

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai kota maju dan berkelanjutan dengan semangat madinatul iman, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan visi indonesia emas 2045;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan

dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menetukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB II
KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana pembangunan Daerah dituangkan dalam:
   a. RPJP Daerah;
   b. RPJM Daerah; dan
   c. RKP Daerah.
(2) Rencana pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
   a. Renstra Perangkat Daerah; dan
   b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
(2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

(1) RPJP Daerah terdiri atas:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
   d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;

e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan

f. BAB VI Penutup.

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Visi RPJP Daerah adalah Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:

a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;

b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;

c. peningkatan daya saing dan inovasi Daerah;

d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan

e. penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission.*

(3) Misi RPJP Daerah adalah:

a. mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global;

b. mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan;

c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif;

d. mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial;

e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan;

f. mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan;

g. mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan; dan

h. mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB III
RPJP DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
   a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
   b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
   c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
   d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.

(4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.

(5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

(7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Wali Kota terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

BAB IV
RPJP DAERAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota.
(2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
(3) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
    a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
    b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

(1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.

(2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RPJM Daerah dan RKP Daerah.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.

(2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
   a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
   b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60), tetap berlaku sampai dengan akhir periode kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
   c. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 15), tetap berlaku sampai dengan akhir periode kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
   d. produk hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan periode masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah wajib mengikuti dan selaras dengan periode masa jabatan Wali Kota dan wakil Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.71/74/9/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(3)

ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperatif pada RPJP Nasional dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat di Daerah yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dan kondisi umum Daerah.

RPJP Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 memuat visi "Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman". Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) sasaran visi dan 8 (delapan) misi pembangunan.

Dokumen RPJP Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk setiap periode kepemimpinan Wali Kota Balikpapan. RPJM Daerah kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah) yang disusun setiap tahun.

Pelaksanaan RPJP Daerah akan dievaluasi secara berkala, minimal sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk memastikan pencapaian target dan kesesuaiannya dengan perkembangan situasi. Perubahan terhadap RPJP Daerah dimungkinkan apabila terjadi perubahan yang mendasar atau hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikapapan tahun 2025-2045. Selain itu, bab ini juga membahas dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Beberapa poin itu akan dibahas secara berurutan dibawah ini

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Balikpapan berjalan dinamis sepanjang periode pembangunan jangka panjang 2005-2025. Kota Balikpapan tumbuh menjadi kota yang terbuka, strategis, dan terus berupaya menjadi kota yang nyaman huni. Berbagai capaian makro pembangunan menunjukkan kinerja yang meningkat dibandingkan dengan awal periode perencanaan. Capaian kinerja pada tahun 2022, yaitu tingkat kemiskinan 2,45%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,13 atau berada pada kategori tinggi, dan pertumbuhan ekonomi berhasil pulih dari masa pandemi sebesar 4,94%.

Meskipun demikian, Kota Balikpapan juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Indeks Gini pada tahun 2011, misalnya masih berada pada rasio 0,28. Namun, Indeks Gini itu kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,334. Kenaikan Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Balikpapan juga mengalamai tantangan terkait tingkat pengangguran terbuka di tengah geliat ekonomi dan kemiskinan yang cukup rendah. Tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 6,9%.

Tantangan pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan diprediksi akan semakin besar. Terdapat berbagai peluang yang harus dioptimalkan, tetapi juga terdapat potensi persoalan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kota

Balikpapan harus membangun kesiapan seiring proses perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, Kota Balikpapan berposisi sebagai pintu gerbang sekaligus mitra IKN. Aktivitas IKN telah menggerakkan perekonomian daerah, tetapi di sisi lain aktivitas perekonomian, arus distribusi barang-jasa, dan potensi perpindahan penduduk memiliki konsekuensi pada kebutuhan pelayanan dasar, tata ruang, hingga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seiring keterbukaan Kota Balikpapan, tantangan yang tidak bisa dihindari juga muncul dari konteks global. Rancangan Akhir RPJPN telah memprediksi adanya megatren global, dengan beberapa megatren yang perlu diantisipasi oleh Kota Balikpapan, antara lain perkembangan demografi global, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, dan perubahan iklim.

Prediksi tentang berbagai kondisi pada masa depan dan kondisi existing menjadi bahan pertimbangan penting untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang tepat, termasuk perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. Secara nasional, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam konteks Kota Balikpapan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025-20245 merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada periode 2005-2025, sehingga proses pembangunan dapat berkesinambungan dan memiliki kinerja yang semakin baik dengan tetap tanggap terhadap perubahan atau ketika kondisi tidak normal.

RPJPD tahun 2025-20245 disusun melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal), Rancangan, dan Rancangan Akhir (Rankhir). Berbagai pendekatan perencanaan digunakan di dalam proses penyusunan tersebut, mulai dari pendekatan teknokratik terkait tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD dan penggunaan kerangka berpikir ilmiah untuk memenuhi sistematika dokumen, pendekatan partisipatif melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, pendekatan politik dengan pembahasan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, serta top-down dan bottom-up melalui penyelarasan dengan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 merupakan bagian dari periode RPJPN 2025-2045. RPJPD memiliki peran penting untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional. RPJPN 2025-2045 memiliki visi “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Transformasi menjadi arah besar di dalam RPJPN.

RPJPD Kota Balikapapan dalam rangka mencapai visi RPJPN akan menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Selaras dengan arah besar RPJPN, maka RPJPD akan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan ke arah yang semakin baik untuk jangka waktu dua puluh tahun. Dalam jangka waktu dua puluh tahun tersebut, Kota Balikpapan diharapkan akan menjadi kota strategis di Indonesia, nyaman dihuni, dan mayoritas penduduknya sejahtera dalam bingkai madinatul iman atau kota yang berperadaban tinggi tanpa meninggalkan nilai agama dan kearifan yang diyakini. RPJPD mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan bukan hanya untuk generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang melalui keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik.

1.2 Dasar Hukum

RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 menggunakan berbagai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176iSJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
22. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 00.7.21/14918/Bapp-II Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota dalam Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan perencanaan makro memuat seluruh sektor pembangunan. RPJPD berposisi sebagai perencanaan induk yang akan menjadi pedoman secara berjenjang bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang termuat di dalam RPJPD akan memandu perumusan dan implementasi empat kali periode RPJMD, sehingga pembangunan dapat berkesinambungan meskipun terdapat pergantian kepemimpinan kepala daerah.

RPJPD sebagai dokumen sangat strategis, dirumuskan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, terutama RPJPN 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Sinkronisasi dengan RPJPN diperlukan karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara RPJPD dan RTRW diperlukan agar arah pembangunan yang termuat di dalam RPJPD selaras dengan tujuan perencanaan tata ruang dan guna menjaga prinsip Pembangunan berkelanjutan.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Perumusan RPJPN 2025-2045 telah memasuki tahap rancangan akhir dan menunggu proses penyusunan rancangan undang-undang. Akhir periode RPJPN bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, sehingga memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Akhir RPJPN, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. 8 misi tersebut, yaitu:

Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki upaya superprioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial:
    - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
    - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
    - Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
    - Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.
    - Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Tranformasi Ekonomi:
    - Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
    - Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.

- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola:
   - Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
   - Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
   - Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat general*.
   - Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
   - Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
   - Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
   - Penguatan karakter dan jatidiri bangsa.
   - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
   - Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*).

Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai transformasi. Kalimantan di dalam arah pembangunan kewilayahan RPJPN berposisi sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara”. Posisi tersebut berbasis pada sektor unggulan Kalimantan berupa pertambangan dan penggalian, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta diakselerasi oleh keberadaan IKN. Balikpapan menjadi

superhub penting dengan kondisi *existing* sebagai pintu gerbang IKN. RPJPD Kota Balikapapan dengan demikian menjadi penjabaran upaya mencapai transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan memperkuat kesejahteraan melalui transformasi sosial yang ditopang oleh transformasi tata kelola.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042

RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042 beririsan dengan periode RPJPD Kota Balikpapan, sehingga RPJPD harus membangun keselarasan dengan RTRW. Kota Balikpapan berposisi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berarti merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. RTRW Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan dan pengembangan IKN. Adapun kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas.
2. Pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
3. Pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh wilayah provinsi.
4. Pelestarian kawasan berfungsi lindung.
5. Pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di wilayah darat dan perairan serta pesisir.
6. Pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
8. Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru.
9. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.
10. Pengembangan kawasan budi daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Balikpapan memiliki periode RTRW 2012-2032 yang masih beririsan dengan periode RPJPD. Keselarasan RPJPD dengan RTRW merupakan aspek kritikal pada masa depan, mengingat prediksi pembangunan Kota Balikpapan yang akan berkembang secara dinamis. Adapun narasi keterkaitan secara lebih detail akan diulas di Bab 4 tentang RPJPD terkait indikasi kinerja berdasarkan RTRW dan rencana sektoral.

RTRW Balikpapan memiliki tujuan menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. RTRW memiliki kebijakan penataan ruang berupa: penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan; peningkatan aksesibilitas antar kawasan; peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (zero waste); perwujudan kelestarian kawasan lindung; peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota; pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan; pengembangan kawasan strategis kota; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

1.3.4 Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Induk IKN

Arah pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan terkait dengan keberadaan proses perpindahan IKN. IKN telah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Di dalam regulasi tersebut terdapat juga Rencana Induk IKN. IKN memiliki visi “Kota Dunia untuk Semua”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan utama berupa:

1. Simbol identitas nasional: kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa.
2. Kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan.
3. Penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Balikpapan memiliki posisi dan peran strategis di dalam Rencana Induk IKN. Balikpapan bagian dari strategi tiga kota yang akan dijalankan sebagai penjabaran visi *locally integrated*. IKN terintegrasi secara domestik sebagai *superhub* ekonomi yang akan menggerakkan perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Strategi tiga kota (IKN, Samarinda, dan Balikpapan) akan membentuk segi tiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi dengan peran masing-masing kota sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Strategi Tiga Kota dalam Rencana Induk IKN

Kota	Peran
IKN sebagai saraf	• Pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau. • Basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). • Basis untuk s*mart city* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
Samarinda sebagai jantung	• Mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. • Dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.
Balikpapan sebagai otot	• Memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor. • Memperkuat peran *superhub* ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. • Menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Sumber: Rencana Induk IKN, Lampiran 2 UU No. 3 Tahun 2022

Berdasarkan peran di dalam strategi tiga kota, Balikpapan memiliki tantangan untuk mengoptimalkan potensi besar *existing* maupun membuka diversifikasi sektor ekonomi unggulan untuk menjadi superhub ekonomi nasional. Sarana dan prasarana yang telah tersedia akan memperkuat posisi Balikpapan sebagai *superhub*, antara lain Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, dan Terminal Kariangau sebagai Pelabuhan kargo internasional.

Pergerakkan ekonomi dan konektivitas yang cepat akan didukung dengan adanya potensi koridor kereta api dari Balikpapan ke IKN.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen yang menjadi acuan bagi arah pembangunan Kota Balikpapan dalam kurun waktu 20 tahun;
2. tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi perumusan empat kali periode RPJMD sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar kepemimpinan kepala daerah;
3. tersusunnya dokumen yang memuat arah pembangunan makro seluruh sektor dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan sektoral jangka panjang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran kondisi *existing* daerah berbasis capaian kinerja pembangunan, hasil evaluasi RPJPD, proyeksi demografi yang akan berdampak pada proyeksi kebutuhan sarana prasarana, dan integrasi kinerja RTRW dan rencana sektoral lainnya ke dalam dokumen RPJPD
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.
Bab 4 Visi dan Misi	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah
Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan penjabaran misi, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.
Bab 6 Penutup	Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas gambaran umum kondisi daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025. Data di dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah di bab V. Berikut adalah deskripsi yang lebih detail tentang gambaran umum kondisi daerah Kota Balikpapan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Deskripsi terkait aspek geografi dan demografi ditujukan untuk menggambarkan karakteristik *eksisting* secara fisik maupun dinamika sosial budaya penduduk di Kota Balikpapan. Aspek geografi mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi memuat jumlah, struktur, dan distribusi penduduk. Berikut disajikan deskripsi dari setiap komponen tersebut

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi secara lebih khusus menarasikan terkait karakteristik lokasi dan wilayah yang mencakup parameter fisik Kota Balikpapan. Deskripsi potensi pengembangan wilayah meliputi distribusi spasial yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan yang didasarkan pada keberadaan dan ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan deskripsi wilayah rawan bencana memuat informasi terkait dinamika, distribusi dan intensitas kebencanaan secara keseluruhan di Kota Balikpapan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

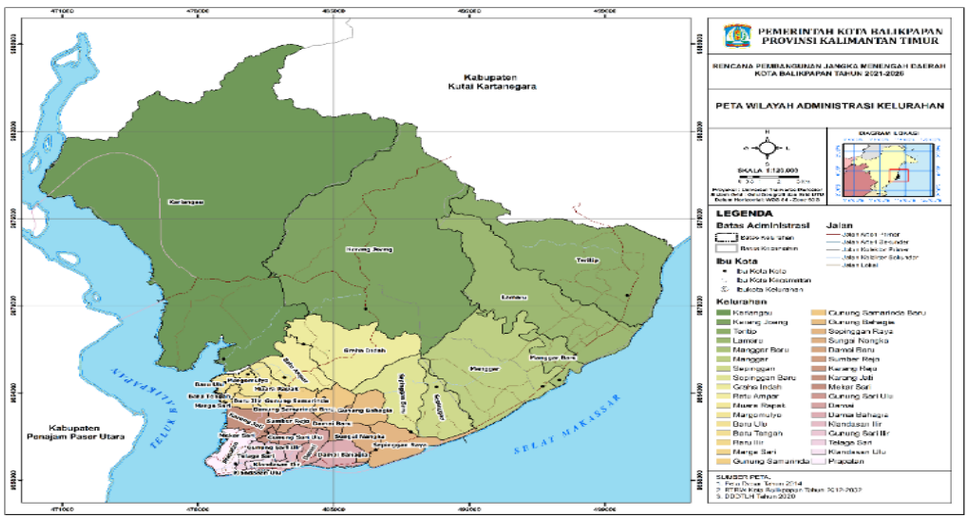
Luas dan batas administratif, letak dan kondisi geografis, karakter geologi, hidrologi serta klimatologi Kota Balikpapan merupakan komponen yang disajikan pada karakteristik lokasi dan wilayah di Kota Balikpapan. Karakteristik lokasi dan wilayah ini merupakan kondisi mendasar, yang selanjutnya memengaruhi kehidupan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, dan lebih lanjut lagi, dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan wilayah di Kota Balikpapan.

1. Luas, Batas dan Wilayah Administratif

Wilayah adminstratif Kota Balikpapan mencakup daratan dan lautan. Adapun luas keseluruhan Kota Balikpapan sebesar 51.101,24 Ha. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan lautan dan kabupaten lain di sekitarnya, yang mencakup:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan



Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2021

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kondisi tersebut didasarkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang bervariasi. Adapun informasi terkait luasan wilayah di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan

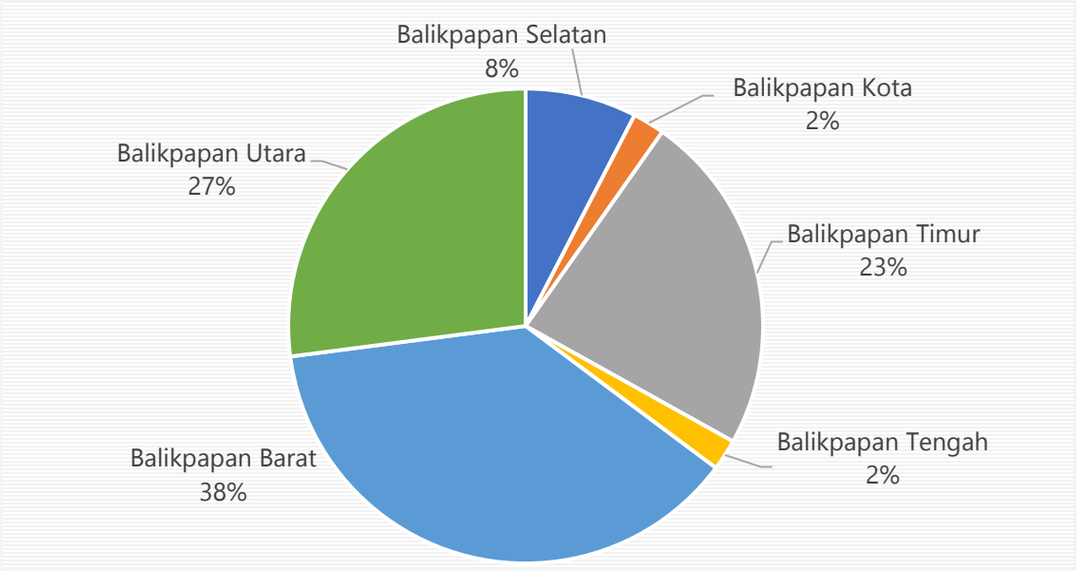
No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2021

Kecamatan terluas, berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan cakupan area sebesar 38% dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21% dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat.

Gambar 2. 2 Persentase Luas Per Kecamatan di Kota Balikpapan



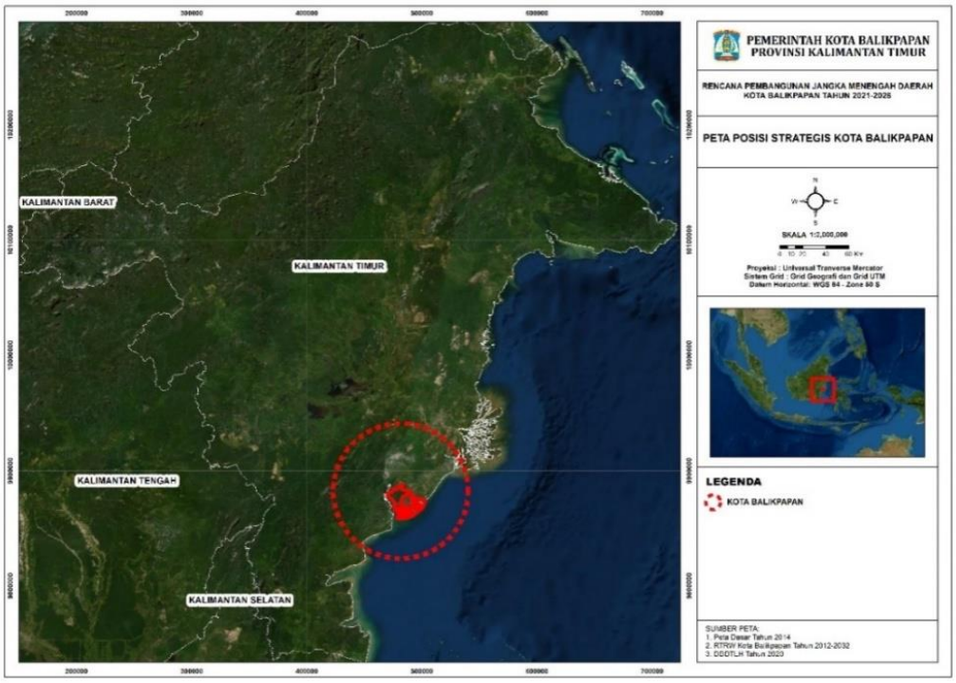
Sumber: Olah data, 2023

Adapun kecamatan dengan luas terkecil terletak di Kecamatan Balikpapan Kota. Cakupan luasnya sebesar 2,17% dari luas total Kota Balikpapan. Meskipun memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek Kota Balikpapan sebagai pusat pemerintahan kota, dan juga pusat aktivitas perekonomian.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara absolut, letak Kota Balikpapan berada pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan. Adapun kondisi geografis Kota Balikpapan secara umum berada di pesisir Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Posisi tersebut cukup menguntungkan bagi Kota Balikpapan, di antaranya berupa sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi. Kekayaan terhadap sumber daya minyak dan gas bumi tersebut, yang selanjutnya turut berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan industri di Kota Balikpapan. Selain itu, posisi Kota Balikpapan yang demikian, juga memberikan dampak positif berupa dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata.

Gambar 2. 3 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan



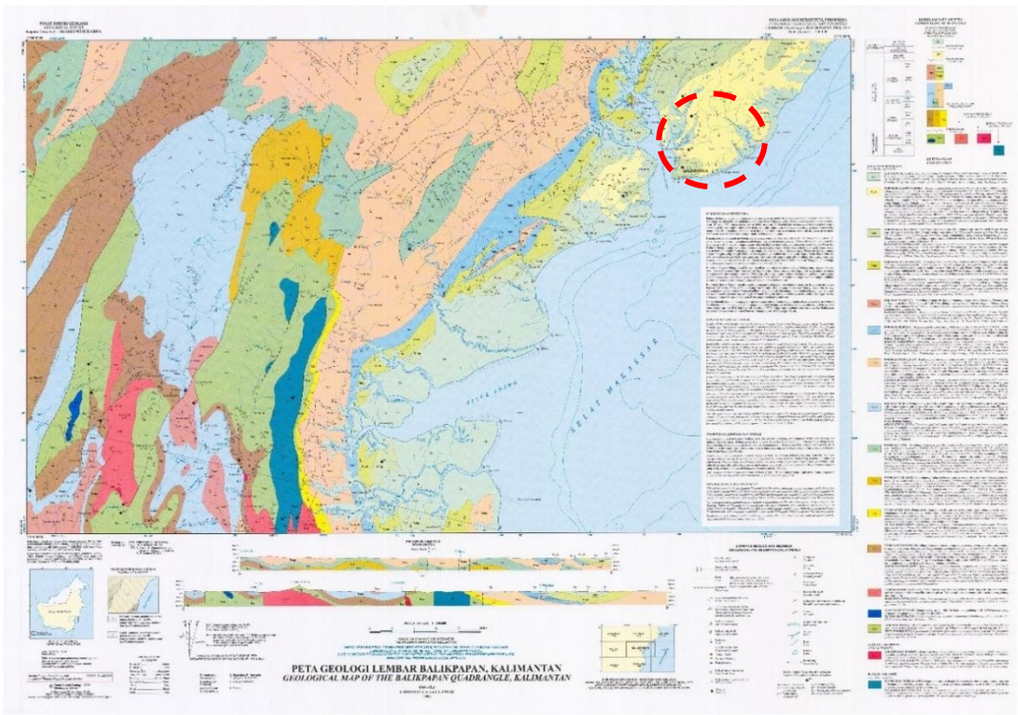
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Lebih lanjut, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berdampak positif bagi Kota Balikpapan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan IKN. Posisi strategis tersebut membuat Kota Balikpapan dipersiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian alam. Selain itu, posisi strategis tersebut juga diperkirakan dapat menunjang roda perekonomian masyarakat Kota Balikpapan.

3. Geologi

Kota Balikpapan termasuk bagian dari Cekungan Kutai, yang merupakan cekungan paling luas dan paling dalam di Indonesia bagian Barat. Selain itu, Cekungan Kutai juga menjadi salah satu cekungan sedimentasi yang penting di Indonesia. Serangkaian proses geologi yang panjang dari Cekungan Kutai di antaranya menghasilkan cadangan minyak, batubara dan gas dalam jumlah yang besar.

Gambar 2. 4 Kota Balikpapan Bagian dari Cekungan Kutai



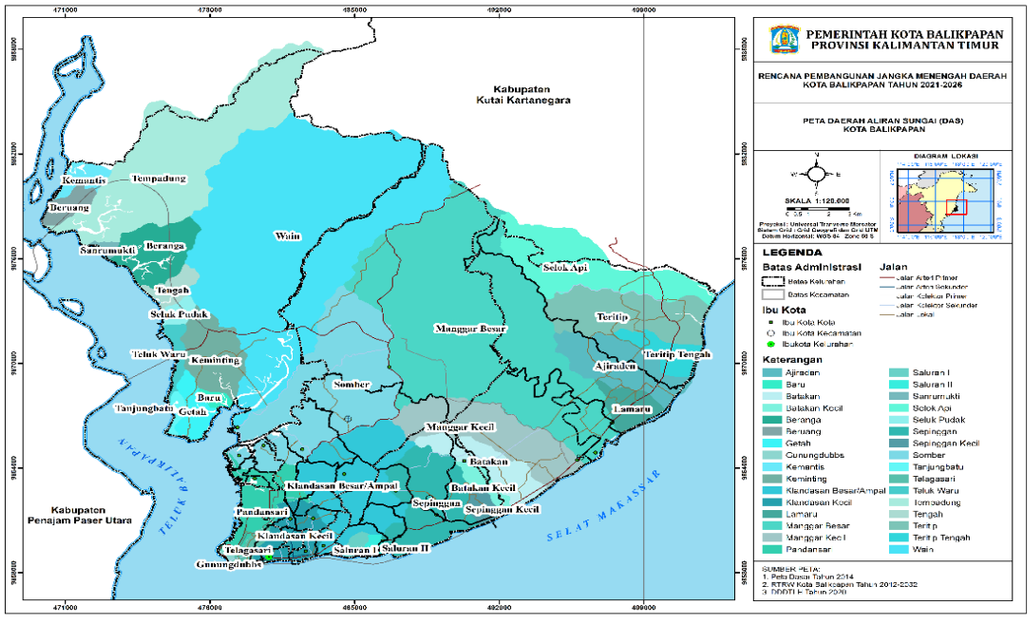
Sumber: Hidayat dan Umar, 1994

Cekungan ini terbentuk akibat proses tektonik dan sedimentasi selama jutaan tahun. Terbentuk pada kala Eosen Tengah karena proses pemekaran yang diikuti oleh fase pelenturan dasar cekungan yang berakhir pada Oligosen Akhir. Peningkatan tekanan karena tumbukan lempeng mengakibatkan pengangkatan dasar cekungan ke arah Barat Laut yang menghasilkan siklus regresif utama sedimentasi klastik di Cekungan Kutai dan tidak terganggu sejak Oligosen Akhir hingga sekarang. Adapun lapisan geologi di daerah ini terdiri dari batuan sedimen, seperti batu pasir, batu lempung, dan batu gamping.

4. Hidrologi

Kota Balikpapan termasuk dalam Wilayah Sungai Strategis Nasional Mahakam. Wilayah Sungai tersebut mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Di bawah ini merupakan distribusi DAS di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 5 DAS Kota Balikpapan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Berdasarkan tiga puluh dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan, area DAS terluas yakni Daerah Aliran Sungai Wain sebesar 25.349,31 Hektar. DAS Sungai Wain juga termasuk ke dalam area hutan lindung Sungai Wain. Adapun Daerah Aliran Sungai terkecil di Kota Balikpapan yaitu DAS Gunung Dubbs, dengan luas sebesar 42.05 Hektar.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)	No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)
1	Gunung Dubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

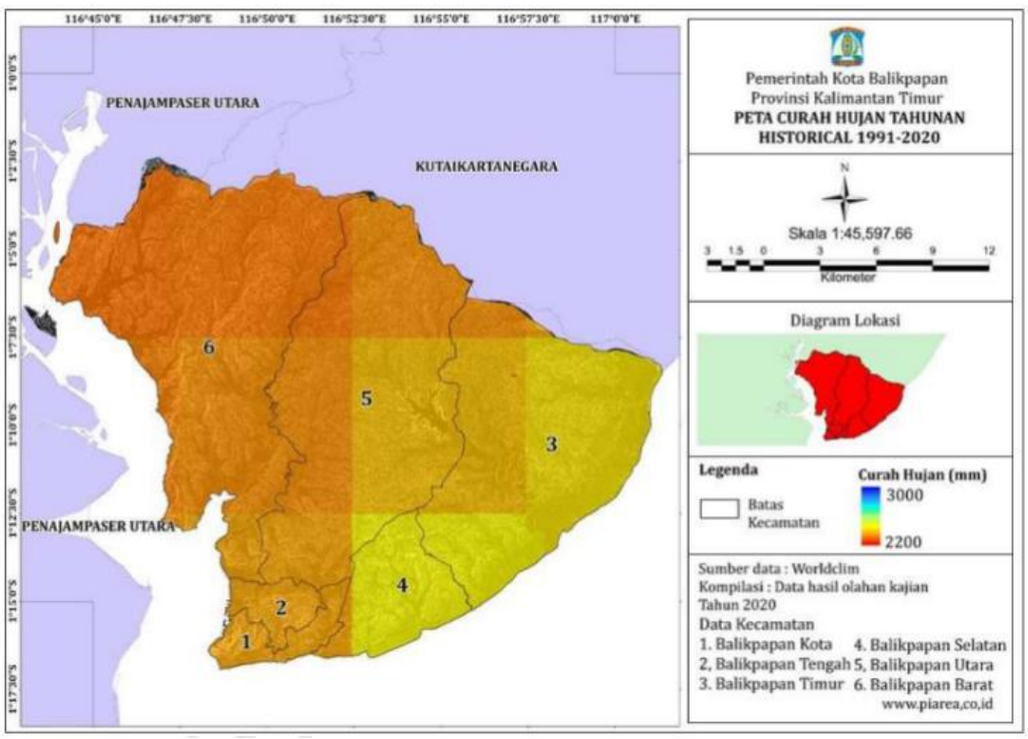
Adapun karakteristik hidrologi air tanah, Kota Balikapapan juga memiliki potensi tersebut. Kondisi fisiografi dan topografi wilayah Kota Balikpapan yang

berbukit di bagian utara, berimplikasi terhadap pola aliran air tanah yang mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan. Banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan penyediaan air bersih dari PDAM.

5. Klimatologi

Julat curah hujan tahunan Kota Balikpapan dari tahun 1991-2020 sebesar 2.220 mm hingga 2.400 mm. Ada peningkatan pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir. Hal tersebut ditandai dengan sebaran warna kuning yang berada di daerah pesisir dan warna jingga-merah berada di daerah tinggi atau perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara).

Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Tahunan Historikal 1991-2020



Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada di kisaran 750 – 450 mm. Adapaun curah hujan tertinggi historikal dari tahun 1991-2020 terdapat pada bulan Maret, April, dan Mei. Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara merata di masa depan, dengan interval curah hujan sebesar 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.

6. Penggunaan Lahan

Komposisi pola pemanfaatan lahan di wilayah daratan maupun laut, Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Pola pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan terbagi menjadi pemanfaatan lahan di kawasan budidaya dan kawasan lindung. Adapun total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 hektar.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki luas lahan sebesar 19.194,08 Ha atau 22,66 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung. Adapun hutan lindung ini terdiri dari kawasan hutan lindung, perluasan Hutan Lindung Sungai Wain, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung.

B. Kawasan Budidaya

Total kawasan budidaya di Kota Balikpapan adalah sebesar 50.746,76 ha. Peruntukan terbesar diarahkan untuk kawasan perikanan dengan luas wilayah sebesar 16.633,55 Ha atau sekitar 19,68 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun distribusi pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan, disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 3 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I. KAWASAN LINDUNG				
A.	Kawasan Hutan Lindung	19,194.08	22.66	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
B.	Kawasan Perlindungan Bawahan	920.25	1.09	
1	Kawasan Resepan Air			
C.	Kawasan Perlindungan Setempat	6,531.18	7.71	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	Kawasan RTH Kota	529.78	0.63	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		

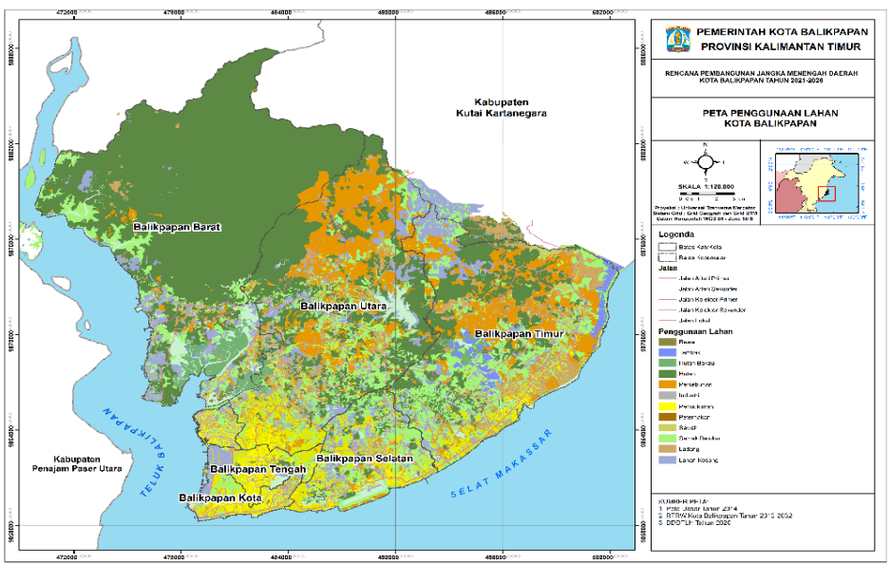
No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya	345.98	0.41	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50	0.23	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
G.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut	6,222.30	7.35	Wil. Pesisir dan Laut
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG		**33,940.07**	**40.08**	
II. KAWASAN BUDIDAYA				
A.	**Kawasan Peruntukan Pertanian**	**3,531.36**	**4.17**	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
B.	**Kawasan Peruntukan Perikanan**	**16,663.55**	**19.68**	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	**Kawasan Peruntukan Perumahan**		**12.87**	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
D.	**Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**	**2,523.58**	**2.98**	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
E.	**Kawasan Peruntukan Perkantoran**	**56.14**	**0.07**	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	**Kawasan Peruntukan Industri**	**5,107.86**	**6.03**	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
G.	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**	**449.40**	**0.53**	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
H.	**Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan**	**264.47**	**0.31**	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
I.	**Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum**	**10,821.83**	**12.78**	
1	Kawasan Bandara	372.05		

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	**Kawasan Pendidikan**	**426.56**	**0.5**	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
Total Kawasan Budidaya		**50,746.76**	**59.92**	
Total Keseluruhan Kawasan		**84,686.84**	**100**	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2012-2032

Dari keseluruhan kawasan lahan di Kota Balikpapan, pemanfaatan lahan terbesar didominasi oleh kawasan budidaya sebesar 59,92 persen. Adapun persentase kawasan lindung sebesar 40,08 persen dari luasan total Kota Balikpapan. Adapun distribusi Pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan, disajikan dalam Peta berikut ini.

Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan



Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Pemanfaatan Lahan sebagai kawasan budidaya, didominasi di daerah urban Kota Balikpapan serta bagian selatannya. Adapun pemanfaatan lahan yang didominasi dengan kawasan lindung, mendominasi di Balikpapan Barat. Diversifikasi terhadap pemanfaatan lahan di Balikpapan Barat memungkinkan

untuk dapat dioptimalkan, dengan tetap memperhatikan prinsip penggunaan lahan yang berkelanjutan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Balikpapan didasarkan pada potensi sumber daya serta potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah bagian Kota Balikpapan. Pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan berkembangnya setiap wilayah kota tanpa saling tumpang tindih, sehingga potensi masing-masing wilayah dapat berkembang secara ideal dan terintegrasi. Pengembangan wilayah Kota Balikpapan telah tertuang dalam dokumen tata ruang wilayah yang berbasis pada pusat pelayanan dan kawasan strategis.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah Kota Balikpapan dapat diwujudkan dengan pendekatan spasial berdasarkan pengembangan berbasis fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan ruang. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Balikpapan didukung dengan adanya potensi sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. Potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.576,67 Ha. Arahan pengelolaan kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan: kawasan pertanian lestari/ sawah lahan basah dan kegiatan pertanian holtikultura.

Perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan dengan fungsi sebagai penyangga bagi kawasan hutan lindung dengan luasan yang terbatas. Perkebunan di Kota Balikpapan merupakan perkebunan tanaman keras. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain tanaman karet, lada, kelapa, kakao, kemiri, kopi, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Peruntukan kawasan perkebunan di Kota Balikpapan mencapai 2.076,17 Ha atau mencapai 4,12 % luas Kota Balikpapan. Kawasan perkebunan tersebut berlokasi di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Teritip, Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru. Namun, sebagian besar kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.

Potensi sumber daya terbarukan atau *renewable resources* dikembangkan pada kawasan pesisir Kota Balikpapan, khususnya pemanfaatan sumber daya perikanan. Tidak hanya di kawasan pesisir dengan potensi perikanan laut, tetapi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai potensi perikanan darat. Pengembangan kawasan minapolitan juga dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan.

Sektor industri dan perdagangan di Kota Balikpapan juga berpotensi untuk dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi pengembangan Kota Balikpapan yang diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial dan unggul. Kota Balikpapan yang terletak di wilayah strategis memiliki keunggulan komparatif berdampak pada pertumbuhan industri skala kecil/rumah tangga hingga skala besar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Penetapan kawasan industri Kota Balikpapan yang terletak di ALKI II sekaligus menjadi pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur menjadi keunggulan untuk perkembangan industri wilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Potensi alam maupun budaya di Kota Balikpapan juga menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata di Kota Balikpapan seperti hutan lindung, kawasan lindung, kawasan bakau (mangrove), agrowisata, wanawisata, dan lain-lain. Sedangkan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi wisata sejarah yang berupa tugu, monumen dan tempat bersejarah, serta bangunan unik.

2. Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis merupakan upaya yang dilakukan untuk pengembangan wilayah. Beberapa kawasan strategis yang ditetapkan untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan.

A. Kawasan Strategis Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan ditopang oleh penetapan kawasan strategis yang dikembangkan berfokus pada pengembangan ekonomi di beberapa kawasan. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan di beberapan kawasan diantaranya Kawasan Metropolitan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Ekonomi Terpadu. Beberapa kawasan di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi adalah:

1. Kawasan Pusat Kota Lama Balikpapan
2. Kawasan Pusat Kota Kedua (Karangjoang)
3. Kawasan Pusat Kota Ketiga (Teritip)
4. Kawasan Industri Karingau (KIK)
5. Kawasan Minapolitas Manggar

B. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis sosial budaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya kota maupun nasional. Kawasan yang ditetapkan di antaranya kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Balikpapan Selatan yang merupakan cikal bakal permukiman nelayan dan Kawasan Pendidikan Skala Regional Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

C. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis yang mendukung perlindungan daya dukung lingkungan hidup didukung dengan penetapan kawasan lindung pada dokumen tata ruang wilayah Kota Balikpapan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Berikut adalah kawasan strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.
2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

3. Peran Strategis sebagai Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga, perlu meningkatkan sinergitas pembangunan dengan IKN guna mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan tujuan utama pembangunan IKN. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan kota sevagai beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN adalah peningkatan kualitas infrastruktur kota seperti penyediaan fasilitas dalam hal permukiman yang layak, pemantapan kondisi jalan, penyediaan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang inklusif, layanan teknologi

informasi yang berkualitas dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di IKN.

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi "otot" atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan pendanaan dan penyediaan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Lebih lanjut, sebagai respon terhadap kebijakan IKN dan dengan memerhatikan situasi serta kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, diperlukan dukungan terhadap kebijakan tata ruang (RDTR) dan transportasi (Masterplan Transportasi) dengan beberapa penguatan yang tertuang dalam Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda IKN, yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya antisipasi bahwa Pusat Pelayanan Kota baru di Karang Joang dan sekitarnya akan menjadi pusat pelayanan yang berskala regional (melayani daerah sekitar Balikpapan).
- Mengingat luasnya kawasan budidaya di Balikpapan Utara yang berada pada kelerengan tinggi dan risiko bencana tinggi, perlu ada upaya mengendalikan pertumbuhan di Balikpapan Utara dengan:
  - Mempertegas peraturan zonasi dan ketentuan konstruksi di Balikpapan Utara
  - Mempermudah pertumbuhan di Balikpapan Timur (kecamatan dengan akses ke jalan tol) dengan insentif pembangunan (peraturan zonasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, dll).
- Pertumbuhan kegiatan permukiman dan jasa diarahkan ke utara dan timur Balikpapan agar tidak memberikan beban tambahan bagi bagian tengah dan selatan Balikpapan yang memiliki persoalan kemacetan, sulitnya air bersih, dan kerentanan terhadap bencana banjir.

- Perlu ada perencanaan dan penataan ruang bagi kawasan perkantoran dan jasa yang kemungkinan akan berkembang pesat apabila IKN telah beroperasi.
- Prioritas penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan untuk memperbaiki kinerja jalan di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan dimana mayoritas penduduk Balikpapan tinggal dan tingkat pelayanan jalannya (LoS) masih rendah (*travel demand management*).
- Perluasan rute dan perencanaan sistem transportasi yang mempertimbangkan konektivitas pada skala lingkungan hingga perkotaan serta potensi paratransit.

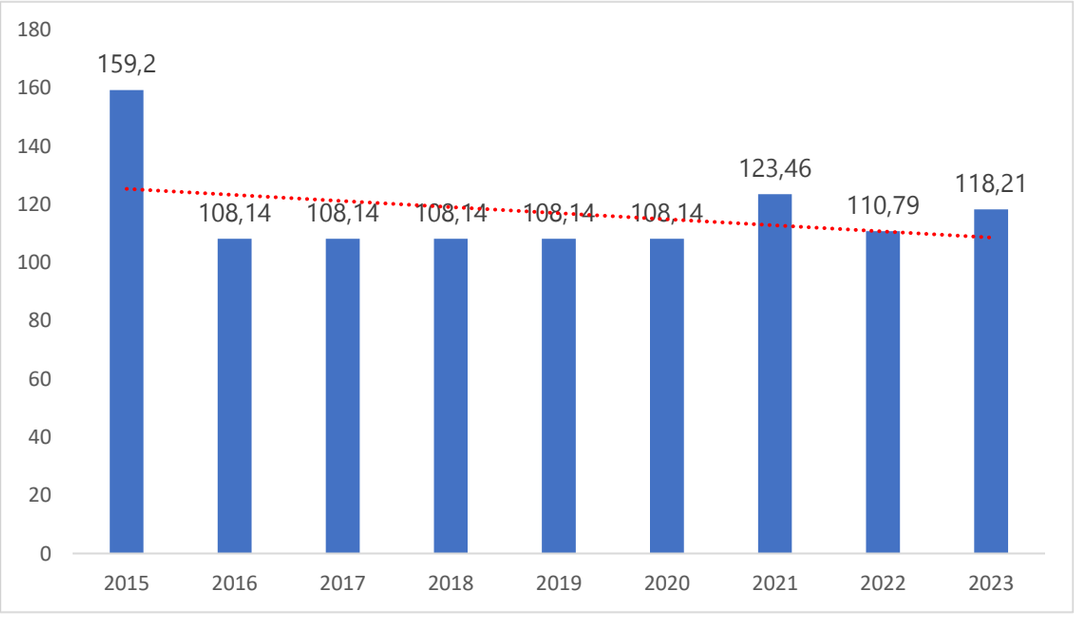
Secara spesifik, konsep pergerakan penumpang dan barang dalam sistem perkotaan Balikpapan dalam konteks kawasan IKN adalah sebagai berikut:

- Bersamaan dengan menangkap peluang peran Balikpapan sebagai otot IKN dan juga kota jasa, Balikpapan perlu mengendalikan perkembangan kota (*controlled urban sprawl*) di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur yang akan menjadi lintasan utama konektivitas dari IKN ke Balikpapan.
- Jalur kereta api regional Trans Kalimantan perlu diintegrasikan dengan jalur kereta api perkotaan dan/atau jalur angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di dalam Kota Balikpapan, menghubungkan ke Bandara dan aktivitas rekreasi.
- Langkah mendasar adalah menentukan simpul-simpul utama yang akan menjadi stasiun dan merencanaan pengembangan kawasan berorientasi transit di simpul-simpul tersebut. Kemudian direncanakan rute-rute pengumpan dalam kota.
- Memulai perencanaan dan pengembangan kota berbasis transit dengan melakukan *land banking*.
- Mendorong angkutan barang multimoda (integrasi moda darat melalui jalan tol/arteri dan kereta barang).
- Untuk mengendalikan *urban sprawl*, perlu pemisahan antara koridor logistik dengan koridor penumpang yang melintasi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Pemisahan dapat dilakukan secara spasial maupun temporal.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah wilayah yang mempunyai pola kejadian bencana yang terjadi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari karakteristik fisik dan sosial daerah tersebut. Salah satu indikator yang menilai terkait kerawanan bencana adalah Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (IRBI). Indeks risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2015-2023 disajikan sebagai berikut ini.

Gambar 2. 8 Indeks risiko bencana Kota Balikpapan Tahun 2015-2023



Sumber: BNPB, 2024

Indeks risiko bencana di Kota Balikpapan memiliki tren yang cenderung menurun, dan termasuk dalam kategori seang hingga capaian termutakhir di tahun 2023. Artinya, kapasitas dalam penanggulangan bencana yakni dari sisi struktural maupun non struktural semakin optimal di Kota Balikpapan. Adapun nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020.

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan dan lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non-alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana

lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali.

1. Kebakaran hutan dan bangunan

Kebakaran merupakan bencana yang juga menjadi catatan khusus di Kota Balikpapan karena memiliki risiko yang besar. Khusus di perkotaan Balikpapan, bencana kebakaran sering terjadi. Penyebab utama dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan adalah terdapat indikasi kekeringan lahan. Selain itu, hal ini disebabkan oleh kerapatan bangunan dan kurangnya upaya yang ada dalam tanggap darurat khususnya penyediaan sarana prasarana pertolongan pertama kebakaran sehingga risiko menjadi besar. Sebagai contoh pada tahun 2016 terjadi kebakaran lahan seluas 65 hektar, tahun 2017 seluas 2 hektar, tahun 2018 seluas 28 hektar dan tahun 2020 sebesar 28,755 hektar.

2. Banjir

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Kejadian banjir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 20 kasus pada tahun 2021. Permasalahan tumpukan sampah di drainase juga mengurangi daya tampung drainase sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik di Kota Balikpapan.

Data pengukuran debit pada tahun 2021, mencatat bahwa debit maksimum DAS Ampal pada bagian hilir adalah sebesar 290,26 m^3/det dan bagian hulu sebesar 60,69 m^3/det dengan lebar dasar saluran permukaan 40 m dan kedalaman 3,5 m. Pada sungai Ampal bagian hulu mengalami kelebihan debit, sehingga terjadi banjir atau genangan pada bagian hilir. Risiko terbesar adalah daerah di sepanjang jalan karena luapan air pada saluran drainase yang tidak dapat menampung air.

3. Pergerakan tanah/longsor

Struktur tanah di Kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Di antara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan oleh lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%. Apabila curah hujannya tinggi, tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi. Dengan kondisi ini wilayah Kota Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kepadatan penduduk yang ada pada wilayah ini. Bencana tanah longsor terjadi pada tahun 2021 jumlah area terdampak sebesar 0,1373 Ha. Menurut DIKPLHD Tahun 2018, laju erosi mencapai 500%, dengan total kehilangan tanah mencapai 1300 ton/ha/tahun untuk kelerengan 15-25%.

4. Kekeringan

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim di masa mendatang khususnya dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku yang menjadi salah satu keterbatasan di Kota Balikpapan. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.

2.1.1.4 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan komponen dari tingkat kapasitas daerah dinilai berdasarkan capaian para pemangku kebijakan (instansi/lembaga) di level pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Ketahanan daerah Kota Balikpapan berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi

bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,630 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

2.1.1.5 Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kota Balikpapan, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Penilaian kualitas lingkungan hidup di antaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 4 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup
Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	91,34	92,4	97,9	84,93	88,42	88,92	88,52	84,29	89,98
Indeks Kualitas Air	40,8	51,6	42,1	49,5	47,9	40,9	49,4	50,0	54,5
Indeks Tutupan lahan	48,12	48,12	48,12	48,15	48,24	65,33	69,49	50,32	48,91
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**58,58**	**62,45**	**61,25**	**59,58**	**60,19**	**65,09**	**69,18**	**63,96**	**67,64**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mencatat bahwa IKLH Kota Balikpapan memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria capaian IKLH Kota Balikpapan tergolong sedang dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015-2023. Kondisi tersebut menunjukkan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga dapat memberikan dampak secara nyata terhadap kualitas air di Kota Balikpapan.

Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut, dapat disebabkan karena telah terjadi kontaminasi dari zat pencemar terhadap tubuh air di Kota balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil. Berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Meskipun berada di tengah kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Masih banyak kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada tahun 2015-2017. Indeks kualitas udara kemudian mengalami penurunan kategori dari tahun 2018 menjadi kategori baik. Adanya penurunan kategori indeks kualitas udara tersebut disebabkan karena indikasi pencemaran udara di Kota Balikpapan.

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Balikpapan. Pertumbuhan pembangunan

sektor industri yang relatif cepat, memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan melalui emisi yang dihasilkan oleh sektor industri. Tercatat penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO_2e pada tahun 2010, atau mencakup 69,30% dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85% terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Dengan demikian, berbagai upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kota Balikpapan perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan demi terwujudnya penurunan emisi yang signifikan dan berimplikasi terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan yang kembali berkategori sangat baik.

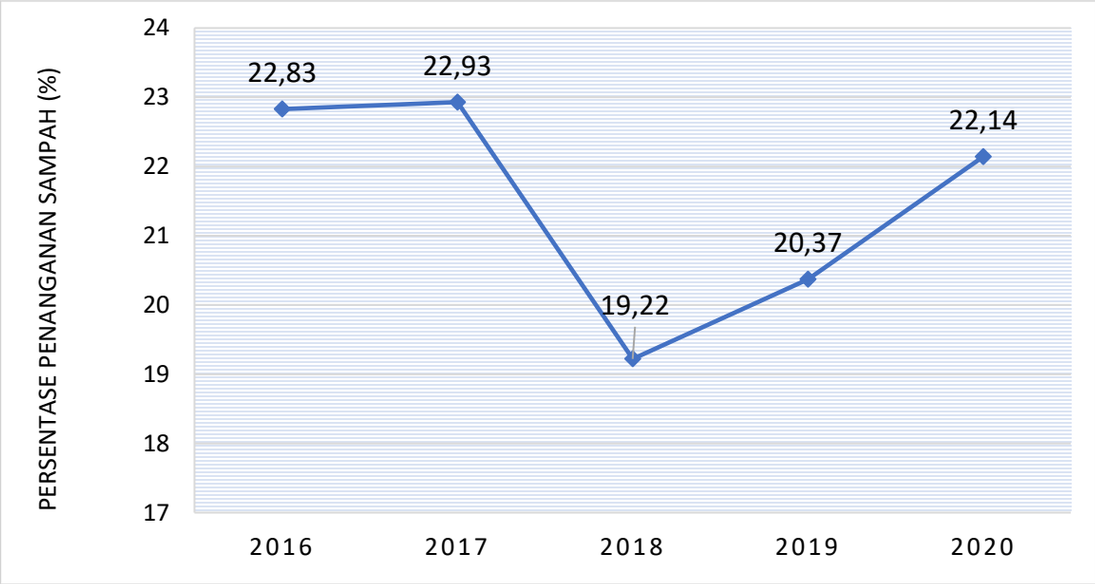
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, dan menurun capaiannya pada tahun 2022 hingga 2023. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan di Kota Balikpapan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan (pengupasan lahan) dan perusakan ekosistem lahan mangrove. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kota Balikpapan, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2023. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian IKTL Kota Balikpapan menjadi kategori baik. Adapun penurunan capaian IKTL tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi ITL Kota Balikpapan oleh KLHK, yang berimplikasi terhadap perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618, 3247 Ha.

2. Persampahan

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara

kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.

Gambar 2. 9 Pengelolaan Sampah di Sumbernya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2021

Persentase pengelolaan sampah di sumbernya di Kota Balikpapan belum mencapai hasil yang diharapkan hingga tahun 2020. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah menjadi penyebab terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di Material Recovery Facility (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif.

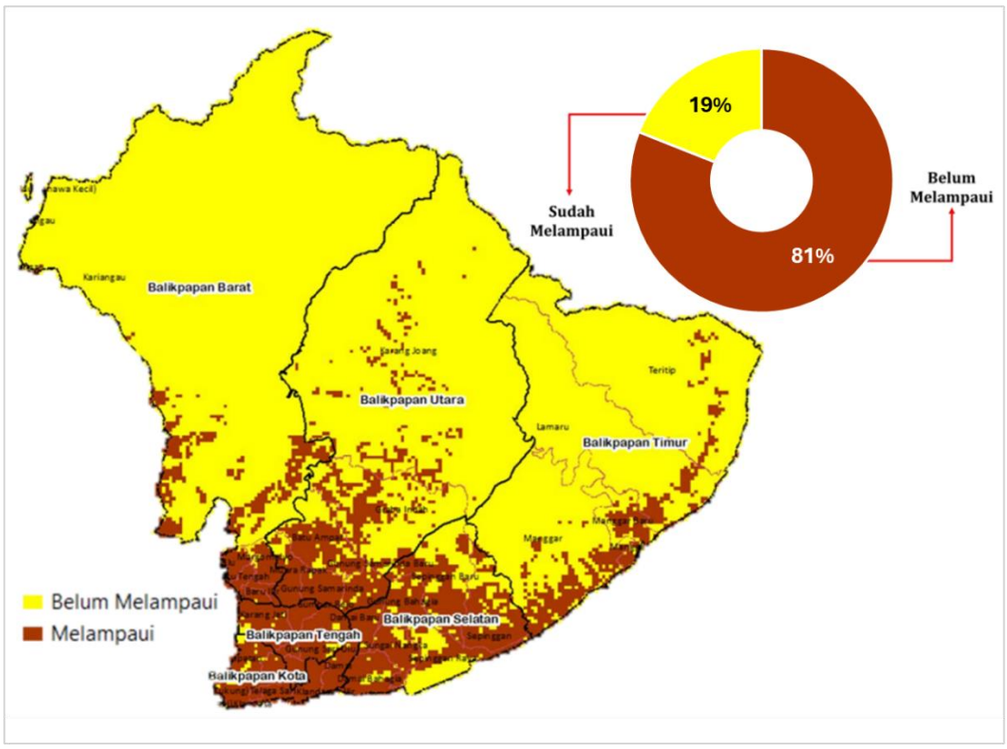
Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang didaur ulang.

2.1.1.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Status Daya Dukung Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%. Berikut disajikan distribusi status daya dukung pangan di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 10 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

Tabel 2. 5 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan

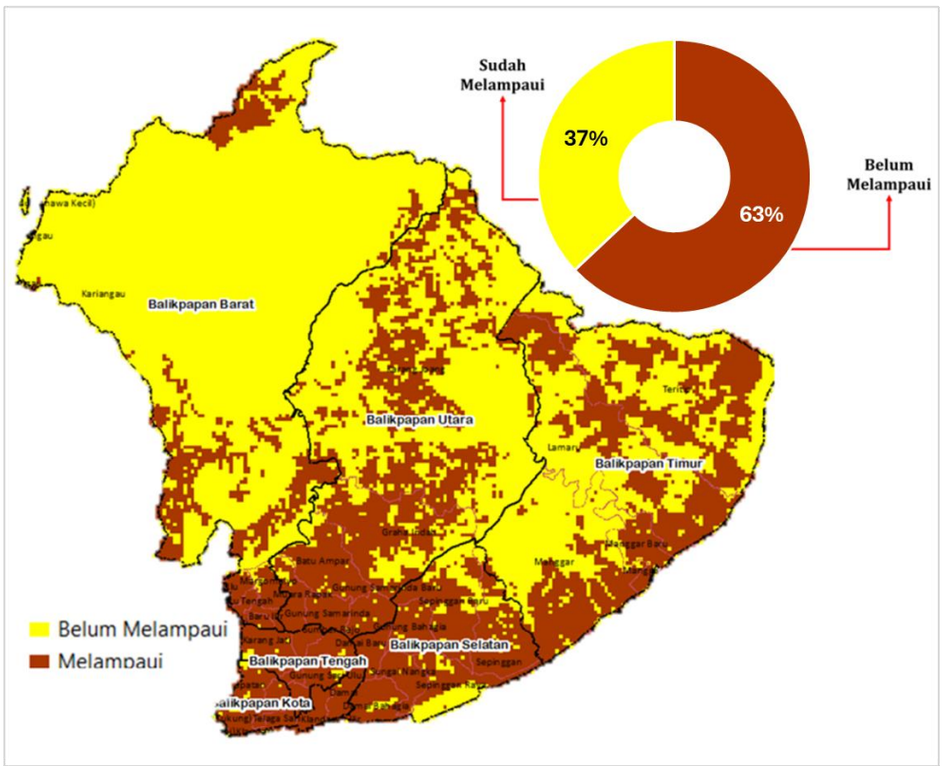
No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355851962292,23	61550296750,00	294301665542,23	453459,02
2	Balikpapan Kota	17309636348,82	60537184500,00	-43227548151,21	22057,52
3	Balikpapan Selatan	59839708148,50	84120491500,00	-24280783351,50	76253,21
4	Balikpapan Tengah	17981253627,96	79236992250,00	-61255738622,07	22913,35
5	Balikpapan Timur	205971870671,05	46788364500,00	159183506171,05	262468,14
6	Balikpapan Utara	259223859518,33	100009324750,00	159214534768,33	330326,68
	Grand Total	**916178290606,89**	**432242654250,00**	**483935636356,83**	**1167477,91**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

2. Status Daya Dukung Air

Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%. Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

Gambar 2. 11 Status daya dukung air Kota Balikpapan



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Tabel 2. 6 Status daya dukung air Kota Balikpapan

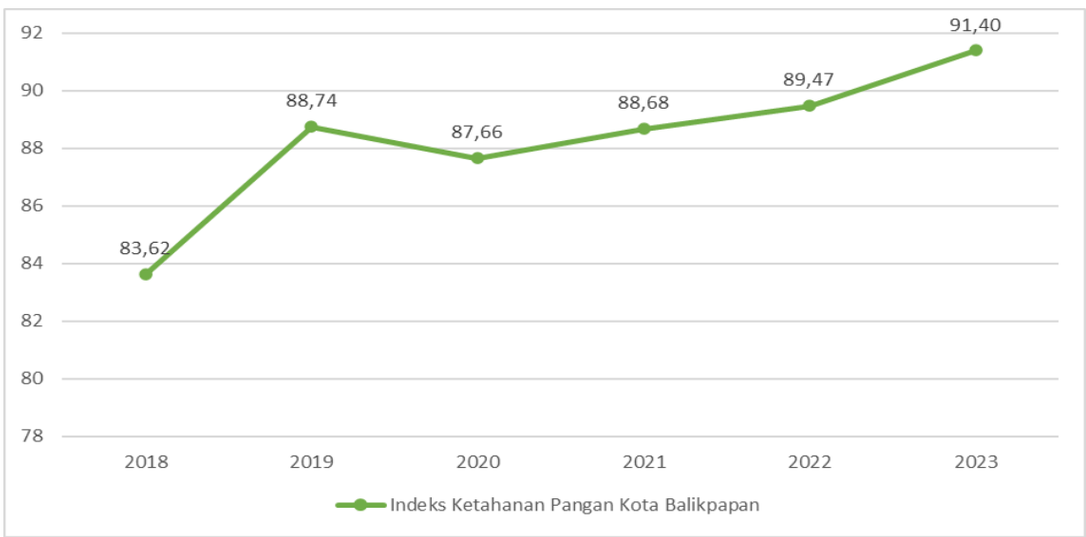
No	Kecamatan	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208478674,78	71655727,90	136822946,89	258209,00
2	Balikpapan Kota	10897248,70	61815593,49	-50918344,78	13695,00
3	Balikpapan Selatan	36595054,51	88885350,79	-52290296,28	45863,00
4	Balikpapan Tengah	11286464,01	81044835,90	-69758371,90	14180,00
5	Balikpapan Timur	116936986,93	92331427,75	24605559,19	145983,00
6	Balikpapan Utara	139953015,05	129892742,34	10060272,72	174504,00
	Grand Total	**524147443,99**	**525625678,16**	**-1478234,17**	**652434,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

2.1.1.7 Indeks Ketahanan Pangan

Kinerja penyelenggaraan pangan di Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari indeks ketahanan pangan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 12 Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2018-2023



Sumber: BPS, 2018-2019 dan Badan Pangan Nasional, 2020-2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan Kota Balikpapan mengalami penurunan peringkat dari peringkat kedua pada tahun 2022 menjadi peringkat kedelapan nasional kategori kota. Kota Balikpapan mampu meraih nilai 91,40 meskipun hanya memiliki 15 persen lahan untuk kegiatan pangan dan sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah masyarakat untuk ditanami tanaman pangan sehingga

menjadi pekarangan pangan lestari (P2L) atau dikenal juga dengan *urban farming*.

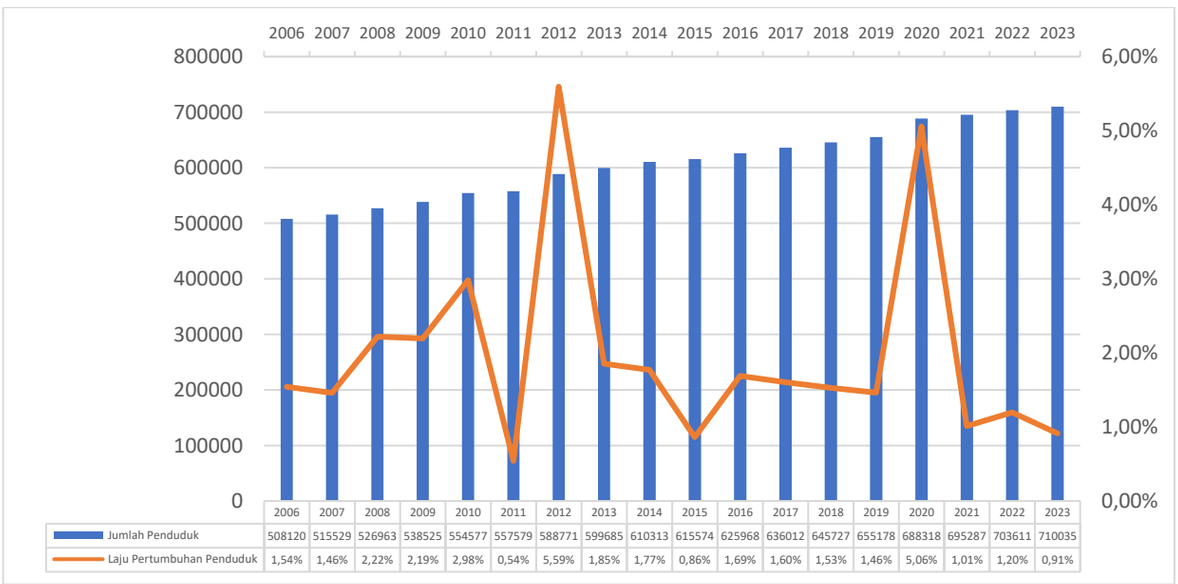
2.1.2 Aspek Demografi

Perubahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari Kota Balikpapan. Data kependudukan di Kota Balikpapan terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk, dan distribusi penduduk. Ketiga pembagian tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk mencapai 710.035 jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 362.767 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 347.268 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 32,24 persen dibandingkan pada masa awal pelaksanaan RPJPD 2005-2025, yakni hanya 500.406 jiwa. Grafik peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2005 hingga 2023 di Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2005-2023



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	508120	515529	526963	538525	554577	557579	588771	599685	610313	615574	625968	636012	645727	655178	688318	695287	703611	710035
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,54%	1,46%	2,22%	2,19%	2,98%	0,54%	5,59%	1,85%	1,77%	0,86%	1,69%	1,60%	1,53%	1,46%	5,06%	1,01%	1,20%	0,91%

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2006-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2005-2023. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2020, yakni bertambah hingga 33.140 jiwa. Hal itu dikarenakan adanya pendataan ulang jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk 2020. Lonjakan jumlah penduduk

dikarenakan data pada tahun 2011 hingga 2019 merupakan data proyeksi dengan data dasar tahun 2020. Selisih yang cukup tinggi antara jumlah penduduk tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada melebihi hasil proyeksi yang ditetapkan pada tahun 2010. Adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga tidak memberikan dampak yang signifikan pada jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Dari segi laju pertumbuhan penduduk, Kota Balikpapan mengalami fluktuasi selama 17 tahun terakhir. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2020 karena terdapat pembaharuan data sensus penduduk. Pembaharuan data penduduk baru terlihat lonjakan pada tahun 2012 karena hasil pengolahan data sensus tahun 2010 baru selesai di tahun 2012.

2.1.2.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data sex ratio di wilayah terkait. Sex ratio menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan sex ratio pada tahun 2008 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Sex Ratio pada Tahun 2008-2023

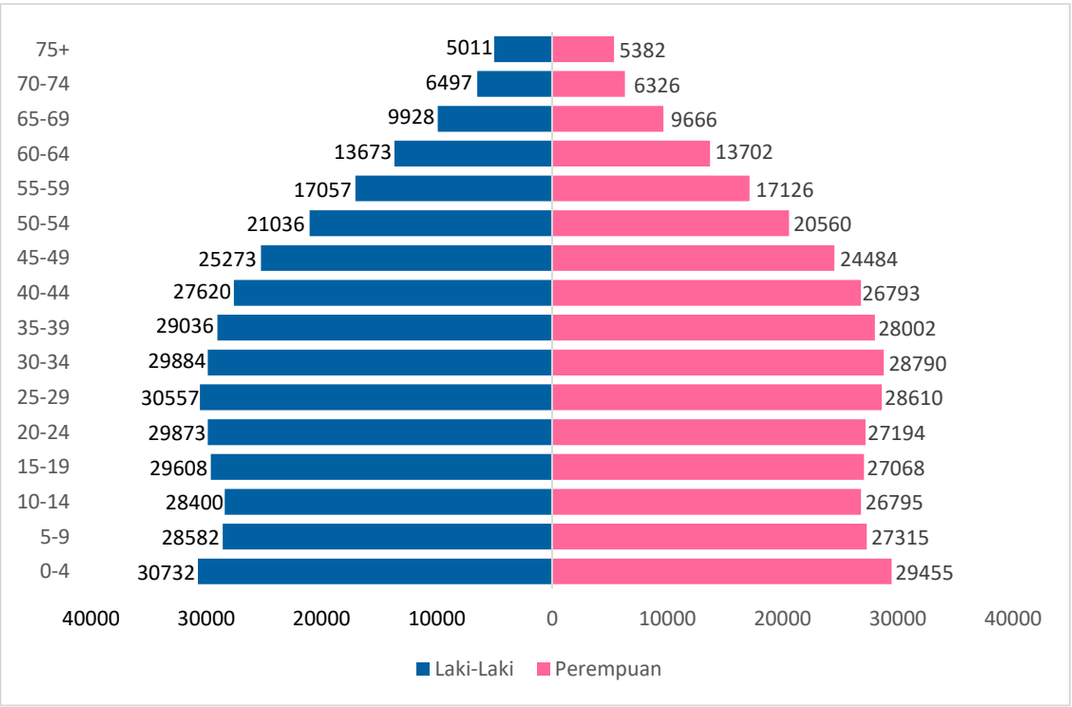
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2008	278.443	248.520	526.963	112,04
2009	283.629	254.896	538.525	111,27
2010	286.680	267.897	554.577	107,01
2011	288.847	268.732	557.579	107,49
2012	313.197	291.252	604.449	107,53
2013	309.899	289.786	599.685	106,94
2014	315.299	295.014	610.313	106,88
2015	317.988	297.586	615.574	106,86
2016	323.394	302.574	625.968	106,88
2017	328.382	307.630	636.012	106,75
2018	333.347	312.380	645.727	106,71
2019	338.202	316.976	655.178	106,70
2020	352.802	335.516	688.318	105,15
2021	355.848	339.439	695.287	104,83
2022	359.563	344.048	703.611	104,51
2023	362.767	347.268	710.035	104,54

Sumber: BPS Kota Kota Balikpapan dalam Angka 2009-2024

Data sex ratio di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada rentang tahun 2008 hingga 2022 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yakni selisih 9,44 dibandingkan data sex ratio pada tahun sebelumnya. Angka sex ratio yang mencapai 110,57 menunjukkan adanya 110 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kota Balikpapan. Penurunan angka sex ratio yang kemudian mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan. Penurunan angka sex ratio yang cukup tinggi memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kota Balikpapan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah. Penurunan angka sex ratio cukup tinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai selisih 4,26 dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2023 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 2. 14 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2024, diolah

Piramida penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori stasioner yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang masuk dalam kategori usia

produktif sebesar 69,85 persen dengan rincian 51,14 persen di antaranya laki-laki dan 48,86 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 24,12 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 6,03 persen. Piramida penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi atau lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

2.1.2.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	2011		2016		2021		2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Balikpapan Tengah	10,83	98.552	9.103,4	111.022	10.255,32	106.960	9.880,10	105.749	9.768,24
2	Balikpapan Kota	11,10	N/A	N/A	89.212	8.038,42	82.849	7.465,08	85078	7.665,93
3	Balikpapan Timur	119,16	60.664	509,1	67.874	569,63	92.542	776,65	102.959	864,07
4	Balikpapan Utara	138,24	123.214	891,3	137.997	998,22	172.117	1.245,03	188.605	1.364,30
5	Balikpapan Selatan	38,81	191.737	4.940,4	125.864	3.243,11	146.689	3.779,70	158.320	4.079,39
6	Balikpapan Barat	192,88	83.412	432,5	93.999	487,34	94.130	488,02	97.821	507,16

Sumber: BPS Balikpapan dalam Angka 2012, 2017, 2022, 2024

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan pada tahun 2011 hingga 2023. Penurunan kepadatan penduduk terjadi di dua kecamatan, yakni Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota pada tahun 2021. Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Balikpapan, yakni mencapai 9.768,24 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9.768 jiwa di tiap kilometer persegi pada tahun 2023 di Kecamatan Balikpapan Tengah. Pada sisi yang berlawanan, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Balikpapan Barat yang hanya mencapai satu per dua puluh dari tingkat kepadatan penduduk di Balikpapan Tengah. Perbedaan tingkat kepadatan yang

cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kota Balikpapan.

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Kota Balikpapan belum memiliki masyarakat adat yang dikukuhkan dalam masyarakat hukum adat (MHA) melalui peraturan daerah. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan multikultur layaknya kota besar lainnya. Daya tarik Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mendorong berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi suku, etnis, dan budaya berkumpul dan menjadi penduduk di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, mengacu pada sejarah Kota Balikpapan, penamaan Balikpapan berasal dari Suku Balik yang mendiami pesisir Kota Balikpapan. Penambahan kata papan dikarenakan Suku Balik pada zaman dahulu kerap membuat papan untuk menyuplai kebutuhan kerajaan saat itu, yakni Kerajaan Kutai. Namun, ketika ditarik garis historis yang jauh, Suku Balik juga bukan suku asli dari Kota Balikpapan, melainkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Kesejahteraan Ekonomi

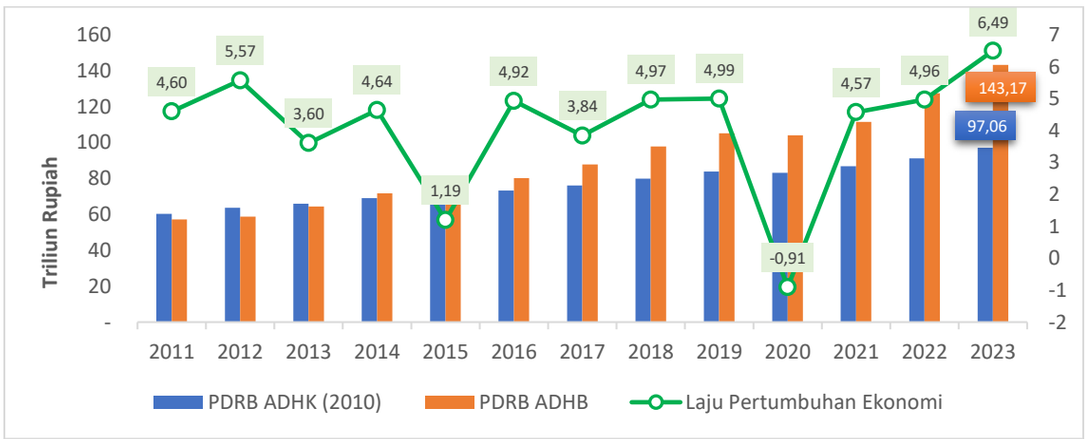
Aspek kesejahteraan ekonomi menggambarkan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks gini, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Penjelasan dari setiap indikator dijabarkan pada bagian berikut.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB riil Kota Balikpapan hingga tahun 2023 mencapai 97,06 triliun

rupiah sedangkan secara nominal mencapai 103,92 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan cenderung stabil sebesar 4,11 persen per tahun pada periode 2011-2023, meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan terkontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu mencapai 6,49 persen.

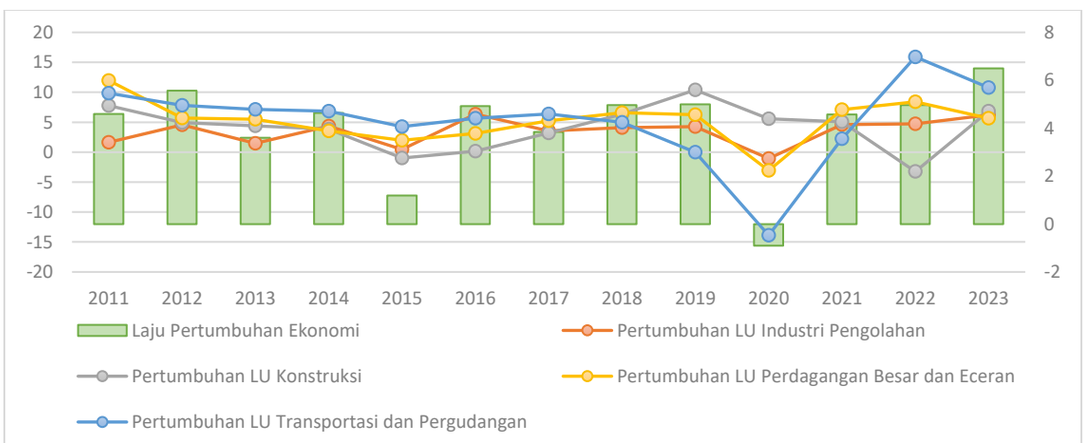
Gambar 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Balikpapan Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Perekonomian Kota Balikpapan yang sempat melambat pada tahun 2015 disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 0,44 persen atau turun 3,92 persen poin dibandingkan tahun 2014, serta kinerja sektor konstruksi yang terkontraksi hingga 0,98 persen. Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena kinerja sektor industri pengolahan dan konstruksi kembali menguat mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level normal. Namun, pada tahun 2020, perekonomian terkontraksi hingga 0,93 persen akibat pandemi Covid-19 di mana kinerja sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Terpilih di Kota Balikpapan Tahun 2011-2023 (%)



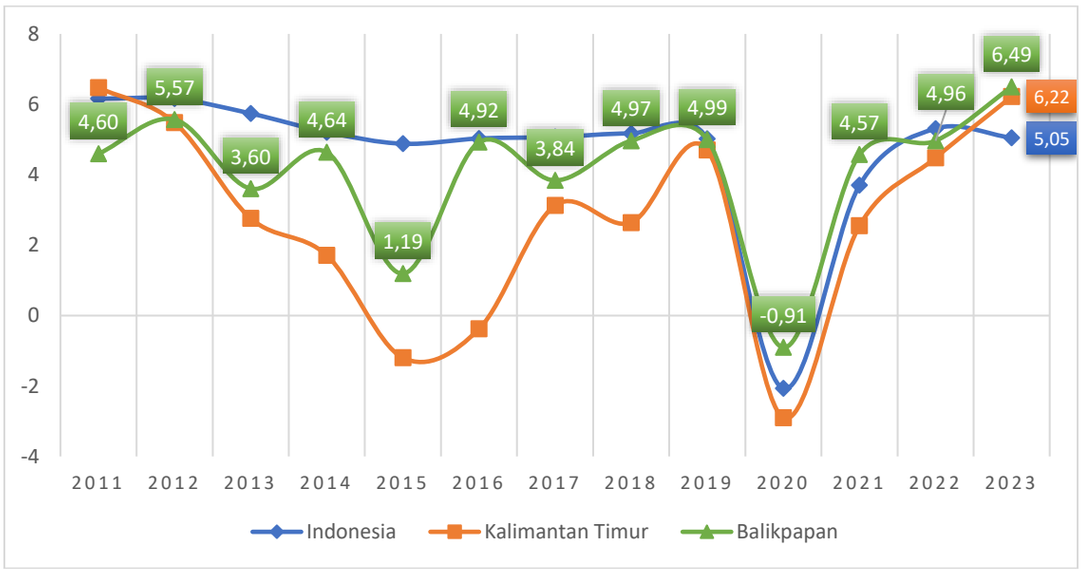
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Balikpapan tidak lepas dari kinerja sejumlah lapangan usaha yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan kontribusi mencapai 53,74 persen pada tahun 2023. Industri pengolahan di Kota Balikpapan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup berfluktuasi tetapi cenderung menguat mencapai angka 6,19 persen pada tahun 2023. Angka tersebut diprediksi akan semakin naik sejalan dengan pembangunan RDMP RU V Balikpapan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2024.

Perekonomian Kota Balikpapan tidak hanya digerakkan oleh industri pengolahan saja tetapi juga didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan. Keberadaan Pelabuhan Semayang serta Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dan penumpang ke Pulau Kalimantan bagian timur mendorong aktivitas transportasi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, pertumbuhan transportasi berkontribusi sebesar 11,68 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, dengan pertumbuhan sebesar 10,79 persen.

Selain sektor transportasi dan pergudangan, sektor konstruksi juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Proyek pembangunan RDMP RU V Balikpapan yang dimulai sejak tahun 2019 serta pembangunan infrastruktur pendukung IKN mendorong kontribusi sektor konstruksi yang semakin tinggi hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi, aktivitas pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dari kontraksi yang lebih dalam. Kinerja sektor konstruksi menunjukkan perlambatan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh turunnya jumlah aktivitas konstruksi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Namun pada tahun 2023, kinerja lapangan usaha konstruksi kembali meningkat dengan pertumbuhan mencapai 6,85 persen.

Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023 (%)



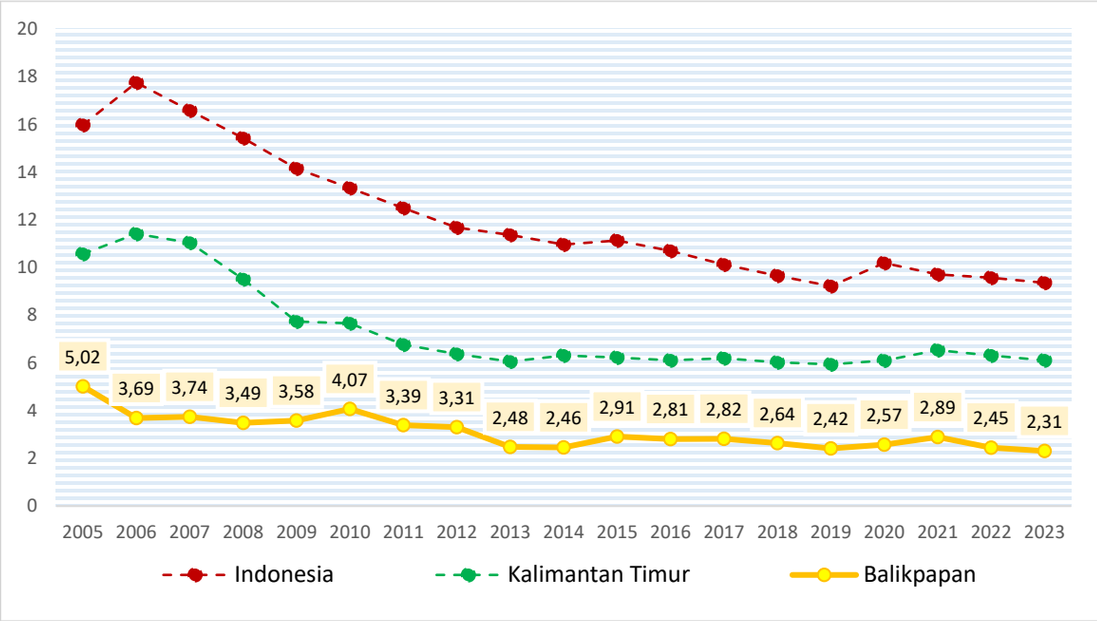
Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan secara umum berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tetapi lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2020, 2021, dan 2023 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Kondisi tersebut menandakan perekonomian Kota Balikpapan saat itu lebih resilien dan cepat pulih saat pandemi Covid-19 terjadi. Sejumlah proyek strategis nasional yang tetap berjalan di tengah lesunya ekonomi dunia mendorong kinerja sejumlah lapangan usaha yang cukup berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Perekonomian Kota Balikpapan juga diprediksi akan tumbuh lebih kuat seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung IKN, pembangunan RDMP RU V Balikpapan, pengembangan KIK Kariangau, serta proyek strategis lainnya.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan tergolong rendah bahkan menduduki peringkat ketiga kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia pada tahun 2023. Pada periode 2005-2023, kemiskinan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional menunjukkan tren yang semakin turun. Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan mencapai 3,46 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan level provinsi dan nasional yang rata-rata turun 2,79 persen dan 2,77 persen per tahun.

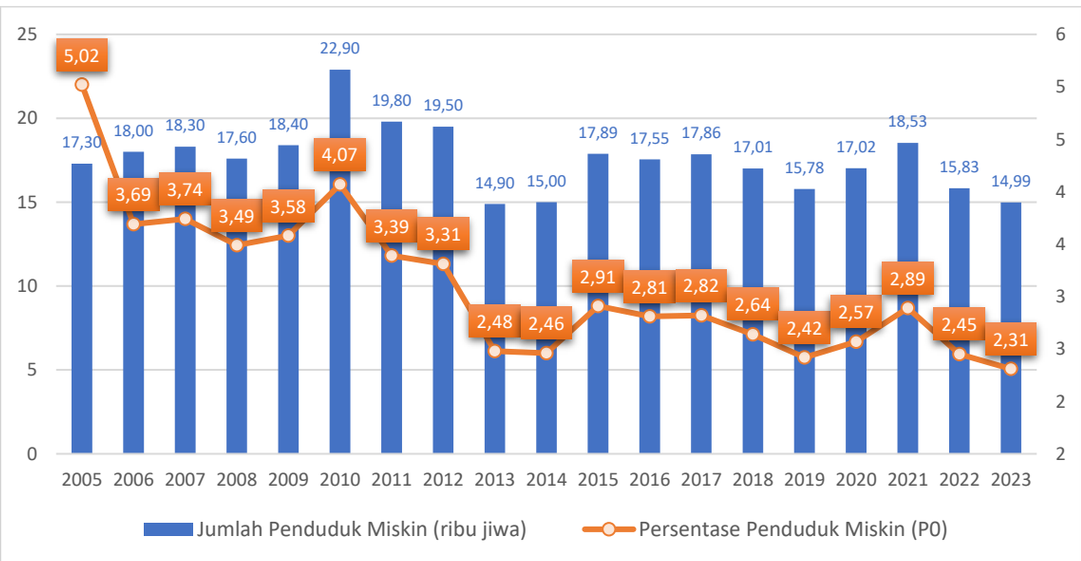
Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2005-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan level provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di tingkat provinsi mencapai 6,11 persen atau lebih tinggi 3,80 persen poin dibandingkan dengan Kota Balikpapan. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat kemiskinan di level nasional yang mencapai 9,36 persen atau lebih tinggi hingga 7,05 persen poin dibandingkan dengan Kota Balikpapan.

Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan Tahun 2005-2023

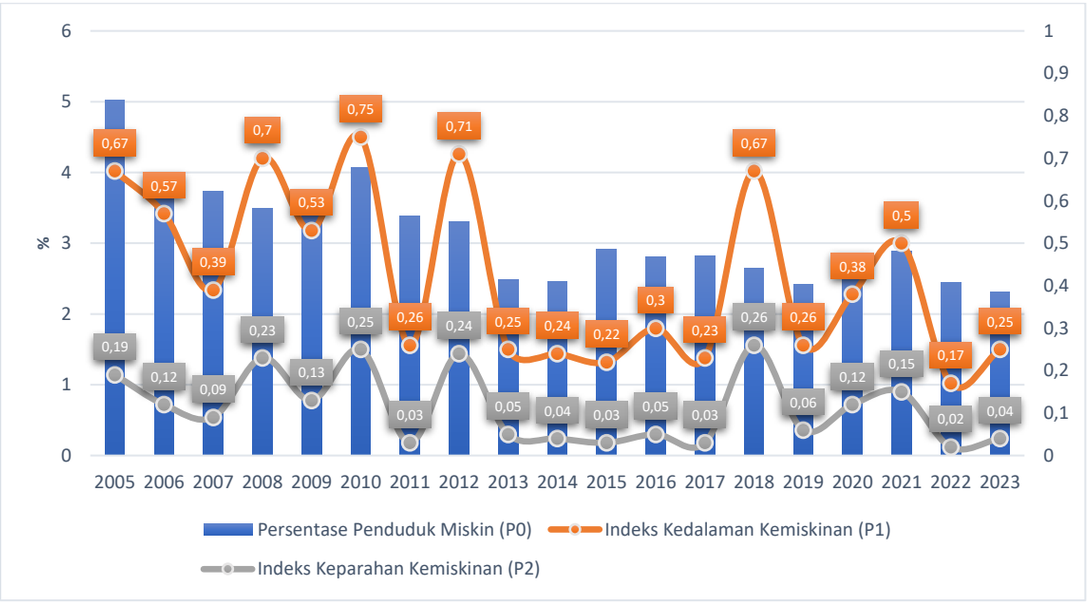


Sumber: BPS, 2024

Pada periode 2005-2023, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan berkisar pada 3,11 persen per tahun dengan tingkat kemiskinan terendah dicapai pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kota Balikpapan turun 5,71 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun garis kemiskinan mengalami

kenaikan hingga 9,20 persen. Turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2023 didorong oleh menguatnya perekonomian Kota Balikpapan yang diikuti dengan perluasan lapangan kerja yang dapat dilihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka dari yang sebelumnya mencapai 6,90 persen menjadi 6,09 persen.

Gambar 2. 20 Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Balikpapan Tahun 2005-2023



Sumber: BPS, 2024

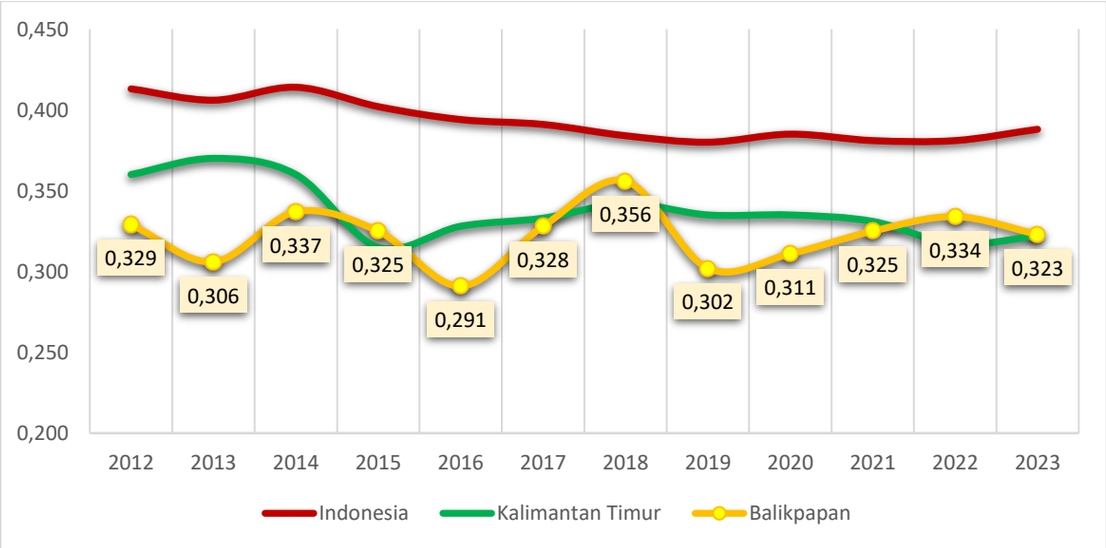
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) maupun indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin baik meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 menjadi nilai terendah selama periode 2005-2023, begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin kecil mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menjadi semakin kecil. Kondisi ini menandakan bahwa kesempatan untuk keluar dari kelompok miskin menjadi semakin besar. Indeks keparahan kemiskinan yang semakin kecil juga menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin menjadi semakin kecil. Secara umum, kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar dan ketimpangan antar penduduk miskin di Kota Balikpapan semakin mengecil selama periode 2005-2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

2.2.1.3 Rasio Gini

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak selalu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut umumnya dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh rasio gini. Rasio gini digunakan untuk melihat seberapa besar kesenjangan pendapatan antara sekelompok orang dengan kelompok yang lain. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Rasio gini Kota Balikpapan secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Namun, rasio gini Kota Balikpapan menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi dengan kecenderungan tren yang meningkat. Kondisi ini berbeda dengan tren yang ditunjukkan oleh rasio gini di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023, rasio gini Kota Balikpapan mencapai 0,334 lebih tinggi 0,017 poin dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 21 Rasio Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber: BPS, 2024

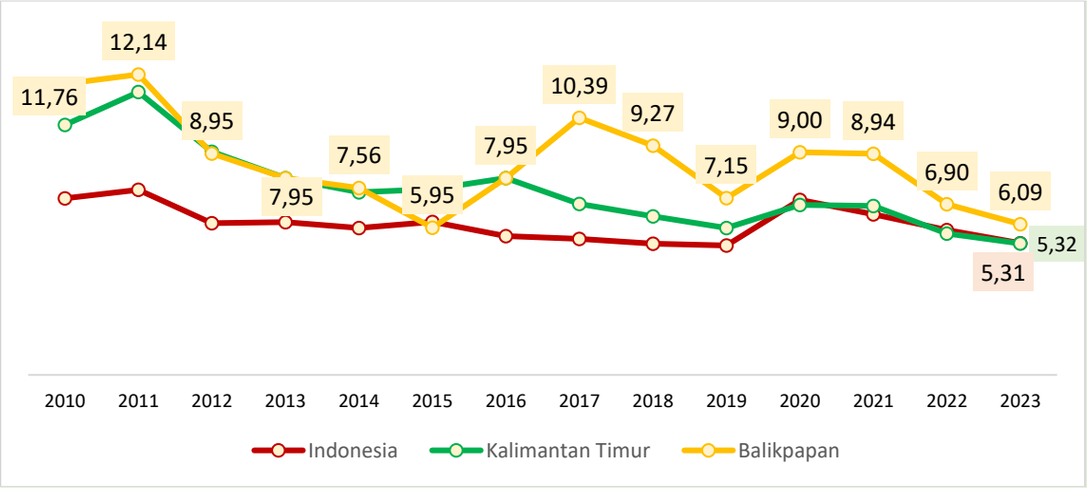
Rasio gini tertinggi Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2018 mencapai angka 0,356. Kinerja perekonomian saat itu memang mengalami kenaikan tetapi tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2019, rasio gini Kota Balikpapan mengalami penurunan hingga 15,17 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan yang terjadi di sejumlah sektor padat karya, seperti konstruksi, pertanian, maupun jasa, mendorong peningkatan pendapatan bagi sebagian

masyarakat, khususnya bagi yang bekerja sebagai pekerja bebas. Namun, rasio gini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 seiring dengan pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian Kota Balikpapan. Pembatasan mobilitas orang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang berdampak pada penurunan omset dan pemutusan hubungan kerja.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. TPT Kota Balikpapan mencapai 6,09 persen atau lebih tinggi 0,77 persen poin dan 0,78 persen poin jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023. TPT Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional menunjukkan tren yang semakin turun meskipun cenderung berfluktuasi. Penurunan TPT di tingkat provinsi dan nasional rata-rata mencapai 4,43 persen dan 2,12 persen per tahun sedangkan di Kota Balikpapan sebesar 3,81 persen per tahun pada periode 2010-2023.

Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

TPT Kota Balikpapan pada tahun 2011 merupakan TPT tertinggi pada periode 2010-2023. Kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2011 mencapai 14,03 persen dibandingkan tahun 2010. Tingginya TPT pada tahun tersebut disebabkan oleh melemahnya perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang pada saat itu menyebabkan TPT melonjak ke angka 13,70 persen. Dampak pelemahan perekonomian pada tahun 2009 masih dirasakan hingga tahun 2011 di mana jumlah jumlah pengangguran masih tinggi.

Gambar 2. 23 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
**Data Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja Tahun 2016 tidak tersedia*

Perekonomian Kota Balikpapan yang kembali menguat setelah tahun 2011 mendorong penurunan TPT hingga tahun 2015. Pada tahun 2011-2015 TPT mengalami penurunan sebesar 12,08 persen per tahun di mana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015. Turunnya TPT tidak hanya didorong oleh menurunnya jumlah pengangguran tetapi juga disertai dengan turunnya jumlah angkatan kerja sebesar 4,24 persen pada tahun 2015. Namun demikian, penurunan tersebut tidak dapat dipertahankan seiring dengan perekonomian daerah yang kembali melemah pada tahun 2017. Jumlah pengangguran kembali mengalami peningkatan mencapai 31 ribu orang mendorong TPT ke angka 10,39 persen pada tahun 2017. Penurunan TPT terus terjadi di Kota Balikpapan hingga menyentuh angka 6,90 persen pada tahun 2022. Meskipun angka ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, TPT di Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

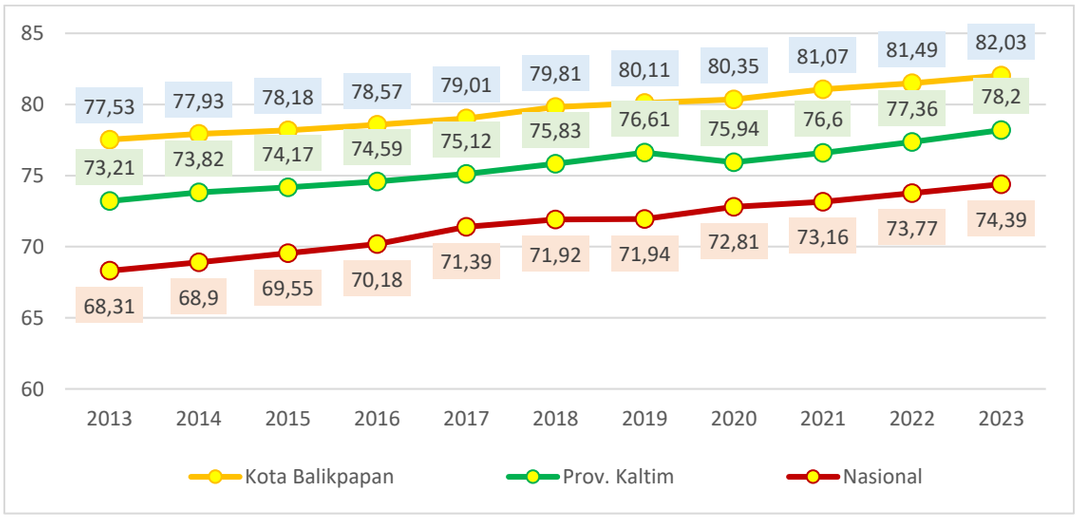
Tingginya TPT dapat disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya kondisi perekonomian daerah dan tingkat pendidikan para pencari kerja. Bagi daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor padat modal umumnya berisiko menciptakan pengangguran. Kondisi ini tercipta karena kebutuhan tenaga kerja pada industri padat modal cenderung kecil dan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Hal ini terkonfirmasi dari struktur perekonomian Kota Balikpapan yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sedangkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas didominasi oleh lulusan SMA/sederajat yang mencapai 48,86 persen (Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2022).

Tingginya angka pengangguran terbuka juga dapat disebabkan oleh rendahnya keinginan berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin dari proporsi penduduk bekerja yang didominasi oleh status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 61,74 persen. Padahal, jika masyarakat memiliki keinginan untuk berwirausaha, angka pengangguran dapat ditekan lebih rendah dan proporsi penduduk bekerja yang memilih untuk berusaha bisa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pekerja buruh/karyawan/pegawai.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam tiga dimensi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dalam perhitungannya IPM dibentuk berdasarkan hasil pengukuran yang mencakup tiga parameter dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, lama pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Berikut merupakan capaian IPM Kota Balikpapan selama periode 2013 hingga 2023.

Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2024

Capaian IPM Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2013 hingga 2023. Selama periode sepuluh tahun terakhir, capaian IPM Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebanyak 4,5 poin. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota

Balikpapan, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Selain itu, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, capaian IPM Kota Balikpapan selalu berada di atas rata-rata capaian IPM Provinisi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal tersebut menujukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan SDM di Kota Balikpapan sudah berada pada tahap yang baik.

Beberapa faktor yang turut memengaruhi tingginya capaian IPM Kota Balikpapan antara lain adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan seperti pemerataan bangunan pendidikan, standarisasi tenaga pendidik dan kependidikan serta sinergitas antara pemerintah Kota dengan Provinsi dalam membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai upaya untuk meningkatkan capaian RLS penduduk usia sekolah. Selain dalam hal pendidikan, upaya lain yang turut memengaruhi tingginya capaian IPM Kota Balikpapan adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan mulai dari layanan kesehatan primer, rujukan pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan pelayanan. Selain itu, penurunan angka pengangguran melalui perluasan tenaga kerja dan optimalisasi pelatihan berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan dan pengeluaran masyarakat di Kota Balikpapan.

2.1.4 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

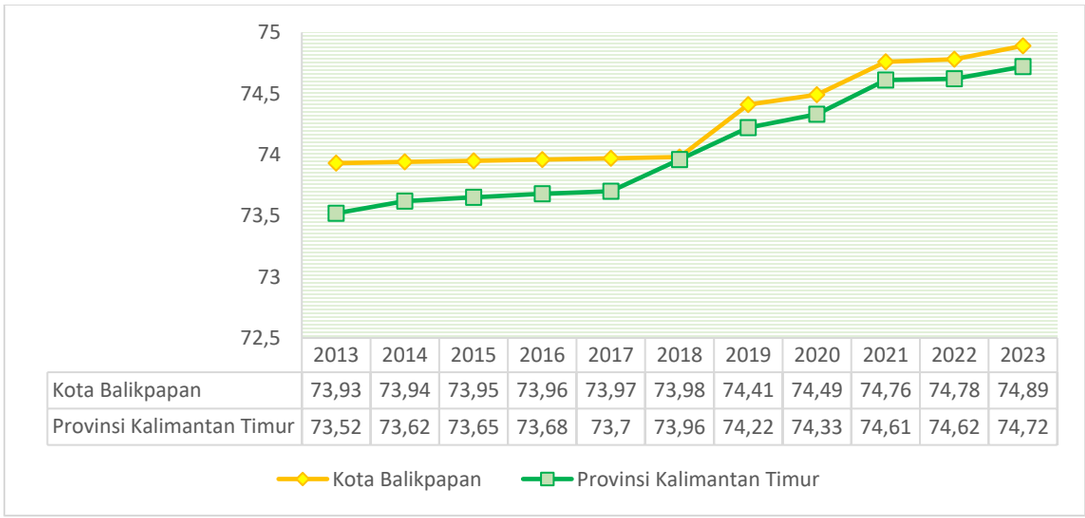
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan budaya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian pembangunan kesehatan, ketahahan keluarga, kesetaraan gender, dan aspek kebudayaan. Berikut beberapa capaian pembangunan sosial budaya di Kota Balikpapan.

2.2.2.1Kualitas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Secara umum, pembangunan kesehatan Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa capaian indikator makro seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Prevalensi Stunting. AHH merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan di suatu wilayah. AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang sejak

lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang hidup sehat dan bisa lebih produktif. Berikut capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan selama periode 2013-2023.

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2023



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Balikpapan	73,93	73,94	73,95	73,96	73,97	73,98	74,41	74,49	74,76	74,78	74,89
Provinsi Kalimantan Timur	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	73,96	74,22	74,33	74,61	74,62	74,72

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

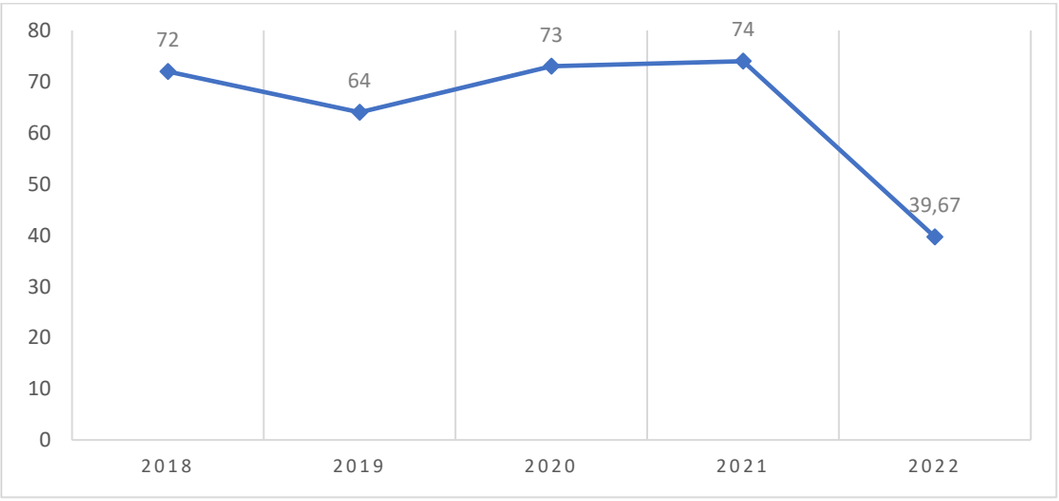
Selama satu dekade (2013-2023), capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan menunjukan trend yang meningkat. Capaian tersebut bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan sebesar 74,89 yang berarti bahwa penduduk Kota Balikpapan yang lahir tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 74,89 tahun. Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan menunjukan keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Balikapan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Keberhasilan tersebut ditopang oleh perbaikan dari segala aspek di antaranya penguatan sistem kesehatan melalui pemberian subsidi iuran BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta kelas III (Peserta Bukan Penerima Upah/PBPU), pembangunan dan pegembangan RSIA Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan, (LPPD Kota Balikpapan Tahun 2022). Selain itu, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga, promosi kesehatan umum, gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lintas sektor, serta *screening* dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan cukup tinggi, tetapi jika dilihat dari tren angka selama sepuluh tahun terakhir cenderung melambat. Selama 11 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan naik 0,96 poin, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur naik 1,2 poin. Untuk itu, upaya pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan ke depan perlu lebih ditingkatkan baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai kebijakan pendukung lainnya. Aspek kesehatan merupakan aspek dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan lebih produktif.

Salah satu upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu dengan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi, sehingga dapat menekan angka kematian pada bayi dan ibu hamil. Di sisi lain, peningkatan kualitas ibu dan bayi merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu indikator yang menunjukan kualitas kesehatan ibu dan bayi yakni Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berikut capaian kinerja AKI dan AKB di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 26 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2022



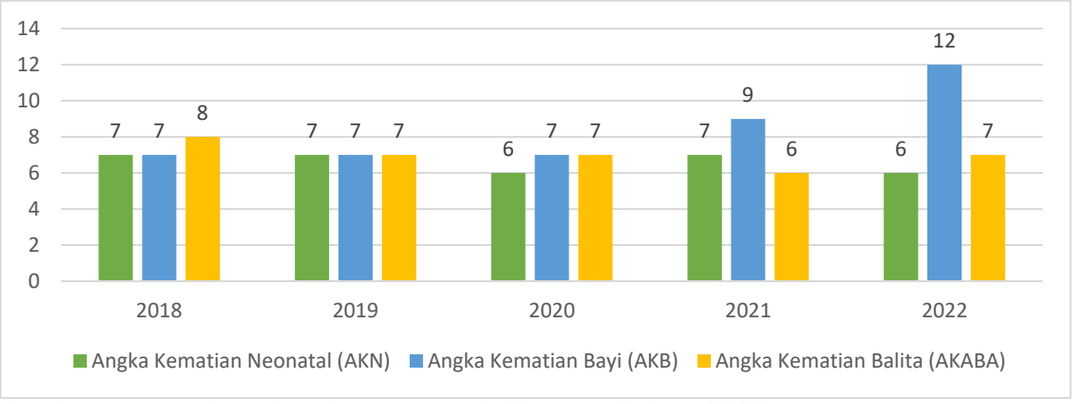
Sumber: Profil Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Selama periode 2018-2022, AKI Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan menurun cukup signifikan pada tahun 2022 yakni 39,67. Capaian tersebut sudah dibawah target SDGs 2030 sebesar 70/100.000 KH. Meskipun demikian, angka kematian ibu tetap perlu ditekan hingga terdapat 0

(tidak ada) kasus. Adapun 3 penyebab terbesar kematian ibu di Kota Balikpapan yakni pendarahan, hipertensi dan sepsis, (LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2020).

Pada periode pembangunan ke depan, pencegahan kematian ibu perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan pelayanan ANC (Antenatal Care), meningkatkan kualitas layanan persalinan, pelayanan PNS (Postnatal Care), serta akses perawatan gawat darurat yang tepat pada ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan menghindari kehamilan berisiko yaitu 4T (terlalu dini, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat jarak kehamilannya). Untuk itu, program terkait kesehatan ibu dan keluarga berencana menjadi bagian penting untuk memastikan "*safe motherhood*" dan mewujudkan kehidupan baru yang sehat.

Gambar 2. 27 Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022



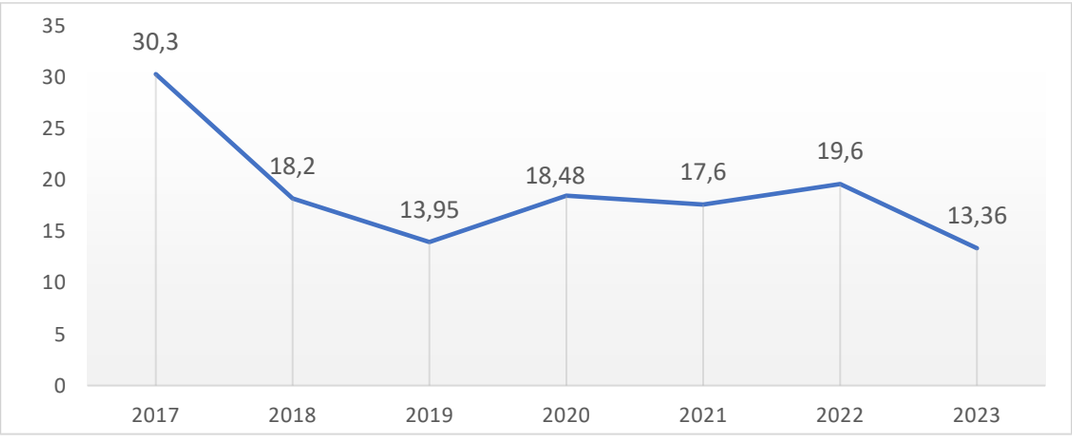
Sumber: LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020

Pada tahun 2018-2022, angka kematian neonatal, bayi dan balita di Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan cenderung rendah. Namun demikian, upaya tersebut tetap perlu ditekan hingga 0 (tidak ada) kasus. Penurunan AKN, AKB, dan AKAB dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada pelayanan kesehatan neonatal (KN) minimal dilakukan 3 kali kunjungan yaitu KN1 pada bayi usia 6-48 jam, KN2 pada umur 3-7 hari, dan KN 3 pada 8-28 hari. Rata-rata cakupan pelayanan KN lengkap di Kota Balikpapan cukup tinggi yakni 99,7%.

Sedangkan pelayanan kesehatan bayi dilakukan pada anak usia 0-11 bulan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A dan imunisasi dasar lengkap. Rata-rata pelayanan kesehatan bayi di Kota Balikpapan sebesar 98,02%. Pelayanan kesehatan balita dilakukan pada anak berusia 0-59 bulan melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan

buku KIA. Adapun rata-rata pelayanan kesehatan balita di Kota Balikpapan sebesar 86,19%. Dengan demikian, upaya pelayanan kesehatan pada balita perlu mendapat perhatian lebih disamping tetap meningkatkan pelayanan kesehatan pada neonatal dan bayi.

Gambar 2. 28 Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2017-2022



Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indoenesia (2019-2022) dan BPS Kota Balikpapan, 2024

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 persen pada tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak di masa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.

Selama tujuh tahun (2017-2023), prevalensi stunting Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2017 sebesar 30,3 persen, kemudian berhasil diturunkan menjadi 13,36 persen pada tahun 2023. Selama tujuh tahun (2017-2023), pemerintah Kota Balikpapan berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 16,94 persen. Tingginya capaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan daerah dalam penanggulangan stunting secara holistik.

Pada tahun 2019, pemerintah Kota Balikpapan membentuk tim pencegahan, penjaringan dan penanganan stunting berdasarkan Perwali Nomor 29 tahun 2019. Tim tersebut beranggotakan berbagai stakeholder di antaranya perangkat daerah, swasta, organisasi profesi, rumah sakit, organisasi masyarakat, kader pembangunan manusia, dan sebagainya. Adapun fokus programnya yaitu penguatan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan),

peningkatan akses air bersih dan sanitasi, praktek pengasuhan yang baik, dan penerapan gizi seimbang dalam rumah tangga.

Selain peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat Kota Balikpapan juga didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang cukup. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan layanan kesehatan sebagai dampak dari pemindahan ibukota negara (IKN). Berikut daftar fasilitas kesehatan Kota Balikpapan tahun 2023.

Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023

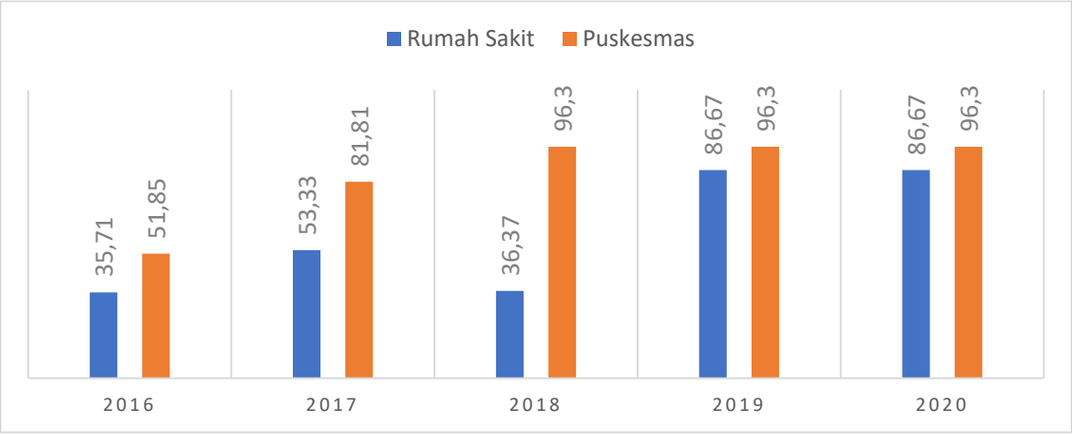
No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	15
2	Puskesmas	27
3	Apotek	118
4	Klinik	113
5	Laboratorium	2
6	Toko Obat	22
7	Faskes Lainnya	6
8	Toko Optik	17
9	Alat Kesehatan (Alkes)	20
10	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	65
11	Ambulance	7
12	Pelayanan Kesehatan Tradisional	4

Sumber: siyankes.balikpapan.go.id, 2023

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan cukup memadai mulai dari tingkat dasar hingga rujukan. Kota Balikpapan memiliki 15 Rumah Sakit yang terdiri dari RSUD dan Rumah Sakit Swasta. Sedangkan puskesmas sebanyak 27 yang tersebar diseluruh kecamatan. Namun demikian, masih ada beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan khususnya pelayanan kesehatan rujukan, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026). Selain rumah sakit dan puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat klinik, laboratorium, toko obat, toko optik, faskes lainnya, alkes, SLHS, ambulance, dan pelayanan kesehatan tradisional.

Meskipun secara jumlah cukup memadai, tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase akreditasi rumah sakit dan puskesmas yang belum mencapai 100%. Akredetasi bertujuan untuk mengukur fasilitas kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Berikut capaian akredetasi rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 29 Persentase Akredetasi Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026

Selama periode 2016-2020, persentase akredetasi pada rumah sakit cukup fluktuatif dengan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 36,37 persen, kemudian naik menjadi 86,67 persen pada tahun 2020. Sedangkan tren puskesmas yang terakredetasi cenderung meningkat yakni 51,85 persen pada tahun 2016, naik menjadi 96,3 persen pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakredetasi menunjukan peningkatan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.

Tabel 2. 10 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

No	Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter	183	209	1158	792	845
2	Dokter Gigi	70	-	-	114	110
3	Bidan	-	449	597	556	515
4	Perawat	-	1383	1975	1481	2015

Sumber: Balikpapan Dalam Angka Tahun 2019-2023

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kota Balikpapan selama periode 2018-2022 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang layanan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2020, persentase ketersediaan SDM kesehatan di Rumah Sakit Kota Balikpapan sebesar 97,32 persen, sedangkan di tingkat Puskesmas baru 82,72 persen, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026).

Adapun kendala dalam pemenuhan SDM terutama di Puskesmas yakni adanya regulasi Permenkes No 43 Tahun 2019 yang mensyaratkan Puskesmas Kawasan perkotaan non-rawat inap memiliki minimal 4 bidan, 5 perawat, apoteker, dan tenaga promosi kesehatan. Sedangkan 15 puskesmas di Kota Balikpapan belum memiliki apoteker dan beberapa puskesmas hanya memiliki

2 bidan. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas mengakibatkan ada petugas yang rangkap jabatan, sehingga kinerja belum optimal.

Selain itu, ketersediaan jumlah dokter spesialis di Kota Balikpapan juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil studi evaluasi capaian pemerataan layanan kesehatan yang berkeadilan di era JKN di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 disebutkan bahwa ketersediaan layanan katerisasi jantung (Cath Lab) di Provinsi Kalimantan Timur cukup terbatas. Layanan Cath Lab hanya ada di RSUD Abdul Wahid Sjahranie Kota Samarinda dan 2 rumah sakit di Kota Balikpapan yaitu RS Pertamina dan RS Siloam. Terbatasnya layanan Cath Lab kemudian menginisiasi pemerintah untuk menambah pelayanan jantung terpadu di RS Kanujoso Balikpapan. Pada tahun 2023, Gubernur Kalimantan Timur memimpin *ground breaking* pembangunan Gedung pelayanan jantung terpadu di RS Kanujoso Balikpapan. Adanya fasilitas baru tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan jantung, sehingga tidak perlu lagi harus ke Jakarta.

2.2.2.2 Ketahanan Keluarga

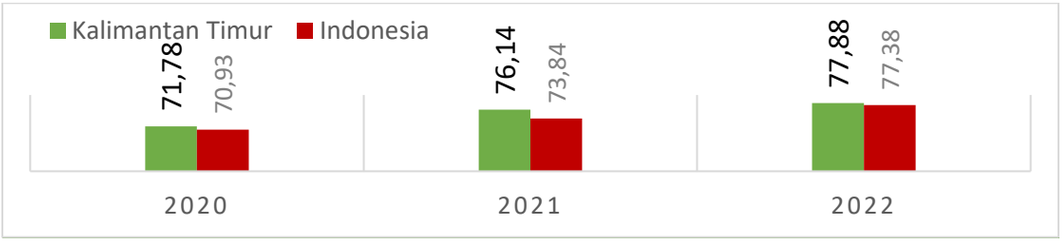
Kebijakan pembangunan keluarga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga penting untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Dalam perkembangannya, peran keluarga mulai bergeser akibat perubahan sosial yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa masalah di antaranya seperti kenakalan remaja, pernikahan usia dini, kehamilan tidak dikehendaki, dan sebagainya. Ketidakberfungsian keluarga sebagai pengawas, pelindung, dan penanam nilai dan karakter dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis secara lebih luas.

Untuk itu, pemerintah mulai mengukur kualitas keluarga melalui Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) sudah dilakukan tiga kali oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2016, 2019, dan 2020-2021 dengan jumlah dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan tersebut baru pada level provinsi belum pada level kabupaten/kota.

Untuk Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tahun 2021 diukur melalui 5 dimensi dan 25 indikator. Lima dimensi tersebut di antaranya dimensi Kualitas

Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Hasil dari data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tahun 2021 dapat menjadi rujukan untuk mengukur kebutuhan suatu daerah akan intervensi pembangunan keluarga yang berkualitas.

Gambar 2. 30 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indoensia Tahun 2020-2022



Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2023, Kemen PPPA, 2024

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) baru dihitung pada level provinsi, sehingga data capaian IKK menurut kabupaten/kota belum tersedia dan bisa memakai proxy data provinsi. Berdasarkan data IKK tahun 2020-2022, IKK Provinsi Kalimantan Timur cenderung naik, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2020, IKK Provinsi Kalimantan Timur 74,69 dan masuk dalam kategori 2 (range 50-75) yaitu cukup responsif gender dan pemenuhan hak anak. Capaian IKK tersebut berhasil ditingkatkan menjadi kategori 3 (di atas 75) pada tahun 2021 dan 2022. Capaian tersebut menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan telah responsif terhadap gender dan hak anak. Namun demikian, arus pembangunan dan tingkat migrasi yang cukup tinggi di Kota Balikpapan sebagai dampak dari IKN, pembangunan kualitas keluarga harus terus ditingkatkan. Salah satunya bisa fokus pada pemenuhan dimensi-dimensi yang ada dalam Indeks Kualitas Keluarga (IKK) secara terpadu, terintegratif dan holistik.

Tabel 2. 11 Komponen Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Dimensi	Nilai	Indikator	Nilai
1	Dimensi kualitas legalitas-struktur	88,96	1. Persentase perempuan berstatus kawin yang memiliki buku/akta Nikah	94,92
			2. Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	93,44
			3. Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa Anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	90,55
2	Dimensi kualitas ketahanan fisik	81,56	4. Persentase rumah tangga yang dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya sumber daya	93,21

No	Dimensi	Nilai	Indikator	Nilai
			5. Persentase rumah tangga yang ada anggota memiliki keluhan kesehatan	43
			6. Prevalence of Undernourishment (PoU) semua umur	16,19
			7. Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	98,75
			8. Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	0,24
			9. Persentase rumah tangga yang ada ART sakit	21,58
3	Dimensi kualitas ketahanan ekonomi	74,89	10. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	77,22
			11. Persentase rumah tangga tidak miskin	95,44
			12. Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	71,6
			13. Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	85,63
			14. Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,14
			15. Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	33,75
4	Dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi	68,37	16. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	33,96
			17. Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	2,49
			18. Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	19,67
			19. Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	98,01
5	Dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya	60,38	20. Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	7,81
			21. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap	86,78
			22. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	80,44
			23. Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	23,16
			24. Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	44,78
			25. Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet	22,62

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2022, KemenPPPA

Dari lima dimensi pembentuk indeks kualitas keluarga (IKK), dimensi kualitas legalitas-struktur memiliki capaian tertinggi 88,96 dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya memiliki capaian terendah 60,38. Tingginya dimensi legalitas-struktur mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kalimantan Timur memiliki posisi secara hukum cukup kuat yakni dengan kepemilikan akta lahir dan akta nikah. Selain itu, banyak anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan. Sedangkan dimensi sosial budaya belum optimal menunjukan bahwa interaksi di dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar masih cenderung rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya partisipasi keluarga yang mengikuti kegiatan keagamaan, masih adanya perkawinan anak, serta rendahnya aktivitas bersama dalam mengakses internet.

Dimensi lain seperti dimensi ketahanan fisik memiliki rata-rata capaian cukup baik yakni 81,56. Dari enam indikator yang diukur pada dimensi ketahanan fisik, ada tiga indikator yang masih mendapat catatan yakni masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan makanan sehat dan bergizi, masih adanya keluhan kesehatan, dan anggota keluarga yang sakit. Sedangkan indikator lainnya cukup positif seperti tingginya kepemilikan ruang tidur terpisah dan rendahnya anak yang merokok. Dimensi ketahanan ekonomi memiliki capaian 74,89. Dari enam indikator yang ada pada dimensi ketahanan ekonomi, hanya satu indikator yang memiliki capaian cukup rendah yakni persentase perempuan berstatus kawin yang bekerja sebesar 33,75. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat keberdayaan perempuan belum optimal. Sedangkan indikator lainnya memiliki capaian cukup baik seperti tingginya rumah tangga yang memiliki rumah, rendahnya rumah tangga miskin, tingginya rumah tangga yang memiliki tabungan dan asuransi kesehatan, serta rendahnya anak putus sekolah.

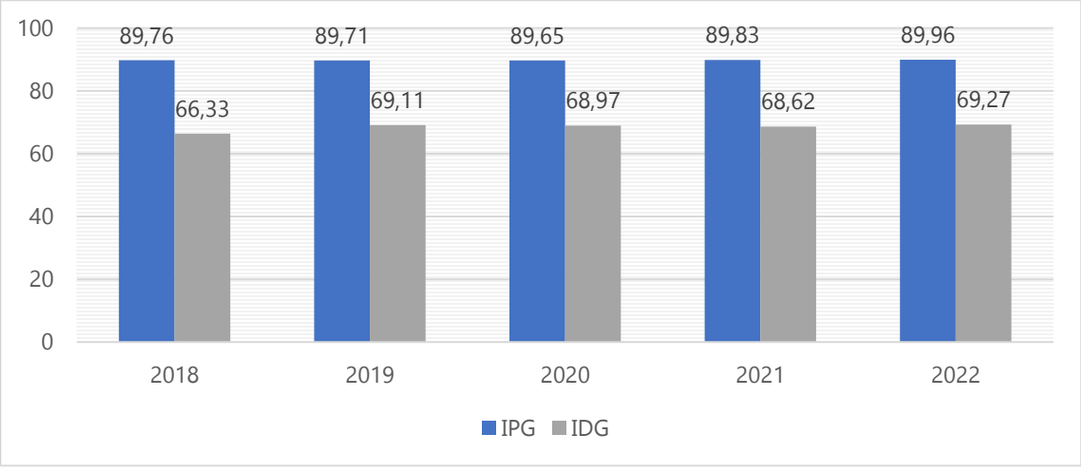
Dimensi terakhir yakni ketahanan sosial psikologi memiliki capaian yang belum optimal yakni 68,37. Dari empat indikator yang dihitung pada dimensi ketahanan sosial psikologi, hanya ada satu indikator yang memiliki capaian cukup baik yakni persentase keluarga yang melakukan kegiatan bersama. Sedangkan tiga indikator lainnya masih perlu ditingkatkan seperti masih adanya anak yang mengalami hukuman fisik/psikologis, masih adanya anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan, serta masih rendahnya tingkat berpergian bersama anggota keluarga. Secara keseluruhan, masih cukup banyak aspek yang perlu diitngkatkan untuk mewujudkan keluarga yang

berkualitas, sehingga mampu mendukung dalam pembangunan daerah secara lebih luas.

2.2.2.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan dalam memberdayakan perempuan dan laki-laki agar memiliki kemampuan setara dalam proses pembangunan. Kesetaraan gender bisa dilihat dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut capaian IPG dan IDG Kota Balikpapan.

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2018-202



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

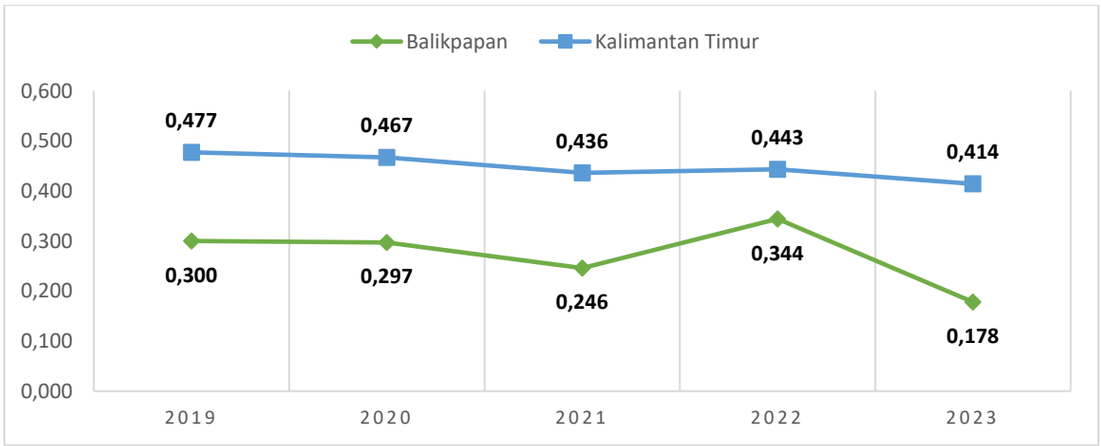
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2018-2022, rata-rata capaian IPG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, IPG Kota Balikpapan 89,96, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 86,61. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian tersebut masih dibawah rata-rata nasional 91,63 (2022). Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak pada perempuan tetap perlu ditingkatkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diintepretasikan dengan persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga professional dan presentase kontribusi pendapatan perempuan. Selama

periode 2018-2022, rata-rata IDG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, IDG Kota Balikpapan 69,27 dan Provinsi Kalimantan Timur 66,89. Hal tersebut mengindikasikan upaya pemberdayaan perempuan di Kota Balikpapan lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dilihat dari capaian angka pada kisaran 60 dari 100 menunjukan bahwa pemberdayaan pada perempuan masih perlu dioptimalkan.

Selain IPG dan IDG, kondisi kesetaraan gender juga dilihat dari indeks ketimpangan gender (IKG). IKG merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun keatas lulus SMA keatas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 32 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

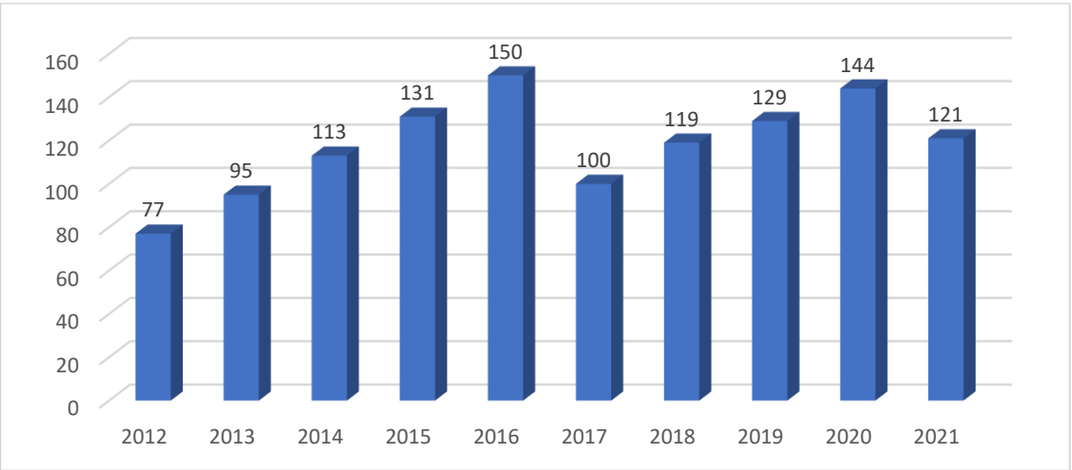
Selama periode 2019-2023, indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan memiliki tren cukup fluktuatif dan selalu berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kota Balikpapan lebih rendah dibanding dengan rata-rata Provinsi

Kalimantan Timur. Artinya, tingkat kesetaraan gender di Kota Balikpapan masih lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Capaian IKG Kota Balikpapan paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 0,344. Capaian tersebut kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 0,178. Hal tersebut menunjukan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi yaitu dilihat dari semakin banyaknya perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan, serta perempuan yang melahirkan dibawah usia 20 tahun semakin kecil. Selain itu partisipasi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, menjadi anggota legislatif, serta partisipasi dalam dunia kerja semakin setara.

2.2.2.4 Kebudayaan

Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari aspek kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial berbasis kebudyaan dapat dilihat melalui pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Cagar Budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di wilayah terkait. Data terkait jumlah cagar budaya di Kota Balikpapan selama periode 2012 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 33 Jumlah Cagar Budaya di Kota Balikpapan Tahun 2012-2021



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan 2021-2026

Jumlah cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan cenderung berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang mengarah pada peningkatan jumlah cagar budaya menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian kebudayaan di Kota Balikpapan. Sebaliknya, penurunan jumlah

cagar budaya yang terjadi pada tahun 2017 dan 2021 diakibatkan oleh adanya keterbatasan pengelolaan akibat lokasi dari cagar budaya terkait, seperti lokasi cagar budaya yang masuk dalam kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina sehingga sulit melakukan elaborasi. Meskipun demikian, secara umum pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan jumlah cagar budaya sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan.

2.2 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, maupun SDM. Daya saing suatu daerah akan menentukan bagaimana kinerja daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam bagian ini akan disampaikan mengenai kondisi ekonomi daerah, iklim investasi daerah, kondisi infrastruktur, maupun kondisi sumber daya manusia yang akan menggambarkan kemampuan daya saing Kota Balikpapan secara umum.

2.2.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

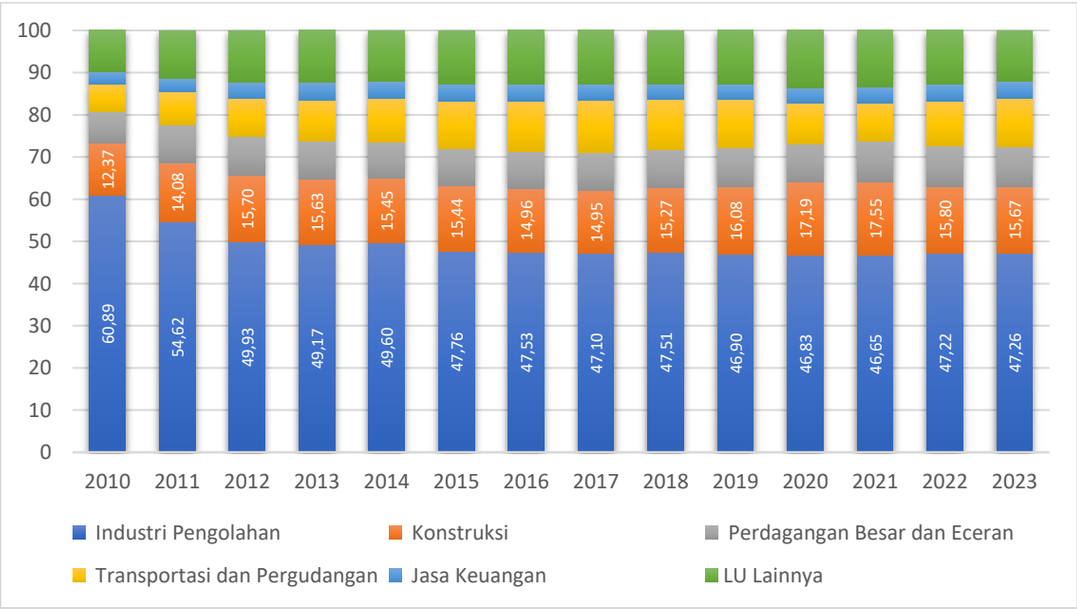
Kondisi daya saing perekonomian daerah menjadi salah satu yang perlu dilihat dalam proses perencanaan jangka panjang. Daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat kemandirian keuangan daerah, inflasi, pengeluaran per kapita, dan struktur ekonomi daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memetakan daya saing suatu daerah dalam aspek perekonomian.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sering digunakan untuk menunjukkan seberapa besar produktivitas perekonomian suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan dua harga dasar yaitu atas dasar harga konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK atau PDRB riil digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sedangkan PDRB ADHB atau PDRB nominal digunakan untuk melihat struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian daerah akan menentukan sejauh mana ketahanan perekonomian daerah serta potensi pengembangan daerah. Daerah yang terlalu bergantung pada salah satu sektor ekonomi umumnya kurang resilien terhadap guncangan.

Secara umum, PDRB Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik. PDRB Kota Balikpapan mencapai 97,06 triliun rupiah berdasar harga konstan sedangkan berdasar harga berlaku mencapai 103,92 triliun rupiah pada tahun 2023. Perekonomian Kota Balikpapan hingga tahun 2023 didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 49,21 persen per tahun pada periode 2010-2023.

Gambar 2. 34 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha Terpilih Tahun 2010-2023 (%)



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang menurun dari yang mulanya mencapai 60,89 persen pada tahun 2010 menjadi 47,26 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan kontribusi sektor usaha lainnya yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Selain industri pengolahan, perekonomian Kota Balikpapan juga digerakkan oleh sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 15,44 persen. Meningkatnya kontribusi sektor konstruksi didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan, khususnya sejak pembangunan RDMP RU V Balikpapan dan IKN.

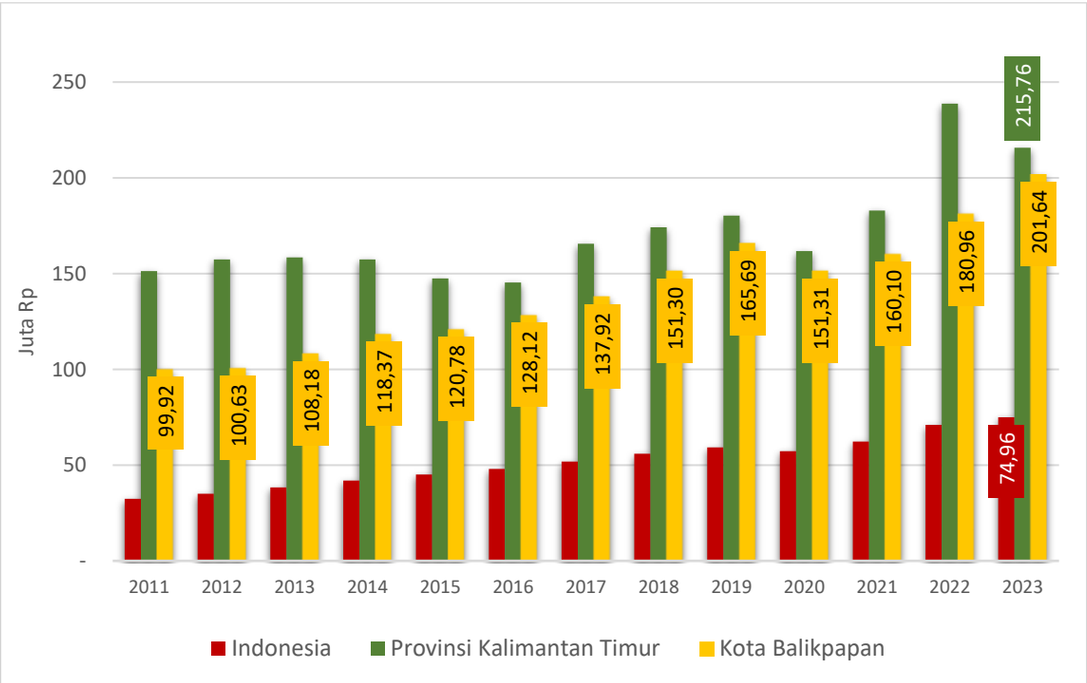
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga menunjukkan peranan yang semakin besar. Sektor perdangan besar dan eceran berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan sebesar 9,40 persen pada tahun 2023. Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan hingga 10,24 persen per tahun.

Sektor tersier atau sektor jasa semakin menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, kontribusi sektor tersier mencapai 35,98 persen dari yang sebelumnya hanya sebesar 25,53 persen pada tahun 2010. Kontribusi sektor tersier yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai bergeser pada aktivitas ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan penduduk karena dinilai dapat mencerminkan pendapatan setiap penduduk. Perhitungan PDRB per kapita adalah total PDRB di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut sehingga tinggi rendahnya PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya nilai PDRB tetapi juga jumlah penduduk.

Gambar 2. 35 PDRB per Kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan PDB per Kapita Indonesia Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah)

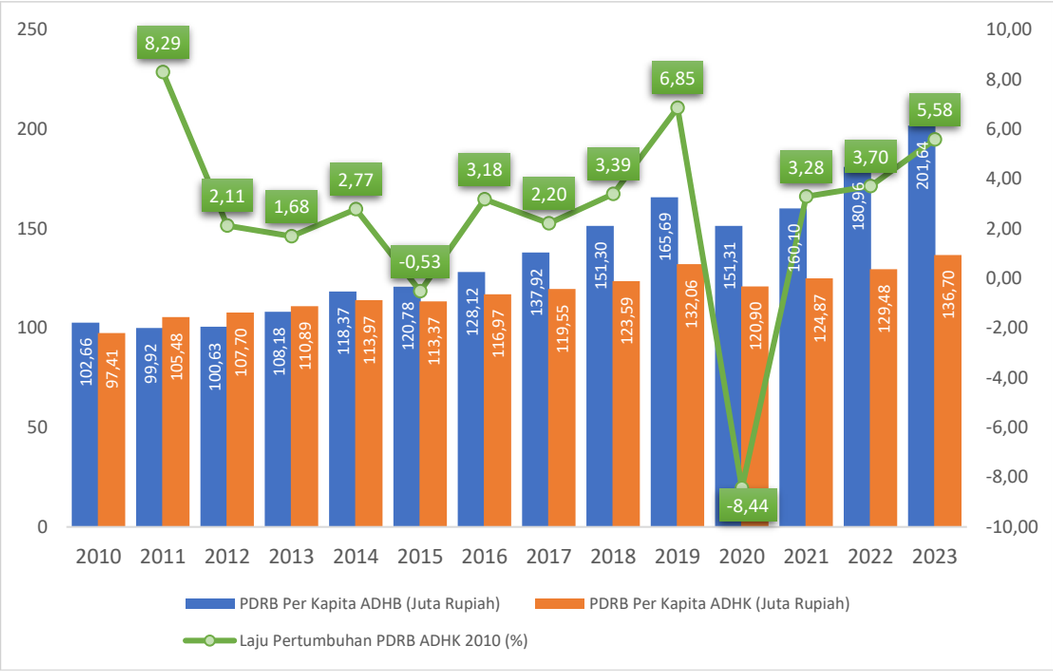


Sumber: BPS, 2024

PDRB per kapita Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat nasional akan tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. PDRB per kapita Kota Balikpapan 169 persen lebih tinggi dibandingkan dengan PDB per kapita nasional di mana PDRB per kapita Kota Balikpapan mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. PDB per kapita di level nasional, serta PDRB per kapita Provinsi

Kalimantan Timur, maupun Kota Balikpapan secara nominal terus mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 saat itu menurunkan tingkat produktivitas masyarakat sehingga kinerja perekonomian mengalami penurunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 2. 36 PDRB per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

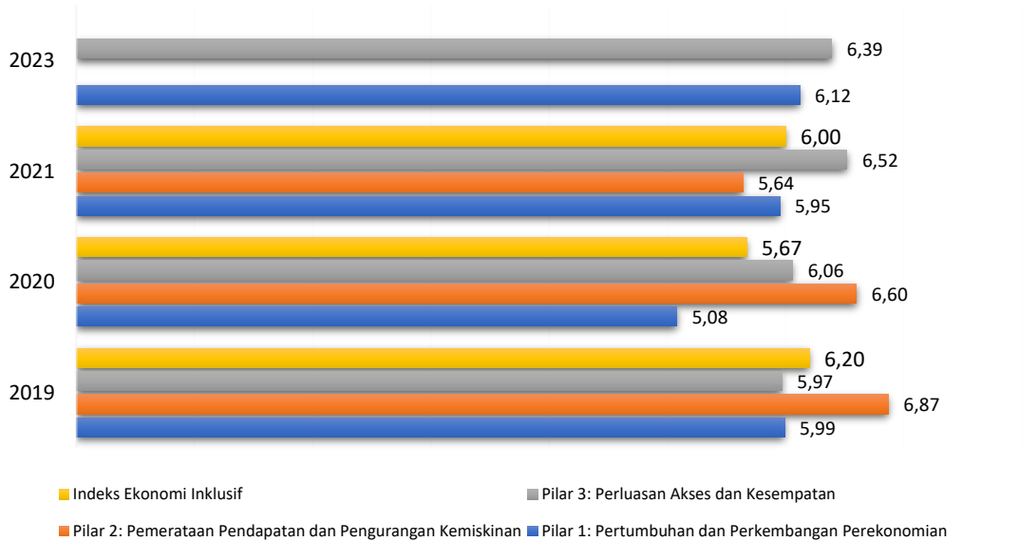
PDRB per kapita Kota Balikpapan tumbuh sebesar 2,62 persen per tahun pada tahun 2010-2023. Nilai PDRB per kapita secara riil mencapai 136,70 juta rupiah sedangkan secara nominal mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan PDRB per kapita cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen dan penurunan jumlah penduduk sebesar 3,41 persen. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 0,93 persen dengan jumlah penduduk yang naik sebesar 5,06 persen. Kenaikan jumlah penduduk tersebut diperkirakan karena penyesuaian hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020. Perekonomian yang tumbuh hingga 6,49 persen mendorong pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 5,58 persen pada tahun 2023.

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Bappenas). Indeks ekonomi inklusif terdiri dari 3 pilar yaitu: Pilar 1: Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;

Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan Pilar 3: Perluasan akses dan kesempatan. Berikut ini adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Balikpapan.

Gambar 2. 37 Indeks Ekonomi Inklusif Kota Balikpapan Tahun 2019-2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin inklusif. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sempat melemahkan perekonomian daerah dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut menyebabkan turunnya nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya menyentuh angka 6,20 pada tahun 2019. Meskipun sempat mengalami penurunan, pembangunan ekonomi inklusif kembali menguat pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,33 poin.

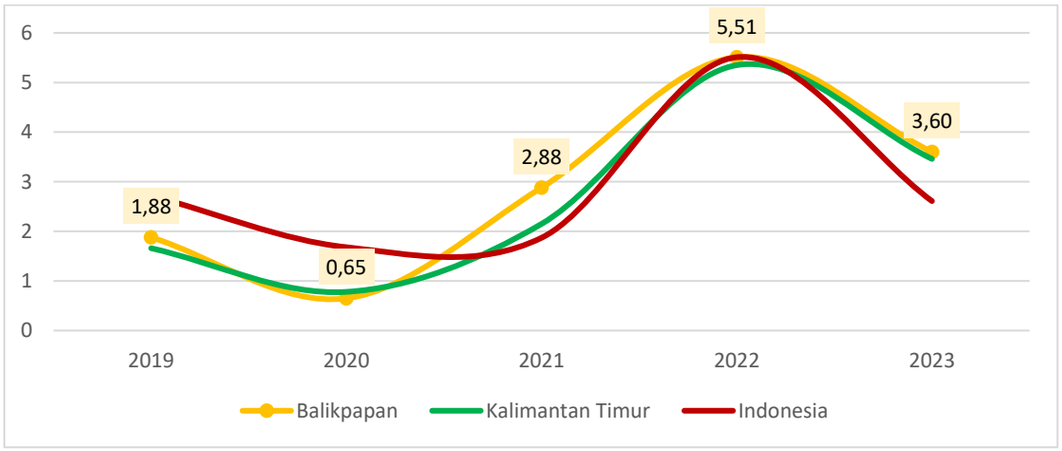
Nilai indeks ekonomi inklusif Kota Balikpapan tahun 2023 tidak dapat dihitung karena hasil perhitungan pada pilar kedua tidak tersedia. namun demikian, apabila dilihat dari pilar pertama dan ketiga, pembangunan ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang semakin terakselerasi serta perluasan lapangan kerja menjadi pendorong dari naiknya nilai pada kedua pilar tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019.

2.3.1.4 Inflasi

Kestabilan harga barang menjadi salah satu faktor yang turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pada dasarnya memang sesuatu yang umum terjadi, tetapi kenaikan yang terlampau tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli yang berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kota Balikpapan merupakan

salah satu kota yang dijadikan sebagai lokasi survey biaya hidup di Indonesia. Berikut ini adalah data inflasi tahunan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.

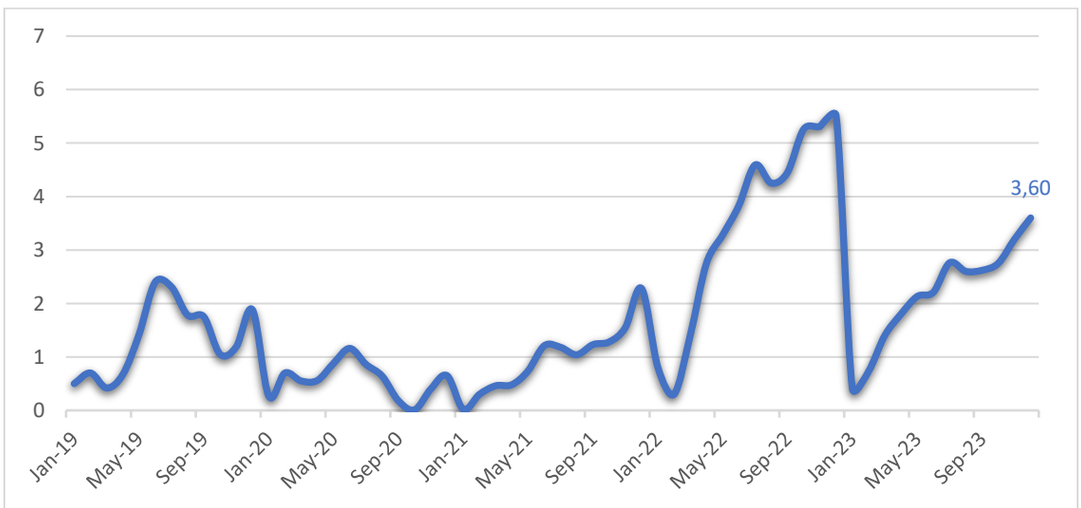
Gambar 2. 38 Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

Harga komoditas di Kota Balikpapan terus mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari terjadinya inflasi pada tahun 2018-2023. Inflasi yang terjadi relatif terjaga sejalan dengan pergerakan inflasi di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi aktual di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan target. Target inflasi pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar ±3,5 persen dengan inflasi aktual sebesar 3,13 persen dan 1,88 persen. Untuk target inflasi tahun 2020 hingga 2023 adalah sebesar ±3 persen dengan inflasi aktual di bawah target pada tahun 2020 dan 2021 sedangkan tahun 2022 lebih tinggi 2,51 persen poin dari target, dan tahun 2023 kembali ke dalam rentang target.

Gambar 2. 39 Inflasi Kumulatif Kota Balikpapan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 di mana daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat melemahnya perekonomian saat pandemi Covid-19. Penurunan daya beli menyebabkan turunnya permintaan di pasar komoditas sehingga kenaikan harga komoditas cenderung lebih kecil, bahkan ada yang terdeflasi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Inflasi kembali naik pada tahun 2021 seiring dengan pulihnya perekonomian Kota Balikpapan. Namun, kenaikan tersebut terus terjadi hingga tahun 2022. Inflasi tahun 2022 Kota Balikpapan naik hingga 3,23 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan harga yang cukup tinggi mulai terjadi pada bulan April tahun 2022 seiring dengan kenaikan permintaan saat perayaan hari raya Idul Fitri. Namun, kenaikan harga tidak kembali melambat dan cenderung semakin tinggi mencapai 5,51 persen pada bulan Desember 2022.

Upaya tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga inflasi kembali ke rentang target menunjukkan hasil pada tahun 2023. Inflasi yang ditargetkan pada rentang 2-4 persen terealisasi ke angka 3,60 persen. Pada tahun 2022 dan 2023, komoditas bahan bakar rumah tangga dan rokok kretek filter menjadi komoditas yang masuk ke dalam 10 komoditas teratas yang memiliki andil terhadap inflasi.

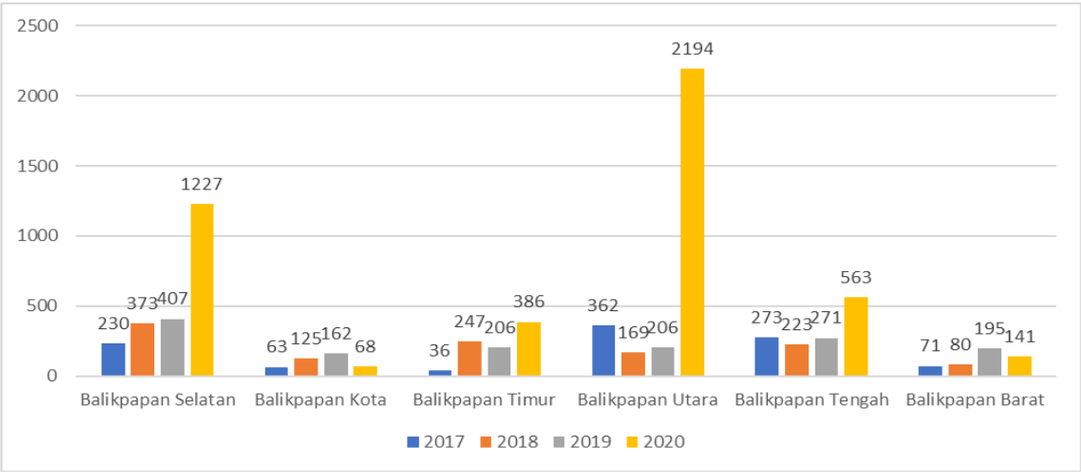
2.3.1.5 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kota Balikpapan ditopang oleh subsektor unggulan yaitu aplikasi dan pengembangan gim. Subsektor tersebut akan menunjang industri kreatif dan *smart city.* Hal ini dikarenakan aplikasi dan pengembangan gim akan menjadi pintu masuk segala kebutuhan tata kelola masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019), omzet dari subsektor ekonomi kreatif aplikasi dan pengembangan gim diperkirakan mencapai Rp48 miliar per tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 20 lebih perusahaan dengan omzet hingga Rp 200 juta per bulan, seperti Honey Bar, Harmony, Balikpapan City Guide, dan lainnya. Pengembangan ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan pengembangan gim berpeluang menyerap tenaga kerja sekitar 7 persen lulusan perguruan tinggi. Adapun produk dari ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan pengembangan gim di Kota Balikpapan berupa usaha rintisan *(start-up)* antara lain: Tukang Pedia, Celining Cling, Office Pedia, dan Denim. Ekonomi kreatif di Kota Balikpapan didukung dengan keberadaan komunitas kreatif seperti Komunitas PHP, Komunitas Front-End Dev, Robotic, dan linux yang telah menumbuhkan 30 *start-up* per tahun.

2.3.1.6 UMKM

Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan untuk mendukung perekonomian dan memiliki keunggulan daya saing. Adapun produk unggulan UMKM Kota Balikpapan yaitu makanan khas seperti amplang dan makanan olahan perikanan kelautan, produk kriya seperti kerajinan tangan gelang, kalung, dan kain batik bermotif khas Balikpapan. Salah satu yang menjadi tantangan untuk meningkatkan keunggulan daya saing adalah digitalisasi UMKM. Sejauh ini beberapa UMKM di Kota Balikpapan telah masuk dalam lokapasar (marketplace) sehingga telah dapat menjangkau pasar yang lebih luas di luar Kota Balikpapan. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 40 Jumlah UMKM berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

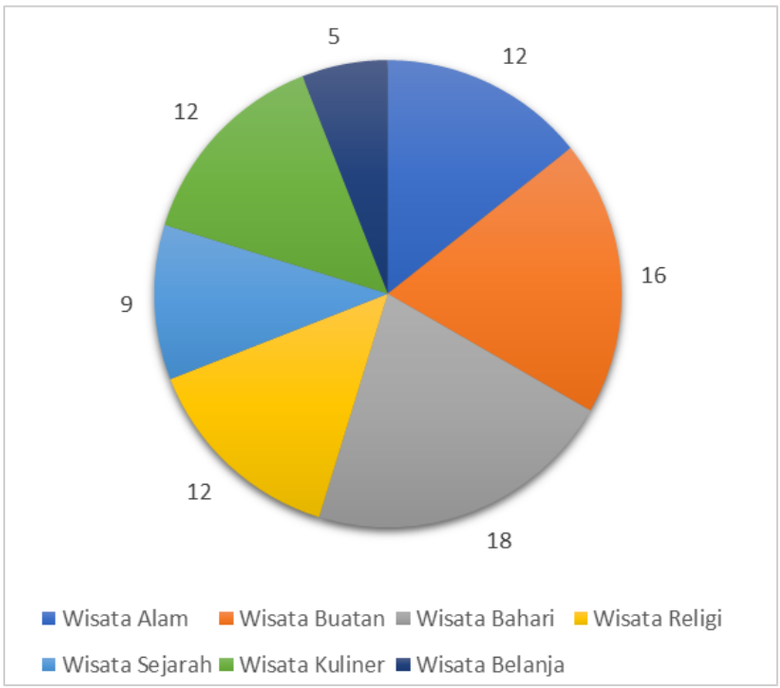
Jumlah UMKM di Kota Balikpapan memiliki tren peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan Balikpapan Utara menjadi kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu 2.194 usaha. Peningkatan jumlah UMKM ini tentunya juga akan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja dan jumlah omset penjualan, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian Kota Balikpapan.

2.3.1.7 Pariwisata

Letak strategis Kota Balikpapan yang berada pada tepian pantai yang juga menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan telah menjadi kota untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan *(event)* memberikan keunggulan daya saing sebagai destinasi pariwisata. Objek daya tarik wisata di Kota Balikpapan

didominasi oleh wisata bahari, selanjutnya wisata buatan, wisata alam, dan wisata kuliner.

Gambar 2. 41 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata di Kota Balikpapan menurut Jenisnya Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Objek daya tarik wisata alam di Kota Balikpapan terdiri dari wisata hutan dan ekowisata, seperti Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Utara, Mangrove Margo Mulyo di Kecamatan Balikpapan Barat, Mangrove Center Graha Indah di Kecamatan Balikpapan Utara, Ekowisata Mangrove Kariangau di Kecamatan Balikpapan Utara, dan Ekowisata Teluk Balikpapan. Adapun objek daya tarik wisata bahari di Kota Balikpapan yang telah menjadi tempat kunjungan favorit wisatawan antara lain: Pantai Manggar Segara Sari di Kecamatan Balikpapan Timur, Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, Pantai Kemala di Kecamatan Balikpapan Kota, dan Pantai Teluk Bayur di Kecamatan Balikpapan Timur.

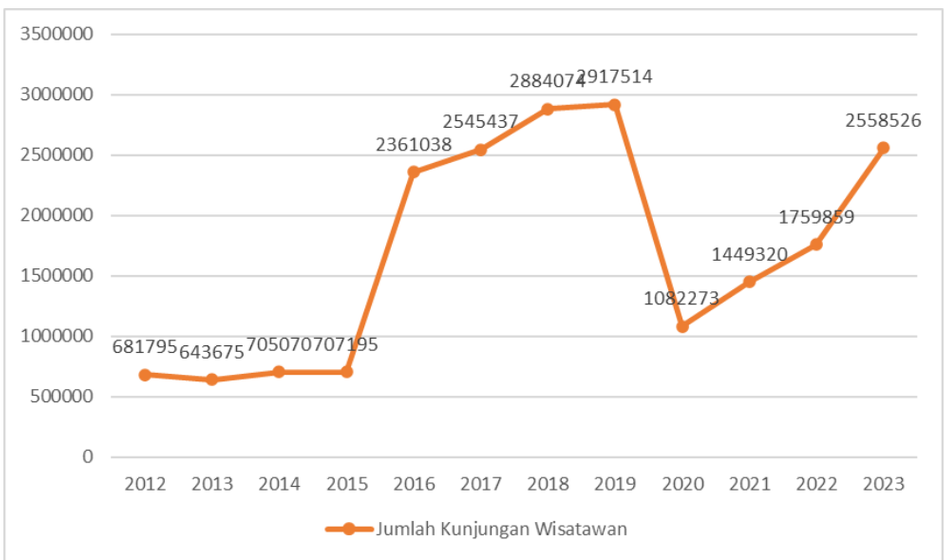
Objek daya tarik wisata buatan dan wisata kuliner semakin dikembangkan untuk menambah lama tinggal wisatawan di Kota Balikpapan. Hal tersebut seiring dikembangkannya taman-taman kota seperti Taman Bekapal di Kecamatan Balikpapan Kota dan Taman Tiga Generasi di Kecamatan Balikpapan Selatan, serta kampung-kampung kota sebagai kampung wisata seperti Kampung Warna-Warni Teluk Seribu di Kecamatan Balikpapan Timur, Kampoeng Kenangan di Kecamatan Balikpapan Timur, Kampung Pinisi di Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kampung Kangkung Sumber Rejo di Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun wisata kuliner yang masih menjadi

daya tarik kunjungan wisatawan antara lain Pasar Segar, Restoran Dandito, Restoran Kenari, dan sentra kuliner di Lapangan Merdeka.

Keberadaan IKN secara tidak langsung telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan. Salah satu motivasi wisatawan datang berkunjung sejak proyek IKN berjalan adalah ingin melihat potensi bisnis di Kota Balikpapan. Beberapa kegiatan (event) baik internasional maupun nasional juga telah dilakukan di Kota Balikpapan. Selama ini lama tinggal wisatawan masih sekitar 1-2 hari. Hal itu berpeluang untuk ditingkatkan mencapai 3-4 hari.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Balikpapan dari tahun 2015 hingga 2022 memiliki tren peningkatan. Meskipun sempat terjadi penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, jumlah kunjungan kembali meningkat pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di Kota Balikpapan dapat pulih dengan cepat seiring dengan pengembangan objek daya tarik wisata.

Gambar 2. 42 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Balikpapan Tahun 2012-2023



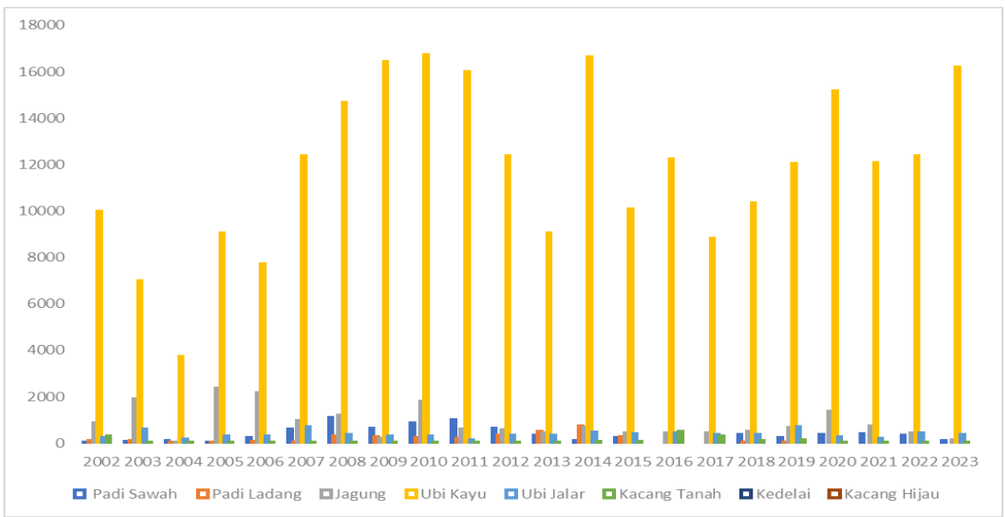
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2012-2023

Peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2015, Kota Balikpapan mendapatkan predikat kota paling nyaman dan layak huni di Indonesia berdasarkan *Most Livable City Index.* Kondisi tersebut secara tidak langsung mampu menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

2.3.1.8 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang ketahanan pangan di Kota Balikpapan. Namun demikian, lahan pertanian di Kota Balikpapan relatif terbatas luas dan sebarannya, serta pada umumnya dilakukan dalam skala kecil. Kawasan yang masih mengusahakan pertanian cenderung terpusat di Kecamatan Balikpapan Timur, terutama di Kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip. Produksi tanaman pangan dengan jumlah terbanyak adalah ubi kayu, hal ini menunjukkan bahwa jenis tanah di Kota Balikpapan lebih cocok untuk komoditas ubi kayu, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan komoditas pertanian lainnya masih mengandalkan pasokan hasil pertanian dari wilayah di luar Kota Balikpapan.

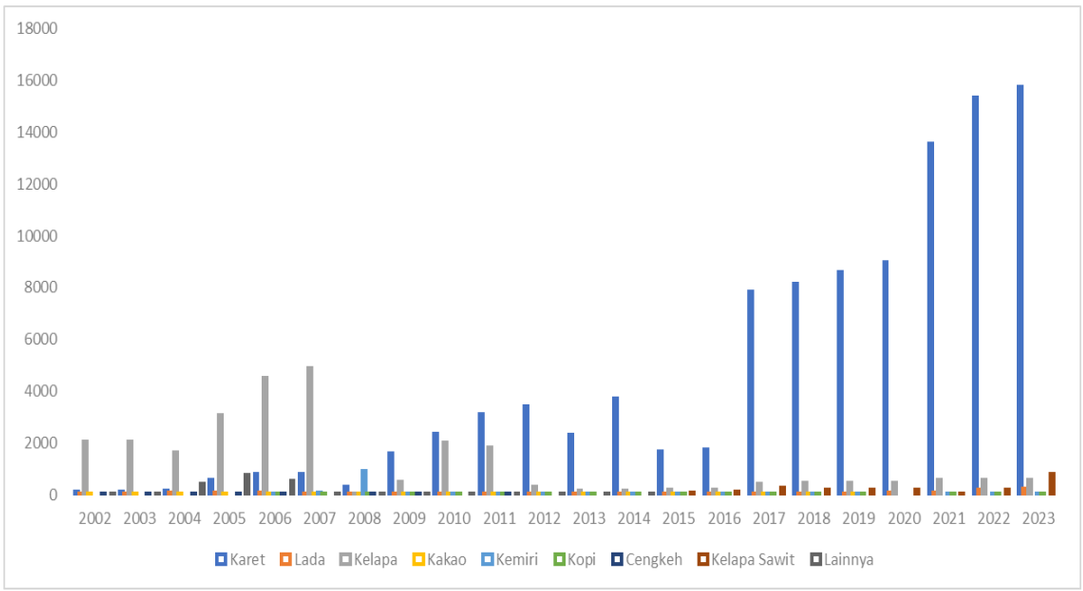
Gambar 2. 43 Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2002-2023



Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka (2003-2024)

Perkebunan menjadi salah satu subsektor pertanian yang juga memiliki kontribusi ekonomi di Kota Balikpapan. Tanaman perkebunan dengan hasil produksi terbanyak adalah karet. Kota Balikpapan merupakan salah satu penghasil tanaman karet terbesar yang berpotensi bisa meningkatkan ekspor. Potensi karet tersebut juga didukung dengan adanya pasar yang mampu menyerap produksi karet Balikpapan. Hasil produksi karet Kota Balikpapan selama ini selalu dipasarkan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kota Balikpapan dari tahun 2002 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 44 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2002-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2002-2024

Berdasarkan grafik tersebut, produksi tanaman perkebunan karet terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal ini didukung dengan adanya program perluasan area perkebunan karet yang telah menjadi salah satu program prioritas untuk memenuhi permintaan pasar.

2.2.2 Daya Saing SDM

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menggambarkan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Gambaran daya saing SDM dapat dilihat dari beberapa capaian seperti kualitas pendidikan dan serapan tenaga kerja. Berikut beberapa capaian yang menunjukan daya saing SDM.

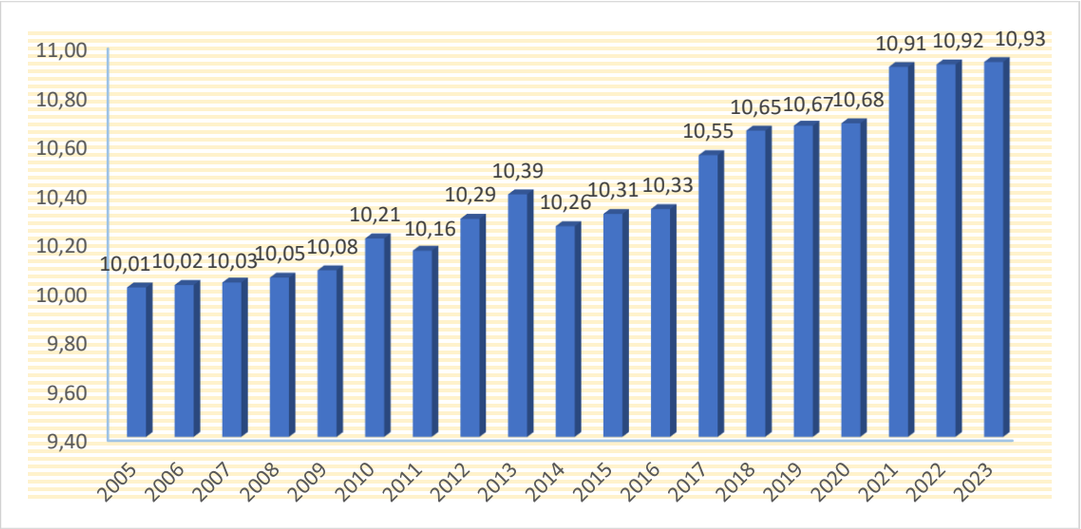
2.3.2.1 Kualitas Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan, serta angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Sekolah. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di suatu daerah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. RLS berkaitan erat dengan

kondisi pembangunan manusia sebagai bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut data RLS di Kota Balikpapan pada rentang tahun 2005 hingga 2023.

Gambar 2. 45 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan pada Tahun 2005-2023



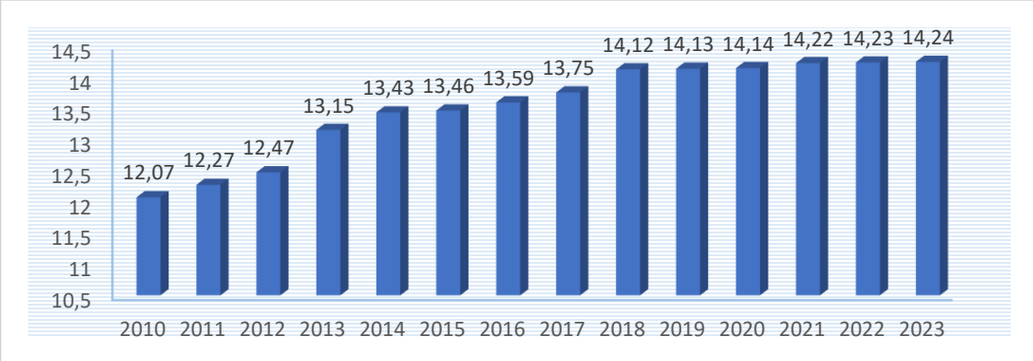
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2005 hingga 2023. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Balikpapan selama tujuh belas tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin. Capaian RLS yang mencapai 10,93 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan merasakan pendidikan selama 10,93 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Capaian tersebut juga telah berada di atas angka RLS Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, yakni selisih 1 poin di atas capaian provinsi dan 2,23 poin dibandingkan nasional. Meskipun begitu, capaian positif terkait RLS tersebut masih perlu untuk ditingkatkan untuk mengejar angka minimal wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 13 tahun atau setara kelas 3 SMA dengan kewajiban menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD).

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah terkait. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di wilayah terkait. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian HLS Kota Balikpapan selama periode 2010 hingga 2023.

Gambar 2. 46 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Balikpapan juga mengalami tren serupa dengan capaian RLS, yakni memiliki tren positif selama periode 2010 hingga 2023. Harapan lama sekolah masyarakat di Kota Balikpapan selama 13 tahun terakhir meningkat sebanyak 2,17 poin. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan memiliki harapan untuk dapat merasakan pendidikan formal selama 14 tahun atau setara dengan tahun pertama di perguruan tinggi. HLS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara harapan masyarakat usia sekolah, Kota Balikpapan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun. Namun, capaian tersebut tetap perlu untuk ditingkatkan, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat di Kota Balikpapan untuk 20 tahun ke depan.

Indikator selanjutnya yang dapat melihat kondisi pendidikan di Kota Balikpapan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut merupakan capaian APK di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2022.

Tabel 2. 12 Angka Partispasi Kasar (APK) Kota Balikpapan pada Tahun 2015-2022

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Dasar Sederajat	109,8	104,92	108,21	107,35	107,35	105,52	104,64	105,5
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	92,56	99,66	85,23	92,78	92,78	96,81	95,49	89,16
Sekolah Menengah Atas Sederajat	95,76	93,34	103,73	108	108	96,88	99,27	98,55

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Balikpapan pada tabel di atas merupakan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Data 2023 tidak dicantumkan karena tidak tersedia pada dokumen Kota Balikpapan Dalam Angka 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Meskipun demikian, data pada tabel di atas menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat di Kota Balikpapan telah lebih dari 100 persen. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Dengan kata lain Kota Balikpapan telah mampu menampung penduduk usia sekolah dasar lebih dari target yang sesungguhnya. Tren yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan yang lain. Fluktuasi capaian APK di Kota Balikpapan terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan atas. Penurunan capaian APK sekolah menengah pertama dan atas mengindikasikan bahwa berkurangnya jumlah masyarakat yang berpartipisasi pada jenjang pendidikan terkait di Kota Balikpapan.

Indikator lain pada sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya juga semakin tinggi. Berikut merupakan data capaian APM Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023.

Tabel 2. 13 Angka Partipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
Sekolah Dasar Sederajat	97,52	98,68	98,19	99,98	99,98	99,52	99,49	99,87	99,81
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	76,97	80,52	81,51	82,93	82,93	83,24	83,16	86,21	85,56
Sekolah Menengah Atas Sederajat	67,81	68,41	69,89	69,6	69,6	70,98	70,79	70,61	70,51

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

APM di Kota Balikpapan secara umum cenderung mengalami tren peningkatan pada rentang tahun 2015 hingga 2024. Capaian APM di Kota Balikpapan yang semakin mendekati 100 pada jenjang sekolah dasar menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah dasar yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Fluktuasi capaian APM yang sempat terjadi dipengaruhi oleh

jumlah anak pada usia kelompok tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai kelompok umurnya. Selain itu, capaian APM yang semakin menurun pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti belum adanya batasan minimal pada awal mula penduduk usia sekolah mengakses pendidikan jenjang pertama, sehingga banyak penduduk yang menempuh pendidikan sekolah menengah tidak sesuai usia jenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tren peningkatan APM dari tahun 2015 hingga 2023 secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya.

Indikator lain yang juga melengkapi data di sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan salah satu indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Berikut merupakan kondisi APS di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023.

Tabel 2. 14 Angka Partipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	100	100	98,19	99,8	99,98	99,79	99,68	99,87	99,81
13-15	97,71	99,18	81,51	97,62	97,62	98,25	98,36	99,4	99,27
16-18	80,67	83,91	69,89	85,14	85,14	84,85	84,95	83,47	83,41

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi pada semua rentang umur. Fluktuasi APS di Kota Balikpapan menunjukkan adanya perubahan partisipasi masyarakat usia terkait pada jenjang pendidikannya. Penurunan APS di semua rentang umur terjadi pada tahun 2017 dan 2023. Penurunan APS pada tahun 2017 dikarenakan diimplementasikannya kebijakan sistem zonasi sekolah secara nasional. Sistem zonasi yang mewajibkan penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya mengurangi jumlah sekolah yang dapat diakses oleh penduduk, sehingga secara tidak langsung memengaruhi APS di Kota Balikpapan secara keseluruhan. Penurunan APS pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya fluktuasi jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Kelima indikator di sektor pendidikan yang telah dijabarkan di atas perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasaranan penunjang layanan pendidikan, seperti gedung sekolah, tenaga pengajar, maupun dukungan sarana lainnya. Berikut merupakan data ketersediaan gedung sekolah di Kota Balikpapan selama periode 2006 hingga 2023 pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah Jenjang TK-SMA di Kota Balikpapan Tahun 2006-2022

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	190	61	51
2007	N/A	193	51	43
2008	295	188	67	50
2009	310	190	55	42
2010	318	188	66	49
2011	327	190	67	52
2012	336	195	69	53
2013	338	195	N/A	N/A
2014	342	195	48	57
2015	349	197	72	58
2016	355	209	75	60
2017	349	136	63	60
2018	356	209	84	64
2019	141	209	84	62
2020	150	210	84	61
2021	152	211	88	67
2022	153	208	92	68
2023	142	221	93	71

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Secara umum, jumlah gedung sekolah di Kota Balikpapan mengalami peningkatan selama periode 2006-2023. Khusus pada jumlah gedung jenjang pendidikan TK mengalami perubahan cukup signifikan dikarenakan pada rentang tahun 2008-2018 merupakan data gabungan antara jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pada tahun 2017, jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama mengalami penurunan. Hal tersebut karena data jumlah gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsnawaiyah (MTs) tidak tersedia, sehingga data yang tercantum merupakan data jumlah sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah gedung sekolahnya semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penambahan gedung sekolah pada jenjang menengah pertama dan atas. Ketersediaan jumlah sekolah berkaitan dengan daya tampung sekolah anak-anak yang telah selesai

menempuh pendidikan awal dan perlu melanjutkan pada jenjang pendidikan di atasnya. Ketersediaan dan kemampuan daya tampung gedung sekolah akan memengaruhi proses pembangunan melalui sektor pendidikan. Selain jumlah gedung, ketersediaan jumlah guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran para siswa. Berikut merupakan data terkait jumlah guru di Kota Balikpapan pada tahun 2006 hingga 2023.

Tabel 2. 16 Jumlah Guru Jenjang TK-SMA di Kota Balikpapan Tahun 2006-2023

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	2.695	1.463	1.557
2007	N/A	2.710	1.394	1.250
2008	N/A	2.644	1.614	1.627
2009	N/A	2.644	1.614	1.627
2010	N/A	3.023	1.693	1.675
2011	N/A	3.071	1.608	1.760
2012	N/A	3.156	1.638	1.741
2013	N/A	5.709	3.497	2.672
2014	N/A	3.392	2.256	1.145
2015	N/A	3.346	1.768	2.052
2016	N/A	3.326	1.730	2.031
2017	N/A	2.613	1.751	1.568
2018	N/A	6.797	1.847	1.525
2019	602	3.916	1.814	1.553
2020	424	3.238	1.597	1.654
2021	359	3.274	1.759	1.717
2022	550	3.472	1.661	1.732
2023	611	3.716	1.888	1.776

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Jumlah guru yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Kota Balikpapan pada rentang tahun 2006 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada jenjang Taman Kanak-Kanak sederajat. Fluktuasi jumlah guru di berbagai jenjang terjadi akibat terdapat data guru tetap, guru honorer maupun guru bantu yang tidak tersebar merata di setiap tahun, sehingga seolah terdapat lonjakan jumlah guru di Kota Balikpapan. Jumlah guru yang terlihat sudah cukup banyak harus tetap memperhatikan berapa banyak murid yang diajari. Ketercukupan guru akan murid di suatu wilayah dapat diliihat dari rasio guru murid. Data terkait rasio guru murid di Kota Balikpapan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 17 Rasio guru murid di Kota Balikpapan tahun 2006-2022.

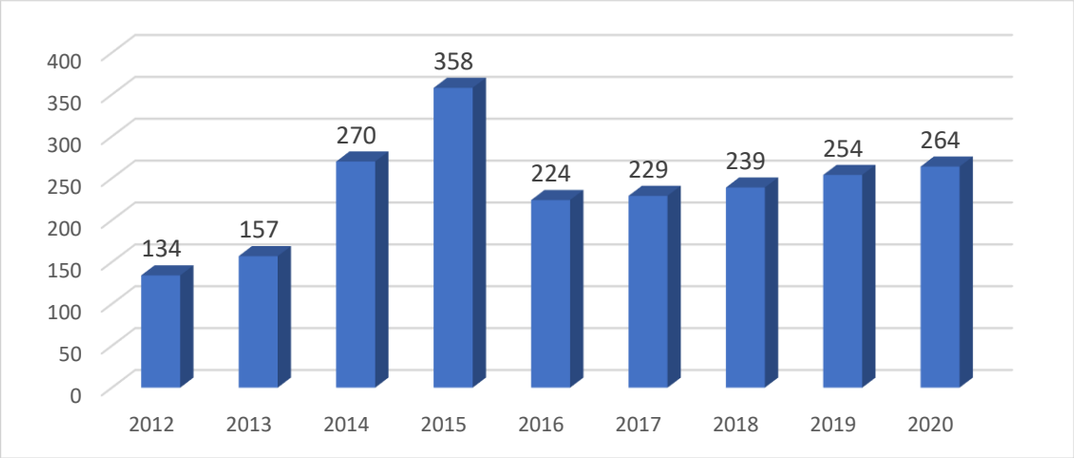
Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	0,04	0,06	0,07
2007	N/A	0,04	0,06	0,06
2008	N/A	0,04	0,06	0,08
2009	N/A	0,04	0,06	0,07
2010	N/A	0,05	0,06	0,07
2011	N/A	0,05	0,06	0,07
2012	N/A	0,05	0,06	0,07
2013	N/A	0,08	0,13	0,11
2014	N/A	0,05	0,07	0,05
2015	N/A	0,05	0,06	0,08
2016	N/A	0,04	0,06	0,07
2017	N/A	0,05	0,05	0,13
2018	N/A	0,11	0,07	0,12
2019	0,09	0,11	0,07	0,05
2020	0,09	0,05	0,05	0,06
2021	0,12	0,05	0,05	0,06
2022	0,10	0,05	0,05	0,06
2023	0,10	0,05	0,06	0,06

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Rasio guru dan murid pada semua jenjang di Kota Balikpapan pada tahun 2006 hingga 2023 dapat dikatakan cukup memadai. Hal itu sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, terkait rasio guru dan murid, yakni 1:20 untuk SD, SMP, dan SMA, serta 1:15 untuk SMK. Apabila rasio tersebut diubah ke dalam desimal, maka rasio guru dan murid yang ideal adalah 0,05. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh, semakin bagus tingkat ketercukupan guru akan murid yang ada di Kota Balikpapan.

Sarana prasarana lain yang juga dapat menunjang capaian kinerja sektor pendidikan adalah tersedianya perpustakaan di suatu wilayah. Adanya perpustakaan dapat menjadi gambaran tambahan pengetahuan dan kebiasaan penduduk terkait pendidikan, salah satunya mencakup minat baca penduduk. Data terkait jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 47 Jumlah Perpustakaan di Kota Balikpapan Tahun 2012-2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan 2021-2026

Jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan secara umum mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan jumlah perpustakaan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015, kemudian mengalami penurunan di tahun selanjutnya. Peningkatan jumlah perpustakaan pada tahun 2014 dan 2015 karena merupakan gabungan dari perpustakaan dan taman baca yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan data tahun 2016 hingga 2020 hanya memuat jumlah perpustakaan yang ada di Kota Balikpapan. Peningkatan jumlah perpustakaan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Kota Balikpapan.

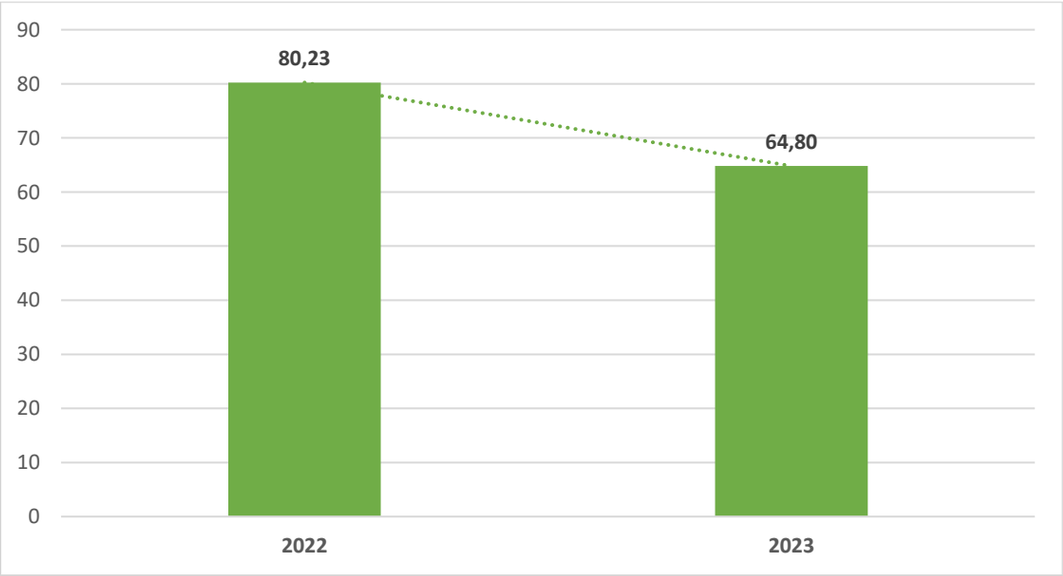
Sarana prasarana di Kota Balikpapan secara umum dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui bangunan sekolah, tenaga pendidik, maupun sarana penunjang seperti layanan perpustakaan. Namun penyesuaian sarana prasarana di Kota Balikpapan tetap perlu untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat usia sekolah di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dapat menjadi salah satu acuan untuk melihat kemungkinan penambahan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang.

2.3.2.2 **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat

(UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kota Balikpapan tahun 2022 dan 2023

Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan Tahun 2022-2023



Sumber: Perpusnas, 2024

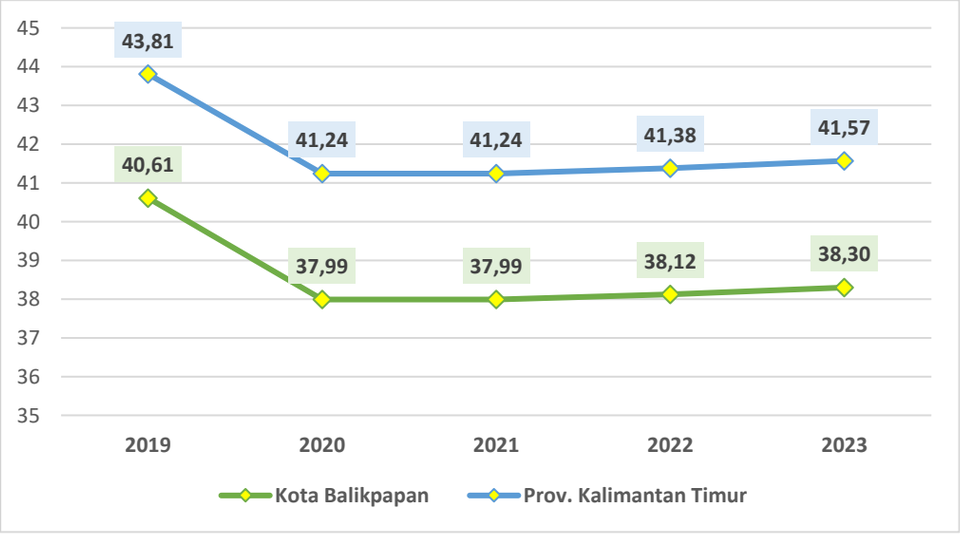
IPLM Kota Balikpapan mengalami tren yang menurun selama periode 2022 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dalam dua tahun terakhir, capaian IPLM Kota Balikpapan menurun sebesar 15,43 persen. kondisi ini perlu menjadi salah satu perhatian penting dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kota Balikpapan. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan meyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.3.2.3 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukan semakin

rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kota Balikpapan selama periode 2019 hingga 2023.

Gambar 2. 49 Angka Ketergantungan Kota Balikpapan tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

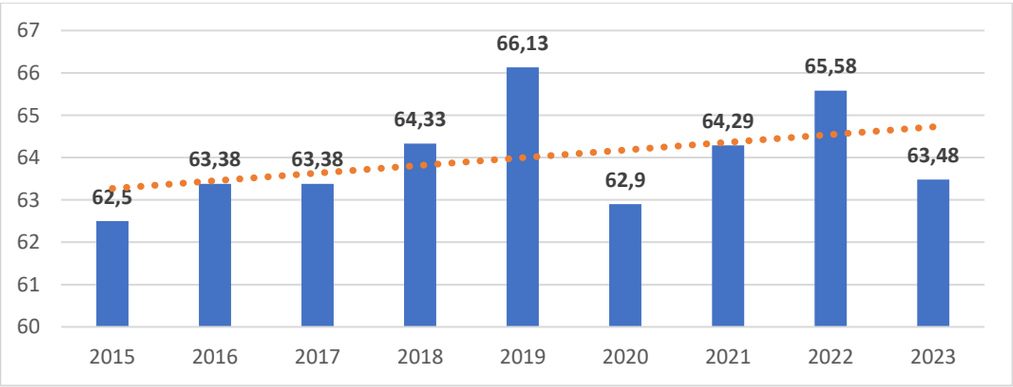
Rasio ketergantungan di Kota Balikpapan mengalami tren yang relatif menurun selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 2,31 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa setiap 100 orang dengan usia produktif memiliki tanggungan beban orang dengan usia non produktif yang relatif menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka rasio ketergantungan di Kota Balikpapan secara konsisten berada di bawah rata-rata rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, setiap 100 orang usia produktif di Kota Balikpapan memiliki tanggungan sekitar 38 orang dengan usia non produktif. Upaya pemberdayaan bagi usia non produktif menjadi salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan guna menekan rasio ketergantungan di masa yang akan datang.

2.3.2.4 Serapan Tenaga Kerja

Kualitas SDM di suatu daerah merupakan salah satu ceriminan dari kuailtas penyelenggaraan layanan dasar, khususnya bidang pendidikan. Serapan tenaga kerja menjadi salah satu indikator yang bisa menggambarkan bagaimana kualitas SDM di suatu daerah dapat diserap di dunia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang secara ekonomis telah mampu untuk dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dan berpotensi untuk dapat menjadi aktor produksi baik berupa barang maupun jasa.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang terserap oleh pasar kerja. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat serapan kerja di suatu daerah adalah indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini dapat menggambarkan seberapa banyak bagian dari tenaga kerja yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan produksi baik dalam bentuk barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. TPAK dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja). Berikut adalah capaian TPAK di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2022.

Gambar 2. 50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan Tahun 2015-2022



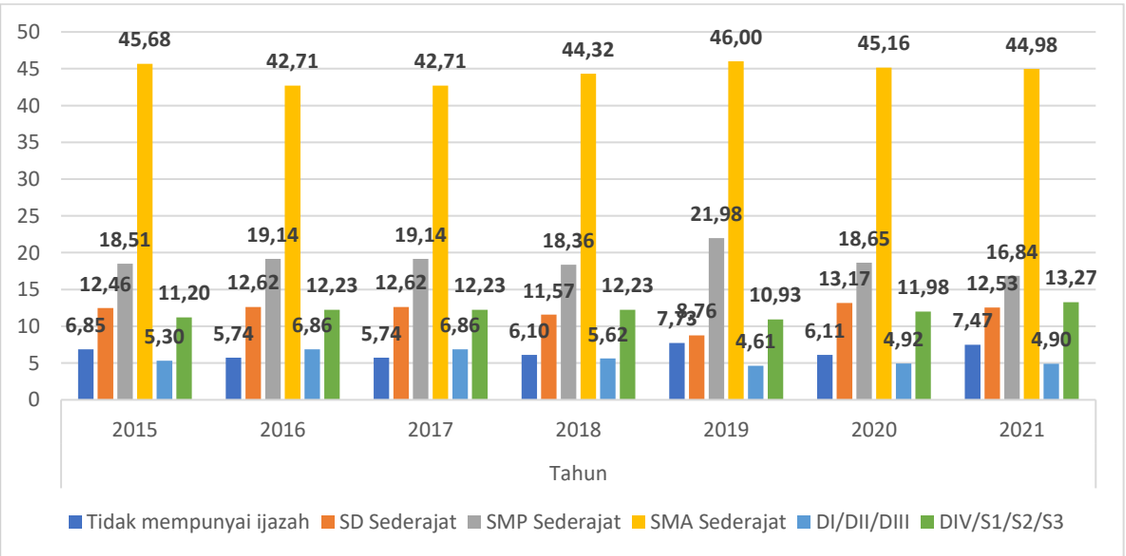
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2015 hingga 2023. Dalam kurun waktu 7 tahun TPAK Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 3,08 poin, walaupun kembali menurun pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPAK Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan, karena capaian tersebut masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Belum optimalnya capaian TPAK mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Balikpapan masih belum terserap secara optimal di pasar kerja. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian TPAK antara lain adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga sebagian penduduk usia kerja tidak terserap oleh lapangan usaha serta tidak sesuainya kualifikasi penduduk usia kerja dengan pasar kerja yang tersedia. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya fenomena yang positif terutama dalam bidang pendidikan. Rendahnya capaian TPAK juga bisa diartikan bahwa angka melanjutkan penduduk usia 15 tahun ke atas cukup tinggi sehingga mampu mengurangi jumlah kasus pekerja anak. Dalam artian, rendahnya capaian TPAK mengindikasikan banyaknya PUK yang

sedang menempuh pendidikan lanjutan alih-alih langsung memasuki dunia kerja.

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan SDM yang ungul. Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pendidikan menjadi salah satu input yang dapat memberikan perubahan terhadap kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut akan semakin baik. Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi cenderung memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Kondisi ini juga turut berdampak terhadap upah yang diperoleh sehingga berimplikasi pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Balikpapan Tahun 2015 hingga 2021.

Gambar 2. 51 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Balikpapan Tahun 2015-2021

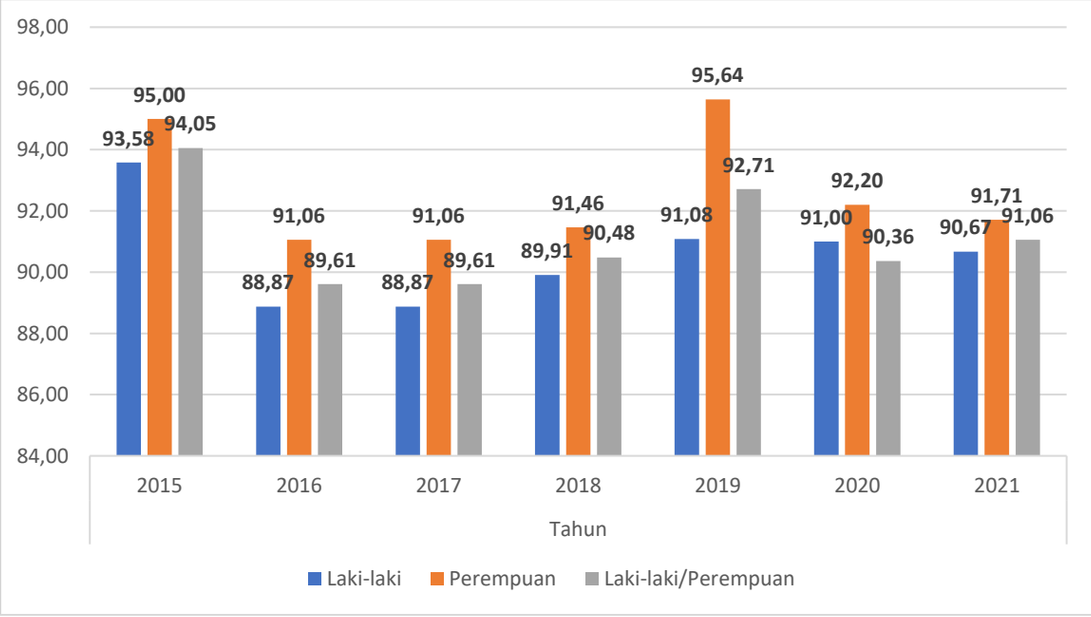


Sumber: BPS, Kota Balikpapan, 2023

Selama periode 2015 hingga 2021, penduduk usia kerja di Kota Balikpapan didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Selama tujuh tahun terakhir penduduk usia kerja dengan kualifikasi SMA sederajat mencapai angka 44,43 persen. Kondisi ini jauh lebih besar dibanding penduduk usia kerja dengan kualifikasi yang lainnya. Proporsi penduduk usia kerja terbesar kedua adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP dengan rata-rata 19,27 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan dan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) juga turut memengaruhi serapan tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut merupakan gambaran kondisi TKK di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2021.

Gambar 2. 52 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Balikpapan Tahun 2015-2021



Sumber: BPS, Kota Balikpapan, 2023

Kondisi TKK di Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2015 hingga 2021. Kondisi tersebut merupakan negasi dari angka TPT di Kota Balikpapan. Secara perhitungan, jika capaian TPT semakin meningkat maka kesempatan kerja akan menurun, dan sebaliknya jika TPT mengalami penurunan maka kesempatan kerja akan meningkat. Menurunnya angka kesempatan kerja di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2021 mengindikasikan penyerapan penduduk usia kerja di pasar kerja mengalami penurunan. Kondisi ini ini juga memiliki arti bahwa pada tahun yang sama tingkat pengangguran di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat karena kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

2.2.2 Daya Saing Infrastruktur

Daya saing infrastruktur menganalisis tentang penyelenggaraan pemerintah terhadap pemenuhan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Daya saing infrastruktur meliputi kondisi infrastruktur wilayah, transportasi, kelistrikan, air bersih, telekomunikasi, jalan, sanitasi, drainase serta perumahan dan permukiman.

2.3.3.1 Kondisi Infrastruktur wilayah

Kota Balikpapan yang memiliki konsep sebagai kota nyaman huni atau *liveable* city sesungguhnya merupakan representasi dari sebuah kota yang berkelanjutan (*sustainable city*), dengan harapan kualitas hidup masyarakat dapat dipertahankan dan meningkat. Selain itu, sebagai sebuah kota yang terus berkembang ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi fasilitas yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara khusus kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 berikut:

Tabel 2. 18 Nilai Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92
Penajam Paser Utara	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	**2,80**	4,94	3,42	**3,59**
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Konidisi Infrastruktur berdasarkan IDSD Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki nilai yang cukup baik pada Dimensi Lingkungan Pendukung, Pilar kedua infrastruktur memiliki nilai 2,80. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 2,41.

Infrastruktur wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal suatu wilayah yang akan menyokong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana tersebut mencakup ketersediaan prasarana transportasi, kelistrikan, air bersih/minum, dan telekomunikasi.

2.3.3.2 Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik secara nasional maupun regional. Konektivitas antarwilayah secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kinerja dan aksesibilitas perekonomian dan sosial masyarakat. Jaringan transportasi di Kota Balikpapan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan sungai, laut, dan udara.

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan nantinya akan menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Negera (IKN) membutuhkan jaringan jalan untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan negara di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 75,74 km, jalan provinsi 34,1 km, dan jalan yang dikuasai pemerintah kota 442,586 km. Panjang jalan dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 19 Panjang Jalan di Kota Balikpapan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Tahun 2021-2023

Tingkat Kewenangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Negara	45,660	35,350	75,74
Provinsi	31,610	31,610	34,1
Kabupaten/Kota	501,180	518,418	442,586
Jumlah	578,450	585,378	552,426

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2024

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2. 20 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan	1.047.289,25	1.112.503	1.142.552,25	1.133.855
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	2.992.255	3.178.580	3.264.435	3.527.657
3	Rasio	0,35	0,35	0,35	0,32

Sumber: DPU dan Dishub, Tahun 2024

Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang terus bertambah. Secara umum jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah mayoritas kendaraaan dibandingkan dengan kendaraan umum dan dinas yang ada di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 21 Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Tahun 2022

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Mobil Penumpang	**61503**	**13962**	**8758**	**84243**
Sedan	9006	2866	1831	13723
Station Wagon	28574	5294	2653	36521
Mini Bus	12221	3176	1382	16779
Jeep	11270	2495	2766	16531
Lain-lain	432	131	126	689
Mobil Bus	**13163**	**1139**	**713**	**15015**
Bus	907	595	217	1719
Micro Bus	12227	424	477	13128
Bus Bertingkat	-	-	-	-
Lain-lain	29	120	19	168
Mobil Barang	**38671**	**10443**	**5663**	**55457**
Pick Up	16519	1597	1082	19918
Deliver Van	2081	1058	711	3850
Truck	10106	4287	1877	16270
Tangki	5471	1337	805	7613
Double Cabin	3299	1898	1126	6323
Lain-lain	1195	266	62	1483
Sepeda Motor	**486709**	**32820**	**24898**	**544338**
Sepeda Motor Solo	435841	12628	11346	459815
Sepeda Motor dgn Kereta Samping	994	554	497	2045
Sepeda Motor Roda Tiga	89	-	-	-
Scooter	12969	9672	6450	29091
Trail	36422	9767	6327	52516
Lain-lain	394	199	278	871
Kendaraan Khusus	**548**	**420**	**347**	**1315**
Mobil Pemadam Kebakaran	155	137	147	439
Mobil Ambulance	233	104	106	443
Mobil Jenazah	99	99	49	247
Fork Lift	45	50	43	138
Lain-lain	16	30	2	48
Jumlah	**600594**	**58784**	**40379**	**700368**

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2022, BPS

Dalam hal penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota turun dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit. Penurunan ini disebabkan oleh rencana Dinas Perhubungan untuk meremajakan angkutan kota dan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). Namun, dari tahun 2016 hingga 2020, hanya ada 1 koridor SAUM yang ditambahkan, melayani jalur dari Pelabuhan Ferry Kariangau ke Terminal Batu Ampar. Rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,33% pada tahun 2016 menjadi 0,12% pada tahun 2020. Ini disebabkan belum tersedianya SAUM dan kurangnya angkutan kota.

Tabel 2. 22 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Kendaraan	553.528	572.976	588.911	610.819	637.531
Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan	0,33%	0,31%	0,30%	0,20%	0,12%

Sumber: Dishub, 2021

Pengembangan SAUM ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap sistem transportasi yang berkelanjutan, aman, terjangkau, dan mudah diakses untuk semua orang. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua yang berada dalam situasi rentan. Perencanaan Koridor SAUM masih berkaitan dengan rute angkutan kota, yang menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu, kondisi jalan yang curam dan kurang lebar membuat pengembangan moda transportasi publik sulit.

Seperti halnya dengan penyelenggaraan angkutan, perlengkapan jalan dan prasarana jalan juga tidak meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda tidak meningkat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan mewujudkan Kota yang Nyaman Dihuni dan *Smart City*, perlengkapan tersebut perlu diperkuat dalam beberapa tahun mendatang.

Tabel 2. 23 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Koridor	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal
SAUM	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar
Jumlah Halte SAUM	14	14	14	14	14
Jumlah Rambu	2.191	2.306	2.447	3.229	3.848
Jumlah ATCS	15	15	15	15	15
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Sumber: Dishub, 2021

Berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan menjadi pusat pengumpul utama untuk penerbangan domestik dan internasional dan sebagai pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun, Bandar Udara SAMS menunjukkan pertumbuhan yang tidak signifikan karena terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tahun 2016-2020

Penerbangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Internasional	76.595	45.320	56.802	59.002	8.870
Domestik	7.433.595	7.254.136	7.441.334	5.370.714	2.730.924

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggan turun menjadi 2.739.794 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak ahir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Tahun 2016-2020

Tahun	Penumpang turun (Jiwa)	Penumpang naik (Jiwa)
2016	169.393	149.077
2017	148.998	162.852
2018	251.304	206.026
2019	251.304	206.026
2020	93.038	86.606

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Lebih lanjut, jumlah penumpang angkatan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Data terkait arus penumpangtersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pengembangan transportasi di Kota Balikpapan.

2.3.3.3 Kelistrikan

Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan fasilitas publik yang ada. Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang berkembang di Pulau Kalimantan, kebutuhan listrik Kota Balikpapan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan yang menggunakan listrik terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan listrik yang meningkat. Produksi listrik pada tahun 2020 mencapai 1.088.423.119 KWh dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.504.787.490 KWh pada akhir tahun 2023.

Tabel 2. 26 Kondisi Penyediaan Listrik di Tahun 2019-2023

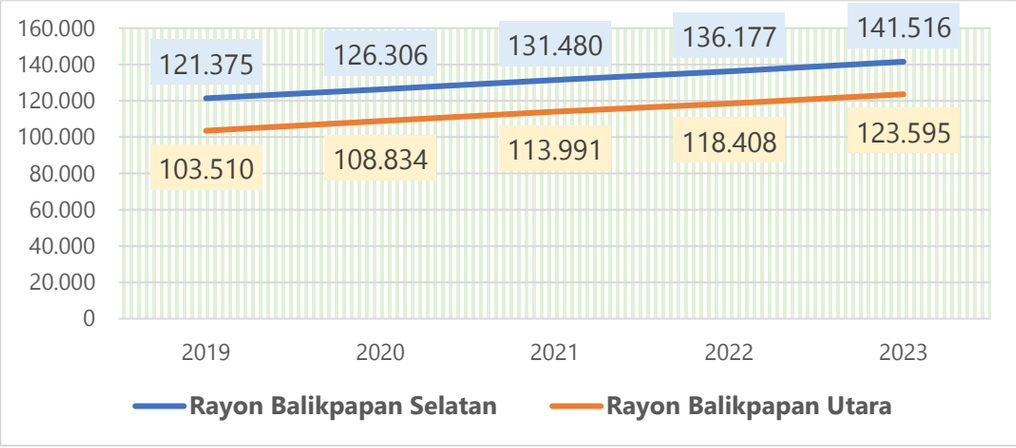
Indikator	Rayon	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (KW)	Rayon Balikpapan Selatan	299.155.000	360.275.022	377.332.522	406.911.372	427.407.322
	Rayon Balikpapan Utara	217.322.000	253.489.750	281.048.500	274.779.550	295.334.400
	Jumlah	**516.477.000**	**613.764.772**	**658.381.022**	**681.690.922**	**722.741.722**
Produksi Listrik (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	662.436.628	634.329.711	899.728.999	951.983.433	1.004.674.090
	Rayon Balikpapan Utara	434.424.564	454.093.408	537.338.515	500.577.809	500.113.400
	Jumlah	**1.096.861.192**	**1.088.423.119**	**1.437.067.514**	**1.452.561.242**	**1.504.787.490**
Listrik Terjual (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	631.029.632	604.699.529	607.878.878	661.337.148	748.359.797
	Rayon Balikpapan Utara	420.782.083	441.608.722	506.627.264	467.315.011	477.217.477
	Jumlah	**1.051.811.715**	**1.046.308.251**	**1.114.506.142**	**1.128.652.159**	**1.225.577.274**
Susut/ Hilang (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	31.407.266	29.630.182	34.315.267	38.876.299	43.366.397
	Rayon Balikpapan Utara	13.642.481	12.484.686	19.800.095	17.376.358	17.246.559
	Jumlah	**45.049.747**	**42.114.868**	**54.115.362**	**56.252.657**	**60.612.956**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah Pelanggan Listrik di wilayah Kota Balikpapan berdasar data PLN Area Balikpapan terdiri dari 2 Rayon yaitu Rayon Balikpapan Selatan dan Rayon Balikpapan Utara. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah pelanggan 2

rayon tersebut mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada gambar grafik berikut

Gambar 2. 53 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik rumah tangga mencapai 238.006, meningkat signifikan dari 204.281 pelanggan listrik rumah tangga pada tahun 2019. Jumlah pelanggan fasilitas publik juga meningkat pesat, mencapai 1.289 pelanggan pada tahun 2023, dari 1.089 pelanggan pada tahun 2019. Sektor bisnis juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya, rata-rata meningkat 1.331 pelanggan, dengan total 21.711 pelanggan pada tahun 2023.

Tabel 2. 27 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2019-2023

Kelompok Tarif	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	3.041	3.233	3.474	3.680	3.913
Rumah Tangga	204.281	213.850	222.361	229.500	238.006
Bisnis	16.388	16.859	18.385	20.064	21.711
Industri	86	85	87	91	94
Publik	1.089	1.113	1.164	1.222	1.289
Jumlah	**224.885**	**235.140**	**245.471**	**254.557**	**265.013**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Lebih lanjut, pada sektor industri pelanggan terdapat 94 pelanggan. Sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya, meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki 85 pelanggan. Melalui data ini, kelistrikan menjadi modal penting dalam merencanakan strategi pengembangan energi baru terbarukan yang telah menjadi tuntutan secara nasional.

2.3.3.4 Air Bersih

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air bersih tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk produksi, seperti digunakan untuk aktivitas bisnis.

Tabel 2. 28 Konsumen Air Bersih di Tahun 2023

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
Sosial	1.583	1.279.314	3.580.888.164
Rumah Tangga	109.069	24.840.419	272.615.673.691
Instansi Pemerintah	263	417.516	2.034.237.393
Niaga	4.913	1.936.764	27.630.525.218
Industri	14	11.891	215.626.657
Khusus	547	335.256	6.423.996.167
Jumlah	**116.389**	**28.821.160**	**312.500.947.290**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah pelanggan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 116.389 pelanggan. Total pelanggan tersebut didominasi pelanggan rumah tangga sebanyak 109.069 pelanggan dan niaga sebanyak 4.913 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 28.821.160m^3 dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 312.500.947.290.

2.3.3.5 Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian penting yang mendukung layanan komunikasi di suatu daerah. Pemerintah harus mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Malalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 80% pada tahun 2017 menjadi 83% pada tahun 2020.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	-	80%	85%	90%	83%
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	-	90%	90%	90%	84%

Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	-	80%	80%	80%	94%

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait telekomunikasi adalah perluasan jangkuan layanan telekomunikasi di Kota Balikpapan, di mana tidak ada *blank spot* di lokasi tertentu. Untuk memfasilitasi jangkuan telekomunikasi ini dapat dilihat dengan ketersediaan menara *base transceiver station* (BTS) yang ada di setiap kecamatan di Kota Balikpapan. Tabel di bawah menunjukkan jumlah BTS per kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana cakupan telekomunikasi tersebar di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 30 Jumlah BTS Menurut Kecamatan di Tahun 2021-2023

Kecamatan	Jumlah BTS 2021	Jumlah BTS 2022
Balikpapan Selatan	127	127
Balikpapan Kota	78	75
Balikpapan Timur	54	57
Balikpapan Utara	115	113
Balikpapan Tengah	53	52
Balikpapan Barat	33	33
Total	**460**	**457**

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2024

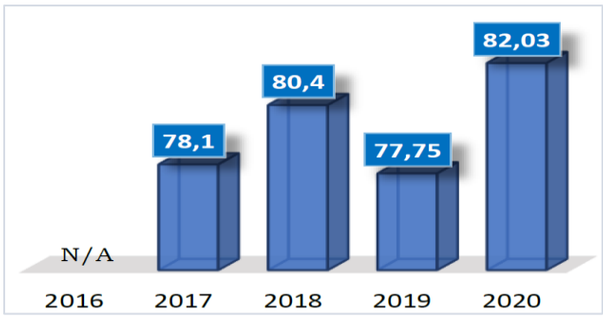
Data tersebut menunjukan persebaran BTS di Kota Balikpapan memiliki jumlah berbeda-beda. Dari 460 BTS yang tersebar di seluruh Kota Balikpapan pada tahun 2021, Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki jumlah BTS terbanyak yang mencapai 127 BTS. Sedangkan jumlah BTS paling sedikit berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan jumlah 33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hampir semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2022 jumlah BTS justru mengalami penurunan 3 BTS.

Meskipun jumlahnya mengalami penurunan, masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara yang dibutuhkan di Kota Balikpapan. Padahal ketersediaan BTS adalah bagian penting dari infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan yang diperlukan pengguna seluler di berbagai lingkungan dan kebutuhan.

Daya saing infrastruktur menganalisis tentang penyelenggaraan pemerintah terhadap pemenuhan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar kepada masyarakat di Kota Balikpapan. Infrastruktur dasar meliputi

penyelenggaraan jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan perumahan dan permukiman. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan, pada tahun 2015, realisasi indikator ini sebesar 73,4 lalu meningkat signifikan menjadi 80,40 pada tahun 2017 dan terakhir menjadi 82,03 pada tahun 2020. Secara umum capaian indikator IKLI Kota Balikpapan mengalami fluktuasi meskipun dalam tren yang meningkat pada akhir tahun perhitungan.

Gambar 2. 54 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 – 2020



Sumber: Bappeda Litbang, 2021

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,18 km, di mana kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survey oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalandi Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2023

Kualitas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km
Baik	396,58	95,39	288,95	268,99	365,31	344,947	322,279	137,584
Sedang	85,93	295,56	133,24	150,13	96,59	102,363	169,129	218,351
Rusak	18,66	58,60	30,55	54,44	38,91	53,870	27,240	24,297
Rusak Berat	-	51,63	48,44	27.61	0,38	-	-	62,561
Jumlah	501,18	501,18	501,18	501,18	501,18	501,180	518,648	442,793

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam angka 2024

Persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2020 adalah sebesar 92,16% atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,28%. Hal ini seiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Kinerja untuk penambahan ruas jalan baru diluar jalan kota, diukur dengan indeks aksesibilitas kawasan perkotaan yang dihitung berdasarkan panjang jalan terhadap luas kawasan perkotaan. Indeks aksesibilitas Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,415 dan mengalami peningkatan hingga akhir 2020 yaitu sebesar 1,475.

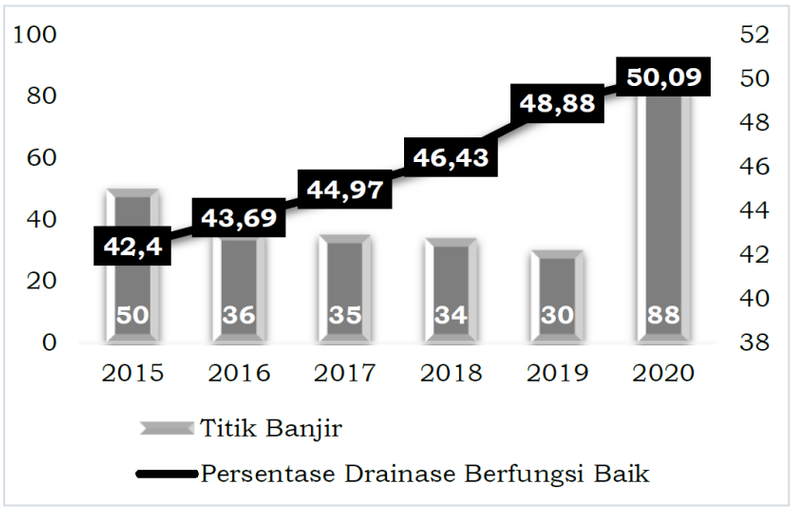
Tabel 2. 32 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
2016	-
2017	1,415
2018	1,427
2019	1,430
2020	1,475

Sumber: Dinas PU, 2021

Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaran urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pegelolana saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada *Masterplan* Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.

Gambar 2. 55 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



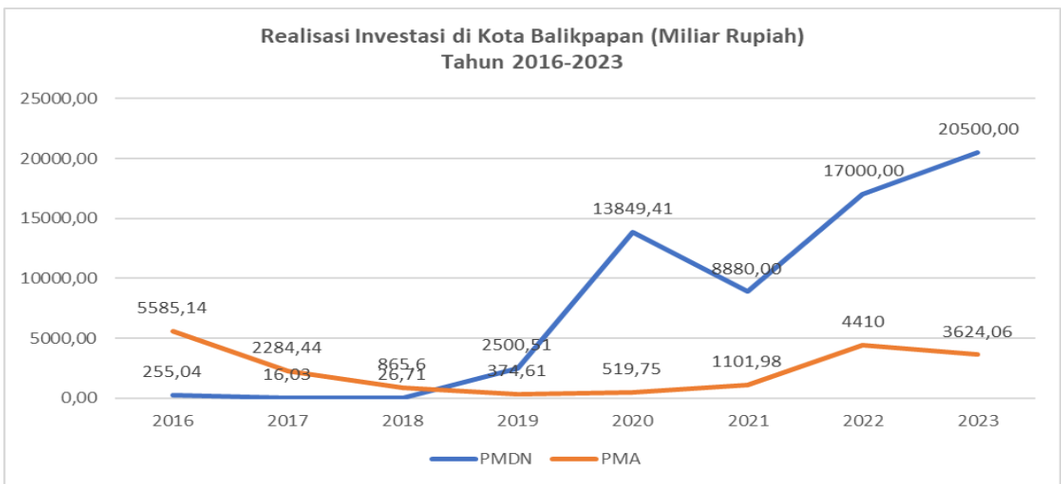
Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, terjadi peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Adapun titik banjir sesuai dengan *baseline* pada tahun 2015 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 titik dan menurun menjadi 30 titik pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

2.2.3 Daya Saing Iklim Investasi

Realisasi investasi di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi angka. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) cenderung mengalami tren peningkatan, sempat mengalami tren penurunan pada tahun 2021 karena dampak dari pandemi COVID-19, dan kembali meningkat pada tahun 2022-2023. Adapun penanaman modal asing (PMA) juga serupa mengalami penurunan pada tahun 2017-2019, kemudian meningkat pada tahun 2020-2022, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023. Salah satu hal yang mendongkrak investasi di Kota Balikpapan adalah keberadaan proyek IKN.

Gambar 2. 56 Realisasi Investasi di Kota Balikpapan (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2023



Sumber: DPMPT Kota Balikpapan (2023)

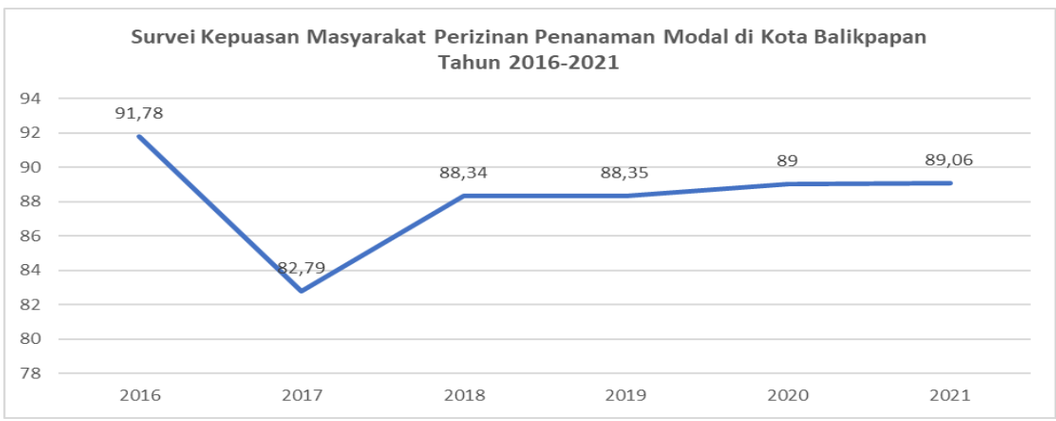
Berdasarkan sektor usahanya, kontribusi tertinggi terhadap investasi di Kota Balikpapan adalah sektor konstruksi. Selanjutnya sektor industri kimia dan farmasi yang berkontribusi tertinggi kedua terhadap investasi, dan di bawah sektor tersebut terdapat sektor pertambangan.

Realisasi investasi di Kota Balikpapan saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan

penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima, dan persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan. Tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal dihitung melalui jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya pada *platform* lkpmonline.go.id. Dalam kurun waktu 2016-2023, jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal terus meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, upaya untuk melakukan reformasi perizinan melalui digitalisasi perizinan secara daring dapat dilihat dari indikator persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara daring, yang dalam kurun waktu 2016-2023, tren realisasi indikator ini terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perizinan sudah semakin baik.

Namun demikian, pengelolaan perizinan yang telah menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik belum berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat yang masih fluktuatif. Berikut ini hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kurun waktu 2016-2021.

Gambar 2. 57 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kurun waktu 2016-2021



Sumber: DPMPT Kota Balikpapan (2021)

Selain daya tarik IKN, iklim investasi juga didukung sistem perizinan yang sudah direvitalisasi dan memanfaatkan digitalisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaku usaha wajib menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan realisasi investasi dilakukan melalui:

1. Pengembangan iklim penanaman modal melalui revisi Perda Insentif Penanaman Modal, penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Balikpapan, dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Balikpapan tahun 2022-2025.
2. Pengembangan promosi penanaman modal melalui pameran promosi investasi, *one-on-one meeting*, Temu Usaha Investasi (Temu Investor), dan pembuatan media promosi investasi Kota Balikpapan.
3. Peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal melalui fasilitasi kemudahan berusaha seperti Pelayanan Pendampingan *Online Single Submission* (OSS), fasilitasi investor dalam permasalahan penanaman modalnya *(debottlenecking)*, kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan: SiJempol (Sistem Jemput Bola Langsung) dan Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif yang memudahkan difabel dan lansia dalam mengajukan perizinan berusaha dengan proses jemput dan antar)
4. Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD, dan swasta.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Dimensi lingkungan pendukung IDSD ini terdiri dari empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, dan stabilitas ekonomi.

Tabel 2. 33 Indeks Daya Saing Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Penajam Paser Utara	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	2,80	4,94	3,42	**3,59**
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

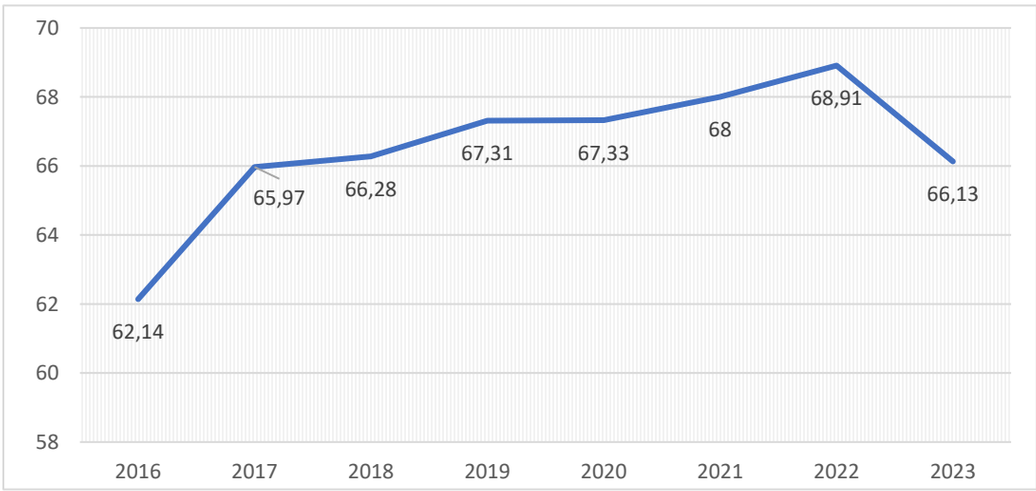
Berdasarkan tabel tersebut, IDSD Kota Balikpapan memiliki skor 3,59 atau berada di atas nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki daya saing daerah yang kuat dengan keunggulan terutama pada dimensi pendukung adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan dimensi institusi. Adapun pada dimensi pendukung infrastruktur masih perlu peningkatan, karena infrastruktur pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat pada suatu wilayah yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana tersebut mencakup ketersediaan prasarana transportasi, kelistrikan, air bersih dan air minum, dan prasarana pendukung lainnya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian yang menjelaskan terkait kondisi tata kelola pemerintahan suatu daerah. Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan sebagainya.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan good governance, dimana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif, efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan:

Gambar 2. 58 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Balikpapan Tahun 2016-2023



Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005 dan 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan mendapatkan predikat B pada tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 10,89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja reformasi birokrasi belum optimal yang ditandai dengan penurunan nilai RB pada tahun 2023. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen RB yang belum optimal. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain adalah Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Profesionalisme ASN. Capaian kinerja bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan pada periode sebelumnya akan dibahas secara mendetail di bagian selanjutnya.

Opini BPK merupakan hasil temuan atas permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini BPK merupakan tolok ukur akuntabilitas pemerintah terkait tingkat kewajaran dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Opini tertinggi yang diberikan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun capaian Opini BPK Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 34 Opini BPK Kota Balikpapan Tahun 2017-2023

Opini BPK	
Tahun	**Predikat**
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber: Bappeda dan Inspektorat Kota Balikpapan, 2024

Capaian Opini BPK Kota Balikpapan secara konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017 hingga 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan sudah akuntabel, wajar, dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan antara lain adalah penyusunan anggaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat, implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan capaian kinerja bidang tata kelola adalah nilai SAKIP. Indikator ini berbicara tentang bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan aktivitas pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai SAKIP secara jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mencapai target kinerja yang telah disusun pada awal periode tertentu dan kesesuaiannya dengan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian nilai SAKIP Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Nilai SAKIP Kota Balikpapan Tahun 2017-2023

Nilai SAKIP	
Tahun	**Predikat**
2017	66,19
2018	68,13
2019	68,68
2020	68,99
2021	69,28
2022	69,5
2023	68,75

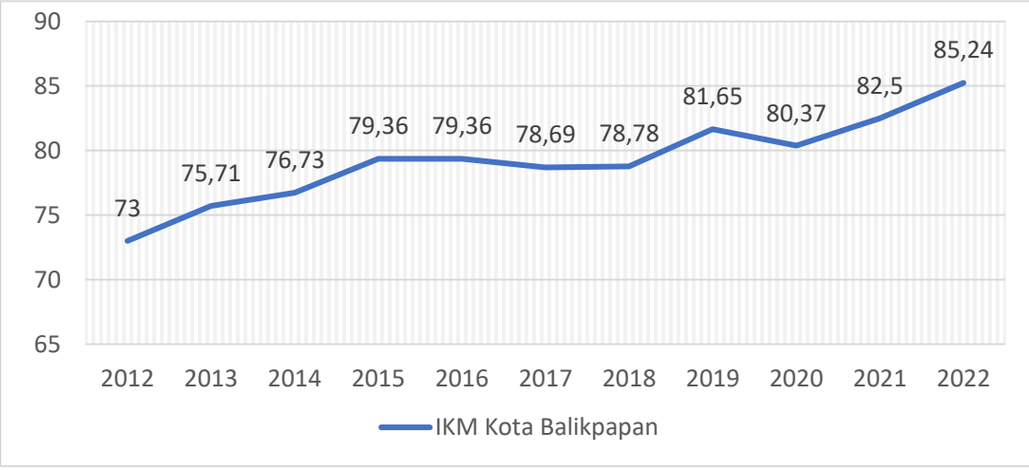
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, 2023

Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh predikat B sejak tahun 2017 hingga 2023. Meskipun demikian, terjadi penurunan nilai Sakip Daerah tahun 2023 yang kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya nilai RB. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan bidang tata kelola selanjutnya, yakni menjalankan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, kualitas indikator kinerja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme *cascading* kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi. Dengan demikian, pemantapan kualitas penataan kelembagaan berbasis hasil perlu secara progresif dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi pemerintah. Indikator ini juga dapat menjadi bahan penilaian atas unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi acuan untuk penetapan kebijakan selanjutnya. Sumber data Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari hasil survey berdasarkan beberapa komposisi pelayanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. 59 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2012-2022

Sumber:

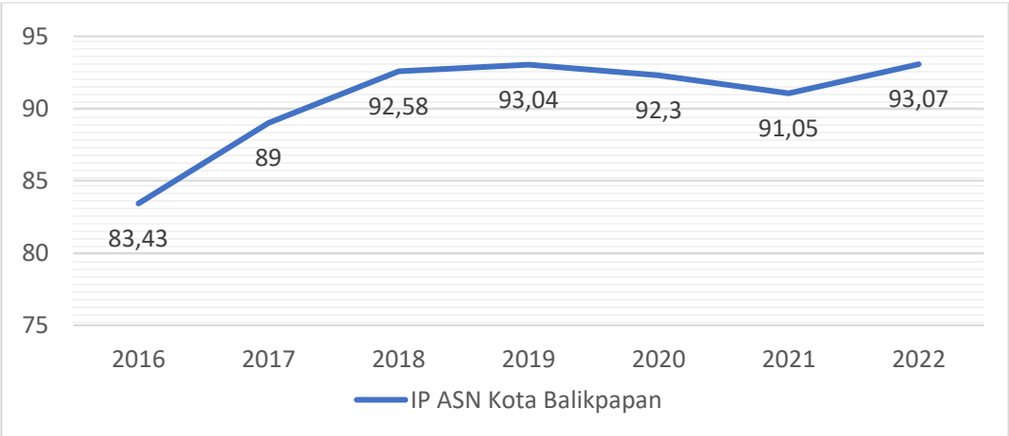


Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga 2022, dengan rata-rata capaian 79,21. Capaian ini sempat menurun sebesar 1,28 poin pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memegaruhi pelayanan publik (LKJIP Kota Balikpapan, 2020). Adapun persentase peningkatan IKM antara tahun 2012 dan 2022 mencapai 16,76 persen. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan guna memastikan pelayanan yang menjawab permasalahan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN). Indikator ini mengukur tingkat kompetensi dan kualitas pelayanan aparatur sipil pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran IP ASN memperhatikan tiga dimensi, yaitu dimensi kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Sasaran utama dari IP ASN ini adalah peningkatan kompetensi dan iklim kerja aparatur melalui evaluasi kinerja secara berkala. Adapun capaian Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 60 Indeks Profesionalisme ASN Kota Balikpapan Tahun 2016-2022



Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan, 2023

Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 11,55 persen pada tahun 2016 hingga 2022. Perolehan IP ASN tertinggi dicapai pada tahun 2022, meskipun trennya cenderung menurun sejak tahun 2020. Meski demikian, capaian pada periode tersebut tetap konsisten pada kategori tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mempertahankan raihan ini adalah praktik pengawasan daerah secara komprehensif serta adanya kebijakan *reward* (Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan, 2022). Namun, peningkatan kompetensi SDM terkait integrasi satu data dengan sistem BKN masih perlu dioptimalkan guna mencapai hasil yang lebih baik di periode yang akan datang.

2.4 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap hasil RPJPD menggambarkan sejauh mana realisasi antara sasaran pokok daerah dengan capaian sasaran RPJMD periode sebelumnya serta realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Hasil evaluasi RPJPD periode yang lampau juga digunakan untuk memastikan bahwa penetapan arah pembangunan jangka panjang periode selanjutnya dapat menyesuaikan capaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, baik yang berdasarkan arah kebijakan dan juga misi daerah, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2. 36 Hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 Berdasarkan Arah Kebijakan Periode Perencanaan Kedua dan Ketiga (RPJMD Tahap II dan III)

Periode Perencanaan	:	RPJMD Tahap II (2011-2016)
Arah Kebijakan	:	Diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK, kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan, pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya, pengelolaan potensi daerah, pembangunan infrastruktur, pemerataan sarana dan prasarana daerah, penataan ruang dan lingkungan hidup serta upaya mitigasi bencana.
Uraian Pencapaian	:	Kinerja periode kedua RPJPD sebagai berikut: • Pembangunan sumber daya manusia memiliki kinerja baik yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia memiliki capaian 78,57 pada 2016. Kondisi ini merupakan peningkatan dibanding dengan akhir periode pertama yang memiliki capaian 76,02 pada tahun 2011. Beberapa faktor pendorong capaian ini, antara tercapaianya kinerja peningkatan angka harapan hidup yaitu 73,96 dari target 73,95 dan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 10,54 dari target 10,43 pada tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja pembangunan sumber daya manusia Kota Balikpapan belum melampaui kinerja Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki nilai IPM 78,91 pada tahun 2016. • Kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan capaian angka kemiskinan pada periode kedua ini masih fluktuatif. Angka kemiskinan mengalami penurunan atau kinerja yang baik dalam beberapa tahun, yakni 3,39 pada 2011 menjadi 2,46 pada 2014. Namun angka kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 2,91 meskipun kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 2,81. Capaian kinerja aspek kesejahteraan ini memiliki sifat anomali, karena salah satu penyebab dari kemiskinan, yaitu angka pengangguran justru mengalami penurunan. Angka pengangguran konsisten mengalami penurunan, yaitu mulai 2011 sebesar 12,14 menjadi 5,95 pada 2016. Namun, angka kemiskinan yang fluktuatif selaras dengan ketimpangan pendapatan yang semakin naik atau memiliki kinerja yang memburuk, yaitu 0,28 pada 2011 menjadi 0,34 pada 2016. • Pembangunan perekonomian yang ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif sepanjang periode kedua RPJPD yang memiliki rata-

		rata pertumbuhan sebesar 0,06%. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian yang fluktuatif dan cenderung menurun. Adapun sektor-sektor yang terkait perekonomian masyarakat, antara lain kontribusi sektor pertanian pada perekonomian mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2011 hingga 2016. • Tata kelola pemerintahan pada periode kedua telah menunjukkan kinerja perbaikan, terutama dari aspek akuntabilitas kinerja, keuangan dan kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP meskipun masih berada pada kategori B, namun menunjukkan peningkatan, yakni 55,19 pada 2015 menjadi 60,85 pada 2016. Sedangkan opini BPK Kota Balikpapan konsisten dengan capaian WTP mulai tahun 2012. Kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan nilai IKM juga sesuai dengan target pada tahun 2016, yakni sebesar 79,36.
Periode Perencanaan	**:**	**RPJMD Tahap III (2016-2021)**
Arah Kebijakan	:	Diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang lebih baik. Fokus pembangunan memiliki orientasi pada perwujudan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka.
Uraian Pencapaian	:	Kinerja periode ketiga RPJPD sebagai berikut: 1 Kinerja pembangunan sumber daya manusia memiliki capaian yang baik pada akhir periode ketiga. Kota Balikpapan memiliki IPM sebesar 80,71 pada tahun 2021. Capaian tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 80,01 sekaligus peningkatan dari akhir periode kedua. Kinerja ini ditopang derajat kesehatan masyarakat yang meningkat yang ditandai oleh realisasi kinerja angka harapan hidup sebesar 74,76 pada tahun 2021. Selain itu, didukung meningkatnya akses pendidikan yang ditandai dengan kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 10,91 yang telah melampaui dari targetnya pada 2021 sebesar 10,53. Meskipun demikian, kinerja pembangunan sumber daya manusia Kota Balikpapan tersebut belum melampaui kinerja Kota Samarinda yang memiliki IPM sebesar 80,76.

		2 Aspek kesejahteraan masyarakat belum optimal di dalam periode ketiga RPJPD. Angka kemiskinan bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Hal ini menjadi persoalan umum terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi kemiskinan pada akhir periode ketiga lebih tinggi dibanding akhir periode kedua, yakni 2,89 pada tahun 2021 dan 2,81 pada tahun 2016. Angka kemiskinan yang fluktuatif selaras dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran bahkan pernah mengalami peningkatan sebelum pandemi, yaitu dari 5,55% pada 2017 menjadi 9,27% pada 2018. Tingkat pengangguran pada akhir periode ketiga lebih tinggi dibanding akhir periode kedua, yakni 8,94% pada 2021 dan 5,95% pada 2016. 3 Kinerja perekonomian Kota Balikpapan bersifat fluktuatif, dan pernah mengalami penurunan sebelum pandemi Covid-19, yakni dari tahun 2016 sebesar 4,92 menjadi 3,84 pada 2017. Penurunan tajam menjadi -0,93 terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Kota Balikpapan mengalami *recovery* cukup signifikan yang ditandai naiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 4,56. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada tahun 2021, yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. 4 Tata kelola pemerintahan memiliki kinerja yang baik ditandai dengan kinerja reformasi birokrasi yang semakin meningkat. Kinerja reformasi birokrasi ditopang dari beberapa aspek yang mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, kualitas pelayanan publik, sistem pengendalian intern dan profesionalitas aparatur. Meskipun demikian, terdapat capaian yang belum sesuai dengan targetnya, yakni SAKIP yang pada 2021 ditarget memiliki nilai 75 dengan kategori BB, namun realisasinya masih 69,28 dengan kategori B. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas manajemen kinerja mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sumber: Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Balikpapan

Secara keseluruhan, gambaran capaian perekonomian Kota Balikpapan yang disajikan pada tabel diatas belum cukup kuat untuk mencapai daya saing, kemandirian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi, namun juga fluktuasi perekonomian sebelum

pandemi. Capaian tersebut meningkat menjelang akhir periode RPJPD 2005-2025 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Meski demikian, capaian tersebut berdampak kecil terhadap penurunan angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam dengan arah kebijakan yang lebih mengoptimalkan daya saing dan keunggulan Kota Balikpapan sebagai kota industri pengolahan dan perdagangan yang sebenarnya cukup kuat.

Tabel 2. 37 Hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 Berdasarkan Misi Daerah Periode Perencanaan Kedua dan Ketiga (RPJMD Tahap II dan III)

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah konflik masyarakat yang disebabkan isu SARA			0	0	0	0	100%	100%		Koordinasi yang baik antara PD dengan *stakeholder* serta elemen masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas kota	- Peningkatan koordinasi antar satakeholder yang terlibat dalam mewujudkan kondusifitas wilayah - Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam mengakses informasi
												Pemanfaatakan TIK dalam mengakses informasi	
												Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerinta dengan partai politik, ormas, serta	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												elemen maysrakat lainnya	
												Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan stuasi yang kondusif	
	Meningkatnya derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			73,95	74,04	73,96	74,76	100%	100,97 %	Belum meratanya akses terhadap pengetahuan dan informasi terkait penanganan ibu hamil;	Tersedianya puslesmas dan tenaga pendamping di setiap kelurahan;	- Peningkatan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan - Peningkatan kualitas tenaga kesehatan - Optimalisasi kerjasama dengan lembaga pendidikan yang fokus terhadap dunia kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100	100	95,99	97	95,99 %	97,00%	Masih terhambatnya upaya penanganan medis terhadap ibu hamil;	Terdapat rumah sakit khusus ibu dan anak;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		kesehatan ibu hamil											
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			100	100	95,13	97	95,13 %	97,00%	Belum optimalnya akses terhadap pengetahuan dan informasi terkait penanganan bayi;	Aksesibilitas kota yang terjangkau;	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100%	100%	99,17 %	83%	99,17 %	83,00%	Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan;	Tenaga masyarakat yang supportif;	
											Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.	Tersedianya sekolah kejuruan kesehatan.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkanya cakupan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah			10,43	10,53	10,54	10,91	101%	103,61 %	Masih terdapat guru yang belum bersertifikat pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs;	Optimalisasi pelatihan IT;	- Peningkatan dan pemerataan fasilitas layanan pendidikan - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Angka Melek Huruf			98,49	99,5	99,34	100	99,14 %	99,50%	Masih terbatasnya kompetensi guru khususnya dalam bidang pemanfaatan teknologi;	Ketersediaan sekolah swasta yang berkualitas;	
											Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;	Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Belum optimalnya pengelolaan DAPODIK.	Pemberian dukungan terhadap siswa baru di sekolah swasta.	
	Meningkatnya pembinaan terhadap keanekaragaman budaya secara partisipatif	Jumlah budaya dan seni yang berciri khas Kota Balikpapan			14 tarian	N/A	N/A	N/A	-	-			
					14 lagu				-	-			
	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Persentase pemakaian alat kontrasepsi			66	67,5	65,5	70,3	99,24 %	104,15 %	Penolakan penggunaan KB karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama;	Adanya peran penyuluh keluarga berencana yang melibatkan penyuluh agama;	- Optimalisasi peran penyuluh Keluarga Berencana - Optimalisasi KIE kepada masyarakat - Peningkatan dan pemerataan kualitas peelayanan KB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet			15,83 %	14,05 %	15,83 %	14,29 %	100%	102%	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengaturan	Edukasi terhadap calon pasangan pengantin tentang pentingnya program KB;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)									jarak kelahiran anak;		
											Masih terbatasnya ketersediaan layanan;	Optimalisasi KIE kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan KB;	
											Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan KB.	Peningkatan kualitas pelayanan KB.	
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi kepemudaan			65	50	45	N/A	69,23 %	-	Belum efektifnya penerapan regulasi tentang kepemudaan;	Sosialisasi dan penerapan regulasi terkait kepemudaan secara masif;	- Peningkatan kualitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan - Peningkatan kualitas pembinaan terhadap atlet - peningkatan
		Jumlah prestasi olahraga			43	40	27	N/A	62,79 %	-	Belum optimalnya pembinaan atlet;	Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga;	Optimalisasi pembinaan terhadap atlet	ketersediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga
											Belum efektifnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.	Tersusunnya masterplan keolahragaan Kota Balikpapan.	
	Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender			90,1	92	N/A	89,65	-	97,45%	Belum optimalnya penyelesaian penanangan korban kekerasan perempuan dan anak;	Peningkatan kesempatan bagi kelompok perempuan;	- Penguatan regulasi terkait peran perempuan dalam pembangunan - Optimalisasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
		Persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan			35,87	75,01	35,87	75,53	100%	100,69 %	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak;	Implementasi regulasi terkait pelaksanaan PUG dalam pembangunan;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		terhadap perempuan											
		Persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak			34,9	65,15	34,92	N/A	100%	-	Belum optimalnya kelembagaan PUG baik tingkat kota maupun perangkat daerah;	Adanya pedoman penyusunan data pilah gender;	
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan			1	1	1	1	100%	100%	Belum tersedianya data pilah gender;	Terbentuknya UPT perlindungan perempuan dan anak;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah			30	30	22,22	20	74,07 %	66,67%	Belum optimalnya keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif.	Terbentuknya seksi perlindungan perempuan dan anak di tingkat RT.	
	Menurunnya angka penganggura n	Tingkat Pengangg uran Terbuka			6	4,6	5,95	8,94	100,83 %	5,65%	Keterbatasan lapangan kerja;	Terdapat banyak perusahaan untu penyaluran tenaga kerja;	- Penguatan kualitas SDM/lembaga pelatihan tenaga kerja -Peningkatan dan pemetaan kebutuhan lapangan kerja
											Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja;	Penguatan SDM pemberi pelatihan tenaga kerja	
											Belum optimalnya pelaksanaan program magang;	Penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi dan kebutuhan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Belum optimalnya pembinaan terhadap para pencari kerja;	Pemetaan kebutuhan lapangan kerja	
											Belum optimalnya pemanfaatan sistem pemetaan angkatan kerja.	Optimalisasi pembinaan terhadap angkatan kerja.	
	Menurunnya angka penduduk miskin	Persentase penduduk miskin			2,35	2,3	2,81	2,89	74,35 %	80,42%	Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah;	Optimalisasi implementasi regulasi tentang penanggulangan kemiskinan	-Optimalisai peran stakeholder dalam penanganan kemiskinan -Peningkatan koordinasi dalam penanganan kemiskinan
											Belum optimalnya pendataan	Adanya SOP terkait verifikasi dan validasi DTKS	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											dan verivali DTKS.		
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah wahana sosial berbasis masyarakat (WKBSM)			15 kelompok	N/A	N/A	N/A	-	-			
Misi 2 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai	Meningkatnya jaringan perhubungan darat, laut dan udara yang terintegrasi baik di lingkungan internal Kota Balikpapan maupun yang menghubungkan Kota Balikpapan	Persentase Kemantapan Jalan			66,97 %	81,14 %	96,28 %	85,11 %	143,77 %	104,89 %	-	Tersedianya data terkait informasi jalan dan jembatan yang akurat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu Adanya Pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan	-Penyediaan data akurat mengenai jalan dan jembatan harus terus dilaksanakan -Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan perlu untuk terus dilaksanakan secara berkala untuk memastikan terjaganya kualitas jalan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	dan sekitarnya											sebagai infrastruktur pendukung bagi pembangunan kota Balikpapan. Pengembangan pelabuhan sebagai sarana perhubungan laut Adanya dukungan dari pemerintah Pusat mengembangkan kawasan industri Kariangau	dan jembatan - Optimalisasi penyediaan kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan -Optimalisasi penyediaan infrastruktur pendukung lainnya
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah			4,43 %	4,17%	4,56%	2,76%	97,07 %	133,81 %	Tingginya *backlog* perumahan	Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sistem drainase di kawasan permukiman kumuh	- Peningkatan pencegahan dan penangan kawasan kumuh - Optimalisasi fasilitasi penyediaan rumah layak huni
											Adanya migrasi yang tidak diimbangi	Adanya penataan ruang seperti pembangunan taman	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											dengan penyediaan lahan untuk perumahan		
											Terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati suatu rumah untuk lebih dari satu keluarga		
	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan distribusi penyediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Minum			77,00 %	80,80 %	78,40 %	98,21 %	101,82 %	12,.55 %	Penurunan kualitas air permukaan, dan fluktuasi terhadap eksploitasi air tanah	Pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang tepat dalam penyediaan data dan informasi yang valid terkait kondisi pemerataan cakupan air minum	-Penyediaan air minum tidak hanya diarahkan pada air minum layak tetapi juga air minum yang aman-optimalisasi layanan PDAM

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh pelaku usaha	Adanya strategi mewujudkan clean air dengan kebijakan penurunan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan	
											konversi lahan resapan air menjadi lahan terbangun	Adanya perpindahan dari sumur bor ke air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air	
	Meningkatnya Sumberdaya Energi yang ramah lingkungan	Rasio Elektrifikasi			N/A	N/A	N/A	100	-	-	Sasaran ini belum dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam dokumen RPJMD. Lebih dari	-	-Pada periode perencanaan selanjutnya, penentuan sasaran harus disertai dengan indikator sasaran dan definisi
		Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)			N/A	N/A	435,5	N/A	-	-		-	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											itu, sejak diterbitkannya UU 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota terhadap urusan ESDM semakin terbatas.		operasional yang jelas
	Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang			85%	99%	98%	99%	115%	100%	Masih adanya pembangunan di kawasan hijau	Adanya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen tata ruang Adanya strategi dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang	- Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang - Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												dilakukan pemerintah dengan baik	
												Peningkatan Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Lingkungan	
	Meningkatnya Sanitasi Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			97,15 %	97,00 %	93,00 %	96,79 %	95,73 %	99,78%	Buruknya sanitasi di wilayah padat penduduk	Adanya pengembangan sarana sanitasi IPAL komunal dan sanitasi individu	-Peningkatan penyediaan sanitasi layak dan aman -Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sanitasi layak dan aman
											Adanya penolakan karena pola pikir masyarakat tentang IPAL yang nantinya akan	Adanya hibah dalam pelaksanaan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											mengeluarkan bau		
											Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi	Dilakukannya sosialisasi berkesinambungan akhirnya masyarakat sadar akan pentingnya sanitasi di lingkungan	
Misi 3: Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berkelanjutan	Mempertahankan pola ruang 52% hijau dan 48% budidaya	Perda Tata Ruang			N/A	3	N/A	2	-	66,67%	Belum merealisasikan regulasi terkait insentif dan disinsentif Belum menerapkan konsep kota ekologis secara utuh Belum adanya pembaruan		- Pembuatan regulasi terkait insentif dan disinsentif - Penerapan konsep kota ekologis secara lebih holistik - Pembaruan data peta tata ruang - Memperket kebijakan alih fungsi lahan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											data peta tata ruang Adanya alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif		
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota	Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang			90%	98.50 %	90%	99%	100%	100,51 %		Pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan telah berjalan secara tertib dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan	- Peningkatan pemanfaatan ruang secara lebih tertib dan berkelanjutan - Peningkatan pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW - Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mendukung keamanan, ketenteraman, dan ketertiban
		Penurunan Angka Kriminalitas			N/A	17%	N/A	18,50 %	-	108,82 %		Pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam RTRW mengenai ketersediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												dan Kawasan Budidaya	umum - Peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan politik masyarakat melalui sosialisasi, diskusi, dsb.
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			62.50 %	100%	90%	88.62 %	144%	88,62%		Pentingnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum	
		Tingkat Waktu Tanggap			N/A	98.63	N/A	92.86	-	94,15%		Kesadaran politik masyarakat telah meningkat	
		Angka Partisipasi Pemilu			70%	65%	70%	82%	100%	126%			
	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	Indeks Liveable City (Indeks Kota			71.12	74.5	N/A	78.48	-	105,34 %	Masih terbatasnya data berdasarkan nama dan	Optimalisasi penyediaan hunian yang layak	- Peningkatan penyediaan Rumah Layak Huni dan pendataan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Layak Huni)									alamat dari Rumah Tidak Layak Huni serta kawasan permukiman kumuh		Rumah Tidak Layak Kuni - Pembebasan lahan dan pembangunan embung - Peningkatan ketersediaan sarana pengolahan air limbah terpusat - Peningkatan lahan TPA
											Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung	Tersusunnya Rencana Pemenuhan Air Baku Regional	
											Keterbatasan sarana pengolahan air limbah terpusat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman	Meningkatnya penyediaan air bersih	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA			80%	60.91 %	63.02 %	74.85 %	78,78 %	122,89 %	Terbatasnya lahan TPA	Meningkatnya penyediaan listrik.	
												Meningkatnya penyediaan sanitasi lingkungan	
												Pengelolaan sampah terpadu dimulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah	
	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			58.58	60.46	62.45	69.66	106,61 %	115,22 %	Pengupasan lahan yang tidak terkendali	Koordinasi pendampingan teknis dan pendampingan lintas OPD disetiap	- Peningkatan koordinasi pendampingan teknis dan pendampingan lintas OPD

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												permohonan izin investasi	- Penindakan terhadap usaha ilegal di daerah aliran sungai - Peningkatan kapasitas drainase - Peningkatan kualitas air sungai dan laut; udara; dan tutupan lahan
											Usaha ilegal di daerah aliran sungai	Perbaikan dan peningkatan kualitas air sungai	
											Berkurangnya kapasitas drainase	Perbaikan dan peningkatan kualitas air laut	
												Perbaikan dan peningkatan kualitas udara	
												Perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan	
Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatnya potensi ekonomi yang berbasis masyarakat	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)	7,24	N/A	0,98	N/A	0,98	0,99	100%	-	a. Semakin menurunnya luas lahan pertanian;b. Menurunnya produksi pertanian;c. Produksi dan	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik.	-Peningkatan produksi dan pemasaran produk UKM'-Fasilitasi modal dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan
		Jumlah usaha	5.374	N/A	15.145	N/A	18.025	40.689	119%	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		mikro dan kecil (Unit)									pemasaran produk UKM belum optimal;d. Kualitas SDM pengelola, modal dan inovasi koperasi belum optimal.		UKM'-Penerapan inovasi dalam koperasi dan UKM
		Persentase koperasi yang aktif (Persen)	61,63	80,9	78,7	80,9	77,22	87,86	98%	109%			
	Berkembangnya ekonomi riil masyarakat yang inovatif dan kreatif	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (Persen)	-10,98	N/A	47,94	N/A	47,53	46,63	99%	-	a. Nilai produksi dan pemasaran produk perindustrian belum optimal; b. Daya tarik destinasi wisata, pemasaran dan pengembangan kerjasama	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik; b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan; c. Semakin mudahnya akses distribusi barang pokok dan barang	-Peningkatan nilai produksi dan pemasaranan produk perindustrian -Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui kerjasama
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Persen)	17,86	N/A	12,44 Triliyun	N/A	8,78	9,22	-	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Kontribusi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya terhadap PDRB (Persen)	71,78	N/A	N/A	N/A	6,88	7,31	-	-	pariwisata masih perlu ditingkatkan.	penting; d. Pembangunan perkotaan yang semakin mengarah ke sektor jasa.	
		Kunjungan wisatawan (orang)	381.262	2.488.535	468.298	2.488.535	2.253.943	1.082.273	481%	43%			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap	8,97	N/A	N/A	N/A	0,0176	0,0175	-	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		PDRB (Persen)											
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daera	Nilai investasi (Rp Triliyun)	9.210,74 (Miliar)	N/A	25	N/A	0,5	1,9	2%	N/A	a. Kapasitas produksi dan pemasaran produk non-migas perlu ditingkatkan; b. Identifikasi investasi dan promosi investasi perlu ditingkatkan.	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik; b. Peningkatan kondusivitas investasi; c. Pembangunan perkotaan yang semakin mengarah ke sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.	-Identifikasi potensi investasi daerah -Pelayanan perizinan berbasis TIK dan terintegrasi
		Nilai PDRB Non-migas (Rp Triliyun)	N/A	38,62	99,97	38,62	34,12	38,62	34%	100%			
	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Daerah dan terpenuhinya kebutuhan teknologi aplikatif	PDRB perkapita (Rp Juta)	99,92	126,64	N/A	126,64	80,2	111,31	-	88%	a. Nilai produksi dan pemasaran produk perindustrian belum optimal; b. Pengembang	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik.	-Pengembangan sektor-sektor potensial dan unggulan ekonomi daerah

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											an sektor perindustrian (IKM), perdagangan, pariwisata, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan.		
Misi 5 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata pemerintahan yang Baik	Menata kelembagaan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			79,36	80,36	79,36	82,5	100,00 %	102,66 %	Penggunaan pelayanan daring oleh masyarakat belum optimal;	Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik sudah berjalan	-Pemanfaatan TIK dan inovasi dalam pelayanan publik -Integrasi pelayanan publik -Sosialisasi bentuk pelayanan publik baru kepada masyarakat
											Adanya perubahan peraturan;	Implementasi inovasi dalam pelayanan publik	
											Belum seluruh pelayanan terintegrasi secara online		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Daerah			B (65-67)	BB (75)	B (60,85)	B (69,28)	90,82 %	92,37%	Kinerja PD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)	Cascading kinerja sudah dilakukan sampai pada level organisasi terkecil	-Perumusan indikator kinerja yang SMART-C -Peningkatan kualitas laporan melalui analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap faktor-faktor yang penghambat dan pendorong kinerja -Penyusunan pohon kinerja dan peta proses bisnis
											Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART-	Pemetaan crosscutting lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan	
											Penjabaran kinerja belum dilakukan secara baik sampai ke PD		
											Kualitas penyusunan laporan belum baik	Pemerintah daerah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
											Belum menggunakan hasil evaluasi		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											kinerja sebagai bahan perbaikkan kinerja		
	Meningkatnya kualitas kemitraan antar daerah, lembaga dan kerja sama luar negeri	Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti			N/A	100	N/A	88	-	88,00%	Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah kota dengan pusat maupun provinsi		Peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pembangunan daerah
											Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta		
	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pemerintah Kota	Indek Profesionalitas ASN			82	87	83,43	92,05	101,74 %	105,80 %	Integrasi data kepegawaian belum optimal;	Pengawasan internal tingkat daerah sudah baik	-Peningkatan integrasi data kepegawaian -Peningkatan sistem reward dan punihsman -Pelaksanaan sistem merit
											Tingkat kedisiplinan pegawai	Adanya kebijakan Pemda terkait	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											belum optimal;	reward bagi pegawai teladan	
											Sistem pengukuran kedisiplinan belum dilakukan secara integratif;		
											Pengawasan tingkat PD belum optimal;		
											Belum optimalnya perencanaan kebutuhan ASN;		
											Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit		
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %	Menurunya penerimaan pajak dan retribusi	Ketaatan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %	daerah karena covid-19	Pengelolaan aset daerah sesuai standar	PAD potensial dan unggulan - Mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui			90%	90%	90%	90%	100,00 %	100,00 %		Pengendalian internal sudah optimal	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Persentase PAD terhadap APBD			N/A	24%	N/A	31%	-	133,45 %			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Keluraha n			70%	65%	70%	60%	100,00 %	92,31%	Keberlanjutan usulan masyarakat tidak optimal	Seluruh PD sudah banyak memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-Integrasi aplikasi pelayanan publik -Peningkatan sistem aduan masyarakat
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetah			N/A	80	N/A	80	-	100,00 %	Integrasi aplikasi belum optimal		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		ui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota											
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			N/A	80	N/A	80	-	100,00 %	Pengelolaan aduan masyarakat belum optimal	Layanan publik dan internet yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Indeks Persepsi Korupsi			6,62	6,9	6,62	7,18	100,00 %	104,06 %		Melakukan Self Assessment secara berkala	-Penerapan pengendalian internal yang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Tingkat Kapabilitas APIP			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	100,00 %	100,00 %		Melakukan penilaian efektifitas manajemen resiko pemerintah daerah	efektif -Setiap evalauasi pengendalian didokumentasi secara memadai
		Maturitas SPIP			N/A	Level 3	Level 2	Level 3	100,00 %	100,00 %			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									**104,10%**	**97,03 %**			
Predikat									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			

Rata-rata tingkat pencapaian kinerja misi periode kedua RPJPD secara kuantitatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja misi periode ketiga. Capaian ini konsisten dengan temuan penilaian kualitatif yang dibahas pada bagian sebelumnya. Capaian kinerja makro daerah pada periode kedua lebih baik ketimbang periode ketiga jika dilihat dari capaian aspek pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan. Dinamika capaian ini perlu dilihat secara kontekstual mengingat setiap periode menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang diinginkan, seperti pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja seluruh periode RPJPD termasuk dalam predikat sangat tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan telah berjalan dengan optimal.

Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 juga menitikberatkan pada beberapa rekomendasi yang disusun berdasarkan capaian kinerja makro, arah kebijakan dan sasaran pokok, serta analisis faktor pendorong dan penghambat dari setiap sasaran pokok. Perumusan perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pada periode 2025-2045 dapat ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang meliputi aspek teknis hingga substansi perencanaan.

Rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi aspek substansi perencanaan terkait upaya peningkatan kinerja pembangunan di masa depan, yaitu:
    - Penguatan dan transformasi struktur perekonomian Kota Balikpapan. Struktur perekonomian perlu transformasi atau setidaknya mengurangi ketergantungan secara bertahap dari industri pengolahan yang terkait migas. Sektor-sektor perekonomian harus didorong agar semakin dapat diakses dan memberi manfaat bagi masyarakat. Adanya proyek strategis nasional dan provinsi berupa Kawasan Industri Kariangau selain diberikan dukungan berupa infrastruktur, juga perlu advokasi dan penyiapan tenaga kerja agar masyarakat dapat mengakses dan menerima manfaat. Pada tahap berikutnya, sektor perekonomian misalnya UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan inovasi dan perluasan akses pasar. Struktur perekonomian yang berbasis masyarakat juga diperlukan agar masyarakat tidak tereksklusi dengan kemungkinan Kota Balikpapan yang semakin tumbuh seiring rencana perpindahan Ibukota

Negara (IKN). Dengan demikian, fokus pembangunan jangka panjang ke depan dapat meneruskan misi pembangunan perekonomian sebelumnya yang belum optimal terwujud, yakni mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

- Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian untuk mendorong kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa, dan infrastruktur pendukung pembangunan kawasan strategis nasional.
- Penguatan Kota Balikpapan sebagai kota layak huni melalui optimalisasi penyediaan jaringan sarana dan prasarana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelestarian lingkungan hidup. Perkembangan Kota Balikpapan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Capaian pembangunan sumber daya manusia yang telah baik perlu ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
- Kota Balikpapan yang semakin tumbuh perlu merespon problematika sosial dan meningkatkan pembangunan inklusif. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui kesiapan SDM angkatan kerja, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang masif, serta dibutuhkan perluasan akses infrastruktur pelayanan dasar.
- Kota Balikpapan menghadapi berbagai bencana dan potensi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, membutuhkan penurunan risiko bencana melalui peningkatan infrastruktur pengendali bencana, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lincah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini untuk merespon tren masa depan dan kebijakan nasional aktual. Tata kelola pemerintahan yang lincah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tata kelola diperlukan prasyarat berupa sinergi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat.

- Capaian pembangunan jangka panjang kemudian dielaborasi dengan respon kebijakan aktual, yaitu peningkatan kesiapan Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai pintu gerbang IKN. Kesiapan yang komprehensif mulai dari aspek kesiapan sumber daya manusia, sektor perekonomian, infrastruktur pendukung perekonomian, lingkungan hidup, tata ruang, dan dukungan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Rekomendasi aspek teknis perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RPJPD periode 2025-2045, yaitu:
   - Penyusunan dokumen RPJPD yang memadukan pendekatan *problem based* berbasis hasil evaluasi dengan *vision based* berupa analisis kebijakan nasional dan provinsi, isu aktual, serta kemungkinan tren pada masa depan.
   - Perumusan sasaran pokok dan indikator sasaran pokok di dalam RPJPD yang mampu menunjukkan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama 20 tahun. Indikator sasaran pokok memiliki sifat *impact/final outcome*.
   - Perumusan arah kebijakan yang berbasis kebutuhan pembanguan setiap periode dengan memerhatikan konsepsi perkembangan pembangunan, antara lain mulai dari peningkatan akses, kualitas, daya saing, dan memperkokoh capaian pembangunan.
   - Penerjemahan secara cermat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD ke dalam RPJMD, serta dari RPJMD ke dalam RKPD.

2.5 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik

Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Kota Balikpapan dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk tahun 2020-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen Kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate*

(IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Hasil proyeksi penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2020-2035 yang telah dipublikasikan oleh BPS, kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2036-2045. Proyeksi penduduk untuk tahun 2036-2045 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Spectrum yang dikembangkan oleh Avenir Health. Hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini adalah proyeksi penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 – 2045 melalui modul DemProj (*Demography Project*) serta dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk melalui modul RAPID (*Resources for the Awarness of Popolation Impacts on Development*). Pembahasan terkait proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama dua puluh tahun mendatang diulas secara detil dan mendalam pada subbab selanjutnya.

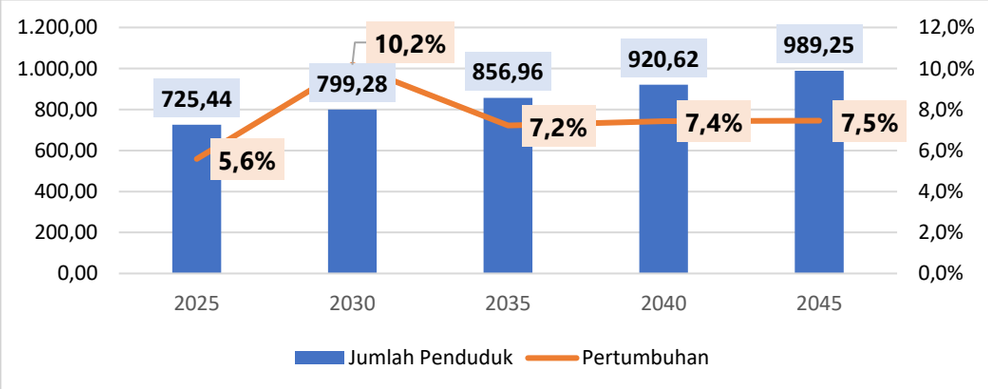
2.5.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi demografi Kota Balikpapan difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju kependudukan, seperti menganalisis data penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, pendudukan usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Adapun hasil proyeksi kependudukan dijabarkan sebagai berikut:

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Kota Balikpapan tahun 2020 sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun hasil proyeksi demografi Kota Balikpapan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 61 Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Total penduduk Kota Balikpapan diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 989 ribu jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,57 persen selama 20 tahun ke depan. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2030, yaitu sebesar 10,18 persen atau bertambah sebanyak 73 ribu jiwa. Pada periode tahun 2035 jumlah penduduk diproyeksikan tumbuh sebesar 7,22 persen atau mengalami penurunun sebesar 2,69 persen dari periode sebelumnya dengan total penambahan penduduk sebanyak 57 ribu jiwa. Pada periode ketiga hingga keempat jumlah penduduk Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan dengan masing-masing sebesar 7,43 dan 7,45 persen atau penambahan penduduk masing-masing sebanyak 63 ribu jiwa dan 68 ribu jiwa.

Tabel 2. 38 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Balikpapan Selatan	144,72	154,78	173,98	189,09	205,51	223,05
2	Balikpapan Kota	82,66	82,81	85,48	86,13	87,43	89,16
3	Balikpapan Timur	90,11	100,13	118,24	133,60	150,06	167,44
4	Balikpapan Utara	168,84	183,58	211,10	233,85	258,21	284,11
5	Balikpapan Tengah	106,74	107,44	108,05	108,63	109,82	111,48
6	Balikpapan Barat	93,98	96,70	102,43	105,66	109,59	114,01
KOTA BALIKPAPAN		**687,06**	**725,44**	**799,28**	**856,96**	**920,62**	**989,25**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Berdasarkan tabel diatas, penduduk paling banyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu sebanyak 284 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 27,17 persen dari total penduduk. Sementara kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu sebanyak 89 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 10,14 persen dari total penduduk. Rata-rata proporsi persebaran penduduk tiap kecamatan secara berurutan dari yang tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara (27,15 persen), diikuti Kecamatan Balikpapan Selatan (22,01 Persen), Kecamatan Balikpapan Timur (15,48 persen), Kecamatan Balikpapan Tengah (12,84 persen), Kecamatan Balikpapan Barat (12,38 persen), dan Kecamatan Balikpapan Kota (10,13 persen). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk Kota Balikpapan ke depan relatif merata dan tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Pola kependudukan mengalami perubahan mendasar, terutama di Kecamatan Balikpapan Barat. Pada tahun 2020, secara absolut jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Namun, memasuki tahun 2045 diproyeksikan terjadi pergeseran pola persebaran penduduk yakni jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat akan lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Berbeda halnya jika pola kependudukan Kecamatan Balikpapan Barat dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur. Namun, pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Timur akan lebih banyak dibandingkan Kecamatan Balikpapan Barat. Meskipun demikian, dari sisi laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Balikpapan Barat akan lebih tinggi, yaitu sebesar 1,14 persen, sedangkan laju pertumbuhan Kecamatan Balikpapan Timur hanya sebesar 0,47 persen. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis Kecamatan Balikpapan Barat yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga diproyeksikan aktivitas dan mobilitas masyarakat akan tinggi ke depannya.

2.6.1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Dengan adanya gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin maka proses perumusan kebijakan akan lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun hasil proyeksi penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	KECAMATAN	Tahun 2020			Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam Ribuan)														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Balikpapan Selatan	74,20	70,53	144,72	78,31	76,47	154,78	87,37	86,61	173,98	94,32	94,77	189,09	102,00	103,50	205,51	110,31	112,73	223,04
2	Balikpapan Kota	42,14	40,52	82,66	41,91	40,91	82,81	43,00	42,48	85,48	43,05	43,08	86,13	43,45	43,98	87,43	44,05	45,10	89,15
3	Balikpapan Timur	46,58	43,53	90,11	51,32	48,81	100,13	60,37	57,87	118,24	67,99	65,61	133,60	76,35	73,71	150,06	85,29	82,16	167,45
4	Balikpapan Utara	86,39	82,45	168,84	93,39	90,19	183,58	106,83	104,28	211,10	117,87	115,98	233,85	129,85	128,37	258,21	142,75	141,35	284,11
5	Balikpapan Tengah	54,23	52,51	106,74	55,00	52,44	107,44	55,00	53,05	108,05	54,85	53,78	108,63	54,91	54,90	109,81	55,19	56,28	111,48
6	Balikpapan Barat	48,63	45,35	93,98	49,91	46,79	96,70	52,80	49,63	102,43	54,32	51,33	105,66	56,21	53,39	109,59	58,32	55,70	114,02
KOTA BALIKPAPAN		**352,17**	**334,89**	**687,06**	**369,84**	**355,61**	**725,44**	**405,36**	**393,92**	**799,28**	**432,41**	**424,56**	**856,96**	**462,77**	**457,85**	**920,62**	**495,92**	**493,33**	**989,25**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan ke depannya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 10,08 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki hanya sebesar 8,27 persen. Dari sisi rasio jenis kelamin menunjukkan trend penurunan dan mengarah pada keseimbangan antara penduduk laki-laki dengan perempuan Kota Balikpapan ke depan. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan berpengaruhi terhadap kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2.6.1.3 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan

Sebagai kota besar dan menjadi salah satu mitra IKN, Kota Balikpapan memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan (Jiwa/Km2)

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Balikpapan Selatan	38,81	3.729,1	4.001,7	4.482,8	4.872,2	5.295,4	5.747,3
2	Balikpapan Kota	11,1	7.447,0	7.486,2	7.701,0	7.759,5	7.876,9	8.032,3
3	Balikpapan Timur	119,16	756,2	843,1	992,3	1.121,2	1.259,3	1.405,2
4	Balikpapan Utara	138,24	1.221,4	1.332,5	1.527,1	1.691,7	1.867,8	2.055,2
5	Balikpapan Tengah	10,83	9.855,8	9.726,1	9.977,3	10.030,5	10.139,9	10.293,9
6	Balikpapan Barat	192,88	487,3	503,1	531,0	547,8	568,2	591,1
KOTA BALIKPAPAN		**511,02**	**1.344,5**	**1.419,6**	**1.564,1**	**1.677,0**	**1.801,5**	**1.935,8**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Balikpapan terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk aksisting saat ini. Dari 6 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan disebabkan oleh wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Kota, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Balikpapan. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Balikpapan Barat.

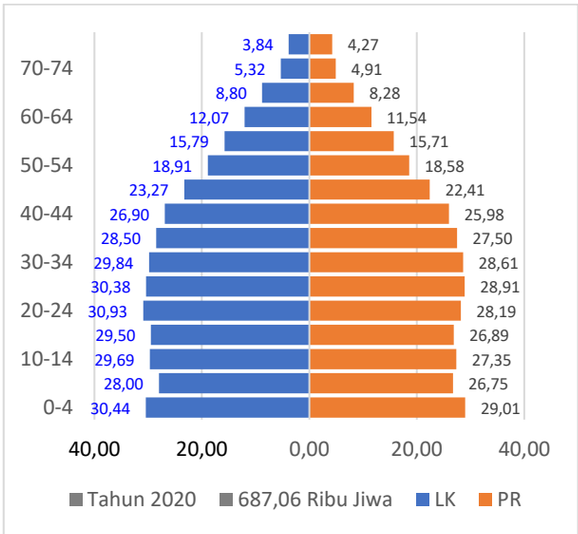
Dalam konteks perkotaan, pertambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kota Balikpapan. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni.

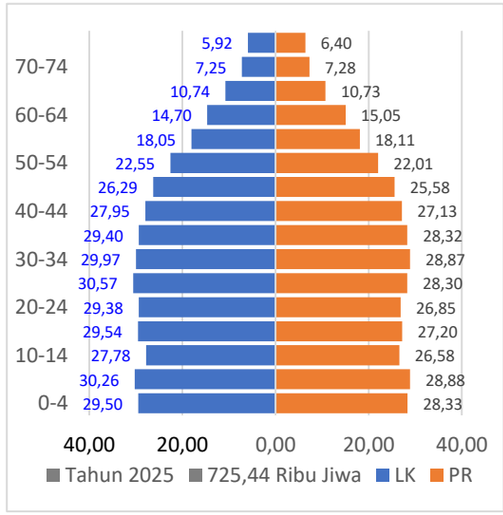
2.6.1.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

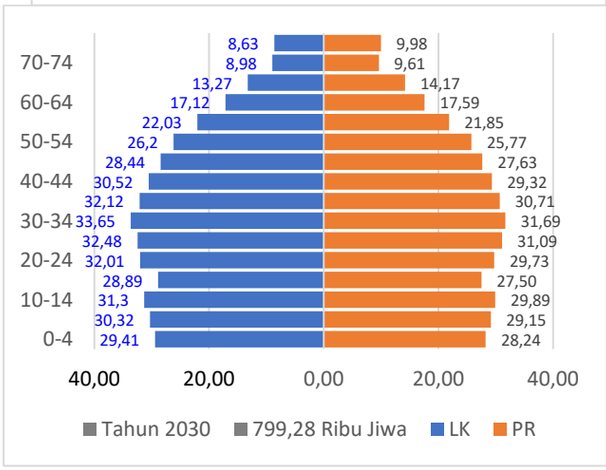
Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondis pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentan usia 15-64, sedangkan penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentang

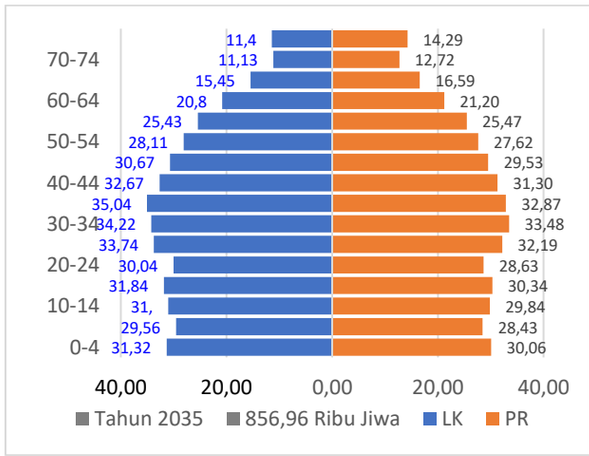
usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65-keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kota Balikpapan.

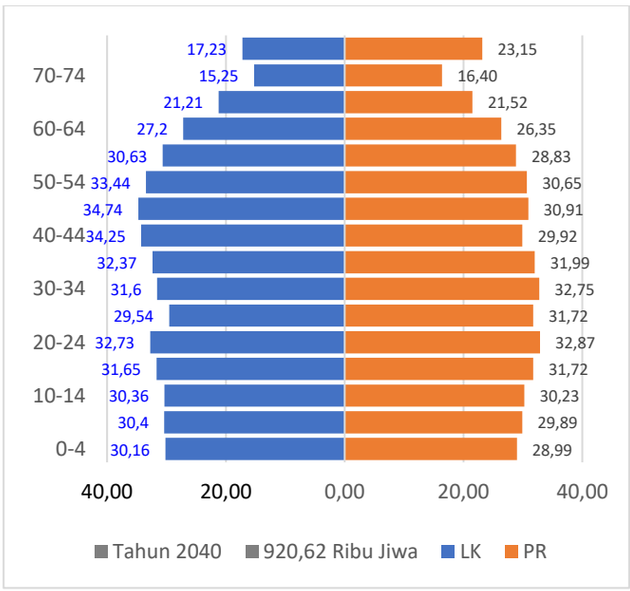
Gambar 2. 62 Proyeksi Piramida Penduduk Kota Balikpapan (Dalam Ribuan)

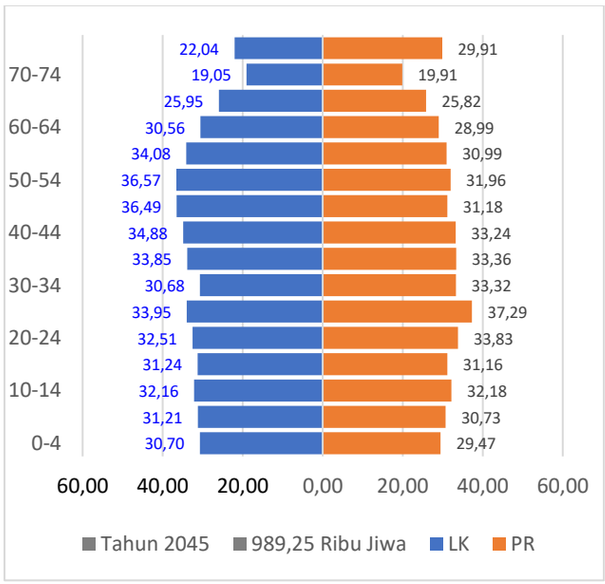












Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 171,33 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 178,31 ribu jiwa dan 180,21 ribu jiwa pada tahun 2030 hingga 2035. Namun pada tahun 2040, diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 180,02 ribu jiwa atau menurun sebesar 0,10 persen dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2045 menjadi 186,45 ribu jiwa. Meskipun demikian, laju pertumbuhannya lambat dan fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun.

Saat ini proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 24,92 persen dari total populasi pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2045, diproyeksikan proporsi penduduk usia tersebut mengalami penurunan dari total populasi. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan setiap periode dan pada tahun 2045 memiliki proporsi dari total populasi yaitu hanya sebesar 18,85 persen. Dari sisi laju pertumbuhan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi mengalami penurunan dan proporsi penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2040, yaitu sebesar 7,01 persen, sedangkan proporsi penurunan yang paling rendah terjadi pada 2045, yaitu hanya 3,61 persen.

Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 480,41 ribu jiwa, meningkat menjadi 660,12 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun demikian, laju pertumbuhannya mengalami

penurunan setiap periode. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan proporsi terhadap total populasi penduduk usia tersebut sebesar 0,28 persen dan diproyeksi menurun sebesar 0,18 persen pada tahun 2045. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan penduduk umur 0-14 tahun karena diproyeksikan TFR Kota Balikpapan diangka 2. Dengan kata lain, rata-rata kelahiran anak di Kota Balikpapan hanya 2 anak yang berpengaruh terhadap pola kependudukannya.

Berbeda halnya dengan penduduk umur 65 tahun ke atas, yang penduduknya dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun demikian, proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 5,16 persen pada tahun 2020 menjadi 14,42 persen pada tahun 2045. Hal yang sama juga terjadi pada laju pertumbuhannya, menunjukkan trend peningkatan signifikan setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,28 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2020 sebanyak 35,42 ribu jiwa meningkat menjadi 142,68 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kota Balikpapan ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan mereka.

2.6.1.5 Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertility dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 59,03 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikasi menjadi 202,23 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 28,05 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

2.6.1.6 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/sederajat, dan penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/Sederajat. Secara keseluruhan penduduk usia sekolah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 1,77 persen. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,22 persen. Namun, kembali naik sebesar 4,10 persen pada tahun 2030. Pada tahun 2035 laju pertumbuhannya berjalan lambat, yaitu hanya sebesar 0,85 persen dan terus perlambatan hingga pada tahun 2040, yaitu tumbuh hanya sebesar 0,63 persen. Namun pada tahun 2045 terjadi laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3,50 persen.

Penduduk usia sekolah PAUD menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang masuk PAUD sebesar 0,59 persen dan menurun sebesar 2,98 persen pada tahun 2030. Selanjutnya, pada tahun 2035 hingga 2040 kembali meningkat secara kontinu masing-masing sebesar 1,84 persen dan 2,65 persen. Namun, pada tahun 2045 laju pertumbuhannya melambat, yaitu hanya sebesar 1,75 persen.

Penduduk usia sekolah yang masuk SD/Sederajat menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah yang masuk SD/Sederajat sebesar 0,54 persen dan pada tahun 2030 meningkat drastis sebesar 11,09 persen. Namun, pada tahun 2035, terjadi penurunan sebesar -4,65 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2040 dan 2045 dengan masing-masing sebesar 1,87 persen dan 4,95 persen.

Berbeda halnya dengan penduduk usia sekolah masuk SMP yang menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung meningkat. Namun pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar -3,65 persen. Selanjutnya, pada tahun 2030, laju pertumbuhan penduduk usia tersebut kembali naik sebesar 7,46 persen dan terus naik hingga tahun 2035 sebesar 10,22 persen. Namun pada tahun 2040 terjadi penurunan yaitu sebesar -5,82 persen. Sementara pada tahun 2045 penduduk usia sekolah tersebut kembali naik, sebesar 4,57 persen.

2.6.1.7 Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usai tidak bekerja.

Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Tabel 2. 41 Proyeksi Rasio Ketergantungan (persen) Kota Balikpapan

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen) Kota Balikpapan					
	Tahun 2020	2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	24,92	23,62	22,31	21,03	19,55	18,85
Umur 15-64	69,92	69,72	69,60	69,45	67,98	66,73
Umur 65+	5,16	6,66	8,09	9,52	12,46	14,42
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Dependency Ratio	**43,02**	**43,42**	**43,67**	**43,98**	**47,10**	**49,86**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Rasio ketergantungan Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 43,02 persen dan meningkat menjadi 49,86 pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 43 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung bebas 49-50 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kota Balikpapan tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Kota Balikpapan saat ini memiliki peluang bonus demografi dan puncaknya berakhir pada tahun 2035. Artinya dari tahun 2020 hingga 2035, Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Memasukki periode 2040 hingga 2045, Kota Balikpapan tidak memiliki bonus demografi lagi karena penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak peroduktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

2.5.1 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih serta penanganan akan timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Kota Balikpapan. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk dan hasil proyeksinya, standar minimal kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, dan standar kebutuhan ruang untuk masing-masing sarana prasarana. Berbagai kebutuhan sarana prasarana tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

2.6.2.1 Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana menjadi hal yang vital dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan salah satunya adalah gedung sekolah dan tenaga pendidik. Kebutuhan sarana prasarana pendidikan bergantung pada hasil proyeksi anak usia sekolah yang berimplikasi terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil proyeksi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah PAUD hingga SMP di Kota Balikpapan pada Tahun 2020-2045 (Ribu Jiwa)

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	17,30	14,48	7,45	17,60	14,50	7,33	17,49	16,56	8,13	18,21	16,08	9,19	19,13	16,62	8,83	19,96	17,66	9,40
2	Balikpapan Kota	8,89	7,31	3,78	8,65	7,13	3,38	7,39	7,12	3,25	6,41	6,18	3,21	5,34	5,80	2,72	4,04	5,66	2,57
3	Balikpapan Timur	11,79	9,20	4,60	12,74	9,91	4,70	14,11	11,87	5,47	16,27	11,93	6,40	18,83	12,63	6,33	21,56	13,65	6,90
4	Balikpapan Utara	20,77	16,90	8,56	21,37	17,35	8,49	22,20	20,15	9,58	24,16	19,82	10,95	26,52	20,68	10,64	28,93	22,10	11,42
5	Balikpapan Tengah	11,70	9,80	5,05	11,01	9,35	4,56	8,91	9,31	4,36	7,36	8,24	4,38	5,63	7,88	3,79	3,56	7,85	3,65
6	Balikpapan Barat	10,98	9,21	4,74	10,54	9,02	4,46	9,36	9,70	4,60	8,53	9,00	4,88	7,63	8,97	4,44	6,48	9,26	4,49
KOTA BALIKPAPAN		**81,43**	**66,90**	**34,18**	**81,91**	**67,26**	**32,93**	**79,47**	**74,72**	**35,39**	**80,93**	**71,25**	**39,01**	**83,08**	**72,58**	**36,74**	**84,53**	**76,17**	**38,42**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi anak usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang berbeda. Anak usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kelompok dengan jumlah tertinggi pada kondisi eksisting tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2045. Jumlah anak usia sekolah dari jenjang pendidikan PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama sederajat (SMP) mengalami penurunan. Hal tersebut karena tidak semua anak yang menempuh PAUD melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah mengindikasikan adanya permasalahan pada urusan pendidikan, seperti sulitnya akses pendidikan. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Balikpapan karena pendidikan menjadi salah satu fondasi awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, mengingat Kota Balikpapan terus mengalami penurunan persentase penduduk yang berusia 0-15 tahun, maka sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan agar tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.

Proyeksi jumlah anak usia sekolah hingga tahun 2045 secara umum mengalami fluktuasi, kecuali di Kecamatan Balikpapan Utara yang secara konsisten mengalami peningkatan dan sebaliknya Kecamatan Balikpapan Kota terus mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa terdapat penurunan jumlah kelahiran dan migrasi masuk pada usia anak sekolah di Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga turut serta mengakibatkan penurunan jumlah anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan selama dua puluh tahun ke depan. Kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Balikpapan Utara yang terus mengalami peningkatan angka kelahiran dan migrasi masuk, sehingga linier dengan jumlah anak usia sekolah yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan yang berbeda harus diambil oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara karena adanya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin tinggi selama dua puluh tahun kedepan. Empat kecamatan lainnya mengalami fluktuasi jumlah anak usia sekolah akibat perubahan penduduk secara keseluruhan.

Jika mengacu pada jumlah anak usia sekolah per wilayah, kecamatan Balikpapan Utara menduduki posisi teratas dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi, sedangkan Kecamatan Balikpapan Kota berada di posisi terakhir dengan jumlah yang tidak sampai setengah dari Kecamatan Balikpapan Utara. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota

Balikpapan yang juga memiliki urutan yang sama per kecamatan. Meskipun demikian, tidak semua anak usia sekolah terdata menjadi siswa. Usia sekolah yang ditetapkan secara nasional adalah pada rentang 6 hingga 12 tahun, sedangkan ada kemungkinan anak yang berusia di bawah 6 tahun yang sudah memulai studi, atau anak yang sudah berada pada rentang usia tersebut tetapi belum atau tidak menempuh studi pada jenjang pendidikan manapun. Oleh karena itu, diperlukan data aktual yang presisi terkait jumlah siswa untuk melihat tingkat kebutuhan sarana prasarana pada urusan pendidikan. Berikut merupakan proyeksi jumlah siswa selama 20 tahun ke depan di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 43 Proyeksi Jumlah Siswa di Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	1.318	15.180	5.783	1.151	15.753	7.282	1.144	16.560	8.132	1.190	16.076	9.190	1.251	16.622	8.833	1.305	17.655	9.399
2	Balikpapan Kota	789	10.046	5.625	566	7.743	3.360	483	7.125	3.247	419	6.182	3.207	349	5.796	2.718	264	5.661	2.568
3	Balikpapan Timur	668	9.839	4.610	833	10.766	4.674	923	11.870	5.468	1.064	11.930	6.398	1.231	12.634	6.329	1.410	13.645	6.898
4	Balikpapan Utara	1.204	17.038	9.282	1.397	18.845	8.440	1.452	20.152	9.578	1.579	19.822	10.952	1.734	20.680	10.636	1.892	22.103	11.417
5	Balikpapan Tengah	830	11.119	3.856	720	10.154	4.532	583	9.309	4.360	481	8.237	4.382	368	7.877	3.786	233	7.849	3.645
6	Balikpapan Barat	515	9.513	4.043	689	9.800	4.435	612	9.704	4.605	558	8.998	4.879	499	8.966	4.435	423	9.257	4.491
KOTA BALIKPAPAN		**5.324**	**72.736**	**33.199**	**5.355**	**73,06**	**32,72**	**5,20**	**74,72**	**35,39**	**5,29**	**71,25**	**39,01**	**5,43**	**72,58**	**36,74**	**5,53**	**76,17**	**38,42**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Jumlah siswa di Kota Balikpapan pada tahun 2020 didominasi olah siswa yang bersekolah di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur pada setiap jenjang pendidikan. Tren peningkatan proyeksi dari tahun 2025 hingga 2045 yang terjadi pada jenjang pendidikan PAUD di dua kecamatan tersebut menunjukkan banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal itu sejalan dengan rata-rata peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi hingga tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur.

Hasil proyeksi yang berbeda tampak pada Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat yang secara kontinu mengalami penurunan jumlah siswa sejak tahun 2025 hingga 2045 di setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat diproyeksikan mengalami lonjakan jumlah siswa pada tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun 2020. Apabila mengacu pada jumlah anak usia sekolah yang juga secara linier mengalami penurunan, hasil proyeksi penurunan jumlah siswa sekolah dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk secara umum di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Struktur penduduk yang semula berbentuk piramida, kemudian pada rentang tahun 2025 hingga 2045 terus mengalami penyempitan pada bagian bawah struktur penduduk. Hal itu mengindikasikan bahwa adanya penurunan angka kelahiran maupun tingginya angka migrasi yang melibatkan penduduk pada usia sekolah. Kondisi yang demikian menuntut adanya kebijakan khusus yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan selama dua puluh tahun mendatang tidak turut menurun seiring berkurangnya jumlah siswa yang ada.

Hasil proyeksi lainnya dialami oleh Kecamatan Balikpapan Selatan yang cenderung mengalami fluktuasi yang secara kontinu pada rentang tahun 2025 hingga 2045. Pada satu sisi, hal itu mampu mempertahankan kestabilan struktur penduduk yang ada, sehingga secara umum kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mudah dilaksanakan secara umum. Namun, penyesuaian kebijakan dalam perenncanaan juga diperlukan untuk menghindari adanya ketidaktepatan sasaran.

Perubahan struktur penduduk secara keseluruhan turut serta memengaruhi persebaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap kecamatan. Hal itu menuntut adanya perencanaan terkait penyediaan sarana

dan prasarana yang diperlukan selama dua puluh tahun mendatang dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana dasar di Kota Balikpapan adalah dengan melakukan proyeksi untuk dua puluh tahun mendatang. Salah satu kebutuhan sarana prasarana pendidikan adalah gedung sekolah. Hasil proyeksi kebutuhan gedung sekolah di Kota Balikpapan per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Gedung Sekolah Jenjang PAUD hingga SMP di Kota Balikpapan pada Tahun 2020-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	41	34	18	42	35	18	42	37	21	44	37	23	46	38	22	49	40	24
2	Balikpapan Kota	25	31	12	24	31	11	21	29	11	18	25	11	15	24	9	12	23	9
3	Balikpapan Timur	21	32	10	23	36	11	25	40	12	29	40	15	34	43	14	39	46	16
4	Balikpapan Utara	38	44	19	39	47	20	40	51	22	44	50	25	49	53	25	54	57	26
5	Balikpapan Tengah	26	41	13	24	40	12	20	37	12	17	33	12	13	32	10	9	32	10
6	Balikpapan Barat	16	27	10	15	27	10	14	27	10	13	25	11	12	26	10	10	26	10
KOTA BALIKPAPAN		**166**	**209**	**82**	**167**	**216**	**82**	**162**	**221**	**88**	**165**	**211**	**97**	**169**	**215**	**91**	**172**	**225**	**95**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Jumlah kebutuhan gedung sekolah yang diproyeksikan pada enam kecamatan di Kota Balikpapan memiliki dua tren yang berbeda, yakni pertama, terdapat tiga kecamatan yang secara konsisten mengalami peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah. Kedua, terdapat ketiga kecamatan lainnya yang justru sebaliknya. Penurunan kebutuhan jumlah gedung sekolah dalam hasil proyeksi tidak dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk mengurangi jumlah gedung sekolah yang tersedia, melainkan perlunya kebijakan pengurangan jumlah rombongan belajar atau kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan terbaru terkait rombongan belajar melalui Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023. Jumlah rombongan belajar yang ditetapkan pada peraturan tersebut mencakup angka minimal dan maksimal rombongan belajar pada tiap jenjang pendidikan. Hal itu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi atau menambah jumlah rombongan belajar di wilayahnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada.

Jumlah rombongan belajar yang ideal di setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh kemendikbudristek, yakni 1-16 rombel untuk jenjang PAUD, 6-24 rombel untuk SD sederajat, dan 6-30 rombel untuk SMP sederajat. Pada masing-masing rombongan belajar juga diatur terkait jumlah siswa yang dapat ditampung, yakni maksimal 10-15 siswa untuk jenjang PAUD tergantung pada usia anak yang mengikuti PAUD, kemudian maksimal 28 untuk SD sederajat, dan 32 untuk SMP sederajat. Apabila dalam satu rombel telah melebihi kapasitas siswa yang dapat ditampung, maka perlu penambahan rombel. Logika serupa juga berlaku pada gedung sekolah, apabila dalam satu gedung sekolah terdapat lebih dari jumlah rombel maksimal yang telah ditetapkan, maka hadir kebutuhan untuk menambah gedung sekolah agar efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran terjaga. Kebijakan penambahan gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi tersebut harus diambil oleh tiga kecamatan di Balikpapan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara.

Kebijakan yang berbeda harus diambil oleh Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat. Hasil proyeksi yang menunjukkan adanya penurunan jumlah gedung sekolah tidak berarti bahwa gedung sekolah yang telah tersedia dimusnahkan, melainkan pemerintah daerah perlu menyesuaikan kembali rombongan belajar yang ditetapkan sebelumnya, dalam konteks ini dilakukan pengurangan jumlah rombongan belajar. Jumlah siswa yang lebih sedikit pada suatu rombongan belajar akan meningkatkan efektivitas

pemahaman siswa terhadap informasi yang diterima. Konsekuensi dari pengurangan jumlah siswa di dalam suatu rombongan belajar adalah jumlah rombongan belajar yang tetap, sehingga gedung yang tersedia tetap digunakan.

Selain gedung sekolah, sarana prasarana dasar yang diperlukan dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten. Peran tenaga pendidik, seperti guru sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal itu dikarenakan guru tidak hanya berperan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik, serta mempersiapkan seorang siswa menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Peran guru yang begitu krusial menghadirkan urgensi untuk memberikan perhatian yang cukup pada proses pembentukan perencanaan di suatu daerah, terutama terkait ketersediaan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut merupakan proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pembelajaran yang ideal di Kota Balikpapan selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 45 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru di Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	185	656	332	148	788	364	147	828	407	153	804	459	160	831	442	167	883	470
2	Balikpapan Kota	107	522	284	73	387	168	62	356	162	54	309	160	45	290	136	34	283	128
3	Balikpapan Timur	69	490	239	107	538	234	118	593	273	136	596	320	158	632	316	181	682	345
4	Balikpapan Utara	141	827	496	179	942	422	186	1.008	479	202	991	547	222	1.034	532	243	1.105	571
5	Balikpapan Tengah	121	608	208	92	508	227	75	465	218	62	412	219	47	394	189	30	392	182
6	Balikpapan Barat	60	462	182	88	490	222	78	485	230	71	450	244	64	448	222	54	463	225
KOTA BALIKPAPAN		**683**	**3.565**	**1.741**	**687**	**3.653**	**1.636**	**666**	**3.736**	**1.770**	**678**	**3.562**	**1.950**	**696**	**3.629**	**1.837**	**709**	**3.808**	**1.921**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah guru selama dua puluh tahun mendatang pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Balikpapan memanfaatkan pola eksisting yang telah ada sebelumnya, sedangkan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan asumsi rasio dari kebijakan PP No 74 tahun 2008 tentang Guru yaitu 1 guru untuk 20 siswa. Penggunaan asumsi rasio antara guru dan siswa berimplikasi pada persamaan tren yang dihasilkan oleh proyeksi jumlah siswa dengan proyeksi kebutuhan guru. Semakin banyak jumlah murid yang diproyeksikan, maka semakin banyak pula jumlah guru yang dibutuhkan di suatu wilayah, begitu juga sebaliknya. Penggunaan asumsi rasio 1 guru untuk 20 murid berguna untuk menjaga efektivitas dan kualitas dari sistem pembelajaran yang dijalankan di Kota Balikpapan.

Jumlah guru pada kondisi eksisting pada rentang tahun 2006 hingga 2022 telah menunjukkan ketercukupan dari jumlah guru yang dibutuhkan di Kota Balikpapan. Hal itu tampak pada rasio guru dan murid yang telah berada di angka 0,05 yang berarti 1 guru mengampu 20 murid atau dapat dikatakan dalam kondisi ideal. Namun, perlu diperhatikan pula terkait persebaran dari guru yang tersedia karena proyeksi yang dihasilkan berskala kecamatan, dan ada potensi guru yang tersedia di sekolah favorit lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah memastikan guru yang tersedia memiliki kompetensi yang sesuai standar, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengajaran dari guru sesuai dengan jumlah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga tetap mendapatkan kualitas dari pengajaran tersebut.

2.6.2.2 Proyeksi Sarana Prasarana Kesehatan

Ketersedian sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya urusan pendidikan, tetapi juga pada ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (SPM). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Peran tenaga kesehatan secara strategis menentukan keberhasilan peningkatan pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan, serta perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Begitu krusialnya peran tenaga kesehatan menghasilkan urgensi bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana terkait tenaga kesehatan di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 46 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi 2020		2025		2030		2035		2040		2045	
		Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)
1	Balikpapan Selatan	121	360	130	374	150	408	167	435	186	466	206	499
2	Balikpapan Kota	338	793	343	801	353	817	360	830	368	843	376	856
3	Balikpapan Timur	35	56	41	65	55	88	66	108	80	130	95	154
4	Balikpapan Utara	250	173	260	190	285	231	306	265	329	303	355	345
5	Balikpapan Tengah	114	27	120	37	133	58	142	74	152	90	162	106
6	Balikpapan Barat	48	72	53	81	66	101	75	116	85	132	95	149
KOTA BALIKPAPAN		**906**	**1.481**	**946**	**1.547**	**1042**	**1.704**	**1117**	**1.827**	**1200**	**1.963**	**1290**	**2.109**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang di Kota Balikpapan memanfaatkan data eksisting beberapa tahun sebelumnya sebagai basis proyeksi dengan standar rasio 1 dokter per 1000 penduduk dan 2,4 perawat per 1000 penduduk. Standar tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di dalam Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan pada tahun 2022. Hasil proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045 secara umum menunjukkan peningkatan. Hal itu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk selama dua puluh tahun mendatang. Peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 2025 tidak terlalu jauh dibandingkan kondisi eksisting pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sebelumnya kebutuhan tersebut cenderung mampu dipenuhi oleh daerah, yakni sebesar 97,32 persen di rumah sakit, dan 82,72 persen di puskesmas, sehingga ketika mengacu pada rasio standar antara tenaga kesehatan dan masyarakat, jumlahnya tidak meningkat secara signifikan.

Tenaga kesehatan yang diperlukan di Kota Balikpapan setidaknya meliputi dokter umum dan perawat. Pada kondisi eksisting dan proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat lebih banyak dibandingkan dokter. Hal itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa jika 1 dokter idealnya menangani 1000 penduduk, maka 1 perawat menangani 417 penduduk. Hal itu dikarenakan interaksi perawat dengan pasien jauh lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dokter, sehingga dalam proses pemberian layanan kesehatan, perawat secara otomatis juga menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dibandingkan dokter. Hasil proyeksi Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat menunjukkan kondisi ideal, yakni lebih banyak perawat dibandingkan dokter. Kondisi yang berbeda tampak pada Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah yang menunjukkan jumlah dokter lebih banyak dibandingkan perawat. Hasil proyeksi demikian dipengaruhi oleh data eksisting yang kemudian membentuk proyeksi yang berbeda dibandingkan empat kecamatan lainnya. Meskipun begitu, penyesuaian kebijakan tetap diperlukan di kedua kecamatan tersebut agar standar pelayanan minimal pada sektor kesehatan dapat tetap dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Ketersediaan dokter dan perawat selaku tenaga kesehatan juga harus disertai dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, sehingga mampu mewujudkan percepatan kinerja pembangunan

kesehatan di Kota Balikpapan. Dengan kinerja pembangunan kesehatan yang lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan juga semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pula, serta menunjang peningkatan IPM.

Sarana dan prasarana kesehatan tidak terbatas pada tenaga kesehatan, melainkan terdapat juga fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Fasilitas kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pada pelayanan kesehatan yang diberikan, fasilitas kesehatan menawarkan layanan medis dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Tanpa adanya fasilitas kesehatan, maka pelayanan kesehatan prima sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk membuat perencanaan yang memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 47 Proyeksi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi 2020		2025		2030		2035		2040		2045	
		Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)
1	Balikpapan Selatan	2	4	2	4	3	4	3	5	4	5	4	5
2	Balikpapan Kota	4	3	4	3	4	3	5	3	5	3	5	3
3	Balikpapan Timur	4	1	4	1	5	1	5	1	5	2	6	2
4	Balikpapan Utara	5	1	5	1	6	2	7	2	7	2	8	2
5	Balikpapan Tengah	6	2	6	2	7	2	7	2	7	3	7	3
6	Balikpapan Barat	6	-	6	-	7	0	7	0	7	0	7	1
KOTA BALIKPAPAN		**27**	**11**	**28**	**11**	**31**	**13**	**33**	**14**	**36**	**15**	**38**	**16**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan memanfaatkan data dasar yang telah tersedia pada tahun 2020. Fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan secara umum tersebar kurang merata apabila melihat perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dengan luas kecamatan yang ada. Namun apabila melihat tingkat kepadatan penduduk di tiap kecamatan, jumlah fasilitas kesehatan tampak menyesuaikan jumlah penduduk yang ada pada kecamatan terkait. Fasilitas kesehatan terbanyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Tengah yang juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan Kecamatan Balikpapan Barat memiliki kondisi sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan unit fasilitas kesehatan pada hasil proyeksi, baik rumah sakit maupun puskesmas disesuaikan dengan kapasitas fasilitas kesehatan dan jumlah penduduk yang ada pada rentang tahun terkait.

Kebutuhan masyarakat akan rumah sakit dan puskesmas tidak hanya terkait ketersediaan dan keterjangkauan akses, melainkan juga terkait fasilitas pelayanan yang disediakan. Setidaknya dari 11 rumah sakit umum yang terdaftar di Kota Balikpapan pada tahun 2020, terdapat satu rumah sakit yang termasuk ke dalam tipe A atau rumah sakit pusat, yakni RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Kecamatan Balikpapan Utara. Selain itu, dua rumah sakit bertipe B, sedangkan 8 lainnya tersebar ke dalam rumah sakit bertipe C dan D. Tipe rumah sakit memengaruhi fasilitas kesehatan yang diberikan. Banyaknya rumah sakit tipe C dan D menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua kalangan. Hal itu dikarenakan rumah sakit tipe C dan D merupakan rumah sakit yang menjadi rujukan pertama bagi masyarakat setelah memeriksakan diri di puskesmas.

Hal yang tidak kalah penting dalam fasilitas kesehatan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil proyeksi memang hanya mampu menunjukkan angka kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Namun pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban untuk turut memastikan kualitas dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Kualitas fasilitas kesehatan dapat dilihat melalui tingkat akreditas yang diperoleh fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan. Jika mengacu pada data eksisting pada tahun 2016 hingga 2020, persentase akreditasi rumah sakit di Kota Balikpapan mampu ditingkatkan dari yang semula hanya 36,37 persen pada tahun 2018, kemudian menjadi 86,67 persen pada tahun 2020. Kondisi serupa juga dialami oleh puskesmas yang mengalami peningkatan dari 51,85 persen pada tahun 2016, kemudian menjadi 96,3 persen pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakredetasi menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan

sesuai dengan standar nasional. Namun capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan selama dua puluh tahun mendatang, terutama ketika melihat struktur penduduk yang semakin lebar pada bagian atas atau lansia.

Pertimbangan bentuk struktur penduduk pada pelayanan kesehatan dikarenakan adanya perbedaan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berusia di bawah 14 tahun tentu akan berbeda dengan penduduk yang telah masuki usia lansia, yakni di atas 64 tahun. Perubahan struktur penduduk yang semakin melebar pada bagian atas piramida menujukkan bahwa dalam dua puluh tahun ke depan, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan berpotensi lebih banyak terkait penanganan penyakit degeneratif, yakni proses berkurangnya fungsi sel saraf secara bertahap. Penyakit tersebut, salah satunya dapat disebabkan oleh pola hidup yang buruk dalam jangka waktu lama. Penduduk dengan usia lanjut berpotensi lebih rentan terkena penyakit degeneratif seperti Oeteoporosis, Alzheimer, Dementia (pikun) dan banyak lagi. Oleh karena itu, penyesuaian perencanaan terkait fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.6.2.3 Proyeksi Sarana Prasarana Infrastruktur

Kebutuhan sarana prasarana mendasar lain yang diperlukan oleh masyarakat adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan selama dua puluh tahun mendatang adalah infrastruktur terkait timbulan sampah, infrastruktur terkait ketersediaan air bersih dan listrik. Sampah menjadi salah satu perhatian penting pada perencanaan jangka panjang karena sampah tidak hanya berpotensi memberikan gambaran yang kurang baik terhadap wajah kota, tetapi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Hal itu tentu tidak hanya berdampak bagi satu sektor secara terpisah, tetapi berkelindan dengan sektor lain dan menjadi masalah yang kompleks serta menjadi sulit untuk diselesaikan, terutama ketika tidak ada perencanaan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, proyeksi terkait jumlah sampah yang mungkin ditimbulkan oleh masyarakat di Kota Balikpapan perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang. Berikut merupakan hasil proyeksi timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan masyarakat dalam dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 48 Proyeksi Volume Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Balikpapan Selatan	464.333,82	116,08	521.931,34	130,48	567.270,22	141,82	616.541,59	154,14	669.152,89	167,29
2	Balikpapan Kota	227.735,34	49,69	235.073,98	51,29	236.858,82	51,68	240.442,48	52,46	245.185,76	53,50
3	Balikpapan Timur	300.380,13	75,10	354.712,11	88,68	400.794,19	100,20	450.178,84	112,54	502.316,40	125,58
4	Balikpapan Utara	550.733,92	137,68	633.305,59	158,33	701.563,52	175,39	774.634,51	193,66	852.319,38	213,08
5	Balikpapan Tengah	322.322,89	80,58	324.161,43	81,04	325.891,15	81,47	329.445,95	82,36	334.448,23	83,61
6	Balikpapan Barat	265.934,80	58,02	307.285,79	76,82	316.969,48	79,24	328.755,22	82,19	342.028,73	85,51
KOTA BALIKPAPAN		**2.131.440,9**	**517,15**	**2.376.470,24**	**586,64**	**2.549.347,38**	**629,80**	**2.739.998,59**	**677,35**	**2.945.451,39**	**728,56**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi timbulan sampah di Kota Balikpapan menggunakan standar acuan pada SNI: SNI 8632-2018 Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Di antara enam kecamatan yang ada di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara merupakan kecamatan yang diproyeksikan menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, sedangkan Balikpapan Kota berada pada posisi sebaliknya. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan Balikpapan Utara dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga produksi sampah juga jauh lebih banyak, baik dari segi volume maupun berat per harinya. Hasil proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi bahwa satu orang di Kota Balikpapan menghasilkan 3-3,6 liter per orang per hari atau sebesar 0,65-0,8 kilogram per orang per hari. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan diproyeksikan akan menghasilkan 2.131.440,90 liter per orang per hari atau setara 517,15 kilogram per orang per hari pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2.945.451,39 liter per orang per hari yang setara dengan 728,56 kilogram per orang per hari pada tahun 2045. Berikut merupakan standar acuan yang telah ditetapkan oleh Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Tabel 2. 49 Standar Acuan Timbulan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Orang/hari)	Berat (KG/Orang/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75-3,00	0,60-0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00-3,60	0,65-0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Realita timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Balikpapan melebihi standar yang ditetapkan oleh SNI: 8632-2018, menunjukkan adanya urgensi untuk membuat skema perencanaan pesimistis, atau menggunakan asumsi bahwa hasil proyeksi merupakan jumlah minimal timbulan sampah yang mungkin dihasilkan oleh penduduk di Kota Balikpapan 20 tahun mendatang. Perencanaan yang matang terkait infrastruktur yang menangani timbulan sampah di Kota Balikpapan tidak lagi hanya bersifat inisiatif, tetapi secara strategis diperlukan untuk menangani permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari timbulan sampah yang ada. Urgensi ketersediaan infrastruktur terkait pengolahan timbulan sampah di Kota Balikpapan semakin

tinggi terutama melihat kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) Manggar diperkirakan akan melebihi kapasitasnya (*overload*) pada tahun 2026, sedangkan proyeksi selama dua puluh tahun mendatang menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 211,41 ton per harinya. Hal itu membuat perencanaan terkait timbulan sampah tidak bisa dijalankan jika hanya sebatas menyediakan lahan baru, melainkan perlunya infrastruktur pengolahan timbulan sampah yang terintegrasi sehingga mampu menguraikan permasalahan sampah di Kota Balikpapan.

Infrastruktur lain yang juga tidak kalah penting diperhatikan adalah tentang ketersediaan air. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa air, baik untuk dikonsumsi maupun untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, ketersediaan infrastruktur air juga menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat proyeksi kebutuhan air yang diperlukan oleh masyarakat sebagai basis pemerintah daerah dalam membuat perencanaan yang matang. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 50 Proyeksi Kebutuhan air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 (M^3/Hari)

No	KECAMATAN	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040	Tahun 2045
1	Balikpapan Selatan	17.025,57	19.137,48	20.799,91	22.606,53	24.535,61
2	Balikpapan Kota	7.453,16	7.693,33	7.751,74	7.869,03	8.024,26
3	Balikpapan Timur	11.013,94	13.006,11	14.695,79	16.506,56	18.418,27
4	Balikpapan Utara	20.193,58	23.221,21	25.724,00	28.403,27	31.251,71
5	Balikpapan Tengah	11.818,51	11.885,92	11.949,34	12.079,68	12.263,10
6	Balikpapan Barat	8.703,32	11.267,15	11.622,21	12.054,36	12.541,05
KOTA BALIKPAPAN		**76.208,07**	**86.211,19**	**92.542,99**	**99.519,42**	**107.034,00**

Sumber: Olah data.

Hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan menggunakan standar acuan pada SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Kondisi yang sama layaknya terkait timbulan sampah, Kecamatan Balikpapan Utara merupakan kecamatan yang diproyeksikan membutuhkan air bersih paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, dan Balikpapan Kota berada pada posisi sebaliknya. Hal itu tidak terlepas dari jumlah penduduk yang juga memiliki posisi yang sama di enam kecamatan di Kota Balikpapan. Hasil proyeksi kebutuhan air bersih didapatkan dengan cara mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar kebutuhan air bersih yang telah ditetapkan di dalam SNI: 6728.1:2015. Berikut merupakan standar acuan yang tertuang di dalam SNI: 6728.1:2015.

Tabel 2. 51 Standar Acuan Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/O/H)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Motropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Kota Balikpapan termasuk ke dalam kota besar dengan jumlah penduduk sebesar 703.611 jiwa pada tahun 2022. Hal itu membuat Kota Balikpapan setidaknya membutuhkan 76.208,07 liter per hari pada tahun 2025. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5.304,15 liter per dibandingkan jumlah air bersih yang mampu disalurkan oleh PDAM pada tahun 2020, yakni rata-rata sebanyak 70.903,92 liter per hari. Peningkatan kebutuhan air bersih pada tahun 2025 dan akan terus meningkat selama dua puluh tahun ke depan mengharuskan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mampu menyuplai air bersih sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu isu terkait krisis air yang melanda Kota Balikpapan akibat penurunan kinerja dua waduk, yakni Teritip dan Manggar, menambah urgensi terhadap penyediaan infrastruktur terkait air bersih.

Infrastruktur air bersih tidak hanya berupaya untuk menyediakan air bersih dalam jumlah banyak, melainkan menjaga dan menyimpan air bersih agar mampu menjadi kunci ketahanan air bersih di masa-masa sulit, seperti saat musim kemarau. Kota Balikpapan memiliki potensi yang besar untuk mengelola air dengan lebih baik. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan dikelilingi oleh laut dan hutan sebagai tempat penyimpanan cadangan air yang berpotensi diubah menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hal tersebut membutuhkan perencanaan yang baik dan matang, sehingga air yang tersedia di Kota Balikpapan tidak hanya sekadar mengalir saat hujan, tetapi juga mampu ditampung, disimpan, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama dua puluh tahun mendatang.

Infrastruktur listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di Kota Balikpapan. Listrik merupakan salah satu sumber energi pokok yang memiliki peran vital dalam berbagai kegiatan manusia pada rumah tangga, industri, perdagangan, transportasi, dan telekomunikasi. Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Uraian	2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh
1	Balikpapan Selatan	154.778	216.689,11	173.977	243.567,96	189.090	264.726,10	205.514	287.719,41	223.051	312.271,35
2	Balikpapan Kota	82.813	115.937,99	85.481	119.674,03	86.130	120.582,67	87.434	122.407,08	89.158	124.821,84
3	Balikpapan Timur	100.127	140.177,39	118.237	165.532,32	133.598	187.037,29	150.060	210.083,46	167.439	234.414,32
4	Balikpapan Utara	183.578	257.009,16	211.102	295.542,61	233.855	327.396,31	258.212	361.496,11	284.106	397.749,04
5	Balikpapan Tengah	107.441	150.417,35	108.054	151.275,33	108.630	152.082,53	109.815	153.741,44	111.483	156.075,84
6	Balikpapan Barat	96.704	135.384,99	102.429	143.400,04	105.656	147.919,09	109.585	153.419,10	114.010	159.613,41
	KOTA BALIKPAPAN	**725.440**	**1.015.616,00**	**799.280**	**1.118.992,28**	**856.960**	**1.199.744,00**	**920.619**	**1.288.866,60**	**989.247**	**1.384.945,80**

Sumber: Olah data

Kebutuhan listrik di Kota Balikpapan diproyeksikan dengan acuan standar untuk proyeksi kebutuhan listrik tahun 2025-2045 adalah Perpres No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana mencapai 1.400 KWh/per kapita atau 1,4 MWh. Hasil proyeksi kebutuhan listrik cenderung mengalami tren kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kecuali pada tahun 2030 yang mengalami penurunan kebutuhan sebesar 80.752 MWh. Pada tahun 2045 kebutuhan listrik diproyeksikan mencapai 1.384.945,80 MWh dengan rentang di setiap lima tahunnya adalah mulai dari 80.752 MWh hingga 103.376 MWh. Peningkatan kebutuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kota Balikpapan belum terpenuhi pada tahun 2020 sehingga dengan pertumbuhan penduduk sebesar 38.380 jiwa, dibutuhkan 103.376 MWh, kemudian peningkatannya cenderung lebih kecil selama dua puluh tahun mendatang hingga 2045.

Proyeksi kebutuhan listrik di masa depan memungkinkan perencanaan infrastruktur yang sesuai dan tepat sasaran. Beberapa tantangan yang perlu direspon terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan penyimpanan energi. Proyeksi yang tepat diharapkan dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekurangan energi yang dapat mengganggu kestabilan jaringan listrik. Selain itu, dengan proyeksi yang akurat, diharapkan dapat menjadi acuan untuk memutuskan investasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan secara efisien. Hal ini membantu menghindari investasi berlebihan atau kekurangan dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang utama dapat diprioritaskan pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang telah diantisipasi sebelumnya.

2.6 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.6.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. Dalam pengaturan pertumbuhan wilayah, RTRW menetapkan regulasi yang mengatur pertumbuhan dan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Hal ini menjadi dasar untuk menghindari pembangunan yang tidak terkendali, dan memastikan lahan digunakan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan kota. Sementara itu,

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, RTRW membantu mengidentifikasi dan melindungi sumber daya alam guna melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem yang berperan dalam menjaga kualitas air dan udara, serta mengurangi risiko bencana. Lebih lanjut, dengan perencanaan kota yang telah dituangkan dalam RTRW, dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk kota. Hal ini mencakup akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan lingkungan yang nyaman dan sehat. Selanjutnya, kinerja RTRW juga diharapkan dapat menjadi indikasi pengembangan infrastruktur yang tepat. RTRW membantu mengarahkan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, serta memastikan bahwa infrastruktur tersebut dibangun di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan Kota Balikpapan.

1. Tujuan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Secara umum tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang kota merupakan terjemahan dari visi dan pengembangan kota dalam pelaksanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai kondisi ideal dari kegiatan penataan ruang wilayah seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, tujuan penataan ruang disusun agar tercipta suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Tujuan penatan ruang kota memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Dalam perumusannya, suatu tujuan penataan ruang didasarkan pada:

a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
b. Karakteristik wilayah kabupaten;
c. Isu strategis; dan
d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Adapun kriteria tujuan penataan ruang adalah:

a. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang;
b. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Visi dan misi pembangunan suatu kota merupakan landasan utama penyusunan sebuah tujuan penataan ruang. Berdasarkan karakteristik fisik Kota Balikpapan dan berdasarkan kehidupan sosial budaya masyarkat Kota Balikpapan, visi pembangunan Kota Balikpapan adalah:

> ***"TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA BERDIMENSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA BUDAYA YANG DIDUKUNG OLEH PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERPERADAPAN MAJU (MADINATUL IMAN)."***

Berdasarkan visi tersebut maka kata kunci yang diperoleh untuk merumuskan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah:

1. Berdimensi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata budaya dan pendidikan;
2. Berwawasan lingkungan; dan
3. Berkelanjutan.

Lebih spesifik tujuan penataan ruang wilayah Kota Balikpapan dirumuskan dalam dokumen tata ruang wilayah kota yang didasarkan pada tujuan penataan ruang nasional seperti yang tertera dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yakni perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Balikpapan

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang Kota Balikpapan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa

pokok kegiatan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah kota meliputi:

1. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, dengan strategi
    a) memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
    b) mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang; dan
    c) mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.
2. peningkatan *aksesibilitas* antar kawasan, dengan strategi
    a) mendukung pengembangan jaringan jalan Trans Kalimantan;
    b) mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota;
    c) meningkatkan ruas-ruas jalan utama;
    d) mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota;
    e) mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
    f) menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
    g) meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
    h) mengembangkan terminal angkutan barang;
    i) meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan;
    j) mengembangkan jembatan antar pulau; dan
    k) meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.
3. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*), dengan strategi
    a) mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
    b) mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
    c) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
    d) mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota; dan
    e) mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
4. perwujudan kelestarian kawasan lindung, dengan strategi
    a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
    b) menjaga keberlanjutan hutan lindung;
    c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;

d) merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
e) mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.

5. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota, dengan strategi
   a) menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota;
   b) mengembangkan RTH di kawasan sempadan; dan
   c) mengembangkan RTH di kawasan rawan bencana.
6. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan, dengan strategi
   a) mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
   b) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
   c) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.
7. pengembangan kawasan strategis kota, dengan strategi
   a) menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan;
   b) memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis; dan
   c) mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada.
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara, dengan strategi
   a) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
   b) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
   d) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

3. Rencana Struktur dan Pola Ruang Daerah

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang

berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kota merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kota, yang terdiri atas: a) PKN yang berada di wilayah kota, b) PKW yang berada di wilayah kota, c) PKL yang berada di wilayah kota, d) PKSN yang berada di wilayah kota, dan e) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kota yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kota, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang terintegrasi serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di dalam wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota, pada dasarnya berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kota yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kota dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kota, terutama pada pusat-pusat kegiatan/ perkotaan yang ada.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah kawasan perkotaan Balikpapan. Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai pusat penyebaran kegiatan ekonomi yang skala pelayanannya meliputi wilayah Balikpapan, Kutai, Penajam Pasir Utara, Samarinda, Bontang, dan beberapa Kota/ Kabupaten di sekitarnya serta menjadi salah satu pusat pendukung ekonomi secara nasional. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Balikpapan adalah meliputi kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kawasan Pusat Kota ini mempunyai fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Balikpapan meliputi rencana Pusat Kota Ke-2 Karang Joang di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara dan rencana Pusat Kota Ke-3/ Kota Perdesaan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kota Balikpapan ditetapkan di ibukota-ibukota kecamatan

sebagai pusat pelayanan bagi kelurahan itu sendiri atau beberapa kelurahan di sekitarnya.

Rencana pengembangan transportasi darat di Kota Balikpapan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan, prasarana angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, dan prasarana transportasi perkotaan yang meliputi jalur pedestrian, penyeberangan, jalur pejalan kaki, dan sebagainya. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat Kota Balikpapan, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pengembangan transportasi laut di Kota Balikpapan diarahkan untuk 1) meningkatkan keterhubungan Balikpapan dengan kota/ kabupaten di sekitarnya, 2) meningkatkan kemudahan distribusi barang produksi dan konsumsi, 3) meningkatkan daya tampung prasarana pelabuhan, dan 4) meningkatkan kenyamanan penumpang sejalan dengan pertumbuhan permintaan pergerakan melalui laut. Sementara itu, pengembangan transportasi udara di Kota Balikpapan diarahkan untuk menunjang pertumbuhan yang cepat akan permintaan pergerakan udara baik penumpang dan barang yang diperkirakan mengalami peningkatan dua kali lipat dari sekarang. Sasaran dari pengembangan transportasi udara di Kota Balikpapan adalah 1) terciptanya pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien dan 2) terjaminnya keamanan ruang udara guna terciptanya transportasi udara yang aman dan nyaman. Mengingat proyeksi jumlah penduduk dan luas pelayanan transportasi udara di Kota Balikpapan yang cukup besar, ketersediaan kapasitas Bandar Udara Sepinggan di Kota Balikpapan diperkirakan tidak akan mencukupi lagi, sehingga dibutuhkan perluasan dan peningkatan.

Pengembangan prasarana telematika meliputi prasarana telepon terestrial, telepon satelit/selular, dan infrastruktur koneksi internet. Sasaran kebijakan pengembangan prasarana telematika meliputi: 1) tercapainya tingkat pelayanan jaringan telepon terestrial sampai 100 persen dari total potensi sambungan non rumah tangga, 2) tercapainya tingkat pelayanan jaringan telepon terestrial untuk kawasan perkotaan, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan, 3) terbangunnya prasarana telekomunikasi satelit dengan daya jangkau 100 persen wilayah di Kota Balikpapan, dan 4) tertatanya

prasarana telekomunikasi satelit secara terpadu. Selanjutnya, sasaran dari kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya energi di Kota Balikpapan adalah: 1) tersedianya pasokan listrik yang memadai, kontinyu dan berkelanjutan sesuai dengan potensi bahan baku setempat, 2) terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Kota Balikpapan sampai tingkat pemenuhan 100 persen pada tahun 2030, dan 3) mulai digunakannya teknologi pengolahan energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan gas.

Sasaran pengembangan prasarana sumberdaya air mencakup 1) meningkatnya cadangan air permukaan siap guna sampai 150 persen pada tahun 2030, 2) meningkatnya cadangan air tanah sampai 120 persen pada tahun 2030, 3) berkurangnya penggunaan air tanah sampai di bawah 50 persen dari potensi yang ada pada tahun 2030, 3) tercapainya pengairan irigasi teknis sepanjang tahun minimal 70 persen dari luas total sawah irigasi yang ada, dan 4) tercapainya pelayanan air minum mencapai 100 % penduduk di tahun 2030. Selanjutnya, rencana pengembangan prasarana penyehatan lingkungan meliputi rencana pengembangan sistem drainase perkotaan, rencana pengembangan prasarana sampah dan rencana pengembangan jaringan air limbah.

Berbeda dengan struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem jaringan sarana dan prasarana, pola ruang wilayah Kota Balikpapan mengatur penggunaan lahan yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung terdiri dari:

a. Hutan Lindung Sungai Manggar sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 4.999 Ha;
b. Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian berada di Kelurahan Kariangau Balikpapan Barat dengan luas kurang lebih 9.782 Ha;
c. Perluasan Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas kurang lebih 1.402 Ha.

Rencana perwujudan pengembangan kawasan hutan lindung meliputi:

1) mengembangkan kawasan wisata alam;
2) mengembangkan wisata pendidikan alam/lingkungan hidup;

3) mengembangkan kegiatan penelitian flora fauna khas Kalimantan; dan
4) mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha, kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih1,591 ha, kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha, kawasan peruntukan peternakan terdapat di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 100 Hektar. Kawasan peruntukan perikanan tangkap kurang lebih 27.896 ha di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur, sedangkan untuk kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas kurang lebih 579 ha. Pengembangan kawasan minapolitan dengan luas kurang lebih 190,56 ha di muara Sungai Manggar Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru.

Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha, Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 2.238 ha, Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah dengan luas kurang lebih 22.270 Ha, Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.170 Ha, industri menengah dengan luas kurang lebih 918 Ha.

4. Indikasi Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahapan pembangunan wilayah Kota Balikpapan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032 dijabarkan secara rinci pada periode pertama perencanaan. Berikut merupakan penjabaran kinerja program tata ruang Kota Balikpapan:

Tabel 2. 53 Indikasi Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
A	**Terwujudnya Struktur Ruang**			
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota	Penataan pusat pemerintahan melalui integrasi kawasan pemerintahan	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	APBD
		Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	Hibah

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
		Pengendalian dan monitoring pusat perdagangan dan jasa	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	APBD
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota	Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pembangaunan Kawasan ITK di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD
		Pembangunan Pasar Tradisional di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Pendidikan di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
3	Perwujudan Pusat Lingkungan	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kota di Kelurahan Damai	Kelurahan Damai	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan kawasan perdagangan jasa skala kecamatan di Kelurahan Gununsari Ilir	Kelurahan Gunung Sari Ilir	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Manggar	Kelurahan Manggar	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Lamaru	Kelurahan Lamaru	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota di Kelurahan Batu Ampar	Kelurahan Batu Ampar	APBN, APBD, Swasta
4	Perwujudan Sistem	Peningkatan Jalan	Kota Balikpapan	
		Pembangunan Jalan		

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
	Prasarana Transportasi	Pembangunan Terminal	Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
		Pembangunan Jalan Kereta Api	Kota Balikpapan	APBN
		Peningkatan pelabuhan utama	Kelurahan Prapatan	APBN
		Kawasan Pelabuhan Terpadu Kariangau	Kelurahan Kariangau	APBN, APBD
		Peningkatan ruang terminal dan prasarana pendukung bandara	Bandara Sepinggan	APBN, APBD, Swasta
5	Telekomunikasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Kota Balikpapan	APBD, Swasta
6	Sumberdaya Air	Pengembangan dan perencanaan prasarana sumberdaya air	Kota Balikpapan	APBD
		Peningkatan irigasi teknis	Kelurahan Teritip	APBD
		Pembangunan Waduk	Kelurahan Teritip, Kelurahan Kariangau	APBN, APBD, Swasta
7	Sumberdaya Energi	Penataan dan pengembangan jaringan listrik	Kota Balikpapan	APBD, Swasta
		Pengembangan pembangkit listrik	Kelurahan Manggar, Teritip, Kariangau	Swasta
8	Penyehatan Lingkungan	pengembangan dan perencanaan TPA	Kec. Kerajaan, Tinada, Siempat Rube, Pergetteng Getteng Sengkut, Salak, Sitellu Tali Urang Julu	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan sistem drainase	Kota Balikpapan	APBN, APBD
		Pengembangan pengelolaan limbah	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan pengelolaan air minum	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
9	Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki	Pembangunan dan Peningkatan Pedestrian Kota	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
10	Jalur Evakuasi Bencana	Ruang Evakuasi dan Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
		Sarana dan prasarana evakuasi bencana	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
11	Jalur Sepeda	Pembangunan Jalur Sepeda	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu	APBN, APBD

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
B	**Terwujudnya Pola Ruang**			
1	Kawasan Lindung	Perwujudan Kawasan Lindung	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar	APBN, APBD, Hibah
2	Kawasan Resapan Air	Perwujudan Kawasan Resapan Air	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD, Hibah
3	Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Bakau	Perwujudan Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Bakau	Kota Balikpapan	APBD
4	Ruang Terbuka Hijau Kota	Pembangunan Taman Kota	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Jalur Hijau	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah	APBN, APBD, Hibah, Swasta
5	Kawasan Suaka Alam, Taman Wisata Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip, Prapatan, Margomulyo, Klandasan Ulu, Sepinggan, Lamaru	APBN, APBD
6	Kawasan Rawan Bencana	Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana	Kota Balikpapan	APBD
7	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kota Balikpapan	APBN, APBD
8	Kawasan Pertanian	Pengembangan kawasan sawah lestari	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBN, APBD
		Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBD
		Diversifikasi Kawasan Perkebunan	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBD
9	Kawasan Peternakan	Kawasan Sentra Peternakan	Kelurahan Teritip	APBN, APBD
10	Kawasan Perikanan	Pembangunan PPI Manggar	Kelurahan Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD
11	Kawasan Perumahan	Perumahan dan permukiman	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
12	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Zona I	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan	APBD, Swasta
		Kawasan Sub Pusat Kota Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pasar tradisional	Kota Balikpapan	APBD
		Pusat perbelanjaan dan kawasan pertokoan	Kelurahan Margasari, Baru Tenagh, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gunung Bahagia, Muara Rapak, Karang Joang, Damai	APBD
		Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Balikpapan	APBN, APBD
13	Kawasan Industri	KIK Kariangau	KIK Kariangau	APBN
14	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
15	Kawasan Pendidikan	ITK Karangjoang	ITK Karangjoang	APBN, APBD
16	Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal	Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Kariangau	APBN, APBD, Swasta
B	**Terwujudnya Kawasan Strategis**			
1	Perwujudan Kawasan Strategis	Pengembangan Kota Baru Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	Kelurahan Kariangau	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kelurahan Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD
		Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan	APBD, Swasta

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
		Pengembangan Kawasan Kota Baru Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan Margasari	Kelurahan Margasari	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Kawasan Pendidikan ITK	Kota Balikpapan	APBN, APBD
		Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain	Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karangjoang	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar	Kelurahan Karangjoang dan kelurahan Manggar	APBN, APBD, Hibah, Swasta

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Kinerja operasional yang dirinci tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi kinerja utama berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang mengedepankan aspek keruangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang.

2.6.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Kalimantan

Wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara dan berbagai kegiatan prioritas strategis pendukungnya, maka pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai **"Superhub Ekonomi Nusantara"**. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, untuk 20 tahun ke depan pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan ke 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan, baik layanan kesehatan, pendidikan keilmuan, pendidikan karakter, maupun keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan.
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial

yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.

3. Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi, meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Arah kebijakan untuk wilayah Kalimantan berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045 di atas, menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana di Kota Balikpapan.

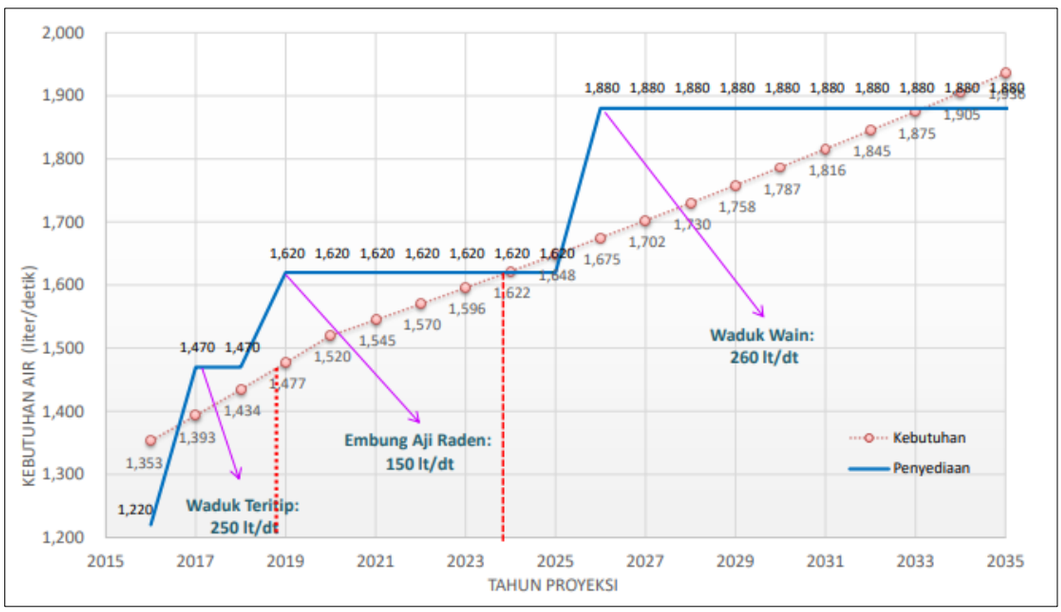
2.7 Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan Rencana Sektoral

Perencanaan sektoral mencakup program dan kegiatan yang secara khusus menyasar pada sektor tertentu secara rinci. Perencanaan tersebut sebagai respon sekaligus pengarustamaan terhadap isu yang menjadi fokus dalam pembangunan suatu daerah. Adapun pengintegrasian indikasi perencanaan sektoral ke dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan ditujukan untuk mengidentifikasi daya dukung daerah, khususnya terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus dalam perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Rencana sektoral yang dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 mencakup, Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minun (RISPAM) Tahun 2016-2035, Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2019-2049, dan *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan.

2.7.1 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minun (RISPAM) Tahun 2016-2035

Dokumen RISPAM menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Adapun tujuan pengembangan SPAM di antaranya mencakup, tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan dan tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Berikut pola skenario penyediaan air minum di Kota Balikpapan pada Tahun 2016-2035.

Gambar 2. 63 Skenario penyediaan air minum Kota Balikpapan



Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kondisi eksisting pola penyediaan air minum Kota Balikpapan Tahun 2016 mencakup PDAM (76%), Perpipaan Non PDAM (12%) dan Non Perpipaan (12%). Terdapat tantangan dalam penyediaan air minum Kota Balikpapan, di antaranya keterbatasan sumber air baku, kualitas air permukaan dan airtanah, kehilangan air 30%, topografi berupa 85% berbukit dan keandalan penyediaan listrik. Berikut disajikan analisis pola penyediaan air minum di Kota Balikpapan hingga tahun 2035.

Tabel 2. 54 Pola Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Liter/detik)	Pemenuhan Kebutuhan		
			PDAM (Liter/detik)	Perpipaan Non PDAM (Liter/detik)	Non Perpipaan (Liter/detik)
2016	625.968	1.781	1.220	214	214
2035	917.996	2.459	1.936	363	121

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kebijakan untuk meningkatkan penyediaan air minum Kota Balikpapan di antaranya dengan meningkatkan layanan PDAM, pengendalian jaringan perpiaan PDAM dengan menggunakan air laut sebagai sumber air baku alternatif (10% airtanah dan 5% air laut), mengendalikan bukan jaringan perpipaan. Peningkatan layanan PDAM di antaranya dengan pemanfaatan *iddle capacity* dari sumber air baku eksisting, pengendalian kehilangan air secara bertahap (0,5% per tahun), dan pembangunan sumber air baku yang mencakup Bendungan Teritip (250 liter/detik), Embung Aji Raden (150 liter/detik) dan Waduk Wain (130 liter/detik) yang ditargetkan beroperasi tahun 2025. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan Waduk Semboja (100 liter/detik), Waduk Sepaku Semoi (150 liter/detik), Waduk Lambakan (1000 liter/detik) dan SPAM Regional Tebasabo (1700 liter/detik).

2.7.2 Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2019-2049

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2019-2049 sebagai berikut:

- Mengharmonisasikan pembangunan Kota Balikpapan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konsep 52:48 (52% kawasan lindung dan 48% kawasan budidaya) hingga 30 tahun mendatang;
- Mewujudkan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berada pada kondisi optimum dengan nilai IKLH Pada Tahun 2049 sebesar 75,26 untuk melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- Mengoptimalkan Ketersediaan Air Baku Kota Balikpapan dan pelestarian sumber-sumber air hingga Tahun 2049;
- Mewujudkan Kota Balikpapan Bebas Sampah dan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada Tahun 2049;
- Ikut serta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui target penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari Kota Balikpapan sebesar 30% pada Tahun 2049;
- Mewujudkan Optimalisasi Produktifitas Pangan Kota Balikpapan pada Tahun 2049;
- Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2049;

- Meningkatkan Kesadaran lingkungan oleh seluruh elemen (swasta-masyarakat-pemerintah) dalam menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup.

2.8 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai Perpres 59/2017 target indikator TPB sekaligus yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan yaitu sebanyak 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kota Balikpapan dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB). Dari 195 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan 70,59% yang diketahui capaiannya, sedangkan 24,10% masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “belum dilaksanakan”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kota Balikpapan. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya.

Tabel 2. 55 Capaian TPB menurut pilar di Kota Balikpapan

Pilar	SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai target nasional	SB (Sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional	Belum dilaksanakan belum mencapai target nasional	NA (tidak ada data)	Total
Ekonomi	26	10		12	48
Hukum dan Tata Kelola	12	1	1	6	20
Lingkungan Hidup	18	6		13	37
Sosial	55	18	1	16	90
Total	**111**	**35**	**2**	**47**	**195**

Terdapat 57% dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 18% dan 1% untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24% TPB yang tidak ada data.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan yang harus direspon di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan analisis data di bab II, hasil FGD dengan perangkat daerah, serta masukan dari berbagai stakeholder melalui survey pendapat. Sedangkan isu strategis Kota Balikpapan merupakan hasil analisis tabulasi silang terhadap isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional, serta hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025. Berikut adalah permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kota Balikpapan.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Daya Daing UMKM Belum Optimal

Perekonomian daerah Kota Balikpapan masih didominasi oleh sektor pengolahan. Namun, peran sektor-sektor lain terhadap peningkatan perekonomian Kota Balikpapan juga tidak kalah penting, salah satunya adalah UMKM. Saat ini, jumlah UMKM di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan total omset yang dimiliki sekitar 1,5 triliun. Kondisi ini menunjukkan sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian daerah.

Di satu sisi peran UMKM belum diimbangi dengan daya saing UMKM. Kondisi ini ditandai dengan jumlah UKM di Kota Balikpapan yang telah melakukan ekspor produk masih sedikit jika dibandingkan dengan Kota Samarinda. Pada tahun 2022, jumlah UKM di Kota Balikpapan yang melakukan ekspor sebanyak 6 UKM, sedangkan UKM di Kota Samarinda sebanyak 21 UKM. Selain itu, kinerja UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing UMKM belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh pengawasan dan pendataan UMKM belum optimal, pemasaran dan digitalisasi UMKM belum optimal, pelayanan perizinan dan pemenuhan standar perizinan dari UMKM belum optimal, dan belum optimalnya integrasi UMKM ke dalam sektor lain.

2. Belum optimalnya Daya Tarik Wisata

Keberagaman daya tarik wisata di Kota Balikpapan belum dikembangkan secara optimal sebagai atraksi wisata bagi wisatawan yang sebagian besar melakukan perjalanannya untuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE). Selama ini beberapa wisatawan yang datang melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan memiliki motivasi kunjungan untuk transit dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Di pihak lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang telah menjadi potensi unggulan Kota Balikpapan.

Optimalisasi pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemasaran, pengembangan industri, dan kelembagaan pariwisata termasuk kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Posisi Kota Balikpapan sebagai beranda IKN Nusantara juga menjadi peluang untuk pengembangan daya tarik wisata kota secara optimal, sehingga tidak sekadar menjadi kota yang dilewati begitu saja saat menuju IKN tetapi memiliki daya tarik tersendiri yang memiliki keunikan *(unique selling point)*, yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kota Balikpapan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi

Kondisi ketenagakerjaan masyarakat Kota Balikpapan menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang menganggur tergolong tinggi yaitu mencapai 6,90 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan memang menunjukkan tren yang menurun selama periode 2011-2022. Namun angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran, baik di level Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,71 persen, maupun level nasional sebesar 5,86 persen pada periode yang sama.

Tingginya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan disebabkan oleh kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia kerja, angkatan kerja Kota Balikpapan didominasi oleh lulusan SMA sederajat yang mencapai 48,86 persen. Kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Kota Balikpapan yang didominasi oleh sektor industri pengolahan yang membutuhkan pekerja

dengan keahlian khusus yang umumnya didapatkan melalui pendidikan vokasi atau sarjana. Pada tahun 2022, serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hanya sebesar 7,33 persen jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Balikpapan yang mencapai 47,20 persen.

Tingkat pengangguran yang tinggi juga disebabkan oleh rendahnya keinginan masyarakat Kota Balikpapan untuk berwirausaha. Kondisi ini dapat dilihat dari status pekerjaan utama tenaga kerja yang masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 61,74 persen, sedangkan penduduk yang berusaha sendiri baru sebesar 20,02 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 6,22 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 3,13 persen pada tahun 2022. Apabila masyarakat memiliki keinginan untuk berwirausaha, persentase penduduk yang berusaha, baik berusaha sendiri maupun dibantu buruh, dapat mencapai angka yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong penurunan angka pengangguran.

4. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan

Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kawasan perkotaaan yang didominasi lahan terbangun berimplikasi pada berkurangnya luasan lahan produksi bahan pangan, sehingga akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan pada masa depan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan adanya ancaman krisis iklim dan permasalahan geopolitik global. Apabila melihat kawasan peruntukan pertanian di Kota Balikpapan yang hanya sebesar 4,17% dari luas keseluruhan pemanfaatan lahan dan potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.576,67 Ha, maka ketahanan pangan di Kota Balikpapan belum optimal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2022 menjadi peringkat kedua nasional kategori kota, namun sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan masih memiliki ketergantungan dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan.

5. Belum Optimalnya Penyediaan Air Baku

Penyediaan air baku di Kota Balikpapan masih belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber air yang ada di Kota Balikpapan. Sumber eksisting saat ini mencakup Embung Teritip, Embung Air Raden, Embung Manggar dan sumur-sumur dalam. Ketersediaan sumber-sumber air tersebut, belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan. Masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Total penyediaan air baku Kota Balikpapan hingga tahun 2020 adalah sebesar 1.570 liter/detik. Adapun total kebutuhanmya sebesar 2.248 liter/detik, sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik (RPJMD 2021-2026). Tercatat capaian akses aman air minum Kota Balikpapan sebesar 81,76% tahun 2021.

Permintaan air bersih semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih. Di sisi lain konservasi air berbasis hulu hilir juga belum diimplementasikan secara optimal, yang dibuktikan dengan capaian indeks kualitas air di Kota Balikpapan yang memiliki trend semakin menurun (berkategori kurang) hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menjadikan penyediaan air baku, di Kota Balikpapan perlu untuk semakin dioptimalkan.

6. Belum Optimalnya Penanganan Banjir

Banjir menjadi salah satu permasalahan penting untuk ditangani di Kota Balikpapan. Berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 30 titik. Selain itu, pada tahun 2018 hingga 2020, luasan genangan banjir pada DAS Klandasan dan DAS Sepinggan mengalami kinerja yang stagnan atau tidak mengalami penurunan luasan genangan banjir.

Berdasarkan analisis data, observasi lapangan, dan *focus group discussion*, penyebab banjir di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi sistem drainase yang belum terintegrasi secara baik dari permukiman di kelurahan hingga perkotaan dan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang belum optimal. Sementara itu, aspek non teknis meliputi kesadaran masyarakat, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penegakan hukum. Kebijakan penanganan banjir

harus dilakukan secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola ruang perkotaan dan pengelolaan sumberdaya air dari hulu ke hilir.

7. Belum Optimalnya Area Cakupan Penanganan Bencana

Cakupan penanganan bencana di Kota Balikpapan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama, implementasi mitigasi bencana yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait penguatan kapasitas masyarakat ketika terjadi bencana alam maupun non-alam.

Kedua, belum optimalnya kapasitas saluran drainase dan belum terbangunnya bendungan pengendali banjir sesuai dengan masterplan drainase. Ketiga, pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin. Penyebab lainya, yaitu penanggulangan bencana banjir di Kota Balikpapan belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Kondisi tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kejadian banjir tahun 2020 yang mencapai 88 kejadian. Selain itu, bencana lain, seperti kebakaran pemukiman/gedung juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat sebanyak 39 kejadian kebakaran pemukiman/gedung pada tahun 2015, lalu meningkat menjadi 44 kejadian pada tahun 2016. Kebakaran tersebut semakin meningkat, menjadi 51 kejadian hingga tahun 2019. Kondisi tersebut menjadi yang menjadi perhatian khusus agar selanjutnya dilakukan upaya yang optimal terkait penanganan bencana di Kota Balikpapan.

8. Penanganan Degradasi Lingkungan Belum Optimal

Penanganan degradasi lingkungan yang belum optimal di Kota Balikpapan merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dan tindakan berkelanjutan. Tantangan tersebut dapat dilihat dari kinerja komponen pembentuk IKLH yaitu kualitas udara, air dan lahan. Dari ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, indeks kualitas udara dan air memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2020. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015 - 2020. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan. Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut, disebabkan karena telah terjadi kontaminasi zat pencemar terhadap tubuh air di Kota balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada

bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Selanjutnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih juga perlu mendapat perhatian. Kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan masih mengolah air limbah menggunakan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Pengelolaan sampah yang belum optimal juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kinerja pengelolaan sampah di sumbernya pada tahun 2020 belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), dan banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Selanjutnya, capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015 – 2020.

Merpertimbangkan daya tampung TPAS yang terbatas, dan potensi dampak dari bangkitan IKN, maka diperlukan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif dan terintegrasi dari hulu ke hilir baik untuk pengelolaan persampahan maupun konservasi air baku.

9. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Infrasruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Perumahan dan permukiman layak di Kota Balikpapan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut dibuktikan dengan luasan kawasan kumuh yang tertangani sebesar 52,42 Ha pada tahun 2022. Dinamika pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dampak ikutan (*multiplier effect*) IKN memicu backlog perumahan di Kota Balikpapan juga menjadi semakin tinggi di

Kota Balikpapan. Dengan demikian, peningkatan intervensi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap akses masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak perlu untuk semakin diperkuat.

10. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal

Selama periode pembangunan sebelumnya, pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan terus mengalami perubahan. Kota Balikpapan memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang cukup memadai baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta. Namun demikian, pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama dari segi pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan tata kelola manajemen kesehatan, pengembangan layanan unggulan, dan peningkatan upaya preventif dan promotif tentang kesehatan kepada masyarakat.

Dari segi jumlah dan jenis tenaga kesehatan, Kota Balikpapan masih terkendala dalam pemenuhan jumlah minimal 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, belum optimalnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit, dan masih kurangnya jumlah dokter spesialis. Di sisi lain pemenuhan alat kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan lebih responsif dan handal. Dari segi keterjangakauan biaya, jarak ke pusat pelayanan kesehatan, dan waktu tunggu dalam pelayanan juga harus diperhatikan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan terbaik.

Pelayanan kesehatan tidak hanya fokus pada upaya kuratif, melainkan mulai meningkatkan upaya preventif dan promotif. Peningkatan pola hidup sehat pada masyarakat merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kesehatan, baik terhadap penyakit menular maupun tidak menular. Untuk itu, upaya screening dan deteksi dini juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak kesehatan yang lebih beresiko. Berdasarkan data capaian SPM Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021, SPM Kesehatan Kota Balikpapan baru tepenuhi 65%. Adapun pelayanan yang masih di bawah 50% yakni pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan usia dasar, pelayanan TBC, dan Hipertensi. Belum optimalnya capaian SPM Kesehatan di Kota Balikpapan juga berkorelasi dengan cukup tingginya penderita HIV/AIDS, TBC, Demam Berdarah, angka kematian ibu, penanganan stunting, dan sebagainya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yakni penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Kota Balikpapan belum memiliki penampungan khusus untuk menangani ODGJ di Kota Balikpapan dari segi kesehatan. Selama ini penanganan ODGJ hanya dilakukan di Kota Samarinda. Potensi masalah ODGJ bisa semakin meningkat di kemudian hari. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan secara digital seperti telemedicine juga perlu dikembangkan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang lebih luas.

11. Akses dan Kualitas Pendidikan Belum Optimal

Salah satu permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh Kota Balikpapan dalam bidang SDM adalah terkait belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan. Permaslahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum meratanya sebaran fasilitas layanan pendidikan yang berkualitas, belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan serta belum meratanya sebaran sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh fasilitas pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah yang masih berada di angka 10 tahun pada tahun 2022 menjadi salah satu indikasi perlu ditingkatkannya akses pendidikan di Kota Balikpapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan dapat merasakan pendidikan formal selama 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini masih perlu ditingkatkan guna mengejar program nasional yang berada pada angka 12 tahun. Selain itu, isu terbatasnya jumlah sekolah tingkat menengah atas menjadi hal yang perlu diselesaikan. Upaya penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi menjadi langkah penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting mengingat Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang kelak akan menjadi daerah pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di masa yang akan datang.

12. Belum Optimalnya Upaya Perlindungan Sosial

Secara umum, perlindungan sosial di Kota Balikpapan dilakukan melalui upaya penurunan kemiskinan dan melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan. Upaya penurunan kemsikinan di Kota Balikpapan dilakukan melaui integrasi antara program kemiskinan level nasional, daerah, dan masyarakat. Selama periode 2005-2022, angka kemiskinan Kota Balikpapan

menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan Kota Balikpapan cukup rendah yakni 2,45% atau sebanyak 15.830 jiwa.

Namun jika diperhatikan dari grafik kemiskinan per tahun, ada 3 gelombang yang menunjukkan peningkatan penduduk miskin yaitu pada tahun 2010 saat terjadi inflasi secara nasional, tahun 2015 saat terjadi penurunan ekonomi yang menyebabkan PHK besar-besaran, dan tahun 2021 saat terjadi pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Balikpapan menunjukkan penyaluran bantuan sosial untuk kebutuhan dasar dan jaminan sosial belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun angka kemiskinan Kota Balikpapan relative kecil, namun kondisi tersebut cukup rentan apabila terjadi guncangan sosial dan ekonomi, serta upaya pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial belum dilaksanakan secara optimal.

Selain penurunan kemiskinan, hal lain yang perlu diperhatikan yakni penanganan terhadap masalah-masalah sosial melalui upaya perlindungan terhadap kelompok rentan. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pemerintah Kota Balikpapan dan hasil FGD dengan OPD Kota Balikpapan menunjukkan bahwa masih banyaknya masalah sosial yang terjadi. Masalah sosial tersebut antara lain masih belum optimalnya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (<70%), belum optimalnya kesetaraan gender dengan nilai indeks pemberdayaan gender 68,62 (2022), masih kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas, belum optimalnya perlindungan sosial bagi lansia, adanya lokalisasi dan pergaulan bebas, adanya pengedaran narkoba, dan adanya potensi radikalisme.

Di sisi lain, Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN juga perlu mengantisipasi dampak dari potensi lonjakan arus migrasi yang semakin meningkat. Arus migrasi tersebut bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar jika tidak diantisipasi dan dilakukan penanganan yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang mulai timbul yakni adanya konflik lahan/pembangunan perumahan, dan pemukiman illegal di sekitar daerah pesisir.

Salah satu kendala dalam penanganan masalah sosial yakni belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif. Selain itu, masih terkendala tahap pengembangan dan peningkatan institusi sosial yang ada. Selama periode 2016-2022, jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan stagnan pada angka 6 dan pekerja sosial stagnan pada angka 34. Terbatasnya

jumlah tenaga yang melakukan pelayanan sosial dapat menghambat upaya program perlindungan sosial pada masyarakat. Selain itu, banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Kota Balikpapan perlu adanya kerjasama untuk melaksanakan upaya pembangunan di daerah, termasuk pembangunan dalam bidang sosial.

13. Inklusifitas Pelayanan Publik

Inklusifitas menjadi salah satu isu yang kerap mencuat khususnya di wilayah perkotaan. Penyediaan pelayanan publik yang inklusif perlu menjadi fokus pembangunan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Pelayanan publik yang inklusif dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok difabel, lansia dan anak seperti jalur khusus difabel, penyediaan ruang khusus bagi anak, dan ruang bagi ibu menyusui. Lebih lanjut, pelayanan publik di Kota Balikpapan diharapkan dapat bertransformasi tidak hanya mengedepankan model *e-government.* Namun, lebih jauh menjadi *smart government* dalam 20 tahun yang akan datang.

14. Belum optimalnya tata kelola & reformasi birokrasi

Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Balikpapan masih belum optimal. Penilaian capaian ini dapat ditinjau melalui aspek sumber daya manusia (SDM), sinkronisasi regulasi pusat-daerah, serta sarana dan prasarana. Terkait aspek sumber daya manusia, proses rekrutmen Pemerintah Kota Balikpapan hanya terbatas pada kandidat ASN saja. Hal ini mengindikasikan bahwa kandidat non-ASN seperti PPPK dan paruh waktu tidak dapat direkrut. Kebijakan ini dapat menghambat keberagaman dalam pembagian tenaga kerja internal pemerintah serta berpotensi mengabaikan calon aparatur yang memenuhi syarat. Selain itu, ketidakseimbangan antara pegawai yang pensiun dan pegawai baru mempengaruhi efektivitas pekerjaan mengingat jumlah kepegawaian yang tidak memadai. Kesenjangan antar generasi pegawai yang mencolok juga terlihat, seperti pegawai berusia relatif muda ditandai dengan kecerdasan dan kreativitas yang tinggi, namun daya juangnya relatif rendah. Selain perbedaan antar generasi, permasalahan kesehatan mental juga ditemukan di beberapa kalangan pegawai serta membutuhkan intervensi secara kelembagaan. Aspek SDM lain yang menghambat efektivitas keseluruhan upaya tata kelola

pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah kurangnya auditor kepegawaian dan perlunya perbaikan sistem informasi dan manajemen pengelolaan SDM.

Masalah yang teridentifikasi pada aspek regulasi dan sarana dan prasarana juga memerlukan perhatian mendalam guna mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Balikpapan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Balikpapan sudah tergolong baik, dengan Indeks SPBE mencapai 3,05 pada tahun 2022. Meski demikian, pengelolaan manajemen dan audit SPBE masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Sementara itu, kebijakan pemerintah pusat terkait pendataan penduduk tidak diikuti dengan dukungan yang memadai terhadap pemerintah daerah. Dalam menerapkan prinsip *agile government*, banyak indikator kinerja dari pemerintah pusat yang tidak relevan dengan konteks daerah. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab dalam menyusun proses bisnis tiap instansi pemerintah belum efektif karena penyusunannya hanya dilakukan oleh bagian organisasi saja. Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana fisik di seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) juga turut memberikan hambatan teknis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan.

15. Belum Optimalnya Penerapan *Smart City*

Kota Balikpapan memiliki sebuah konsep *smart city* atau kota cerdas yang mengusung visi "*Balikpapan The Most Livable City*" sebuah kota yang layak huni dengan tingkat kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Kota cerdas menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat/komunitas, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan *smart city* Kota Balikpapan tahun 2022, program *smart city* Kota Balikpapan perlu memaksimalkan rencana aksi program *smart city* yang tertuang dalam *master plan smart city* dengan dukungan kebijakan atau kelembagaan, Peningkatan Kapasitas SDM, Pembangunan Infrastruktur Pendukung, Pembangunan Aplikasi Pendukung dan Penguatan Literasi. Dalam penerapan *smart city* di Kota Balikpapan masih perlu menyelaraskan kerangka kesiapan perencanaan pembangunan daerah menjadi kota cerdas atau *smart city readiness* dengan kondisi saat ini, agar mendukung upaya menjadi kota cerdas yang layak huni dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan dan

penerapan kota cerdas harus disesuaikan dengan karakter dan potensi Kota Balikpapan.

3.2 Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus berakar pada isu-isu strategis yang ada dalam konteks global, nasional, regional, dan lokal agar terbentuk pemahaman komprehensif terkait potensi sinergi antar skala yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan setiap daerah untuk menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan tujuan nasional dan global yang lebih luas, memastikan koherensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya dan implementasi arah kebijakan. Pendekatan berlapis dalam perencanaan juga akan meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan daerah terhadap tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang dinamis dalam jangka panjang. Isu-isu strategis tingkat global hingga lokal yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 akan dibahas secara detail pada bagian berikut ini.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global merujuk pada tantangan dan permasalahan yang dampaknya bersifat universal dan memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Dampak dari isu global dapat dirasakan secara langsung dalam skala domestik, serta mampu memengaruhi kebijakan dalam negeri. Perkembangan global memberikan wawasan mendalam tentang tren, tantangan, dan potensi solusi yang relevan dengan mengikuti kompleksitas isu-isu global. Oleh karena itu, mengintegrasikan penanganan isu-isu global sebagai landasan makro dalam perencanaan jangka panjang daerah hingga dua dekade mendatang adalah langkah yang sangat mendesak. Isu global yang dipakai dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 adalah sepuluh *Megatrend* global yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Penjelasan mengenai tiap-tiap tantangan akan dijabarkan pada bagian berikut ini.

3.2.1.1 Demografi Global

Keadaan demografi global saat ini ditandai dengan suatu tonggak penting, dengan populasi dunia yang melampaui 9,45 miliar jiwa. Salah satu aspek penting dari lanskap demografis ini adalah peningkatan pesat populasi lansia, terutama di Asia. Transisi demografi ini menandakan adanya tantangan besar yang segera memerlukan perhatian. Adapun beberapa dampak yang mungkin

terjadi jika tantangan ini tidak diatasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dampak tersebut antara lain, terganggunya stabilitas penunjang kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh tidak memadainya infrastruktur layanan kesehatan, sistem jaminan sosial, dan dana pensiun. Dari sudut pandang ekonomi, angkatan kerja produktif yang berkewajiban untuk memikul beban penduduk tidak produktif terus bertambah sehingga dapat menghambat pembangunan. Tanpa intervensi dalam perencanaan, potensi terganggunya kesejahteraan dan melebarnya kesenjangan sosial masyarakat akan semakin besar. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah perlu mengakomodasi dinamika demografi yang terus berkembang, sehingga memastikan arah yang seimbang dan berkelanjutan di masa depan.

3.2.1.2 Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikannya tantangan global yang esensial, mengingat adanya ancaman akan hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang ada. Transformasi ini mengubah layanan ketenagakerjaan dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan perencanaan yang responsif terhadap dampaknya. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat menyebabkan meluasnya pengangguran, dan menyebabkan sebagian besar angkatan kerja tidak mempunyai mata pencaharian yang layak. Hal ini tidak hanya dapat memicu ketidakstabilan ekonomi tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial, karena semakin banyak orang yang terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mencukupi tanggungan hidupnya. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut kebijakan yang proaktif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan mengedepankan pendidikan, pelatihan, dan perluasan pasar kerja. Arah pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlengkapi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa yang akan datang.

3.2.1.3 Konstelasi Perdagangan Global

Megatrend global berikutnya adalah terkait dinamika perdagangan. Kondisi konstelasi perdagangan global saat ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang stabil sebesar 3,4 persen per tahun. Perluasan ini saling ketergantungan dan keterhubungan perekonomian di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan peluang perdagangan global ke dalam perencanaan jangka panjang, peluang perdagangan global mempunyai potensi keuntungan yang signifikan seperti fasilitasi pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi

teknologi, hingga pembinaan kerja sama tingkat regional. Meski demikian, perluasan perdagangan yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan hidup. Perencanaan perdagangan jangka panjang yang seimbang sangat penting untuk diterapkan agar potensi manfaatnya dapat berpengaruh langsung pada kesejahteraan kolektif suatu daerah.

3.2.1.4 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global merupakan *Megatren* global berikutnya yang ditandai dengan lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari total populasi global, sehingga menjadikan kota sebagai pusat perekonomian dan kehidupan yang sangat penting. Konsentrasi umat manusia ini mempunyai pengaruh yang besar, menyumbang hingga 70 persen PDB global. Namun, tanpa perencanaan pembangunan jangka panjang yang cermat, tren ini akan membawa sejumlah dampak negatif. Urbanisasi yang pesat akan membebani infrastruktur, sering kali mengakibatkan perumahan yang tidak memadai, kemacetan transportasi, dan degradasi lingkungan. Kesenjangan sosial-ekonomi cenderung semakin parah mengingat masyarakat yang terpinggirkan akan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang kerja. Isu ini berpotensi membahayakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dalam perencanaan jangka panjang dan pembangunan kota sangat penting untuk mewujudkan kehidupan kota masa depan yang berketahanan, sejahtera, dan adil.

3.2.1.5 Luar Angkasa

Megatrend ruang angkasa yang terus berkembang mencakup ekonomi, keberlanjutan, dan keamanan luar angkasa, mewakili inovasi yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Dengan meningkatnya minat dan investasi, ruang angkasa telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang potensial, menjanjikan sumber daya yang belum dimanfaatkan, penelitian dan pengembangan teknologi, serta pasar baru. Beberapa masalah yang terjadi dalam *megatren ini* antara lain adalah meningkatnya jumlah sampah antariksa menimbulkan ancaman nyata terhadap operasional satelit dan misi di masa depan. Aspek keberlanjutan juga berada dalam keseimbangan mengingat dampak lingkungan dari aktivitas luar angkasa, mulai dari teknologi penunjang hingga ekstraksi sumber daya alam yang memerlukan perencanaan yang

bijaksana. Pemanfaatan peluang luar angkasa perlu dipertimbangkan secara jangka panjang untuk memastikan bahwa ruang angkasa memberikan nilai tambah ekonomis serta menciptakan kerja sama yang berkontribusi bagi kemajuan manusia.

3.2.1.6 Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal dan pesatnya kemajuan teknologi keuangan, menjadikannya *megatrend* di bidang transformasi ekonomi. Adapun urgensi terkait tata kelola keuangan mengingat perannya dalam membentuk stabilitas dan efektivitas sistem keuangan di suatu negara. Beberapa perhatian khusus terkait *megatrend* ini perlu ditempatkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kemajuan teknologi yang pesat, yang melampaui beberapa kebijakan eksisting, dapat menyebabkan kerentanan pada infrastruktur keuangan dan pelanggaran keamanan siber. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal yang tidak inklusif dapat memicu ketidakseimbangan ekonomi dan berpotensi memicu pengelolaan keuangan masyarakat yang tidak efisien. Untuk menjamin tata kelola keuangan global yang tangguh dan inklusif, diperlukan perencanaan yang responsif dalam membangun struktur tata kelola yang kuat dan adaptif, tanggap inovasi teknologi, serta penentuan arah kebijakan fiskal yang bijaksana.

3.2.1.7 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan agenda global yang telah lama diupayakan implementasinya. Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan secara jangka panjang mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta menganggu kenyamanan berkehidupan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemeritahan dunia, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan yang tidak responsif dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis kemanusiaan yang telah diprediksi sebelumnya. Strategi pembangunan jangka panjang dalam mengatasi

perubahan iklim dapat memedomani perkembangan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk melakukan dekarbonisasi sektor-sektor utama, dan berinvestasi pada infrastruktur energi terbarukan, serta memberikan insentif pada praktik berkelanjutan di seluruh industri.

3.2.1.8 Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam, yang dipicu oleh meluasnya pengaruh perekonomian Asia dan jumlah penduduk di Afrika, merupakan *megatrend* penting karena implikasinya yang cukup besar. Tren ini berakar pada meningkatnya permintaan akan komoditas penting, yang didorong oleh pesatnya urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. Pentingnya hal ini terletak pada peran penting sumber daya alam dalam menopang aktivitas ekonomi global, termasuk pertanian, produksi energi, dan proses industri. Adapun beberapa urgensi mengapa *megatrend* ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas sumber daya yang langka dapat terjadi, sehingga memperburuk ketegangan geopolitik dan menghambat arah pembangunan berkelanjutan. Penerapan praktik pengelolaan sumber daya strategis yang memprioritaskan konservasi, distribusi yang adil, dan transisi menuju teknologi berkelanjutan dan hemat sumber daya dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan. Dampak buruk yang tidak dimitigasi akan menghambat kemajuan menuju stabilitas global dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dan berpikiran jangka panjang harus dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya bumi yang terbatas secara seimbang dan adil.

3.2.1.9 Pertumbuhan Kelas Menengah

Megatrend selanjutnya adalah pertumbuhan demografi kelas menengah yang sedang berkembang. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai status kelas menengah dan atas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai angka 90 persen dari populasi global atau sekitar 8,8 miliar manusia. Tren ini menandakan perubahan signifikan dalam dinamika sosio-ekonomi global dan mempunyai implikasi yang luas. Ketika kelas menengah bertambah, pola konsumsi dan kebutuhan juga meningkat, sehingga permintaan terhadap sumber daya, lapangan kerja, dan barang-barang primer meningkat. Mayoritas kelas menengah diperhadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai generasi *sandwich,* yaitu mereka memiliki peran

ganda dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan terkadang fisik kepada orang tua dan anak. Generasi *sandwich* merupakan cerminan dari pergeseran demografi, harapan hidup yang lebih panjang, dan perubahan struktur keluarga, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan multigenerasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang harus mempertimbangkan arah pembangunan yang proaktif pada pengembangan keterampilan, mendorong diversifikasi lapangan kerja, sekaligus mengatasi kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kelas menengah sangat diperlukan untuk mewujudkan masa depan global yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2.1.10 Geopolitik dan Geoekonomi

Megatrend terakhir adalah dinamika geopolitik dan geoekonomi. Terdapat beberapa perubahan kebijakan domestik agar dapat menyesuaikan ketegangan persaingan antarnegara yang diamplifikasi dengan munculnya poros kekuasaan baru. Negara-negara berkembang, yang secara kolektif berkontribusi sebesar 71 persen terhadap dinamika ini, memainkan peran penting dalam membentuk kembali peran kerja sama internasional. Meningkatnya persaingan antar negara mendorong penyesuaian kebijakan dalam negeri, yang mengarah pada fokus pada prioritas ekonomi, penyesuaian perdagangan, dan investasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang perlu mengakomodasi pengembangan tenaga kerja, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan kebijakan lingkungan hidup untuk mempertahankan daya saing dan beradaptasi dengan perkembangan global. Arah pembangunan memberikan urgensi yang jelas bagi setiap daerah untuk memposisikan potensi sumber daya utama secara strategis dalam konteks pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama antar wilayah.

3.2.2 Isu Strategis Nasional (RPJPN)

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPN dengan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penggunaan terminologi Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Ada 14 isu strategis nasional harus ditangani untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut uraian terkait keempat belas isu strategis nasional.

3.2.2.1 Produktivitas Rendah

Rata-rata tingkat produktivitas Indonesia yang dilihat melalui indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66 poin. Rendahnya angka produktivitas di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, tertinggalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan belum optimalnya sistem kelembagaan meliputi penghargaan dan hukuman, serta diperparah dengan lemahnya kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia kemudian mengakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulanya mencapai 5,7 persen selama periode tahun 2005 hingga 2010, kemudian menjadi hanya 4 persen pada 2015 hingga 2022. Kondisi itu masih diperparah dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial pada saat pandemi Covid-19 yang mencapai di bawah 5 persen. Isu ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila ingin menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.2 IPTEKIN dan Riset Lemah

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) merupakan salah satu hal krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berperan melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, pengembangan IPTEKIN di Indonesia selama ini terhambat oleh setidaknya dua hal, yakni rendahnya komitmen pemerintah terkait anggaran, ditambah dengan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Indonesia tercatat hanya menyediakan anggaran untuk IPTEKIN sebesar 0,28 persen dari PDB dan itu hanya 26,92 persen dari persentase anggaran yang disediakan oleh Malaysia, serta hanya 5,82 persen dengan Korea Selatan. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388 jiwa, sedangkan Singapura mencapai 7.287 jiwa.

Ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ikut berkontribusi dalam lemahnya IPTEKIN dan riset karena cenderung kurang kondusif. Hal itu tampak dari lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, baik secara domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama pada ranah riset dan industri juga sedikit banyak dikarenakan tingkat kesadaran ilmiah di masyarakat yang

masih lemah, sehingga keinginan untuk melakukan penelitian juga cenderung rendah.

3.2.2.3 Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Deindustrialisasi merupakan suatu kondisi industri yang tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian di suatu negara. Deindustrialisasi ditandai dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus melemah. Terdapat beberapa penyebab semakin melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB, yakni adanya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat logistik dan tingkat suku bunga.

Masalah serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami penurunan, yakni dari semula Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 dan menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, yakni mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

3.2.2.4 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Indonesia memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang tersebar di berbagai daerah, namun kinerja pariwisata selama ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada, terutama apabila dilihat melalui keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Pada sisi lain, adanya disrupsi digital dan teknologi juga memengaruhi proses pemanfaatan potensi pariwisata, terutama terkait promosi daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan proses percepatan dari pemanfaatan teknologi pada sektor pariwisata. Hal serupa juga terjadi pada industri kreatif yang menuntut adanya transformasi digital, komersialisasi, dan perluasan akses ke pasar internasional.

3.2.2.5 Ekonomi Biru Belum Optimal

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi dari sektor kelautan, termasuk ekonomi biru yang dapat menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penggunaan terminologi ekonomi biru karena merujuk pada pernyataan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indonesia dengan potensi yang melimpah sampai saat ini belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki, sehingga kontribusi sektor kelautan pada PDB hanya sebesar 7,60 persen. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi optimalisasi dari sektor kelautan, seperti belum optimalnya proses manajemen wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, terbatasnya diversifikasi industri yang memanfaatkan kekayaan laut, serta minimnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Tantangan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah rendahnya penanganan plastik di laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported*, dan *unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

3.2.2.6 Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama ini berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yakni mencapai 99,99 persen untuk UMKM, dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Namun, penyerapan tenaga kerja yang besar tidak serta merta linier dengan kontribusi UMKM dan Koperasi pada PDB. Tercatat kontribusi UMKM pada PDB hanya mencapai 60,51 persen dan 1,07 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan ada begitu banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan sumber daya manusia berkeahlian rendah, bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, minimnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, terbatasnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan terbatasnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.

Perekonomian Indonesia secara makro memang dapat dikatakan cukup solid di tengah ketidakpastian global saat ini, namun tetap diperlukan perencanaan terkait kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan.

Selama ini ruang fiskal yang rendah dan kualitas belanja yang belum optimal mengakibatkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Pada sisi lain, kebijakan moneter juga dihadapkan oleh adanya ketidakstabilan harga di tengah volatilitas harga komoditas pasar global, sehingga berdampak pada risiko tekanan inflasi di Indonesia.

3.2.2.7 Minimnya Infrastruktur dan Rendahnya Literasi Digital

Indonesia masih mengalami keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas dari sisi penawaran, permintaan dan ekosistem digital. Keterbatasan dari sisi penawaran selama ini terkait pada infrastruktur yang belum memadai, seperti terbatasnya kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Kemudian dari sisi permintaan, literasi digital dan pemanfaatan teknologi dari luar negeri yang tidak produktif menjadi salah satu masalah utama. Hal itu menyebabkan tingginya angka penetrasi jaringan tidak serta merta mampu mendongkrak proses pembangunan karena penggunaannya mayoritas untuk hiburan. Kondisi ekosistem yang juga tidak mendukung proses percepatan digitalisasi, riset, dan inovasi juga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia, ditambah dengan isu keamanan siber yang belum memadai.

3.2.2.8 Pembangunan Belum Berkelanjutan

Visi Indonesia Emas 2045 harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam proses pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Selama ini, proses pembangunan di Indonesia cenderung hanya melihat dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya penggunaan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, yakni mencapai 87,1 persen. Ketergantungan Indonesia akan energi fosil sesungguhnya telah mengalami penurunan. Hal itu ditandai dengan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan yang mencapai 8,06 persen selama periode 2005 hingga 2022, namun tetap belum mencukupi standar pembangunan berkelanjutan karena masih sangat bergantung dengan energi tak terbarukan.

Tingginya angka ketergantungan Indonesia akan energi fosil juga mengakibatkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam dapat berlangsung dari

waktu ke waktu karena minimnya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman terhadap para pelaku ekonomi yang patuh maupun yang bertentangan dengan ekonomi hijau. Padahal ketahanan ekonomi hijau berbasis ekologi mampu menjadi kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2.2.9 Integrasi Domestik Terbatas

Indonesia menetapkan transformasi ekonomi domestik yang terintegrasi sebagai salah satu arah kebijakan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dasar dari penetapan itu adalah terbatasnya integrasi domestik di Indonesia akibat pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa. Sistem logistik yang tangguh menjadi salah satu dasar dalam perwujudan integrasi domestik di Indonesia. Namun, selama ini sistem logistik Indonesia terkendala keterbatasan infrastruktur konektivitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa, banyaknya regulasi yang menjadi hambatan, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik antar wilayah.

Integrasi domestik tidak hanya terjadi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, melainkan terjadi pula di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan cenderung tidak elastis karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan sekitarnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya berada pada titik tertentu dan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3.2.2.10 Makin Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu dioptimalkan sebagai salah satu aspek utama penentu keberhasilan. Namun, selama rentang tahun 2005 hingga 2022, kualitas sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin rendah, terutama dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan sektor kesehatan dari waktu ke waktu dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Transisi demografi juga mengakibatkan perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan

yang dihasilkan, seperti adanya pola penyakit baru yang mungkin terjadi di masyarakat. Saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, adanya ketimpangan pada akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan belum adaptifnya sektor kesehatan pada perkembangan teknologi, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan kesehatan.

Sektor kedua yang berpengaruh besar pada sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama ketika berupaya mengoptimalkan bonus demografi. Dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggu di ranah global, dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai pasar tenaga kerja. Layanan pendidikan yang belum merata juga dikarenakan oleh disparitas partisipasi pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi yang tinggi. Kemudian kualitas pendidikan dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru yang tidak merata. Pada tataran yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya terimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, padahal hal itu mampu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Berbagai kondisi tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang kurang optimal, sehingga penduduk yang berpartisipasi di sektor pendidikan menjadi sumber daya yang kurang berkualitas dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait sumber daya manusia adalah perlindungan sosial. Isu perlindungan sosial menjadi krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan berubah dan ditandai dengan bertambahnya rasio ketergantungan nasional. Oleh karena itu, isu terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lain untuk kelompok lansia penting untuk diantisipasi sejak saat ini agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan kedepannya.

Tata kelola menjadi kunci dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola dapat mengintervensi melalui diadakannya kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik

yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.11 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada segi tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa hal yang belum dapat dioptimalkan hingga saat ini, seperti adanya regulasi yang berlebih dan ditambah dengan rendahnya kualitas regulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya regulasi tumpang tindih baik pada skala nasional maupun daerah. Selain itu kelembagaan instansi publik selama ini masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan timbulnya ego sektoral dalam kerangka hubungan pemerintah. Tata kelola yang terkait proses bisnis juga belum mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga dipandang tidak adaptif dan terkotak-kotakkan, serta menimbulkan inefisiensi. Pada problematika yang lebih tinggi, terjadi pula masalah kurang meratanya manajemen talenta di seluruh kementerian/lembaga/daerah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, rendahnya budaya dan etos kerja, serta kuatnya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta juga semakin rumit akibat adanya kerentanan yang dihadapi ASN terhadap intervensi politik. Meskipun pemerintah diminta untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan kebijakan, tetapi selama ini prinsip keterbukaan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah tata kelola yang terjadi pada internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti belum meratanya kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan dihadapkan masalah mendasar, seperti infrastruktur. Kurang optimalnya output yang diterima masyarakat kemudian menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

3.2.2.12 Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih

tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.

3.2.2.13 Demokratisasi Belum Optimal

Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal, misalnya saja demokrasi pada aspek politik terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Secara tidak langsung, hal itu menimbulkan adanya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, dan semakin meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

3.2.2.14 Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Hasil dari pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi pada tahun 1999 cukup signifikan, namun juga disertai dengan ketimpangan antara Jawa sebagai pusat pembangunan (*Java centris*) dan luar jawa yang kurang mendapat perhatian. Ketimpangan hadir dalam berbagai bentuk, seperti tidak meratanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, terbatasnya anggaran pemerintah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Kesenjangan antara juga hadir melalui masalah pertanahan, salah satunya adalah terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencama dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Memang secara eksplisit, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah kebutuhannya. Salah satunya terkait infrastruktur konektivitas domestik dan global, terutama di laut dan udara. Hal itu dikarenakan belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional.

Masalah kesenjangan antara Jawa dan Pulau Jawa perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika adanya potensi kerentanan keamanan nasional dalam menghadapi kompleksitas ancaman gangguan serta terdapat peningkatan isu geopolitik kawasan di daerah perbatasan.

3.2.3 Isu Strategis Regional (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)

Isu strategis regional merupakan isu kewilayahan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis jangka panjang di level daerah, termasuk Kota Balikpapan Berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi pembangunan suatu daerah. Adapun isu regional dibagi ke dalam dua bagian yaitu isu regional dalam konteks luas yang mencakup Wilayah Kalimantan dan isu regional yang lebih spesifik mencakup Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum, potensi pembangunan wilayah Kalimantan mencakup beberapa sektor, antara lain pertambangan, penggalian, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sektor industri pengolahan berbasis pertambangan dan penggalian tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena pengembangan kawasan industri belum optimal. Selain itu, capaian pembangunan di beberapa bidang juga turut mengalami tantangan seperti bidang sosial, ekonomi, dan sarana dan prasarana. Secara rinci isu dan tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Isu dan Potensi Pembangunan Wilayah Kalimantan

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
1	Ekonomi	Tingginya kesenjangan antarwilayah di Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten/kota
		Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan
		Sumber daya alam yang melimpah dan kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan
		inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan
2	Sosial	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
		Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan
3	Sarana dan Prasarana	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan *superhub* ekonomi
		Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan
		Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya menjangkau pusat-pusat perekonomian
		Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di daerah perbatasan
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan
6	Sosial Budaya dan Ekologi	Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (*heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan untuk pelestarian lingkungan dan ekologis

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil pemetaan isu dan potensi wilayah Kalimantan, secara lebih spesifik dirumuskan isu pembangunan yang dihadapi Kalimantan Timur. Hal ini berkaitan dengan lima aspek utama yaitu meliputi:

1. Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern,
2. Konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah pulau Kalimantan,
3. Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN,
4. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan, dan
5. Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

3.2.4 Telaah Isu Strategis KLHS RPJPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD disusun guna memberikan panduan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan

secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. KLHS RPJPD Kota Balikpapan disusun secara sistematis, komprehensif dan partisipatif hingga mampu merumuskan isu strategis yang kemudian perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

Isu strategis KLHS RPJPD dirumuskan dengan memperhatikan enam muatan KLHS yang meliputi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), kinerja layanan/jasa lingkungan, perkiraan mengenai dampak dan resiko kerusakan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dan tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, perumusan isu strategis KLHS RPJPD juga turut memperhatikan pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu strategis lain yang termuat dalam dokumen perencanaan sektoral lainnya. Berikut merupakan isu strategis KLHS RPJPD yang perlu diitegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan.

1. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pembangunan kota nyaman huni dan kesiapan sebagai mitra IKN
3. Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi
5. Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
6. Pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender
7. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
8. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
9. Kecukupan, keamanan dan pemanfaatan pangan

3.2.5 Penentuan Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance. Dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*) dan memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*). Hal ini

dilakukan agar isu strategis yang dirumuskan lebih kontekstual, adaptif, dan dinamis sehingga selaras dengan isu di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan juga disusun berdasarkan instrumen yang digunakan sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain adalah 1) dimensi sumber daya manusia (*people*), 2) dimensi kesejahteraan atau ekonomi (*prosperity*), 3) dimensi lingkungan (*planet*) yang didalamnya juga terdapat infrastruktur kewilayahan dan 4) dimensi tata Kelola pemerintahan (*management*). Adapun hasil perumusan isu strategis jangka Panjang Kota Balikpapan tahun 2025-2045 berdasarkan konsep dan kinerja Pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Tabulasi Silang (*Crosstab*) Isu Strategis Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
1	People	Pertumbuhan Kelas Menengah	Kualitas Sumber Daya Manusia yang makin rendah	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern	Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial	Pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kota Balikpapan	Akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial
		Urbanisasi Dunia	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan		Pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Kota Balikpapan yang semakin tumbuh perlu merespon problematika sosial dan meningkatkan pembangunan inklusif	Akses dan kualitas pendidikan belum optimal	
		Demografi global	Pembangunan Belum Berkelanjutan					Belum optimalnya upaya perlindungan sosial	
								Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
								Inklusifitas pelayanan publik	
2	Planet	Persaingan sumber daya alam	IPTEKIN dan Riset Lemah	Sumber daya alam yang melimpah serta kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan	Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia	Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	Penurunan risiko bencana melalui peningkatan infrastruktur pengendali bencana, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat	Belum optimalnya penyediaan air baku	Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana
		Perubahan Iklim	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Belum optimalnya penanganan banjir	
		Luar angkasa		Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (heart of Borneo) dengan menjaga kawasan untuk		Pemenuhan akses minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan sesuai dengan		Belum Optimalnya Area Cakupan Penanganan Bencana	

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
				pelestarian lingkungan dan ekologis		karateristik wilayah			
								Penanganan degradasi lingkungan belum optimal	
3	Prosperity	Konstelasi perdagangan global	Produktivitas Rendah	Tingginya kesenjangan antarwilayah di wilayah Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten/kota	Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah pulau Kalimantan	Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan dan transformasi struktur perekonomian Kota Balikpapan	Daya saing UMKM belum optimal	Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
		Geopolitik dan geoekonomi	Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian	Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan	Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian untuk mendorong kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa, dan infrastruktur pendukung pembangunan kawasan strategis nasional	Belum optimalnya tarik pariwisata	infrastruktur berkualitas terpadu dan penataan utilitas kota
			Pariwisata dibawah potensi	Inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan			Penguatan Kota Balikpapan sebagai kota layak huni melalui optimalisasi penyediaan jaringan sarana dan prasarana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelestarian	Belum optimalnya ketahanan pangan	Pemantapan kota cerdas dan nyaman huni

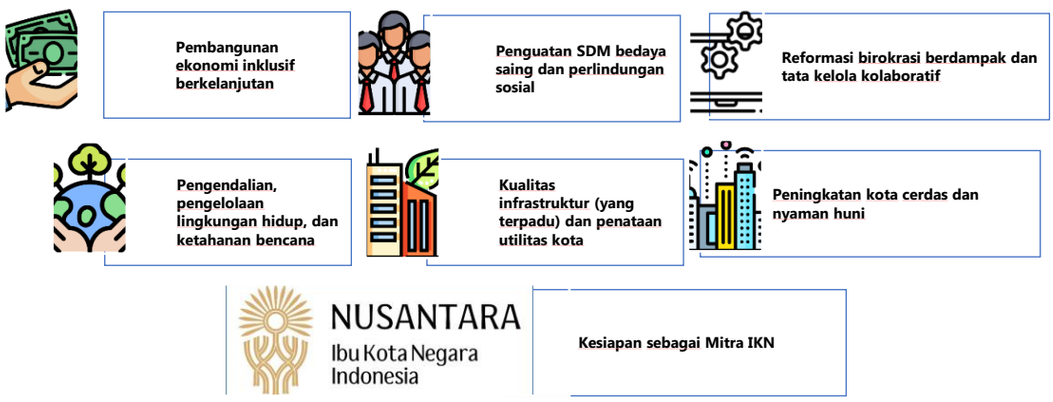
No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
							lingkungan hidup;		
			Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan superhub ekonomi				Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar	
			Integrasi Domestik Terbatas	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya					

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
				menjangkau pusat-pusat perekonomian					
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di daerah perbatasan					
			Ekonomi laut Belum Optimal						
4	Management	Tata kelola keuangan global	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan	Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN	Pembangunan kota nyaman huni dan kesiapan sebagai mitra IKN	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lincah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya tata kelola & reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi berdampak dan tata kelola kolaboratif

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
		Perkembangan teknologi	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan		Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi	Capaian pembangunan jangka panjang kemudian dielaborasi dengan respon kebijakan aktual, yaitu peningkatan kesiapan Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai pintu gerbang IKN	Belum optimalnya penerapan smart city	Maju sebagai mitra IKN
			Demokratisasi belum optimal						
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa						
			Infrastruktur dan literasi digital rendah						

Perumusan isu strategis berdasarkan metode tabel silang yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance* dan pembangunan berkelanjutan menghasilkan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Ketujuh isu strategis tersebut seluruhnya bersifat mendesak dan penting yang harus diselesaikan ke depan. Adapun enam isu strategis jangka Panjang yang dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Isu Strategis Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045



3.2.5.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Persoalan tenaga kerja masih menjadi tugas yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Angka pengangguran Kota Balikpapan tergolong tinggi, baik dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,90 persen pada tahun 2022. Selain persoalan pengangguran, ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh rasio gini di Kota Balikpapan juga menunjukkan tren yang semakin naik mencapai 0,334 pada tahun 2022. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat kemiskinan yang menunjukkan pencapaian yang semakin baik. Tingginya pengangguran dan naiknya ketimpangan mengindikasikan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kota Balikpapan masih berfokus pada pertumbuhan yang tinggi. Namun, belum dapat menjamin ketersediaan akses lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat dan manfaatnya baru dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Selain persoalan inklusifitas, pembangunan berkelanjutan juga menjadi isu yang perlu diangkat mengingat kondisi lingkungan yang semakin rusak sebagai dampak dari pembangunan ekonomi yang begitu masif. IKLH Kota Balikpapan secara umum mengalami peningkatan, tetapi nilai dan predikat IKLH masih tergolong sedang dengan nilai sebesar 63,52 pada tahun 2022.

Naiknya nilai IKLH didorong oleh peningkatan nilai indeks tutupan lahan sedangkan nilai indeks kualitas udara dan air secara umum mengalami tren yang terus menurun. Jalannya kegiatan hilirisasi yang dilakukan oleh sejumlah industri, baik industri besar maupun kecil, turut menyumbang penurunan kualitas udara dan air di Kota Balikpapan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya transformatif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kualitas lingkungan Kota Balikpapan dikhawatirkan akan semakin rusak dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Keberadaan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN juga menjadi salah satu urgensi pentingnya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan karena adanya potensi penambahan jumlah penduduk dan wisatawan yang dapat memengaruhi permintaan komoditas barang dan jasa yang harus disediakan oleh Kota Balikpapan. Naiknya permintaan barang dan jasa dapat mendorong kenaikan produksi. Apabila aktivitasnya tidak dikendalikan secara tepat, dapat memberikan eksternalitas negatif, baik terhadap kehidupan sosial maupun kualitas lingkungan.

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan ke depannya perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan melalui perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pada upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Secara lebih spesifik, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini dikembangkan melalui penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.2.5.2 Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu indikator dalam mengukur kualitas SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. Selama periode 2013-2022,

capaian IPM Kota Balikpapan menunjukkan trend meningkat, bahkan melebihi rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kota Balikpapan 81,13, Provinsi Kalimantan Timur 77,44, dan Nasional 72,91.

Meskipun capaian IPM Kota Balikpapan cukup tinggi, masih terdapat kendala pada pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Balikpapan sebesar 10,92 atau setara kelas 1 SMA. Capaian tersebut belum memenuhi wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA. Selain itu, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan tren fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum semua penduduk di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan menengah dan atas.

Pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan trend meningkat, bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, AHH Kota Balikpapan 74,78 dan Provinsi Kalimantan Timur 74,62. Meskipun adanya peningkatan pada capaian AHH, upaya peningkatan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut: angka kematian ibu yakni 39,59 per 100.000 kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting 19,6 persen (2022), cakupan pengobatan TBC 69 persen (2022), prevalensi kusta 0,2 per 1.000 penduduk (2022), jumlah kasus HIV 338 (2022), (sumber: profil kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022). Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 sudah 100 persen. Capaian tersebut perlu dipertahankan untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Balikpapan tercover dalam pelayanan kesehatan yang memadai.

Perlindungan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif. Secara umum, upaya perlindungan sosial di Kota Balikpapan diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal di antaranya terbatasnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, Pekerja Sosial, dan lain-lain), belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representative

untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan perlindungan sosial (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Selain itu, cakupan program perlindungan sosial lebih banyak bantuan sosial yang bersifat karikatif daripada bersifat pemberdayaan dan jaminan sosial (asuransi sosial).

3.2.5.3 Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif

Perwujudan *good governance* sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi memerlukan penguatan dalam sistem dan tatanan birokrasi yang lebih berdampak. Penguatan ini lebih menekankan kepada akuntabilitas sosial dan tidak hanya akuntabilitas kinerja. Capaian bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan hingga tahun 2022 relatif meningkat. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 68,91; Indeks Profesionalisme ASN mencapai 93,07; Nilai SAKIP mencapai 69,5 atau predikat B; dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,24. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang telah terpenuhi.

Terlepas dari capaian sektoral yang baik, kinerja bidang tata kelola Kota Balikpapan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Gini Kota Balikpapan yang masih terus meningkat. Upaya reformasi birokrasi Kota Balikpapan belum cukup optimal untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat Kota Balikpapan cukup tinggi, isu pengangguran di tengah dinamika ekonomi dan kemiskinan juga menjadi masalah periodik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Penyandingan kondisi-kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Balikpapan perlu diarahkan, tidak lagi pada pemenuhan target internal saja, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang bertumpu pada luaran/*outcome*.

Tata kelola kolaboratif juga turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Upaya kolaborasi pemerintah perlu dipertegas mengingat banyaknya pemangku kepentingan/*stakeholders* yang terlibat dalam mengejar misi pembangunan Kota Balikpapan. Salah satu misi yang mendapatkan atensi cukup tinggi adalah pengusungan Kota Balikpapan sebagai *superhub* atau mitra IKN. Kerjasama dan sinergi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok sebagai kawasan

transit dan penunjang ibukota, yang juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar. Selain itu, inisiasi untuk mempromosikan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition)* juga memerlukan peningkatan kapasitas di seluruh lapisan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pekerja. Dengan demikian, pendekatan tata kelola yang kolaboratif menjadi agenda penting dalam setiap tahapan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan.

3.2.5.4 Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah berkelanjutan. Berbagai aspek pendukung kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup masih terkendala dalam beberapa sektor. Berbagai keterbatasan dalam proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya air, sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat masih menjadi persoalan sehingga berdampak juga terhadap ketahanan daerah menghadapi bencana.

Fokus penyelenggaran lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global. Mandat tersebut dieksplisitkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13 dan ke-15 fokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, kepentingan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup juga menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola dan struktur ruang perkotaan dan pengelolaan sumberdaya alam dari hulu ke hilir melalui pendekatan kolaboratif. Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2.5.5 Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota

Kualitas infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota adalah faktor penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan

diharapkan dapat memberikan dampak pada kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik dan wilayah dengan utilitas yang tertata, tentu membutuhkan perencanaan jangka panjang yang cermat dan diimplementasikan secara bertahap. Kualitas infrastruktur yang baik dan utilitas kota yang tertata, diharapkan menjadikan Kota Balikpapan dapat menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan untuk tinggal dan berkembang bagi masyarakatnya.

3.2.5.6 Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni

Mewujudkan kota cerdas yang nyaman huni harus didukung dengan konsep kota berkelanjutan atau *sustainable city.* Hal tersebut penting untuk mempertahankan kualitas hidup warga Kota Balikpapan saat ini dan masa depan. Kota yang menerapkan *sustainable city* dalam penyelenggaraan tata kelola kotanya akan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan harapan generasi penerus dapat merasakan kota yang nyaman huni. Dalam perencanaan tata kelola kota, konsep yang digunakan juga akan mengacu pada kelestarian alam, termasuk pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif baik dalam menjaga lingkungan. Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman huni perlu diperkuat dengan menjaga kualitas hidup dan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebagai *enabler* agar tetap aman dan efektif digunakan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan dengan konsep kota cerdas yang nyaman huni perlu melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Negara akan memiliki peran strategis yang berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat Kota Balikpapan untuk bersama-sama mewujudkan konsep kota cerdas dan nyaman huni.

3.2.5.7 Maju sebagai Mitra IKN

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan

akan menjadi “otot” atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional.

Kesiapan Kota Balikpapan yang menjadi beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur berupa penyediaan fasilitas dalam hal permukiman, transportasi, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di IKN. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan pendanaan dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pengendalian banjir, penataan pergerakan transportasi, penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

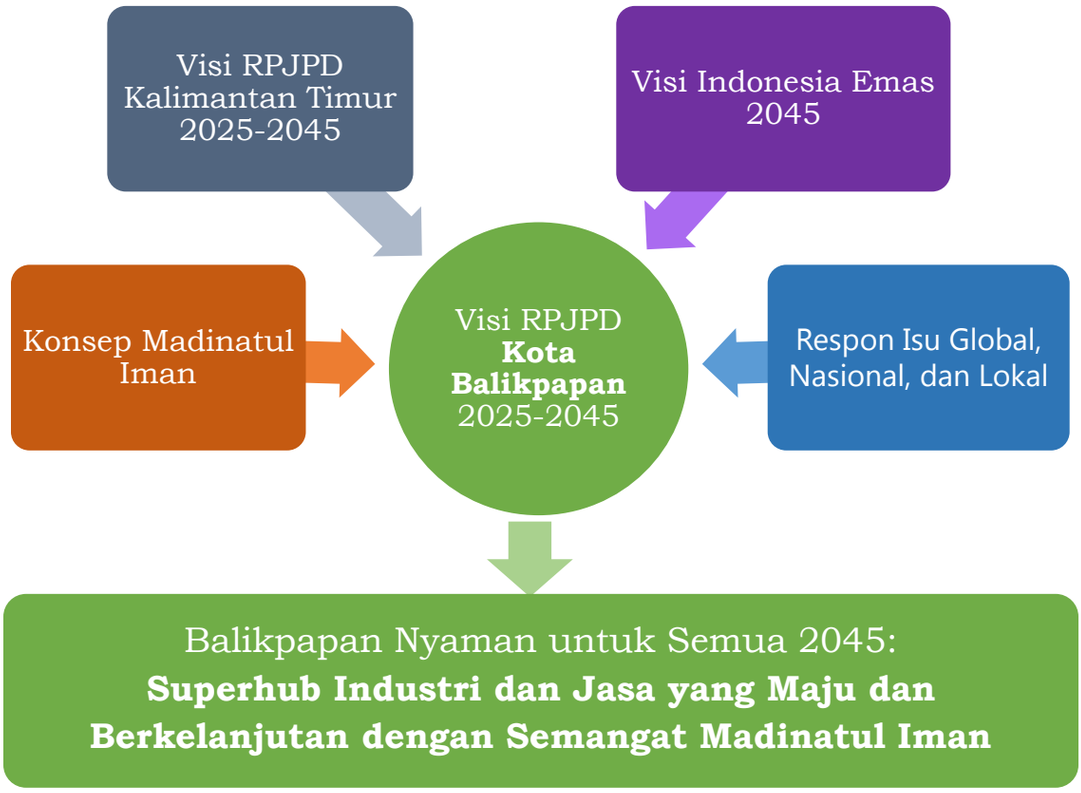
Bab VI RPJPD memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai dan misi merupakan agenda besar pembangunan untuk mencapainya. Substansi visi dan misi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai, menjawab permasalahan dan isu strategis, menjelaskan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah, menunjukkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, dan menunjukkan cita-cita bersama masyarakat. Perumusan visi dan misi juga mempertimbangkan aspek kesinambungan dengan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025, serta aspek sinkronisasi dengan RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 dan dan RTRW Kota Balikpapan.

4.1 Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045

Posisi Kota Balikpapan yang strategis dilihat dari sudut kepentingan lokal, nasional, maupun global, maka dalam merumuskan visi dan misi perlu menelaah berbagai lingkungan strategis. Dari sudut lokal, perumusan visi dan misi harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memandu penyelesaian masalah pembangunan. Masih dari sudut perspektif lokal, perumusan visi dan misi mengacu pada nilai yang menjadi budaya masyarakat, salah satunya konsep pembangunan kota “Madinatul Iman”.

Proses pembangunan dan berpindahnya ibukota negara, merupakan lingkungan strategis nasional yang harus direspon. Kota Balikpapan berposisi sebagai mitra IKN, sehingga dalam perumusan visi dan misi terhubung dan memiliki perspektif yang sama dengan sudut kepentingan nasional. Dalam perspektif lingkungan strategis global, maka perumusan visi dan misi Kota Balikpapan mampu merespon kondisi global yang dinamis. Kesepatan global seperti SDGs dan megatren merupakan aspek penting untuk menjadi acuan dalam perumusan visi dan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045, yaitu

Gambar 4. 1 Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045



Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 merupakan kesinambungan dari Visi RPJPD 2005-2025. Kota 5 dimensi merupakan modal kuat bagi akselerasi



pembangunan Kota Balikpapan untuk 20 tahun berikutnya. Perekonomian yang kokoh dan SDM Balikpapan yang unggul merupakan modal untuk memasuki era transformasi sebagaimana agenda besar yang dibawa oleh RPJPN. Berdasarkan modal tersebut, Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 berupaya mencapai kondisi yang terarah dan mencerminkan keunggulan kompetitif Kota Balikpapan. Tidak kalah penting, visi tersebut juga terhubung dan selaras dengan visi IKN, yaitu **“Kota Dunia untuk Semua”**.

Visi "**Nyaman untuk Semua"** merupakan cita-cita sekaligus sebagai identitas/*city branding* serta mencerminkan kemajuan kota di segala bidang. Balikpapan nyaman dibentuk dari kondisi sosial-budaya, perekonomian, lingkungan hidup, infrastruktur, utilitas kota dan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi nyaman direpresentasikan dari sumber penghidupan masyarakat yang layak dan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup dan sosial, serta infrastruktur kota berkualitas yang berdampak pada masyarakat sejahtera dan bahagia, serta manfaat pembangunan inklusif yang dapat diakses masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Visi **"untuk Semua"** juga berangkat dari realitas sosiokultural masyarakat Balikpapan yang heterogen dan multikultur. "Untuk Semua" menjadikan Balikpapan sebagai kota milik bersama dan inklusif yang selalu damai dan aman dengan kohesivitas sosial yang tinggi. Inklusif juga memiliki makna terkait proses pembangunan yang partisipatif-kolaboratif dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Pelayanan publik dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dan berkualitas, serta perekonomian Kota Balikpapan tumbuh inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh ditopang industri dan jasa besar, serta ekonomi kerakyatan dan kreatif yang semakin berdaya. Kota Balikpapan dengan demikian tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target kinerja pembangunan, sekaligus mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Pokok visi "untuk semua" selaras dengan motto tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu *no one left behind*.

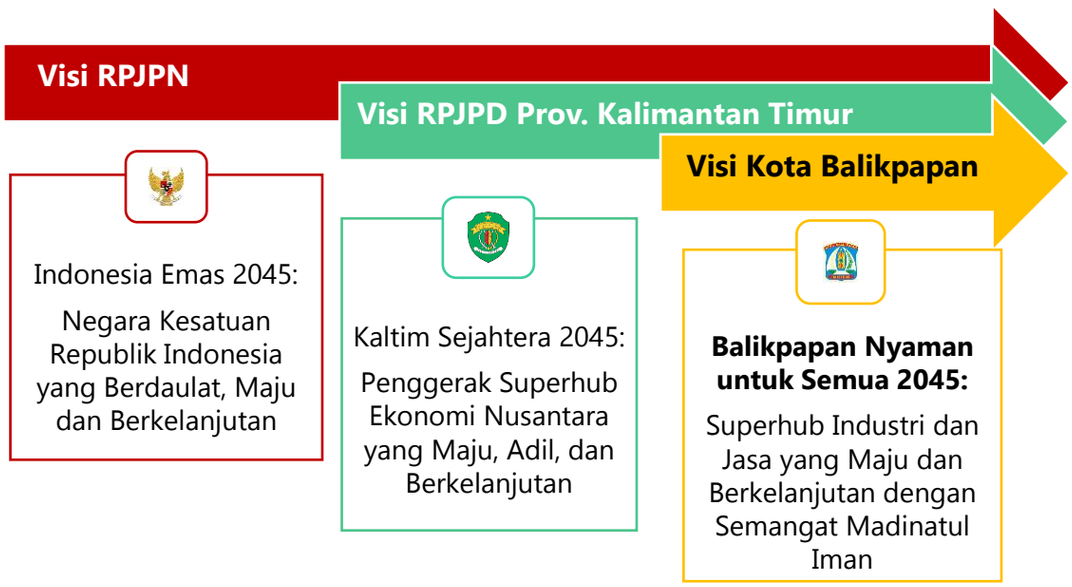
"Superhub Industri dan Jasa" merupakan posisi dan peran penting Balikpapan dalam pembangunan regional, nasional dan global. Balikpapan akan semakin memperkuat perannya sebagai sentra industri dan jasa yang berkelanjutan. Balikpapan sekaligus menjadi salah satu kota utama untuk pengelolaan sumber daya yang mengarah pada hilirisasi. Hub industri dan jasa mendukung peran Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Dalam hal ini Balikpapan mendukung peran Kalimantan dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.

Visi **"maju"** merupakan kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Maju juga mencerminkan kesinambungan pembangunan dan kinerja pembangunan yang semakin

progresif. Visi **“Berkelanjutan”** merupakan cita-cita bersama untuk menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan merupakan keselarasan dan keseimbangan pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dengan fondasi tata kelola yang berkualitas. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada capaian dan manfaat jangka pendek, sekaligus capaian dan manfaat pembangunan pada masa depan. Berkelanjutan juga sebagai bentuk kesinambungan antar periode pembangunan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik.

Visi RPJPD Kota Balikpapan tidak meninggalkan akar dari nilai di tengah masyarakat. Masyarakat Balikpapan sangat heterogen dan multikultur telah terbingkai dalam satu konsep pembangunan kota, yaitu ***Madinatul Iman***. Konsep ini merupakan strategi pembangunan sekaligus cita-cita yang memiliki makna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban maju dengan landasan iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Kota yang memiliki peradaban maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi serta hidup harmonis dalam lingkungan masyarakat yang multikultur atau majemuk. *Madinatul Iman* menjadi landasan, nilai dan cita-cita pembangunan yang terus relevan, mengingat pula perlu upaya antisipatif dengan semakin besarnya tantangan pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan. *Madinatul Iman* tetap menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang inklusif dan toleran.

Gambar 4. 2 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045



Visi RPJPD Kota Balikpapan merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Visi RPJPD Kota Balikpapan mendukung pencapaian kondisi Kalimantan Timur Sejahtera 2045,

serta kondisi maju, adil dan berkelanjutan sebagai penggerak superhub ekonomi nusantara. Visi RPJPD Kota Balikpapan dalam konteks nasional mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, yang di dalamnya akan mencapai kondisi Indonesia berdaulat, maju dan berkelanjutan.

4.2 Sasaran Visi

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih rinci, terkait indikator dan target sasaran visi RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten//kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Berikut sasaran, indikator, dan target visi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator Visi	Satuan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	Peningkatan perekonomian dan pendapatan perkapita	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50-7,00	6,60-7,20	6,73-7,45	6,85-7,70	7,00-8,00
		2. PDRB per kapita	Rp juta	225,56	378,228-513,384	569,063-873,164	759,898-1232,944	988,90-1.664,68
		3. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	16,75	17,8	19,11	20,42	21,99
		4. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	47,50	49,76	52,59	55,42	58,82
		5. Persentase Pekerja di Sektor Jasa	%	77,71	78,57	79,64	80,71	82
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	6. Tingkat Kemiskinan	%	2,15 – 2,20	1,73-1,80	1,20-1,29	0,67-0,79	0,04-0,18
		7. Rasio Gini	Indeks	0,300-0,330	0,296-0,33	0,291-0,33	0,286-0,33	0,280-0,330
3	Peningkatan daya saing dan inovasi daerah	8. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,80	3,90	4,03	4,15	4,30
		9. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	66	72	78	85
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,50	84,59	86,78	89,02	91,71
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*	11. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	24,84	45,04	59,53	67,99	79,8
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,80	72,48	73,34	74,19	75,22

4.3 Misi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Perumusan misi RPJPD mengacu pada pokok visi RPJPD yang akan dicapai, respon atas isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta selaras dengan misi atau agenda pembangunan di dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memiliki agenda besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia yang disertai dengan landasan dan kerangka implementasi transformasi. Misi RPJPD dengan demikian juga memiliki agenda besar untuk mendukung transformasi Indonesia melalui transformasi pembangunan daerah. Berikut keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Tabel 4. 2 Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045

Agenda	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	Misi Kota Balikpapan Tahun 2025-2045
Transformasi Indonesia	Misi 1: Transformasi Sosal	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
	Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif
Landasan Transformasi	Misi 4: Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia	Misi 4: Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan	Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial

Agenda	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	Misi Kota Balikpapan Tahun 2025-2045
		stabilitas ekonomi makro daerah	
	Misi 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 5: Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6: Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi 6: Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
	Misi 7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
	Misi 8: Kesinambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

Tabel 4. 3 Visi dan Misi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045:

Visi:
Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman
Misi:
Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global **Misi 2:** Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan **Misi 3:** Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif **Misi 4:** Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial

Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan **Misi 6:** Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan **Misi 7:** Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan **Misi 8:** Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

Secara lebih detail, berikut penjelasan 8 Misi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045:

4.3.1 Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Membangun Manusia Unggul dan Berdaya Saing Global

Misi mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global diarahkan untuk membangun dan mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di era modern, serta memiliki kualitas kehidupan yang layak dan sejahtera. Guna mewujudkan SDM yang unggul dan memiliki daya saing global maka perlu ditopang oleh konidisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kondisi masyarakat yang sehat dan cerdas berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga peluang bonus demografi dan pembangunan IKN dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dari segi pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan masih perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 yang masih berada pada angka 10,93 atau setara kelas 1 SMA, sehingga masih belum mencapai target nasional yang tertuang dalam program wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah, 12 tahun pendidikan dasar dan menengah), dan peningkatan partisipasi pada pendidikan tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi peningkatan fasilitas pembelajaran, penambahan kuantitas dan kualitas guru, serta peningkatan kerjasama antar pelaku pendidikan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengembangan kurikulum yang mengarah pada peningkatan ketrampilan interpersonal, analitis, dan digital, serta pengetahuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEAM).

Dari segi kesehatan, peningkatan mutu layanan kesehatan dilakukan tidak hanya untuk menjamin derajat kesehatan setinggi-tingginya, melainkan juga mendukung upaya super prioritas Kota Balikpapan dalam mengembangkan *hospital tourism.* Meskipun capaian AHH Kota Balikpapan cukup tinggi yakni 74,89, tetapi beberapa upaya masih perlu dioptimalkan seperti pelayanan terhadap kesehatan ibu yang angka kematian mencapai angka 73 per 100.000 (2020), prevalensi stunting 13,36% (2023), rumah sakit yang terkaredetasi 86,67% (2020), persentase ketersediaan SDM Kesehatan Puskesmas 82,72% (2020), dan sebagainya. Dalam melakukan pembangunan kesehatan beberapa aspek perlu diperhatikan seperti peningkatan layanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan (primer, sekunder, tersier), peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, serta digitaliasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan tidak hanya fokus pada upaya karikatif, melainkan juga peningkatan upaya pelayanan preventif dan promotif.

4.3.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Agenda transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama dalam mewujudkan Balikpapan nyaman untuk semua karena tujuan dari transformasi ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian nilai tambah yang lebih besar. Sejalan dengan visi dan misi Indonesia Emas serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, transformasi ekonomi berkelanjutan menjadi misi yang perlu diwujudkan dalam RPJPD Kota Balikpapan. Transformasi ekonomi menekankan pada peningkatan produktivitas untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan produktivitas perlu didorong demi mewujudkan transformasi ekonomi.

Peningkatan produktivitas tidak semata-mata hanya mengejar nilai tambah yang tinggi dan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Namun, keberlanjutan atas segala sumber daya di Kota Balikpapan perlu diperhatikan untuk menjamin manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Penerapan ekonomi hijau dan biru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga manfaat dari pembangunan ekonomi betul-

betul dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa perlu mengorbankan lingkungan hidup.

4.3.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Kolaboratif

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi saat ini. Pemerintah diminta mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam memenuhi seluruh ekspektasi masyarakat. Pemerintah juga dihadapkan dengan permasalahan kepercayaan masyarakat yang rendah karena dinilai terlalu birokratis, sentralistik, kurang profesional, dan silo sehingga membuat pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif, efisien, dan kaku. Dalam konteks ini, perlu adanya transformasi tata kelola yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif. Tranformasi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan 20 tahun ke depan.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis diperlukan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, cepat, dan responsif. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang strategis. Kepemimpinan yang strategis berkaitan dengan cara berpikir dan bertindak yang tepat, yaitu mampu berpikir ke depan dan antisipatif (*think ahead*), mampu berpikir atau merefleksi secara berulang terhadap berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi (*think again*), dan mampu berpikir lintas sektor (*think across*). Dengan demikian, kemampuan tersebut mampu membuat pemerintah lebih adaptif terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mampu mengurai berbagai permasalahan daerah secara sistematis dan terukur.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif juga sangat penting. Pemerintah yang inovatif adalah pemerintahan yang kreatif dalam menciptakan atau menemukan bentuk pelayanan terbaik, baik berupa produk maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi juga berkaitan dengan gagasan baru yang berasal dari pemikiran kreatif dan *out of box* serta digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan publik. Inovasi yang diterapkan harus

mampu menyasar persoalan internal pemerintah dan persoalan pelayanan masyarakat.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dilakukan untuk merespon perkembangan dunia yang begitu pesat di tengah ketidakpastian dan risiko tinggi melalui kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders*. Kemitraan strageis ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Balikpapan. Dalam konteks ini, maka keterlibatan yang diharapkan adalah keterlibatan yang saling menguntungkan guna mewujudkan visi daerah. Setiap pelaku pembangunan harus terlibat aktif dalam mengurai berbagai persoalan daerah dan mampu memberikan berbagai solusi yang tepat.

4.3.4 Mewujudkan Stabilitas Kota dan Demokrasi Substansial

Misi mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial diarahkan pada upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam menciptakan kondisi daerah yang stabil dan mewujudkan demokrasi yang substansial dimana prinsip-prinsip utama demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil lebih ditekankan. Stabilitas daerah sendiri turut dipengaruhi oleh kondisi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ada di suatu wilayah. Penjagaan kondisi ketenteraman dan ketertiban menjadi kunci utama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang stabil. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan peraturan daerah yang optimal, pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran, upaya resolusi konflik yang cepat dan tepat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan demokrasi yang substansial.

Perwujudan stabilitas kota dan demokrasi yang substansial juga merupakan bagian dan prasayarat yang penting dalam pembangunan daerah. Kaitannya dengan pembangunan daerah, dari sisi ekonomi, daerah yang memiliki stabilitas yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari investor guna menanamkan modal di wilayah tersebut. Dari sisi pembangunan sosial dan infrastruktur, stabilitas daerah juga turut memiliki peran yang cukup besar. Kaitaannya dengan pencegahan dan penanganan konflik sosial yang berpotensi menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka peran pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan turut berpengaruh

terhadap upaya pembangunan yang dilakukan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan demokrasi substansial di suatu daerah.

4.3.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan

Misi mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan di Kota Balikpapan merupakan upaya yang penting untuk merespon berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis. Ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan berupaya untuk mengintengrasikan pembangunan manusia secara individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan kebencanaan. Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Balikpapan. Ketahanan sosial budaya menjadi salah satu isu penting di Kota Balikpapan karena menjadi salah satu penyangga dan mitra IKN. Kehadiran IKN berpotensi memberikan dampak arus perubahan tatanan secara sosial dan budaya di Kota Balikpapan. Selain itu, Kota Balikpapan juga merupakan kota yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga lingkungan dan menjadi daerah yang tangguh terhadap kebencanaan. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi Kota Balikpapan yang merupakan pusat industri, kawasan perkotaan penyangga dan mitra IKN, serta berada di dekat kawasan hutan, pantai, dan laut yang sensitif. Melalui berbagai tantangan tersebut, perlu adanya sinergi perencanaan kota yang berketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan misi ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian beberapa kebijakan strategis, seperti penguatan peran keluarga, pembangunan karakter, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan lingkungan alam, mitigasi perubahan iklim, pemulihan dan konservasi ekosistem penyangga, pengelolaan sampah terpadu, dan berbagai hal lain yang berkontribusi pada ketangguhan sosial budaya, dan kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat. Dalam rangka mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan, diperlukan

upaya jangka panjang yang melibatkan kerja sama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pihak swasta, lembaga non-pemerintah maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terpadu dan sistematis, Kota Balikpapan diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tahan terhadap berbagai tantangan sosial budaya, lingkungan dan bencana yang muncul di masa depan.

4.3.6 Mewujudkan Pembangunan Kota Cerdas, Terintegrasi dan Berkeadilan

Pembangunan kota yang modern, terintegrasi dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kota Balikpapan sebagai Superhub Industri dan Jasa. Perwujudan tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya sekadar penyediaan, namun kualitas infrastruktur dan utilitas perkotaan juga memiliki urgensi yang tinggi untuk menjadi fokus pemerintah daerah, terlebih Kota Balikpapan menjadi salah satu kota yang menjadi mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara Kota Balikpapan dengan IKN.

Pembangunan kota yang modern didasarkan pada perencanaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan lahan yang bijaksana, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan perencanaan transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan. Kemudian sebagai hub ekonomi, infrastruktur yang terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan kota yang efisien dan mudah diakses. Sehingga diperlukan jaringan transportasi yang baik, sistem air dan sanitasi yang memadai, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pengarustamaan kualitas infrastruktur di Kota Balikpapan tersebut, juga telah sejalan dengan konsep *smart city* yang telah direncanakan. Kemudian dalam membangun kota yang berkeadilan, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung aksesibilitas perumahan bagi semua lapisan masyarakat, memberdayakan sektor-sektor ekonomi lokal, penggunaan teknologi digital dalam manajemen perkotaan, peningkatan infrastruktur tangguh bencana dan perencanaan kota yang adaptif dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.

4.3.7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Terpadu, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana terpadu merupakan pondasi dasar atau kerangka pada komponen pelayanan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi yang dirancang dan diintegrasikan secara menyeluruh untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sarana prasarana yang bersifat fisik, berupa bangunan yang terlihat seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan yang lainnya, serta sarana prasarana yang bersifat sistem, seperti sistem pengelolaan limbah, sistem penyediaan air bersih, sistem penyediaan energi, dan sejenisnya, sehingga sarana prasarana terpadu tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk sarana prasarana transportasi, perumahan, utilitas, dan fasilitas umum lainnya.

Perwujudan sarana dan prasarana yang terpadu di Kota Balikpapan diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien melalui pengembangan *smart infrastructure*. Kondisi tersebut selanjutnya juga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sarana prasarana yang ramah lingkungan. Sistem sarana prasarana yang telah terancang dan terbangun secara merata dan berkeadilan, diharapkan dapat menjadikan Kota Balikpapan tidak hanya menjadi nyaman, tetapi juga ramah lingkungan terhadap generasi yang akan datang.

4.3.8 Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan

Keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan adalah dua konsep penting yang memastikan pembangunan yang dilakukan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berkelanjutan dan konsistensi berkala dengan semangat kolaboratif. Keselarasan pembangunan merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pemenuhan kebutuhan dan hak untuk generasi mendatang. Keselarasan pembangunan diwujudkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan perencanaan jangka panjang dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, keselarasan pembangunan juga dimaknai sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan sinergi pembangunan di Kota Balikpapan.

Keselarasan pembangunan melibatkan komitmen jangka panjang multipihak, koordinasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan, dan perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan dan diimplementasikan pada tindakan sehari-hari menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan dan diimplementasikan pada tindakan sehari-hari, sehingga keselarasan pembangunan dapat terwujud di Kota Balikpapan.

Kesinambungan pembangunan berarti upaya keberlanjujtan pembangunan dari periode ke periode yang sejalan dengan cita-cita Kota Balikapapan. Kondisi ini melibatkan komitmen jangka panjang multipihak, koordinasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan, dan perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kesinambungan pembangunan di Kota Balikpapan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang kolaboratif.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab V RPJPD memuat arah kebijakan, sasaran pokok, indikator utama pembangunan (IUP) dan upaya transformasi super prioritas (*game changers*). Arah kebijakan dalam dokumen RPJPD dibagi menjadi dua yakni arah kebijakan sebagai tahapan pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Arah kebijakan tahapan pembangunan merupakan upaya tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam 4 (empat) periode lima tahunan. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rumusan visi dan misi, serta permasalahan dan isu strategis jangka panjang daerah. Sedangkan arah kebijakan transformasi mengacu pada lampiran Buku II SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang dicapai pada akhir periode dan mencerminkan ketercapaian visi pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok memiliki indikator utama pembangunan (IUP) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, serta mengacu pada 17 arah arah pembangunan nasional.

5.1 Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan

Arah kebijakan tahapan pembangunan merupakan upaya tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam 4 (empat) periode lima tahunan. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rumusan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang tertuang pada bab III. Arah kebijakan yang dirumuskan diharapkan menjadi panduan dan dasar intervensi perumusan arah kebijakan yang lebih operasional pada perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Berikut arah kebijakan tahapan pembangunan RPJPD Kota Balikapan yang diselaraskan dengan arah kebijakan tahapan pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5. 1 Penyelarasan Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan

	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
RPJPN	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	Perkuatan fondasi transformasi: Pembangunan landasan transformasi	Akselerasi transformasi: Peningkatan daya saing daerah dalam upaya	Ekspansi transformasi daerah: Pemantapan peran daerah sebagai	Perwujudan Kaltim Sejahtera: Perwujudan pembangunan yang maju, adil,

	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
	sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	akselerasi transformasi dan peran sebagai Mitra IKN	pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan Nusantara	dan berkelanjutan menuju masyarakat Kaltim Sejahtera
RPJPD Kota Balikpapan	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing	Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan	Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua

Pertahapan pembangunan sesuai tema dengan periode lima tahunan memiliki fokus masing-masing untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Balikpapan yaitu tahap 1 (2025-2029) sebagai tahapan penguatan transformasi: Balikpapan kota cerdas dan kolaboratif, tahap 2 (2030-2034) sebagai tahapan percepatan transformasi: Balikpapan kota berdaya saing, tahap 3 (2035-2039) sebagai tahapan ekspansi transformasi: Balikpapan kota unggul dan berkelanjutan, dan tahap 4 (2040-2045) sebagai tahap perwujudan Balikpapan kota nyaman untuk semua. Tema pembangunan tersebut telah diselerasakan dengan tema pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta terdapat penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan daerah pada periode 3 dan 4. Secara lebih rinci, tema arah kebijakan pada masing-masing periode kemudian didetailkan pada masing-masing Misi sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Misi	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	**Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing**	**Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan**	**Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua**
Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	Penguatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang adaptif	Pelayanan dasar yang berkualitas untuk SDM yang berdaya saing dan sejahtera	Pemantapan SDM yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing global
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	Penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial	Pemantapan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta akselerasi ekonomi kreatif	Industri dan jasa yang berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perekonomian daerah yang kokoh, inklusif dan berkelanjutan
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif, serta pelayanan yang berkualitas	Akselerasi tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berdampak serta pelayanan yang inovatif	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan kolaboratif serta pelayanan yang adaptif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif yang mendukung transformasi pembangunan daerah
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	Meningkatkan supremasi hukum kualitas demokrasi dan stabilitas ekonomi	Memperkuat stabilitas wilayah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi	Memantapkan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah	Stabilitas wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan

Misi	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	**Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing**	**Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan**	**Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua**
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	Peningkatan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), pelestarian budaya, dan pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang	Penguatan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) dan ketahanan budaya, serta memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya maju, serta kelestarian lingkungan hidup yang terjaga	Pemantapan masyarakat yang inklusif dan berkebudayaan maju, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	Peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi	Akselerasi layanan kota cerdas yang mendukung pemerataaan pembangunan wilayah	Pemantapan pelayanan kota cerdas yang terintegrasi dengan aglomerasi perkotaan	Perwujudan layanan kota cerdas yang berkeadilan dan terintegrasi dalam skala regional
Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	Akselerasi akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang ramah lingkungan	Pemantapan *smart infrastructure* pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	Perwujudan *smart infrastructure* yang merata dan berkeadilan
Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran serta perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang sebagai modal kesinambungan	Percepatan kesinambungan pembangunan berbasis inovasi, penganggaran alternatif, dan komitmen politik untuk kesinambungan	Penguatan kesinambungan pembangunan berbasis budaya inovasi, penganggaran inovatif, dan komitmen politik yang semakin kuat	Pemantapan kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan yang inovatif, kolaboratif, dan semakin adaptif terhadap perubahan

Arah kebijakan pembangunan daerah memiliki tema pada masing-masing periode 5 (lima) tahunan dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan, yakni Tahap 1 (Tahun 2025-2029) sebagai tahap Penguatan Transformasi, Tahap 2 (Tahun 2030-2034) sebagai tahap Percepatan Transformasi, Tahap 3 (Tahun 2035-2039) sebagai tahap Ekspansi Transformasi, dan Tahap 4 (Tahun 2040-2045) sebagai tahap Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 1 RPJPD Kota Balikpapan adalah “Penguatan Transformasi” dengan tema ”Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif”. Arah kebijakan Tahap 1 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui penguatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosoal. Pada aspek transformasi ekonomi dilaksanakan melalui penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial. Sedangkan pada aspek tata kelola pemerintahan, arah kebijakan pada tahap pertama diarahkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan kolaboratif serta peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pada tahap pertama RPJPD Pemerintah Kota Balikpapan juga turut berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas hukum dan demokrasi, peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perekonomian serta memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagai modal Pembangunan berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2030-2034)

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 2 adalah “Percepatan Transformasi” dengan tema ”Balikpapan Kota Berday saing”. Arah kebijakan Tahap 2 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna menunjang upaya perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Pada aspek transformasi ekonomi dilakukan melalui upaya pemantapan ekosistem sebagai superhub

industri dan jasa serta akselerasi Pembangunan ekonomi kreatif. Sedangkan pada upaya transformasi tata kelola diarahkan pada upaya percepatan Pembangunan tata kelola yang berkinerja tinggi dan berdampak serta pelayanan yang inovatif. Selain itu, pada tahap ke 2 pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, Pemerintah Kota juga berupaya untuk melakukan penguatan stabilitas wilayah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi, penguatan GEDSI dan ketahanan budaya dengan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai upaya mewujudkan Pembangunan kota cerdas dan ramah lingkungan. Percepatan Pembangunan berbasis inovasi, penganggaran alternatif dan komitmen politik yang berkesinambungan juga menjadi bagian arah Pembangunan yang turut diupayakan pada periode ke 2 RPJPD guna mewujudkan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan di Kota Balikpapan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2035-2039)

Arah kebijakan pembangunan daerah tahap 3 adalah Ekspansi Transformasi dengan tema ”Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan“. Pada transformasi sosial dilaksanakan melalui pelayanan dasar yang berkualitas untuk SDM yang berdaya saing dan sejahtera. Pada aspek transformasi ekonomi dilakukan melalui industri dan jasa yang berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sementara pada transformasi tata kelola difokuskan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan kolaboratif serta pelayanan yang adaptif. Untuk mendukung transformasi Balikpapan pada tahap 3 ini dilakukan melalui upaya pemantapan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah, perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya maju, serta kelestarian lingkungan hidup yang terjaga, pemantapan pelayanan kota cerdas yang terintegrasi dengan aglomerasi perkotaan, pemantapan *smart infrastructure* pelayanan dasar dan pendukung perekonomian. Selain itu, penguatan kesinambungan pembangunan berbasis budaya inovasi, penganggaran inovatif, dan komitmen politik yang semakin kuat.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2040-2045)

Arah kebijakan pembangunan daerah tahap 4 merupakan “perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua”. Tahap ini adalah tahap terakhir dari periodenisasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Harapannya seluruh transformasi Kota Balikpapan semakin mantap. Pada transformasi sosial

diharapkan terwujudnya SDM yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing global. Pada transformasi ekonomi diharapkan terwujudnya perekonomian Kota Balikpapan yang kokoh, inklusif dan berkelanjutan. Sementara pada transformasi tata kelola diharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif yang mendukung transformasi pembangunan daerah. Untuk memantapkan transformasi Balikpapan pada tahap 4 diperlukan dimantapkan landasan transformasi dan implementasinya melalui stabilitas wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan, pemantapan masyarakat yang inklusif dan berkebudayaan maju, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, perwujudan layanan kota cerdas yang berkeadilan dan terintegrasi dalam skala regional, perwujudan *smart infrastructure* yang merata dan berkeadilan, dan pemantapan kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan yang inovatif, kolaboratif, dan semakin adaptif terhadap perubahan.

5.2 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers)*

Dalam rangka mewujudkan transformasi Kota Balikpapan, diperlukan agenda pembangunan yang lebih operasional. Agenda pembangunan ini merupakan *game changers* yang akan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang dan merupakan superprioritas dari berbagai arah kebijakan transformasi. Game changers memiliki sifat operasional, lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi serta akan merespon berbagai isu strategis.

- Mewujdukan Transformasi Sosial dengan membangun manusia unggul dan berpandangan Global
  1) Revitalisasi program pendidikan berbasis ketrampilan (vokasi)
  2) Transformasi kesehatan digital
  3) Penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi
  4) Penguatan pendidikan karakter dalam membangun tanggung jawab sosial, kemandirian, dan religius
  5) Akselerasi kolaborasi pihak swastam organisasi nirlaba, internasional dan masyarakat sipil
- Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang berkelanjutan
  1) Pengembangan kawasan industri Kariangau dan pengolahan minyak (*oleochemical*) berbasis *green industry* dalam rangka mendukung hilirisasi berbasis SDA Unggulan
  2) Penguatan ekosistem MICE dan ekonomi kreatif
  3) Pendaftaran tanah kota lengkap 100%

- Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dengan membangun pemerintahan berintegritas, kolaboratif, dan adaptif
  1) Tata kelola kolaboratif dan transformasi pelayanan publik
  2) Penguatan birokrasi yang ramping struktur kaya fungsi
  3) Penguatan kolaborasi internasional melalui *sister city*
- Mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
  1) Penyediaan air minum dan sanitasi 100% aman terintegrasi
  2) Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
  3) Pengembangan *transit oriented development*
  4) Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan pada semua sektor
  5) Pengembangan *nature based solution*
  6) Penguatan nilai kearifan lokal masyarakat kota
  7) Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan pada semua sektor dan penguatan ketahanan pangan
- Mewujudkan kondusivitas kota dan demokrasi substansial
  1) Penguatan pengawasan kota berbasis teknologi
  2) Transformasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko

5.3 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Sasaran pokok, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan merupakan penjabaran lebih detail dari perumusan visi dan misi RPJPD Kota Balikpapan, serta arah kebijakan tahapan pembangunan yang dirumuskan pada bab sebelumnya.

5.3.1 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Penentuan indikator dan target kinerja indikator (IUP) RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten/kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Sedangkan perumusan sasaran pokok mengacu pada 17 (tujuh belas) arah pembangunan RPJPN, arah kebijakan transformasi, serta indikator utama pembangunan (IUP) sebagaimana tertuang dalam kertas kerja perumusan sasaran pokok RPJPD yang ada pada lampiran dokumen ini. Sasaran pokok, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	1. Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	76,7	77,88	79,06	80,47
			2	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	5	4	3	2	0
			3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,5	16,5	12,75	9	4,5
			4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment covarage*)	%	81,6	85,28	89,88	94,49	100
			5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	84,98	87,98	91,74	95,49	100
			6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
		2. Pendidikan berkualitas yang merata	7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi						

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
				minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
				2.9 Literasi membaca SD/Sederajat	%	87,71	90,17	93,24	96,31	100
				2.10 Literasi membaca SMP/Sederajat	%	90,24	92,19	94,63	97,07	100
				2.11 Numerasi SD/Sederajat	%	73,57	78,86	85,46	92,07	100
				2.12 Numerasi SMP/Sederajat	%	85,72	88.58	92,15	95,72	100
			8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	11,26	11,83	12,4	13,08
			9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	14,68	15,15	15,62	16,18
			10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	13	14	15,25	16,5	18
			11	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	%	74,22	76,38	79,07	81,77	85
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	12	Tingkat kemiskinan	%	2,15-2,20	1,73-1,80	1,20-1,29	0,67-0,79	0,04-0,18
			13	*Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan*	%	68,57	73,86	80,47	87,07	95
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing berkelanjutan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	47,5	49,76	52,59	55,42	58,82
			15	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,94	2,98	4,27	5,57	7,12
			16	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	25.918	41.469	60.908	8-.347	103.673
			17	*Jumlah usaha ekonomi kreatif*	*Angka*	670	1.118	1.678	2..238	2.910

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
			18	*Proporsi jumlah usaha miko naik kelas*	*%*	2,27	3,04	4,36	6,26	9,66
			19	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,02	4,77	5,71	6,6	7,78
			20	*Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	*%*	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
			21	*Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	*%*	6,38	6,71	7,11	7,51	8,00
			22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,85 – 5,90	5,56-5,79	5,19-5,65	4,83-5,51	4,39-5,34
			23	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	%	67,17	71,84	787,68	83,52	90,53
			24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,87	53,43	56,63	59,83	63,67
			25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	66	72	78	85
		5. Penerapan Ekonomi Hijau								
		6. Transformasi Digital	26	Persentase pnduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88	90	92,5	95	98
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	27	*Disparitas Harga*	*%*	9,77	8,91	7,85	6,78	5,50
			28	Kontribusi PDRB pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB	%	33,18	32,71	32,13	31,54	30,84
			29	Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	%	42,34	44,01	46,11	48,2	50,71
		8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	30	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,69	86,15	90,48	94,81	100

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	31	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks	3,85	4,08	4,37	4,66	5
			32	*Indeks pelayanan publik*	Indeks	4,54	4,59	4,66	4,72	4,8
			33	Indeks integritas pemerintah	Indeks	77,5	80,46	84,16	87,86	92,3
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	4. Meningkatnya kondusifitas wilayah	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
	5. Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro	34	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,06	0,22	0,43	0,63	0,88
			35	Tingkat inflasi	%	2,50±1	2,40±1	2,28±1	2,15±1	2,00±1
			36	Total dana pihak ketiga/PDRB	%	29,85	40,83	54,56	68,29	84,76
			37	Total kredit/PDRB	%	23,01	32,9	45,27	57,63	72,47
	6. Menguatnya stabilitas daerah	12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	38	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,8	3,9	4,03	4,15	4,3
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan	7. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	39	a. Jumlah kejadian tindak kriminal	Jumlah	1.167	1.054	912	770	600
				b. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	23	23,60	24,35	25,10	26
			40	Jumlah kejadian konflik SARA	Jumlah	0	0	0	0	0
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kota Cerdas, Terintegrasi dan Berkeadilan	8. Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	41	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	70,00	75,45	80,01	85,58	92,25
			42	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,16	0,15	0,13-0,14	0,12-0,13	0,10-0,12
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana		15. Lingkungan Hidup Berkualitas	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,80	72,48	73,34	74,19	75,22

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
Terpadu, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan **Misi 8: Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan**	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		44	*Rumah tangga dengan akses sanitasi layak*	%	96	97	98	99	100
			45	*Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah*	%	30,45	33,69	39,01	41,08	41,44
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	46	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5,67	4,59	3,25	1,9	0,29
			47	*Kapasitas air baku*	*m3/detik*	2.458	2.685	3.141	3.902	4.306
			48	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum aman	%	38,75	51	66	82	100
	10. Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	49	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	109,35	104,43	98,28	92,13	84,75
			50	Persentase Penurunan Emisi GRK						
				a. Kumulatif	%	0,24	3,24	9,17	16,43	26,24
				b. Tahunan	%	-9,22	16,75	36,74	50,26	70,39
Misi 8: Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan	-									

Sumber: Data diolah

Berdasarkan surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten/kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, jumlah indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan sebanyak 50 indikator. Dari 50 indikator tersebut, terdapat 38 indikator yang targetnya sudah ditentukan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan 12 indikator targetnya ditentukan oleh Pemerintah Kota Balikapapan. Adapun 12 indikator tersebut yakni persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah usaha ekonomi kreatif, proporsi jumlah usaha mikro naik kelas, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, *return on asset (ROA)* BUMD, disparitas harga, indeks pelayanan publik, indeks pembangunan kebudayaan, jumlah kejadian konflik SARA, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan kapasitas air baku.

5.4 Arah Kebijakan Transformasi

5.4.1 Arah Kebijakan Transformasi Kota Balikpapan

Arah kebijakan transformasi Kota Balikpapan mengacu pada lampiran Buku II SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan transformasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan transformasi berada dalam kerangka penguatan fondasi transformasi pada periode 1, percepatan transformasi pada periode 2, Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan pada periode 3 dan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua pada periode 4.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kota Balikpapan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
Transformasi sosial	1	Perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan penguatan peran layanan kesehatan primer	Seluruh kecamatan, seluruh puskesmas dan posyandu
	2	Penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis	Penuntasan stunting di semua kecamatan, peningkatan pengendalian dan penanganan penyakit menular (HIV, TBC, dll) melalui pendekatan integrasi multisektor, serta percepatan eliminasi penyakit malaria melalui rekayasa lingkungan habitat vektor	Seluruh kecamatan
	3	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan berkelanjutan	Pemenuhan dan pemerataan jumlah tenaga medis dan kesehatan pada layanan kesehatan sesuai standar, peningkatan tenaga kesahatan spesialis, peningkatan kompetensi kesehatan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya	Seluruh puskesmas dan rumah sakit
	4	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan yang disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi serta penguatan ketahanan kesehatan, penguatan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan; Ketahan kesehatan (farmasi, alat kesehatan, dan surveilance/ketahanan terhadap krisis kesehatan/bencana non alam); Transformasi ketahanan teknologi kesehatan; Pembiayaan kesehatan.	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Barat, Puskesmas di Sepinggan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	5	Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas melalui perluasan akses Pendidikan dini dan Pendidikan dasar (Regulasi, kelembagaan, SDM, sarana prasarana)	Seluruh kecamatan
	6	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta melalui pengembangan kualitas SDM, sarana prasarana, pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat keberkerjaan tinggi, dan kelembagaan kerja sama antar satuan pendidikan	Seluruh kecamatan
	7	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan tinggi melalui pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi Science, Technology, Enginerring, Art, Mathematic (STEAM)	Seluruh kecamatan
	8	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3	
	9	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi globa	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara
	10	Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan TIK	Seluruh kecamatan
	11	Penguatan literasi masyarakat	Penguatan literasi masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, penyediaan akses buku dan sumber informasi pada perpustakaan dan taman baca masyarakat, pemanfaatan digitalisasi, kampanye literasi dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Seluruh kecamatan
	12	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.	
	13	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal dan informal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas	Seluruh kecamatan
	14	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat (termasuk pekerja sosial profesional) melalui akses perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala, terutama untuk daerah 3TP.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	15	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi.	'Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.	Seluruh kecamatan
Transformasi Ekonomi	16	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	Seluruh kecamatan
	17	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	18	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	19	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	20	Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	21	Penguatan cadangan pangan	Penguatan cadangan pangan melalui penguatan kerjasama, penyediaan infrastrukur pergudangan, pengembangan *urban farming,* peningkatan investasi dan inovasi di sektor pangan serta optimalisasi Perumda berbasis pangan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	22	Pengembangan destinasi wisata potensial	Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat	Seluruh kecamatan
	23	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilakukan melalui peningkatan daya saing, penguatan jalur distribusi, dan perluasan pasar tujuan komoditas unggulan	Seluruh kecamatan
	24	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan	
	25	Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola	Seluruh kecamatan
	26	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	
	27	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung (sinergi dan integrasi dengan pembangunan IKN).	Seluruh kecamatan
	28	Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan kompetensi SDM, proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Seluruh kecamatan
	29	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Seluruh kecamatan
	30	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	31	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Seluruh kecamatan
	32	Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan budidaya	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk *research and development* dan portofolio ekonomi karbon, *coastal tourism*, serta *marine services*, dengan mengedepankan penerapan *blue economy*	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
Transformasi Tata Kelola	33	Optimasi regulasi daerah	Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah.	Seluruh kecamatan
	37	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.	Seluruh kecamatan
	38	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat.	Seluruh kecamatan
	39	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	40	Penguatan sistem integritas serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penguatan preventif, edukatif, dan investigative serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan.	Seluruh kecamatan
	41	Peningkatan kualitas proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.	Seluruh kecamatan
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	42	Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.	Seluruh kecamatan
	43	Penguatan demokrasi substansial	Penguatan demokrasi substansial melalui Penguatan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi penguatan pendidikan partai politik, dan penguatan kebebasan sipil.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	44	Peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.	Seluruh kecamatan
	45	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.	Seluruh kecamatan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	46	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	Seluruh kecamatan
	47	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat, dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	48	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	Seluruh kecamatan
	49	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya, budaya tak benda, dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	Seluruh kecamatan
	50	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan	Seluruh kecamatan
	51	Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	52	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan melalui peningkatan restorasi hutan dan lahan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan	Seluruh kecamatan
	53	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem	Seluruh kecamatan
	54	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana pengurangan resiko bencana dan ketahanan terhadap perubahan iklim.	Seluruh kecamatan
	55	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	56	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat	Seluruh kecamatan
	58	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Seluruh kecamatan
	59	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi	Seluruh kecamatan
	60	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan	Seluruh kecamatan
	61	Pembangunan bendung/ bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	62	Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN	Seluruh kecamatan
	63	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill untuk mencapai ekonomi sirkular	Seluruh kecamatan
	64	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh kecamatan
Implementasi Transformasi	65	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota	Seluruh kecamatan
	66	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial	
	69	Pengembangan pelabuhan laut	Fasilitasi pengembangan melalui dikembangkannya pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep *Economic Hub* tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	70	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	71	Pengembangan bandara	Pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk aerocity)	Kecamatan Balikpapan Selatan
	72	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	73	Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	Seluruh kecamatan
	74	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya	Seluruh kecamatan
	76	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	Seluruh kecamatan
	77	Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	78	Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	Seluruh kecamatan
	79	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik	Seluruh kecamatan
	80	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	81	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan	Seluruh kecamatan
	82	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota) dalam RTRW	Seluruh kecamatan
	83	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah	Seluruh kecamatan
	84	Perkuatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko	Seluruh kecamatan
	88	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	89	Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon	Seluruh kecamatan
	90	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.	Seluruh kecamatan

Sumber: Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

5.4.2 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Indikasi Program RTRW dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi Kota Balikpapan perlu untuk diintegrasikan terhadap dokumen perencanaan tata ruang dan juga dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD Kota Balikpapan. Pengintegrasian ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan dan sinegisitas antar dokumen perencanaan di Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan implementasi terhadap kesinambungan pembangunan di Kota Balikpapan dapat diwujudkan.

Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Indikasi Program RTRW dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
Transformasi Sosial	Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
				Pembangunan fasilitas kesehatan baru	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat yang membahayakan
					Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
					Mencapai cakupan kesehatan termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan serta vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah
					Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control
		Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pemeliharan dan peningkatan fasilitas pendidikan	Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
				Pembangunan fasilitas pendidikan baru	Menjamin semua anak untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan serta pendidikan pra sekolah, sehingga siap menembuh pendidikan dasar
					Membangun dan meningkatkan fasilitas yang ramah, aman, inklusif dan efektif bagi semua

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua
					Menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
					Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
					Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memperkuat ekonomi kreatif dan inklusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdayasaing berkelanjutan	Penyusunan Kajian Pengembangan KI Kariangau, Optimalisasi KI Kariangau, Pengembangan IPAL industri, Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di PPK Karangjoang.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
					Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah
		Penerapan Ekonomi Hijau		Pengembangan budidaya perikanan	Melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
				Peningkatan fasilitas pendukung perikanan budidaya	Meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
		Transformasi Digital		Pengembangan jaringan serat optic, Pembangunan jaringan serat optic, Pengembangan Menara BTS, Pembangunan Menara BTS, Penataan Menara Telekomunikasi	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Kota, Pengembangan potensi pariwisata, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
		Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Penataan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kajian pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan baru	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
				Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintahan	Meningkatkan kerjasama dalam sains, teknologi, inovasi, serta berbagi pengetahuan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mengopersionalisasikan penggunaan teknologi dan sains, mekanisme pembangunan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi
					Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Hankam	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat status apapun
		Stabilitas Ekonomi Makro	Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah	Pengembangan sentra industri kecil, Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sentra industri kecil, Penataan kegiatan perdagangan sektor informal, Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar
		Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	Kolaborasi pemerintahan meningkat dan berdampak		Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
					Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan
					Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas peribadatan, Pembangunan fasilitas peribadatan, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga, Pembangunan fasilitas olah raga baru, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas RTNH	Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas		Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun
					Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan maunusia,

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					eksploitasi terhadap perempuan
					Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa
					Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
					Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar
Implementasi transformasi	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	Lingkungan Hidup Ber kualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengembangan Jaringan Jalan, Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pengembangan Bandar Udara Pengumpul, Pengembangan Transportasi Laut, Pengembangan Jaringan Kereta Api, Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda, Pengembangan Kawasan Transportasi	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya
					Memulihkan lahan kritis dan lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
	Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, Pengembangan jaringan gas rumah tangga, Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengembangan jaringan transmisi antar sistem, Pengembangan dan pembangunan SUTM, Pengembangan dan pembangunan Gardu Induk, Penyusunan Master Plan penyediaan Air Minum, Pengkajian sumber air baku untuk penyediaan air minum, Peningkatan intake air baku untuk penyediaan air minum, Pembangunan intake air baku untuk penyediaan air minum, Pengembangan unit produksi air minum, Pembangunan unit produksi air minum, Penyusunan Masterplan Pengolahan Limbah, Peningkatan SPAL, Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah B3, Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, Penyusunan Masterplan Persampahan, Pengembangan TPS, Pengembangan TPS3R, Pengembangan TPST, Pembangunan TPST, Pengembangan TPA, Penyusunan Masterplan Drainase Kota, Pengembangan jaringan drainase, Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pengembangan pertanian tanaman pangan.	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
				Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Menjamin mobilisasi untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik
				Penyediaan perumahan untuk MBR	Mencapai akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau
				Penyediaan fasilitas pendukung perumahan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata
				Penanganan kawasan kumuh	Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan
					Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu
					Menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan aksesibilitas terhadap semua pengguna

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
	Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penyusunan rencana pengurangan risiko bencana	Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana
				Penyusunan rencana kontijensi	
				Pengembangan fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana	
				Peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana	
				Pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana	

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat harapan dan tujuan pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan. Sebagai dokumen yang secara umum bersifat teknokratis, RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 ini disusun melalui proses-proses teknokratik berbasis riset. Tentunya pendekatan partisipatif juga digunakan dalam perumusan dokumen RPJPD ini melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, penggalian data sekunder melalui laporan-laporan yang berisi data-data yang relevan untuk digunakan dalam rangka perencanaan jangka panjang.

Dokumen RPJPD ini secara umum telah memuat permasalahan pembangunan jangka panjang yang dialami oleh Kota Balikpapan beserta dengan perumusan isu strategis yang perlu direspons yang tentunya juga bersifat jangka panjang. Isu-isu strategis yang telah disusun tersebut digunakan untuk merumuskan perencanaan jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan yang berisi kondisi-kondisi yang ingin dicapai.

Kondisi-kondisi yang ingin dicapai tersebut disusun dalam bentuk perencanaan kinerja yang disusun dengan menggunakan metode bagan alir atau cascading. Penggunaan metode bagan alir ini bertujuan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan memiliki hubungan yang logis antara pemetaan masalah yang telah dilakukan dengan perencanaan kinerja yang telah disusun, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, hingga sasaran pokok.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan peraturan atau patokan yang harus diikuti dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Adapun kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen bersama, pemerintah, masyarakat, dan swasta berkewajiban mendukung cita-cita RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-

2045, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;

2. Setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban mempedomani dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dalam perumusan visi dan misi beserta program prioritas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban mempedomani dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi;
4. Unsur Pemerintah Kota Balikpapan yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan atau unit organisasi yang ditugaskan sesuai peraturan yang berlaku berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya;
5. Apabila dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 setelah ditetapkan, terjadi perubahan kondisi yang berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan dan/atau kondisi yang menyebabkan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 tidak dapat dilaksanakan, maka perubahan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian kebijakan, sasaran, indikator, dan target, sedangkan cita-cita yang ingin diwujudkan berupa visi dan misi tidak dilakukan perubahan;
    b. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian isu strategis yang sesuai dengan perkembangan zaman;
    c. Jika dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berbeda periodenisasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti SDGs, RTRW, dan rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakannya yang dianggap masih relevan dan penting sesuai kondisi daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan turunannya, tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045;
    d. Perubahan dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	80,47	1. Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera
		Penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis	2	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	5	0	
		Pemenuhan tenaga kesehatan berkelanjutan	3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,5	4,5	
		Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas	4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment covarage*)	%	81,6	100	
			5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	84,98	100	
			6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,5	99,5	
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun	7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
		Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan		*a. Literasi membaca SD/Sederajat*	%	87,71	100	
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi		*b. Literasi membaca SMP/Sederajat*	%	90,24	100	
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik		*c. Numerasi SD/Sederajat*	%	73,57	100	
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan		*d. Numerasi SMP/Sederajat*	%	85,72	100	
		Penguatan literasi masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	13,08	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	16,18	
		Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	13	18	
			11	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	%	74,22	85	
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan	12	Tingkat kemiskinan	%	2,15-2,20	0,04-0,18	
		Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	13	*Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan*	%	68,57	95	
		Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat						
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing	14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	47,5	58,82	2, Terwujudnya perekonomian daerah yang berdayasaing berkelanjutan
		Pengembangan kawasan industri komoditas unggulan berbasis teknologi tinggi berkelanjutan	15	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,94	7,12	
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	16	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	25.918	103.673	
		Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	17	*Jumlah usaha ekonomi kreatif*	*Angka*	670	2.910	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	18	*Proporsi jumlah usaha miko naik kelas*	%	2,27	9,66	
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	19	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,02	7,78	
		Industrialisasi koperasi	20	*Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	%	0,24	0,29	
		Peningkatan produktivitas BUMD	21	*Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	%	6,38	8	
		Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,85-5,90	4,39-5,34	
		Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	23	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	%	67,17	90,53	
			24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,87	63,67	
			25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	85	
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	-	-	-	-	-	
		Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan						
		Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan budidaya						
	6. Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital	26	Persentase pnduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88	98	
			27	*Disparitas Harga*	%	9,77	5,50	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global.	28	Kontribusi PDRB pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB	%	33,18	30,84	
			29	Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	%	42,34	50,71	
	8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	30	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,69	100	
		Pemerataan terhadap akses hunian layak						
		Pengendalilan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh						
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Optimasi regulasi daerah	31	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	3,85	5	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
		Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	32	*Indeks pelayanan publik*	*Indeks*	4,54	4,8	
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	33	Indeks integritas pemerintah	Indeks	77,5	92,3	
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga						
		Penguatan sistem integritas serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi						
		Peningkatan kualitas proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.						
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan						
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Penguatan demokrasi substansial	-	-	-	-	-	4. Meningkatnya kondusifitas wilayah
	11. Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kualitas belanja daerah	34	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,06	0,88	5. Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	35	Tingkat inflasi	%	2,50±1	2,00±1	
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah	36	Total dana pihak ketiga/PDRB	%	29,85	84,76	
			37	Total kredit/PDRB	%	23,01	72,47	
	12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan	38	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,8	4,3	6.Menguatnya stabilitas daerah
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	39	*a. Jumlah Kejadian Tindak Kriminal*	*Jumlah*	1.167	600	7. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju
		Pengembangan nilai- nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter		*b. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran*	Persen	23	26	
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;	40	*Jumlah Kejadian Konflik SARA*	*Kali*	0	0	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama						
		Peningkatan peran lembaga/forum masyarakat serta lembaga adat						
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	70	92,25	8. Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	42	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,16	0,10-0,12	
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan						
		Peningkatan, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal						
		Peningkatan pengendalian penduduk						
Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,8	75,22	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	44	*Rumah tangga dengan akses sanitasi layak*	%	96	100	
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan	45	*Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah*	%	30,45	41,44	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		konektivitas spesies yang dilindungi						
		Perencanaan dan pengembangan perkotaan berwawasan lingkungan dan *nature based on solution*						
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pembangunan irigasi baru	46	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5,67	0,29	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Pengendalian banjir	47	*Kapasitas air baku*	*m3/detik*	2.458	4.306	
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	48	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum aman	%	38,75	100	
		Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem						
		Peningkatan kualitas penataan ruang						
		Fasilitasi peningkatan pelaksanaan reforma agraria						
		Fasilitasi pengembangan pelabuhan						
		Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia						
		Pengembangan bandara						
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan						
		Pembangunan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal, dan berwawasan lingkungan						
		Pengembangan diversifikasi pangan						
		Pengembangan moda kereta api						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi						
		Pemenuhan akses air minum berkelanjutan dan inklusif						
		Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan						
		Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman						
	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan peningkatan mitigasi bencana dan ketangguhan terhadap bencana serta pengendalian kebakaran kawasan permukiman	49	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	109,35	84,75	10.Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
			50	Persentase Penurunan Emisi GRK				
				a. Kumulatif	%	0,24	26,24	
				b. Tahunan	%	-9,22	70,39	
Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	-	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	-					
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi						
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah						
		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko						
		Pengembangan pembiayaan inovatif						

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikapapan tahun 2025-2045. Selain itu, bab ini juga membahas dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Beberapa poin itu akan dibahas secara berurutan dibawah ini

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Balikpapan berjalan dinamis sepanjang periode pembangunan jangka panjang 2005-2025. Kota Balikpapan tumbuh menjadi kota yang terbuka, strategis, dan terus berupaya menjadi kota yang nyaman huni. Berbagai capaian makro pembangunan menunjukkan kinerja yang meningkat dibandingkan dengan awal periode perencanaan. Capaian kinerja pada tahun 2022, yaitu tingkat kemiskinan 2,45%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,13 atau berada pada kategori tinggi, dan pertumbuhan ekonomi berhasil pulih dari masa pandemi sebesar 4,94%.

Meskipun demikian, Kota Balikpapan juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Indeks Gini pada tahun 2011, misalnya masih berada pada rasio 0,28. Namun, Indeks Gini itu kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,334. Kenaikan Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Balikpapan juga mengalamai tantangan terkait tingkat pengangguran terbuka di tengah geliat ekonomi dan kemiskinan yang cukup rendah. Tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 6,9%.

Tantangan pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan diprediksi akan semakin besar. Terdapat berbagai peluang yang harus dioptimalkan, tetapi juga terdapat potensi persoalan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kota Balikpapan harus membangun kesiapan seiring proses perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, Kota Balikpapan berposisi sebagai pintu gerbang sekaligus mitra IKN. Aktivitas IKN telah menggerakkan perekonomian daerah, tetapi di sisi lain aktivitas perekonomian, arus distribusi barang-jasa, dan potensi perpindahan penduduk memiliki konsekuensi pada kebutuhan pelayanan dasar, tata ruang, hingga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seiring keterbukaan Kota Balikpapan, tantangan yang tidak bisa dihindari juga muncul dari konteks global. Rancangan Akhir RPJPN telah memprediksi adanya megatren global, dengan beberapa megatren yang perlu diantisipasi oleh Kota Balikpapan, antara lain perkembangan demografi global, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, dan perubahan iklim.

Prediksi tentang berbagai kondisi pada masa depan dan kondisi existing menjadi bahan pertimbangan penting untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang tepat, termasuk perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. Secara nasional, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam konteks Kota Balikpapan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025-20245 merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada periode 2005-2025, sehingga proses pembangunan dapat berkesinambungan dan memiliki kinerja yang semakin baik dengan tetap tanggap terhadap perubahan atau ketika kondisi tidak normal.

RPJPD tahun 2025-20245 disusun melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal), Rancangan, dan Rancangan Akhir (Rankhir). Berbagai pendekatan perencanaan digunakan di dalam proses penyusunan tersebut, mulai dari pendekatan teknokratik terkait tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD dan penggunaan kerangka berpikir ilmiah untuk memenuhi sistematika dokumen, pendekatan partisipatif melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, pendekatan politik dengan pembahasan bersama antara DPRD dengan pemerintah

daerah, serta top-down dan bottom-up melalui penyelarasan dengan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 merupakan bagian dari periode RPJPN 2025-2045. RPJPD memiliki peran penting untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional. RPJPN 2025-2045 memiliki visi "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Transformasi menjadi arah besar di dalam RPJPN. RPJPD Kota Balikapapan dalam rangka mencapai visi RPJPN akan menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Selaras dengan arah besar RPJPN, maka RPJPD akan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan ke arah yang semakin baik untuk jangka waktu dua puluh tahun. Dalam jangka waktu dua puluh tahun tersebut, Kota Balikpapan diharapkan akan menjadi kota strategis di Indonesia, nyaman dihuni, dan mayoritas penduduknya sejahtera dalam bingkai madinatul iman atau kota yang berperadaban tinggi tanpa meninggalkan nilai agama dan kearifan yang diyakini. RPJPD mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan bukan hanya untuk generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang melalui keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik.

1.2 Dasar Hukum

RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 menggunakan berbagai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176iSJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
22. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 00.7.21/14918/Bapp-II Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota dalam Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan perencanaan makro memuat seluruh sektor pembangunan. RPJPD berposisi sebagai perencanaan induk yang akan menjadi pedoman secara berjenjang bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang termuat di dalam RPJPD akan memandu perumusan dan implementasi empat kali periode RPJMD, sehingga pembangunan dapat berkesinambungan meskipun terdapat pergantian kepemimpinan kepala daerah.

RPJPD sebagai dokumen sangat strategis, dirumuskan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, terutama RPJPN 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Sinkronisasi dengan RPJPN diperlukan karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara RPJPD dan RTRW diperlukan agar arah pembangunan yang termuat di dalam RPJPD selaras dengan tujuan perencanaan tata ruang dan guna menjaga prinsip Pembangunan berkelanjutan.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Perumusan RPJPN 2025-2045 telah memasuki tahap rancangan akhir dan menunggu proses penyusunan rancangan undang-undang. Akhir periode RPJPN bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, sehingga memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Akhir RPJPN, yaitu "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. 8 misi tersebut, yaitu:

Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki upaya superprioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial:
    - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
    - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
    - Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
    - Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.
    - Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Tranformasi Ekonomi:
    - Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
    - Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
    - Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
    - *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
    - Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
    - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola:
    - Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
    - Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
    - Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat general*.

- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
- Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
- Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
   - Penguatan karakter dan jatidiri bangsa.
   - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
   - Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*).

Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai transformasi. Kalimantan di dalam arah pembangunan kewilayahan RPJPN berposisi sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara". Posisi tersebut berbasis pada sektor unggulan Kalimantan berupa pertambangan dan penggalian, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta diakselerasi oleh keberadaan IKN. Balikpapan menjadi superhub penting dengan kondisi *existing* sebagai pintu gerbang IKN. RPJPD Kota Balikapapan dengan demikian menjadi penjabaran upaya mencapai transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan memperkuat kesejahteraan melalui transformasi sosial yang ditopang oleh transformasi tata kelola.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042

RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042 beririsan dengan periode RPJPD Kota Balikpapan, sehingga RPJPD harus membangun keselarasan dengan RTRW. Kota Balikpapan berposisi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berarti merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. RTRW Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan,

pertambangan dan pengembangan IKN. Adapun kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas.
2. Pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
3. Pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh wilayah provinsi.
4. Pelestarian kawasan berfungsi lindung.
5. Pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di wilayah darat dan perairan serta pesisir.
6. Pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
8. Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru.
9. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.
10. Pengembangan kawasan budi daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Balikpapan memiliki periode RTRW 2012-2032 yang masih beririsan dengan periode RPJPD. Keselarasan RPJPD dengan RTRW merupakan aspek kritikal pada masa depan, mengingat prediksi pembangunan Kota Balikpapan yang akan berkembang secara dinamis. Adapun narasi keterkaitan secara lebih detail akan diulas di Bab 4 tentang RPJPD terkait indikasi kinerja berdasarkan RTRW dan rencana sektoral.

RTRW Balikpapan memiliki tujuan menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. RTRW memiliki kebijakan penataan ruang berupa: penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan; peningkatan aksesibilitas antar kawasan; peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (zero waste);

perwujudan kelestarian kawasan lindung; peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota; pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan; pengembangan kawasan strategis kota; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

1.3.4 Keterkaitan RPJPD dengan Rencana Induk IKN

Arah pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan terkait dengan keberadaan proses perpindahan IKN. IKN telah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Di dalam regulasi tersebut terdapat juga Rencana Induk IKN. IKN memiliki visi "Kota Dunia untuk Semua". Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan utama berupa:

1. Simbol identitas nasional: kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa.
2. Kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan.
3. Penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan serta untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Balikpapan memiliki posisi dan peran strategis di dalam Rencana Induk IKN. Balikpapan bagian dari strategi tiga kota yang akan dijalankan sebagai penjabaran visi *locally integrated*. IKN terintegrasi secara domestik sebagai *superhub* ekonomi yang akan menggerakkan perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Strategi tiga kota (IKN, Samarinda, dan Balikpapan) akan membentuk segi tiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi dengan peran masing-masing kota sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Strategi Tiga Kota dalam Rencana Induk IKN

Kota	Peran
IKN sebagai saraf	• Pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau. • Basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). • Basis untuk s*mart city* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
Samarinda sebagai jantung	• Mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. • Dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.
Balikpapan sebagai otot	• Memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor. • Memperkuat peran *superhub* ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. • Menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Sumber: Rencana Induk IKN, Lampiran 2 UU No. 3 Tahun 2022

Berdasarkan peran di dalam strategi tiga kota, Balikpapan memiliki tantangan untuk mengoptimalkan potensi besar *existing* maupun membuka diversifikasi sektor ekonomi unggulan untuk menjadi superhub ekonomi nasional. Sarana dan prasarana yang telah tersedia akan memperkuat posisi Balikpapan sebagai *superhub*, antara lain Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, dan Terminal Kariangau sebagai Pelabuhan kargo internasional. Pergerakkan ekonomi dan konektivitas yang cepat akan didukung dengan adanya potensi koridor kereta api dari Balikpapan ke IKN.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen yang menjadi acuan bagi arah pembangunan Kota Balikpapan dalam kurun waktu 20 tahun;
2. tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi perumusan empat kali periode RPJMD sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar kepemimpinan kepala daerah;
3. tersusunnya dokumen yang memuat arah pembangunan makro seluruh sektor dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan sektoral jangka panjang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran kondisi *existing* daerah berbasis capaian kinerja pembangunan, hasil evaluasi RPJPD, proyeksi demografi yang akan berdampak pada proyeksi kebutuhan sarana prasarana, dan integrasi kinerja RTRW dan rencana sektoral lainnya ke dalam dokumen RPJPD
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.
Bab 4 Visi dan Misi	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah
Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan penjabaran misi, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.
Bab 6 Penutup	Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas gambaran umum kondisi daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025. Data di dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah di bab V. Berikut adalah deskripsi yang lebih detail tentang gambaran umum kondisi daerah Kota Balikpapan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Deskripsi terkait aspek geografi dan demografi ditujukan untuk menggambarkan karakteristik *eksisting* secara fisik maupun dinamika sosial budaya penduduk di Kota Balikpapan. Aspek geografi mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi memuat jumlah, struktur, dan distribusi penduduk. Berikut disajikan deskripsi dari setiap komponen tersebut

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi secara lebih khusus menarasikan terkait karakteristik lokasi dan wilayah yang mencakup parameter fisik Kota Balikpapan. Deskripsi potensi pengembangan wilayah meliputi distribusi spasial yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan yang didasarkan pada keberadaan dan ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan deskripsi wilayah rawan bencana memuat informasi terkait dinamika, distribusi dan intensitas kebencanaan secara keseluruhan di Kota Balikpapan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

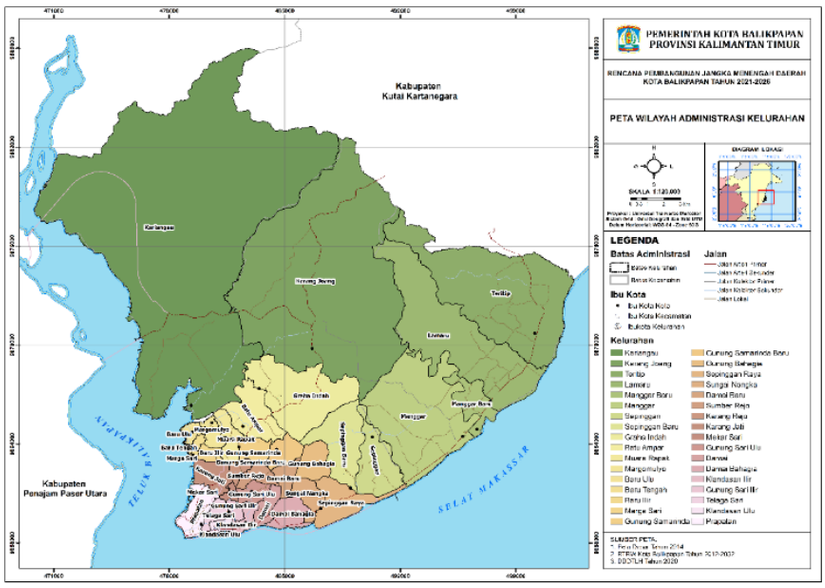
Luas dan batas administratif, letak dan kondisi geografis, karakter geologi, hidrologi serta klimatologi Kota Balikpapan merupakan komponen yang disajikan pada karakteristik lokasi dan wilayah di Kota Balikpapan. Karakteristik lokasi dan wilayah ini merupakan kondisi mendasar, yang selanjutnya memengaruhi kehidupan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, dan lebih lanjut lagi, dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan wilayah di Kota Balikpapan.

1. Luas, Batas dan Wilayah Administratif

Wilayah adminstratif Kota Balikpapan mencakup daratan dan lautan. Adapun luas keseluruhan Kota Balikpapan sebesar 51.101,24 Ha. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan lautan dan kabupaten lain di sekitarnya, yang mencakup:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan



Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2021

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kondisi tersebut didasarkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang bervariasi. Adapun informasi terkait luasan wilayah di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan

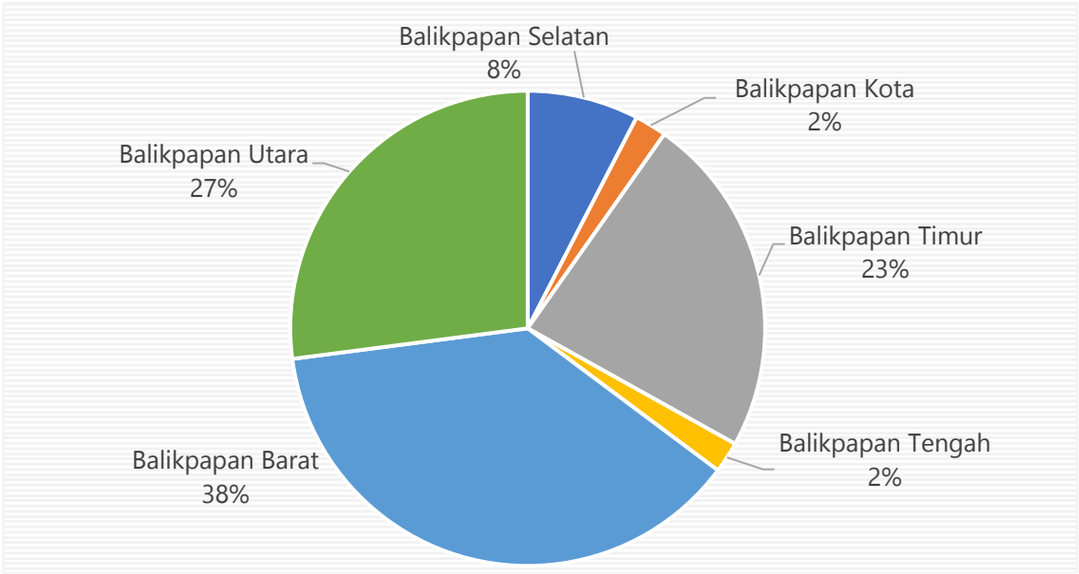
No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2021

Kecamatan terluas, berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan cakupan area sebesar 38% dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21% dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat.

Gambar 2. 2 Persentase Luas Per Kecamatan di Kota Balikpapan



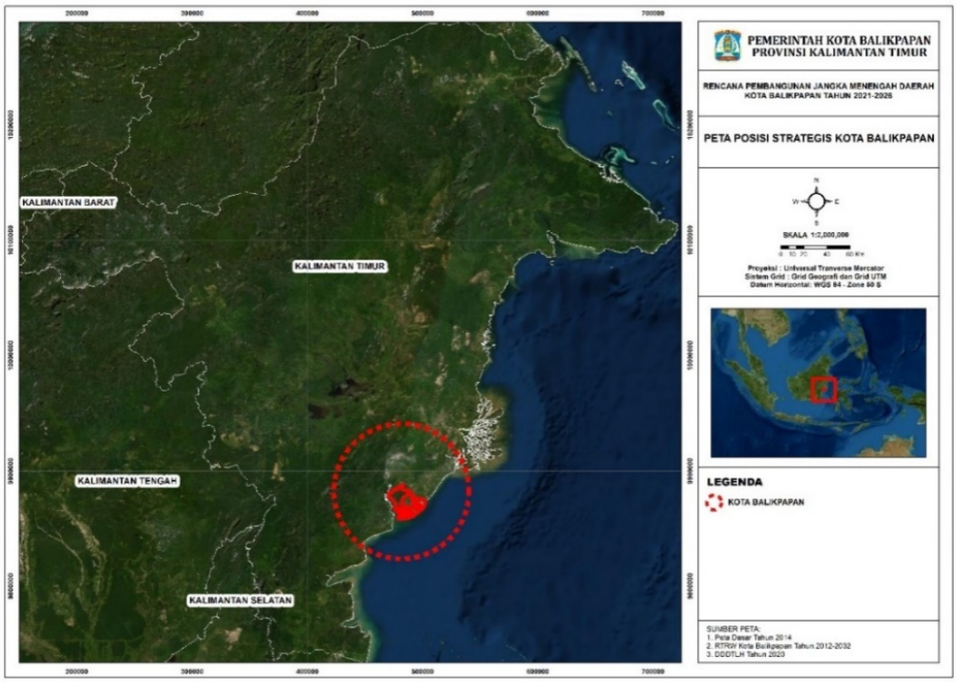
Sumber: Olah data, 2023

Adapun kecamatan dengan luas terkecil terletak di Kecamatan Balikpapan Kota. Cakupan luasnya sebesar 2,17% dari luas total Kota Balikpapan. Meskipun memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek Kota Balikpapan sebagai pusat pemerintahan kota, dan juga pusat aktivitas perekonomian.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara absolut, letak Kota Balikpapan berada pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan. Adapun kondisi geografis Kota Balikpapan secara umum berada di pesisir Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Posisi tersebut cukup menguntungkan bagi Kota Balikpapan, di antaranya berupa sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi. Kekayaan terhadap sumber daya minyak dan gas bumi tersebut, yang selanjutnya turut berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan industri di Kota Balikpapan. Selain itu, posisi Kota Balikpapan yang demikian, juga memberikan dampak positif berupa dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata.

Gambar 2. 3 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan



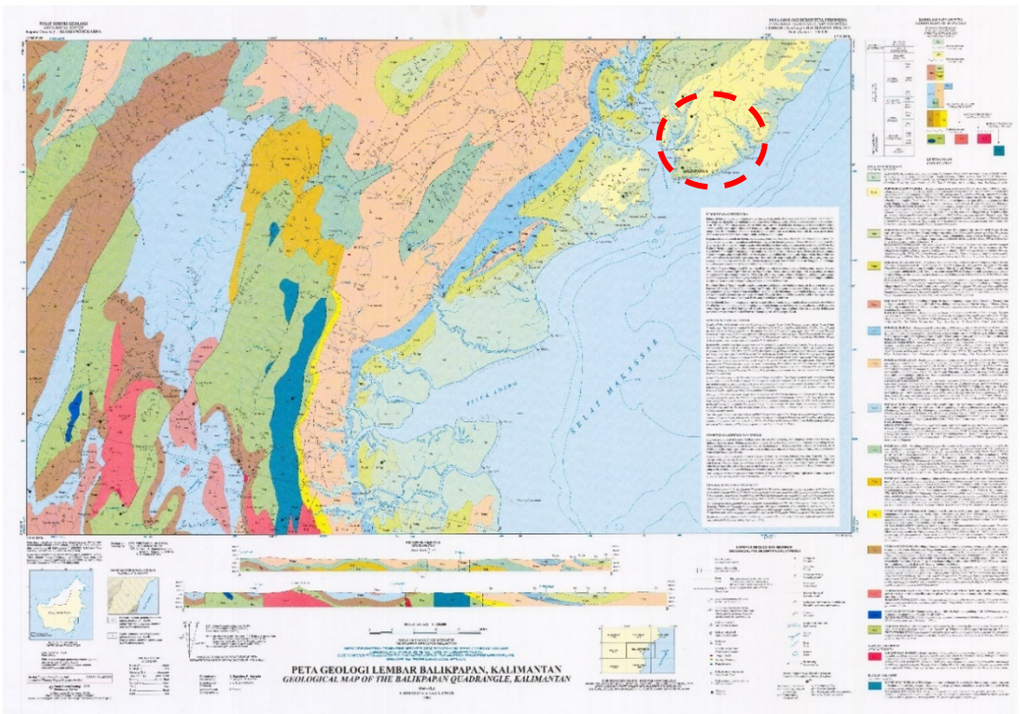
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Lebih lanjut, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berdampak positif bagi Kota Balikpapan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan IKN. Posisi strategis tersebut membuat Kota Balikpapan dipersiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian alam. Selain itu, posisi strategis tersebut juga diperkirakan dapat menunjang roda perekonomian masyarakat Kota Balikpapan.

3. Geologi

Kota Balikpapan termasuk bagian dari Cekungan Kutai, yang merupakan cekungan paling luas dan paling dalam di Indonesia bagian Barat. Selain itu, Cekungan Kutai juga menjadi salah satu cekungan sedimentasi yang penting di Indonesia. Serangkaian proses geologi yang panjang dari Cekungan Kutai di antaranya menghasilkan cadangan minyak, batubara dan gas dalam jumlah yang besar.

Gambar 2. 4 Kota Balikpapan Bagian dari Cekungan Kutai



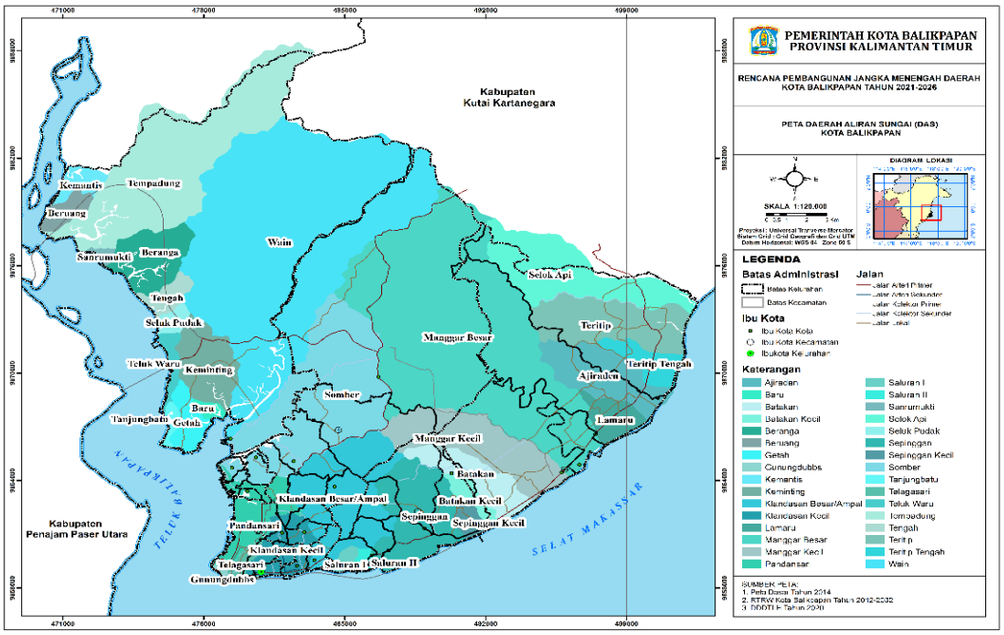
Sumber: Hidayat dan Umar, 1994

Cekungan ini terbentuk akibat proses tektonik dan sedimentasi selama jutaan tahun. Terbentuk pada kala Eosen Tengah karena proses pemekaran yang diikuti oleh fase pelenturan dasar cekungan yang berakhir pada Oligosen Akhir. Peningkatan tekanan karena tumbukan lempeng mengakibatkan pengangkatan dasar cekungan ke arah Barat Laut yang menghasilkan siklus regresif utama sedimentasi klastik di Cekungan Kutai dan tidak terganggu sejak Oligosen Akhir hingga sekarang. Adapun lapisan geologi di daerah ini terdiri dari batuan sedimen, seperti batu pasir, batu lempung, dan batu gamping.

4. Hidrologi

Kota Balikpapan termasuk dalam Wilayah Sungai Strategis Nasional Mahakam. Wilayah Sungai tersebut mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Di bawah ini merupakan distribusi DAS di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 5 DAS Kota Balikpapan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Berdasarkan tiga puluh dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan, area DAS terluas yakni Daerah Aliran Sungai Wain sebesar 25.349,31 Hektar. DAS Sungai Wain juga termasuk ke dalam area hutan lindung Sungai Wain. Adapun Daerah Aliran Sungai terkecil di Kota Balikpapan yaitu DAS Gunung Dubbs, dengan luas sebesar 42.05 Hektar.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)	No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)
1	Gunung Dubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

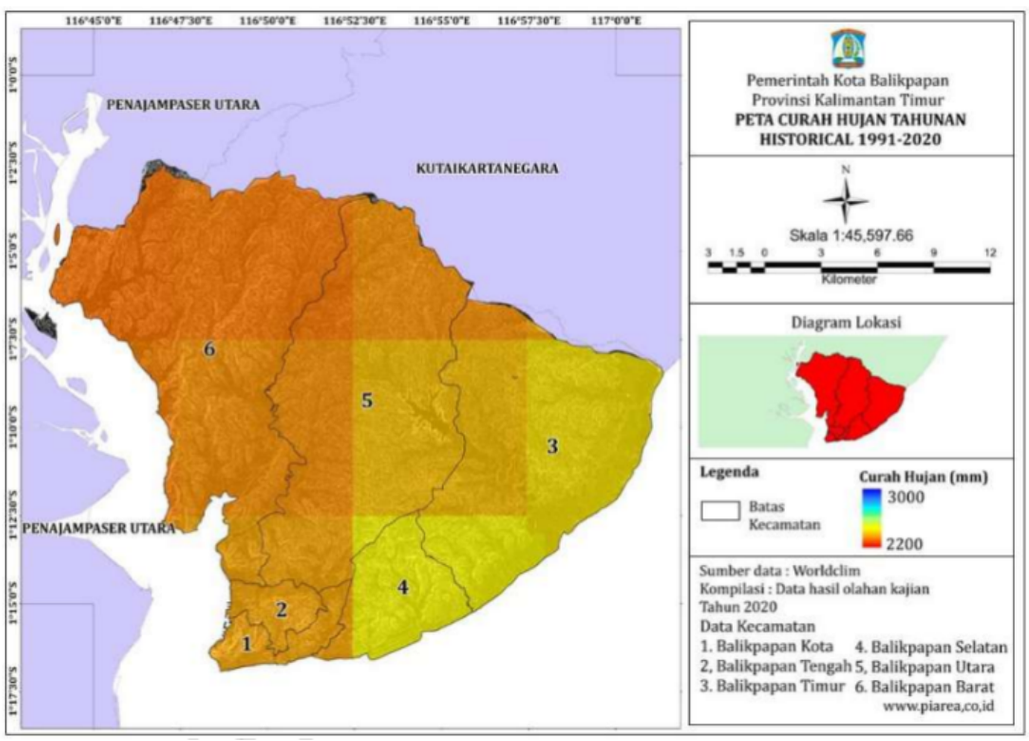
Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Adapun karakteristik hidrologi air tanah, Kota Balikapapan juga memiliki potensi tersebut. Kondisi fisiografi dan topografi wilayah Kota Balikpapan yang berbukit di bagian utara, berimplikasi terhadap pola aliran air tanah yang mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan. Banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan penyediaan air bersih dari PDAM.

5. Klimatologi

Julat curah hujan tahunan Kota Balikpapan dari tahun 1991-2020 sebesar 2.220 mm hingga 2.400 mm. Ada peningkatan pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir. Hal tersebut ditandai dengan sebaran warna kuning yang berada di daerah pesisir dan warna jingga-merah berada di daerah tinggi atau perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara).

Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Tahunan Historikal 1991-2020



Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada di kisaran 750 – 450 mm. Adapaun curah hujan tertinggi historikal dari tahun 1991-2020 terdapat pada bulan Maret, April, dan Mei. Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara merata di masa depan, dengan interval curah hujan sebesar 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.

6. Penggunaan Lahan

Komposisi pola pemanfaatan lahan di wilayah daratan maupun laut, Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Pola pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan terbagi menjadi pemanfaatan lahan di kawasan budidaya dan kawasan lindung. Adapun total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 hektar.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki luas lahan sebesar 19.194,08 Ha atau 22,66 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung. Adapun hutan lindung ini terdiri dari kawasan hutan lindung, perluasan Hutan Lindung Sungai Wain, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung.

B. Kawasan Budidaya

Total kawasan budidaya di Kota Balikpapan adalah sebesar 50.746,76 ha. Peruntukan terbesar diarahkan untuk kawasan perikanan dengan luas wilayah sebesar 16.633,55 Ha atau sekitar 19,68 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun distribusi pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan, disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 3 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I. KAWASAN LINDUNG				
A.	Kawasan Hutan Lindung	19,194.08	22.66	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
B.	Kawasan Perlindungan Bawahan	920.25	1.09	
1	Kawasan Resepan Air			
C.	Kawasan Perlindungan Setempat	6,531.18	7.71	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	Kawasan RTH Kota	529.78	0.63	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		

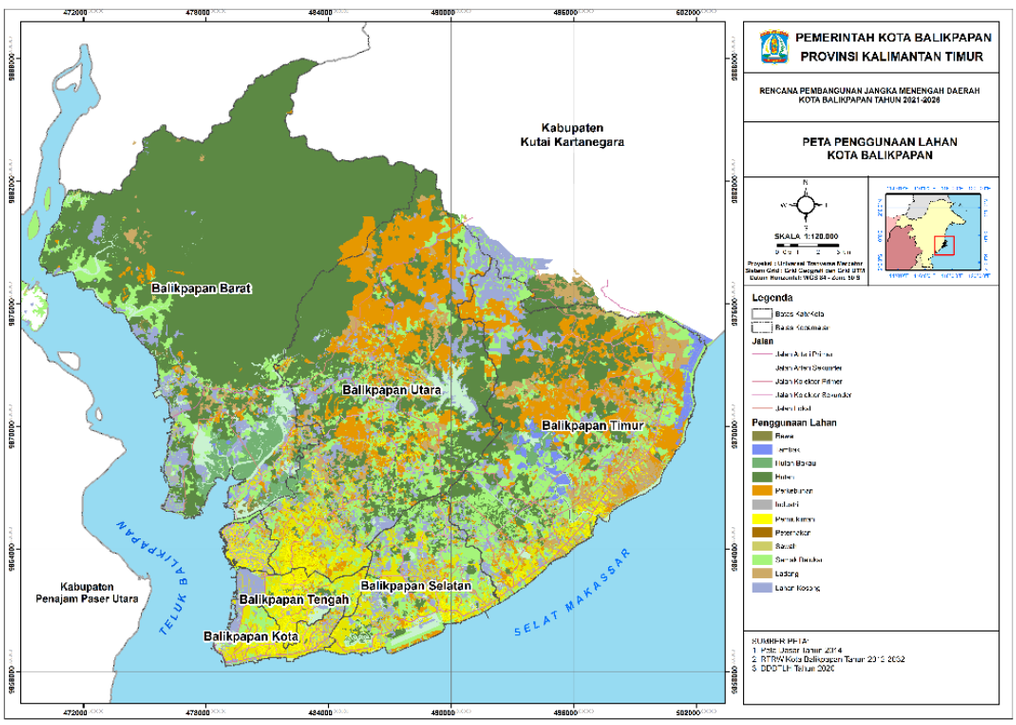
No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya	345.98	0.41	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50	0.23	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
G.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut	6,222.30	7.35	Wil. Pesisir dan Laut
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG		33,940.07	40.08	
II. KAWASAN BUDIDAYA				
A.	Kawasan Peruntukan Pertanian	3,531.36	4.17	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
B.	Kawasan Peruntukan Perikanan	16,663.55	19.68	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	Kawasan Peruntukan Perumahan		12.87	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
D.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	2,523.58	2.98	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
E.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	56.14	0.07	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	Kawasan Peruntukan Industri	5,107.86	6.03	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
G.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	449.40	0.53	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
H.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	264.47	0.31	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	10,821.83	12.78	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	Kawasan Pendidikan	426.56	0.5	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
Total Kawasan Budidaya		50,746.76	59.92	
Total Keseluruhan Kawasan		84,686.84	100	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2012-2032

Dari keseluruhan kawasan lahan di Kota Balikpapan, pemanfaatan lahan terbesar didominasi oleh kawasan budidaya sebesar 59,92 persen. Adapun persentase kawasan lindung sebesar 40,08 persen dari luasan total Kota Balikpapan. Adapun distribusi Pemanfaatan lahan di Kota Balikpapan, disajikan dalam Peta berikut ini.

Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan



Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Pemanfaatan Lahan sebagai kawasan budidaya, didominasi di daerah urban Kota Balikpapan serta bagian selatannya. Adapun pemanfaatan lahan yang didominasi dengan kawasan lindung, mendominasi di Balikpapan Barat. Diversifikasi terhadap pemanfaatan lahan di Balikpapan Barat memungkinkan untuk dapat dioptimalkan, dengan tetap memperhatikan prinsip penggunaan lahan yang berkelanjutan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Balikpapan didasarkan pada potensi sumber daya serta potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah bagian Kota Balikpapan. Pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan berkembangnya setiap wilayah kota tanpa saling tumpang tindih, sehingga potensi masing-masing wilayah dapat berkembang secara ideal dan terintegrasi. Pengembangan wilayah Kota Balikpapan telah tertuang dalam dokumen tata ruang wilayah yang berbasis pada pusat pelayanan dan kawasan strategis.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah Kota Balikpapan dapat diwujudkan dengan pendekatan spasial berdasarkan pengembangan berbasis fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan ruang. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Balikpapan didukung dengan adanya potensi sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. Potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.576,67 Ha. Arahan pengelolaan kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan: kawasan pertanian lestari/ sawah lahan basah dan kegiatan pertanian holtikultura.

Perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan dengan fungsi sebagai penyangga bagi kawasan hutan lindung dengan luasan yang terbatas. Perkebunan di Kota Balikpapan merupakan perkebunan tanaman keras. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain tanaman karet, lada, kelapa, kakao, kemiri, kopi, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Peruntukan kawasan perkebunan di Kota Balikpapan mencapai 2.076,17 Ha atau mencapai 4,12 % luas Kota Balikpapan. Kawasan perkebunan tersebut berlokasi di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Teritip,

Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru. Namun, sebagian besar kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.

Potensi sumber daya terbarukan atau *renewable resources* dikembangkan pada kawasan pesisir Kota Balikpapan, khususnya pemanfaatan sumber daya perikanan. Tidak hanya di kawasan pesisir dengan potensi perikanan laut, tetapi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai potensi perikanan darat. Pengembangan kawasan minapolitan juga dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan.

Sektor industri dan perdagangan di Kota Balikpapan juga berpotensi untuk dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi pengembangan Kota Balikpapan yang diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial dan unggul. Kota Balikpapan yang terletak di wilayah strategis memiliki keunggulan komparatif berdampak pada pertumbuhan industri skala kecil/rumah tangga hingga skala besar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Penetapan kawasan industri Kota Balikpapan yang terletak di ALKI II sekaligus menjadi pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur menjadi keunggulan untuk perkembangan industri wilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Potensi alam maupun budaya di Kota Balikpapan juga menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata di Kota Balikpapan seperti hutan lindung, kawasan lindung, kawasan bakau (mangrove), agrowisata, wanawisata, dan lain-lain. Sedangkan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi wisata sejarah yang berupa tugu, monumen dan tempat bersejarah, serta bangunan unik.

2. Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis merupakan upaya yang dilakukan untuk pengembangan wilayah. Beberapa kawasan strategis yang ditetapkan untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan.

A. Kawasan Strategis Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan ditopang oleh penetapan kawasan strategis yang dikembangkan berfokus pada pengembangan

ekonomi di beberapa kawasan. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan di beberapan kawasan diantaranya Kawasan Metropolitan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Ekonomi Terpadu. Beberapa kawasan di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi adalah:

1. Kawasan Pusat Kota Lama Balikpapan
2. Kawasan Pusat Kota Kedua (Karangjoang)
3. Kawasan Pusat Kota Ketiga (Teritip)
4. Kawasan Industri Karingau (KIK)
5. Kawasan Minapolitas Manggar

B. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis sosial budaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya kota maupun nasional. Kawasan yang ditetapkan di antaranya kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Balikpapan Selatan yang merupakan cikal bakal permukiman nelayan dan Kawasan Pendidikan Skala Regional Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

C. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis yang mendukung perlindungan daya dukung lingkungan hidup didukung dengan penetapan kawasan lindung pada dokumen tata ruang wilayah Kota Balikpapan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Berikut adalah kawasan strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.
2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

3. Peran Strategis sebagai Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga, perlu meningkatkan sinergitas pembangunan dengan IKN guna mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan tujuan utama pembangunan IKN. Beberapa aspek yang

perlu diperhatikan dalam penataan kota sevagai beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN adalah peningkatan kualitas infrastruktur kota seperti penyediaan fasilitas dalam hal permukiman yang layak, pemantapan kondisi jalan, penyediaan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang inklusif, layanan teknologi informasi yang berkualitas dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di IKN.

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi “otot” atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan pendanaan dan penyediaan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Lebih lanjut, sebagai respon terhadap kebijakan IKN dan dengan memerhatikan situasi serta kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, diperlukan dukungan terhadap kebijakan tata ruang (RDTR) dan transportasi (Masterplan Transportasi) dengan beberapa penguatan yang tertuang dalam Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda IKN, yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya antisipasi bahwa Pusat Pelayanan Kota baru di Karang Joang dan sekitarnya akan menjadi pusat pelayanan yang berskala regional (melayani daerah sekitar Balikpapan).
- Mengingat luasnya kawasan budidaya di Balikpapan Utara yang berada pada kelerengan tinggi dan risiko bencana tinggi, perlu ada upaya mengendalikan pertumbuhan di Balikpapan Utara dengan:
  - Mempertegas peraturan zonasi dan ketentuan konstruksi di Balikpapan Utara

- Mempermudah pertumbuhan di Balikpapan Timur (kecamatan dengan akses ke jalan tol) dengan insentif pembangunan (peraturan zonasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, dll).

- Pertumbuhan kegiatan permukiman dan jasa diarahkan ke utara dan timur Balikpapan agar tidak memberikan beban tambahan bagi bagian tengah dan selatan Balikpapan yang memiliki persoalan kemacetan, sulitnya air bersih, dan kerentanan terhadap bencana banjir.
- Perlu ada perencanaan dan penataan ruang bagi kawasan perkantoran dan jasa yang kemungkinan akan berkembang pesat apabila IKN telah beroperasi.
- Prioritas penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan untuk memperbaiki kinerja jalan di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan dimana mayoritas penduduk Balikpapan tinggal dan tingkat pelayanan jalannya (LoS) masih rendah (*travel demand management*).
- Perluasan rute dan perencanaan sistem transportasi yang mempertimbangkan konektivitas pada skala lingkungan hingga perkotaan serta potensi paratransit.

Secara spesifik, konsep pergerakan penumpang dan barang dalam sistem perkotaan Balikpapan dalam konteks kawasan IKN adalah sebagai berikut:

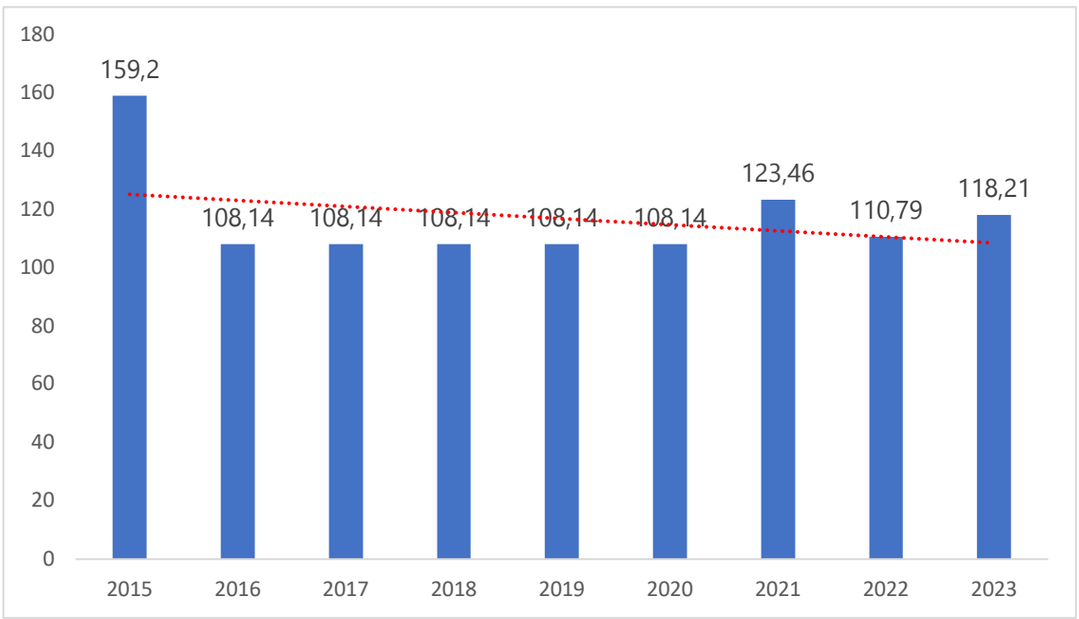
- Bersamaan dengan menangkap peluang peran Balikpapan sebagai otot IKN dan juga kota jasa, Balikpapan perlu mengendalikan perkembangan kota (*controlled urban sprawl*) di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur yang akan menjadi lintasan utama konektivitas dari IKN ke Balikpapan.
- Jalur kereta api regional Trans Kalimantan perlu diintegrasikan dengan jalur kereta api perkotaan dan/atau jalur angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di dalam Kota Balikpapan, menghubungkan ke Bandara dan aktivitas rekreasi.
- Langkah mendasar adalah menentukan simpul-simpul utama yang akan menjadi stasiun dan merencanaan pengembangan kawasan berorientasi transit di simpul-simpul tersebut. Kemudian direncanakan rute-rute pengumpan dalam kota.
- Memulai perencanaan dan pengembangan kota berbasis transit dengan melakukan *land banking*.

- Mendorong angkutan barang multimoda (integrasi moda darat melalui jalan tol/arteri dan kereta barang).
- Untuk mengendalikan *urban sprawl*, perlu pemisahan antara koridor logistik dengan koridor penumpang yang melintasi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Pemisahan dapat dilakukan secara spasial maupun temporal.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah wilayah yang mempunyai pola kejadian bencana yang terjadi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari karakteristik fisik dan sosial daerah tersebut. Salah satu indikator yang menilai terkait kerawanan bencana adalah Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (IRBI). Indeks risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2015-2023 disajikan sebagai berikut ini.

Gambar 2. 8 Indeks risiko bencana Kota Balikpapan Tahun 2015-2023



Sumber: BNPB, 2024

Indeks risiko bencana di Kota Balikpapan memiliki tren yang cenderung menurun, dan termasuk dalam kategori seang hingga capaian termutakhir di tahun 2023. Artinya, kapasitas dalam penanggulangan bencana yakni dari sisi struktural maupun non struktural semakin optimal di Kota Balikpapan. Adapun nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020.

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah

kebakaran hutan dan lahan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan dan lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non-alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali.

1. Kebakaran hutan dan bangunan

Kebakaran merupakan bencana yang juga menjadi catatan khusus di Kota Balikpapan karena memiliki risiko yang besar. Khusus di perkotaan Balikpapan, bencana kebakaran sering terjadi. Penyebab utama dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan adalah terdapat indikasi kekeringan lahan. Selain itu, hal ini disebabkan oleh kerapatan bangunan dan kurangnya upaya yang ada dalam tanggap darurat khususnya penyediaan sarana prasarana pertolongan pertama kebakaran sehingga risiko menjadi besar. Sebagai contoh pada tahun 2016 terjadi kebakaran lahan seluas 65 hektar, tahun 2017 seluas 2 hektar, tahun 2018 seluas 28 hektar dan tahun 2020 sebesar 28,755 hektar.

2. Banjir

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Kejadian banjir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 20 kasus pada tahun 2021. Permasalahan tumpukan sampah di drainase juga mengurangi daya tampung drainase sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik di Kota Balikpapan.

Data pengukuran debit pada tahun 2021, mencatat bahwa debit maksimum DAS Ampal pada bagian hilir adalah sebesar 290,26 m^3/det dan bagian hulu sebesar 60,69 m^3/det dengan lebar dasar saluran permukaan 40 m dan kedalaman 3,5 m. Pada sungai Ampal bagian hulu mengalami kelebihan debit, sehingga terjadi banjir atau genangan pada bagian hilir. Risiko terbesar adalah daerah di sepanjang jalan karena luapan air pada saluran drainase yang tidak dapat menampung air.

3. Pergerakan tanah/longsor

Struktur tanah di Kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Di antara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan oleh lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%. Apabila curah hujannya tinggi, tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi. Dengan kondisi ini wilayah Kota Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kepadatan penduduk yang ada pada wilayah ini. Bencana tanah longsor terjadi pada tahun 2021 jumlah area terdampak sebesar 0,1373 Ha. Menurut DIKPLHD Tahun 2018, laju erosi mencapai 500%, dengan total kehilangan tanah mencapai 1300 ton/ha/tahun untuk kelerengan 15-25%.

4. Kekeringan

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim di masa mendatang khususnya dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku yang menjadi salah satu keterbatasan di Kota Balikpapan. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.

2.1.1.4 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan komponen dari tingkat kapasitas daerah dinilai berdasarkan capaian para pemangku kebijakan (instansi/lembaga) di level pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Ketahanan daerah Kota Balikpapan berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,630 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

2.1.1.5 Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kota Balikpapan, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Penilaian kualitas lingkungan hidup di antaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 4 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	91,34	92,4	97,9	84,93	88,42	88,92	88,52	84,29	89,98
Indeks Kualitas Air	40,8	51,6	42,1	49,5	47,9	40,9	49,4	50,0	54,5
Indeks Tutupan lahan	48,12	48,12	48,12	48,15	48,24	65,33	69,49	50,32	48,91
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**58,58**	**62,45**	**61,25**	**59,58**	**60,19**	**65,09**	**69,18**	**63,96**	**67,64**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mencatat bahwa IKLH Kota Balikpapan memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria capaian IKLH Kota Balikpapan tergolong sedang dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015-2023. Kondisi tersebut menunjukkan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga dapat memberikan dampak secara nyata terhadap kualitas air di Kota Balikpapan.

Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut, dapat disebabkan karena telah terjadi kontaminasi dari zat pencemar terhadap tubuh air di Kota balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil. Berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Meskipun berada di

tengah kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Masih banyak kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada tahun 2015-2017. Indeks kualitas udara kemudian mengalami penurunan kategori dari tahun 2018 menjadi kategori baik. Adanya penurunan kategori indeks kualitas udara tersebut disebabkan karena indikasi pencemaran udara di Kota Balikpapan.

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Balikpapan. Pertumbuhan pembangunan sektor industri yang relatif cepat, memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan melalui emisi yang dihasilkan oleh sektor industri. Tercatat penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO_2e pada tahun 2010, atau mencakup 69,30% dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85% terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Dengan demikian, berbagai upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kota Balikpapan perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan demi terwujudnya penurunan emisi yang signifikan dan berimplikasi terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan yang kembali berkategori sangat baik.

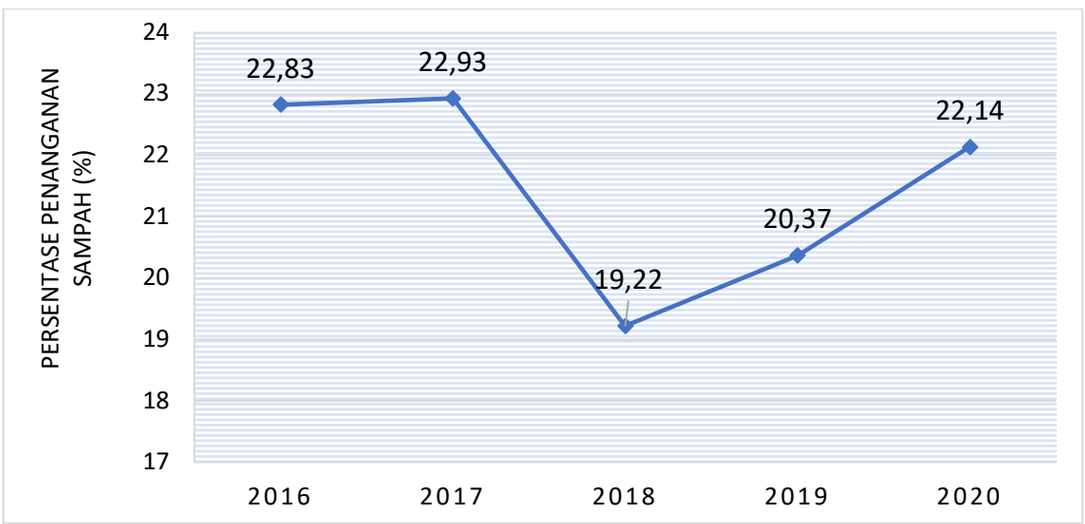
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, dan menurun capaiannya pada tahun 2022 hingga 2023. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan di Kota Balikpapan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan (pengupasan lahan) dan perusakan ekosistem lahan mangrove. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kota Balikpapan, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2023. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian IKTL Kota Balikpapan menjadi kategori baik.

Adapun penurunan capaian IKTL tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi ITL Kota Balikpapan oleh KLHK, yang berimplikasi terhadap perubahan
luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618, 3247 Ha.

2. Persampahan

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.

Gambar 2. 9 Pengelolaan Sampah di Sumbernya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2021

Persentase pengelolaan sampah di sumbernya di Kota Balikpapan belum mencapai hasil yang diharapkan hingga tahun 2020. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah menjadi penyebab terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan

sampah di Material Recovery Facility (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif.

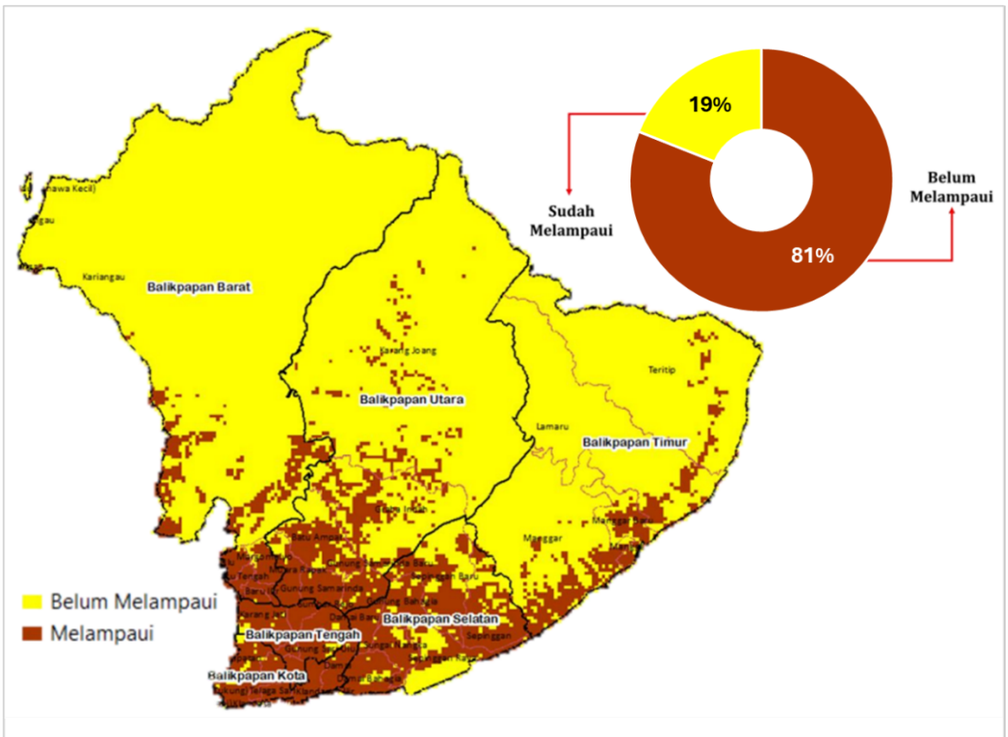
Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang didaur ulang.

2.1.1.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Status Daya Dukung Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%. Berikut disajikan distribusi status daya dukung pangan di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 10 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

Tabel 2. 5 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan

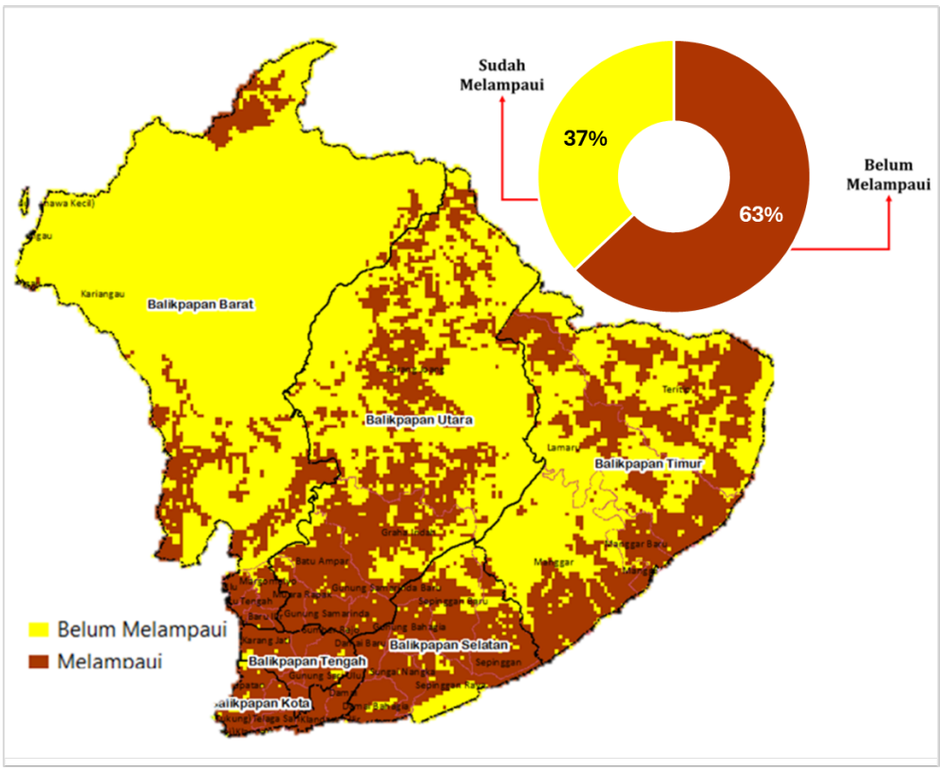
No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355851962292,23	61550296750,00	294301665542,23	453459,02
2	Balikpapan Kota	17309636348,82	60537184500,00	-43227548151,21	22057,52
3	Balikpapan Selatan	59839708148,50	84120491500,00	-24280783351,50	76253,21
4	Balikpapan Tengah	17981253627,96	79236992250,00	-61255738622,07	22913,35
5	Balikpapan Timur	205971870671,05	46788364500,00	159183506171,05	262468,14
6	Balikpapan Utara	259223859518,33	100009324750,00	159214534768,33	330326,68
	Grand Total	**916178290606,89**	**432242654250,00**	**483935636356,83**	**1167477,91**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

2. Status Daya Dukung Air

Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%. Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

Gambar 2. 11 Status daya dukung air Kota Balikpapan



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Tabel 2. 6 Status daya dukung air Kota Balikpapan

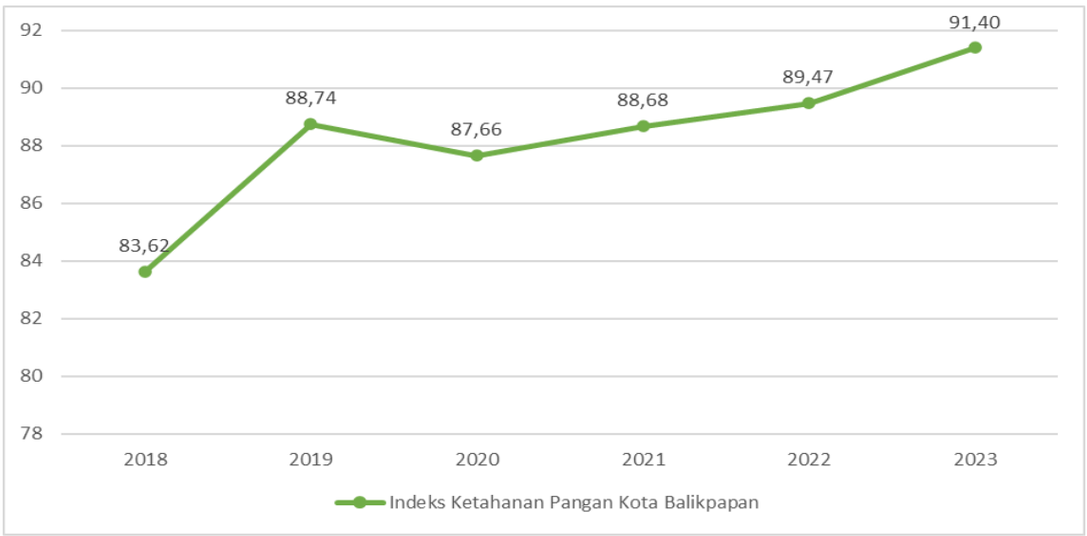
No	Kecamatan	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208478674,78	71655727,90	136822946,89	258209,00
2	Balikpapan Kota	10897248,70	61815593,49	-50918344,78	13695,00
3	Balikpapan Selatan	36595054,51	88885350,79	-52290296,28	45863,00
4	Balikpapan Tengah	11286464,01	81044835,90	-69758371,90	14180,00
5	Balikpapan Timur	116936986,93	92331427,75	24605559,19	145983,00
6	Balikpapan Utara	139953015,05	129892742,34	10060272,72	174504,00
	Grand Total	**524147443,99**	**525625678,16**	**-1478234,17**	**652434,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

2.1.1.7 Indeks Ketahanan Pangan

Kinerja penyelenggaraan pangan di Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari indeks ketahanan pangan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 12 Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2018-2023



Sumber: BPS, 2018-2019 dan Badan Pangan Nasional, 2020-2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan Kota Balikpapan mengalami penurunan peringkat dari peringkat kedua pada tahun 2022 menjadi peringkat kedelapan nasional kategori kota. Kota Balikpapan mampu meraih nilai 91,40 meskipun hanya memiliki 15 persen lahan untuk kegiatan pangan dan sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah masyarakat untuk ditanami tanaman pangan sehingga menjadi pekarangan pangan lestari (P2L) atau dikenal juga dengan *urban farming*.

2.1.2 Aspek Demografi

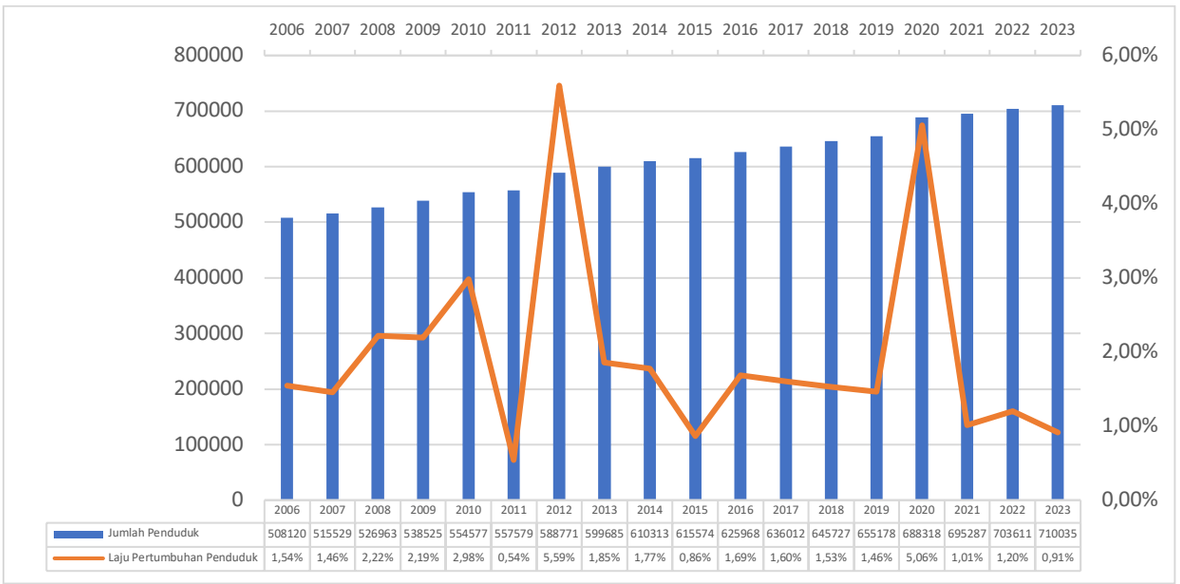
Perubahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari Kota Balikpapan. Data kependudukan di Kota Balikpapan terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk, dan distribusi penduduk. Ketiga pembagian tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk mencapai 710.035 jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 362.767 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 347.268 lainnya adalah perempuan. Jumlah

tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 32,24 persen dibandingkan pada masa awal pelaksanaan RPJPD 2005-2025, yakni hanya 500.406 jiwa. Grafik peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2005 hingga 2023 di Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2005-2023



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	508120	515529	526963	538525	554577	557579	588771	599685	610313	615574	625968	636012	645727	655178	688318	695287	703611	710035
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,54%	1,46%	2,22%	2,19%	2,98%	0,54%	5,59%	1,85%	1,77%	0,86%	1,69%	1,60%	1,53%	1,46%	5,06%	1,01%	1,20%	0,91%

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2006-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2005-2023. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2020, yakni bertambah hingga 33.140 jiwa. Hal itu dikarenakan adanya pendataan ulang jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk 2020. Lonjakan jumlah penduduk dikarenakan data pada tahun 2011 hingga 2019 merupakan data proyeksi dengan data dasar tahun 2020. Selisih yang cukup tinggi antara jumlah penduduk tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada melebihi hasil proyeksi yang ditetapkan pada tahun 2010. Adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga tidak memberikan dampak yang signifikan pada jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Dari segi laju pertumbuhan penduduk, Kota Balikpapan mengalami fluktuasi selama 17 tahun terakhir. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2020 karena terdapat pembaharuan data sensus penduduk. Pembaharuan data penduduk baru terlihat lonjakan pada tahun 2012 karena hasil pengolahan data sensus tahun 2010 baru selesai di tahun 2012.

2.1.2.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data sex ratio di wilayah terkait. Sex ratio menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan sex ratio pada tahun 2008 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Sex Ratio pada Tahun 2008-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2008	278.443	248.520	526.963	112,04
2009	283.629	254.896	538.525	111,27
2010	286.680	267.897	554.577	107,01
2011	288.847	268.732	557.579	107,49
2012	313.197	291.252	604.449	107,53
2013	309.899	289.786	599.685	106,94
2014	315.299	295.014	610.313	106,88
2015	317.988	297.586	615.574	106,86
2016	323.394	302.574	625.968	106,88
2017	328.382	307.630	636.012	106,75
2018	333.347	312.380	645.727	106,71
2019	338.202	316.976	655.178	106,70
2020	352.802	335.516	688.318	105,15
2021	355.848	339.439	695.287	104,83
2022	359.563	344.048	703.611	104,51
2023	362.767	347.268	710.035	104,54

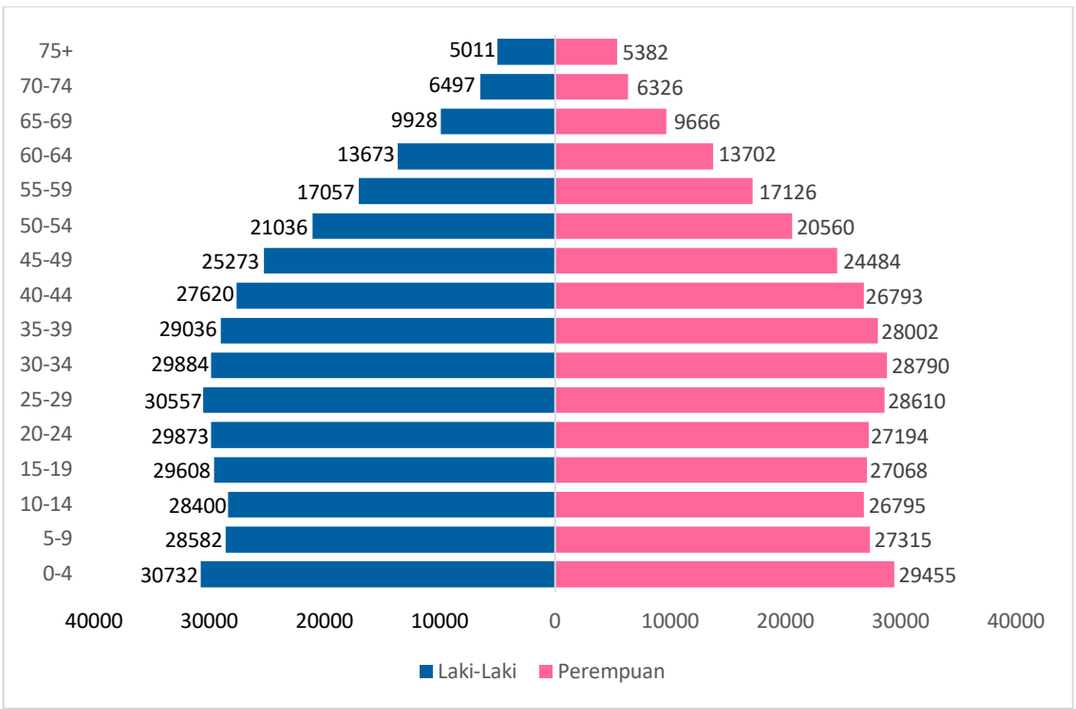
Sumber: BPS Kota Kota Balikpapan dalam Angka 2009-2024

Data sex ratio di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada rentang tahun 2008 hingga 2022 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yakni selisih 9,44 dibandingkan data sex ratio pada tahun sebelumnya. Angka sex ratio yang mencapai 110,57 menunjukkan adanya 110 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kota Balikpapan. Penurunan angka sex ratio yang kemudian mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan. Penurunan angka sex ratio yang cukup tinggi memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kota Balikpapan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan

angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah. Penurunan angka sex ratio cukup tinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai selisih 4,26 dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2023 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 2. 14 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2024, diolah

Piramida penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori stasioner yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang masuk dalam kategori usia produktif sebesar 69,85 persen dengan rincian 51,14 persen di antaranya laki-laki dan 48,86 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 24,12 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 6,03 persen. Piramida penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi atau lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola

dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

2.1.2.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	2011		2016		2021		2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Balikpapan Tengah	10,83	98.552	9.103,4	111.022	10.255,32	106.960	9.880,10	105.749	9.768,24
2	Balikpapan Kota	11,10	N/A	N/A	89.212	8.038,42	82.849	7.465,08	85078	7.665,93
3	Balikpapan Timur	119,16	60.664	509,1	67.874	569,63	92.542	776,65	102.959	864,07
4	Balikpapan Utara	138,24	123.214	891,3	137.997	998,22	172.117	1.245,03	188.605	1.364,30
5	Balikpapan Selatan	38,81	191.737	4.940,4	125.864	3.243,11	146.689	3.779,70	158.320	4.079,39
6	Balikpapan Barat	192,88	83.412	432,5	93.999	487,34	94.130	488,02	97.821	507,16

Sumber: BPS Balikpapan dalam Angka 2012, 2017, 2022, 2024

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan pada tahun 2011 hingga 2023. Penurunan kepadatan penduduk terjadi di dua kecamatan, yakni Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota pada tahun 2021. Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Balikpapan, yakni mencapai 9.768,24 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9.768 jiwa di tiap kilometer persegi pada tahun 2023 di Kecamatan Balikpapan Tengah. Pada sisi yang berlawanan, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Balikpapan Barat yang hanya mencapai satu per dua puluh dari tingkat kepadatan penduduk di Balikpapan Tengah. Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kota Balikpapan.

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Kota Balikpapan belum memiliki masyarakat adat yang dikukuhkan dalam masyarakat hukum adat (MHA) melalui peraturan daerah. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan multikultur layaknya kota besar lainnya. Daya tarik Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mendorong berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi suku, etnis, dan budaya berkumpul dan menjadi penduduk di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, mengacu pada sejarah Kota Balikpapan, penamaan Balikpapan berasal dari Suku Balik yang mendiami pesisir Kota Balikpapan. Penambahan kata papan dikarenakan Suku Balik pada zaman dahulu kerap membuat papan untuk menyuplai kebutuhan kerajaan saat itu, yakni Kerajaan Kutai. Namun, ketika ditarik garis historis yang jauh, Suku Balik juga bukan suku asli dari Kota Balikpapan, melainkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

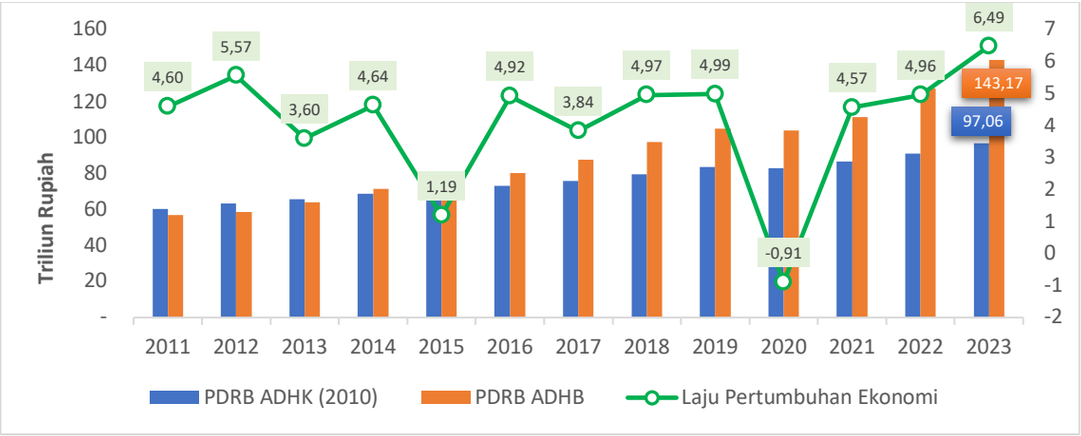
Aspek kesejahteraan ekonomi menggambarkan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks gini, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Penjelasan dari setiap indikator dijabarkan pada bagian berikut.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB riil Kota Balikpapan hingga tahun 2023 mencapai 97,06 triliun rupiah sedangkan secara nominal mencapai 103,92 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan cenderung stabil sebesar 4,11 persen per tahun pada periode 2011-2023, meskipun sempat mengalami

perlambatan pada tahun 2015 dan terkontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu mencapai 6,49 persen.

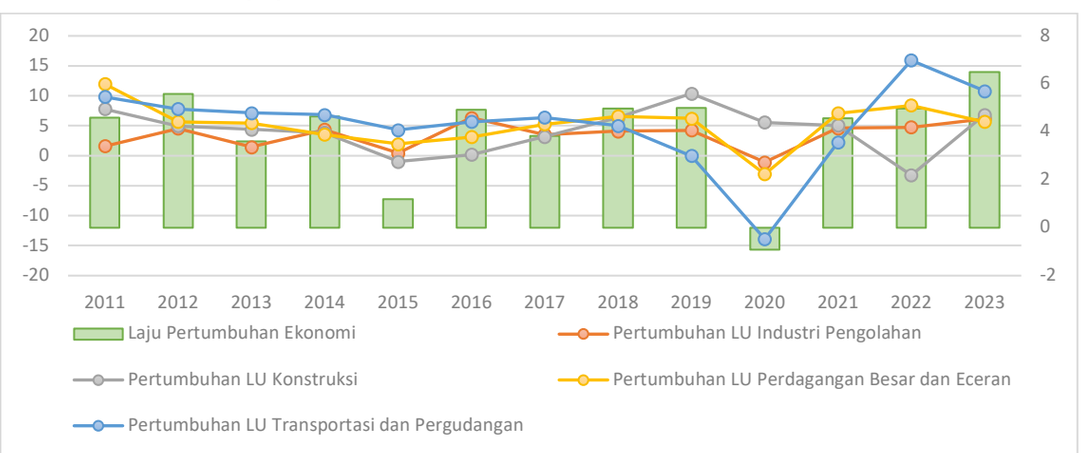
Gambar 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Perekonomian Kota Balikpapan yang sempat melambat pada tahun 2015 disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 0,44 persen atau turun 3,92 persen poin dibandingkan tahun 2014, serta kinerja sektor konstruksi yang terkontraksi hingga 0,98 persen. Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena kinerja sektor industri pengolahan dan konstruksi kembali menguat mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level normal. Namun, pada tahun 2020, perekonomian terkontraksi hingga 0,93 persen akibat pandemi Covid-19 di mana kinerja sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2. 16 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Terpilih di Kota Balikpapan Tahun 2011-2023 (%)



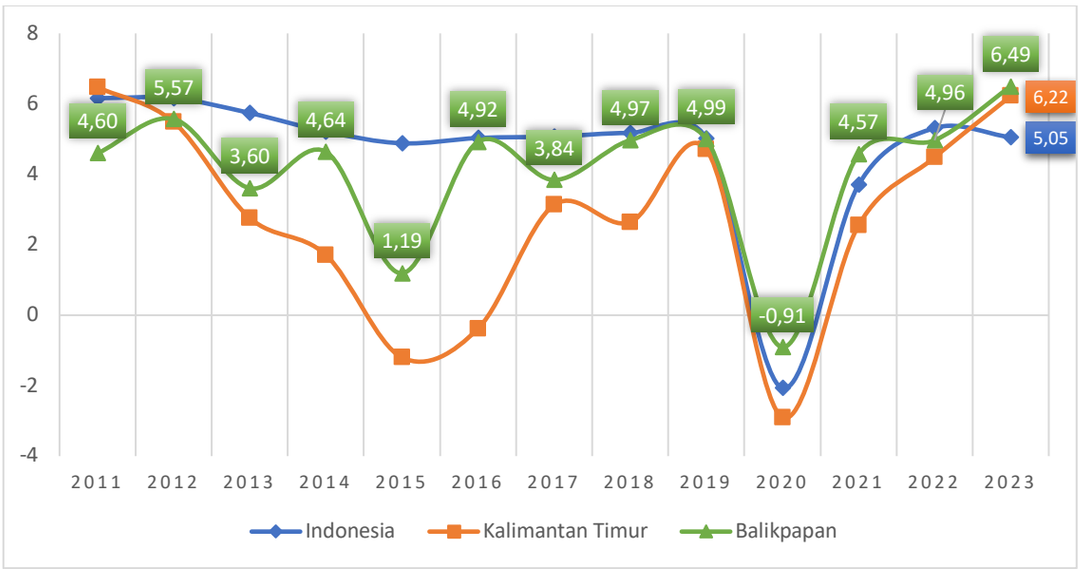
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Balikpapan tidak lepas dari kinerja sejumlah lapangan usaha yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan kontribusi mencapai 53,74 persen pada tahun 2023. Industri pengolahan di Kota Balikpapan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup berfluktuasi tetapi cenderung menguat mencapai angka 6,19 persen pada tahun 2023. Angka tersebut diprediksi akan semakin naik sejalan dengan pembangunan RDMP RU V Balikpapan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2024.

Perekonomian Kota Balikpapan tidak hanya digerakkan oleh industri pengolahan saja tetapi juga didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan. Keberadaan Pelabuhan Semayang serta Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dan penumpang ke Pulau Kalimantan bagian timur mendorong aktivitas transportasi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, pertumbuhan transportasi berkontribusi sebesar 11,68 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, dengan pertumbuhan sebesar 10,79 persen.

Selain sektor transportasi dan pergudangan, sektor konstruksi juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Proyek pembangunan RDMP RU V Balikpapan yang dimulai sejak tahun 2019 serta pembangunan infrastruktur pendukung IKN mendorong kontribusi sektor konstruksi yang semakin tinggi hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi, aktivitas pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dari kontraksi yang lebih dalam. Kinerja sektor konstruksi menunjukkan perlambatan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh turunnya jumlah aktivitas konstruksi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Namun pada tahun 2023, kinerja lapangan usaha konstruksi kembali meningkat dengan pertumbuhan mencapai 6,85 persen.

Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023 (%)



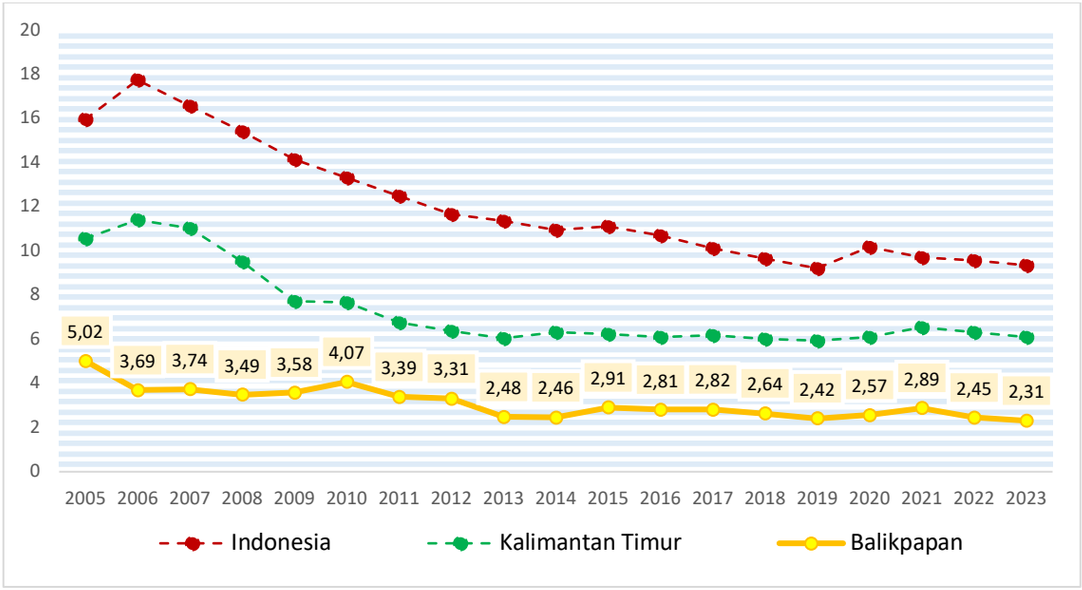
Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan secara umum berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tetapi lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2020, 2021, dan 2023 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Kondisi tersebut menandakan perekonomian Kota Balikpapan saat itu lebih resilien dan cepat pulih saat pandemi Covid-19 terjadi. Sejumlah proyek strategis nasional yang tetap berjalan di tengah lesunya ekonomi dunia mendorong kinerja sejumlah lapangan usaha yang cukup berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Perekonomian Kota Balikpapan juga diprediksi akan tumbuh lebih kuat seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung IKN, pembangunan RDMP RU V Balikpapan, pengembangan KIK Kariangau, serta proyek strategis lainnya.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan tergolong rendah bahkan menduduki peringkat ketiga kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia pada tahun 2023. Pada periode 2005-2023, kemiskinan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional menunjukkan tren yang semakin turun. Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan mencapai 3,46 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan level provinsi dan nasional yang rata-rata turun 2,79 persen dan 2,77 persen per tahun.

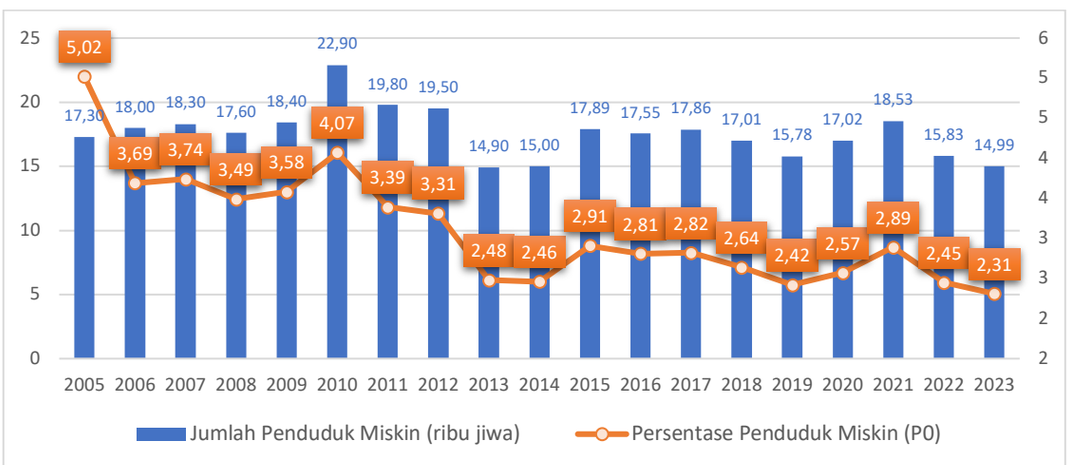
Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2005-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan level provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di tingkat provinsi mencapai 6,11 persen atau lebih tinggi 3,80 persen poin dibandingkan dengan Kota Balikpapan. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat kemiskinan di level nasional yang mencapai 9,36 persen atau lebih tinggi hingga 7,05 persen poin dibandingkan dengan Kota Balikpapan.

Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan Tahun 2005-2023

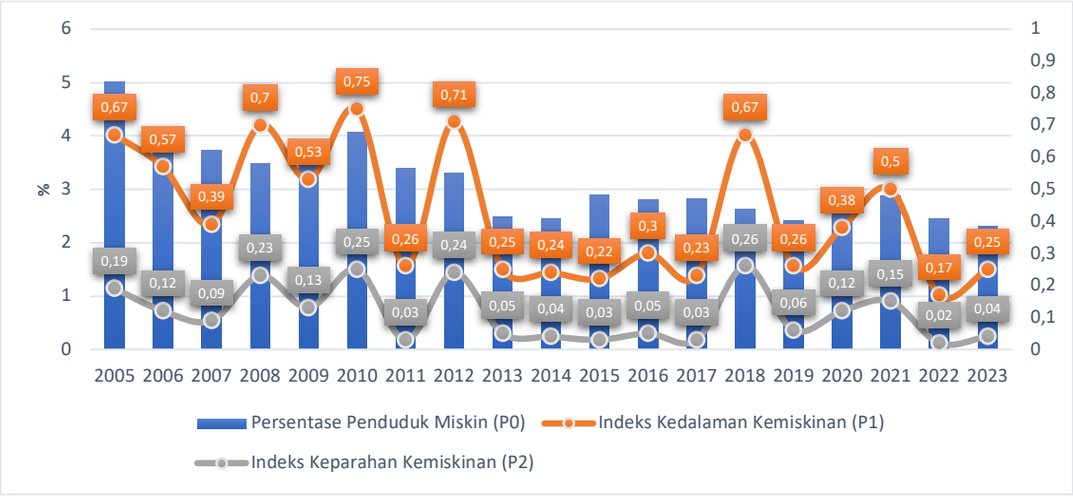


Sumber: BPS, 2024

Pada periode 2005-2023, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan berkisar pada 3,11 persen per tahun dengan tingkat kemiskinan terendah dicapai pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kota Balikpapan turun 5,71 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan hingga 9,20 persen. Turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2023 didorong oleh menguatnya perekonomian

Kota Balikpapan yang diikuti dengan perluasan lapangan kerja yang dapat dilihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka dari yang sebelumnya mencapai 6,90 persen menjadi 6,09 persen.

Gambar 2. 20 Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Balikpapan Tahun 2005-2023



Sumber: BPS, 2024

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) maupun indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin baik meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 menjadi nilai terendah selama periode 2005-2023, begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin kecil mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menjadi semakin kecil. Kondisi ini menandakan bahwa kesempatan untuk keluar dari kelompok miskin menjadi semakin besar. Indeks keparahan kemiskinan yang semakin kecil juga menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin menjadi semakin kecil. Secara umum, kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar dan ketimpangan antar penduduk miskin di Kota Balikpapan semakin mengecil selama periode 2005-2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

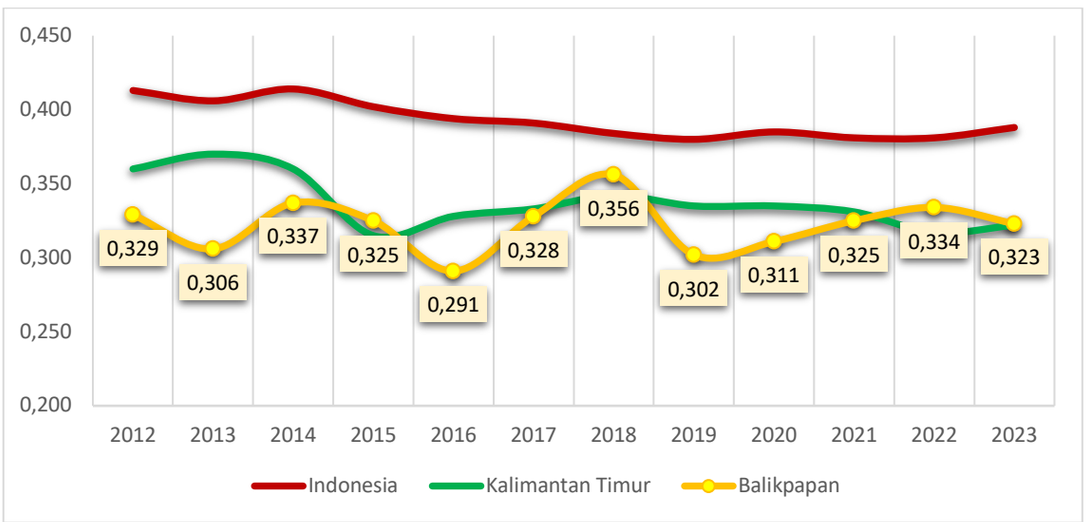
2.2.1.3 Rasio Gini

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak selalu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut umumnya dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh rasio gini. Rasio gini digunakan untuk melihat seberapa besar

kesenjangan pendapatan antara sekelompok orang dengan kelompok yang lain. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Rasio gini Kota Balikpapan secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Namun, rasio gini Kota Balikpapan menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi dengan kecenderungan tren yang meningkat. Kondisi ini berbeda dengan tren yang ditunjukkan oleh rasio gini di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023, rasio gini Kota Balikpapan mencapai 0,334 lebih tinggi 0,017 poin dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 21 Rasio Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber: BPS, 2024

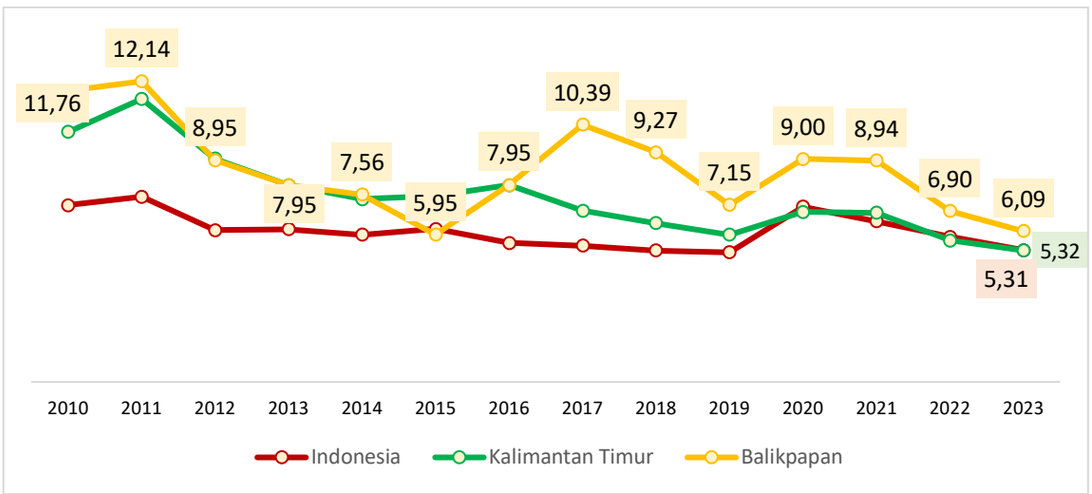
Rasio gini tertinggi Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2018 mencapai angka 0,356. Kinerja perekonomian saat itu memang mengalami kenaikan tetapi tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2019, rasio gini Kota Balikpapan mengalami penurunan hingga 15,17 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan yang terjadi di sejumlah sektor padat karya, seperti konstruksi, pertanian, maupun jasa, mendorong peningkatan pendapatan bagi sebagian masyarakat, khususnya bagi yang bekerja sebagai pekerja bebas. Namun, rasio gini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 seiring dengan pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian Kota Balikpapan. Pembatasan mobilitas orang menyebabkan penurunan

aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang berdampak pada penurunan omset dan pemutusan hubungan kerja.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. TPT Kota Balikpapan mencapai 6,09 persen atau lebih tinggi 0,77 persen poin dan 0,78 persen poin jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023. TPT Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional menunjukkan tren yang semakin turun meskipun cenderung berfluktuasi. Penurunan TPT di tingkat provinsi dan nasional rata-rata mencapai 4,43 persen dan 2,12 persen per tahun sedangkan di Kota Balikpapan sebesar 3,81 persen per tahun pada periode 2010-2023.

Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

TPT Kota Balikpapan pada tahun 2011 merupakan TPT tertinggi pada periode 2010-2023. Kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2011 mencapai 14,03 persen dibandingkan tahun 2010. Tingginya TPT pada tahun tersebut disebabkan oleh melemahnya perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang pada saat itu menyebabkan TPT melonjak ke angka 13,70 persen. Dampak pelemahan perekonomian pada tahun 2009 masih dirasakan hingga tahun 2011 di mana jumlah jumlah pengangguran masih tinggi.

Gambar 2. 23 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023
**Data Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja Tahun 2016 tidak tersedia*

Perekonomian Kota Balikpapan yang kembali menguat setelah tahun 2011 mendorong penurunan TPT hingga tahun 2015. Pada tahun 2011-2015 TPT mengalami penurunan sebesar 12,08 persen per tahun di mana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015. Turunnya TPT tidak hanya didorong oleh menurunnya jumlah pengangguran tetapi juga disertai dengan turunnya jumlah angkatan kerja sebesar 4,24 persen pada tahun 2015. Namun demikian, penurunan tersebut tidak dapat dipertahankan seiring dengan perekonomian daerah yang kembali melemah pada tahun 2017. Jumlah pengangguran kembali mengalami peningkatan mencapai 31 ribu orang mendorong TPT ke angka 10,39 persen pada tahun 2017. Penurunan TPT terus terjadi di Kota Balikpapan hingga menyentuh angka 6,90 persen pada tahun 2022. Meskipun angka ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, TPT di Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Tingginya TPT dapat disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya kondisi perekonomian daerah dan tingkat pendidikan para pencari kerja. Bagi daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor padat modal umumnya berisiko menciptakan pengangguran. Kondisi ini tercipta karena kebutuhan tenaga kerja pada industri padat modal cenderung kecil dan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Hal ini terkonfirmasi dari struktur perekonomian Kota Balikpapan yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sedangkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas didominasi oleh lulusan

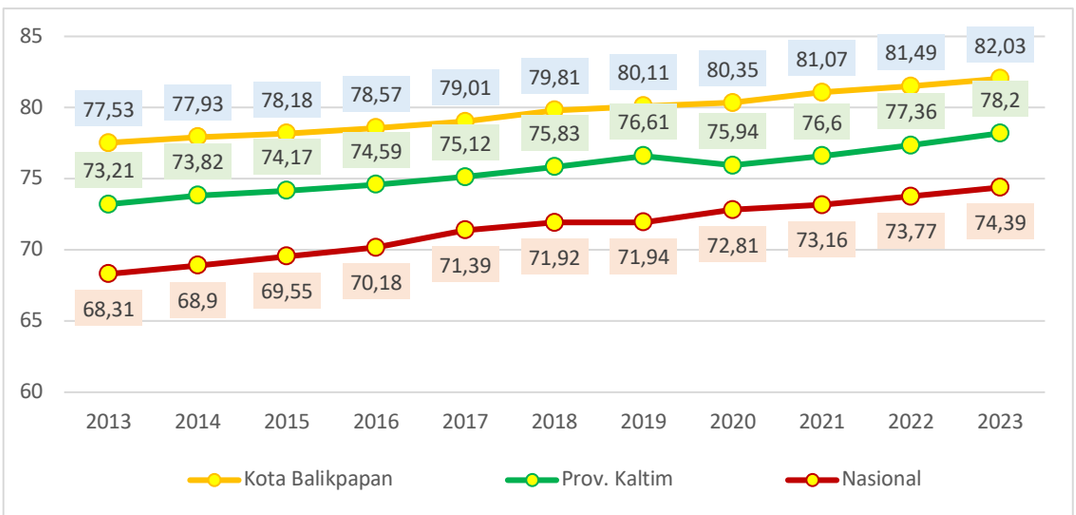
SMA/sederajat yang mencapai 48,86 persen (Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2022).

Tingginya angka pengangguran terbuka juga dapat disebabkan oleh rendahnya keinginan berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin dari proporsi penduduk bekerja yang didominasi oleh status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 61,74 persen. Padahal, jika masyarakat memiliki keinginan untuk berwirausaha, angka pengangguran dapat ditekan lebih rendah dan proporsi penduduk bekerja yang memilih untuk berusaha bisa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pekerja buruh/karyawan/pegawai.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam tiga dimensi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dalam perhitungannya IPM dibentuk berdasarkan hasil pengukuran yang mencakup tiga parameter dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, lama pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Berikut merupakan capaian IPM Kota Balikpapan selama periode 2013 hingga 2023.

Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2024

Capaian IPM Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2013 hingga 2023. Selama periode sepuluh tahun terakhir, capaian IPM Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebanyak 4,5 poin.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Balikpapan, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Selain itu, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, capaian IPM Kota Balikpapan selalu berada di atas rata-rata capaian IPM Provinisi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal tersebut menujukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan SDM di Kota Balikpapan sudah berada pada tahap yang baik.

Beberapa faktor yang turut memengaruhi tingginya capaian IPM Kota Balikpapan antara lain adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan seperti pemerataan bangunan pendidikan, standarisasi tenaga pendidik dan kependidikan serta sinergitas antara pemerintah Kota dengan Provinsi dalam membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai upaya untuk meningkatkan capaian RLS penduduk usia sekolah. Selain dalam hal pendidikan, upaya lain yang turut memengaruhi tingginya capaian IPM Kota Balikpapan adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan mulai dari layanan kesehatan primer, rujukan pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan pelayanan. Selain itu, penurunan angka pengangguran melalui perluasan tenaga kerja dan optimalisasi pelatihan berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan dan pengeluaran masyarakat di Kota Balikpapan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

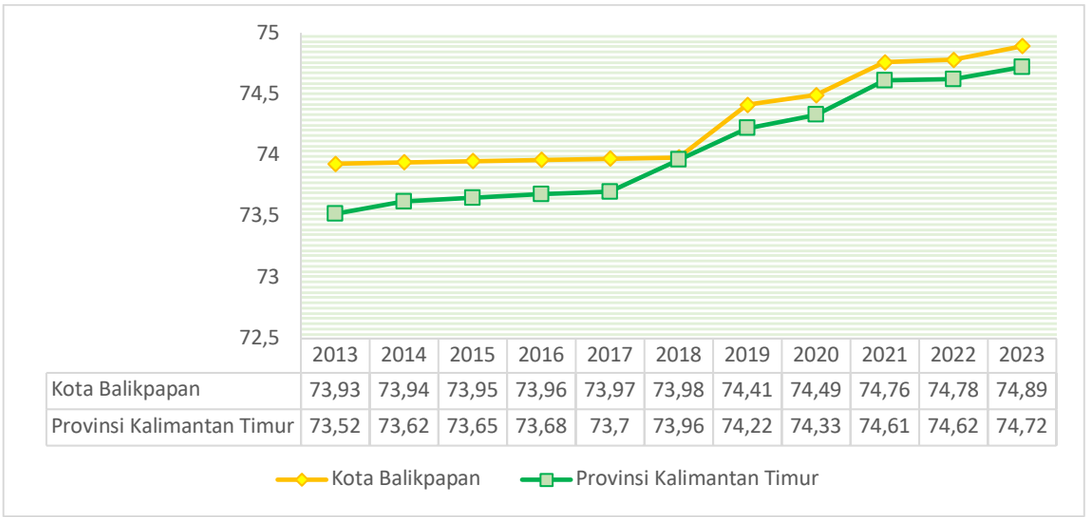
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan budaya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian pembangunan kesehatan, ketahahan keluarga, kesetaraan gender, dan aspek kebudayaan. Berikut beberapa capaian pembangunan sosial budaya di Kota Balikpapan.

2.2.2.1Kualitas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Secara umum, pembangunan kesehatan Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa capaian indikator makro seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Prevalensi

Stunting. AHH merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan di suatu wilayah. AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang hidup sehat dan bisa lebih produktif. Berikut capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan selama periode 2013-2023.

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2023



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Balikpapan	73,93	73,94	73,95	73,96	73,97	73,98	74,41	74,49	74,76	74,78	74,89
Provinsi Kalimantan Timur	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	73,96	74,22	74,33	74,61	74,62	74,72

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selama satu dekade (2013-2023), capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan menunjukan trend yang meningkat. Capaian tersebut bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan sebesar 74,89 yang berarti bahwa penduduk Kota Balikpapan yang lahir tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 74,89 tahun. Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan menunjukan keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Balikapan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

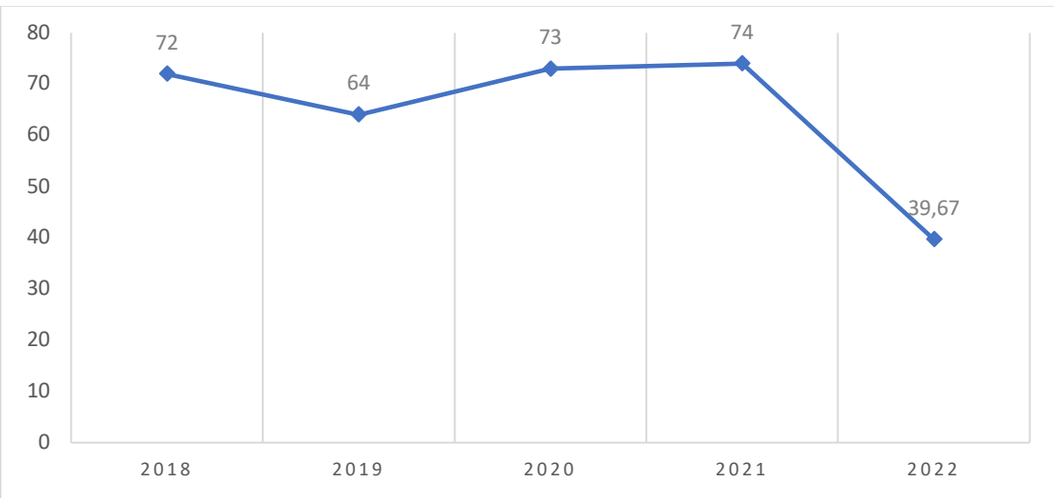
Keberhasilan tersebut ditopang oleh perbaikan dari segala aspek di antaranya penguatan sistem kesehatan melalui pemberian subsidi iuran BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta kelas III (Peserta Bukan Penerima Upah/PBPU), pembangunan dan pegembangan RSIA Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan, (LPPD Kota Balikpapan Tahun 2022). Selain itu, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga, promosi kesehatan umum, gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan

masyarakat dan seluruh lintas sektor, serta *screening* dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan cukup tinggi, tetapi jika dilihat dari tren angka selama sepuluh tahun terakhir cenderung melambat. Selama 11 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan naik 0,96 poin, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur naik 1,2 poin. Untuk itu, upaya pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan ke depan perlu lebih ditingkatkan baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai kebijakan pendukung lainnya. Aspek kesehatan merupakan aspek dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan lebih produktif.

Salah satu upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu dengan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi, sehingga dapat menekan angka kematian pada bayi dan ibu hamil. Di sisi lain, peningkatan kualitas ibu dan bayi merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu indikator yang menunjukan kualitas kesehatan ibu dan bayi yakni Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berikut capaian kinerja AKI dan AKB di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 26 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2022



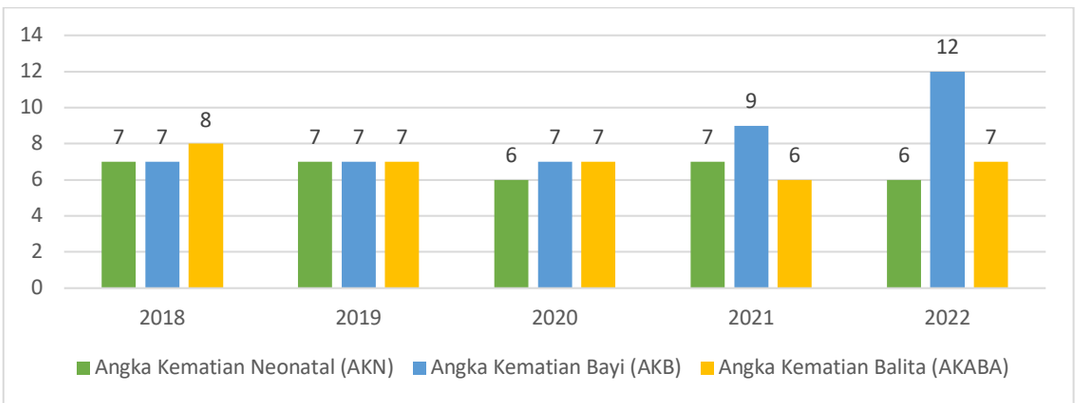
Sumber: Profil Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Selama periode 2018-2022, AKI

Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan menurun cukup signifikan pada tahun 2022 yakni 39,67. Capaian tersebut sudah dibawah target SDGs 2030 sebesar 70/100.000 KH. Meskipun demikian, angka kematian ibu tetap perlu ditekan hingga terdapat 0 (tidak ada) kasus. Adapun 3 penyebab terbesar kematian ibu di Kota Balikpapan yakni pendarahan, hipertensi dan sepsis, (LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2020).

Pada periode pembangunan ke depan, pencegahan kematian ibu perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan pelayanan ANC (Antenatal Care), meningkatkan kualitas layanan persalinan, pelayanan PNS (Postnatal Care), serta akses perawatan gawat darurat yang tepat pada ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan menghindari kehamilan berisiko yaitu 4T (terlalu dini, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat jarak kehamilannya). Untuk itu, program terkait kesehatan ibu dan keluarga berencana menjadi bagian penting untuk memastikan "*safe motherhood*" dan mewujudkan kehidupan baru yang sehat.

Gambar 2. 27 Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022



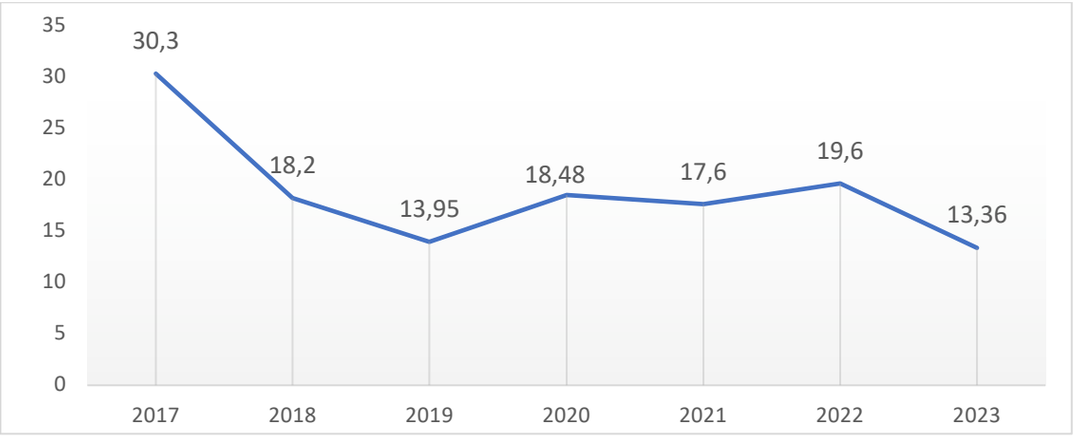
Sumber: LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020

Pada tahun 2018-2022, angka kematian neonatal, bayi dan balita di Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan cenderung rendah. Namun demikian, upaya tersebut tetap perlu ditekan hingga 0 (tidak ada) kasus. Penurunan AKN, AKB, dan AKAB dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada pelayanan kesehatan neonatal (KN) minimal dilakukan 3 kali kunjungan yaitu KN1 pada bayi usia 6-48 jam, KN2 pada umur 3-7 hari, dan KN 3 pada 8-28 hari. Rata-rata cakupan pelayanan KN lengkap di Kota Balikpapan cukup tinggi yakni 99,7%.

Sedangkan pelayanan kesehatan bayi dilakukan pada anak usia 0-11 bulan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan,

pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A dan imunisasi dasar lengkap. Rata-rata pelayanan kesehatan bayi di Kota Balikpapan sebesar 98,02%. Pelayanan kesehatan balita dilakukan pada anak berusia 0-59 bulan melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan buku KIA. Adapun rata-rata pelayanan kesehatan balita di Kota Balikpapan sebesar 86,19%. Dengan demikian, upaya pelayanan kesehatan pada balita perlu mendapat perhatian lebih disamping tetap meningkatkan pelayanan kesehatan pada neonatal dan bayi.

Gambar 2. 28 Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2017-2022



Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indoenesia (2019-2022) dan BPS Kota Balikpapan, 2024

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 persen pada tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak di masa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.

Selama tujuh tahun (2017-2023), prevalensi stunting Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2017 sebesar 30,3 persen, kemudian berhasil diturunkan menjadi 13,36 persen pada tahun 2023. Selama tujuh tahun (2017-2023), pemerintah Kota Balikpapan berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 16,94 persen. Tingginya capaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan daerah dalam penanggulangan stunting secara holistik.

Pada tahun 2019, pemerintah Kota Balikpapan membentuk tim pencegahan, penjaringan dan penanganan stunting berdasarkan Perwali Nomor 29 tahun 2019. Tim tersebut beranggotakan berbagai stakeholder di

antaranya perangkat daerah, swasta, organisasi profesi, rumah sakit, organisasi masyarakat, kader pembangunan manusia, dan sebagainya. Adapun fokus programnya yaitu penguatan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), peningkatan akses air bersih dan sanitasi, praktek pengasuhan yang baik, dan penerapan gizi seimbang dalam rumah tangga.

Selain peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat Kota Balikpapan juga didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang cukup. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan layanan kesehatan sebagai dampak dari pemindahan ibukota negara (IKN). Berikut daftar fasilitas kesehatan Kota Balikpapan tahun 2023.

Tabel 2. 9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	15
2	Puskesmas	27
3	Apotek	118
4	Klinik	113
5	Laboratorium	2
6	Toko Obat	22
7	Faskes Lainnya	6
8	Toko Optik	17
9	Alat Kesehatan (Alkes)	20
10	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	65
11	Ambulance	7
12	Pelayanan Kesehatan Tradisional	4

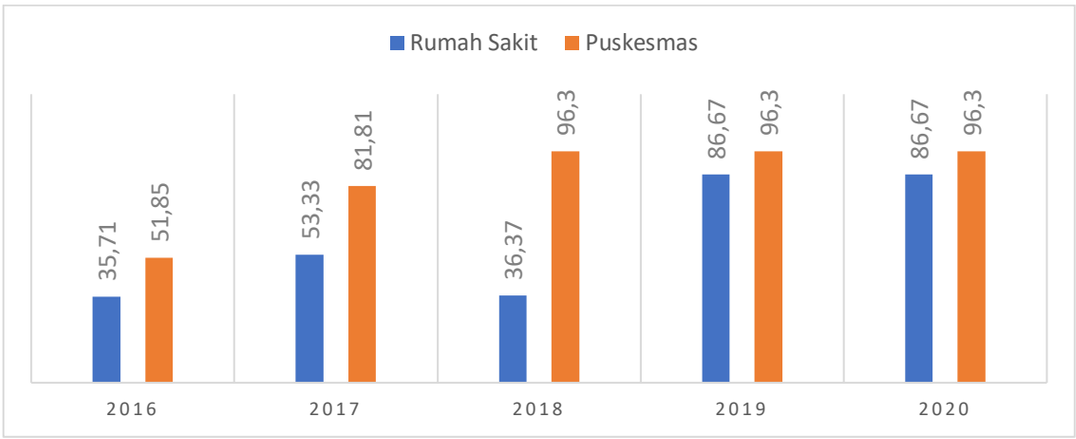
Sumber: siyankes.balikpapan.go.id, 2023

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan cukup memadai mulai dari tingkat dasar hingga rujukan. Kota Balikpapan memiliki 15 Rumah Sakit yang terdiri dari RSUD dan Rumah Sakit Swasta. Sedangkan puskesmas sebanyak 27 yang tersebar diseluruh kecamatan. Namun demikian, masih ada beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan khususnya pelayanan kesehatan rujukan, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026). Selain rumah sakit dan puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat klinik, laboratorium, toko obat, toko optik, faskes lainnya, alkes, SLHS, ambulance, dan pelayanan kesehatan tradisional.

Meskipun secara jumlah cukup memadai, tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase akreditasi rumah sakit dan puskesmas yang belum mencapai 100%.

Akredetasi bertujuan untuk mengukur fasilitas kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Berikut capaian akredetasi rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 29 Persentase Akredetasi Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026

Selama periode 2016-2020, persentase akredetasi pada rumah sakit cukup fluktuatif dengan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 36,37 persen, kemudian naik menjadi 86,67 persen pada tahun 2020. Sedangkan tren puskesmas yang terakredetasi cenderung meningkat yakni 51,85 persen pada tahun 2016, naik menjadi 96,3 persen pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakredetasi menunjukan peningkatan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.

Tabel 2. 10 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

No	Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter	183	209	1158	792	845
2	Dokter Gigi	70	-	-	114	110
3	Bidan	-	449	597	556	515
4	Perawat	-	1383	1975	1481	2015

Sumber: Balikpapan Dalam Angka Tahun 2019-2023

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kota Balikpapan selama periode 2018-2022 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang layanan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2020, persentase ketersediaan SDM kesehatan di Rumah Sakit Kota Balikpapan sebesar 97,32 persen, sedangkan di tingkat Puskesmas baru 82,72 persen, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026).

Adapun kendala dalam pemenuhan SDM terutama di Puskesmas yakni adanya regulasi Permenkes No 43 Tahun 2019 yang mensyaratkan Puskesmas Kawasan perkotaan non-rawat inap memiliki minimal 4 bidan, 5 perawat, apoteker, dan tenaga promosi kesehatan. Sedangkan 15 puskesmas di Kota Balikpapan belum memiliki apoteker dan beberapa puskesmas hanya memiliki 2 bidan. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas mengakibatkan ada petugas yang rangkap jabatan, sehingga kinerja belum optimal.

Selain itu, ketersediaan jumlah dokter spesialis di Kota Balikpapan juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil studi evaluasi capaian pemerataan layanan kesehatan yang berkeadilan di era JKN di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 disebutkan bahwa ketersediaan layanan katerisasi jantung (Cath Lab) di Provinsi Kalimantan Timur cukup terbatas. Layanan Cath Lab hanya ada di RSUD Abdul Wahid Sjahranie Kota Samarinda dan 2 rumah sakit di Kota Balikpapan yaitu RS Pertamina dan RS Siloam. Terbatasnya layanan Cath Lab kemudian menginisiasi pemerintah untuk menambah pelayanan jantung terpadu di RS Kanujoso Balikpapan. Pada tahun 2023, Gubernur Kalimantan Timur memimpin *ground breaking* pembangunan Gedung pelayanan jantung terpadu di RS Kanujoso Balikpapan. Adanya fasilitas baru tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan jantung, sehingga tidak perlu lagi harus ke Jakarta.

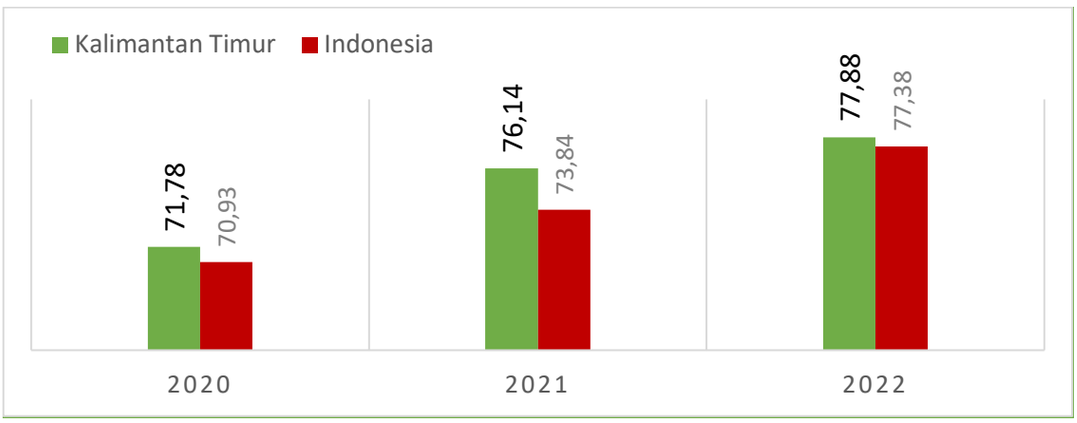
2.2.2.2 Ketahanan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga penting untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Dalam perkembangannya, peran keluarga mulai bergeser akibat perubahan sosial yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa masalah di antaranya seperti kenakalan remaja, pernikahan usia dini, kehamilan tidak dikehendaki, dan sebagainya. Ketidakberfungsian keluarga sebagai pengawas, pelindung, dan penanam nilai dan karakter dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis secara lebih luas.

Untuk itu, pemerintah mulai mengukur kualitas keluarga melalui Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) sudah dilakukan tiga kali oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2016, 2019, dan 2020-2021 dengan jumlah dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan tersebut baru pada level provinsi belum pada level kabupaten/kota.

Untuk Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tahun 2021 diukur melalui 5 dimensi dan 25 indikator. Lima dimensi tersebut di antaranya dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Hasil dari data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tahun 2021 dapat menjadi rujukan untuk mengukur kebutuhan suatu daerah akan intervensi pembangunan keluarga yang berkualitas.

Gambar 2. 30 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indoensia Tahun 2020-2022



Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2023, Kemen PPPA, 2024

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) baru dihitung pada level provinsi, sehingga data capaian IKK menurut kabupaten/kota belum tersedia dan bisa memakai proxy data provinsi. Berdasarkan data IKK tahun 2020-2022, IKK Provinsi Kalimantan Timur cenderung naik, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2020, IKK Provinsi Kalimantan Timur 74,69 dan masuk dalam kategori 2 (range 50-75) yaitu cukup responsif gender dan pemenuhan hak anak. Capaian IKK tersebut berhasil ditingkatkan menjadi kategori 3 (di atas 75) pada tahun 2021 dan 2022. Capaian tersebut menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan telah responsif terhadap gender dan hak anak. Namun demikian, arus pembangunan dan tingkat migrasi yang cukup tinggi di Kota Balikpapan sebagai dampak dari IKN, pembangunan kualitas keluarga

harus terus ditingkatkan. Salah satunya bisa fokus pada pemenuhan dimensi-dimensi yang ada dalam Indeks Kualitas Keluarga (IKK) secara terpadu, terintegratif dan holistik.

Tabel 2. 11 Komponen Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Dimensi	Nilai	Indikator	Nilai
1	Dimensi kualitas legalitas-struktur	88,96	1. Persentase perempuan berstatus kawin yang memiliki buku/akta Nikah	94,92
			2. Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	93,44
			3. Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa Anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	90,55
2	Dimensi kualitas ketahanan fisik	81,56	4. Persentase rumah tangga yang dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya sumber daya	93,21
			5. Persentase rumah tangga yang ada anggota memiliki keluhan kesehatan	43
			6. Prevalence of Undernourishment (PoU) semua umur	16,19
			7. Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	98,75
			8. Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	0,24
			9. Persentase rumah tangga yang ada ART sakit	21,58
3	Dimensi kualitas ketahanan ekonomi	74,89	10. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	77,22
			11. Persentase rumah tangga tidak miskin	95,44
			12. Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	71,6
			13. Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	85,63
			14. Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,14
			15. Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	33,75
4	Dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi	68,37	16. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	33,96
			17. Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	2,49

No	Dimensi	Nilai	Indikator	Nilai
			18. Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	19,67
			19. Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	98,01
5	Dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya	60,38	20. Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	7,81
			21. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap	86,78
			22. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	80,44
			23. Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	23,16
			24. Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	44,78
			25. Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet	22,62

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2022, KemenPPPA

Dari lima dimensi pembentuk indeks kualitas keluarga (IKK), dimensi kualitas legalitas-struktur memiliki capaian tertinggi 88,96 dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya memiliki capaian terendah 60,38. Tingginya dimensi legalitas-struktur mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kalimantan Timur memiliki posisi secara hukum cukup kuat yakni dengan kepemilikan akta lahir dan akta nikah. Selain itu, banyak anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan. Sedangkan dimensi sosial budaya belum optimal menunjukan bahwa interaksi di dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar masih cenderung rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya partisipasi keluarga yang mengikuti kegiatan keagamaan, masih adanya perkawinan anak, serta rendahnya aktivitas bersama dalam mengakses internet.

Dimensi lain seperti dimensi ketahanan fisik memiliki rata-rata capaian cukup baik yakni 81,56. Dari enam indikator yang diukur pada dimensi ketahanan fisik, ada tiga indikator yang masih mendapat catatan yakni masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan makanan sehat dan bergizi, masih adanya keluhan kesehatan, dan anggota keluarga yang sakit. Sedangkan indikator lainnya cukup positif seperti tingginya kepemilikan ruang tidur terpisah dan rendahnya anak yang merokok. Dimensi ketahanan ekonomi memiliki capaian 74,89. Dari enam indikator yang ada pada dimensi ketahanan ekonomi, hanya satu indikator yang

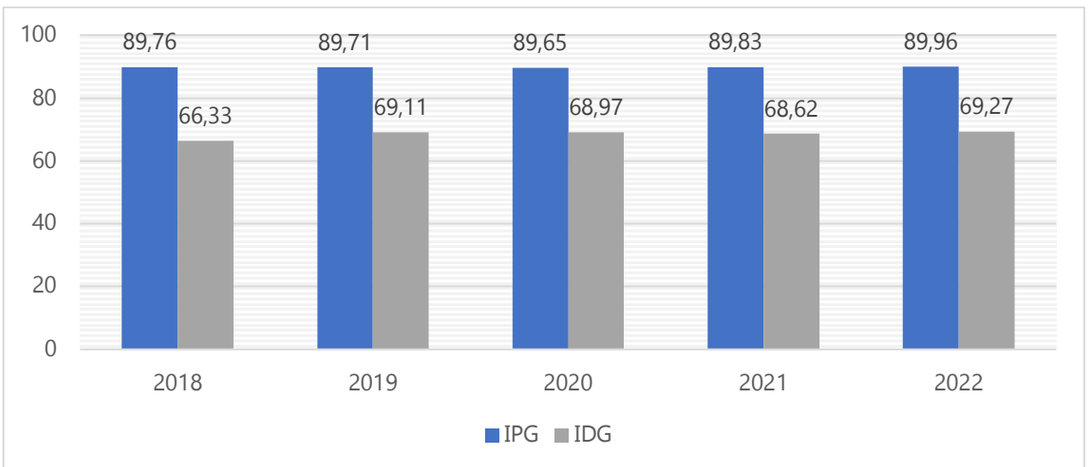
memiliki capaian cukup rendah yakni persentase perempuan berstatus kawin yang bekerja sebesar 33,75. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat keberdayaan perempuan belum optimal. Sedangkan indikator lainnya memiliki capaian cukup baik seperti tingginya rumah tangga yang memiliki rumah, rendahnya rumah tangga miskin, tingginya rumah tangga yang memiliki tabungan dan asuransi kesehatan, serta rendahnya anak putus sekolah.

Dimensi terakhir yakni ketahanan sosial psikologi memiliki capaian yang belum optimal yakni 68,37. Dari empat indikator yang dihitung pada dimensi ketahanan sosial psikologi, hanya ada satu indikator yang memiliki capaian cukup baik yakni persentase keluarga yang melakukan kegiatan bersama. Sedangkan tiga indikator lainnya masih perlu ditingkatkan seperti masih adanya anak yang mengalami hukuman fisik/psikologis, masih adanya anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan, serta masih rendahnya tingkat berpergian bersama anggota keluarga. Secara keseluruhan, masih cukup banyak aspek yang perlu diitngkatkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga mampu mendukung dalam pembangunan daerah secara lebih luas.

2.2.2.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan dalam memberdayakan perempuan dan laki-laki agar memiliki kemampuan setara dalam proses pembangunan. Kesetaraan gender bisa dilihat dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut capaian IPG dan IDG Kota Balikpapan.

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2018-202



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

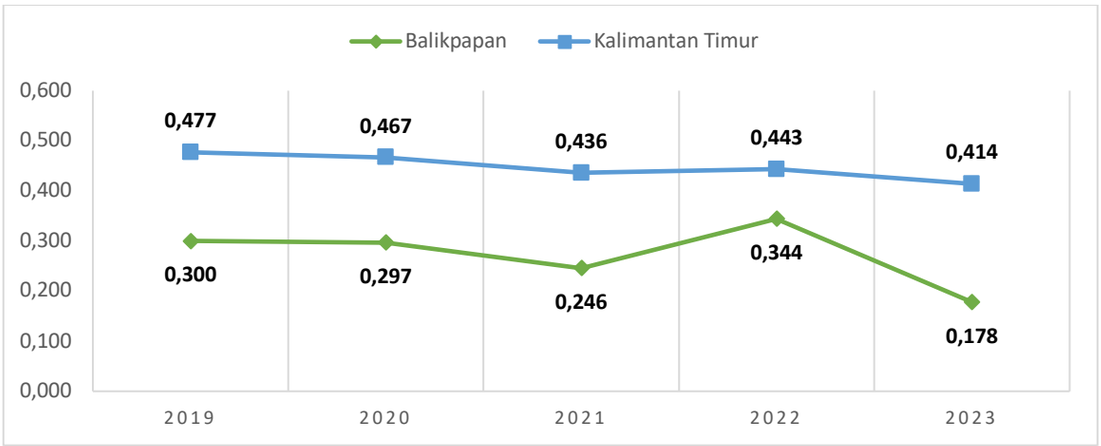
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2018-2022, rata-rata capaian IPG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, IPG Kota Balikpapan 89,96, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 86,61. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian tersebut masih dibawah rata-rata nasional 91,63 (2022). Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak pada perempuan tetap perlu ditingkatkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diintepretasikan dengan persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga professional dan presentase kontribusi pendapatan perempuan. Selama periode 2018-2022, rata-rata IDG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, IDG Kota Balikpapan 69,27 dan Provinsi Kalimantan Timur 66,89. Hal tersebut mengindikasikan upaya pemberdayaan perempuan di Kota Balikpapan lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dilihat dari capaian angka pada kisaran 60 dari 100 menunjukan bahwa pemberdayaan pada perempuan masih perlu dioptimalkan.

Selain IPG dan IDG, kondisi kesetaraan gender juga dilihat dari indeks ketimpangan gender (IKG). IKG merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun keatas lulus SMA keatas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai

IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 32 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

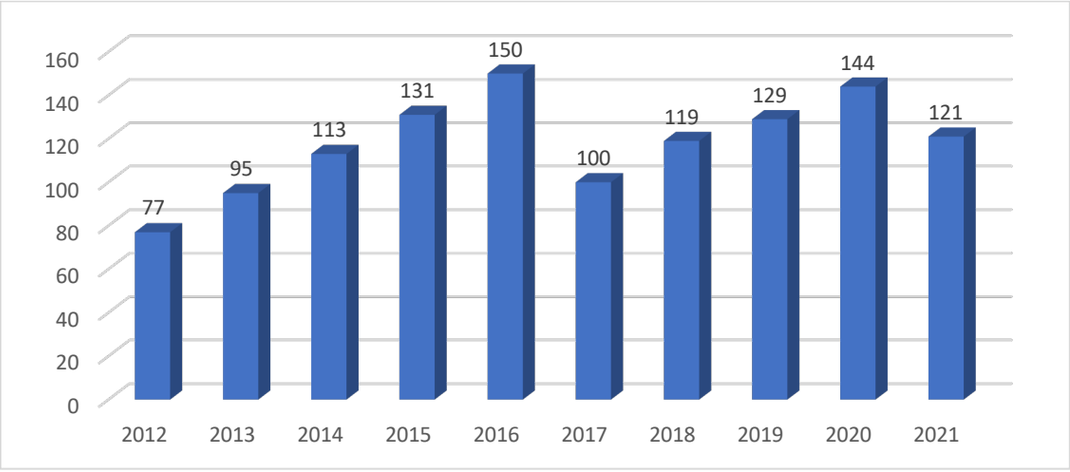
Selama periode 2019-2023, indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan memiliki tren cukup fluktuatif dan selalu berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kota Balikpapan lebih rendah dibanding dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, tingkat kesetaraan gender di Kota Balikpapan masih lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Capaian IKG Kota Balikpapan paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 0,344. Capaian tersebut kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 0,178. Hal tersebut menunjukan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi yaitu dilihat dari semakin banyaknya perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan, serta perempuan yang melahirkan dibawah usia 20 tahun semakin kecil. Selain itu partisipasi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, menjadi anggota legislatif, serta partisipasi dalam dunia kerja semakin setara.

2.2.2.4 Kebudayaan

Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari aspek kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial berbasis kebudyaan dapat dilihat melalui pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Cagar Budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di wilayah terkait. Data terkait jumlah cagar budaya di Kota Balikpapan selama periode 2012 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 33 Jumlah Cagar Budaya di Kota Balikpapan Tahun 2012-2021



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan 2021-2026

Jumlah cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan cenderung berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang mengarah pada peningkatan jumlah cagar budaya menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian kebudayaan di Kota Balikpapan. Sebaliknya, penurunan jumlah cagar budaya yang terjadi pada tahun 2017 dan 2021 diakibatkan oleh adanya keterbatasan pengelolaan akibat lokasi dari cagar budaya terkait, seperti lokasi cagar budaya yang masuk dalam kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina sehingga sulit melakukan elaborasi. Meskipun demikian, secara umum pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan jumlah cagar budaya sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan.

2.3 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, maupun SDM. Daya saing suatu daerah akan menentukan bagaimana kinerja daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam bagian ini akan disampaikan mengenai kondisi ekonomi daerah, iklim investasi daerah, kondisi infrastruktur,

maupun kondisi sumber daya manusia yang akan menggambarkan kemampuan daya saing Kota Balikpapan secara umum.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

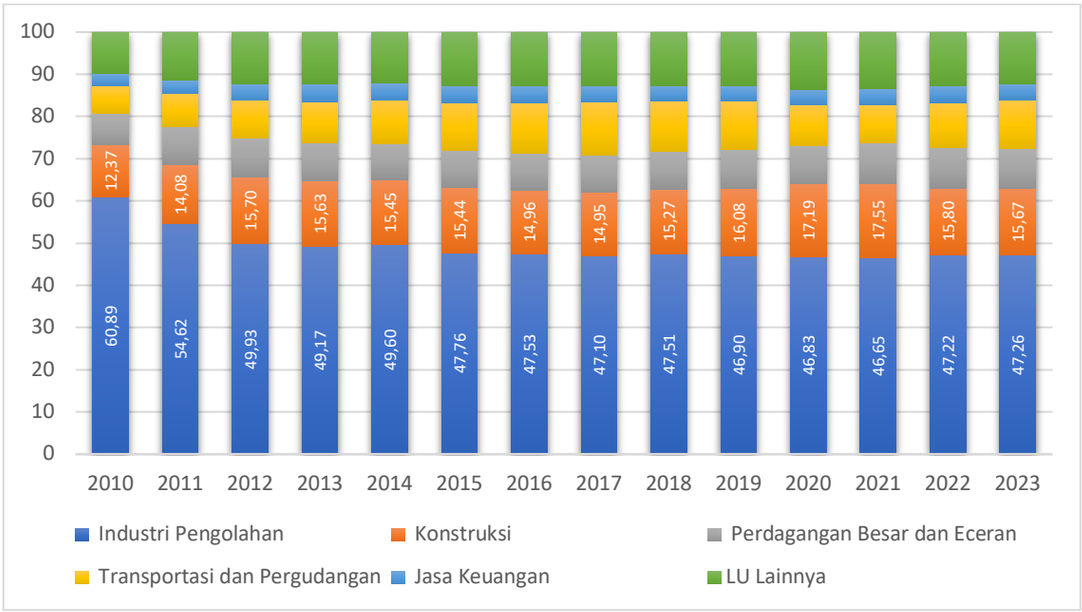
Kondisi daya saing perekonomian daerah menjadi salah satu yang perlu dilihat dalam proses perencanaan jangka panjang. Daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat kemandirian keuangan daerah, inflasi, pengeluaran per kapita, dan struktur ekonomi daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memetakan daya saing suatu daerah dalam aspek perekonomian.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sering digunakan untuk menunjukkan seberapa besar produktivitas perekonomian suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan dua harga dasar yaitu atas dasar harga konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK atau PDRB riil digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sedangkan PDRB ADHB atau PDRB nominal digunakan untuk melihat struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian daerah akan menentukan sejauh mana ketahanan perekonomian daerah serta potensi pengembangan daerah. Daerah yang terlalu bergantung pada salah satu sektor ekonomi umumnya kurang resilien terhadap guncangan.

Secara umum, PDRB Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik. PDRB Kota Balikpapan mencapai 97,06 triliun rupiah berdasar harga konstan sedangkan berdasar harga berlaku mencapai 103,92 triliun rupiah pada tahun 2023. Perekonomian Kota Balikpapan hingga tahun 2023 didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 49,21 persen per tahun pada periode 2010-2023.

Gambar 2. 34 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha Terpilih Tahun 2010-2023 (%)



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang menurun dari yang mulanya mencapai 60,89 persen pada tahun 2010 menjadi 47,26 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan kontribusi sektor usaha lainnya yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Selain industri pengolahan, perekonomian Kota Balikpapan juga digerakkan oleh sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 15,44 persen. Meningkatnya kontribusi sektor konstruksi didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan, khususnya sejak pembangunan RDMP RU V Balikpapan dan IKN.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga menunjukkan peranan yang semakin besar. Sektor perdangan besar dan eceran berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan sebesar 9,40 persen pada tahun 2023. Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan hingga 10,24 persen per tahun.

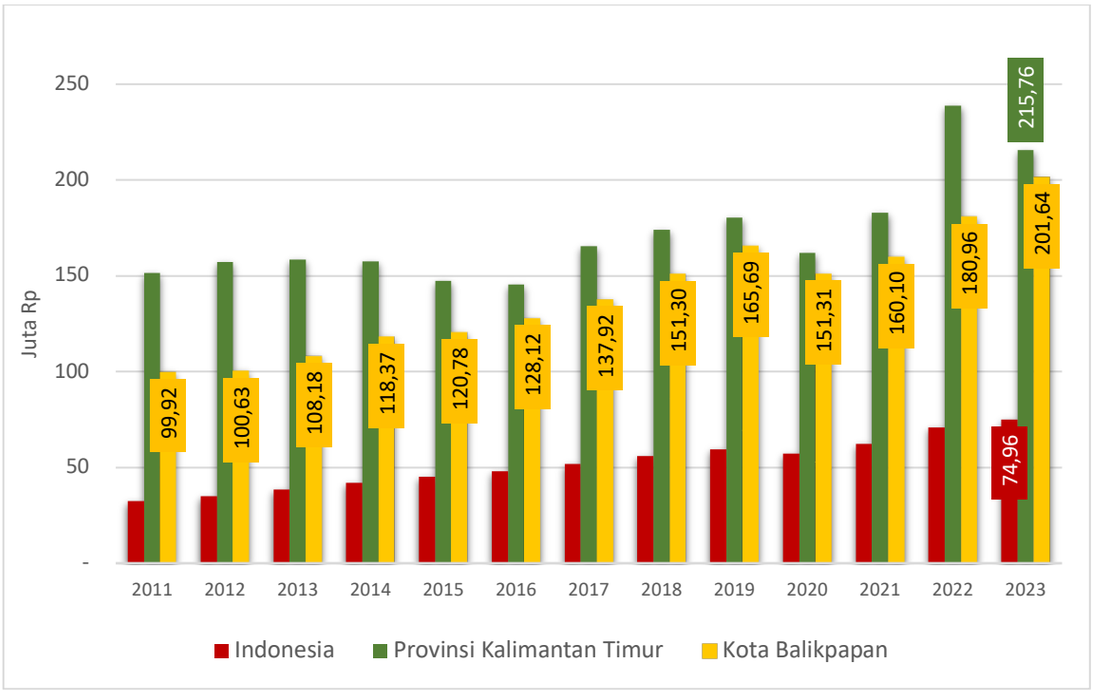
Sektor tersier atau sektor jasa semakin menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, kontribusi sektor tersier mencapai 35,98 persen dari yang sebelumnya hanya sebesar 25,53 persen pada tahun 2010. Kontribusi sektor tersier yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai

bergeser pada aktivitas ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan penduduk karena dinilai dapat mencerminkan pendapatan setiap penduduk. Perhitungan PDRB per kapita adalah total PDRB di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut sehingga tinggi rendahnya PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya nilai PDRB tetapi juga jumlah penduduk.

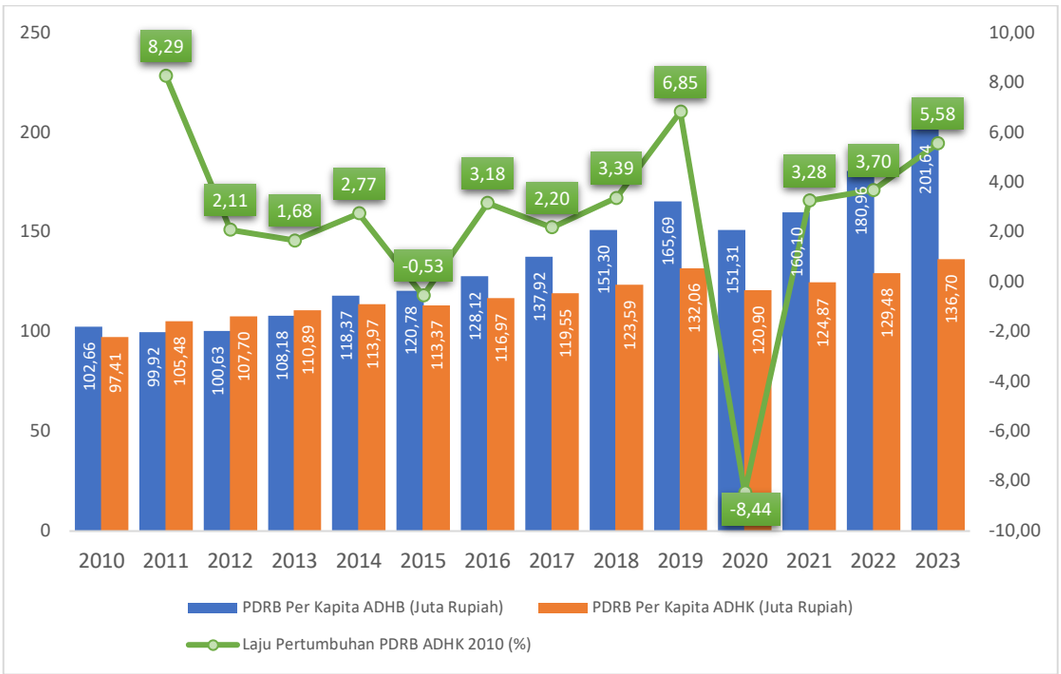
Gambar 2. 35 PDRB per Kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan PDB per Kapita Indonesia Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, 2024

PDRB per kapita Kota Balikpapan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat nasional akan tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. PDRB per kapita Kota Balikpapan 169 persen lebih tinggi dibandingkan dengan PDB per kapita nasional di mana PDRB per kapita Kota Balikpapan mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. PDB per kapita di level nasional, serta PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur, maupun Kota Balikpapan secara nominal terus mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 saat itu menurunkan tingkat produktivitas masyarakat sehingga kinerja perekonomian mengalami penurunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 2. 36 PDRB per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah)



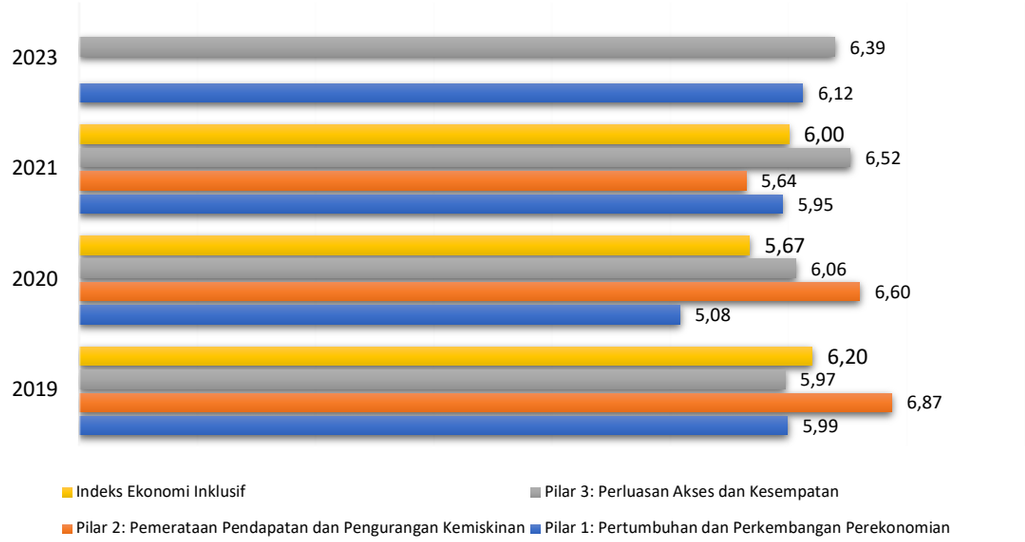
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

PDRB per kapita Kota Balikpapan tumbuh sebesar 2,62 persen per tahun pada tahun 2010-2023. Nilai PDRB per kapita secara riil mencapai 136,70 juta rupiah sedangkan secara nominal mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan PDRB per kapita cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen dan penurunan jumlah penduduk sebesar 3,41 persen. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 0,93 persen dengan jumlah penduduk yang naik sebesar 5,06 persen. Kenaikan jumlah penduduk tersebut diperkirakan karena penyesuaian hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020. Perekonomian yang tumbuh hingga 6,49 persen mendorong pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 5,58 persen pada tahun 2023.

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Bappenas). Indeks ekonomi inklusif terdiri dari 3 pilar yaitu: Pilar 1: Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan Pilar 3: Perluasan akses dan kesempatan. Berikut ini adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Balikpapan.

Gambar 2. 37 Indeks Ekonomi Inklusif Kota Balikpapan Tahun 2019-2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

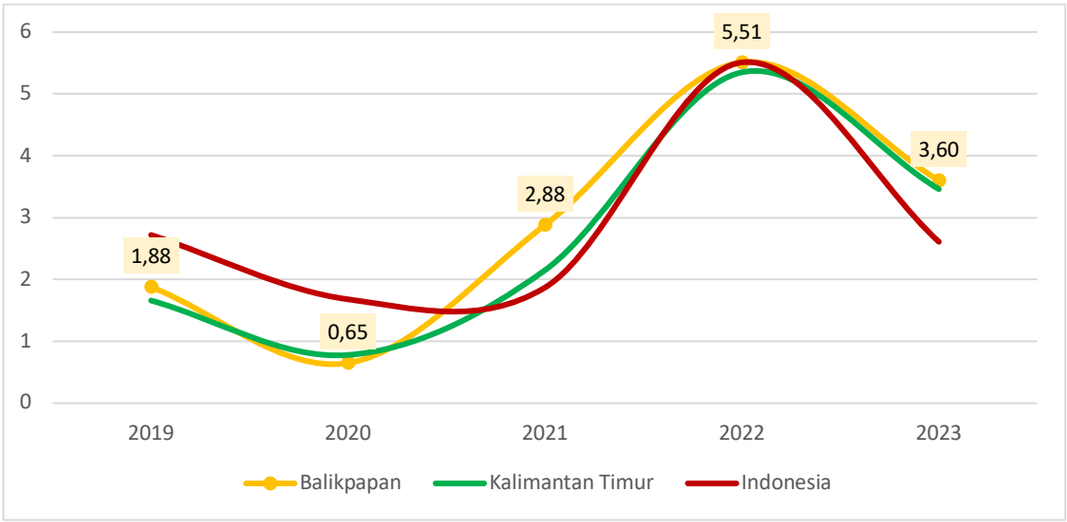
Pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin inklusif. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sempat melemahkan perekonomian daerah dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut menyebabkan turunnya nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya menyentuh angka 6,20 pada tahun 2019. Meskipun sempat mengalami penurunan, pembangunan ekonomi inklusif kembali menguat pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,33 poin.

Nilai indeks ekonomi inklusif Kota Balikpapan tahun 2023 tidak dapat dihitung karena hasil perhitungan pada pilar kedua tidak tersedia. namun demikian, apabila dilihat dari pilar pertama dan ketiga, pembangunan ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang semakin terakselerasi serta perluasan lapangan kerja menjadi pendorong dari naiknya nilai pada kedua pilar tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019.

2.3.1.4 Inflasi

Kestabilan harga barang menjadi salah satu faktor yang turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pada dasarnya memang sesuatu yang umum terjadi, tetapi kenaikan yang terlampau tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli yang berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dijadikan sebagai lokasi survey biaya hidup di Indonesia. Berikut ini adalah data inflasi tahunan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.

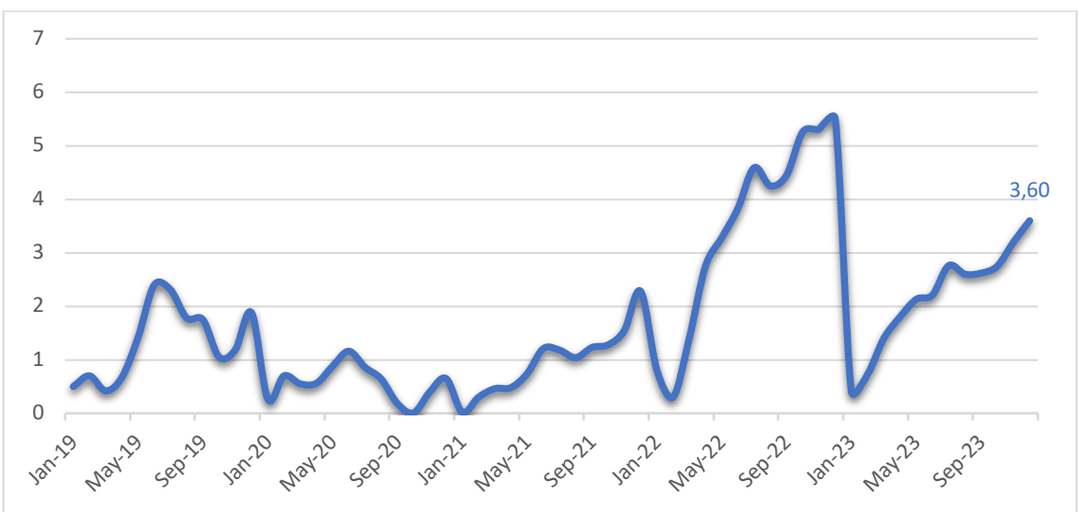
Gambar 2. 38 Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

Harga komoditas di Kota Balikpapan terus mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari terjadinya inflasi pada tahun 2018-2023. Inflasi yang terjadi relatif terjaga sejalan dengan pergerakan inflasi di tingkat nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi aktual di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun nasional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan target. Target inflasi pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar ±3,5 persen dengan inflasi aktual sebesar 3,13 persen dan 1,88 persen. Untuk target inflasi tahun 2020 hingga 2023 adalah sebesar ±3 persen dengan inflasi aktual di bawah target pada tahun 2020 dan 2021 sedangkan tahun 2022 lebih tinggi 2,51 persen poin dari target, dan tahun 2023 kembali ke dalam rentang target.

Gambar 2. 39 Inflasi Kumulatif Kota Balikpapan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 di mana daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat melemahnya perekonomian saat

pandemi Covid-19. Penurunan daya beli menyebabkan turunnya permintaan di pasar komoditas sehingga kenaikan harga komoditas cenderung lebih kecil, bahkan ada yang terdeflasi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Inflasi kembali naik pada tahun 2021 seiring dengan pulihnya perekonomian Kota Balikpapan. Namun, kenaikan tersebut terus terjadi hingga tahun 2022. Inflasi tahun 2022 Kota Balikpapan naik hingga 3,23 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan harga yang cukup tinggi mulai terjadi pada bulan April tahun 2022 seiring dengan kenaikan permintaan saat perayaan hari raya Idul Fitri. Namun, kenaikan harga tidak kembali melambat dan cenderung semakin tinggi mencapai 5,51 persen pada bulan Desember 2022.

Upaya tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga inflasi kembali ke rentang target menunjukkan hasil pada tahun 2023. Inflasi yang ditargetkan pada rentang 2-4 persen terealisasi ke angka 3,60 persen. Pada tahun 2022 dan 2023, komoditas bahan bakar rumah tangga dan rokok kretek filter menjadi komoditas yang masuk ke dalam 10 komoditas teratas yang memiliki andil terhadap inflasi.

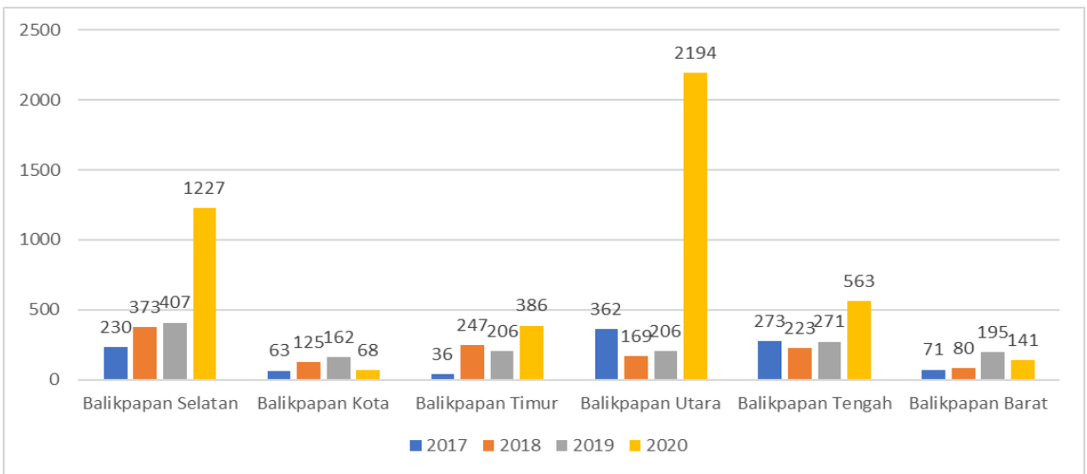
2.3.1.5 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kota Balikpapan ditopang oleh subsektor unggulan yaitu aplikasi dan pengembangan gim. Subsektor tersebut akan menunjang industri kreatif dan *smart city.* Hal ini dikarenakan aplikasi dan pengembangan gim akan menjadi pintu masuk segala kebutuhan tata kelola masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019), omzet dari subsektor ekonomi kreatif aplikasi dan pengembangan gim diperkirakan mencapai Rp48 miliar per tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 20 lebih perusahaan dengan omzet hingga Rp 200 juta per bulan, seperti Honey Bar, Harmony, Balikpapan City Guide, dan lainnya. Pengembangan ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan pengembangan gim berpeluang menyerap tenaga kerja sekitar 7 persen lulusan perguruan tinggi. Adapun produk dari ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan pengembangan gim di Kota Balikpapan berupa usaha rintisan *(start-up)* antara lain: Tukang Pedia, Celining Cling, Office Pedia, dan Denim. Ekonomi kreatif di Kota Balikpapan didukung dengan keberadaan komunitas kreatif seperti Komunitas PHP, Komunitas Front-End Dev, Robotic, dan linux yang telah menumbuhkan 30 *start-up* per tahun.

2.3.1.6 UMKM

Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan untuk mendukung perekonomian dan memiliki keunggulan daya saing. Adapun produk unggulan UMKM Kota Balikpapan yaitu makanan khas seperti amplang dan makanan olahan perikanan kelautan, produk kriya seperti kerajinan tangan gelang, kalung, dan kain batik bermotif khas Balikpapan. Salah satu yang menjadi tantangan untuk meningkatkan keunggulan daya saing adalah digitalisasi UMKM. Sejauh ini beberapa UMKM di Kota Balikpapan telah masuk dalam lokapasar (marketplace) sehingga telah dapat menjangkau pasar yang lebih luas di luar Kota Balikpapan. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 40 Jumlah UMKM berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

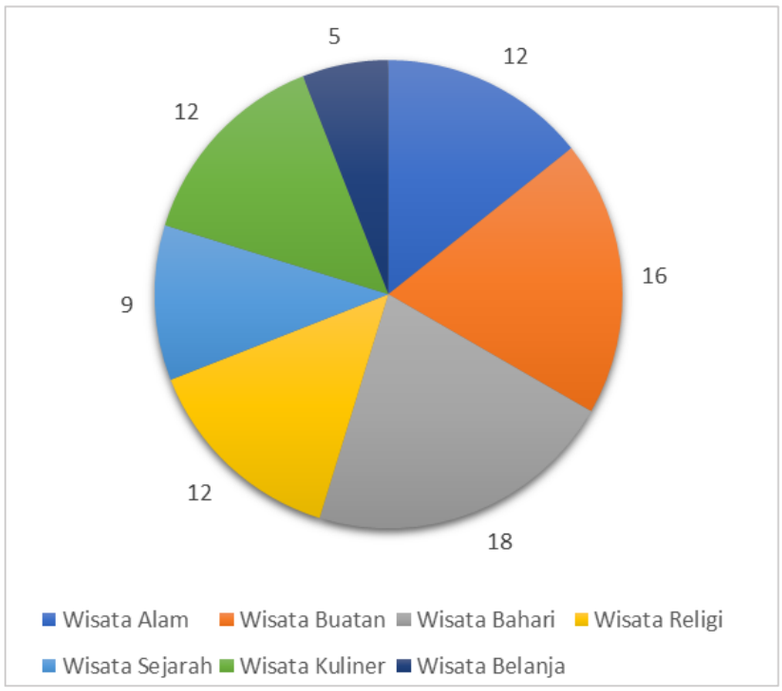
Jumlah UMKM di Kota Balikpapan memiliki tren peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan Balikpapan Utara menjadi kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu 2.194 usaha. Peningkatan jumlah UMKM ini tentunya juga akan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja dan jumlah omset penjualan, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian Kota Balikpapan.

2.3.1.7 Pariwisata

Letak strategis Kota Balikpapan yang berada pada tepian pantai yang juga menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan telah menjadi kota untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan *(event)* memberikan keunggulan daya saing sebagai destinasi pariwisata. Objek daya tarik wisata di Kota

Balikpapan didominasi oleh wisata bahari, selanjutnya wisata buatan, wisata alam, dan wisata kuliner.

Gambar 2. 41 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata di Kota Balikpapan menurut Jenisnya Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Objek daya tarik wisata alam di Kota Balikpapan terdiri dari wisata hutan dan ekowisata, seperti Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Utara, Mangrove Margo Mulyo di Kecamatan Balikpapan Barat, Mangrove Center Graha Indah di Kecamatan Balikpapan Utara, Ekowisata Mangrove Kariangau di Kecamatan Balikpapan Utara, dan Ekowisata Teluk Balikpapan. Adapun objek daya tarik wisata bahari di Kota Balikpapan yang telah menjadi tempat kunjungan favorit wisatawan antara lain: Pantai Manggar Segara Sari di Kecamatan Balikpapan Timur, Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, Pantai Kemala di Kecamatan Balikpapan Kota, dan Pantai Teluk Bayur di Kecamatan Balikpapan Timur.

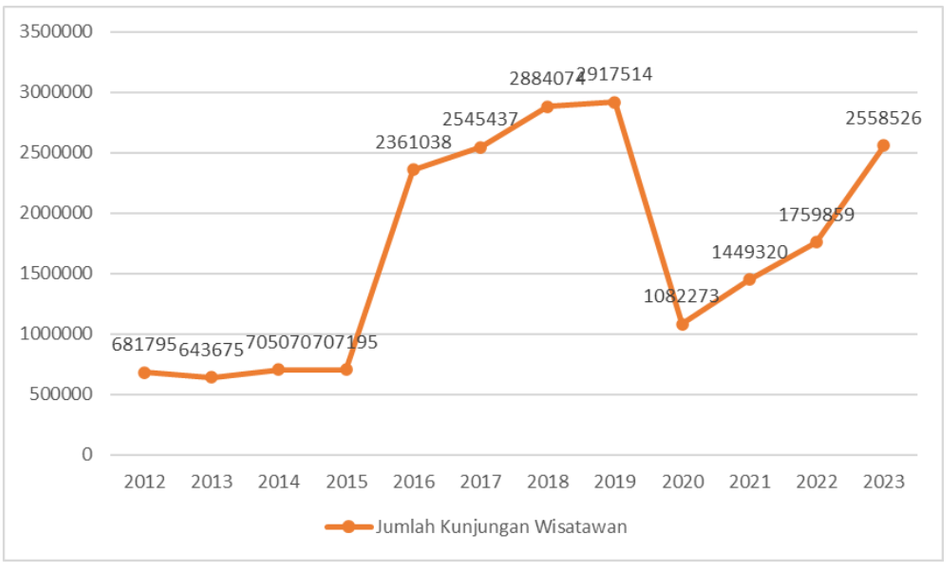
Objek daya tarik wisata buatan dan wisata kuliner semakin dikembangkan untuk menambah lama tinggal wisatawan di Kota Balikpapan. Hal tersebut seiring dikembangkannya taman-taman kota seperti Taman Bekapal di Kecamatan Balikpapan Kota dan Taman Tiga Generasi di Kecamatan Balikpapan Selatan, serta kampung-kampung kota sebagai kampung wisata seperti Kampung Warna-Warni Teluk Seribu di Kecamatan Balikpapan Timur, Kampoeng Kenangan di Kecamatan Balikpapan Timur, Kampung Pinisi di Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kampung Kangkung Sumber Rejo di Kecamatan Balikpapan Tengah.

Adapun wisata kuliner yang masih menjadi daya tarik kunjungan wisatawan antara lain Pasar Segar, Restoran Dandito, Restoran Kenari, dan sentra kuliner di Lapangan Merdeka.

Keberadaan IKN secara tidak langsung telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan. Salah satu motivasi wisatawan datang berkunjung sejak proyek IKN berjalan adalah ingin melihat potensi bisnis di Kota Balikpapan. Beberapa kegiatan (event) baik internasional maupun nasional juga telah dilakukan di Kota Balikpapan. Selama ini lama tinggal wisatawan masih sekitar 1-2 hari. Hal itu berpeluang untuk ditingkatkan mencapai 3-4 hari.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Balikpapan dari tahun 2015 hingga 2022 memiliki tren peningkatan. Meskipun sempat terjadi penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, jumlah kunjungan kembali meningkat pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di Kota Balikpapan dapat pulih dengan cepat seiring dengan pengembangan objek daya tarik wisata.

Gambar 2. 42 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Balikpapan Tahun 2012-2023



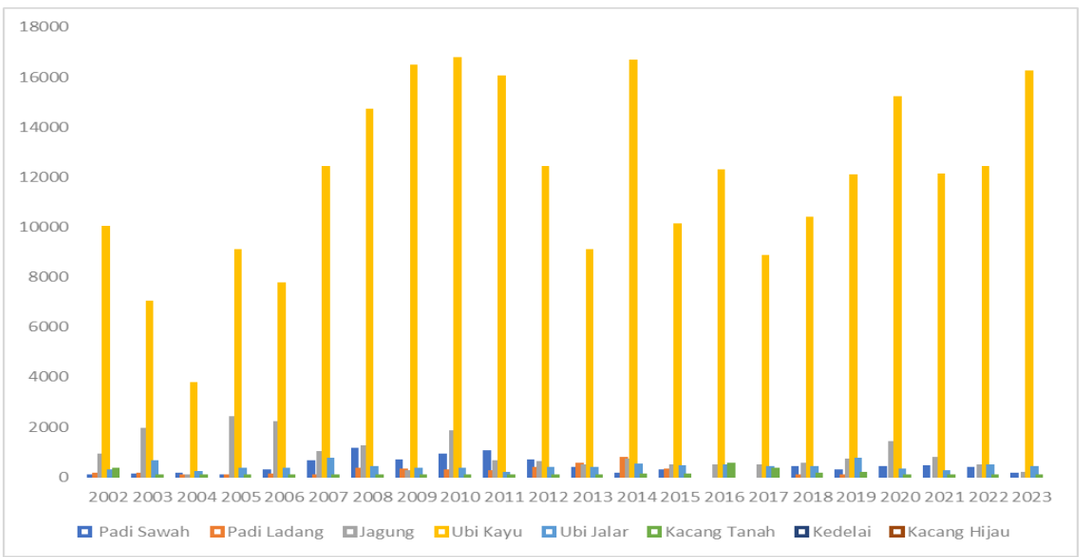
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2012-2023

Peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2015, Kota Balikpapan mendapatkan predikat kota paling nyaman dan layak huni di Indonesia berdasarkan *Most Livable City Index.* Kondisi tersebut secara tidak langsung mampu menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

2.3.1.8 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang ketahanan pangan di Kota Balikpapan. Namun demikian, lahan pertanian di Kota Balikpapan relatif terbatas luas dan sebarannya, serta pada umumnya dilakukan dalam skala kecil. Kawasan yang masih mengusahakan pertanian cenderung terpusat di Kecamatan Balikpapan Timur, terutama di Kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip. Produksi tanaman pangan dengan jumlah terbanyak adalah ubi kayu, hal ini menunjukkan bahwa jenis tanah di Kota Balikpapan lebih cocok untuk komoditas ubi kayu, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan komoditas pertanian lainnya masih mengandalkan pasokan hasil pertanian dari wilayah di luar Kota Balikpapan.

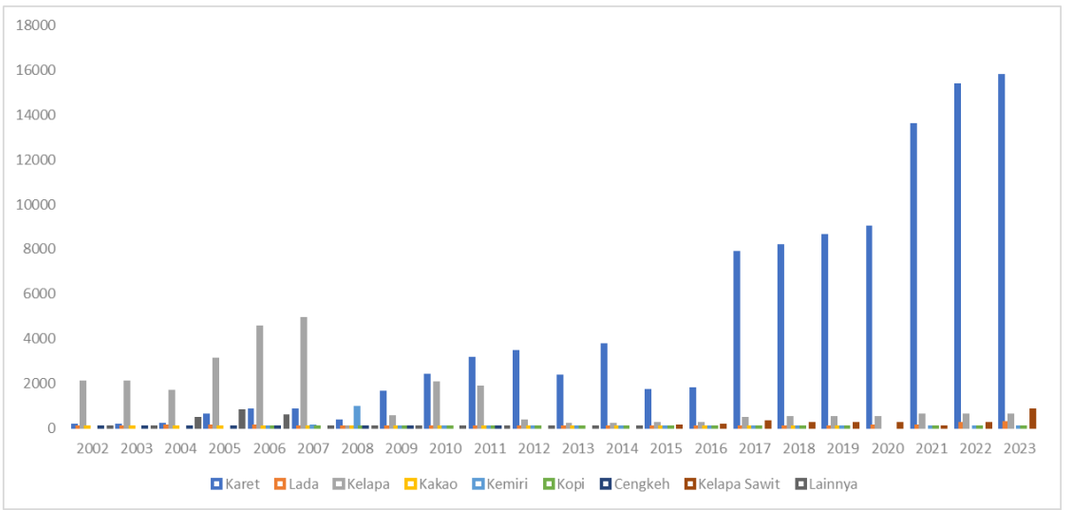
Gambar 2. 43 Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2002-2023



Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka (2003-2024)

Perkebunan menjadi salah satu subsektor pertanian yang juga memiliki kontribusi ekonomi di Kota Balikpapan. Tanaman perkebunan dengan hasil produksi terbanyak adalah karet. Kota Balikpapan merupakan salah satu penghasil tanaman karet terbesar yang berpotensi bisa meningkatkan ekspor. Potensi karet tersebut juga didukung dengan adanya pasar yang mampu menyerap produksi karet Balikpapan. Hasil produksi karet Kota Balikpapan selama ini selalu dipasarkan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kota Balikpapan dari tahun 2002 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 44 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2002-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2002-2024

Berdasarkan grafik tersebut, produksi tanaman perkebunan karet terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal ini didukung dengan adanya program perluasan area perkebunan karet yang telah menjadi salah satu program prioritas untuk memenuhi permintaan pasar.

2.3.2 Daya Saing SDM

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menggambarkan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Gambaran daya saing SDM dapat dilihat dari beberapa capaian seperti kualitas pendidikan dan serapan tenaga kerja. Berikut beberapa capaian yang menunjukan daya saing SDM.

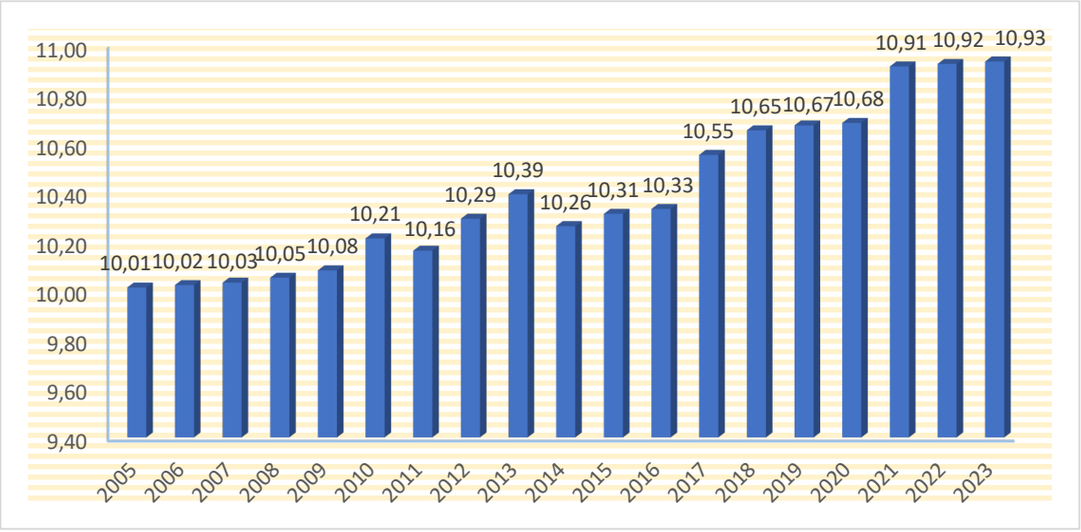
2.3.2.1 Kualitas Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan, serta angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Sekolah. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di suatu daerah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk

dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. RLS berkaitan erat dengan kondisi pembangunan manusia sebagai bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut data RLS di Kota Balikpapan pada rentang tahun 2005 hingga 2023.

Gambar 2. 45 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan pada Tahun 2005-2023



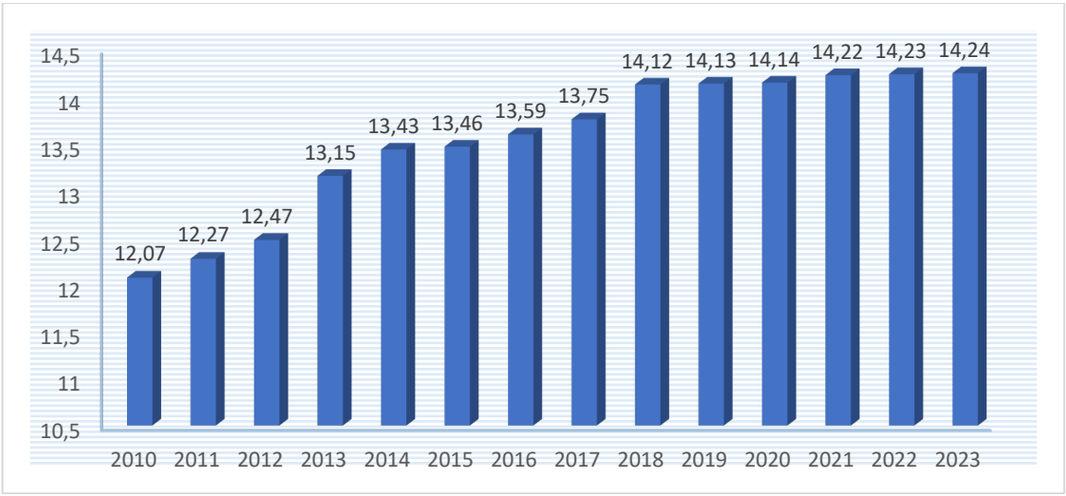
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2005 hingga 2023. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Balikpapan selama tujuh belas tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin. Capaian RLS yang mencapai 10,93 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan merasakan pendidikan selama 10,93 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Capaian tersebut juga telah berada di atas angka RLS Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, yakni selisih 1 poin di atas capaian provinsi dan 2,23 poin dibandingkan nasional. Meskipun begitu, capaian positif terkait RLS tersebut masih perlu untuk ditingkatkan untuk mengejar angka minimal wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 13 tahun atau setara kelas 3 SMA dengan kewajiban menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD).

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah terkait. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di wilayah terkait. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian HLS Kota Balikpapan selama periode 2010 hingga 2023.

Gambar 2. 46 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Balikpapan juga mengalami tren serupa dengan capaian RLS, yakni memiliki tren positif selama periode 2010 hingga 2023. Harapan lama sekolah masyarakat di Kota Balikpapan selama 13 tahun terakhir meningkat sebanyak 2,17 poin. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan memiliki harapan untuk dapat merasakan pendidikan formal selama 14 tahun atau setara dengan tahun pertama di perguruan tinggi. HLS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara harapan masyarakat usia sekolah, Kota Balikpapan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun. Namun, capaian tersebut tetap perlu untuk ditingkatkan, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat di Kota Balikpapan untuk 20 tahun ke depan.

Indikator selanjutnya yang dapat melihat kondisi pendidikan di Kota Balikpapan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut merupakan capaian APK di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2022.

Tabel 2. 12 Angka Partispasi Kasar (APK) Kota Balikpapan pada Tahun 2015-2022

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Dasar Sederajat	109,8	104,92	108,21	107,35	107,35	105,52	104,64	105,5
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	92,56	99,66	85,23	92,78	92,78	96,81	95,49	89,16
Sekolah Menengah Atas Sederajat	95,76	93,34	103,73	108	108	96,88	99,27	98,55

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Balikpapan pada tabel di atas merupakan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Data 2023 tidak dicantumkan karena tidak tersedia pada dokumen Kota Balikpapan Dalam Angka 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Meskipun demikian, data pada tabel di atas menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat di Kota Balikpapan telah lebih dari 100 persen. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Dengan kata lain Kota Balikpapan telah mampu menampung penduduk usia sekolah dasar lebih dari target yang sesungguhnya. Tren yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan yang lain. Fluktuasi capaian APK di Kota Balikpapan terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan atas. Penurunan capaian APK sekolah menengah pertama dan atas mengindikasikan bahwa berkurangnya jumlah masyarakat yang berpartipisasi pada jenjang pendidikan terkait di Kota Balikpapan.

Indikator lain pada sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya juga semakin tinggi. Berikut merupakan data capaian APM Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023.

Tabel 2. 13 Angka Partipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
Sekolah Dasar Sederajat	97,52	98,68	98,19	99,98	99,98	99,52	99,49	99,87	99,81
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	76,97	80,52	81,51	82,93	82,93	83,24	83,16	86,21	85,56
Sekolah Menengah Atas Sederajat	67,81	68,41	69,89	69,6	69,6	70,98	70,79	70,61	70,51

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

APM di Kota Balikpapan secara umum cenderung mengalami tren peningkatan pada rentang tahun 2015 hingga 2024. Capaian APM di Kota Balikpapan yang semakin mendekati 100 pada jenjang sekolah dasar menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah dasar yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Fluktuasi capaian APM yang sempat terjadi dipengaruhi oleh jumlah anak pada usia kelompok tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai kelompok umurnya. Selain itu, capaian APM yang semakin menurun pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti belum adanya batasan minimal pada awal mula penduduk usia sekolah mengakses pendidikan jenjang pertama, sehingga banyak penduduk yang menempuh pendidikan sekolah menengah tidak sesuai usia jenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tren peningkatan APM dari tahun 2015 hingga 2023 secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya.

Indikator lain yang juga melengkapi data di sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan salah satu indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Berikut merupakan kondisi APS di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023.

Tabel 2. 14 Angka Partipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2015-2023

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	100	100	98,19	99,8	99,98	99,79	99,68	99,87	99,81
13-15	97,71	99,18	81,51	97,62	97,62	98,25	98,36	99,4	99,27
16-18	80,67	83,91	69,89	85,14	85,14	84,85	84,95	83,47	83,41

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2016-2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi pada semua rentang umur. Fluktuasi APS di Kota Balikpapan menunjukkan adanya perubahan partisipasi masyarakat usia terkait pada jenjang pendidikannya. Penurunan APS di semua rentang umur terjadi pada tahun 2017 dan 2023. Penurunan APS pada tahun 2017 dikarenakan diimplementasikannya kebijakan sistem zonasi sekolah secara nasional. Sistem zonasi yang mewajibkan penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya mengurangi jumlah sekolah yang dapat diakses oleh penduduk, sehingga secara tidak langsung memengaruhi APS di Kota Balikpapan secara keseluruhan. Penurunan APS pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya fluktuasi jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Kelima indikator di sektor pendidikan yang telah dijabarkan di atas perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasaranan penunjang layanan pendidikan, seperti gedung sekolah, tenaga pengajar, maupun dukungan sarana lainnya. Berikut merupakan data ketersediaan gedung sekolah di Kota Balikpapan selama periode 2006 hingga 2023 pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah Jenjang TK-SMA di Kota Balikpapan Tahun 2006-2022

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	190	61	51
2007	N/A	193	51	43
2008	295	188	67	50
2009	310	190	55	42
2010	318	188	66	49
2011	327	190	67	52
2012	336	195	69	53
2013	338	195	N/A	N/A
2014	342	195	48	57
2015	349	197	72	58
2016	355	209	75	60

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2017	349	136	63	60
2018	356	209	84	64
2019	141	209	84	62
2020	150	210	84	61
2021	152	211	88	67
2022	153	208	92	68
2023	142	221	93	71

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Secara umum, jumlah gedung sekolah di Kota Balikpapan mengalami peningkatan selama periode 2006-2023. Khusus pada jumlah gedung jenjang pendidikan TK mengalami perubahan cukup signifikan dikarenakan pada rentang tahun 2008-2018 merupakan data gabungan antara jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pada tahun 2017, jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama mengalami penurunan. Hal tersebut karena data jumlah gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsnawaiyah (MTs) tidak tersedia, sehingga data yang tercantum merupakan data jumlah sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah gedung sekolahnya semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penambahan gedung sekolah pada jenjang menengah pertama dan atas. Ketersediaan jumlah sekolah berkaitan dengan daya tampung sekolah anak-anak yang telah selesai menempuh pendidikan awal dan perlu melanjutkan pada jenjang pendidikan di atasnya. Ketersediaan dan kemampuan daya tampung gedung sekolah akan memengaruhi proses pembangunan melalui sektor pendidikan. Selain jumlah gedung, ketersediaan jumlah guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran para siswa. Berikut merupakan data terkait jumlah guru di Kota Balikpapan pada tahun 2006 hingga 2023.

Tabel 2. 16 Jumlah Guru Jenjang TK-SMA di Kota Balikpapan Tahun 2006-2023

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	2.695	1.463	1.557
2007	N/A	2.710	1.394	1.250
2008	N/A	2.644	1.614	1.627
2009	N/A	2.644	1.614	1.627
2010	N/A	3.023	1.693	1.675
2011	N/A	3.071	1.608	1.760

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2012	N/A	3.156	1.638	1.741
2013	N/A	5.709	3.497	2.672
2014	N/A	3.392	2.256	1.145
2015	N/A	3.346	1.768	2.052
2016	N/A	3.326	1.730	2.031
2017	N/A	2.613	1.751	1.568
2018	N/A	6.797	1.847	1.525
2019	602	3.916	1.814	1.553
2020	424	3.238	1.597	1.654
2021	359	3.274	1.759	1.717
2022	550	3.472	1.661	1.732
2023	611	3.716	1.888	1.776

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Jumlah guru yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Kota Balikpapan pada rentang tahun 2006 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada jenjang Taman Kanak-Kanak sederajat. Fluktuasi jumlah guru di berbagai jenjang terjadi akibat terdapat data guru tetap, guru honorer maupun guru bantu yang tidak tersebar merata di setiap tahun, sehingga seolah terdapat lonjakan jumlah guru di Kota Balikpapan. Jumlah guru yang terlihat sudah cukup banyak harus tetap memperhatikan berapa banyak murid yang diajari. Ketercukupan guru akan murid di suatu wilayah dapat diliihat dari rasio guru murid. Data terkait rasio guru murid di Kota Balikpapan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 17 Rasio guru murid di Kota Balikpapan tahun 2006-2022.

Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2006	N/A	0,04	0,06	0,07
2007	N/A	0,04	0,06	0,06
2008	N/A	0,04	0,06	0,08
2009	N/A	0,04	0,06	0,07
2010	N/A	0,05	0,06	0,07
2011	N/A	0,05	0,06	0,07
2012	N/A	0,05	0,06	0,07
2013	N/A	0,08	0,13	0,11
2014	N/A	0,05	0,07	0,05
2015	N/A	0,05	0,06	0,08
2016	N/A	0,04	0,06	0,07
2017	N/A	0,05	0,05	0,13
2018	N/A	0,11	0,07	0,12
2019	0,09	0,11	0,07	0,05
2020	0,09	0,05	0,05	0,06
2021	0,12	0,05	0,05	0,06

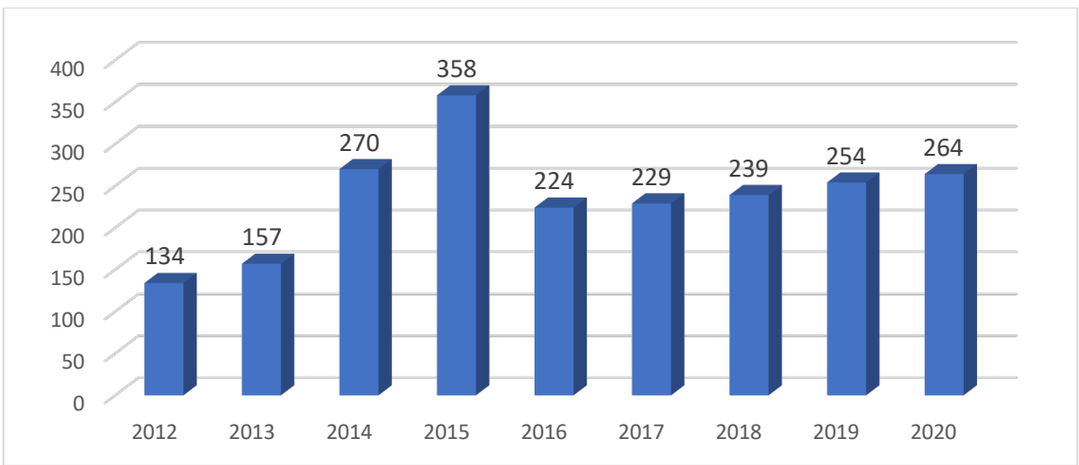
Tahun	Jenjang			
	TK/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
2022	0,10	0,05	0,05	0,06
2023	0,10	0,05	0,06	0,06

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2007-2024

Rasio guru dan murid pada semua jenjang di Kota Balikpapan pada tahun 2006 hingga 2023 dapat dikatakan cukup memadai. Hal itu sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, terkait rasio guru dan murid, yakni 1:20 untuk SD, SMP, dan SMA, serta 1:15 untuk SMK. Apabila rasio tersebut diubah ke dalam desimal, maka rasio guru dan murid yang ideal adalah 0,05. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh, semakin bagus tingkat ketercukupan guru akan murid yang ada di Kota Balikpapan.

Sarana prasarana lain yang juga dapat menunjang capaian kinerja sektor pendidikan adalah tersedianya perpustakaan di suatu wilayah. Adanya perpustakaan dapat menjadi gambaran tambahan pengetahuan dan kebiasaan penduduk terkait pendidikan, salah satunya mencakup minat baca penduduk. Data terkait jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 47 Jumlah Perpustakaan di Kota Balikpapan Tahun 2012-2020



Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan 2021-2026

Jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan secara umum mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan jumlah perpustakaan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015, kemudian mengalami penurunan di tahun selanjutnya. Peningkatan jumlah perpustakaan pada tahun 2014 dan 2015 karena merupakan gabungan dari perpustakaan dan taman baca yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan data tahun 2016 hingga 2020 hanya memuat

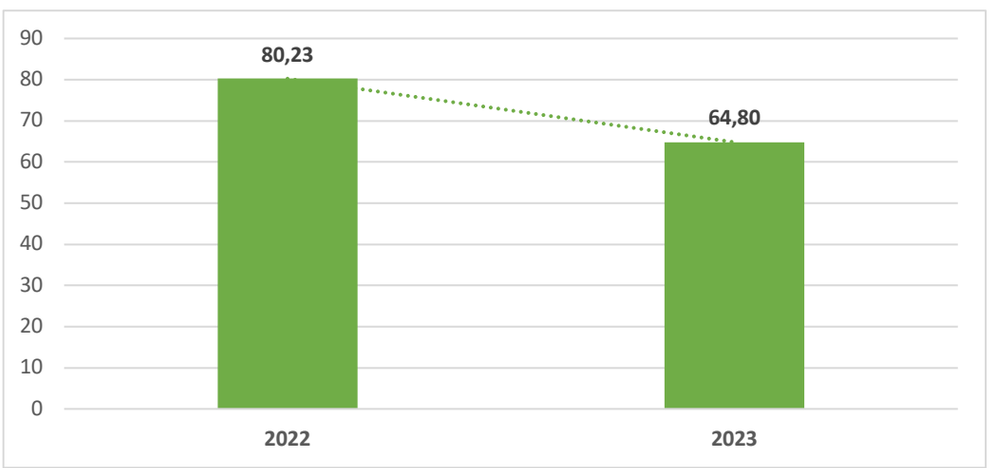
jumlah perpustakaan yang ada di Kota Balikpapan. Peningkatan jumlah perpustakaan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Kota Balikpapan.

Sarana prasarana di Kota Balikpapan secara umum dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui bangunan sekolah, tenaga pendidik, maupun sarana penunjang seperti layanan perpustakaan. Namun penyesuaian sarana prasarana di Kota Balikpapan tetap perlu untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat usia sekolah di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dapat menjadi salah satu acuan untuk melihat kemungkinan penambahan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang.

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kota Balikpapan tahun 2022 dan 2023

Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan Tahun 2022-2023



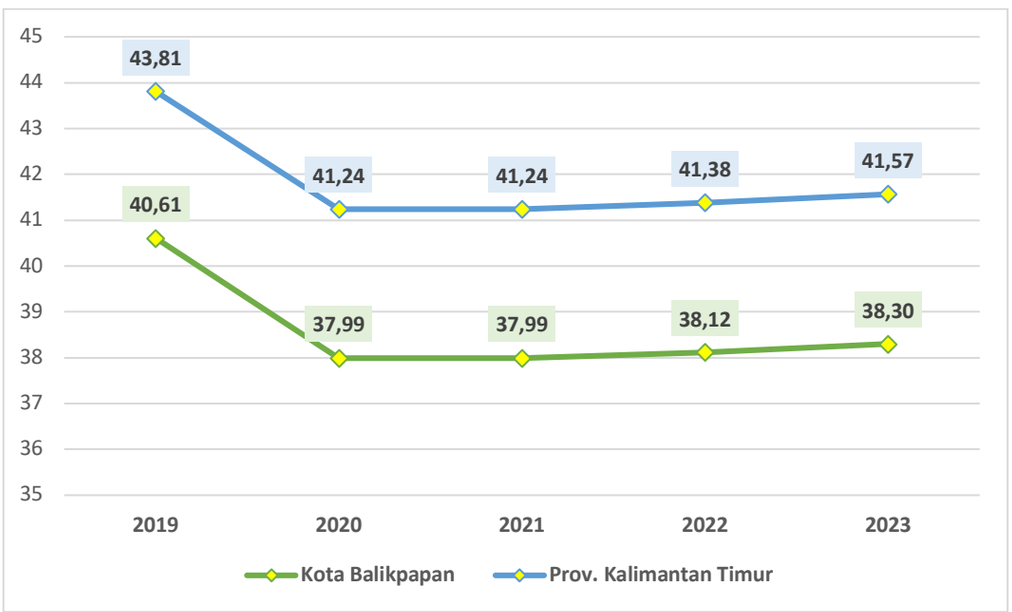
Sumber: Perpusnas, 2024

IPLM Kota Balikpapan mengalami tren yang menurun selama periode 2022 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dalam dua tahun terakhir, capaian IPLM Kota Balikpapan menurun sebesar 15,43 persen. kondisi ini perlu menjadi salah satu perhatian penting dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kota Balikpapan. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan meyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.3.2.3 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kota Balikpapan selama periode 2019 hingga 2023.

Gambar 2. 49 Angka Ketergantungan Kota Balikpapan tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

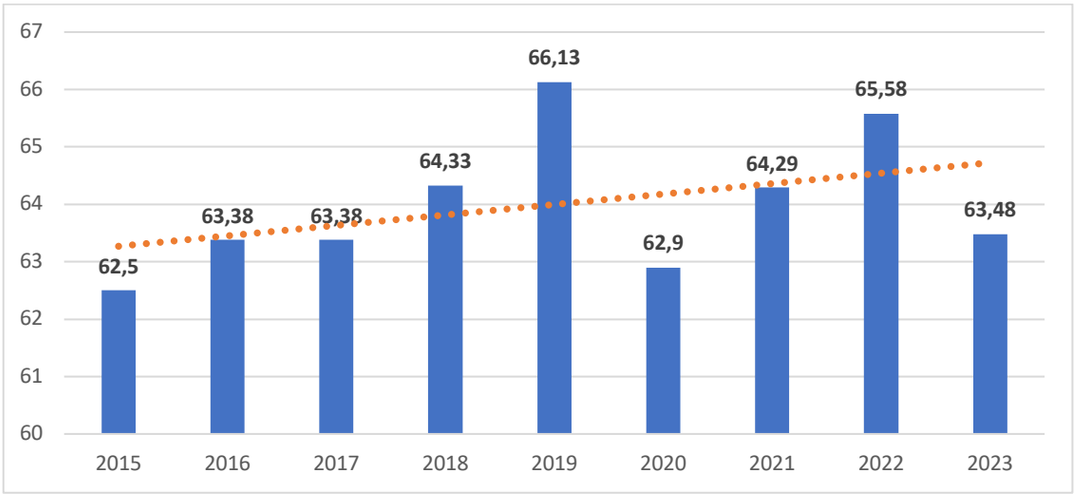
Rasio ketergantungan di Kota Balikpapan mengalami tren yang relatif menurun selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 2,31 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa setiap 100 orang dengan usia produktif memiliki tanggungan beban orang dengan usia non produktif yang relatif menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka rasio ketergantungan di Kota Balikpapan secara konsisten berada di bawah rata-rata rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, setiap 100 orang usia produktif di Kota Balikpapan memiliki tanggungan sekitar 38 orang dengan usia non produktif. Upaya pemberdayaan bagi usia non produktif menjadi salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan guna menekan rasio ketergantungan di masa yang akan datang.

2.3.2.4 Serapan Tenaga Kerja

Kualitas SDM di suatu daerah merupakan salah satu ceriminan dari kuailtas penyelenggaraan layanan dasar, khususnya bidang pendidikan. Serapan tenaga kerja menjadi salah satu indikator yang bisa menggambarkan bagaimana kualitas SDM di suatu daerah dapat diserap di dunia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang secara ekonomis telah mampu untuk dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dan berpotensi untuk dapat menjadi aktor produksi baik berupa barang maupun jasa.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang terserap oleh pasar kerja. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat serapan kerja di suatu daerah adalah indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini dapat menggambarkan seberapa banyak bagian dari tenaga kerja yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan produksi baik dalam bentuk barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. TPAK dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja). Berikut adalah capaian TPAK di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2022.

Gambar 2. 50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan Tahun 2015-2022



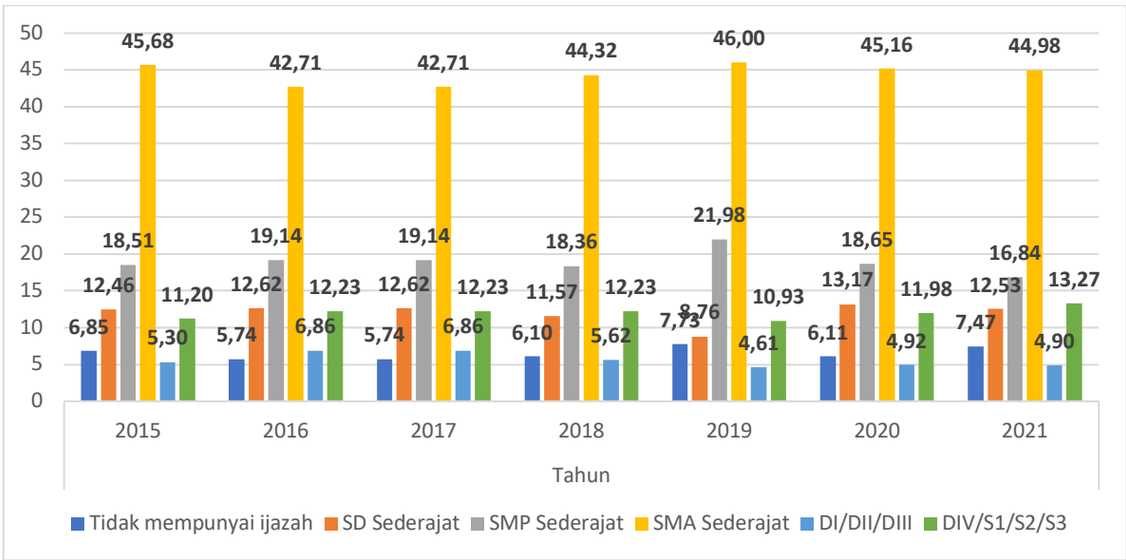
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2015 hingga 2023. Dalam kurun waktu 7 tahun TPAK Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 3,08 poin, walaupun kembali menurun pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPAK Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan, karena capaian tersebut masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Belum optimalnya capaian TPAK mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Balikpapan masih belum terserap secara optimal di pasar kerja. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian TPAK antara lain adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga sebagian penduduk usia kerja tidak terserap oleh lapangan usaha serta tidak sesuainya kualifikasi penduduk usia kerja dengan pasar kerja yang tersedia. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya fenomena yang positif terutama dalam bidang pendidikan. Rendahnya capaian TPAK juga bisa diartikan bahwa angka melanjutkan penduduk usia 15 tahun ke atas cukup tinggi sehingga mampu mengurangi jumlah kasus pekerja anak. Dalam artian, rendahnya capaian TPAK mengindikasikan banyaknya PUK yang sedang menempuh pendidikan lanjutan alih-alih langsung memasuki dunia kerja.

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan SDM yang ungul. Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pendidikan menjadi salah satu input yang dapat memberikan perubahan terhadap kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut akan semakin baik. Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi cenderung

memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Kondisi ini juga turut berdampak terhadap upah yang diperoleh sehingga berimplikasi pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Balikpapan Tahun 2015 hingga 2021.

Gambar 2. 51 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Balikpapan Tahun 2015-2021

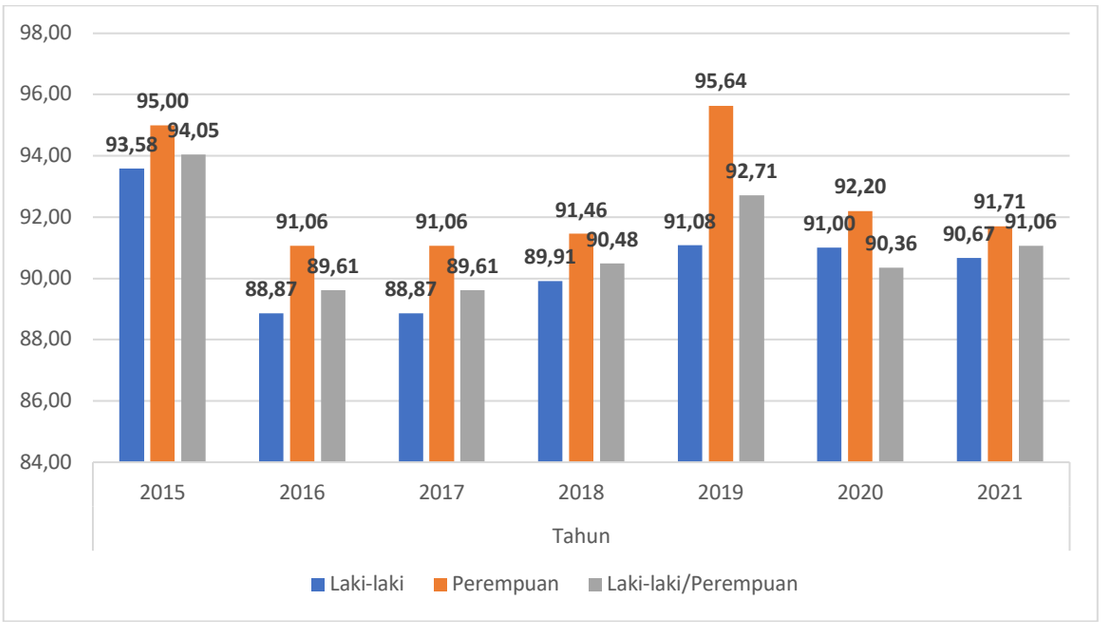


Sumber: BPS, Kota Balikpapan, 2023

Selama periode 2015 hingga 2021, penduduk usia kerja di Kota Balikpapan didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Selama tujuh tahun terakhir penduduk usia kerja dengan kualifikasi SMA sederajat mencapai angka 44,43 persen. Kondisi ini jauh lebih besar dibanding penduduk usia kerja dengan kualifikasi yang lainnya. Proporsi penduduk usia kerja terbesar kedua adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP dengan rata-rata 19,27 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan dan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) juga turut memengaruhi serapan tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut merupakan gambaran kondisi TKK di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2021.

Gambar 2. 52 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Balikpapan Tahun 2015-2021



Sumber: BPS, Kota Balikpapan, 2023

Kondisi TKK di Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2015 hingga 2021. Kondisi tersebut merupakan negasi dari angka TPT di Kota Balikpapan. Secara perhitungan, jika capaian TPT semakin meningkat maka kesempatan kerja akan menurun, dan sebaliknya jika TPT mengalami penurunan maka kesempatan kerja akan meningkat. Menurunnya angka kesempatan kerja di Kota Balikpapan selama periode 2015 hingga 2021 mengindikasikan penyerapan penduduk usia kerja di pasar kerja mengalami penurunan. Kondisi ini ini juga memiliki arti bahwa pada tahun yang sama tingkat pengangguran di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat karena kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Daya saing infrastruktur menganalisis tentang penyelenggaraan pemerintah terhadap pemenuhan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Daya saing infrastruktur meliputi kondisi infrastruktur wilayah, transportasi, kelistrikan, air bersih, telekomunikasi, jalan, sanitasi, drainase serta perumahan dan permukiman.

2.3.3.1 Kondisi Infrastruktur wilayah

Kota Balikpapan yang memiliki konsep sebagai kota nyaman huni atau *liveable* city sesungguhnya merupakan representasi dari sebuah kota yang berkelanjutan (*sustainable city*), dengan harapan kualitas hidup masyarakat dapat dipertahankan dan meningkat. Selain itu, sebagai

sebuah kota yang terus berkembang ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi fasilitas yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara khusus kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 berikut:

Tabel 2. 18 Nilai Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92
Penajam Paser Utara	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	**2,80**	4,94	3,42	**3,59**
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Konidisi Infrastruktur berdasarkan IDSD Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki nilai yang cukup baik pada Dimensi Lingkungan Pendukung, Pilar kedua infrastruktur memiliki nilai 2,80. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 2,41.

Infrastruktur wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal suatu wilayah yang akan menyokong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana tersebut mencakup ketersediaan prasarana transportasi, kelistrikan, air bersih/minum, dan telekomunikasi.

2.3.3.2 Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik secara nasional maupun regional. Konektivitas antarwilayah secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kinerja dan aksesibilitas perekonomian dan sosial

masyarakat. Jaringan transportasi di Kota Balikpapan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan sungai, laut, dan udara.

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan nantinya akan menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Negera (IKN) membutuhkan jaringan jalan untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan negara di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 75,74 km, jalan provinsi 34,1 km, dan jalan yang dikuasai pemerintah kota 442,586 km. Panjang jalan dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 19 Panjang Jalan di Kota Balikpapan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Tahun 2021-2023

Tingkat Kewenangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Negara	45,660	35,350	75,74
Provinsi	31,610	31,610	34,1
Kabupaten/Kota	501,180	518,418	442,586
Jumlah	578,450	585,378	552,426

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2024

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2. 20 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan	1.047.289,25	1.112.503	1.142.552,25	1.133.855
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	2.992.255	3.178.580	3.264.435	3.527.657
3	Rasio	0,35	0,35	0,35	0,32

Sumber: DPU dan Dishub, Tahun 2024

Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang terus bertambah. Secara umum jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah mayoritas kendaraaan dibandingkan dengan kendaraan umum dan dinas yang ada di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 21 Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Tahun 2022

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Mobil Penumpang	61503	13962	8758	84243
Sedan	9006	2866	1831	13723
Station Wagon	28574	5294	2653	36521
Mini Bus	12221	3176	1382	16779
Jeep	11270	2495	2766	16531
Lain-lain	432	131	126	689
Mobil Bus	13163	1139	713	15015
Bus	907	595	217	1719
Micro Bus	12227	424	477	13128
Bus Bertingkat	-	-	-	-
Lain-lain	29	120	19	168
Mobil Barang	38671	10443	5663	55457
Pick Up	16519	1597	1082	19918
Deliver Van	2081	1058	711	3850
Truck	10106	4287	1877	16270
Tangki	5471	1337	805	7613
Double Cabin	3299	1898	1126	6323
Lain-lain	1195	266	62	1483
Sepeda Motor	486709	32820	24898	544338
Sepeda Motor Solo	435841	12628	11346	459815
Sepeda Motor dgn Kereta Samping	994	554	497	2045
Sepeda Motor Roda Tiga	89	-	-	-
Scooter	12969	9672	6450	29091
Trail	36422	9767	6327	52516
Lain-lain	394	199	278	871
Kendaraan Khusus	548	420	347	1315
Mobil Pemadam Kebakaran	155	137	147	439
Mobil Ambulance	233	104	106	443
Mobil Jenazah	99	99	49	247
Fork Lift	45	50	43	138
Lain-lain	16	30	2	48
Jumlah	600594	58784	40379	700368

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2022, BPS

Dalam hal penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota turun dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit. Penurunan ini disebabkan oleh rencana Dinas Perhubungan untuk meremajakan angkutan kota dan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). Namun, dari tahun 2016 hingga 2020, hanya ada 1 koridor SAUM yang ditambahkan, melayani jalur dari Pelabuhan Ferry Kariangau ke Terminal Batu Ampar. Rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,33% pada tahun 2016 menjadi 0,12% pada tahun 2020. Ini disebabkan belum tersedianya SAUM dan kurangnya angkutan kota.

Tabel 2. 22 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Kendaraan	553.528	572.976	588.911	610.819	637.531
Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan	0,33%	0,31%	0,30%	0,20%	0,12%

Sumber: Dishub, 2021

Pengembangan SAUM ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap sistem transportasi yang berkelanjutan, aman, terjangkau, dan mudah diakses untuk semua orang. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua yang berada dalam situasi rentan. Perencanaan Koridor SAUM masih berkaitan dengan rute angkutan kota, yang menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu, kondisi jalan yang curam dan kurang lebar membuat pengembangan moda transportasi publik sulit.

Seperti halnya dengan penyelenggaraan angkutan, perlengkapan jalan dan prasarana jalan juga tidak meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda tidak meningkat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan mewujudkan Kota yang Nyaman Dihuni dan *Smart City*, perlengkapan tersebut perlu diperkuat dalam beberapa tahun mendatang.

Tabel 2. 23 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	1.807	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Koridor	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal	1 Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal
SAUM	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar	Batu Ampar
Jumlah Halte SAUM	14	14	14	14	14
Jumlah Rambu	2.191	2.306	2.447	3.229	3.848
Jumlah ATCS	15	15	15	15	15
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Sumber: Dishub, 2021

Berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan menjadi pusat pengumpul utama untuk penerbangan domestik dan internasional dan sebagai pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun, Bandar Udara SAMS menunjukkan pertumbuhan yang tidak signifikan karena terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tahun 2016-2020

Penerbangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Internasional	76.595	45.320	56.802	59.002	8.870
Domestik	7.433.595	7.254.136	7.441.334	5.370.714	2.730.924

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggan turun menjadi 2.739.794 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak ahir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Tahun 2016-2020

Tahun	Penumpang turun (Jiwa)	Penumpang naik (Jiwa)
2016	169.393	149.077
2017	148.998	162.852
2018	251.304	206.026
2019	251.304	206.026
2020	93.038	86.606

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Lebih lanjut, jumlah penumpang angkatan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Data terkait arus penumpangtersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pengembangan transportasi di Kota Balikpapan.

2.3.3.3 Kelistrikan

Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan fasilitas publik yang ada. Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang berkembang di Pulau Kalimantan, kebutuhan listrik Kota Balikpapan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan yang menggunakan listrik terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan listrik yang meningkat. Produksi listrik pada tahun 2020 mencapai 1.088.423.119 KWh dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.504.787.490 KWh pada akhir tahun 2023.

Tabel 2. 26 Kondisi Penyediaan Listrik di Tahun 2019-2023

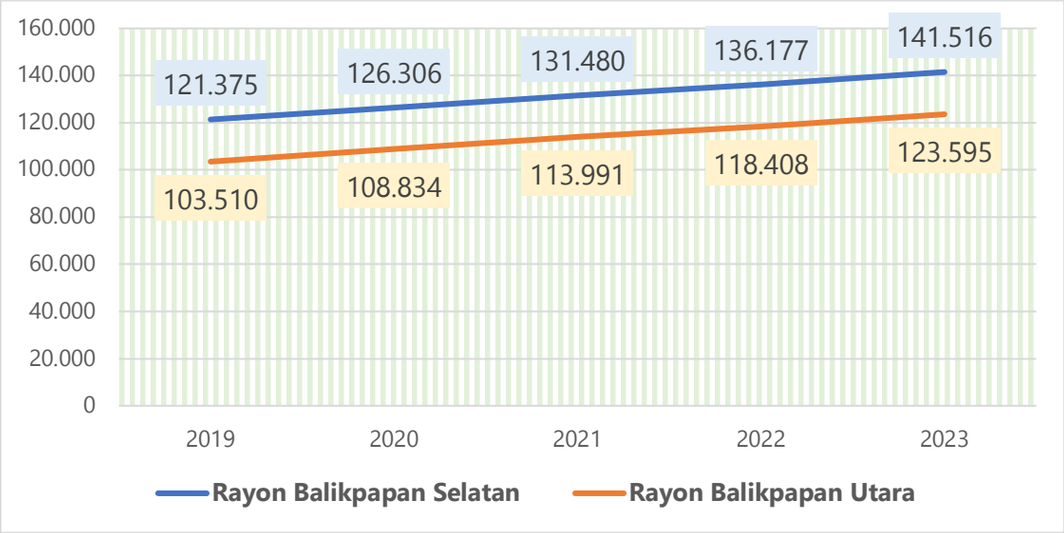
Indikator	Rayon	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (KW)	Rayon Balikpapan Selatan	299.155.000	360.275.022	377.332.522	406.911.372	427.407.322
	Rayon Balikpapan Utara	217.322.000	253.489.750	281.048.500	274.779.550	295.334.400
	Jumlah	516.477.000	613.764.772	658.381.022	681.690.922	722.741.722
Produksi Listrik (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	662.436.628	634.329.711	899.728.999	951.983.433	1.004.674.090
	Rayon Balikpapan Utara	434.424.564	454.093.408	537.338.515	500.577.809	500.113.400
	Jumlah	1.096.861.192	1.088.423.119	1.437.067.514	1.452.561.242	1.504.787.490
Listrik Terjual (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	631.029.632	604.699.529	607.878.878	661.337.148	748.359.797
	Rayon Balikpapan Utara	420.782.083	441.608.722	506.627.264	467.315.011	477.217.477
	Jumlah	1.051.811.715	1.046.308.251	1.114.506.142	1.128.652.159	1.225.577.274
Susut/ Hilang (KWh)	Rayon Balikpapan Selatan	31.407.266	29.630.182	34.315.267	38.876.299	43.366.397
	Rayon Balikpapan Utara	13.642.481	12.484.686	19.800.095	17.376.358	17.246.559
	Jumlah	45.049.747	42.114.868	54.115.362	56.252.657	60.612.956

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah Pelanggan Listrik di wilayah Kota Balikpapan berdasar data PLN Area Balikpapan terdiri dari 2 Rayon yaitu Rayon Balikpapan Selatan dan Rayon Balikpapan Utara. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah

pelanggan 2 rayon tersebut mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada gambar grafik berikut

Gambar 2. 53 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik rumah tangga mencapai 238.006, meningkat signifikan dari 204.281 pelanggan listrik rumah tangga pada tahun 2019. Jumlah pelanggan fasilitas publik juga meningkat pesat, mencapai 1.289 pelanggan pada tahun 2023, dari 1.089 pelanggan pada tahun 2019. Sektor bisnis juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya, rata-rata meningkat 1.331 pelanggan, dengan total 21.711 pelanggan pada tahun 2023.

Tabel 2. 27 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2019-2023

Kelompok Tarif	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	3.041	3.233	3.474	3.680	3.913
Rumah Tangga	204.281	213.850	222.361	229.500	238.006
Bisnis	16.388	16.859	18.385	20.064	21.711
Industri	86	85	87	91	94
Publik	1.089	1.113	1.164	1.222	1.289
Jumlah	**224.885**	**235.140**	**245.471**	**254.557**	**265.013**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Lebih lanjut, pada sektor industri pelanggan terdapat 94 pelanggan. Sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya, meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki 85 pelanggan. Melalui data ini, kelistrikan menjadi modal penting dalam merencanakan strategi pengembangan energi baru terbarukan yang telah menjadi tuntutan secara nasional.

2.3.3.4 Air Bersih

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air bersih tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk produksi, seperti digunakan untuk aktivitas bisnis.

Tabel 2. 28 Konsumen Air Bersih di Tahun 2023

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
Sosial	1.583	1.279.314	3.580.888.164
Rumah Tangga	109.069	24.840.419	272.615.673.691
Instansi Pemerintah	263	417.516	2.034.237.393
Niaga	4.913	1.936.764	27.630.525.218
Industri	14	11.891	215.626.657
Khusus	547	335.256	6.423.996.167
Jumlah	**116.389**	**28.821.160**	**312.500.947.290**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah pelanggan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 116.389 pelanggan. Total pelanggan tersebut didominasi pelanggan rumah tangga sebanyak 109.069 pelanggan dan niaga sebanyak 4.913 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 28.821.160m^3 dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 312.500.947.290.

2.3.3.5 Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian penting yang mendukung layanan komunikasi di suatu daerah. Pemerintah harus mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Malalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 80% pada tahun 2017 menjadi 83% pada tahun 2020.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	-	80%	85%	90%	83%
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	-	90%	90%	90%	84%
Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	-	80%	80%	80%	94%

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait telekomunikasi adalah perluasan jangkuan layanan telekomunikasi di Kota Balikpapan, di mana tidak ada *blank spot* di lokasi tertentu. Untuk memfasilitasi jangkuan telekomunikasi ini dapat dilihat dengan ketersediaan menara *base transceiver station* (BTS) yang ada di setiap kecamatan di Kota Balikpapan. Tabel di bawah menunjukkan jumlah BTS per kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana cakupan telekomunikasi tersebar di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 30 Jumlah BTS Menurut Kecamatan di Tahun 2021-2023

Kecamatan	Jumlah BTS 2021	Jumlah BTS 2022
Balikpapan Selatan	127	127
Balikpapan Kota	78	75
Balikpapan Timur	54	57
Balikpapan Utara	115	113
Balikpapan Tengah	53	52
Balikpapan Barat	33	33
Total	460	457

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2024

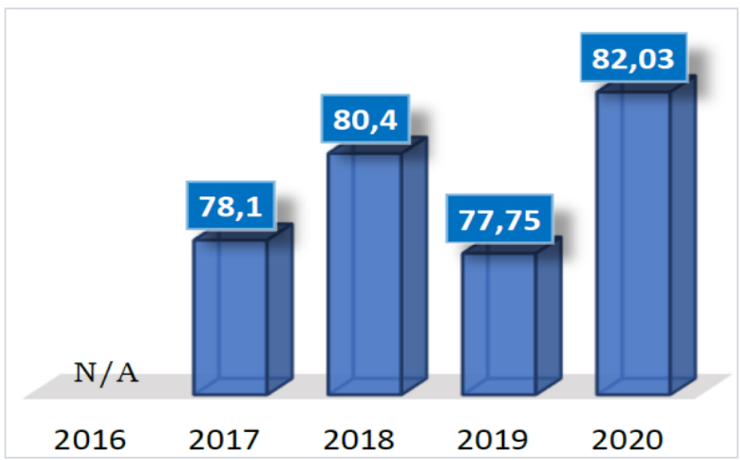
Data tersebut menunjukan persebaran BTS di Kota Balikpapan memiliki jumlah berbeda-beda. Dari 460 BTS yang tersebar di seluruh Kota Balikpapan pada tahun 2021, Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki jumlah BTS terbanyak yang mencapai 127 BTS. Sedangkan jumlah BTS paling sedikit berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan jumlah 33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hampir semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2022 jumlah BTS justru mengalami penurunan 3 BTS.

Meskipun jumlahnya mengalami penurunan, masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara yang dibutuhkan di Kota Balikpapan.

Padahal ketersediaan BTS adalah bagian penting dari infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan yang diperlukan pengguna seluler di berbagai lingkungan dan kebutuhan.

Daya saing infrastruktur menganalisis tentang penyelenggaraan pemerintah terhadap pemenuhan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar kepada masyarakat di Kota Balikpapan. Infrastruktur dasar meliputi penyelenggaraan jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan perumahan dan permukiman. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan, pada tahun 2015, realisasi indikator ini sebesar 73,4 lalu meningkat signifikan menjadi 80,40 pada tahun 2017 dan terakhir menjadi 82,03 pada tahun 2020. Secara umum capaian indikator IKLI Kota Balikpapan mengalami fluktuasi meskipun dalam tren yang meningkat pada akhir tahun perhitungan.

Gambar 2. 54 Indeks Kepuasan Infrastruktur Dasar (IKLI) tahun 2016 – 2020



Sumber: Bappeda Litbang, 2021

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,18 km, di mana kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survey oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalandi Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2023

Kualitas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km
Baik	396,58	95,39	288,95	268,99	365,31	344,947	322,279	137,584
Sedang	85,93	295,56	133,24	150,13	96,59	102,363	169,129	218,351
Rusak	18,66	58,60	30,55	54,44	38,91	53,870	27,240	24,297
Rusak Berat	-	51,63	48,44	27.61	0,38	-	-	62,561
Jumlah	501,18	501,18	501,18	501,18	501,18	501,180	518,648	442,793

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam angka 2024

Persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2020 adalah sebesar 92,16% atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,28%. Hal ini seiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Kinerja untuk penambahan ruas jalan baru diluar jalan kota, diukur dengan indeks aksesibilitas kawasan perkotaan yang dihitung berdasarkan panjang jalan terhadap luas kawasan perkotaan. Indeks aksesibilitas Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,415 dan mengalami peningkatan hingga akhir 2020 yaitu sebesar 1,475.

Tabel 2. 32 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

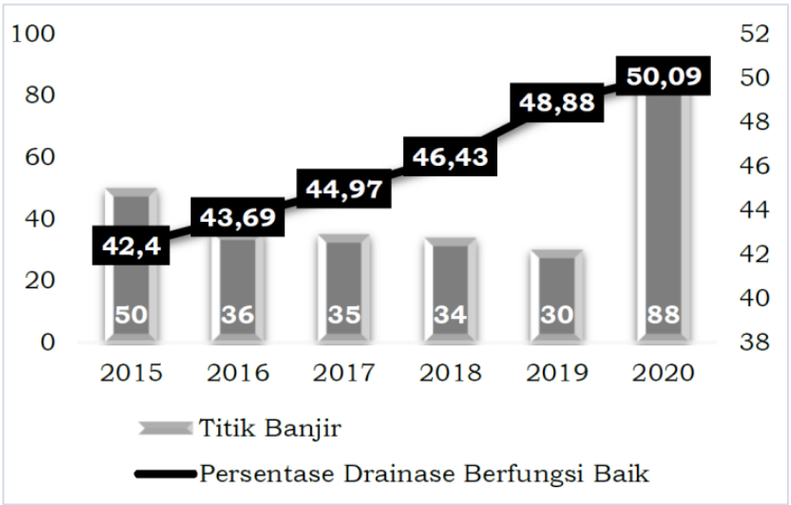
Tahun	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
2016	-
2017	1,415
2018	1,427
2019	1,430
2020	1,475

Sumber: Dinas PU, 2021

Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaran urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pegelolana saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada *Masterplan* Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana

dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.

Gambar 2. 55 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



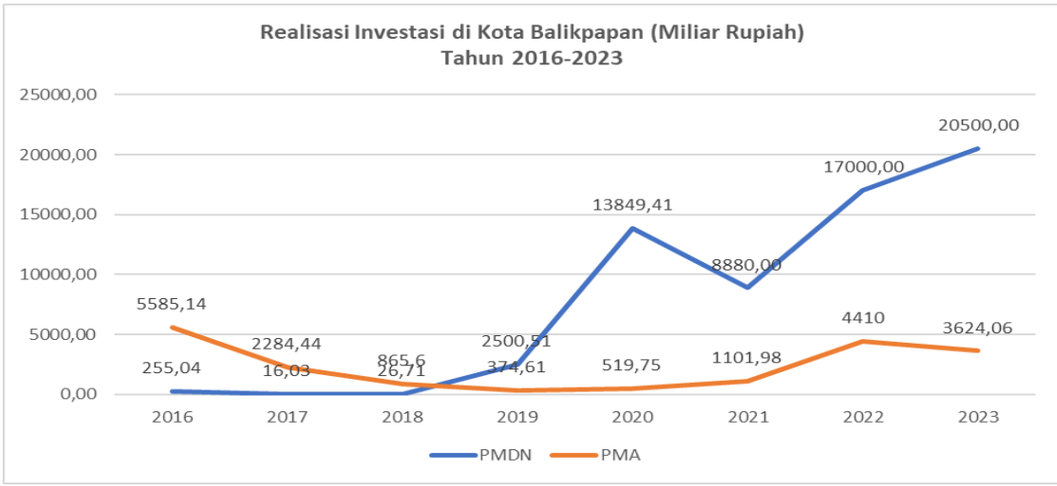
Sumber: DPU Kota Balikpapan, 2021

Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, terjadi peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Adapun titik banjir sesuai dengan *baseline* pada tahun 2015 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 titik dan menurun menjadi 30 titik pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Realisasi investasi di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2016-2023 mengalami fluktuasi angka. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) cenderung mengalami tren peningkatan, sempat mengalami tren penurunan pada tahun 2021 karena dampak dari pandemi COVID-19, dan kembali meningkat pada tahun 2022-2023. Adapun penanaman modal asing (PMA) juga serupa mengalami penurunan pada tahun 2017-2019, kemudian meningkat pada tahun 2020-2022, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023. Salah satu hal yang mendongkrak investasi di Kota Balikpapan adalah keberadaan proyek IKN.

Gambar 2. 56 Realisasi Investasi di Kota Balikpapan (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2023



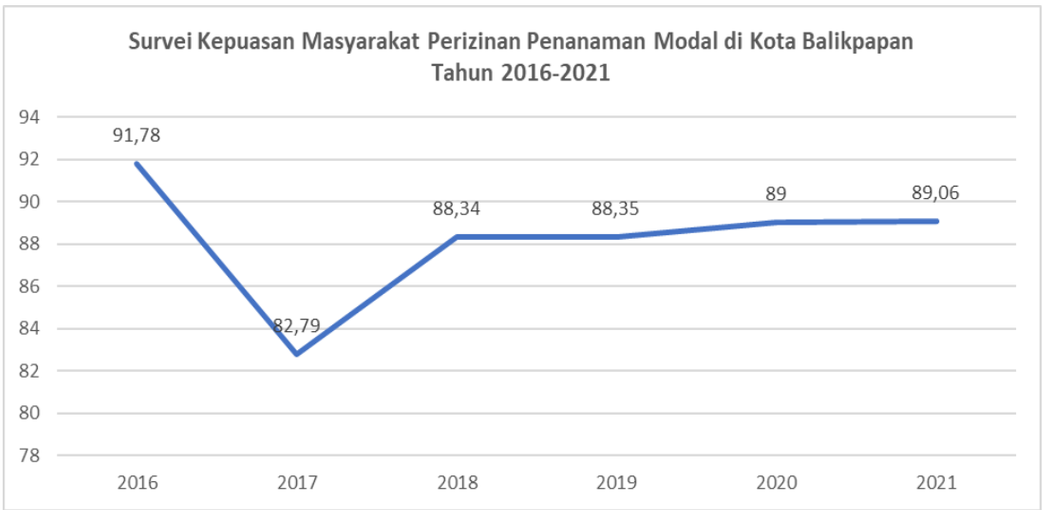
Sumber: DPMPT Kota Balikpapan (2023)

Berdasarkan sektor usahanya, kontribusi tertinggi terhadap investasi di Kota Balikpapan adalah sektor konstruksi. Selanjutnya sektor industri kimia dan farmasi yang berkontribusi tertinggi kedua terhadap investasi, dan di bawah sektor tersebut terdapat sektor pertambangan.

Realisasi investasi di Kota Balikpapan saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima, dan persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan. Tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal dihitung melalui jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya pada *platform* lkpmonline.go.id. Dalam kurun waktu 2016-2023, jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal terus meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, upaya untuk melakukan reformasi perizinan melalui digitalisasi perizinan secara daring dapat dilihat dari indikator persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara daring, yang dalam kurun waktu 2016-2023, tren realisasi indikator ini terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perizinan sudah semakin baik.

Namun demikian, pengelolaan perizinan yang telah menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik belum berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat yang masih fluktuatif. Berikut ini hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kurun waktu 2016-2021.

Gambar 2. 57 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kurun waktu 2016-2021



Sumber: DPMPT Kota Balikpapan (2021)

Selain daya tarik IKN, iklim investasi juga didukung sistem perizinan yang sudah direvitalisasi dan memanfaatkan digitalisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaku usaha wajib menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan realisasi investasi dilakukan melalui:

1. Pengembangan iklim penanaman modal melalui revisi Perda Insentif Penanaman Modal, penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Balikpapan, dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Balikpapan tahun 2022-2025.
2. Pengembangan promosi penanaman modal melalui pameran promosi investasi, *one-on-one meeting*, Temu Usaha Investasi (Temu Investor), dan pembuatan media promosi investasi Kota Balikpapan.
3. Peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal melalui fasilitasi kemudahan berusaha seperti Pelayanan Pendampingan *Online Single Submission* (OSS), fasilitasi investor dalam permasalahan penanaman modalnya *(debottlenecking)*, kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan: SiJempol (Sistem Jemput Bola Langsung) dan Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif yang memudahkan difabel dan lansia dalam mengajukan perizinan berusaha dengan proses jemput dan antar)

4. Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD, dan swasta.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Dimensi lingkungan pendukung IDSD ini terdiri dari empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, dan stabilitas ekonomi.

Tabel 2. 33 Indeks Daya Saing Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92
Penajam Paser Utara	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	2,80	4,94	3,42	**3,59**
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Berdasarkan tabel tersebut, IDSD Kota Balikpapan memiliki skor 3,59 atau berada di atas nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki daya saing daerah yang kuat dengan keunggulan terutama pada dimensi pendukung adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan dimensi institusi. Adapun pada dimensi pendukung infrastruktur masih perlu peningkatan, karena infrastruktur pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam

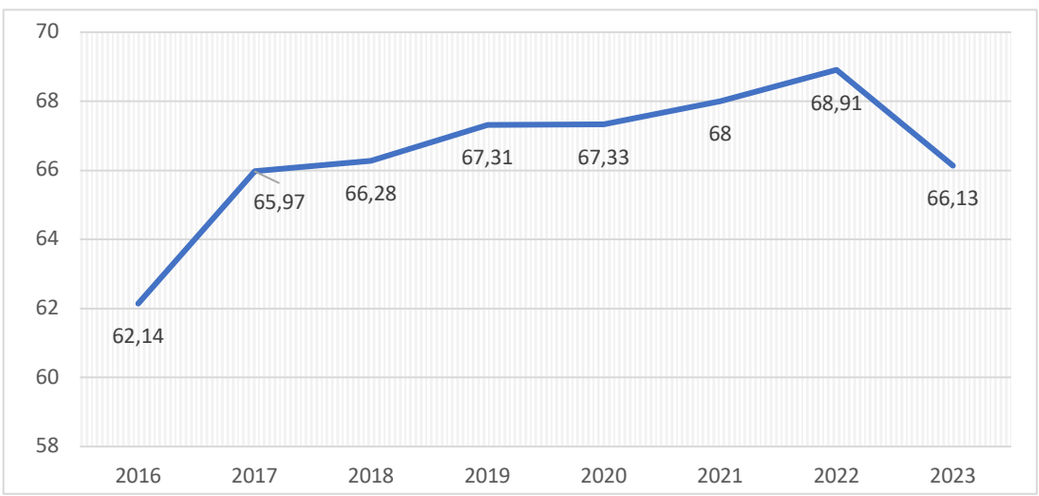
keberlangsungan kehidupan masyarakat pada suatu wilayah yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana tersebut mencakup ketersediaan prasarana transportasi, kelistrikan, air bersih dan air minum, dan prasarana pendukung lainnya.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian yang menjelaskan terkait kondisi tata kelola pemerintahan suatu daerah. Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan sebagainya.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan good governance, dimana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif, efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan:

Gambar 2. 58 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Balikpapan Tahun 2016-2023



Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005 dan 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan mendapatkan predikat B pada tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 10,89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja reformasi

birokrasi belum optimal yang ditandai dengan penurunan nilai RB pada tahun 2023. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen RB yang belum optimal. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain adalah Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Profesionalisme ASN. Capaian kinerja bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan pada periode sebelumnya akan dibahas secara mendetail di bagian selanjutnya.

Opini BPK merupakan hasil temuan atas permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini BPK merupakan tolok ukur akuntabilitas pemerintah terkait tingkat kewajaran dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Opini tertinggi yang diberikan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun capaian Opini BPK Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 34 Opini BPK Kota Balikpapan Tahun 2017-2023

Opini BPK	
Tahun	**Predikat**
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber: Bappeda dan Inspektorat Kota Balikpapan, 2024

Capaian Opini BPK Kota Balikpapan secara konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017 hingga 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan sudah akuntabel, wajar, dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan antara lain adalah penyusunan anggaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat, implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan capaian kinerja bidang tata kelola adalah nilai SAKIP. Indikator ini berbicara tentang bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan aktivitas pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga

evaluasi kinerja. Nilai SAKIP secara jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mencapai target kinerja yang telah disusun pada awal periode tertentu dan kesesuaiannya dengan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian nilai SAKIP Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Nilai SAKIP Kota Balikpapan Tahun 2017-2023

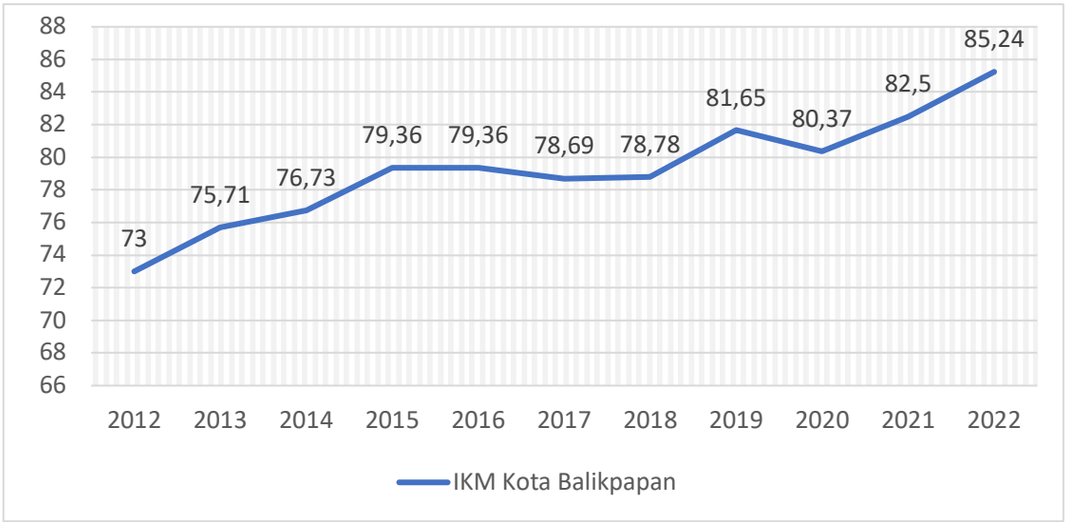
Nilai SAKIP	
Tahun	Predikat
2017	66,19
2018	68,13
2019	68,68
2020	68,99
2021	69,28
2022	69,5
2023	68,75

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, 2023

Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh predikat B sejak tahun 2017 hingga 2023. Meskipun demikian, terjadi penurunan nilai Sakip Daerah tahun 2023 yang kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya nilai RB. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan bidang tata kelola selanjutnya, yakni menjalankan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, kualitas indikator kinerja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme *cascading* kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi. Dengan demikian, pemantapan kualitas penataan kelembagaan berbasis hasil perlu secara progresif dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi pemerintah. Indikator ini juga dapat menjadi bahan penilaian atas unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi acuan untuk penetapan kebijakan selanjutnya. Sumber data Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari hasil survey berdasarkan beberapa komposisi pelayanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. 59 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2012-2022

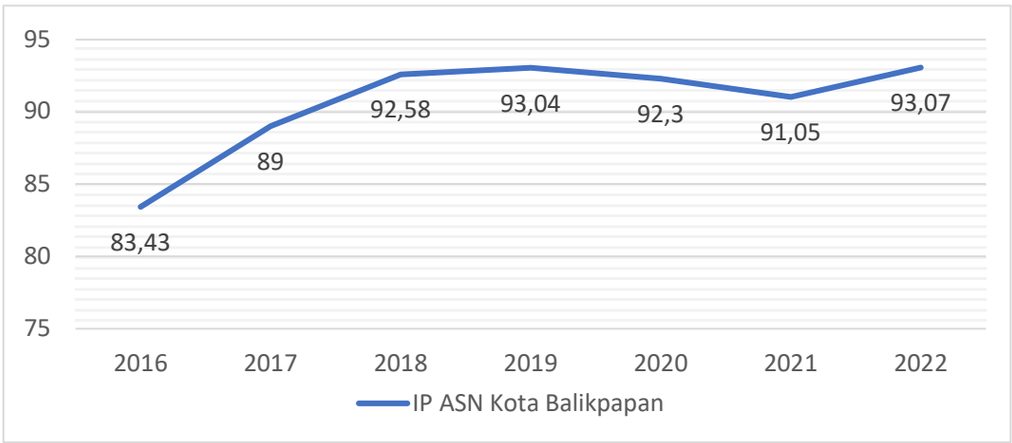


Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga 2022, dengan rata-rata capaian 79,21. Capaian ini sempat menurun sebesar 1,28 poin pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memegaruhi pelayanan publik (LKJIP Kota Balikpapan, 2020). Adapun persentase peningkatan IKM antara tahun 2012 dan 2022 mencapai 16,76 persen. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan guna memastikan pelayanan yang menjawab permasalahan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN). Indikator ini mengukur tingkat kompetensi dan kualitas pelayanan aparatur sipil pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran IP ASN memperhatikan tiga dimensi, yaitu dimensi kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Sasaran utama dari IP ASN ini adalah peningkatan kompetensi dan iklim kerja aparatur melalui evaluasi kinerja secara berkala. Adapun capaian Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 60 Indeks Profesionalisme ASN Kota Balikpapan Tahun 2016-2022



Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan, 2023

Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 11,55 persen pada tahun 2016 hingga 2022. Perolehan IP ASN tertinggi dicapai pada tahun 2022, meskipun trennya cenderung menurun sejak tahun 2020. Meski demikian, capaian pada periode tersebut tetap konsisten pada kategori tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mempertahankan raihan ini adalah praktik pengawasan daerah secara komprehensif serta adanya kebijakan *reward* (Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan, 2022). Namun, peningkatan kompetensi SDM terkait integrasi satu data dengan sistem BKN masih perlu dioptimalkan guna mencapai hasil yang lebih baik di periode yang akan datang.

2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap hasil RPJPD menggambarkan sejauh mana realisasi antara sasaran pokok daerah dengan capaian sasaran RPJMD periode sebelumnya serta realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Hasil evaluasi RPJPD periode yang lampau juga digunakan untuk memastikan bahwa penetapan arah pembangunan jangka panjang periode selanjutnya dapat menyesuaikan capaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, baik yang berdasarkan arah kebijakan dan juga misi daerah, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2. 36 Hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 Berdasarkan Arah Kebijakan Periode Perencanaan Kedua dan Ketiga (RPJMD Tahap II dan III)

Periode Perencanaan	:	RPJMD Tahap II (2011-2016)
Arah Kebijakan	:	Diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan berkualitas yang berbasiskan IMTAQ dan IPTEK, kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan, pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya, pengelolaan potensi daerah, pembangunan infrastruktur, pemerataan sarana dan prasarana daerah, penataan ruang dan lingkungan hidup serta upaya mitigasi bencana.
Uraian Pencapaian	:	Kinerja periode kedua RPJPD sebagai berikut: • Pembangunan sumber daya manusia memiliki kinerja baik yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia memiliki capaian 78,57 pada 2016. Kondisi ini merupakan peningkatan dibanding dengan akhir periode pertama yang memiliki capaian 76,02 pada tahun 2011. Beberapa faktor pendorong capaian ini, antara tercapaianya kinerja peningkatan angka harapan hidup yaitu 73,96 dari target 73,95 dan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 10,54 dari target 10,43 pada tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja pembangunan sumber daya manusia Kota Balikpapan belum melampaui kinerja Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki nilai IPM 78,91 pada tahun 2016. • Kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan capaian angka kemiskinan pada periode kedua ini masih fluktuatif. Angka kemiskinan mengalami penurunan atau kinerja yang baik dalam beberapa tahun, yakni 3,39 pada 2011 menjadi 2,46 pada 2014. Namun angka kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 2,91 meskipun kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 2,81. Capaian kinerja aspek kesejahteraan ini memiliki sifat anomali, karena salah satu penyebab dari kemiskinan, yaitu angka pengangguran justru mengalami penurunan. Angka pengangguran konsisten mengalami penurunan, yaitu mulai 2011 sebesar 12,14 menjadi 5,95 pada 2016. Namun, angka kemiskinan yang fluktuatif selaras dengan ketimpangan pendapatan yang semakin naik atau memiliki kinerja yang memburuk, yaitu 0,28 pada 2011 menjadi 0,34 pada 2016. • Pembangunan perekonomian yang ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif sepanjang periode kedua RPJPD yang memiliki rata-

		rata pertumbuhan sebesar 0,06%. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian yang fluktuatif dan cenderung menurun. Adapun sektor-sektor yang terkait perekonomian masyarakat, antara lain kontribusi sektor pertanian pada perekonomian mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2011 hingga 2016. • Tata kelola pemerintahan pada periode kedua telah menunjukkan kinerja perbaikan, terutama dari aspek akuntabilitas kinerja, keuangan dan kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP meskipun masih berada pada kategori B, namun menunjukkan peningkatan, yakni 55,19 pada 2015 menjadi 60,85 pada 2016. Sedangkan opini BPK Kota Balikpapan konsisten dengan capaian WTP mulai tahun 2012. Kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan nilai IKM juga sesuai dengan target pada tahun 2016, yakni sebesar 79,36.
Periode Perencanaan	**:**	**RPJMD Tahap III (2016-2021)**
Arah Kebijakan	:	Diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang lebih baik. Fokus pembangunan memiliki orientasi pada perwujudan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka.
Uraian Pencapaian	:	Kinerja periode ketiga RPJPD sebagai berikut: 1 Kinerja pembangunan sumber daya manusia memiliki capaian yang baik pada akhir periode ketiga. Kota Balikpapan memiliki IPM sebesar 80,71 pada tahun 2021. Capaian tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 80,01 sekaligus peningkatan dari akhir periode kedua. Kinerja ini ditopang derajat kesehatan masyarakat yang meningkat yang ditandai oleh realisasi kinerja angka harapan hidup sebesar 74,76 pada tahun 2021. Selain itu, didukung meningkatnya akses pendidikan yang ditandai dengan kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 10,91 yang telah melampaui dari targetnya pada 2021 sebesar 10,53. Meskipun demikian, kinerja pembangunan sumber daya manusia Kota Balikpapan tersebut belum melampaui kinerja Kota Samarinda yang memiliki IPM sebesar 80,76.

		2 Aspek kesejahteraan masyarakat belum optimal di dalam periode ketiga RPJPD. Angka kemiskinan bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021. Hal ini menjadi persoalan umum terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi kemiskinan pada akhir periode ketiga lebih tinggi dibanding akhir periode kedua, yakni 2,89 pada tahun 2021 dan 2,81 pada tahun 2016. Angka kemiskinan yang fluktuatif selaras dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran bahkan pernah mengalami peningkatan sebelum pandemi, yaitu dari 5,55% pada 2017 menjadi 9,27% pada 2018. Tingkat pengangguran pada akhir periode ketiga lebih tinggi dibanding akhir periode kedua, yakni 8,94% pada 2021 dan 5,95% pada 2016. 3 Kinerja perekonomian Kota Balikpapan bersifat fluktuatif, dan pernah mengalami penurunan sebelum pandemi Covid-19, yakni dari tahun 2016 sebesar 4,92 menjadi 3,84 pada 2017. Penurunan tajam menjadi -0,93 terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Kota Balikpapan mengalami *recovery* cukup signifikan yang ditandai naiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 4,56. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada tahun 2021, yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. 4 Tata kelola pemerintahan memiliki kinerja yang baik ditandai dengan kinerja reformasi birokrasi yang semakin meningkat. Kinerja reformasi birokrasi ditopang dari beberapa aspek yang mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, kualitas pelayanan publik, sistem pengendalian intern dan profesionalitas aparatur. Meskipun demikian, terdapat capaian yang belum sesuai dengan targetnya, yakni SAKIP yang pada 2021 ditarget memiliki nilai 75 dengan kategori BB, namun realisasinya masih 69,28 dengan kategori B. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas manajemen kinerja mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Sumber: Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Balikpapan

Secara keseluruhan, gambaran capaian perekonomian Kota Balikpapan yang disajikan pada tabel diatas belum cukup kuat untuk mencapai daya saing, kemandirian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi, namun juga fluktuasi

perekonomian sebelum pandemi. Capaian tersebut meningkat menjelang akhir periode RPJPD 2005-2025 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Meski demikian, capaian tersebut berdampak kecil terhadap penurunan angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam dengan arah kebijakan yang lebih mengoptimalkan daya saing dan keunggulan Kota Balikpapan sebagai kota industri pengolahan dan perdagangan yang sebenarnya cukup kuat.

Tabel 2. 37 Hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 Berdasarkan Misi Daerah Periode Perencanaan Kedua dan Ketiga (RPJMD Tahap II dan III)

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah konflik masyarakat yang disebabkan isu SARA			0	0	0	0	100%	100%		Koordinasi yang baik antara PD dengan *stakeholder* serta elemen masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas kota Pemanfaatakan TIK dalam mengakses informasi Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerinta dengan partai politik, ormas, serta	- Peningkatan koordinasi antar satakeholder yang terlibat dalam mewujudkan kondusifitas wilayah - Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam mengakses informasi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												elemen maysrakat lainnya	
												Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan stuasi yang kondusif	
	Meningkatnya derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			73,95	74,04	73,96	74,76	100%	100,97 %	Belum meratanya akses terhadap pengetahuan dan informasi terkait penanganan ibu hamil;	Tersedianya puslesmas dan tenaga pendamping di setiap kelurahan;	- Peningkatan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan - Peningkatan kualitas tenaga kesehatan - Optimalisasi kerjasama dengan lembaga pendidikan yang fokus terhadap dunia kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100	100	95,99	97	95,99 %	97,00%	Masih terhambatnya upaya penanganan medis terhadap ibu hamil;	Terdapat rumah sakit khusus ibu dan anak;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		kesehatan ibu hamil											
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			100	100	95,13	97	95,13 %	97,00%	Belum optimalnya akses terhadap pengetahuan dan informasi terkait penanganan bayi;	Aksesibilitas kota yang terjangkau;	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100%	100%	99,17 %	83%	99,17 %	83,00%	Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan;	Tenaga masyarakat yang supportif;	
											Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.	Tersedianya sekolah kejuruan kesehatan.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkanya cakupan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah			10,43	10,53	10,54	10,91	101%	103,61 %	Masih terdapat guru yang belum bersertifikat pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs;	Optimalisasi pelatihan IT;	- Peningkatan dan pemerataan fasilitas layanan pendidikan - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Angka Melek Huruf			98,49	99,5	99,34	100	99,14 %	99,50%	Masih terbatasnya kompetensi guru khususnya dalam bidang pemanfaatan teknologi;	Ketersediaan sekolah swasta yang berkualitas;	
											Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;	Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Belum optimalnya pengelolaan DAPODIK.	Pemberian dukungan terhadap siswa baru di sekolah swasta.	
	Meningkatnya pembinaan terhadap keanekaragaman budaya secara partisipatif	Jumlah budaya dan seni yang berciri khas Kota Balikpapan			14 tarian	N/A	N/A	N/A	-	-			
					14 lagu				-	-			
	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Persentase pemakaian alat kontrasepsi			66	67,5	65,5	70,3	99,24 %	104,15 %	Penolakan penggunaan KB karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama;	Adanya peran penyuluh keluarga berencana yang melibatkan penyuluh agama;	- Optimalisasi peran penyuluh Keluarga Berencana - Optimalisasi KIE kepada masyarakat - Peningkatan dan pemerataan kualitas peelayanan KB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet			15,83 %	14,05 %	15,83 %	14,29 %	100%	102%	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengaturan	Edukasi terhadap calon pasangan pengantin tentang pentingnya program KB;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)									jarak kelahiran anak;		
											Masih terbatasnya ketersediaan layanan;	Optimalisasi KIE kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan KB;	
											Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan KB.	Peningkatan kualitas pelayanan KB.	
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi kepemudaan			65	50	45	N/A	69,23 %	-	Belum efektifnya penerapan regulasi tentang kepemudaan;	Sosialisasi dan penerapan regulasi terkait kepemudaan secara masif;	- Peningkatan kualitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan - Peningkatan kualitas pembinaan terhadap atlet - peningkatan
		Jumlah prestasi olahraga			43	40	27	N/A	62,79 %	-	Belum optimalnya pembinaan atlet;	Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga;	Optimalisasi pembinaan terhadap atlet	ketersediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga
											Belum efektifnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.	Tersusunnya masterplan keolahragaan Kota Balikpapan.	
	Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender			90,1	92	N/A	89,65	-	97,45%	Belum optimalnya penyelesaian penanangan korban kekerasan perempuan dan anak;	Peningkatan kesempatan bagi kelompok perempuan;	- Penguatan regulasi terkait peran perempuan dalam pembangunan - Optimalisasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
		Persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan			35,87	75,01	35,87	75,53	100%	100,69 %	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak;	Implementasi regulasi terkait pelaksanaan PUG dalam pembangunan;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		terhadap perempuan											
		Persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak			34,9	65,15	34,92	N/A	100%	-	Belum optimalnya kelembagaan PUG baik tingkat kota maupun perangkat daerah;	Adanya pedoman penyusunan data pilah gender;	
		Jumlah kebijakan yang responsif gender menduku ng pemberda yaan perempua n			1	1	1	1	100%	100%	Belum tersedianya data pilah gender;	Terbentuknya UPT perlindungan perempuan dan anak;	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah			30	30	22,22	20	74,07 %	66,67%	Belum optimalnya keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif.	Terbentuknya seksi perlindungan perempuan dan anak di tingkat RT.	
	Menurunnya angka penganggura n	Tingkat Pengangg uran Terbuka			6	4,6	5,95	8,94	100,83 %	5,65%	Keterbatasan lapangan kerja;	Terdapat banyak perusahaan untu penyaluran tenaga kerja;	- Penguatan kualitas SDM/lembaga pelatihan tenaga kerja -Peningkatan dan pemetaan kebutuhan lapangan kerja
											Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja;	Penguatan SDM pemberi pelatihan tenaga kerja	
											Belum optimalnya pelaksanaan program magang;	Penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi dan kebutuhan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Belum optimalnya pembinaan terhadap para pencari kerja;	Pemetaan kebutuhan lapangan kerja	
											Belum optimalnya pemanfaatan sistem pemetaan angkatan kerja.	Optimalisasi pembinaan terhadap angkatan kerja.	
	Menurunnya angka penduduk miskin	Persentase penduduk miskin			2,35	2,3	2,81	2,89	74,35 %	80,42%	Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah;	Optimalisasi implementasi regulasi tentang penanggulangan kemiskinan	-Optimalisai peran stakeholder dalam penanganan kemiskinan -Peningkatan koordinasi dalam penanganan kemiskinan
											Belum optimalnya pendataan	Adanya SOP terkait verifikasi dan validasi DTKS	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											dan verivali DTKS.		
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah wahana sosial berbasis masyarakat (WKBSM)			15 kelompok	N/A	N/A	N/A	-	-			
Misi 2 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai	Meningkatnya jaringan perhubungan darat, laut dan udara yang terintegrasi baik di lingkungan internal Kota Balikpapan maupun yang menghubungkan Kota Balikpapan	Persentase Kemantapan Jalan			66,97 %	81,14 %	96,28 %	85,11 %	143,77 %	104,89 %	-	Tersedianya data terkait informasi jalan dan jembatan yang akurat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu Adanya Pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan	-Penyediaan data akurat mengenai jalan dan jembatan harus terus dilaksanakan -Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan perlu untuk terus dilaksanakan secara berkala untuk memastikan terjaganya kualitas jalan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	dan sekitarnya											sebagai infrastruktur pendukung bagi pembangunan kota Balikpapan.	dan jembatan - Optimalisasi penyediaan kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan -Optimalisasi penyediaan infrastruktur pendukung lainnya
												Pengembangan pelabuhan sebagai sarana perhubungan laut	
												Adanya dukungan dari pemerintah Pusat mengembangkan kawasan industri Kariangau	
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah			4,43 %	4,17%	4,56%	2,76%	97,07 %	133,81 %	Tingginya *backlog* perumahan	Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sistem drainase di kawasan permukiman kumuh	- Peningkatan pencegahan dan penangan kawasan kumuh - Optimalisasi fasilitasi penyediaan rumah layak huni
											Adanya migrasi yang tidak diimbangi	Adanya penataan ruang seperti pembangunan taman	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											dengan penyediaan lahan untuk perumahan		
											Terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati suatu rumah untuk lebih dari satu keluarga		
	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan distribusi penyediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Minum			77,00 %	80,80 %	78,40 %	98,21 %	101,82 %	12,.55 %	Penurunan kualitas air permukaan, dan fluktuasi terhadap eksploitasi air tanah	Pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang tepat dalam penyediaan data dan informasi yang valid terkait kondisi pemerataan cakupan air minum	-Penyediaan air minum tidak hanya diarahkan pada air minum layak tetapi juga air minum yang aman-optimalisasi layanan PDAM

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											Pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh pelaku usaha	Adanya strategi mewujudkan clean air dengan kebijakan penurunan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan	
											konversi lahan resapan air menjadi lahan terbangun	Adanya perpindahan dari sumur bor ke air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air	
	Meningkatnya Sumberdaya Energi yang ramah lingkungan	Rasio Elektrifikasi			N/A	N/A	N/A	100	-	-	Sasaran ini belum dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam dokumen RPJMD. Lebih dari	-	-Pada periode perencanaan selanjutnya, penentuan sasaran harus disertai dengan indikator sasaran dan definisi
		Rasio Ketersediaan daya listrik (Kilowatt)			N/A	N/A	435,5	N/A	-	-		-	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											itu, sejak diterbitkannya UU 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota terhadap urusan ESDM semakin terbatas.		operasional yang jelas
	Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang			85%	99%	98%	99%	115%	100%	Masih adanya pembangunan di kawasan hijau	Adanya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen tata ruang Adanya strategi dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang	- Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang - Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												dilakukan pemerintah dengan baik	
												Peningkatan Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Lingkungan	
	Meningkatnya Sanitasi Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			97,15 %	97,00 %	93,00 %	96,79 %	95,73 %	99,78%	Buruknya sanitasi di wilayah padat penduduk	Adanya pengembangan sarana sanitasi IPAL komunal dan sanitasi individu	-Peningkatan penyediaan sanitasi layak dan aman -Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sanitasi layak dan aman
											Adanya penolakan karena pola pikir masyarakat tentang IPAL yang nantinya akan	Adanya hibah dalam pelaksanaan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											mengeluarkan bau		
											Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi	Dilakukannya sosialisasi berkesinambungan akhirnya masyarakat sadar akan pentingnya sanitasi di lingkungan	
Misi 3: Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berkelanjutan	Mempertahankan pola ruang 52% hijau dan 48% budidaya	Perda Tata Ruang			N/A	3	N/A	2	-	66,67%	Belum merealisasikan regulasi terkait insentif dan disinsentif Belum menerapkan konsep kota ekologis secara utuh Belum adanya pembaruan		- Pembuatan regulasi terkait insentif dan disinsentif - Penerapan konsep kota ekologis secara lebih holistik - Pembaruan data peta tata ruang - Memperket kebijakan alih fungsi lahan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											data peta tata ruang Adanya alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif		
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota	Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang			90%	98.50 %	90%	99%	100%	100,51 %		Pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan telah berjalan secara tertib dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan	- Peningkatan pemanfaatan ruang secara lebih tertib dan berkelanjutan - Peningkatan pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW - Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mendukung keamanan, ketenteraman, dan ketertiban
		Penurunan Angka Kriminalitas			N/A	17%	N/A	18,50 %	-	108,82 %		Pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam RTRW mengenai ketersediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												dan Kawasan Budidaya	umum - Peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan politik masyarakat melalui sosialisasi, diskusi, dsb.
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			62.50 %	100%	90%	88.62 %	144%	88,62%		Pentingnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum	
		Tingkat Waktu Tanggap			N/A	98.63	N/A	92.86	-	94,15%		Kesadaran politik masyarakat telah meningkat	
		Angka Partisipasi Pemilu			70%	65%	70%	82%	100%	126%			
	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	Indeks Liveable City (Indeks Kota			71.12	74.5	N/A	78.48	-	105,34 %	Masih terbatasnya data berdasarkan nama dan	Optimalisasi penyediaan hunian yang layak	- Peningkatan penyediaan Rumah Layak Huni dan pendataan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Layak Huni)									alamat dari Rumah Tidak Layak Huni serta kawasan permukiman kumuh		Rumah Tidak Layak Kuni - Pembebasan lahan dan pembangunan embung - Peningkatan ketersediaan sarana pengolahan air limbah terpusat - Peningkatan lahan TPA
											Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung	Tersusunnya Rencana Pemenuhan Air Baku Regional	
											Keterbatasan sarana pengolahan air limbah terpusat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman	Meningkatnya penyediaan air bersih	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA			80%	60.91 %	63.02 %	74.85 %	78,78 %	122,89 %	Terbatasnya lahan TPA	Meningkatnya penyediaan listrik.	
												Meningkatnya penyediaan sanitasi lingkungan	
												Pengelolaan sampah terpadu dimulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah	
	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			58.58	60.46	62.45	69.66	106,61 %	115,22 %	Pengupasan lahan yang tidak terkendali	Koordinasi pendampingan teknis dan pendampingan lintas OPD disetiap	- Peningkatan koordinasi pendampingan teknis dan pendampingan lintas OPD

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												permohonan izin investasi	- Penindakan terhadap usaha ilegal di daerah aliran sungai - Peningkatan kapasitas drainase - Peningkatan kualitas air sungai dan laut; udara; dan tutupan lahan
											Usaha ilegal di daerah aliran sungai	Perbaikan dan peningkatan kualitas air sungai	
											Berkurangnya kapasitas drainase	Perbaikan dan peningkatan kualitas air laut	
												Perbaikan dan peningkatan kualitas udara	
												Perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan	
Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatnya potensi ekonomi yang berbasis masyarakat	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)	7,24	N/A	0,98	N/A	0,98	0,99	100%	-	a. Semakin menurunnya luas lahan pertanian;b. Menurunnya produksi pertanian;c. Produksi dan	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik.	-Peningkatan produksi dan pemasaran produk UKM'-Fasilitasi modal dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan
		Jumlah usaha	5.374	N/A	15.145	N/A	18.025	40.689	119%	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		mikro dan kecil (Unit)									pemasaran produk UKM belum optimal;d. Kualitas SDM pengelola, modal dan inovasi koperasi belum optimal.		UKM'-Penerapan inovasi dalam koperasi dan UKM
		Persentase koperasi yang aktif (Persen)	61,63	80,9	78,7	80,9	77,22	87,86	98%	109%			
	Berkembangnya ekonomi riil masyarakat yang inovatif dan kreatif	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (Persen)	-10,98	N/A	47,94	N/A	47,53	46,63	99%	-	a. Nilai produksi dan pemasaran produk perindustrian belum optimal; b. Daya tarik destinasi wisata, pemasaran dan pengembangan kerjasama	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik; b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan; c. Semakin mudahnya akses distribusi barang pokok dan barang	-Peningkatan nilai produksi dan pemasaranan produk perindustrian -Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui kerjasama
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Persen)	17,86	N/A	12,44 Triliyun	N/A	8,78	9,22	-	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Kontribusi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya terhadap PDRB (Persen)	71,78	N/A	N/A	N/A	6,88	7,31	-	-	pariwisata masih perlu ditingkatkan.	penting; d. Pembangunan perkotaan yang semakin mengarah ke sektor jasa.	
		Kunjungan wisatawan (orang)	381.262	2.488.535	468.298	2.488.535	2.253.943	1.082.273	481%	43%			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap	8,97	N/A	N/A	N/A	0,0176	0,0175	-	-			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		PDRB (Persen)											
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daera	Nilai investasi (Rp Triliyun)	9.210,74 (Miliar)	N/A	25	N/A	0,5	1,9	2%	N/A	a. Kapasitas produksi dan pemasaran produk non-migas perlu ditingkatkan; b. Identifikasi investasi dan promosi investasi perlu ditingkatkan.	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik; b. Peningkatan kondusivitas investasi; c. Pembangunan perkotaan yang semakin mengarah ke sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.	-Identifikasi potensi investasi daerah -Pelayanan perizinan berbasis TIK dan terintegrasi
		Nilai PDRB Non-migas (Rp Triliyun)	N/A	38,62	99,97	38,62	34,12	38,62	34%	100%			
	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Daerah dan terpenuhinya kebutuhan teknologi aplikatif	PDRB perkapita (Rp Juta)	99,92	126,64	N/A	126,64	80,2	111,31	-	88%	a. Nilai produksi dan pemasaran produk perindustrian belum optimal; b. Pengembang	a. Perkembangan TIK dalam perekonomian berjalan dengan baik.	-Pengembangan sektor-sektor potensial dan unggulan ekonomi daerah

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											an sektor perindustrian (IKM), perdagangan, pariwisata, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan.		
Misi 5 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata pemerintahan yang Baik	Menata kelembagaan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			79,36	80,36	79,36	82,5	100,00 %	102,66 %	Penggunaan pelayanan daring oleh masyarakat belum optimal;	Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik sudah berjalan	-Pemanfaatan TIK dan inovasi dalam pelayanan publik -Integrasi pelayanan publik -Sosialisasi bentuk pelayanan publik baru kepada masyarakat
											Adanya perubahan peraturan;	Implementasi inovasi dalam pelayanan publik	
											Belum seluruh pelayanan terintegrasi secara online		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Daerah			B (65-67)	BB (75)	B (60,85)	B (69,28)	90,82 %	92,37%	Kinerja PD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)	Cascading kinerja sudah dilakukan sampai pada level organisasi terkecil	-Perumusan indikator kinerja yang SMART-C -Peningkatan kualitas laporan melalui analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap faktor-faktor yang penghambat dan pendorong kinerja -Penyusunan pohon kinerja dan peta proses bisnis
											Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART-	Pemetaan crosscutting lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan	
											Penjabaran kinerja belum dilakukan secara baik sampai ke PD		
											Kualitas penyusunan laporan belum baik	Pemerintah daerah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
											Belum menggunakan hasil evaluasi		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											kinerja sebagai bahan perbaikkan kinerja		
	Meningkatnya kualitas kemitraan antar daerah, lembaga dan kerja sama luar negeri	Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti			N/A	100	N/A	88	-	88,00%	Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah kota dengan pusat maupun provinsi		Peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pembangunan daerah
											Belum optimalnya kerjasama dengan pihak swasta		
	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pemerintah Kota	Indek Profesionalitas ASN			82	87	83,43	92,05	101,74 %	105,80 %	Integrasi data kepegawaian belum optimal;	Pengawasan internal tingkat daerah sudah baik	-Peningkatan integrasi data kepegawaian -Peningkatan sistem reward dan punihsman -Pelaksanaan sistem merit
											Tingkat kedisiplinan pegawai	Adanya kebijakan Pemda terkait	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											belum optimal;	reward bagi pegawai teladan	
											Sistem pengukuran kedisiplinan belum dilakukan secara integratif;		
											Pengawasan tingkat PD belum optimal;		
											Belum optimalnya perencanaan kebutuhan ASN;		
											Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit		
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %	Menurunya penerimaan pajak dan retribusi	Ketaatan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %	daerah karena covid-19	Pengelolaan aset daerah sesuai standar	PAD potensial dan unggulan - Mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui			90%	90%	90%	90%	100,00 %	100,00 %		Pengendalian internal sudah optimal	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Persentase PAD terhadap APBD			N/A	24%	N/A	31%	-	133,45 %			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Keluraha n			70%	65%	70%	60%	100,00 %	92,31%	Keberlanjutan usulan masyarakat tidak optimal	Seluruh PD sudah banyak memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-Integrasi aplikasi pelayanan publik -Peningkatan sistem aduan masyarakat
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetah			N/A	80	N/A	80	-	100,00 %	Integrasi aplikasi belum optimal		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		ui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota											
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			N/A	80	N/A	80	-	100,00 %	Pengelolaan aduan masyarakat belum optimal	Layanan publik dan internet yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Indeks Persepsi Korupsi			6,62	6,9	6,62	7,18	100,00 %	104,06 %		Melakukan Self Assessment secara berkala	-Penerapan pengendalian internal yang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan terhadap sasaran pokok RPJPD Kota Balikpapan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja		Usulan Tindak Lanjut
					2016	2021	2016	2021	2016	2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Tingkat Kapabilitas APIP			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	100,00 %	100,00 %		Melakukan penilaian efektifitas manajemen resiko pemerintah daerah	efektif -Setiap evalauasi pengendalian didokumentasi secara memadai
		Maturitas SPIP			N/A	Level 3	Level 2	Level 3	100,00 %	100,00 %			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									104,10 %	97,03 %			
Predikat									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Rata-rata tingkat pencapaian kinerja misi periode kedua RPJPD secara kuantitatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja misi periode ketiga. Capaian ini konsisten dengan temuan penilaian kualitatif yang dibahas pada bagian sebelumnya. Capaian kinerja makro daerah pada periode kedua lebih baik ketimbang periode ketiga jika dilihat dari capaian aspek pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan. Dinamika capaian ini perlu dilihat secara kontekstual mengingat setiap periode menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang diinginkan, seperti pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja seluruh periode RPJPD termasuk dalam predikat sangat tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan telah berjalan dengan optimal.

Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 juga menitikberatkan pada beberapa rekomendasi yang disusun berdasarkan capaian kinerja makro, arah kebijakan dan sasaran pokok, serta analisis faktor pendorong dan penghambat dari setiap sasaran pokok. Perumusan perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pada periode 2025-2045 dapat ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang meliputi aspek teknis hingga substansi perencanaan.

Rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi aspek substansi perencanaan terkait upaya peningkatan kinerja pembangunan di masa depan, yaitu:
    - Penguatan dan transformasi struktur perekonomian Kota Balikpapan. Struktur perekonomian perlu transformasi atau setidaknya mengurangi ketergantungan secara bertahap dari industri pengolahan yang terkait migas. Sektor-sektor perekonomian harus didorong agar semakin dapat diakses dan memberi manfaat bagi masyarakat. Adanya proyek strategis nasional dan provinsi berupa Kawasan Industri Kariangau selain diberikan dukungan berupa infrastruktur, juga perlu advokasi dan penyiapan tenaga kerja agar masyarakat dapat mengakses dan menerima manfaat. Pada tahap berikutnya, sektor perekonomian misalnya UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan inovasi dan perluasan akses pasar. Struktur perekonomian yang

berbasis masyarakat juga diperlukan agar masyarakat tidak tereksklusi dengan kemungkinan Kota Balikpapan yang semakin tumbuh seiring rencana perpindahan Ibukota Negara (IKN). Dengan demikian, fokus pembangunan jangka panjang ke depan dapat meneruskan misi pembangunan perekonomian sebelumnya yang belum optimal terwujud, yakni mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

- Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian untuk mendorong kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa, dan infrastruktur pendukung pembangunan kawasan strategis nasional.
- Penguatan Kota Balikpapan sebagai kota layak huni melalui optimalisasi penyediaan jaringan sarana dan prasarana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelestarian lingkungan hidup. Perkembangan Kota Balikpapan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Capaian pembangunan sumber daya manusia yang telah baik perlu ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
- Kota Balikpapan yang semakin tumbuh perlu merespon problematika sosial dan meningkatkan pembangunan inklusif. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui kesiapan SDM angkatan kerja, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang masif, serta dibutuhkan perluasan akses infrastruktur pelayanan dasar.
- Kota Balikpapan menghadapi berbagai bencana dan potensi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, membutuhkan penurunan risiko bencana melalui peningkatan infrastruktur pengendali bencana, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lincah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini untuk merespon

tren masa depan dan kebijakan nasional aktual. Tata kelola pemerintahan yang lincah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tata kelola diperlukan prasyarat berupa sinergi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat.

- Capaian pembangunan jangka panjang kemudian dielaborasi dengan respon kebijakan aktual, yaitu peningkatan kesiapan Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai pintu gerbang IKN. Kesiapan yang komprehensif mulai dari aspek kesiapan sumber daya manusia, sektor perekonomian, infrastruktur pendukung perekonomian, lingkungan hidup, tata ruang, dan dukungan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Rekomendasi aspek teknis perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RPJPD periode 2025-2045, yaitu:
   - Penyusunan dokumen RPJPD yang memadukan pendekatan *problem based* berbasis hasil evaluasi dengan *vision based* berupa analisis kebijakan nasional dan provinsi, isu aktual, serta kemungkinan tren pada masa depan.
   - Perumusan sasaran pokok dan indikator sasaran pokok di dalam RPJPD yang mampu menunjukkan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama 20 tahun. Indikator sasaran pokok memiliki sifat *impact/final outcome*.
   - Perumusan arah kebijakan yang berbasis kebutuhan pembanguan setiap periode dengan memerhatikan konsepsi perkembangan pembangunan, antara lain mulai dari peningkatan akses, kualitas, daya saing, dan memperkokoh capaian pembangunan.
   - Penerjemahan secara cermat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD ke dalam RPJMD, serta dari RPJMD ke dalam RKPD.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik

Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Kota Balikpapan dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk tahun 2020-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang

selanjutnya disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen Kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Hasil proyeksi penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2020-2035 yang telah dipublikasikan oleh BPS, kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2036-2045. Proyeksi penduduk untuk tahun 2036-2045 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Spectrum yang dikembangkan oleh Avenir Health. Hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini adalah proyeksi penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 – 2045 melalui modul DemProj (*Demography Project*) serta dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk melalui modul RAPID (*Resources for the Awarness of Popolation Impacts on Development*). Pembahasan terkait proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama dua puluh tahun mendatang diulas secara detil dan mendalam pada subbab selanjutnya.

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

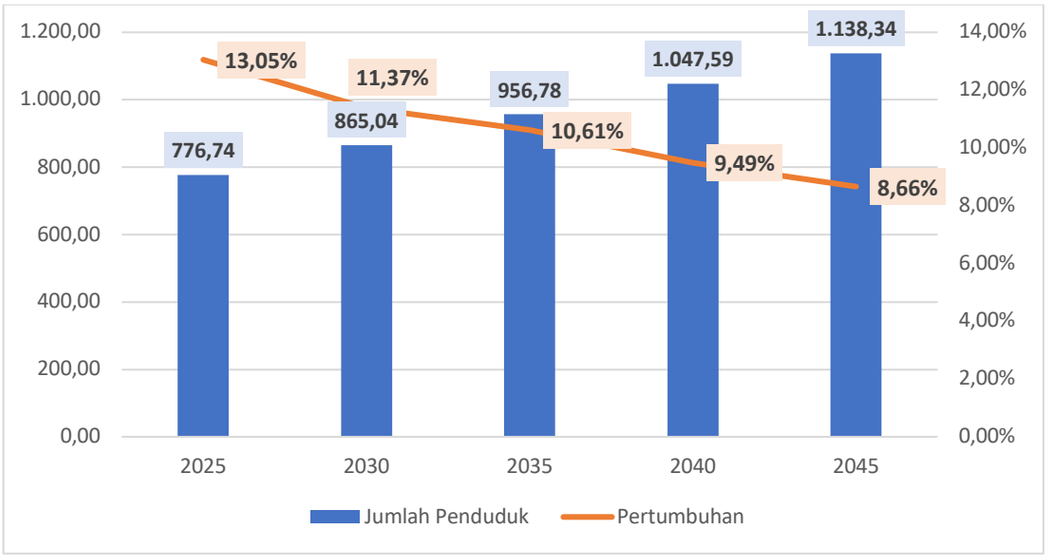
Proyeksi demografi Kota Balikpapan difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju kependudukan, seperti menganalisis data penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, pendudukan usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Adapun hasil proyeksi kependudukan dijabarkan sebagai berikut:

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Kota Balikpapan tahun 2020 sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun

hasil proyeksi demografi Kota Balikpapan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 61 Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022, diolah.

Berdasarkan grafik pertumbuhan penduduk diatas dapat dilihat bahwa Proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan tahun 2025–2045 menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang konsisten, namun dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk diproyeksikan meningkat dari 776,74 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.138,34 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2025, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 13,05%. Angka ini menurun menjadi 11,37% pada tahun 2030, 10,61% pada tahun 2035, 9,49% pada tahun 2040, dan diproyeksikan turun lagi menjadi 8,66% pada tahun 2045. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk terus bertambah setiap lima tahun, laju pertumbuhan penduduk Balikpapan diperkirakan akan terus melambat hingga tahun 2045. Hal ini dapat mengindikasikan adanya transisi demografi, di mana pertumbuhan penduduk mulai stabil seiring waktu.

Tabel 2. 38 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Balikpapan Selatan	144,72	163,613	182,212	201,536	220,663	239,781
2	Balikpapan Kota	82,66	93,451	104,074	115,112	126,037	136,956
3	Balikpapan Timur	90,11	101,874	113,454	125,487	137,396	149,299
4	Balikpapan Utara	168,84	190,882	212,580	235,126	257,441	279,744
5	Balikpapan Tengah	106,74	120,675	134,393	148,646	162,753	176,853
6	Balikpapan Barat	93,98	106,249	118,327	130,876	143,297	155,712
KOTA BALIKPAPAN		**687,06**	**776,74**	**865,04**	**956,78**	**1.047,59**	**1.138,34**

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022, diolah.

Berdasarkan tabel diatas, penduduk paling banyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu sebanyak 284 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 27,17 persen dari total penduduk. Sementara kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu sebanyak 89 ribu jiwa dengan proporsi sebesar 10,14 persen dari total penduduk. Rata-rata proporsi persebaran penduduk tiap kecamatan secara berurutan dari yang tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara (27,15 persen), diikuti Kecamatan Balikpapan Selatan (22,01 Persen), Kecamatan Balikpapan Timur (15,48 persen), Kecamatan Balikpapan Tengah (12,84 persen), Kecamatan Balikpapan Barat (12,38 persen), dan Kecamatan Balikpapan Kota (10,13 persen). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk Kota Balikpapan ke depan relatif merata dan tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Pola kependudukan mengalami perubahan mendasar, terutama di Kecamatan Balikpapan Barat. Pada tahun 2020, secara absolut jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Namun, memasuki tahun 2045 diproyeksikan terjadi pergeseran pola persebaran penduduk yakni jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat akan lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Berbeda halnya jika pola kependudukan Kecamatan Balikpapan Barat dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Barat lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur. Namun, pada tahun 2045 diproyeksikan

jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Timur akan lebih banyak dibandingkan Kecamatan Balikpapan Barat. Meskipun demikian, dari sisi laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Balikpapan Barat akan lebih tinggi, yaitu sebesar 1,14 persen, sedangkan laju pertumbuhan Kecamatan Balikpapan Timur hanya sebesar 0,47 persen. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis Kecamatan Balikpapan Barat yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga diproyeksikan aktivitas dan mobilitas masyarakat akan tinggi ke depannya.

2.6.1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Dengan adanya gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin maka proses perumusan kebijakan akan lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun hasil proyeksi penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	KECAMATAN	Tahun 2020			Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam Ribuan)														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Balikpapan Selatan	74,19	70,53	144,72	82,78	80,83	163,61	91,5	90,71	182,21	100,53	101,01	201,54	109,53	111,14	220,66	118,59	121,19	239,78
2	Balikpapan Kota	42,14	40,52	82,66	47,29	46,16	93,45	52,35	51,72	104,07	57,54	57,58	115,11	62,64	63,4	126,04	67,67	69,28	136,96
3	Balikpapan Timur	46,58	43,53	90,11	52,21	49,66	101,87	57,93	55,53	113,45	63,86	61,63	125,49	69,91	67,49	137,4	76,04	73,25	149,3
4	Balikpapan Utara	86,39	82,45	168,84	97,1	93,78	190,88	107,57	105,01	212,58	118,51	116,61	235,13	129,46	127,98	257,44	140,56	139,18	279,74
5	Balikpapan Tengah	54,23	52,51	106,74	61,78	58,9	120,68	68,41	65,98	134,39	75,06	73,59	148,65	81,38	81,37	162,75	87,56	89,29	176,85
6	Balikpapan Barat	48,63	45,35	93,98	54,84	51,41	106,25	60,99	57,33	118,33	67,29	63,59	130,88	73,49	69,8	143,30	79,65	76,07	155,71
KOTA BALIKPAPAN		**352,165**	**334,885**	**687,050**	**396,001**	**380,743**	**776,744**	**438,762**	**426,278**	**865,040**	**482,784**	**473,999**	**956,783**	**526,403**	**521,184**	**1047,587**	**570,074**	**568,271**	**1138,345**

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022, diolah.

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan ke depannya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 10,08 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki hanya sebesar 8,27 persen. Dari sisi rasio jenis kelamin menunjukkan trend penurunan dan mengarah pada keseimbangan antara penduduk laki-laki dengan perempuan Kota Balikpapan ke depan. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan berpengaruhi terhadap kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2.6.1.3 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan

Sebagai kota besar dan menjadi salah satu mitra IKN, Kota Balikpapan memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan (Jiwa/Km2)

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Balikpapan Selatan	38,81	3.729,1	4.215,74	4.694,97	4.694,97	4.694,97	4.694,97
2	Balikpapan Kota	11,1	7.447,0	8.419,03	9.376,06	10.370,45	11.354,66	12.338,37
3	Balikpapan Timur	119,16	756,2	854,93	952,12	1.053,10	1.153,04	1.252,93
4	Balikpapan Utara	138,24	1.221,4	1.380,80	1.537,76	1.700,85	1.862,27	2.023,61
5	Balikpapan Tengah	10,83	9.855,8	11.142,64	12.409,29	13.725,36	15.027,97	16.329,92
6	Balikpapan Barat	192,88	487,3	550,86	613,47	678,54	742,93	807,30
KOTA BALIKPAPAN		**511,02**	**1.344,5**	**1.419,6**	**1.520,01**	**1.692,80**	**1.872,33**	**2.050,02**

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022, diolah.

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Balikpapan terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk aksisting saat ini. Dari 6 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan disebabkan oleh wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Kota, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Balikpapan. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Balikpapan Barat.

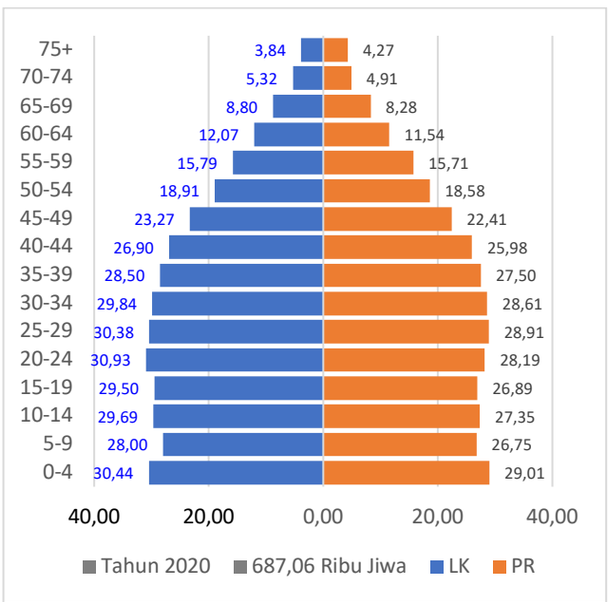
Dalam konteks perkotaan, pertambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kota Balikpapan. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni.

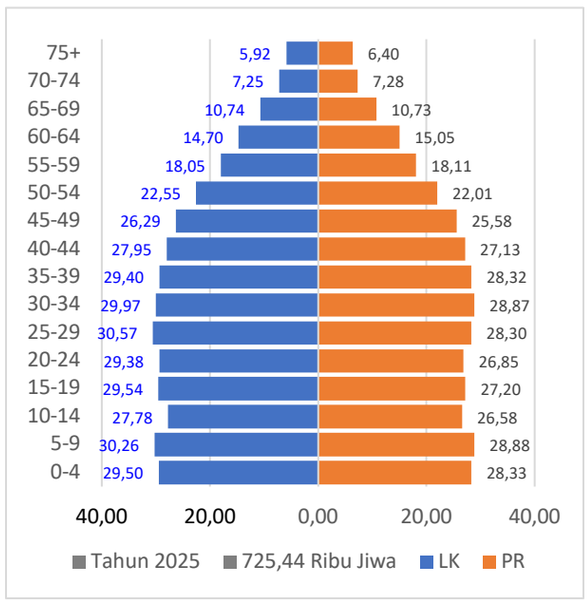
2.6.1.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

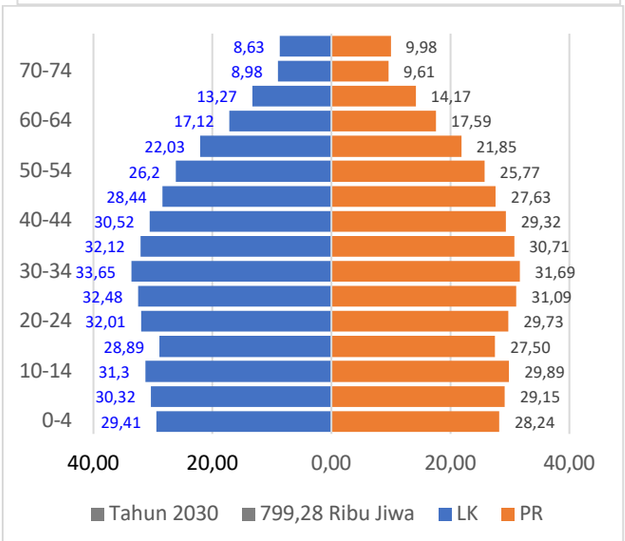
Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondis pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk

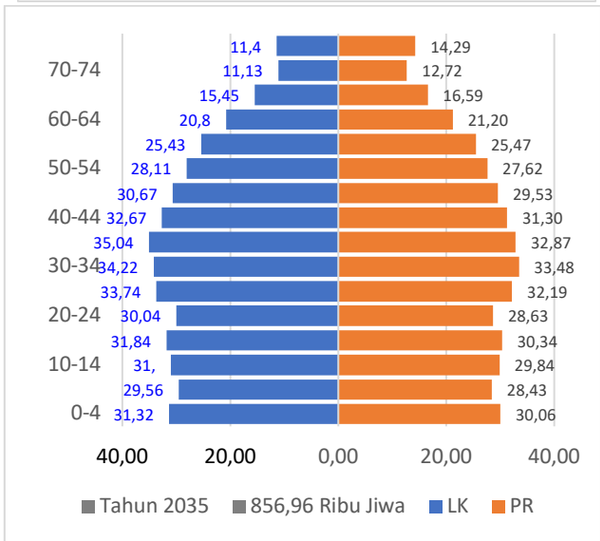
dengan rentan usia 15-64, sedangkan penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentang usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65-keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kota Balikpapan.

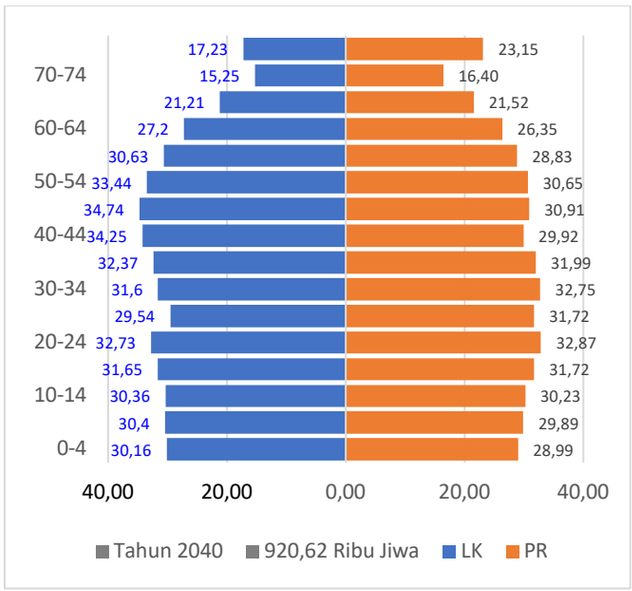
Gambar 2. 62 Proyeksi Piramida Penduduk Kota Balikpapan (Dalam Ribuan)

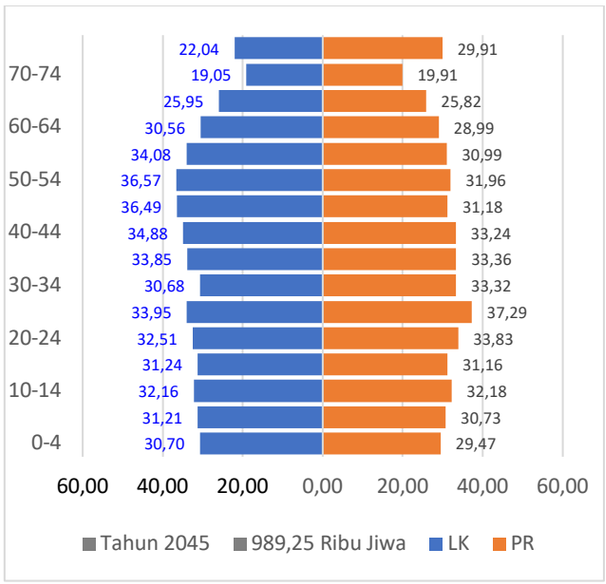












Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 171,33 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 178,31 ribu jiwa dan 180,21 ribu jiwa pada tahun 2030 hingga 2035. Namun pada tahun 2040, diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 180,02 ribu jiwa atau menurun sebesar 0,10 persen dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2045 menjadi 186,45 ribu jiwa. Meskipun demikian, laju pertumbuhannya lambat dan fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun.

Saat ini proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 24,92 persen dari total populasi pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2045, diproyeksikan proporsi penduduk usia tersebut mengalami penurunan dari total populasi. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan setiap periode dan pada tahun 2045 memiliki proporsi dari total populasi yaitu hanya sebesar 18,85 persen. Dari sisi laju pertumbuhan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi mengalami penurunan dan proporsi penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2040, yaitu sebesar 7,01 persen, sedangkan proporsi penurunan yang paling rendah terjadi pada 2045, yaitu hanya 3,61 persen.

Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 480,41 ribu jiwa, meningkat menjadi 660,12 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun demikian, laju

pertumbuhannya mengalami penurunan setiap periode. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan proporsi terhadap total populasi penduduk usia tersebut sebesar 0,28 persen dan diproyeksi menurun sebesar 0,18 persen pada tahun 2045. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan penduduk umur 0-14 tahun karena diproyeksikan TFR Kota Balikpapan diangka 2. Dengan kata lain, rata-rata kelahiran anak di Kota Balikpapan hanya 2 anak yang berpengaruh terhadap pola kependudukannya.

Berbeda halnya dengan penduduk umur 65 tahun ke atas, yang penduduknya dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun demikian, proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 5,16 persen pada tahun 2020 menjadi 14,42 persen pada tahun 2045. Hal yang sama juga terjadi pada laju pertumbuhannya, menunjukkan trend peningkatan signifikan setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,28 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2020 sebanyak 35,42 ribu jiwa meningkat menjadi 142,68 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kota Balikpapan ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan mereka.

2.6.1.5 Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertility dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 59,03 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikasi menjadi 202,23 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 28,05 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi

lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

2.6.1.6 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/sederajat, dan penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/Sederajat. Secara keseluruhan penduduk usia sekolah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 1,77 persen. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,22 persen. Namun, kembali naik sebesar 4,10 persen pada tahun 2030. Pada tahun 2035 laju pertumbuhannya berjalan lambat, yaitu hanya sebesar 0,85 persen dan terus perlambatan hingga pada tahun 2040, yaitu tumbuh hanya sebesar 0,63 persen. Namun pada tahun 2045 terjadi laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3,50 persen.

Penduduk usia sekolah PAUD menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang masuk PAUD sebesar 0,59 persen dan menurun sebesar 2,98 persen pada tahun 2030. Selanjutnya, pada tahun 2035 hingga 2040 kembali meningkat secara kontinu masing-masing sebesar 1,84 persen dan 2,65 persen. Namun, pada tahun 2045 laju pertumbuhannya melambat, yaitu hanya sebesar 1,75 persen.

Penduduk usia sekolah yang masuk SD/Sederajat menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2025, penduduk usia sekolah yang masuk SD/Sederajat sebesar 0,54 persen dan pada tahun 2030 meningkat drastis sebesar 11,09 persen. Namun, pada tahun 2035, terjadi penurunan sebesar -4,65 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2040 dan 2045 dengan masing-masing sebesar 1,87 persen dan 4,95 persen.

Berbeda halnya dengan penduduk usia sekolah masuk SMP yang menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung meningkat. Namun pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar -3,65 persen. Selanjutnya, pada tahun 2030, laju pertumbuhan penduduk usia tersebut kembali naik sebesar 7,46 persen dan terus naik hingga tahun 2035 sebesar 10,22 persen. Namun pada tahun 2040 terjadi penurunan yaitu sebesar -5,82 persen. Sementara pada

tahun 2045 penduduk usia sekolah tersebut kembali naik, sebesar 4,57 persen.

2.6.1.7 Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Tabel 2. 41 Proyeksi Rasio Ketergantungan (persen) Kota Balikpapan

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen) Kota Balikpapan					
	Tahun 2020	2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	24,92	23,62	22,31	21,03	19,55	18,85
Umur 15-64	69,92	69,72	69,60	69,45	67,98	66,73
Umur 65+	5,16	6,66	8,09	9,52	12,46	14,42
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Dependency Ratio	**43,02**	**43,42**	**43,67**	**43,98**	**47,10**	**49,86**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Rasio ketergantungan Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 43,02 persen dan meningkat menjadi 49,86 pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 43 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung bebas 49-50 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah

karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kota Balikpapan tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Kota Balikpapan saat ini memiliki peluang bonus demografi dan puncaknya berakhir pada tahun 2035. Artinya dari tahun 2020 hingga 2035, Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Memasukki periode 2040 hingga 2045, Kota Balikpapan tidak memiliki bonus demografi lagi karena penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak peroduktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

2.6.2 **Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih serta penanganan akan timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Kota Balikpapan. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk dan hasil proyeksinya, standar minimal kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, dan standar kebutuhan ruang untuk masing-masing sarana prasarana. Berbagai kebutuhan sarana prasarana tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

2.6.2.1 Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana menjadi hal yang vital dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang menunjang

pendidikan salah satunya adalah gedung sekolah dan tenaga pendidik. Kebutuhan sarana prasarana pendidikan bergantung pada hasil proyeksi anak usia sekolah yang berimplikasi terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil proyeksi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah PAUD hingga SMP di Kota Balikpapan pada Tahun 2020-2045 (Ribu Jiwa)

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	17,30	14,48	7,45	17,60	14,50	7,33	17,49	16,56	8,13	18,21	16,08	9,19	19,13	16,62	8,83	19,96	17,66	9,40
2	Balikpapan Kota	8,89	7,31	3,78	8,65	7,13	3,38	7,39	7,12	3,25	6,41	6,18	3,21	5,34	5,80	2,72	4,04	5,66	2,57
3	Balikpapan Timur	11,79	9,20	4,60	12,74	9,91	4,70	14,11	11,87	5,47	16,27	11,93	6,40	18,83	12,63	6,33	21,56	13,65	6,90
4	Balikpapan Utara	20,77	16,90	8,56	21,37	17,35	8,49	22,20	20,15	9,58	24,16	19,82	10,95	26,52	20,68	10,64	28,93	22,10	11,42
5	Balikpapan Tengah	11,70	9,80	5,05	11,01	9,35	4,56	8,91	9,31	4,36	7,36	8,24	4,38	5,63	7,88	3,79	3,56	7,85	3,65
6	Balikpapan Barat	10,98	9,21	4,74	10,54	9,02	4,46	9,36	9,70	4,60	8,53	9,00	4,88	7,63	8,97	4,44	6,48	9,26	4,49
KOTA BALIKPAPAN		81,43	66,90	34,18	81,91	67,26	32,93	79,47	74,72	35,39	80,93	71,25	39,01	83,08	72,58	36,74	84,53	76,17	38,42

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi anak usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang berbeda. Anak usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kelompok dengan jumlah tertinggi pada kondisi eksisting tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2045. Jumlah anak usia sekolah dari jenjang pendidikan PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama sederajat (SMP) mengalami penurunan. Hal tersebut karena tidak semua anak yang menempuh PAUD melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah mengindikasikan adanya permasalahan pada urusan pendidikan, seperti sulitnya akses pendidikan. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Balikpapan karena pendidikan menjadi salah satu fondasi awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, mengingat Kota Balikpapan terus mengalami penurunan persentase penduduk yang berusia 0-15 tahun, maka sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan agar tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.

Proyeksi jumlah anak usia sekolah hingga tahun 2045 secara umum mengalami fluktuasi, kecuali di Kecamatan Balikpapan Utara yang secara konsisten mengalami peningkatan dan sebaliknya Kecamatan Balikpapan Kota terus mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa terdapat penurunan jumlah kelahiran dan migrasi masuk pada usia anak sekolah di Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga turut serta mengakibatkan penurunan jumlah anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan selama dua puluh tahun ke depan. Kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Balikpapan Utara yang terus mengalami peningkatan angka kelahiran dan migrasi masuk, sehingga linier dengan jumlah anak usia sekolah yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan yang berbeda harus diambil oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara karena adanya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin tinggi selama dua puluh tahun kedepan. Empat kecamatan lainnya mengalami fluktuasi jumlah anak usia sekolah akibat perubahan penduduk secara keseluruhan.

Jika mengacu pada jumlah anak usia sekolah per wilayah, kecamatan Balikpapan Utara menduduki posisi teratas dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi, sedangkan Kecamatan Balikpapan Kota berada di posisi

terakhir dengan jumlah yang tidak sampai setengah dari Kecamatan Balikpapan Utara. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota Balikpapan yang juga memiliki urutan yang sama per kecamatan. Meskipun demikian, tidak semua anak usia sekolah terdata menjadi siswa. Usia sekolah yang ditetapkan secara nasional adalah pada rentang 6 hingga 12 tahun, sedangkan ada kemungkinan anak yang berusia di bawah 6 tahun yang sudah memulai studi, atau anak yang sudah berada pada rentang usia tersebut tetapi belum atau tidak menempuh studi pada jenjang pendidikan manapun. Oleh karena itu, diperlukan data aktual yang presisi terkait jumlah siswa untuk melihat tingkat kebutuhan sarana prasarana pada urusan pendidikan. Berikut merupakan proyeksi jumlah siswa selama 20 tahun ke depan di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 43 Proyeksi Jumlah Siswa di Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	1.318	15.180	5.783	1.151	15.753	7.282	1.144	16.560	8.132	1.190	16.076	9.190	1.251	16.622	8.833	1.305	17.655	9.399
2	Balikpapan Kota	789	10.046	5.625	566	7.743	3.360	483	7.125	3.247	419	6.182	3.207	349	5.796	2.718	264	5.661	2.568
3	Balikpapan Timur	668	9.839	4.610	833	10.766	4.674	923	11.870	5.468	1.064	11.930	6.398	1.231	12.634	6.329	1.410	13.645	6.898
4	Balikpapan Utara	1.204	17.038	9.282	1.397	18.845	8.440	1.452	20.152	9.578	1.579	19.822	10.952	1.734	20.680	10.636	1.892	22.103	11.417
5	Balikpapan Tengah	830	11.119	3.856	720	10.154	4.532	583	9.309	4.360	481	8.237	4.382	368	7.877	3.786	233	7.849	3.645
6	Balikpapan Barat	515	9.513	4.043	689	9.800	4.435	612	9.704	4.605	558	8.998	4.879	499	8.966	4.435	423	9.257	4.491
KOTA BALIKPAPAN		5.324	72.736	33.199	5.355	73,06	32,72	5,20	74,72	35,39	5,29	71,25	39,01	5,43	72,58	36,74	5,53	76,17	38,42

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Jumlah siswa di Kota Balikpapan pada tahun 2020 didominasi olah siswa yang bersekolah di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur pada setiap jenjang pendidikan. Tren peningkatan proyeksi dari tahun 2025 hingga 2045 yang terjadi pada jenjang pendidikan PAUD di dua kecamatan tersebut menunjukkan banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal itu sejalan dengan rata-rata peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi hingga tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur.

Hasil proyeksi yang berbeda tampak pada Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat yang secara kontinu mengalami penurunan jumlah siswa sejak tahun 2025 hingga 2045 di setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat diproyeksikan mengalami lonjakan jumlah siswa pada tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun 2020. Apabila mengacu pada jumlah anak usia sekolah yang juga secara linier mengalami penurunan, hasil proyeksi penurunan jumlah siswa sekolah dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk secara umum di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Struktur penduduk yang semula berbentuk piramida, kemudian pada rentang tahun 2025 hingga 2045 terus mengalami penyempitan pada bagian bawah struktur penduduk. Hal itu mengindikasikan bahwa adanya penurunan angka kelahiran maupun tingginya angka migrasi yang melibatkan penduduk pada usia sekolah. Kondisi yang demikian menuntut adanya kebijakan khusus yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan selama dua puluh tahun mendatang tidak turut menurun seiring berkurangnya jumlah siswa yang ada.

Hasil proyeksi lainnya dialami oleh Kecamatan Balikpapan Selatan yang cenderung mengalami fluktuasi yang secara kontinu pada rentang tahun 2025 hingga 2045. Pada satu sisi, hal itu mampu mempertahankan kestabilan struktur penduduk yang ada, sehingga secara umum kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mudah dilaksanakan secara umum. Namun, penyesuaian kebijakan dalam perenncanaan juga diperlukan untuk menghindari adanya ketidaktepatan sasaran.

Perubahan struktur penduduk secara keseluruhan turut serta memengaruhi persebaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap

kecamatan. Hal itu menuntut adanya perencanaan terkait penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan selama dua puluh tahun mendatang dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana dasar di Kota Balikpapan adalah dengan melakukan proyeksi untuk dua puluh tahun mendatang. Salah satu kebutuhan sarana prasarana pendidikan adalah gedung sekolah. Hasil proyeksi kebutuhan gedung sekolah di Kota Balikpapan per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Gedung Sekolah Jenjang PAUD hingga SMP di Kota Balikpapan pada Tahun 2020-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	41	34	18	42	35	18	42	37	21	44	37	23	46	38	22	49	40	24
2	Balikpapan Kota	25	31	12	24	31	11	21	29	11	18	25	11	15	24	9	12	23	9
3	Balikpapan Timur	21	32	10	23	36	11	25	40	12	29	40	15	34	43	14	39	46	16
4	Balikpapan Utara	38	44	19	39	47	20	40	51	22	44	50	25	49	53	25	54	57	26
5	Balikpapan Tengah	26	41	13	24	40	12	20	37	12	17	33	12	13	32	10	9	32	10
6	Balikpapan Barat	16	27	10	15	27	10	14	27	10	13	25	11	12	26	10	10	26	10
KOTA BALIKPAPAN		166	209	82	167	216	82	162	221	88	165	211	97	169	215	91	172	225	95

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Jumlah kebutuhan gedung sekolah yang diproyeksikan pada enam kecamatan di Kota Balikpapan memiliki dua tren yang berbeda, yakni pertama, terdapat tiga kecamatan yang secara konsisten mengalami peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah. Kedua, terdapat ketiga kecamatan lainnya yang justru sebaliknya. Penurunan kebutuhan jumlah gedung sekolah dalam hasil proyeksi tidak dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk mengurangi jumlah gedung sekolah yang tersedia, melainkan perlunya kebijakan pengurangan jumlah rombongan belajar atau kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan terbaru terkait rombongan belajar melalui Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023. Jumlah rombongan belajar yang ditetapkan pada peraturan tersebut mencakup angka minimal dan maksimal rombongan belajar pada tiap jenjang pendidikan. Hal itu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi atau menambah jumlah rombongan belajar di wilayahnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada.

Jumlah rombongan belajar yang ideal di setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh kemendikbudristek, yakni 1-16 rombel untuk jenjang PAUD, 6-24 rombel untuk SD sederajat, dan 6-30 rombel untuk SMP sederajat. Pada masing-masing rombongan belajar juga diatur terkait jumlah siswa yang dapat ditampung, yakni maksimal 10-15 siswa untuk jenjang PAUD tergantung pada usia anak yang mengikuti PAUD, kemudian maksimal 28 untuk SD sederajat, dan 32 untuk SMP sederajat. Apabila dalam satu rombel telah melebihi kapasitas siswa yang dapat ditampung, maka perlu penambahan rombel. Logika serupa juga berlaku pada gedung sekolah, apabila dalam satu gedung sekolah terdapat lebih dari jumlah rombel maksimal yang telah ditetapkan, maka hadir kebutuhan untuk menambah gedung sekolah agar efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran terjaga. Kebijakan penambahan gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi tersebut harus diambil oleh tiga kecamatan di Balikpapan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara.

Kebijakan yang berbeda harus diambil oleh Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat. Hasil proyeksi yang menunjukkan adanya penurunan jumlah gedung sekolah tidak berarti bahwa gedung sekolah yang telah tersedia dimusnahkan, melainkan pemerintah daerah perlu menyesuaikan kembali rombongan belajar yang

ditetapkan sebelumnya, dalam konteks ini dilakukan pengurangan jumlah rombongan belajar. Jumlah siswa yang lebih sedikit pada suatu rombongan belajar akan meningkatkan efektivitas pemahaman siswa terhadap informasi yang diterima. Konsekuensi dari pengurangan jumlah siswa di dalam suatu rombongan belajar adalah jumlah rombongan belajar yang tetap, sehingga gedung yang tersedia tetap digunakan.

Selain gedung sekolah, sarana prasarana dasar yang diperlukan dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten. Peran tenaga pendidik, seperti guru sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal itu dikarenakan guru tidak hanya berperan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik, serta mempersiapkan seorang siswa menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Peran guru yang begitu krusial menghadirkan urgensi untuk memberikan perhatian yang cukup pada proses pembentukan perencanaan di suatu daerah, terutama terkait ketersediaan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut merupakan proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pembelajaran yang ideal di Kota Balikpapan selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 45 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru di Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2020			Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Balikpapan Selatan	185	656	332	148	788	364	147	828	407	153	804	459	160	831	442	167	883	470
2	Balikpapan Kota	107	522	284	73	387	168	62	356	162	54	309	160	45	290	136	34	283	128
3	Balikpapan Timur	69	490	239	107	538	234	118	593	273	136	596	320	158	632	316	181	682	345
4	Balikpapan Utara	141	827	496	179	942	422	186	1.008	479	202	991	547	222	1.034	532	243	1.105	571
5	Balikpapan Tengah	121	608	208	92	508	227	75	465	218	62	412	219	47	394	189	30	392	182
6	Balikpapan Barat	60	462	182	88	490	222	78	485	230	71	450	244	64	448	222	54	463	225
KOTA BALIKPAPAN		**683**	**3.565**	**1.741**	**687**	**3.653**	**1.636**	**666**	**3.736**	**1.770**	**678**	**3.562**	**1.950**	**696**	**3.629**	**1.837**	**709**	**3.808**	**1.921**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah guru selama dua puluh tahun mendatang pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Balikpapan memanfaatkan pola eksisting yang telah ada sebelumnya, sedangkan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan asumsi rasio dari kebijakan PP No 74 tahun 2008 tentang Guru yaitu 1 guru untuk 20 siswa. Penggunaan asumsi rasio antara guru dan siswa berimplikasi pada persamaan tren yang dihasilkan oleh proyeksi jumlah siswa dengan proyeksi kebutuhan guru. Semakin banyak jumlah murid yang diproyeksikan, maka semakin banyak pula jumlah guru yang dibutuhkan di suatu wilayah, begitu juga sebaliknya. Penggunaan asumsi rasio 1 guru untuk 20 murid berguna untuk menjaga efektivitas dan kualitas dari sistem pembelajaran yang dijalankan di Kota Balikpapan.

Jumlah guru pada kondisi eksisting pada rentang tahun 2006 hingga 2022 telah menunjukkan ketercukupan dari jumlah guru yang dibutuhkan di Kota Balikpapan. Hal itu tampak pada rasio guru dan murid yang telah berada di angka 0,05 yang berarti 1 guru mengampu 20 murid atau dapat dikatakan dalam kondisi ideal. Namun, perlu diperhatikan pula terkait persebaran dari guru yang tersedia karena proyeksi yang dihasilkan berskala kecamatan, dan ada potensi guru yang tersedia di sekolah favorit lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah memastikan guru yang tersedia memiliki kompetensi yang sesuai standar, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengajaran dari guru sesuai dengan jumlah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga tetap mendapatkan kualitas dari pengajaran tersebut.

2.6.2.2 Proyeksi Sarana Prasarana Kesehatan

Ketersedian sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya urusan pendidikan, tetapi juga pada ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (SPM). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Peran tenaga kesehatan secara strategis menentukan keberhasilan peningkatan pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan, serta perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang

mumpuni. Begitu krusialnya peran tenaga kesehatan menghasilkan urgensi bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana terkait tenaga kesehatan di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 46 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi 2020		2025		2030		2035		2040		2045	
		Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)	Dokter (Orang)	Perawat (Orang)
1	Balikpapan Selatan	121	360	130	374	150	408	167	435	186	466	206	499
2	Balikpapan Kota	338	793	343	801	353	817	360	830	368	843	376	856
3	Balikpapan Timur	35	56	41	65	55	88	66	108	80	130	95	154
4	Balikpapan Utara	250	173	260	190	285	231	306	265	329	303	355	345
5	Balikpapan Tengah	114	27	120	37	133	58	142	74	152	90	162	106
6	Balikpapan Barat	48	72	53	81	66	101	75	116	85	132	95	149
KOTA BALIKPAPAN		906	1.481	946	1.547	1042	1.704	1117	1.827	1200	1.963	1290	2.109

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang di Kota Balikpapan memanfaatkan data eksisting beberapa tahun sebelumnya sebagai basis proyeksi dengan standar rasio 1 dokter per 1000 penduduk dan 2,4 perawat per 1000 penduduk. Standar tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di dalam Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan pada tahun 2022. Hasil proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045 secara umum menunjukkan peningkatan. Hal itu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk selama dua puluh tahun mendatang. Peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 2025 tidak terlalu jauh dibandingkan kondisi eksisting pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sebelumnya kebutuhan tersebut cenderung mampu dipenuhi oleh daerah, yakni sebesar 97,32 persen di rumah sakit, dan 82,72 persen di puskesmas, sehingga ketika mengacu pada rasio standar antara tenaga kesehatan dan masyarakat, jumlahnya tidak meningkat secara signifikan.

Tenaga kesehatan yang diperlukan di Kota Balikpapan setidaknya meliputi dokter umum dan perawat. Pada kondisi eksisting dan proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat lebih banyak dibandingkan dokter. Hal itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa jika 1 dokter idealnya menangani 1000 penduduk, maka 1 perawat menangani 417 penduduk. Hal itu dikarenakan interaksi perawat dengan pasien jauh lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dokter, sehingga dalam proses pemberian layanan kesehatan, perawat secara otomatis juga menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dibandingkan dokter. Hasil proyeksi Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat menunjukkan kondisi ideal, yakni lebih banyak perawat dibandingkan dokter. Kondisi yang berbeda tampak pada Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah yang menunjukkan jumlah dokter lebih banyak dibandingkan perawat. Hasil proyeksi demikian dipengaruhi oleh data eksisting yang kemudian membentuk proyeksi yang berbeda dibandingkan empat kecamatan lainnya. Meskipun begitu, penyesuaian kebijakan tetap diperlukan di kedua kecamatan tersebut agar standar pelayanan minimal pada sektor kesehatan dapat tetap dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Ketersediaan dokter dan perawat selaku tenaga kesehatan juga harus disertai dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang

komprehensif, sehingga mampu mewujudkan percepatan kinerja pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan. Dengan kinerja pembangunan kesehatan yang lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan juga semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pula, serta menunjang peningkatan IPM.

Sarana dan prasarana kesehatan tidak terbatas pada tenaga kesehatan, melainkan terdapat juga fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Fasilitas kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pada pelayanan kesehatan yang diberikan, fasilitas kesehatan menawarkan layanan medis dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Tanpa adanya fasilitas kesehatan, maka pelayanan kesehatan prima sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk membuat perencanaan yang memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 47 Proyeksi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Kondisi 2020		2025		2030		2035		2040		2045	
		Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Rumah Sakit (Unit)
1	Balikpapan Selatan	2	4	2	4	3	4	3	5	4	5	4	5
2	Balikpapan Kota	4	3	4	3	4	3	5	3	5	3	5	3
3	Balikpapan Timur	4	1	4	1	5	1	5	1	5	2	6	2
4	Balikpapan Utara	5	1	5	1	6	2	7	2	7	2	8	2
5	Balikpapan Tengah	6	2	6	2	7	2	7	2	7	3	7	3
6	Balikpapan Barat	6	-	6	-	7	0	7	0	7	0	7	1
KOTA BALIKPAPAN		27	11	28	11	31	13	33	14	36	15	38	16

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi kebutuhan rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan memanfaatkan data dasar yang telah tersedia pada tahun 2020. Fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan secara umum tersebar kurang merata apabila melihat perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dengan luas kecamatan yang ada. Namun apabila melihat tingkat kepadatan penduduk di tiap kecamatan, jumlah fasilitas kesehatan tampak menyesuaikan jumlah penduduk yang ada pada kecamatan terkait. Fasilitas kesehatan terbanyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Tengah yang juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan Kecamatan Balikpapan Barat memiliki kondisi sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan unit fasilitas kesehatan pada hasil proyeksi, baik rumah sakit maupun puskesmas disesuaikan dengan kapasitas fasilitas kesehatan dan jumlah penduduk yang ada pada rentang tahun terkait.

Kebutuhan masyarakat akan rumah sakit dan puskesmas tidak hanya terkait ketersediaan dan keterjangkauan akses, melainkan juga terkait fasilitas pelayanan yang disediakan. Setidaknya dari 11 rumah sakit umum yang terdaftar di Kota Balikpapan pada tahun 2020, terdapat satu rumah sakit yang termasuk ke dalam tipe A atau rumah sakit pusat, yakni RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Kecamatan Balikpapan Utara. Selain itu, dua rumah sakit bertipe B, sedangkan 8 lainnya tersebar ke dalam rumah sakit bertipe C dan D. Tipe rumah sakit memengaruhi fasilitas kesehatan yang diberikan. Banyaknya rumah sakit tipe C dan D menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua kalangan. Hal itu dikarenakan rumah sakit tipe C dan D merupakan rumah sakit yang menjadi rujukan pertama bagi masyarakat setelah memeriksakan diri di puskesmas.

Hal yang tidak kalah penting dalam fasilitas kesehatan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil proyeksi memang hanya mampu menunjukkan angka kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Namun pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban untuk turut memastikan kualitas dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Kualitas fasilitas kesehatan dapat dilihat melalui tingkat akreditas yang diperoleh fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan. Jika mengacu pada data eksisting pada tahun 2016 hingga 2020, persentase akreditasi rumah sakit di Kota Balikpapan mampu ditingkatkan dari yang semula hanya 36,37 persen pada tahun 2018, kemudian menjadi 86,67 persen pada tahun 2020. Kondisi serupa juga dialami oleh puskesmas yang mengalami peningkatan

dari 51,85 persen pada tahun 2016, kemudian menjadi 96,3 persen pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakredetasi menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional. Namun capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan selama dua puluh tahun mendatang, terutama ketika melihat struktur penduduk yang semakin lebar pada bagian atas atau lansia.

Pertimbangan bentuk struktur penduduk pada pelayanan kesehatan dikarenakan adanya perbedaan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berusia di bawah 14 tahun tentu akan berbeda dengan penduduk yang telah masuki usia lansia, yakni di atas 64 tahun. Perubahan struktur penduduk yang semakin melebar pada bagian atas piramida menujukkan bahwa dalam dua puluh tahun ke depan, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan berpotensi lebih banyak terkait penanganan penyakit degeneratif, yakni proses berkurangnya fungsi sel saraf secara bertahap. Penyakit tersebut, salah satunya dapat disebabkan oleh pola hidup yang buruk dalam jangka waktu lama. Penduduk dengan usia lanjut berpotensi lebih rentan terkena penyakit degeneratif seperti Oeteoporosis, Alzheimer, Dementia (pikun) dan banyak lagi. Oleh karena itu, penyesuaian perencanaan terkait fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan selama dua puluh tahun mendatang perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.6.2.3 Proyeksi Sarana Prasarana Infrastruktur

Kebutuhan sarana prasarana mendasar lain yang diperlukan oleh masyarakat adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan selama dua puluh tahun mendatang adalah infrastruktur terkait timbulan sampah, infrastruktur terkait ketersediaan air bersih dan listrik. Sampah menjadi salah satu perhatian penting pada perencanaan jangka panjang karena sampah tidak hanya berpotensi memberikan gambaran yang kurang baik terhadap wajah kota, tetapi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Hal itu tentu tidak hanya berdampak bagi satu sektor secara terpisah, tetapi berkelindan dengan sektor lain dan menjadi masalah yang kompleks serta menjadi sulit untuk diselesaikan, terutama ketika tidak ada perencanaan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, proyeksi terkait jumlah sampah yang mungkin

ditimbulkan oleh masyarakat di Kota Balikpapan perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang. Berikut merupakan hasil proyeksi timbulan sampah yang berpotensi dihasilkan masyarakat dalam dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 48 Proyeksi Volume Timbulan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Balikpapan Selatan	464.333,82	116,08	521.931,34	130,48	567.270,22	141,82	616.541,59	154,14	669.152,89	167,29
2	Balikpapan Kota	227.735,34	49,69	235.073,98	51,29	236.858,82	51,68	240.442,48	52,46	245.185,76	53,50
3	Balikpapan Timur	300.380,13	75,10	354.712,11	88,68	400.794,19	100,20	450.178,84	112,54	502.316,40	125,58
4	Balikpapan Utara	550.733,92	137,68	633.305,59	158,33	701.563,52	175,39	774.634,51	193,66	852.319,38	213,08
5	Balikpapan Tengah	322.322,89	80,58	324.161,43	81,04	325.891,15	81,47	329.445,95	82,36	334.448,23	83,61
6	Balikpapan Barat	265.934,80	58,02	307.285,79	76,82	316.969,48	79,24	328.755,22	82,19	342.028,73	85,51
KOTA BALIKPAPAN		2.131.440,9	517,15	2.376.470,24	586,64	2.549.347,38	629,80	2.739.998,59	677,35	2.945.451,39	728,56

Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah

Hasil proyeksi timbulan sampah di Kota Balikpapan menggunakan standar acuan pada SNI: SNI 8632-2018 Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Di antara enam kecamatan yang ada di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara merupakan kecamatan yang diproyeksikan menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, sedangkan Balikpapan Kota berada pada posisi sebaliknya. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan Balikpapan Utara dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga produksi sampah juga jauh lebih banyak, baik dari segi volume maupun berat per harinya. Hasil proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi bahwa satu orang di Kota Balikpapan menghasilkan 3-3,6 liter per orang per hari atau sebesar 0,65-0,8 kilogram per orang per hari. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan diproyeksikan akan menghasilkan 2.131.440,90 liter per orang per hari atau setara 517,15 kilogram per orang per hari pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2.945.451,39 liter per orang per hari yang setara dengan 728,56 kilogram per orang per hari pada tahun 2045. Berikut merupakan standar acuan yang telah ditetapkan oleh Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Tabel 2. 49 Standar Acuan Timbulan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Orang/hari)	Berat (KG/Orang/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75-3,00	0,60-0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00-3,60	0,65-0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI: 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Realita timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Balikpapan melebihi standar yang ditetapkan oleh SNI: 8632-2018, menunjukkan adanya urgensi untuk membuat skema perencanaan pesimistis, atau menggunakan asumsi bahwa hasil proyeksi merupakan jumlah minimal timbulan sampah yang mungkin dihasilkan oleh penduduk di Kota Balikpapan 20 tahun mendatang. Perencanaan yang matang terkait infrastruktur yang menangani timbulan sampah di Kota Balikpapan tidak lagi hanya bersifat inisiatif, tetapi secara strategis diperlukan untuk menangani permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari timbulan

sampah yang ada. Urgensi ketersediaan infrastruktur terkait pengolahan timbulan sampah di Kota Balikpapan semakin tinggi terutama melihat kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) Manggar diperkirakan akan melebihi kapasitasnya (*overload*) pada tahun 2026, sedangkan proyeksi selama dua puluh tahun mendatang menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 211,41 ton per harinya. Hal itu membuat perencanaan terkait timbulan sampah tidak bisa dijalankan jika hanya sebatas menyediakan lahan baru, melainkan perlunya infrastruktur pengolahan timbulan sampah yang terintegrasi sehingga mampu menguraikan permasalahan sampah di Kota Balikpapan.

Infrastruktur lain yang juga tidak kalah penting diperhatikan adalah tentang ketersediaan air. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa air, baik untuk dikonsumsi maupun untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, ketersediaan infrastruktur air juga menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat proyeksi kebutuhan air yang diperlukan oleh masyarakat sebagai basis pemerintah daerah dalam membuat perencanaan yang matang. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 50 Proyeksi Kebutuhan air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 (M^3/Hari)

No	KECAMATAN	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040	Tahun 2045
1	Balikpapan Selatan	17.025,57	19.137,48	20.799,91	22.606,53	24.535,61
2	Balikpapan Kota	7.453,16	7.693,33	7.751,74	7.869,03	8.024,26
3	Balikpapan Timur	11.013,94	13.006,11	14.695,79	16.506,56	18.418,27
4	Balikpapan Utara	20.193,58	23.221,21	25.724,00	28.403,27	31.251,71
5	Balikpapan Tengah	11.818,51	11.885,92	11.949,34	12.079,68	12.263,10
6	Balikpapan Barat	8.703,32	11.267,15	11.622,21	12.054,36	12.541,05
KOTA BALIKPAPAN		76.208,07	86.211,19	92.542,99	99.519,42	107.034,00

Sumber: Olah data.

Hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan menggunakan standar acuan pada SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Kondisi yang sama layaknya terkait timbulan sampah, Kecamatan Balikpapan Utara merupakan kecamatan yang diproyeksikan membutuhkan air bersih paling banyak pada tahun 2025 hingga 2045, dan Balikpapan Kota berada pada posisi sebaliknya. Hal itu tidak terlepas dari jumlah penduduk yang juga memiliki posisi yang sama di enam kecamatan di Kota Balikpapan. Hasil proyeksi kebutuhan air bersih didapatkan dengan cara mengalikan antara jumlah penduduk

dengan standar kebutuhan air bersih yang telah ditetapkan di dalam SNI: 6728.1:2015. Berikut merupakan standar acuan yang tertuang di dalam SNI: 6728.1:2015.

Tabel 2. 51 Standar Acuan Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/O/H)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Motropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Kota Balikpapan termasuk ke dalam kota besar dengan jumlah penduduk sebesar 703.611 jiwa pada tahun 2022. Hal itu membuat Kota Balikpapan setidaknya membutuhkan 76.208,07 liter per hari pada tahun 2025. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5.304,15 liter per dibandingkan jumlah air bersih yang mampu disalurkan oleh PDAM pada tahun 2020, yakni rata-rata sebanyak 70.903,92 liter per hari. Peningkatan kebutuhan air bersih pada tahun 2025 dan akan terus meningkat selama dua puluh tahun ke depan mengharuskan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mampu menyuplai air bersih sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu isu terkait krisis air yang melanda Kota Balikpapan akibat penurunan kinerja dua waduk, yakni Teritip dan Manggar, menambah urgensi terhadap penyediaan infrastruktur terkait air bersih.

Infrastruktur air bersih tidak hanya berupaya untuk menyediakan air bersih dalam jumlah banyak, melainkan menjaga dan menyimpan air bersih agar mampu menjadi kunci ketahanan air bersih di masa-masa sulit, seperti saat musim kemarau. Kota Balikpapan memiliki potensi yang besar untuk mengelola air dengan lebih baik. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan dikelilingi oleh laut dan hutan sebagai tempat penyimpanan cadangan air yang berpotensi diubah menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hal tersebut membutuhkan perencanaan yang baik dan matang, sehingga air yang tersedia di Kota Balikpapan tidak hanya sekadar mengalir saat hujan, tetapi juga mampu ditampung, disimpan, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama dua puluh tahun mendatang.

Infrastruktur listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di Kota Balikpapan. Listrik

merupakan salah satu sumber energi pokok yang memiliki peran vital dalam berbagai kegiatan manusia pada rumah tangga, industri, perdagangan, transportasi, dan telekomunikasi. Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Uraian	2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh
1	Balikpapan Selatan	154.778	216.689,11	173.977	243.567,96	189.090	264.726,10	205.514	287.719,41	223.051	312.271,35
2	Balikpapan Kota	82.813	115.937,99	85.481	119.674,03	86.130	120.582,67	87.434	122.407,08	89.158	124.821,84
3	Balikpapan Timur	100.127	140.177,39	118.237	165.532,32	133.598	187.037,29	150.060	210.083,46	167.439	234.414,32
4	Balikpapan Utara	183.578	257.009,16	211.102	295.542,61	233.855	327.396,31	258.212	361.496,11	284.106	397.749,04
5	Balikpapan Tengah	107.441	150.417,35	108.054	151.275,33	108.630	152.082,53	109.815	153.741,44	111.483	156.075,84
6	Balikpapan Barat	96.704	135.384,99	102.429	143.400,04	105.656	147.919,09	109.585	153.419,10	114.010	159.613,41
	KOTA BALIKPAPAN	725.440	1.015.616,00	799.280	1.118.992,28	856.960	1.199.744,00	920.619	1.288.866,60	989.247	1.384.945,80

Sumber: Olah data

Kebutuhan listrik di Kota Balikpapan diproyeksikan dengan acuan standar untuk proyeksi kebutuhan listrik tahun 2025-2045 adalah Perpres No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana mencapai 1.400 KWh/ per kapita atau 1,4 MWh. Hasil proyeksi kebutuhan listrik cenderung mengalami tren kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kecuali pada tahun 2030 yang mengalami penurunan kebutuhan sebesar 80.752 MWh. Pada tahun 2045 kebutuhan listrik diproyeksikan mencapai 1.384.945,80 MWh dengan rentang di setiap lima tahunnya adalah mulai dari 80.752 MWh hingga 103.376 MWh. Peningkatan kebutuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kota Balikpapan belum terpenuhi pada tahun 2020 sehingga dengan pertumbuhan penduduk sebesar 38.380 jiwa, dibutuhkan 103.376 MWh, kemudian peningkatannya cenderung lebih kecil selama dua puluh tahun mendatang hingga 2045.

Proyeksi kebutuhan listrik di masa depan memungkinkan perencanaan infrastruktur yang sesuai dan tepat sasaran. Beberapa tantangan yang perlu direspon terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan penyimpanan energi. Proyeksi yang tepat diharapkan dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik. Hal ini penting agar tidak terjadi kekurangan energi yang dapat mengganggu kestabilan jaringan listrik. Selain itu, dengan proyeksi yang akurat, diharapkan dapat menjadi acuan untuk memutuskan investasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan secara efisien. Hal ini membantu menghindari investasi berlebihan atau kekurangan dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang utama dapat diprioritaskan pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang telah diantisipasi sebelumnya.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Berdasarkan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. Dalam pengaturan pertumbuhan wilayah, RTRW menetapkan regulasi yang mengatur pertumbuhan dan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Hal ini menjadi dasar untuk menghindari pembangunan yang tidak terkendali,

dan memastikan lahan digunakan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan kota. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, RTRW membantu mengidentifikasi dan melindungi sumber daya alam guna melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem yang berperan dalam menjaga kualitas air dan udara, serta mengurangi risiko bencana. Lebih lanjut, dengan perencanaan kota yang telah dituangkan dalam RTRW, dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk kota. Hal ini mencakup akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan lingkungan yang nyaman dan sehat. Selanjutnya, kinerja RTRW juga diharapkan dapat menjadi indikasi pengembangan infrastruktur yang tepat. RTRW membantu mengarahkan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, serta memastikan bahwa infrastruktur tersebut dibangun di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan Kota Balikpapan.

1. Tujuan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Secara umum tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang kota merupakan terjemahan dari visi dan pengembangan kota dalam pelaksanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai kondisi ideal dari kegiatan penataan ruang wilayah seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, tujuan penataan ruang disusun agar tercipta suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Tujuan penatan ruang kota memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Dalam perumusannya, suatu tujuan penataan ruang didasarkan pada:

a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
b. Karakteristik wilayah kabupaten;

c. Isu strategis; dan

d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Adapun kriteria tujuan penataan ruang adalah:

a. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang;

b. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan

c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Visi dan misi pembangunan suatu kota merupakan landasan utama penyusunan sebuah tujuan penataan ruang. Berdasarkan karakteristik fisik Kota Balikpapan dan berdasarkan kehidupan sosial budaya masyarkat Kota Balikpapan, visi pembangunan Kota Balikpapan adalah:

> ***"TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA BERDIMENSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA BUDAYA YANG DIDUKUNG OLEH PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERPERADAPAN MAJU (MADINATUL IMAN)."***

Berdasarkan visi tersebut maka kata kunci yang diperoleh untuk merumuskan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah:

1. Berdimensi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata budaya dan pendidikan;
2. Berwawasan lingkungan; dan
3. Berkelanjutan.

Lebih spesifik tujuan penataan ruang wilayah Kota Balikpapan dirumuskan dalam dokumen tata ruang wilayah kota yang didasarkan pada tujuan penataan ruang nasional seperti yang tertera dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yakni perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Balikpapan

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 20 (dua

puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang Kota Balikpapan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pokok kegiatan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah kota meliputi:

1. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, dengan strategi
    a) memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
    b) mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang; dan
    c) mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.
2. peningkatan *aksesibilitas* antar kawasan, dengan strategi
    a) mendukung pengembangan jaringan jalan Trans Kalimantan;
    b) mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota;
    c) meningkatkan ruas-ruas jalan utama;
    d) mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota;
    e) mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
    f) menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
    g) meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
    h) mengembangkan terminal angkutan barang;
    i) meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan;
    j) mengembangkan jembatan antar pulau; dan
    k) meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.
3. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*), dengan strategi
    a) mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
    b) mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
    c) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
    d) mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota; dan
    e) mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
4. perwujudan kelestarian kawasan lindung, dengan strategi
    a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;

b) menjaga keberlanjutan hutan lindung;
c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
d) merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
e) mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.

5. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota, dengan strategi
   a) menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota;
   b) mengembangkan RTH di kawasan sempadan; dan
   c) mengembangkan RTH di kawasan rawan bencana.
6. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan, dengan strategi
   a) mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
   b) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
   c) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.
7. pengembangan kawasan strategis kota, dengan strategi
   a) menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan;
   b) memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis; dan
   c) mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada.
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara, dengan strategi
   a) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
   b) mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
d) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

3. Rencana Struktur dan Pola Ruang Daerah

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kota merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kota, yang terdiri atas: a) PKN yang berada di wilayah kota, b) PKW yang berada di wilayah kota, c) PKL yang berada di wilayah kota, d) PKSN yang berada di wilayah kota, dan e) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kota yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kota, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang terintegrasi serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di dalam wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota, pada dasarnya berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kota yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kota dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kota, terutama pada pusat-pusat kegiatan/ perkotaan yang ada.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah kawasan perkotaan Balikpapan. Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai pusat penyebaran kegiatan ekonomi yang skala pelayanannya meliputi wilayah Balikpapan, Kutai, Penajam Pasir Utara, Samarinda, Bontang, dan beberapa Kota/ Kabupaten di sekitarnya serta

menjadi salah satu pusat pendukung ekonomi secara nasional. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Balikpapan adalah meliputi kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kawasan Pusat Kota ini mempunyai fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Balikpapan meliputi rencana Pusat Kota Ke-2 Karang Joang di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara dan rencana Pusat Kota Ke-3/ Kota Perdesaan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kota Balikpapan ditetapkan di ibukota-ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi kelurahan itu sendiri atau beberapa kelurahan di sekitarnya.

Rencana pengembangan transportasi darat di Kota Balikpapan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan, prasarana angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, dan prasarana transportasi perkotaan yang meliputi jalur pedestrian, penyeberangan, jalur pejalan kaki, dan sebagainya. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat Kota Balikpapan, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pengembangan transportasi laut di Kota Balikpapan diarahkan untuk 1) meningkatkan keterhubungan Balikpapan dengan kota/ kabupaten di sekitarnya, 2) meningkatkan kemudahan distribusi barang produksi dan konsumsi, 3) meningkatkan daya tampung prasarana pelabuhan, dan 4) meningkatkan kenyamanan penumpang sejalan dengan pertumbuhan permintaan pergerakan melalui laut. Sementara itu, pengembangan transportasi udara di Kota Balikpapan diarahkan untuk menunjang pertumbuhan yang cepat akan permintaan pergerakan udara baik penumpang dan barang yang diperkirakan mengalami peningkatan dua kali lipat dari sekarang. Sasaran dari pengembangan transportasi udara di Kota Balikpapan adalah 1) terciptanya pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien dan 2) terjaminnya keamanan ruang udara guna terciptanya transportasi udara yang aman dan nyaman. Mengingat proyeksi jumlah penduduk dan luas pelayanan transportasi udara di Kota Balikpapan yang cukup besar, ketersediaan kapasitas Bandar Udara Sepinggan di Kota

Balikpapan diperkirakan tidak akan mencukupi lagi, sehingga dibutuhkan perluasan dan peningkatan.

Pengembangan prasarana telematika meliputi prasarana telepon terestrial, telepon satelit/selular, dan infrastruktur koneksi internet. Sasaran kebijakan pengembangan prasarana telematika meliputi: 1) tercapainya tingkat pelayanan jaringan telepon terestrial sampai 100 persen dari total potensi sambungan non rumah tangga, 2) tercapainya tingkat pelayanan jaringan telepon terestrial untuk kawasan perkotaan, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan, 3) terbangunnya prasarana telekomunikasi satelit dengan daya jangkau 100 persen wilayah di Kota Balikpapan, dan 4) tertatanya prasarana telekomunikasi satelit secara terpadu. Selanjutnya, sasaran dari kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya energi di Kota Balikpapan adalah: 1) tersedianya pasokan listrik yang memadai, kontinyu dan berkelanjutan sesuai dengan potensi bahan baku setempat, 2) terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Kota Balikpapan sampai tingkat pemenuhan 100 persen pada tahun 2030, dan 3) mulai digunakannya teknologi pengolahan energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan gas.

Sasaran pengembangan prasarana sumberdaya air mencakup 1) meningkatnya cadangan air permukaan siap guna sampai 150 persen pada tahun 2030, 2) meningkatnya cadangan air tanah sampai 120 persen pada tahun 2030, 3) berkurangnya penggunaan air tanah sampai di bawah 50 persen dari potensi yang ada pada tahun 2030, 3) tercapainya pengairan irigasi teknis sepanjang tahun minimal 70 persen dari luas total sawah irigasi yang ada, dan 4) tercapainya pelayanan air minum mencapai 100 % penduduk di tahun 2030. Selanjutnya, rencana pengembangan prasarana penyehatan lingkungan meliputi rencana pengembangan sistem drainase perkotaan, rencana pengembangan prasarana sampah dan rencana pengembangan jaringan air limbah.

Berbeda dengan struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem jaringan sarana dan prasarana, pola ruang wilayah Kota Balikpapan mengatur penggunaan lahan yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung terdiri dari:

a. Hutan Lindung Sungai Manggar sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 4.999 Ha;

b. Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian berada di Kelurahan Kariangau Balikpapan Barat dengan luas kurang lebih 9.782 Ha;
c. Perluasan Hutan Lindung Sungai Wain sebagian berada di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas kurang lebih 1.402 Ha.

Rencana perwujudan pengembangan kawasan hutan lindung meliputi:

1) mengembangkan kawasan wisata alam;
2) mengembangkan wisata pendidikan alam/lingkungan hidup;
3) mengembangkan kegiatan penelitian flora fauna khas Kalimantan; dan
4) mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha, kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih1,591 ha, kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha, kawasan peruntukan peternakan terdapat di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 100 Hektar. Kawasan peruntukan perikanan tangkap kurang lebih 27.896 ha di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur, sedangkan untuk kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas kurang lebih 579 ha. Pengembangan kawasan minapolitan dengan luas kurang lebih 190,56 ha di muara Sungai Manggar Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru.

Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha, Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 2.238 ha, Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah dengan luas kurang lebih 22.270 Ha, Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.170 Ha, industri menengah dengan luas kurang lebih 918 Ha.

4. Indikasi Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahapan pembangunan wilayah Kota Balikpapan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032 dijabarkan

secara rinci pada periode pertama perencanaan. Berikut merupakan penjabaran kinerja program tata ruang Kota Balikpapan:

Tabel 2. 53 Indikasi Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
A	Terwujudnya Struktur Ruang			
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota	Penataan pusat pemerintahan melalui integrasi kawasan pemerintahan	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	APBD
		Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	Hibah
		Pengendalian dan monitoring pusat perdagangan dan jasa	Kelurahan Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir	APBD
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota	Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala kota di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pembangaunan Kawasan ITK di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD
		Pembangunan Pasar Tradisional di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Pendidikan di Sub Pusat Pelayanan Kota Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
3	Perwujudan Pusat Lingkungan	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kota di Kelurahan Damai	Kelurahan Damai	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan kawasan perdagangan jasa skala kecamatan di Kelurahan Gununsari Ilir	Kelurahan Gunung Sari Ilir	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat	Kelurahan Manggar	APBN, APBD, Swasta

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
		pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Manggar		
		Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan di Kelurahan Lamaru	Kelurahan Lamaru	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pusat perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota di Kelurahan Batu Ampar	Kelurahan Batu Ampar	APBN, APBD, Swasta
4	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Peningkatan Jalan	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
		Pembangunan Jalan		
		Pembangunan Terminal	Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Teritip	
		Pembangunan Jalan Kereta Api	Kota Balikpapan	APBN
		Peningkatan pelabuhan utama	Kelurahan Prapatan	APBN
		Kawasan Pelabuhan Terpadu Kariangau	Kelurahan Kariangau	APBN, APBD
		Peningkatan ruang terminal dan prasarana pendukung bandara	Bandara Sepinggan	APBN, APBD, Swasta
5	Telekomunikasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Kota Balikpapan	APBD, Swasta
6	Sumberdaya Air	Pengembangan dan perencanaan prasarana sumberdaya air	Kota Balikpapan	APBD
		Peningkatan irigasi teknis	Kelurahan Teritip	APBD
		Pembangunan Waduk	Kelurahan Teritip, Kelurahan Kariangau	APBN, APBD, Swasta
7	Sumberdaya Energi	Penataan dan pengembangan jaringan listrik	Kota Balikpapan	APBD, Swasta
		Pengembangan pembangkit listrik	Kelurahan Manggar, Teritip, Kariangau	Swasta
8	Penyehatan Lingkungan	pengembangan dan perencanaan TPA	Kec. Kerajaan, Tinada, Siempat Rube, Pergetteng Getteng Sengkut, Salak, Sitellu Tali Urang Julu	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan sistem drainase	Kota Balikpapan	APBN, APBD
		Pengembangan pengelolaan limbah	Kota Balikpapan	APBN, APBD,

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
				Hibah, Swasta
		Pengembangan pengelolaan air minum	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
9	Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki	Pembangunan dan Peningkatan Pedestrian Kota	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
10	Jalur Evakuasi Bencana	Ruang Evakuasi dan Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
		Sarana dan prasarana evakuasi bencana	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Swasta
11	Jalur Sepeda	Pembangunan Jalur Sepeda	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu	APBN, APBD
B	Terwujudnya Pola Ruang			
1	Kawasan Lindung	Perwujudan Kawasan Lindung	Kelurahan Kariangau, Karang Joang, Manggar	APBN, APBD, Hibah
2	Kawasan Resapan Air	Perwujudan Kawasan Resapan Air	Kelurahan Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD, Hibah
3	Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Bakau	Perwujudan Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Bakau	Kota Balikpapan	APBD
4	Ruang Terbuka Hijau Kota	Pembangunan Taman Kota	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Jalur Hijau	Kecamatan Balikpapan Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah	APBN, APBD, Hibah, Swasta
5	Kawasan Suaka Alam, Taman Wisata Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya	Kelurahan Karang Joang, Batu Ampar, Teritip, Prapatan, Margomulyo, Klandasan Ulu, Sepinggan, Lamaru	APBN, APBD
6	Kawasan Rawan Bencana	Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana	Kota Balikpapan	APBD

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
7	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kota Balikpapan	APBN, APBD
8	Kawasan Pertanian	Pengembangan kawasan sawah lestari	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBN, APBD
		Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBD
		Diversifikasi Kawasan Perkebunan	Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip	APBD
9	Kawasan Peternakan	Kawasan Sentra Peternakan	Kelurahan Teritip	APBN, APBD
10	Kawasan Perikanan	Pembangunan PPI Manggar	Kelurahan Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD
11	Kawasan Perumahan	Perumahan dan permukiman	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
12	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Zona I	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan	APBD, Swasta
		Kawasan Sub Pusat Kota Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan pasar tradisional	Kota Balikpapan	APBD
		Pusat perbelanjaan dan kawasan pertokoan	Kelurahan Margasari, Baru Tenagh, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gunung Bahagia, Muara Rapak, Karang Joang, Damai	APBD
		Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Balikpapan	APBN, APBD
13	Kawasan Industri	KIK Kariangau	KIK Kariangau	APBN
14	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	Kota Balikpapan	APBN, APBD, Hibah, Swasta
15	Kawasan Pendidikan	ITK Karangjoang	ITK Karangjoang	APBN, APBD
16	Kawasan Peruntukan	Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu,	APBN, APBD, Swasta

No	Kinerja Wajib Sesuai RTRW		Lokasi	Keterangan
	Kinerja Utama	Kinerja Operasional		
	Ruang Bagi Sektor Informal		Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Kariangau	
B	Terwujudnya Kawasan Strategis			
1	Perwujudan Kawasan Strategis	Pengembangan Kota Baru Karang Joang	Kelurahan Karang Joang	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	Kelurahan Kariangau	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kelurahan Manggar, Manggar Baru	APBN, APBD
		Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	Kelurahan Prapatan, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Gn. Bahagia, Sepinggan	APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Kota Baru Teritip	Kelurahan Teritip	APBN, APBD, Swasta
		Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan Margasari	Kelurahan Margasari	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Pengembangan Kawasan Pendidikan ITK	Kota Balikpapan	APBN, APBD
		Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain	Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karangjoang	APBN, APBD, Hibah, Swasta
		Konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar	Kelurahan Karangjoang dan kelurahan Manggar	APBN, APBD, Hibah, Swasta

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Kinerja operasional yang dirinci tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi kinerja utama berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang mengedepankan aspek keruangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang.

2.7.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Kalimantan

Wilayah Kalimantan berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Seiring dengan kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara dan berbagai

kegiatan prioritas strategis pendukungnya, maka pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai **“Superhub Ekonomi Nusantara”**. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, untuk 20 tahun ke depan pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan ke 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan, baik layanan kesehatan, pendidikan keilmuan, pendidikan karakter, maupun keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan.
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi, meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Arah kebijakan untuk wilayah Kalimantan berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045 di atas, menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana di Kota Balikpapan.

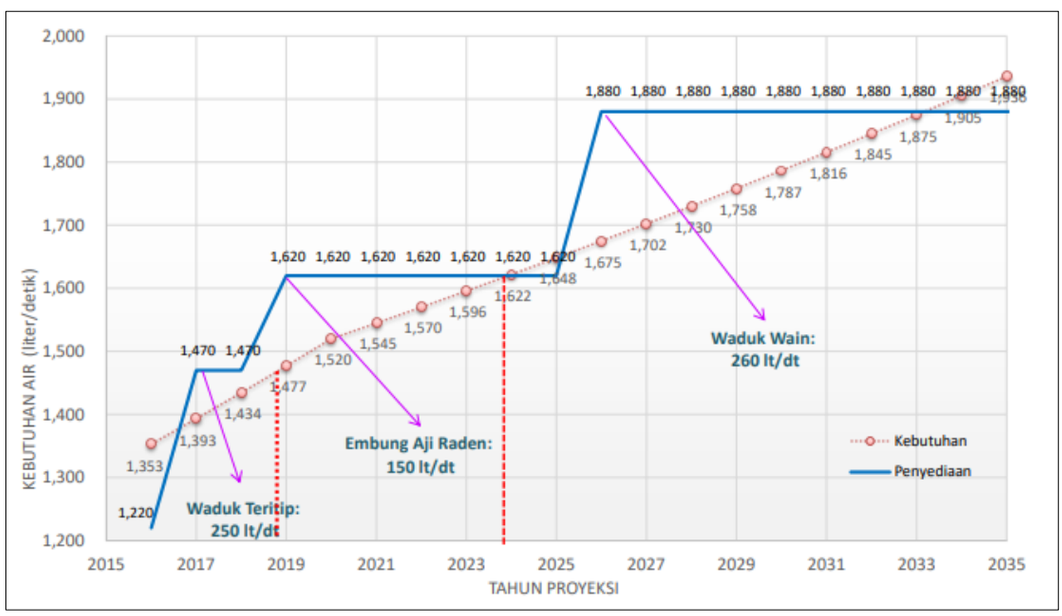
2.8 Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan Rencana Sektoral

Perencanaan sektoral mencakup program dan kegiatan yang secara khusus menyasar pada sektor tertentu secara rinci. Perencanaan tersebut sebagai respon sekaligus pengarustamaan terhadap isu yang menjadi fokus dalam pembangunan suatu daerah. Adapun pengintegrasian indikasi perencanaan sektoral ke dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan ditujukan untuk mengidentifikasi daya dukung daerah, khususnya terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus dalam perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Rencana sektoral yang dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 mencakup, Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minun (RISPAM) Tahun 2016-2035, Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2019-2049, dan *Masterplan Smart City* Kota Balikpapan.

2.8.1 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minun (RISPAM) Tahun 2016-2035

Dokumen RISPAM menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Adapun tujuan pengembangan SPAM di antaranya mencakup, tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan dan tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Berikut pola skenario penyediaan air minum di Kota Balikpapan pada Tahun 2016-2035.

Gambar 2. 63 Skenario penyediaan air minum Kota Balikpapan



Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kondisi eksisting pola penyediaan air minum Kota Balikpapan Tahun 2016 mencakup PDAM (76%), Perpipaan Non PDAM (12%) dan Non Perpipaan (12%). Terdapat tantangan dalam penyediaan air minum Kota Balikpapan, di antaranya keterbatasan sumber air baku, kualitas air permukaan dan airtanah, kehilangan air 30%, topografi berupa 85% berbukit dan keandalan penyediaan listrik. Berikut disajikan analisis pola penyediaan air minum di Kota Balikpapan hingga tahun 2035.

Tabel 2. 54 Pola Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Liter/detik)	Pemenuhan Kebutuhan		
			PDAM (Liter/detik)	Perpipaan Non PDAM (Liter/detik)	Non Perpipaan (Liter/detik)
2016	625.968	1.781	1.220	214	214
2035	917.996	2.459	1.936	363	121

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kebijakan untuk meningkatkan penyediaan air minum Kota Balikpapan di antaranya dengan meningkatkan layanan PDAM, pengendalian jaringan perpiaan PDAM dengan menggunakan air laut sebagai sumber air baku alternatif (10% airtanah dan 5% air laut), mengendalikan bukan jaringan perpipaan. Peningkatan layanan PDAM di antaranya dengan pemanfaatan *iddle capacity* dari sumber air baku eksisting, pengendalian kehilangan air secara bertahap (0,5% per tahun), dan pembangunan sumber air baku yang mencakup Bendungan Teritip (250 liter/detik), Embung Aji Raden (150 liter/detik) dan Waduk Wain (130 liter/detik) yang ditargetkan beroperasi tahun 2025. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan Waduk Semboja (100 liter/detik), Waduk Sepaku Semoi (150 liter/detik), Waduk Lambakan (1000 liter/detik) dan SPAM Regional Tebasabo (1700 liter/detik).

2.8.2 Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2019-2049

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2019-2049 sebagai berikut:

- Mengharmonisasikan pembangunan Kota Balikpapan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konsep 52:48 (52% kawasan lindung dan 48% kawasan budidaya) hingga 30 tahun mendatang;

- Mewujudkan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berada pada kondisi optimum dengan nilai IKLH Pada Tahun 2049 sebesar 75,26 untuk melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- Mengoptimalkan Ketersediaan Air Baku Kota Balikpapan dan pelestarian sumber-sumber air hingga Tahun 2049;
- Mewujudkan Kota Balikpapan Bebas Sampah dan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada Tahun 2049;
- Ikut serta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui target penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari Kota Balikpapan sebesar 30% pada Tahun 2049;
- Mewujudkan Optimalisasi Produktifitas Pangan Kota Balikpapan pada Tahun 2049;
- Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2049;
- Meningkatkan Kesadaran lingkungan oleh seluruh elemen (swasta-masyarakat-pemerintah) dalam menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup.

2.9 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai Perpres 59/2017 target indikator TPB sekaligus yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan yaitu sebanyak 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kota Balikpapan dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB). Dari 195 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan 70,59% yang diketahui capaiannya, sedangkan 24,10% masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “belum dilaksanakan”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kota Balikpapan. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya.

Tabel 2. 55 Capaian TPB menurut pilar di Kota Balikpapan

Pilar	SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai target nasional	SB (Sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional	Belum dilaksanakan belum mencapai target nasional	NA (tidak ada data)	Total
Ekonomi	26	10		12	48
Hukum dan Tata Kelola	12	1	1	6	20
Lingkungan Hidup	18	6		13	37
Sosial	55	18	1	16	90
Total	111	35	2	47	195

Terdapat 57% dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 18% dan 1% untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24% TPB yang tidak ada data.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan yang harus direspon di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan analisis data di bab II, hasil FGD dengan perangkat daerah, serta masukan dari berbagai stakeholder melalui survey pendapat. Sedangkan isu strategis Kota Balikpapan merupakan hasil analisis tabulasi silang terhadap isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional, serta hasil evaluasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025. Berikut adalah permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kota Balikpapan.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Daya Daing UMKM Belum Optimal

Perekonomian daerah Kota Balikpapan masih didominasi oleh sektor pengolahan. Namun, peran sektor-sektor lain terhadap peningkatan perekonomian Kota Balikpapan juga tidak kalah penting, salah satunya adalah UMKM. Saat ini, jumlah UMKM di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan total omset yang dimiliki sekitar 1,5 triliun. Kondisi ini menunjukkan sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian daerah.

Di satu sisi peran UMKM belum diimbangi dengan daya saing UMKM. Kondisi ini ditandai dengan jumlah UKM di Kota Balikpapan yang telah melakukan ekspor produk masih sedikit jika dibandingkan dengan Kota Samarinda. Pada tahun 2022, jumlah UKM di Kota Balikpapan yang melakukan ekspor sebanyak 6 UKM, sedangkan UKM di Kota Samarinda sebanyak 21 UKM. Selain itu, kinerja UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing UMKM belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh pengawasan dan pendataan UMKM belum optimal, pemasaran dan digitalisasi UMKM belum optimal, pelayanan perizinan dan pemenuhan standar perizinan dari UMKM belum optimal, dan belum optimalnya integrasi UMKM ke dalam sektor lain.

2. Belum optimalnya Daya Tarik Wisata

Keberagaman daya tarik wisata di Kota Balikpapan belum dikembangkan secara optimal sebagai atraksi wisata bagi wisatawan yang sebagian besar melakukan perjalanannya untuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE). Selama ini beberapa wisatawan yang datang melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan memiliki motivasi kunjungan untuk transit dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Di pihak lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang telah menjadi potensi unggulan Kota Balikpapan.

Optimalisasi pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemasaran, pengembangan industri, dan kelembagaan pariwisata termasuk kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Posisi Kota Balikpapan sebagai beranda IKN Nusantara juga menjadi peluang untuk pengembangan daya tarik wisata kota secara optimal, sehingga tidak sekadar menjadi kota yang dilewati begitu saja saat menuju IKN tetapi memiliki daya tarik tersendiri yang memiliki keunikan *(unique selling point)*, yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kota Balikpapan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi

Kondisi ketenagakerjaan masyarakat Kota Balikpapan menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang menganggur tergolong tinggi yaitu mencapai 6,90 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan memang menunjukkan tren yang menurun selama periode 2011-2022. Namun angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran, baik di level Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,71 persen, maupun level nasional sebesar 5,86 persen pada periode yang sama.

Tingginya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan disebabkan oleh kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia kerja, angkatan kerja Kota Balikpapan didominasi oleh lulusan SMA sederajat yang mencapai 48,86 persen. Kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Kota

Balikpapan yang didominasi oleh sektor industri pengolahan yang membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus yang umumnya didapatkan melalui pendidikan vokasi atau sarjana. Pada tahun 2022, serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hanya sebesar 7,33 persen jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Balikpapan yang mencapai 47,20 persen.

Tingkat pengangguran yang tinggi juga disebabkan oleh rendahnya keinginan masyarakat Kota Balikpapan untuk berwirausaha. Kondisi ini dapat dilihat dari status pekerjaan utama tenaga kerja yang masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 61,74 persen, sedangkan penduduk yang berusaha sendiri baru sebesar 20,02 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 6,22 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 3,13 persen pada tahun 2022. Apabila masyarakat memiliki keinginan untuk berwirausaha, persentase penduduk yang berusaha, baik berusaha sendiri maupun dibantu buruh, dapat mencapai angka yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong penurunan angka pengangguran.

4. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan

Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kawasan perkotaaan yang didominasi lahan terbangun berimplikasi pada berkurangnya luasan lahan produksi bahan pangan, sehingga akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan pada masa depan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan adanya ancaman krisis iklim dan permasalahan geopolitik global. Apabila melihat kawasan peruntukan pertanian di Kota Balikpapan yang hanya sebesar 4,17% dari luas keseluruhan pemanfaatan lahan dan potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.576,67 Ha, maka ketahanan pangan di Kota Balikpapan belum optimal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2022 menjadi peringkat kedua nasional kategori kota, namun sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa Kota Balikpapan masih memiliki ketergantungan dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan.

5. Belum Optimalnya Penyediaan Air Baku

Penyediaan air baku di Kota Balikpapan masih belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber air yang ada di Kota Balikpapan. Sumber eksisting saat ini mencakup Embung Teritip, Embung Air Raden, Embung Manggar dan sumur-sumur dalam. Ketersediaan sumber-sumber air tersebut, belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan. Masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Total penyediaan air baku Kota Balikpapan hingga tahun 2020 adalah sebesar 1.570 liter/detik. Adapun total kebutuhanmya sebesar 2.248 liter/detik, sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik (RPJMD 2021-2026). Tercatat capaian akses aman air minum Kota Balikpapan sebesar 81,76% tahun 2021.

Permintaan air bersih semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih. Di sisi lain konservasi air berbasis hulu hilir juga belum diimplementasikan secara optimal, yang dibuktikan dengan capaian indeks kualitas air di Kota Balikpapan yang memiliki trend semakin menurun (berkategori kurang) hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menjadikan penyediaan air baku, di Kota Balikpapan perlu untuk semakin dioptimalkan.

6. Belum Optimalnya Penanganan Banjir

Banjir menjadi salah satu permasalahan penting untuk ditangani di Kota Balikpapan. Berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 30 titik. Selain itu, pada tahun 2018 hingga 2020, luasan genangan banjir pada DAS Klandasan dan DAS Sepinggan mengalami kinerja yang stagnan atau tidak mengalami penurunan luasan genangan banjir.

Berdasarkan analisis data, observasi lapangan, dan *focus group discussion*, penyebab banjir di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi sistem drainase yang belum

terintegrasi secara baik dari permukiman di kelurahan hingga perkotaan dan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang belum optimal. Sementara itu, aspek non teknis meliputi kesadaran masyarakat, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penegakan hukum. Kebijakan penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola ruang perkotaan dan pengelolaan sumberdaya air dari hulu ke hilir.

7. Belum Optimalnya Area Cakupan Penanganan Bencana

Cakupan penanganan bencana di Kota Balikpapan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama, implementasi mitigasi bencana yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait penguatan kapasitas masyarakat ketika terjadi bencana alam maupun non-alam.

Kedua, belum optimalnya kapasitas saluran drainase dan belum terbangunnya bendungan pengendali banjir sesuai dengan masterplan drainase. Ketiga, pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin. Penyebab lainya, yaitu penanggulangan bencana banjir di Kota Balikpapan belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Kondisi tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kejadian banjir tahun 2020 yang mencapai 88 kejadian. Selain itu, bencana lain, seperti kebakaran pemukiman/gedung juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat sebanyak 39 kejadian kebakaran pemukiman/gedung pada tahun 2015, lalu meningkat menjadi 44 kejadian pada tahun 2016. Kebakaran tersebut semakin meningkat, menjadi 51 kejadian hingga tahun 2019. Kondisi tersebut menjadi yang menjadi perhatian khusus agar selanjutnya dilakukan upaya yang optimal terkait penanganan bencana di Kota Balikpapan.

8. Penanganan Degradasi Lingkungan Belum Optimal

Penanganan degradasi lingkungan yang belum optimal di Kota Balikpapan merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dan tindakan berkelanjutan. Tantangan tersebut dapat dilihat dari kinerja komponen pembentuk IKLH yaitu kualitas udara, air dan lahan. Dari ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, indeks kualitas udara dan air memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2020. Capaian

indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015 - 2020. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan. Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut, disebabkan karena telah terjadi kontaminasi zat pencemar terhadap tubuh air di Kota balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Selanjutnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih juga perlu mendapat perhatian. Kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan masih mengolah air limbah menggunakan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Pengelolaan sampah yang belum optimal juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kinerja pengelolaan sampah di sumbernya pada tahun 2020 belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), dan banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Selanjutnya, capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015 – 2020.

Merpertimbangkan daya tampung TPAS yang terbatas, dan potensi dampak dari bangkitan IKN, maka diperlukan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif dan terintegrasi dari hulu ke hilir baik untuk pengelolaan persampahan maupun konservasi air baku.

9. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Infrasruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas

publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Perumahan dan permukiman layak di Kota Balikpapan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut dibuktikan dengan luasan kawasan kumuh yang tertangani sebesar 52,42 Ha pada tahun 2022. Dinamika pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dampak ikutan (*multiplier effect*) IKN memicu backlog perumahan di Kota Balikpapan juga menjadi semakin tinggi di Kota Balikpapan. Dengan demikian, peningkatan intervensi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap akses masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak perlu untuk semakin diperkuat.

10. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal

Selama periode pembangunan sebelumnya, pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan terus mengalami perubahan. Kota Balikpapan memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang cukup memadai baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta. Namun demikian, pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama dari segi pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan tata kelola manajemen kesehatan, pengembangan layanan unggulan, dan peningkatan upaya preventif dan promotif tentang kesehatan kepada masyarakat.

Dari segi jumlah dan jenis tenaga kesehatan, Kota Balikpapan masih terkendala dalam pemenuhan jumlah minimal 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas, belum optimalnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit, dan masih kurangnya jumlah dokter spesialis. Di sisi lain pemenuhan alat kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan lebih responsif dan handal. Dari segi keterjangakauan biaya, jarak ke pusat pelayanan kesehatan, dan waktu tunggu dalam pelayanan juga harus diperhatikan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan terbaik.

Pelayanan kesehatan tidak hanya fokus pada upaya kuratif, melainkan mulai meningkatkan upaya preventif dan promotif. Peningkatan pola hidup sehat pada masyarakat merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kesehatan, baik terhadap penyakit menular maupun tidak menular. Untuk itu, upaya screening dan deteksi dini juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak kesehatan yang lebih beresiko.

Berdasarkan data capaian SPM Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021, SPM Kesehatan Kota Balikpapan baru tepenuhi 65%. Adapun pelayanan yang masih di bawah 50% yakni pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan usia dasar, pelayanan TBC, dan Hipertensi. Belum optimalnya capaian SPM Kesehatan di Kota Balikpapan juga berkorelasi dengan cukup tingginya penderita HIV/AIDS, TBC, Demam Berdarah, angka kematian ibu, penanganan stunting, dan sebagainya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yakni penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Kota Balikpapan belum memiliki penampungan khusus untuk menangani ODGJ di Kota Balikpapan dari segi kesehatan. Selama ini penanganan ODGJ hanya dilakukan di Kota Samarinda. Potensi masalah ODGJ bisa semakin meningkat di kemudian hari. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan secara digital seperti telemedicine juga perlu dikembangkan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang lebih luas.

11. Akses dan Kualitas Pendidikan Belum Optimal

Salah satu permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh Kota Balikpapan dalam bidang SDM adalah terkait belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan. Permaslahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum meratanya sebaran fasilitas layanan pendidikan yang berkualitas, belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan serta belum meratanya sebaran sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh fasilitas pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah yang masih berada di angka 10 tahun pada tahun 2022 menjadi salah satu indikasi perlu ditingkatkannya akses pendidikan di Kota Balikpapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan dapat merasakan pendidikan formal selama 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini masih perlu ditingkatkan guna mengejar program nasional yang berada pada angka 12 tahun. Selain itu, isu terbatasnya jumlah sekolah tingkat menengah atas menjadi hal yang perlu diselesaikan. Upaya penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi menjadi langkah penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting mengingat Kota Balikpapan merupakan

salah satu daerah yang kelak akan menjadi daerah pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di masa yang akan datang.

12. Belum Optimalnya Upaya Perlindungan Sosial

Secara umum, perlindungan sosial di Kota Balikpapan dilakukan melalui upaya penurunan kemiskinan dan melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan. Upaya penurunan kemsikinan di Kota Balikpapan dilakukan melaui integrasi antara program kemiskinan level nasional, daerah, dan masyarakat. Selama periode 2005-2022, angka kemiskinan Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan Kota Balikpapan cukup rendah yakni 2,45% atau sebanyak 15.830 jiwa.

Namun jika diperhatikan dari grafik kemiskinan per tahun, ada 3 gelombang yang menunjukkan peningkatan penduduk miskin yaitu pada tahun 2010 saat terjadi inflasi secara nasional, tahun 2015 saat terjadi penurunan ekonomi yang menyebabkan PHK besar-besaran, dan tahun 2021 saat terjadi pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Balikpapan menunjukkan penyaluran bantuan sosial untuk kebutuhan dasar dan jaminan sosial belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun angka kemiskinan Kota Balikpapan relative kecil, namun kondisi tersebut cukup rentan apabila terjadi guncangan sosial dan ekonomi, serta upaya pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial belum dilaksanakan secara optimal.

Selain penurunan kemiskinan, hal lain yang perlu diperhatikan yakni penanganan terhadap masalah-masalah sosial melalui upaya perlindungan terhadap kelompok rentan. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pemerintah Kota Balikpapan dan hasil FGD dengan OPD Kota Balikpapan menunjukkan bahwa masih banyaknya masalah sosial yang terjadi. Masalah sosial tersebut antara lain masih belum optimalnya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak (<70%), belum optimalnya kesetaraan gender dengan nilai indeks pemberdayaan gender 68,62 (2022), masih kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas, belum optimalnya perlindungan sosial bagi lansia, adanya lokalisasi dan pergaulan bebas, adanya pengedaran narkoba, dan adanya potensi radikalisme.

Di sisi lain, Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN juga perlu mengantisipasi dampak dari potensi lonjakan arus migrasi yang semakin

meningkat. Arus migrasi tersebut bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar jika tidak diantisipasi dan dilakukan penanganan yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang mulai timbul yakni adanya konflik lahan/pembangunan perumahan, dan pemukiman illegal di sekitar daerah pesisir.

Salah satu kendala dalam penanganan masalah sosial yakni belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif. Selain itu, masih terkendala tahap pengembangan dan peningkatan institusi sosial yang ada. Selama periode 2016-2022, jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan stagnan pada angka 6 dan pekerja sosial stagnan pada angka 34. Terbatasnya jumlah tenaga yang melakukan pelayanan sosial dapat menghambat upaya program perlindungan sosial pada masyarakat. Selain itu, banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Kota Balikpapan perlu adanya kerjasama untuk melaksanakan upaya pembangunan di daerah, termasuk pembangunan dalam bidang sosial.

13. Inklusifitas Pelayanan Publik

Inklusifitas menjadi salah satu isu yang kerap mencuat khususnya di wilayah perkotaan. Penyediaan pelayanan publik yang inklusif perlu menjadi fokus pembangunan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Pelayanan publik yang inklusif dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok difabel, lansia dan anak seperti jalur khusus difabel, penyediaan ruang khusus bagi anak, dan ruang bagi ibu menyusui. Lebih lanjut, pelayanan publik di Kota Balikpapan diharapkan dapat bertransformasi tidak hanya mengedepankan model *e-government.* Namun, lebih jauh menjadi *smart government* dalam 20 tahun yang akan datang.

14. Belum optimalnya tata kelola dan reformasi birokrasi

Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Balikpapan masih belum optimal. Penilaian capaian ini dapat ditinjau melalui aspek sumber daya manusia (SDM), sinkronisasi regulasi pusat-daerah, serta sarana dan prasarana. Terkait aspek sumber daya manusia, proses rekrutmen Pemerintah Kota Balikpapan hanya terbatas pada kandidat ASN saja. Hal ini mengindikasikan bahwa kandidat

non-ASN seperti PPPK dan paruh waktu tidak dapat direkrut. Kebijakan ini dapat menghambat keberagaman dalam pembagian tenaga kerja internal pemerintah serta berpotensi mengabaikan calon aparatur yang memenuhi syarat. Selain itu, ketidakseimbangan antara pegawai yang pensiun dan pegawai baru mempengaruhi efektivitas pekerjaan mengingat jumlah kepegawaian yang tidak memadai. Kesenjangan antar generasi pegawai yang mencolok juga terlihat, seperti pegawai berusia relatif muda ditandai dengan kecerdasan dan kreativitas yang tinggi, namun daya juangnya relatif rendah. Selain perbedaan antar generasi, permasalahan kesehatan mental juga ditemukan di beberapa kalangan pegawai serta membutuhkan intervensi secara kelembagaan. Aspek SDM lain yang menghambat efektivitas keseluruhan upaya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah kurangnya auditor kepegawaian dan perlunya perbaikan sistem informasi dan manajemen pengelolaan SDM.

Masalah yang teridentifikasi pada aspek regulasi dan sarana dan prasarana juga memerlukan perhatian mendalam guna mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Balikpapan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Balikpapan sudah tergolong baik, dengan Indeks SPBE mencapai 3,05 pada tahun 2022. Meski demikian, pengelolaan manajemen dan audit SPBE masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Sementara itu, kebijakan pemerintah pusat terkait pendataan penduduk tidak diikuti dengan dukungan yang memadai terhadap pemerintah daerah. Dalam menerapkan prinsip *agile government*, banyak indikator kinerja dari pemerintah pusat yang tidak relevan dengan konteks daerah. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab dalam menyusun proses bisnis tiap instansi pemerintah belum efektif karena penyusunannya hanya dilakukan oleh bagian organisasi saja. Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana fisik di seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) juga turut memberikan hambatan teknis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan.

15. Belum Optimalnya Penerapan *Smart City*

Kota Balikpapan memiliki sebuah konsep *smart city* atau kota cerdas yang mengusung visi "*Balikpapan The Most Livable City*" sebuah kota yang layak huni dengan tingkat kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya.

Kota cerdas menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat/komunitas, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan *smart city* Kota Balikpapan tahun 2022, program *smart city* Kota Balikpapan perlu memaksimalkan rencana aksi program *smart city* yang tertuang dalam *master plan smart city* dengan dukungan kebijakan atau kelembagaan, Peningkatan Kapasitas SDM, Pembangunan Infrastruktur Pendukung, Pembangunan Aplikasi Pendukung dan Penguatan Literasi. Dalam penerapan *smart city* di Kota Balikpapan masih perlu menyelaraskan kerangka kesiapan perencanaan pembangunan daerah menjadi kota cerdas atau *smart city readiness* dengan kondisi saat ini, agar mendukung upaya menjadi kota cerdas yang layak huni dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan dan penerapan kota cerdas harus disesuaikan dengan karakter dan potensi Kota Balikpapan.

3.2 Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus berakar pada isu-isu strategis yang ada dalam konteks global, nasional, regional, dan lokal agar terbentuk pemahaman komprehensif terkait potensi sinergi antar skala yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan setiap daerah untuk menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan tujuan nasional dan global yang lebih luas, memastikan koherensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya dan implementasi arah kebijakan. Pendekatan berlapis dalam perencanaan juga akan meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan daerah terhadap tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang dinamis dalam jangka panjang. Isu-isu strategis tingkat global hingga lokal yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 akan dibahas secara detail pada bagian berikut ini.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global merujuk pada tantangan dan permasalahan yang dampaknya bersifat universal dan memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Dampak dari isu global dapat dirasakan secara langsung dalam skala domestik, serta mampu memengaruhi kebijakan dalam negeri. Perkembangan global memberikan wawasan mendalam tentang tren, tantangan, dan potensi solusi yang relevan dengan mengikuti kompleksitas

isu-isu global. Oleh karena itu, mengintegrasikan penanganan isu-isu global sebagai landasan makro dalam perencanaan jangka panjang daerah hingga dua dekade mendatang adalah langkah yang sangat mendesak. Isu global yang dipakai dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 adalah sepuluh *Megatrend* global yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Penjelasan mengenai tiap-tiap tantangan akan dijabarkan pada bagian berikut ini.

3.2.1.1 Demografi Global

Keadaan demografi global saat ini ditandai dengan suatu tonggak penting, dengan populasi dunia yang melampaui 9,45 miliar jiwa. Salah satu aspek penting dari lanskap demografis ini adalah peningkatan pesat populasi lansia, terutama di Asia. Transisi demografi ini menandakan adanya tantangan besar yang segera memerlukan perhatian. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi jika tantangan ini tidak diatasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dampak tersebut antara lain, terganggunya stabilitas penunjang kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh tidak memadainya infrastruktur layanan kesehatan, sistem jaminan sosial, dan dana pensiun. Dari sudut pandang ekonomi, angkatan kerja produktif yang berkewajiban untuk memikul beban penduduk tidak produktif terus bertambah sehingga dapat menghambat pembangunan. Tanpa intervensi dalam perencanaan, potensi terganggunya kesejahteraan dan melebarnya kesenjangan sosial masyarakat akan semakin besar. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah perlu mengakomodasi dinamika demografi yang terus berkembang, sehingga memastikan arah yang seimbang dan berkelanjutan di masa depan.

3.2.1.2 Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikannya tantangan global yang esensial, mengingat adanya ancaman akan hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang ada. Transformasi ini mengubah layanan ketenagakerjaan dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan perencanaan yang responsif terhadap dampaknya. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat menyebabkan meluasnya pengangguran, dan menyebabkan sebagian besar angkatan kerja tidak mempunyai mata pencaharian yang layak. Hal ini tidak hanya dapat memicu ketidakstabilan ekonomi tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial, karena semakin banyak orang yang terpinggirkan dan

kehilangan kesempatan untuk mencukupi tanggungan hidupnya. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut kebijakan yang proaktif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan mengedepankan pendidikan, pelatihan, dan perluasan pasar kerja. Arah pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlengkapi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa yang akan datang.

3.2.1.3 Konstelasi Perdagangan Global

Megatrend global berikutnya adalah terkait dinamika perdagangan. Kondisi konstelasi perdagangan global saat ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang stabil sebesar 3,4 persen per tahun. Perluasan ini saling ketergantungan dan keterhubungan perekonomian di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan peluang perdagangan global ke dalam perencanaan jangka panjang, peluang perdagangan global mempunyai potensi keuntungan yang signifikan seperti fasilitasi pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi teknologi, hingga pembinaan kerja sama tingkat regional. Meski demikian, perluasan perdagangan yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan hidup. Perencanaan perdagangan jangka panjang yang seimbang sangat penting untuk diterapkan agar potensi manfaatnya dapat berpengaruh langsung pada kesejahteraan kolektif suatu daerah.

3.2.1.4 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global merupakan *Megatren* global berikutnya yang ditandai dengan lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari total populasi global, sehingga menjadikan kota sebagai pusat perekonomian dan kehidupan yang sangat penting. Konsentrasi umat manusia ini mempunyai pengaruh yang besar, menyumbang hingga 70 persen PDB global. Namun, tanpa perencanaan pembangunan jangka panjang yang cermat, tren ini akan membawa sejumlah dampak negatif. Urbanisasi yang pesat akan membebani infrastruktur, sering kali mengakibatkan perumahan yang tidak memadai, kemacetan transportasi, dan degradasi lingkungan. Kesenjangan sosial-ekonomi cenderung semakin parah mengingat masyarakat yang terpinggirkan akan menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang kerja. Isu ini berpotensi

membahayakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dalam perencanaan jangka panjang dan pembangunan kota sangat penting untuk mewujudkan kehidupan kota masa depan yang berketahanan, sejahtera, dan adil.

3.2.1.5 Luar Angkasa

Megatrend ruang angkasa yang terus berkembang mencakup ekonomi, keberlanjutan, dan keamanan luar angkasa, mewakili inovasi yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Dengan meningkatnya minat dan investasi, ruang angkasa telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang potensial, menjanjikan sumber daya yang belum dimanfaatkan, penelitian dan pengembangan teknologi, serta pasar baru. Beberapa masalah yang terjadi dalam *megatren ini* antara lain adalah meningkatnya jumlah sampah antariksa menimbulkan ancaman nyata terhadap operasional satelit dan misi di masa depan. Aspek keberlanjutan juga berada dalam keseimbangan mengingat dampak lingkungan dari aktivitas luar angkasa, mulai dari teknologi penunjang hingga ekstraksi sumber daya alam yang memerlukan perencanaan yang bijaksana. Pemanfaatan peluang luar angkasa perlu dipertimbangkan secara jangka panjang untuk memastikan bahwa ruang angkasa memberikan nilai tambah ekonomis serta menciptakan kerja sama yang berkontribusi bagi kemajuan manusia.

3.2.1.6 Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal dan pesatnya kemajuan teknologi keuangan, menjadikannya *megatrend* di bidang transformasi ekonomi. Adapun urgensi terkait tata kelola keuangan mengingat perannya dalam membentuk stabilitas dan efektivitas sistem keuangan di suatu negara. Beberapa perhatian khusus terkait *megatrend* ini perlu ditempatkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kemajuan teknologi yang pesat, yang melampaui beberapa kebijakan eksisting, dapat menyebabkan kerentanan pada infrastruktur keuangan dan pelanggaran keamanan siber. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal yang tidak inklusif dapat memicu ketidakseimbangan ekonomi dan berpotensi memicu pengelolaan keuangan masyarakat yang tidak efisien. Untuk menjamin tata kelola keuangan global yang tangguh dan inklusif, diperlukan perencanaan yang responsif dalam

membangun struktur tata kelola yang kuat dan adaptif, tanggap inovasi teknologi, serta penentuan arah kebijakan fiskal yang bijaksana.

3.2.1.7 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan agenda global yang telah lama diupayakan implementasinya. Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan secara jangka panjang mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta menganggu kenyamanan berkehidupan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemeritahan dunia, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan yang tidak responsif dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis kemanusiaan yang telah diprediksi sebelumnya. Strategi pembangunan jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim dapat memedomani perkembangan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk melakukan dekarbonisasi sektor-sektor utama, dan berinvestasi pada infrastruktur energi terbarukan, serta memberikan insentif pada praktik berkelanjutan di seluruh industri.

3.2.1.8 Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam, yang dipicu oleh meluasnya pengaruh perekonomian Asia dan jumlah penduduk di Afrika, merupakan *megatrend* penting karena implikasinya yang cukup besar. Tren ini berakar pada meningkatnya permintaan akan komoditas penting, yang didorong oleh pesatnya urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. Pentingnya hal ini terletak pada peran penting sumber daya alam dalam menopang aktivitas ekonomi global, termasuk pertanian, produksi energi, dan proses industri. Adapun beberapa urgensi mengapa *megatrend* ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas sumber daya yang langka dapat

terjadi, sehingga memperburuk ketegangan geopolitik dan menghambat arah pembangunan berkelanjutan. Penerapan praktik pengelolaan sumber daya strategis yang memprioritaskan konservasi, distribusi yang adil, dan transisi menuju teknologi berkelanjutan dan hemat sumber daya dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan. Dampak buruk yang tidak dimitigasi akan menghambat kemajuan menuju stabilitas global dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dan berpikiran jangka panjang harus dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya bumi yang terbatas secara seimbang dan adil.

3.2.1.9 Pertumbuhan Kelas Menengah

Megatrend selanjutnya adalah pertumbuhan demografi kelas menengah yang sedang berkembang. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai status kelas menengah dan atas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai angka 90 persen dari populasi global atau sekitar 8,8 miliar manusia. Tren ini menandakan perubahan signifikan dalam dinamika sosio-ekonomi global dan mempunyai implikasi yang luas. Ketika kelas menengah bertambah, pola konsumsi dan kebutuhan juga meningkat, sehingga permintaan terhadap sumber daya, lapangan kerja, dan barang-barang primer meningkat. Mayoritas kelas menengah diperhadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai generasi *sandwich,* yaitu mereka memiliki peran ganda dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan terkadang fisik kepada orang tua dan anak. Generasi *sandwich* merupakan cerminan dari pergeseran demografi, harapan hidup yang lebih panjang, dan perubahan struktur keluarga, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan multigenerasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang harus mempertimbangkan arah pembangunan yang proaktif pada pengembangan keterampilan, mendorong diversifikasi lapangan kerja, sekaligus mengatasi kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kelas menengah sangat diperlukan untuk mewujudkan masa depan global yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2.1.10 Geopolitik dan Geoekonomi

Megatrend terakhir adalah dinamika geopolitik dan geoekonomi. Terdapat beberapa perubahan kebijakan domestik agar dapat menyesuaikan ketegangan persaingan antarnegara yang diamplifikasi dengan munculnya poros kekuasaan baru. Negara-negara berkembang,

yang secara kolektif berkontribusi sebesar 71 persen terhadap dinamika ini, memainkan peran penting dalam membentuk kembali peran kerja sama internasional. Meningkatnya persaingan antar negara mendorong penyesuaian kebijakan dalam negeri, yang mengarah pada fokus pada prioritas ekonomi, penyesuaian perdagangan, dan investasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang perlu mengakomodasi pengembangan tenaga kerja, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan kebijakan lingkungan hidup untuk mempertahankan daya saing dan beradaptasi dengan perkembangan global. Arah pembangunan memberikan urgensi yang jelas bagi setiap daerah untuk memposisikan potensi sumber daya utama secara strategis dalam konteks pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama antar wilayah.

3.2.2 Isu Strategis Nasional (RPJPN)

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPN dengan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penggunaan terminologi Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Ada 14 isu strategis nasional harus ditangani untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut uraian terkait keempat belas isu strategis nasional.

3.2.2.1 Produktivitas Rendah

Rata-rata tingkat produktivitas Indonesia yang dilihat melalui indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66 poin. Rendahnya angka produktivitas di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, tertinggalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan belum optimalnya sistem kelembagaan meliputi penghargaan dan hukuman, serta diperparah dengan lemahnya kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia kemudian mengakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulanya mencapai 5,7 persen selama periode tahun 2005 hingga 2010, kemudian menjadi hanya 4 persen pada 2015 hingga 2022. Kondisi itu masih diperparah dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial pada saat pandemi Covid-19 yang

mencapai di bawah 5 persen. Isu ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila ingin menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.2 IPTEKIN dan Riset Lemah

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) merupakan salah satu hal krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berperan melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, pengembangan IPTEKIN di Indonesia selama ini terhambat oleh setidaknya dua hal, yakni rendahnya komitmen pemerintah terkait anggaran, ditambah dengan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Indonesia tercatat hanya menyediakan anggaran untuk IPTEKIN sebesar 0,28 persen dari PDB dan itu hanya 26,92 persen dari persentase anggaran yang disediakan oleh Malaysia, serta hanya 5,82 persen dengan Korea Selatan. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388 jiwa, sedangkan Singapura mencapai 7.287 jiwa.

Ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ikut berkontribusi dalam lemahnya IPTEKIN dan riset karena cenderung kurang kondusif. Hal itu tampak dari lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, baik secara domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama pada ranah riset dan industri juga sedikit banyak dikarenakan tingkat kesadaran ilmiah di masyarakat yang masih lemah, sehingga keinginan untuk melakukan penelitian juga cenderung rendah.

3.2.2.3 Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Deindustrialisasi merupakan suatu kondisi industri yang tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian di suatu negara. Deindustrialisasi ditandai dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus melemah. Terdapat beberapa penyebab semakin melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB, yakni adanya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat logistik dan tingkat suku bunga.

Masalah serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami penurunan, yakni dari semula Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 dan menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, yakni mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

3.2.2.4 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Indonesia memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang tersebar di berbagai daerah, namun kinerja pariwisata selama ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada, terutama apabila dilihat melalui keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Pada sisi lain, adanya disrupsi digital dan teknologi juga memengaruhi proses pemanfaatan potensi pariwisata, terutama terkait promosi daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan proses percepatan dari pemanfaatan teknologi pada sektor pariwisata. Hal serupa juga terjadi pada industri kreatif yang menuntut adanya transformasi digital, komersialisasi, dan perluasan akses ke pasar internasional.

3.2.2.5 Ekonomi Biru Belum Optimal

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi dari sektor kelautan, termasuk ekonomi biru yang dapat menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penggunaan terminologi ekonomi biru karena merujuk pada pernyataan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indonesia dengan potensi yang melimpah sampai saat ini belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki, sehingga kontribusi sektor kelautan pada PDB hanya sebesar 7,60 persen. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi optimalisasi dari sektor kelautan, seperti belum optimalnya proses manajemen wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, terbatasnya diversifikasi industri yang memanfaatkan kekayaan laut, serta minimnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Tantangan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah rendahnya penanganan plastik di laut, tingginya kegiatan *illegal,*

unreported, dan *unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

3.2.2.6 Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama ini berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yakni mencapai 99,99 persen untuk UMKM, dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Namun, penyerapan tenaga kerja yang besar tidak serta merta linier dengan kontribusi UMKM dan Koperasi pada PDB. Tercatat kontribusi UMKM pada PDB hanya mencapai 60,51 persen dan 1,07 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan ada begitu banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan sumber daya manusia berkeahlian rendah, bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, minimnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, terbatasnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan terbatasnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.

Perekonomian Indonesia secara makro memang dapat dikatakan cukup solid di tengah ketidakpastian global saat ini, namun tetap diperlukan perencanaan terkait kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan. Selama ini ruang fiskal yang rendah dan kualitas belanja yang belum optimal mengakibatkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Pada sisi lain, kebijakan moneter juga dihadapkan oleh adanya ketidakstabilan harga di tengah volatilitas harga komoditas pasar global, sehingga berdampak pada risiko tekanan inflasi di Indonesia.

3.2.2.7 Minimnya Infrastruktur dan Rendahnya Literasi Digital

Indonesia masih mengalami keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas dari sisi penawaran, permintaan dan ekosistem digital. Keterbatasan dari sisi penawaran selama ini terkait pada infrastruktur yang belum memadai, seperti terbatasnya kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Kemudian dari sisi permintaan, literasi digital dan pemanfaatan teknologi dari luar negeri yang tidak produktif menjadi salah satu masalah utama. Hal itu menyebabkan tingginya angka penetrasi jaringan tidak serta merta mampu mendongkrak proses pembangunan karena penggunaannya mayoritas

untuk hiburan. Kondisi ekosistem yang juga tidak mendukung proses percepatan digitalisasi, riset, dan inovasi juga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia, ditambah dengan isu keamanan siber yang belum memadai.

3.2.2.8 Pembangunan Belum Berkelanjutan

Visi Indonesia Emas 2045 harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam proses pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Selama ini, proses pembangunan di Indonesia cenderung hanya melihat dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya penggunaan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, yakni mencapai 87,1 persen. Ketergantungan Indonesia akan energi fosil sesungguhnya telah mengalami penurunan. Hal itu ditandai dengan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan yang mencapai 8,06 persen selama periode 2005 hingga 2022, namun tetap belum mencukupi standar pembangunan berkelanjutan karena masih sangat bergantung dengan energi tak terbarukan.

Tingginya angka ketergantungan Indonesia akan energi fosil juga mengakibatkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam dapat berlangsung dari waktu ke waktu karena minimnya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman terhadap para pelaku ekonomi yang patuh maupun yang bertentangan dengan ekonomi hijau. Padahal ketahanan ekonomi hijau berbasis ekologi mampu menjadi kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2.2.9 Integrasi Domestik Terbatas

Indonesia menetapkan transformasi ekonomi domestik yang terintegrasi sebagai salah satu arah kebijakan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dasar dari penetapan itu adalah terbatasnya integrasi domestik di Indonesia akibat pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa. Sistem logistik yang tangguh menjadi salah satu dasar dalam perwujudan integrasi domestik di Indonesia. Namun, selama ini sistem logistik Indonesia terkendala keterbatasan infrastruktur konektivitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa, banyaknya regulasi yang menjadi

hambatan, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik antar wilayah.

Integrasi domestik tidak hanya terjadi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, melainkan terjadi pula di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan cenderung tidak elastis karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan sekitarnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya berada pada titik tertentu dan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3.2.2.10 Makin Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu dioptimalkan sebagai salah satu aspek utama penentu keberhasilan. Namun, selama rentang tahun 2005 hingga 2022, kualitas sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin rendah, terutama dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan sektor kesehatan dari waktu ke waktu dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Transisi demografi juga mengakibatkan perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan yang dihasilkan, seperti adanya pola penyakit baru yang mungkin terjadi di masyarakat. Saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, adanya ketimpangan pada akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan belum adaptifnya sektor kesehatan pada perkembangan teknologi, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan kesehatan.

Sektor kedua yang berpengaruh besar pada sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama ketika berupaya mengoptimalkan bonus demografi. Dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggu di ranah global, dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai pasar tenaga kerja. Layanan pendidikan yang belum merata juga dikarenakan oleh disparitas partisipasi pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi yang tinggi. Kemudian kualitas

pendidikan dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru yang tidak merata. Pada tataran yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya terimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, padahal hal itu mampu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Berbagai kondisi tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang kurang optimal, sehingga penduduk yang berpartisipasi di sektor pendidikan menjadi sumber daya yang kurang berkualitas dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait sumber daya manusia adalah perlindungan sosial. Isu perlindungan sosial menjadi krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan berubah dan ditandai dengan bertambahnya rasio ketergantungan nasional. Oleh karena itu, isu terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lain untuk kelompok lansia penting untuk diantisipasi sejak saat ini agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan kedepannya.

Tata kelola menjadi kunci dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola dapat mengintervensi melalui diadakannya kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.11 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada segi tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa hal yang belum dapat dioptimalkan hingga saat ini, seperti adanya regulasi yang berlebih dan ditambah dengan rendahnya kualitas regulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya regulasi tumpang tindih baik pada skala nasional maupun daerah. Selain itu kelembagaan instansi publik selama ini masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan timbulnya ego sektoral dalam kerangka hubungan pemerintah. Tata kelola yang terkait proses bisnis juga belum mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga dipandang tidak adaptif dan terkotak-kotakkan, serta menimbulkan inefisiensi. Pada problematika yang lebih tinggi, terjadi pula masalah kurang meratanya manajemen talenta di seluruh kementerian/lembaga/daerah, sehingga

berimplikasi pada rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, rendahnya budaya dan etos kerja, serta kuatnya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta juga semakin rumit akibat adanya kerentanan yang dihadapi ASN terhadap intervensi politik. Meskipun pemerintah diminta untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan kebijakan, tetapi selama ini prinsip keterbukaan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah tata kelola yang terjadi pada internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti belum meratanya kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan dihadapkan masalah mendasar, seperti infrastruktur. Kurang optimalnya output yang diterima masyarakat kemudian menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

3.2.2.12 Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.

3.2.2.13 Demokratisasi Belum Optimal

Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal, misalnya saja demokrasi pada aspek politik terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Secara tidak langsung, hal itu menimbulkan adanya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, dan semakin meningkatnya perilaku diskriminatif dan

intoleransi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

3.2.2.14 Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Hasil dari pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi pada tahun 1999 cukup signifikan, namun juga disertai dengan ketimpangan antara Jawa sebagai pusat pembangunan (*Java centris*) dan luar jawa yang kurang mendapat perhatian. Ketimpangan hadir dalam berbagai bentuk, seperti tidak meratanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, terbatasnya anggaran pemerintah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Kesenjangan antara juga hadir melalui masalah pertanahan, salah satunya adalah terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencama dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Memang secara eksplisit, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah kebutuhannya. Salah satunya terkait infrastruktur konektivitas domestik dan global, terutama di laut dan udara. Hal itu dikarenakan belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional.

Masalah kesenjangan antara Jawa dan Pulau Jawa perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika adanya potensi kerentanan keamanan nasional dalam menghadapi kompleksitas ancaman gangguan serta terdapat peningkatan isu geopolitik kawasan di daerah perbatasan.

3.2.3 Isu Strategis Regional (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)

Isu strategis regional merupakan isu kewilayahan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis jangka panjang di level daerah, termasuk Kota Balikpapan Berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi pembangunan suatu daerah. Adapun isu regional dibagi ke dalam dua bagian yaitu isu regional dalam konteks luas yang mencakup Wilayah

Kalimantan dan isu regional yang lebih spesifik mencakup Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum, potensi pembangunan wilayah Kalimantan mencakup beberapa sektor, antara lain pertambangan, penggalian, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sektor industri pengolahan berbasis pertambangan dan penggalian tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena pengembangan kawasan industri belum optimal. Selain itu, capaian pembangunan di beberapa bidang juga turut mengalami tantangan seperti bidang sosial, ekonomi, dan sarana dan prasarana. Secara rinci isu dan tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Isu dan Potensi Pembangunan Wilayah Kalimantan

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
1	Ekonomi	Tingginya kesenjangan antarwilayah di Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten/kota
		Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan
		Sumber daya alam yang melimpah dan kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan
		inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan
2	Sosial	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
		Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan
3	Sarana dan Prasarana	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan *superhub* ekonomi
		Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan
		Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya menjangkau pusat-pusat perekonomian

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
		Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di daerah perbatasan
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan
6	Sosial Budaya dan Ekologi	Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (*heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan untuk pelestarian lingkungan dan ekologis

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil pemetaan isu dan potensi wilayah Kalimantan, secara lebih spesifik dirumuskan isu pembangunan yang dihadapi Kalimantan Timur. Hal ini berkaitan dengan lima aspek utama yaitu meliputi:

1. Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern,
2. Konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah pulau Kalimantan,
3. Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN,
4. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan, dan
5. Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

3.2.4 Telaah Isu Strategis KLHS RPJPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD disusun guna memberikan panduan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan. KLHS RPJPD Kota Balikpapan disusun secara sistematis, komprehensif dan partisipatif hingga mampu merumuskan isu strategis yang kemudian perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

Isu strategis KLHS RPJPD dirumuskan dengan memperhatikan enam muatan KLHS yang meliputi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), kinerja layanan/jasa lingkungan, perkiraan mengenai dampak dan resiko kerusakan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber

daya alam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dan tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, perumusan isu strategis KLHS RPJPD juga turut memperhatikan pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu strategis lain yang termuat dalam dokumen perencanaan sektoral lainnya. Berikut merupakan isu strategis KLHS RPJPD yang perlu diitegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan.

1. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pembangunan kota nyaman huni dan kesiapan sebagai mitra IKN
3. Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi
5. Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
6. Pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender
7. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
8. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
9. Kecukupan, keamanan dan pemanfaatan pangan

3.2.5 Penentuan Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance*. *Dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*) dan memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*). Hal ini dilakukan agar isu strategis yang dirumuskan lebih kontekstual, adaptif, dan dinamis sehingga selaras dengan isu di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan juga disusun berdasarkan instrumen yang digunakan sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan

tersebut antara lain adalah 1) dimensi sumber daya manusia (*people*), 2) dimensi kesejahteraan atau ekonomi (*prosperity*), 3) dimensi lingkungan (*planet*) yang didalamnya juga terdapat infrastruktur kewilayahan dan 4) dimensi tata Kelola pemerintahan (*management*). Adapun hasil perumusan isu strategis jangka Panjang Kota Balikpapan tahun 2025-2045 berdasarkan konsep dan kinerja Pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Tabulasi Silang (*Crosstab*) Isu Strategis Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
1	People	Pertumbuhan Kelas Menengah	Kualitas Sumber Daya Manusia yang makin rendah	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern	Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial	Pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kota Balikpapan	Akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial
		Urbanisasi Dunia	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan		Pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Kota Balikpapan yang semakin tumbuh perlu merespon problematika sosial dan meningkatkan pembangunan inklusif	Akses dan kualitas pendidikan belum optimal	
		Demografi global	Pembangunan Belum Berkelanjutan					Belum optimalnya upaya perlindungan sosial	
								Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
								Inklusifitas pelayanan publik	
2	Planet	Persaingan sumber daya alam	IPTEKIN dan Riset Lemah	Sumber daya alam yang melimpah serta kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan	Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia	Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	Penurunan risiko bencana melalui peningkatan infrastruktur pengendali bencana, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat	Belum optimalnya penyediaan air baku	Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana
		Perubahan Iklim	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Belum optimalnya penanganan banjir	
		Luar angkasa		Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (heart of Borneo) dengan menjaga kawasan untuk		Pemenuhan akses minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan sesuai dengan		Belum Optimalnya Area Cakupan Penanganan Bencana	

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
				pelestarian lingkungan dan ekologis		karateristik wilayah			
								Penanganan degradasi lingkungan belum optimal	
3	Prosperity	Konstelasi perdagangan global	Produktivitas Rendah	Tingginya kesenjangan antarwilayah di wilayah Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten/kota	Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah pulau Kalimantan	Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan dan transformasi struktur perekonomian Kota Balikpapan	Daya saing UMKM belum optimal	Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
		Geopolitik dan geoekonomi	Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian	Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan	Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian untuk mendorong kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa, dan infrastruktur pendukung pembangunan kawasan strategis nasional	Belum optimalnya tarik pariwisata	infrastruktur berkualitas terpadu dan penataan utilitas kota
			Pariwisata dibawah potensi	Inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan			Penguatan Kota Balikpapan sebagai kota layak huni melalui optimalisasi penyediaan jaringan sarana dan prasarana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelestarian	Belum optimalnya ketahanan pangan	Pemantapan kota cerdas dan nyaman huni

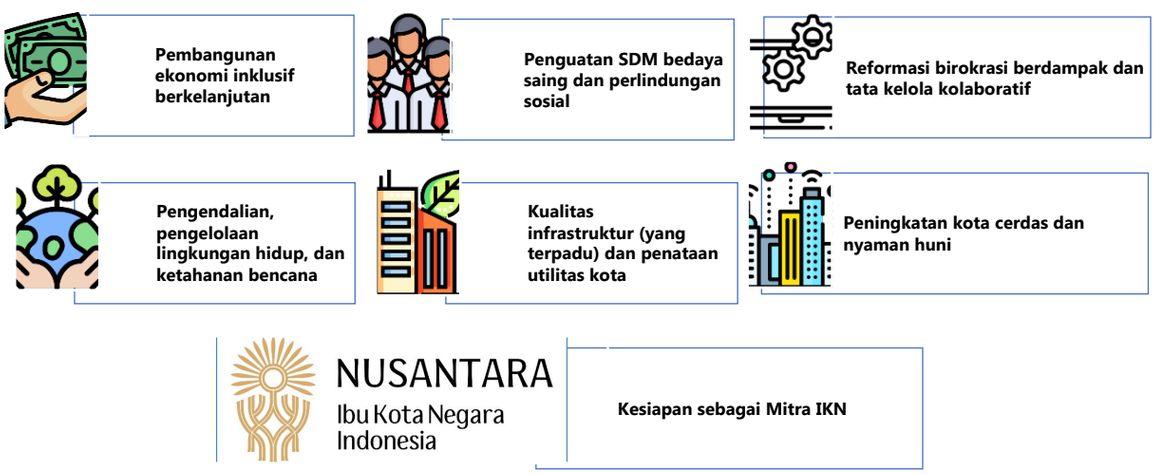
No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
							lingkungan hidup;		
			Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan superhub ekonomi				Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar	
			Integrasi Domestik Terbatas	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya					

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
				menjangkau pusat-pusat perekonomian					
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di daerah perbatasan					
			Ekonomi laut Belum Optimal						
4	Management	Tata kelola keuangan global	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan	Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN	Pembangunan kota nyaman huni dan kesiapan sebagai mitra IKN	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lincah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya tata kelola & reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi berdampak dan tata kelola kolaboratif

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Timur)	Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		10 Isu	17 Isu		5 Isu	9 Isu	8 Isu	15 Isu	7 Isu
		Perkembangan teknologi	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan		Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi	Capaian pembangunan jangka panjang kemudian dielaborasi dengan respon kebijakan aktual, yaitu peningkatan kesiapan Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai pintu gerbang IKN	Belum optimalnya penerapan smart city	Maju sebagai mitra IKN
			Demokratisasi belum optimal						
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa						
			Infrastruktur dan literasi digital rendah						

Perumusan isu strategis berdasarkan metode tabel silang yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance* dan pembangunan berkelanjutan menghasilkan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Ketujuh isu strategis tersebut seluruhnya bersifat mendesak dan penting yang harus diselesaikan ke depan. Adapun enam isu strategis jangka Panjang yang dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Isu Strategis Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045



3.2.5.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Persoalan tenaga kerja masih menjadi tugas yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Angka pengangguran Kota Balikpapan tergolong tinggi, baik dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,90 persen pada tahun 2022. Selain persoalan pengangguran, ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh rasio gini di Kota Balikpapan juga menunjukkan tren yang semakin naik mencapai 0,334 pada tahun 2022. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat kemiskinan yang menunjukkan pencapaian yang semakin baik. Tingginya pengangguran dan naiknya ketimpangan mengindikasikan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kota Balikpapan masih berfokus pada pertumbuhan yang tinggi. Namun, belum dapat menjamin ketersediaan akses lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat dan manfaatnya baru dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Selain persoalan inklusifitas, pembangunan berkelanjutan juga menjadi isu yang perlu diangkat mengingat kondisi lingkungan yang semakin rusak

sebagai dampak dari pembangunan ekonomi yang begitu masif. IKLH Kota Balikpapan secara umum mengalami peningkatan, tetapi nilai dan predikat IKLH masih tergolong sedang dengan nilai sebesar 63,52 pada tahun 2022. Naiknya nilai IKLH didorong oleh peningkatan nilai indeks tutupan lahan sedangkan nilai indeks kualitas udara dan air secara umum mengalami tren yang terus menurun. Jalannya kegiatan hilirisasi yang dilakukan oleh sejumlah industri, baik industri besar maupun kecil, turut menyumbang penurunan kualitas udara dan air di Kota Balikpapan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya transformatif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kualitas lingkungan Kota Balikpapan dikhawatirkan akan semakin rusak dan mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Keberadaan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN juga menjadi salah satu urgensi pentingnya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan karena adanya potensi penambahan jumlah penduduk dan wisatawan yang dapat memengaruhi permintaan komoditas barang dan jasa yang harus disediakan oleh Kota Balikpapan. Naiknya permintaan barang dan jasa dapat mendorong kenaikan produksi. Apabila aktivitasnya tidak dikendalikan secara tepat, dapat memberikan eksternalitas negatif, baik terhadap kehidupan sosial maupun kualitas lingkungan.

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan ke depannya perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan melalui perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pada upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Secara lebih spesifik, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini dikembangkan melalui penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.2.5.2 Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah

satu indikator dalam mengukur kualitas SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. Selama periode 2013-2022, capaian IPM Kota Balikpapan menunjukkan trend meningkat, bahkan melebihi rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kota Balikpapan 81,13, Provinsi Kalimantan Timur 77,44, dan Nasional 72,91.

Meskipun capaian IPM Kota Balikpapan cukup tinggi, masih terdapat kendala pada pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Balikpapan sebesar 10,92 atau setara kelas 1 SMA. Capaian tersebut belum memenuhi wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA. Selain itu, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan tren fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum semua penduduk di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan menengah dan atas.

Pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan trend meningkat, bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, AHH Kota Balikpapan 74,78 dan Provinsi Kalimantan Timur 74,62. Meskipun adanya peningkatan pada capaian AHH, upaya peningkatan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut: angka kematian ibu yakni 39,59 per 100.000 kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting 19,6 persen (2022), cakupan pengobatan TBC 69 persen (2022), prevalensi kusta 0,2 per 1.000 penduduk (2022), jumlah kasus HIV 338 (2022), (sumber: profil kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022). Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 sudah 100 persen. Capaian tersebut perlu dipertahankan untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Balikpapan tercover dalam pelayanan kesehatan yang memadai.

Perlindungan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif. Secara umum, upaya perlindungan sosial di Kota Balikpapan diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan terhadap kelompok

rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal di antaranya terbatasnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, Pekerja Sosial, dan lain-lain), belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representative untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan perlindungan sosial (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Selain itu, cakupan program perlindungan sosial lebih banyak bantuan sosial yang bersifat karikatif daripada bersifat pemberdayaan dan jaminan sosial (asuransi sosial).

3.2.5.3 Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif

Perwujudan *good governance* sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi memerlukan penguatan dalam sistem dan tatanan birokrasi yang lebih berdampak. Penguatan ini lebih menekankan kepada akuntabilitas sosial dan tidak hanya akuntabilitas kinerja. Capaian bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan hingga tahun 2022 relatif meningkat. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 68,91; Indeks Profesionalisme ASN mencapai 93,07; Nilai SAKIP mencapai 69,5 atau predikat B; dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,24. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang telah terpenuhi.

Terlepas dari capaian sektoral yang baik, kinerja bidang tata kelola Kota Balikpapan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Gini Kota Balikpapan yang masih terus meningkat. Upaya reformasi birokrasi Kota Balikpapan belum cukup optimal untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat Kota Balikpapan cukup tinggi, isu pengangguran di tengah dinamika ekonomi dan kemiskinan juga menjadi masalah periodik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Penyandingan kondisi-kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Balikpapan perlu diarahkan, tidak lagi pada pemenuhan target internal saja, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang bertumpu pada luaran/*outcome*.

Tata kelola kolaboratif juga turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Upaya kolaborasi pemerintah perlu dipertegas mengingat banyaknya pemangku kepentingan/*stakeholders* yang terlibat dalam mengejar misi pembangunan Kota Balikpapan. Salah satu misi

yang mendapatkan atensi cukup tinggi adalah pengusungan Kota Balikpapan sebagai *superhub* atau mitra IKN. Kerjasama dan sinergi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok sebagai kawasan transit dan penunjang ibukota, yang juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar. Selain itu, inisiasi untuk mempromosikan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition)* juga memerlukan peningkatan kapasitas di seluruh lapisan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pekerja. Dengan demikian, pendekatan tata kelola yang kolaboratif menjadi agenda penting dalam setiap tahapan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan.

3.2.5.4 Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah berkelanjutan. Berbagai aspek pendukung kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup masih terkendala dalam beberapa sektor. Berbagai keterbatasan dalam proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya air, sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat masih menjadi persoalan sehingga berdampak juga terhadap ketahanan daerah menghadapi bencana.

Fokus penyelenggaran lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global. Mandat tersebut dieksplisitkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13 dan ke-15 fokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, kepentingan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup juga menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola dan struktur ruang perkotaan dan pengelolaan sumberdaya alam dari hulu ke hilir melalui pendekatan kolaboratif. Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2.5.5 Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota

Kualitas infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota adalah faktor penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan dampak pada kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik dan wilayah dengan utilitas yang tertata, tentu membutuhkan perencanaan jangka panjang yang cermat dan diimplementasikan secara bertahap. Kualitas infrastruktur yang baik dan utilitas kota yang tertata, diharapkan menjadikan Kota Balikpapan dapat menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan untuk tinggal dan berkembang bagi masyarakatnya.

3.2.5.6 Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni

Mewujudkan kota cerdas yang nyaman huni harus didukung dengan konsep kota berkelanjutan atau *sustainable city.* Hal tersebut penting untuk mempertahankan kualitas hidup warga Kota Balikpapan saat ini dan masa depan. Kota yang menerapkan *sustainable city* dalam penyelenggaraan tata kelola kotanya akan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan harapan generasi penerus dapat merasakan kota yang nyaman huni. Dalam perencanaan tata kelola kota, konsep yang digunakan juga akan mengacu pada kelestarian alam, termasuk pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif baik dalam menjaga lingkungan. Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman huni perlu diperkuat dengan menjaga kualitas hidup dan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebagai *enabler* agar tetap aman dan efektif digunakan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan dengan konsep kota cerdas yang nyaman huni perlu melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Negara akan memiliki peran strategis yang berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat Kota Balikpapan untuk bersama-sama mewujudkan konsep kota cerdas dan nyaman huni.

3.2.5.7 Maju sebagai Mitra IKN

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan

rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi “otot” atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional.

Kesiapan Kota Balikpapan yang menjadi beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur berupa penyediaan fasilitas dalam hal permukiman, transportasi, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di IKN. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan pendanaan dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pengendalian banjir, penataan pergerakan transportasi, penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Bab VI RPJPD memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai dan misi merupakan agenda besar pembangunan untuk mencapainya. Substansi visi dan misi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai, menjawab permasalahan dan isu strategis, menjelaskan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah, menunjukkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, dan menunjukkan cita-cita bersama masyarakat. Perumusan visi dan misi juga mempertimbangkan aspek kesinambungan dengan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025, serta aspek sinkronisasi dengan RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 dan dan RTRW Kota Balikpapan.

4.1 Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045

Posisi Kota Balikpapan yang strategis dilihat dari sudut kepentingan lokal, nasional, maupun global, maka dalam merumuskan visi dan misi perlu menelaah berbagai lingkungan strategis. Dari sudut lokal, perumusan visi dan misi harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memandu penyelesaian masalah pembangunan. Masih dari sudut perspektif lokal, perumusan visi dan misi mengacu pada nilai yang menjadi budaya masyarakat, salah satunya konsep pembangunan kota “Madinatul Iman”.

Proses pembangunan dan berpindahnya ibukota negara, merupakan lingkungan strategis nasional yang harus direspon. Kota Balikpapan berposisi sebagai mitra IKN, sehingga dalam perumusan visi dan misi terhubung dan memiliki perspektif yang sama dengan sudut kepentingan nasional. Dalam perspektif lingkungan strategis global, maka perumusan visi dan misi Kota Balikpapan mampu merespon kondisi global yang dinamis. Kesepatan global seperti SDGs dan megatren merupakan aspek penting untuk menjadi acuan dalam perumusan visi dan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045, yaitu

Gambar 4. 1 Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045



Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 merupakan kesinambungan dari Visi RPJPD 2005-2025. Kota 5 dimensi merupakan modal kuat bagi



akselerasi pembangunan Kota Balikpapan untuk 20 tahun berikutnya. Perekonomian yang kokoh dan SDM Balikpapan yang unggul merupakan modal untuk memasuki era transformasi sebagaimana agenda besar yang dibawa oleh RPJPN. Berdasarkan modal tersebut, Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045 berupaya mencapai kondisi yang terarah dan mencerminkan keunggulan kompetitif Kota Balikpapan. Tidak kalah penting, visi tersebut juga terhubung dan selaras dengan visi IKN, yaitu **“Kota Dunia untuk Semua”**.

Visi "**Nyaman untuk Semua"** merupakan cita-cita sekaligus sebagai identitas/*city branding* serta mencerminkan kemajuan kota di segala bidang. Balikpapan nyaman dibentuk dari kondisi sosial-budaya, perekonomian, lingkungan hidup, infrastruktur, utilitas kota dan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi nyaman direpresentasikan dari sumber penghidupan masyarakat yang layak dan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup dan sosial, serta infrastruktur kota berkualitas yang berdampak pada masyarakat sejahtera dan bahagia, serta manfaat pembangunan inklusif yang dapat diakses masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Visi **"untuk Semua"** juga berangkat dari realitas sosiokultural masyarakat Balikpapan yang heterogen dan multikultur. "Untuk Semua" menjadikan Balikpapan sebagai kota milik bersama dan inklusif yang selalu damai dan aman dengan kohesivitas sosial yang tinggi. Inklusif juga memiliki makna terkait proses pembangunan yang partisipatif-kolaboratif dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Pelayanan publik dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dan berkualitas, serta perekonomian Kota Balikpapan tumbuh inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh ditopang industri dan jasa besar, serta ekonomi kerakyatan dan kreatif yang semakin berdaya. Kota Balikpapan dengan demikian tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target kinerja pembangunan, sekaligus mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Pokok visi "untuk semua" selaras dengan motto tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu *no one left behind*.

"Superhub Industri dan Jasa" merupakan posisi dan peran penting Balikpapan dalam pembangunan regional, nasional dan global. Balikpapan akan semakin memperkuat perannya sebagai sentra industri dan jasa yang berkelanjutan. Balikpapan sekaligus menjadi salah satu kota utama untuk pengelolaan sumber daya yang mengarah pada hilirisasi. Hub industri dan jasa mendukung peran Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Dalam hal ini Balikpapan mendukung peran Kalimantan dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.

Visi **“maju”** merupakan kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Maju juga mencerminkan kesinambungan pembangunan dan kinerja pembangunan yang semakin progresif. Visi **“Berkelanjutan”** merupakan cita-cita bersama untuk menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan merupakan keselarasan dan keseimbangan pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dengan fondasi tata kelola yang berkualitas. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada capaian dan manfaat jangka pendek, sekaligus capaian dan manfaat pembangunan pada masa depan. Berkelanjutan juga sebagai bentuk kesinambungan antar periode pembangunan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik.

Visi RPJPD Kota Balikpapan tidak meninggalkan akar dari nilai di tengah masyarakat. Masyarakat Balikpapan sangat heterogen dan multikultur telah terbingkai dalam satu konsep pembangunan kota, yaitu ***Madinatul Iman***. Konsep ini merupakan strategi pembangunan sekaligus cita-cita yang memiliki makna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban maju dengan landasan iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Kota yang memiliki peradaban maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi serta hidup harmonis dalam lingkungan masyarakat yang multikultur atau majemuk. *Madinatul Iman* menjadi landasan, nilai dan cita-cita pembangunan yang terus relevan, mengingat pula perlu upaya antisipatif dengan semakin besarnya tantangan pembangunan Kota Balikpapan pada masa depan. *Madinatul Iman* tetap menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang inklusif dan toleran.

Gambar 4. 2 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045



Visi RPJPD Kota Balikpapan merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Visi RPJPD Kota Balikpapan mendukung pencapaian kondisi Kalimantan Timur Sejahtera 2045, serta kondisi maju, adil dan berkelanjutan sebagai penggerak superhub ekonomi nusantara. Visi RPJPD Kota Balikpapan dalam konteks nasional mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, yang di dalamnya akan mencapai kondisi Indonesia berdaulat, maju dan berkelanjutan.

4.2 Sasaran Visi

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih rinci, terkait indikator dan target sasaran visi RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten//kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Berikut sasaran, indikator, dan target visi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator Visi	Satuan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	Peningkatan perekonomian dan pendapatan perkapita	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50-7,00	6,60-7,20	6,73-7,45	6,85-7,70	7,00-8,00
		2. PDRB per kapita	Rp juta	225,56	378,228-513,384	569,063-873,164	759,898-1232,944	988,90-1.664,68
		3. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	16,75	17,8	19,11	20,42	21,99
		4. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	47,50	49,76	52,59	55,42	58,82
		5. Persentase Pekerja di Sektor Jasa	%	77,71	78,57	79,64	80,71	82
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	6. Tingkat Kemiskinan	%	2,15 – 2,20	1,73-1,80	1,20-1,29	0,67-0,79	0,04-0,18
		7. Rasio Gini	Indeks	0,300-0,330	0,296-0,33	0,291-0,33	0,286-0,33	0,280-0,330
3	Peningkatan daya saing dan inovasi daerah	8. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,80	3,90	4,03	4,15	4,30
		9. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	66	72	78	85
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,50	84,59	86,78	89,02	91,71
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*	11. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	24,84	45,04	59,53	67,99	79,8
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,80	72,48	73,34	74,19	75,22

4.3 Misi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Perumusan misi RPJPD mengacu pada pokok visi RPJPD yang akan dicapai, respon atas isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta selaras dengan misi atau agenda pembangunan di dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memiliki agenda besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia yang disertai dengan landasan dan kerangka implementasi transformasi. Misi RPJPD dengan demikian juga memiliki agenda besar untuk mendukung transformasi Indonesia melalui transformasi pembangunan daerah. Berikut keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Tabel 4. 2 Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045

Agenda	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	Misi Kota Balikpapan Tahun 2025-2045
Transformasi Indonesia	Misi 1: Transformasi Sosal	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
	Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif
Landasan Transformasi	Misi 4: Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia	Misi 4: Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan	Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial

Agenda	Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	Misi Kota Balikpapan Tahun 2025-2045
		stabilitas ekonomi makro daerah	
	Misi 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 5: Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6: Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi 6: Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
	Misi 7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
	Misi 8: Kesinambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

Tabel 4. 3 Visi dan Misi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045:

Visi: Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman
Misi: Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

Secara lebih detail, berikut penjelasan 8 Misi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045:

4.3.1 Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Membangun Manusia Unggul dan Berdaya Saing Global

Misi mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global diarahkan untuk membangun dan mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di era modern, serta memiliki kualitas kehidupan yang layak dan sejahtera. Guna mewujudkan SDM yang unggul dan memiliki daya saing global maka perlu ditopang oleh konidisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kondisi masyarakat yang sehat dan cerdas berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga peluang bonus demografi dan pembangunan IKN dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dari segi pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan masih perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 yang masih berada pada angka 10,93 atau setara kelas 1 SMA, sehingga masih belum mencapai target nasional yang tertuang dalam program wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah, 12 tahun pendidikan dasar dan menengah), dan peningkatan partisipasi pada pendidikan tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi peningkatan fasilitas pembelajaran, penambahan kuantitas dan kualitas guru, serta peningkatan kerjasama antar pelaku pendidikan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengembangan kurikulum yang mengarah pada peningkatan ketrampilan interpersonal, analitis, dan digital, serta pengetahuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEAM).

Dari segi kesehatan, peningkatan mutu layanan kesehatan dilakukan tidak hanya untuk menjamin derajat kesehatan setinggi-tingginya, melainkan juga mendukung upaya super prioritas Kota Balikpapan dalam mengembangkan *hospital tourism.* Meskipun capaian AHH Kota Balikpapan

cukup tinggi yakni 74,89, tetapi beberapa upaya masih perlu dioptimalkan seperti pelayanan terhadap kesehatan ibu yang angka kematian mencapai angka 73 per 100.000 (2020), prevalensi stunting 13,36% (2023), rumah sakit yang terkaredetasi 86,67% (2020), persentase ketersediaan SDM Kesehatan Puskesmas 82,72% (2020), dan sebagainya. Dalam melakukan pembangunan kesehatan beberapa aspek perlu diperhatikan seperti peningkatan layanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan (primer, sekunder, tersier), peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, serta digitaliasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan tidak hanya fokus pada upaya karikatif, melainkan juga peningkatan upaya pelayanan preventif dan promotif.

4.3.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Agenda transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama dalam mewujudkan Balikpapan nyaman untuk semua karena tujuan dari transformasi ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian nilai tambah yang lebih besar. Sejalan dengan visi dan misi Indonesia Emas serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, transformasi ekonomi berkelanjutan menjadi misi yang perlu diwujudkan dalam RPJPD Kota Balikpapan. Transformasi ekonomi menekankan pada peningkatan produktivitas untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan produktivitas perlu didorong demi mewujudkan transformasi ekonomi.

Peningkatan produktivitas tidak semata-mata hanya mengejar nilai tambah yang tinggi dan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Namun, keberlanjutan atas segala sumber daya di Kota Balikpapan perlu diperhatikan untuk menjamin manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Penerapan ekonomi hijau dan biru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga manfaat dari pembangunan ekonomi betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa perlu mengorbankan lingkungan hidup.

4.3.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif, dan Kolaboratif

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi saat ini. Pemerintah diminta mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam memenuhi seluruh ekspektasi masyarakat. Pemerintah juga dihadapkan dengan permasalahan kepercayaan masyarakat yang rendah karena dinilai terlalu birokratis, sentralistik, kurang profesional, dan silo sehingga membuat pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif, efisien, dan kaku. Dalam konteks ini, perlu adanya transformasi tata kelola yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif. Tranformasi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan 20 tahun ke depan.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis diperlukan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, cepat, dan responsif. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang strategis. Kepemimpinan yang strategis berkaitan dengan cara berpikir dan bertindak yang tepat, yaitu mampu berpikir ke depan dan antisipatif (*think ahead*), mampu berpikir atau merefleksi secara berulang terhadap berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi (*think again*), dan mampu berpikir lintas sektor (*think across*). Dengan demikian, kemampuan tersebut mampu membuat pemerintah lebih adaptif terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mampu mengurai berbagai permasalahan daerah secara sistematis dan terukur.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif juga sangat penting. Pemerintah yang inovatif adalah pemerintahan yang kreatif dalam menciptakan atau menemukan bentuk pelayanan terbaik, baik berupa produk maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi juga berkaitan dengan gagasan baru yang berasal dari pemikiran kreatif dan *out of box* serta digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan publik. Inovasi yang diterapkan harus mampu menyasar persoalan internal pemerintah dan persoalan pelayanan masyarakat.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dilakukan untuk merespon perkembangan dunia yang begitu pesat di tengah

ketidakpastian dan risiko tinggi melalui kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders*. Kemitraan strageis ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Balikpapan. Dalam konteks ini, maka keterlibatan yang diharapkan adalah keterlibatan yang saling menguntungkan guna mewujudkan visi daerah. Setiap pelaku pembangunan harus terlibat aktif dalam mengurai berbagai persoalan daerah dan mampu memberikan berbagai solusi yang tepat.

4.3.4 Mewujudkan Stabilitas Kota dan Demokrasi Substansial

Misi mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial diarahkan pada upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam menciptakan kondisi daerah yang stabil dan mewujudkan demokrasi yang substansial dimana prinsip-prinsip utama demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil lebih ditekankan. Stabilitas daerah sendiri turut dipengaruhi oleh kondisi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ada di suatu wilayah. Penjagaan kondisi ketenteraman dan ketertiban menjadi kunci utama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang stabil. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan peraturan daerah yang optimal, pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran, upaya resolusi konflik yang cepat dan tepat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan demokrasi yang substansial.

Perwujudan stabilitas kota dan demokrasi yang substansial juga merupakan bagian dan prasayarat yang penting dalam pembangunan daerah. Kaitannya dengan pembangunan daerah, dari sisi ekonomi, daerah yang memiliki stabilitas yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari investor guna menanamkan modal di wilayah tersebut. Dari sisi pembangunan sosial dan infrastruktur, stabilitas daerah juga turut memiliki peran yang cukup besar. Kaitaannya dengan pencegahan dan penanganan konflik sosial yang berpotensi menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka peran pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan turut berpengaruh terhadap upaya pembangunan yang dilakukan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan demokrasi substansial di suatu daerah.

4.3.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan

Misi mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan di Kota Balikpapan merupakan upaya yang penting untuk merespon berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis. Ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan berupaya untuk mengintengrasikan pembangunan manusia secara individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan kebencanaan. Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Balikpapan. Ketahanan sosial budaya menjadi salah satu isu penting di Kota Balikpapan karena menjadi salah satu penyangga dan mitra IKN. Kehadiran IKN berpotensi memberikan dampak arus perubahan tatanan secara sosial dan budaya di Kota Balikpapan. Selain itu, Kota Balikpapan juga merupakan kota yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga lingkungan dan menjadi daerah yang tangguh terhadap kebencanaan. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi Kota Balikpapan yang merupakan pusat industri, kawasan perkotaan penyangga dan mitra IKN, serta berada di dekat kawasan hutan, pantai, dan laut yang sensitif. Melalui berbagai tantangan tersebut, perlu adanya sinergi perencanaan kota yang berketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan misi ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian beberapa kebijakan strategis, seperti penguatan peran keluarga, pembangunan karakter, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan lingkungan alam, mitigasi perubahan iklim, pemulihan dan konservasi ekosistem penyangga, pengelolaan sampah terpadu, dan berbagai hal lain yang berkontribusi pada ketangguhan sosial budaya, dan kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat. Dalam rangka mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan, diperlukan upaya jangka panjang yang melibatkan kerja sama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pihak swasta, lembaga non-pemerintah maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah yang

terpadu dan sistematis, Kota Balikpapan diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tahan terhadap berbagai tantangan sosial budaya, lingkungan dan bencana yang muncul di masa depan.

4.3.6 Mewujudkan Pembangunan Kota Cerdas, Terintegrasi dan Berkeadilan

Pembangunan kota yang modern, terintegrasi dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kota Balikpapan sebagai Superhub Industri dan Jasa. Perwujudan tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya sekadar penyediaan, namun kualitas infrastruktur dan utilitas perkotaan juga memiliki urgensi yang tinggi untuk menjadi fokus pemerintah daerah, terlebih Kota Balikpapan menjadi salah satu kota yang menjadi mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara Kota Balikpapan dengan IKN.

Pembangunan kota yang modern didasarkan pada perencanaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan lahan yang bijaksana, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan perencanaan transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan. Kemudian sebagai hub ekonomi, infrastruktur yang terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan kota yang efisien dan mudah diakses. Sehingga diperlukan jaringan transportasi yang baik, sistem air dan sanitasi yang memadai, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pengarustamaan kualitas infrastruktur di Kota Balikpapan tersebut, juga telah sejalan dengan konsep *smart city* yang telah direncanakan. Kemudian dalam membangun kota yang berkeadilan, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung aksesibilitas perumahan bagi semua lapisan masyarakat, memberdayakan sektor-sektor ekonomi lokal, penggunaan teknologi digital dalam manajemen perkotaan, peningkatan infrastruktur tangguh bencana dan perencanaan kota yang adaptif dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.

4.3.7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Terpadu, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana terpadu merupakan pondasi dasar atau kerangka pada komponen pelayanan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi yang

dirancang dan diintegrasikan secara menyeluruh untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sarana prasarana yang bersifat fisik, berupa bangunan yang terlihat seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan yang lainnya, serta sarana prasarana yang bersifat sistem, seperti sistem pengelolaan limbah, sistem penyediaan air bersih, sistem penyediaan energi, dan sejenisnya, sehingga sarana prasarana terpadu tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk sarana prasarana transportasi, perumahan, utilitas, dan fasilitas umum lainnya.

Perwujudan sarana dan prasarana yang terpadu di Kota Balikpapan diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien melalui pengembangan *smart infrastructure*. Kondisi tersebut selanjutnya juga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sarana prasarana yang ramah lingkungan. Sistem sarana prasarana yang telah terancang dan terbangun secara merata dan berkeadilan, diharapkan dapat menjadikan Kota Balikpapan tidak hanya menjadi nyaman, tetapi juga ramah lingkungan terhadap generasi yang akan datang.

4.3.8 Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan

Keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan adalah dua konsep penting yang memastikan pembangunan yang dilakukan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berkelanjutan dan konsistensi berkala dengan semangat kolaboratif. Keselarasan pembangunan merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pemenuhan kebutuhan dan hak untuk generasi mendatang. Keselarasan pembangunan diwujudkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan perencanaan jangka panjang dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, keselarasan pembangunan juga dimaknai sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan sinergi pembangunan di Kota Balikpapan.

Keselarasan pembangunan melibatkan komitmen jangka panjang multipihak, koordinasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan, dan perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan dan diimplementasikan

pada tindakan sehari-hari menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan dan diimplementasikan pada tindakan sehari-hari, sehingga keselarasan pembangunan dapat terwujud di Kota Balikpapan.

Kesinambungan pembangunan berarti upaya keberlanjujtan pembangunan dari periode ke periode yang sejalan dengan cita-cita Kota Balikapapan. Kondisi ini melibatkan komitmen jangka panjang multipihak, koordinasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan, dan perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kesinambungan pembangunan di Kota Balikpapan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang kolaboratif.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab V RPJPD memuat arah kebijakan, sasaran pokok, indikator utama pembangunan (IUP) dan upaya transformasi super prioritas (*game changers*). Arah kebijakan dalam dokumen RPJPD dibagi menjadi dua yakni arah kebijakan sebagai tahapan pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Arah kebijakan tahapan pembangunan merupakan upaya tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam 4 (empat) periode lima tahunan. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rumusan visi dan misi, serta permasalahan dan isu strategis jangka panjang daerah. Sedangkan arah kebijakan transformasi mengacu pada lampiran Buku II SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang dicapai pada akhir periode dan mencerminkan ketercapaian visi pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok memiliki indikator utama pembangunan (IUP) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, serta mengacu pada 17 arah arah pembangunan nasional.

5.1 Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan

Arah kebijakan tahapan pembangunan merupakan upaya tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam 4 (empat) periode lima tahunan. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rumusan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang tertuang pada bab III. Arah kebijakan yang dirumuskan diharapkan menjadi panduan dan dasar intervensi perumusan arah kebijakan yang lebih operasional pada perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Berikut arah kebijakan tahapan pembangunan RPJPD Kota Balikapan yang diselaraskan dengan arah kebijakan tahapan pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5. 1 Penyelarasan Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJPD Kota Balikpapan

	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
RPJPN	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	Perkuatan fondasi transformasi: Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi transformasi: Peningkatan daya saing daerah dalam upaya akselerasi transformasi dan peran sebagai Mitra IKN	Ekspansi transformasi daerah: Pemantapan peran daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan Nusantara	Perwujudan Kaltim Sejahtera: Perwujudan pembangunan yang maju, adil, dan berkelanjutan menuju masyarakat Kaltim Sejahtera
RPJPD Kota Balikpapan	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing	Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan	Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua

Pertahapan pembangunan sesuai tema dengan periode lima tahunan memiliki fokus masing-masing untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Balikpapan yaitu tahap 1 (2025-2029) sebagai tahapan penguatan transformasi: Balikpapan kota cerdas dan kolaboratif, tahap 2 (2030-2034) sebagai tahapan percepatan transformasi: Balikpapan kota berdaya saing, tahap 3 (2035-2039) sebagai tahapan ekspansi transformasi: Balikpapan kota unggul dan berkelanjutan, dan tahap 4 (2040-2045) sebagai tahap perwujudan Balikpapan kota nyaman untuk semua. Tema pembangunan tersebut telah diselerasakan dengan tema pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta terdapat penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan daerah pada periode 3 dan 4. Secara lebih rinci, tema arah kebijakan pada masing-masing periode kemudian didetailkan pada masing-masing Misi sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Misi	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing	Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan	Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua
Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	Penguatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang adaptif	Pelayanan dasar yang berkualitas untuk SDM yang berdaya saing dan sejahtera	Pemantapan SDM yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing global
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	Penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial	Pemantapan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta akselerasi ekonomi kreatif	Industri dan jasa yang berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perekonomian daerah yang kokoh, inklusif dan berkelanjutan
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif, serta pelayanan yang berkualitas	Akselerasi tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berdampak serta pelayanan yang inovatif	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan kolaboratif serta pelayanan yang adaptif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif yang mendukung transformasi pembangunan daerah
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	Meningkatkan supremasi hukum kualitas demokrasi dan stabilitas ekonomi	Memperkuat stabilitas wilayah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi	Memantapkan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah	Stabilitas wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan

Misi	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif	Percepatan Transformasi: Balikpapan Kota Berdaya Saing	Ekspansi Transformasi: Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan	Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	Peningkatan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), pelestarian budaya, dan pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang	Penguatan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) dan ketahanan budaya, serta memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya maju, serta kelestarian lingkungan hidup yang terjaga	Pemantapan masyarakat yang inklusif dan berkebudayaan maju, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	Peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi	Akselerasi layanan kota cerdas yang mendukung pemerataaan pembangunan wilayah	Pemantapan pelayanan kota cerdas yang terintegrasi dengan aglomerasi perkotaan	Perwujudan layanan kota cerdas yang berkeadilan dan terintegrasi dalam skala regional
Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	Akselerasi akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang ramah lingkungan	Pemantapan *smart infrastructure* pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	Perwujudan *smart infrastructure* yang merata dan berkeadilan
Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran serta perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang sebagai modal kesinambungan	Percepatan kesinambungan pembangunan berbasis inovasi, penganggaran alternatif, dan komitmen politik untuk kesinambungan	Penguatan kesinambungan pembangunan berbasis budaya inovasi, penganggaran inovatif, dan komitmen politik yang semakin kuat	Pemantapan kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan yang inovatif, kolaboratif, dan semakin adaptif terhadap perubahan

Arah kebijakan pembangunan daerah memiliki tema pada masing-masing periode 5 (lima) tahunan dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan, yakni Tahap 1 (Tahun 2025-2029) sebagai tahap Penguatan Transformasi, Tahap 2 (Tahun 2030-2034) sebagai tahap Percepatan Transformasi, Tahap 3 (Tahun 2035-2039) sebagai tahap Ekspansi Transformasi, dan Tahap 4 (Tahun 2040-2045) sebagai tahap Perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 1 RPJPD Kota Balikpapan adalah “Penguatan Transformasi” dengan tema ”Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif”. Arah kebijakan Tahap 1 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui penguatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosoal. Pada aspek transformasi ekonomi dilaksanakan melalui penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial. Sedangkan pada aspek tata kelola pemerintahan, arah kebijakan pada tahap pertama diarahkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan kolaboratif serta peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pada tahap pertama RPJPD Pemerintah Kota Balikpapan juga turut berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas hukum dan demokrasi, peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perekonomian serta memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagai modal Pembangunan berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2030-2034)

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 2 adalah “Percepatan Transformasi” dengan tema ”Balikpapan Kota Berday saing”. Arah kebijakan Tahap 2 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna menunjang upaya perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Pada aspek

transformasi ekonomi dilakukan melalui upaya pemantapan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta akselerasi Pembangunan ekonomi kreatif. Sedangkan pada upaya transformasi tata kelola diarahkan pada upaya percepatan Pembangunan tata kelola yang berkinerja tinggi dan berdampak serta pelayanan yang inovatif. Selain itu, pada tahap ke 2 pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, Pemerintah Kota juga berupaya untuk melakukan penguatan stabilitas wilayah, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi, penguatan GEDSI dan ketahanan budaya dengan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai upaya mewujudkan Pembangunan kota cerdas dan ramah lingkungan. Percepatan Pembangunan berbasis inovasi, penganggaran alternatif dan komitmen politik yang berkesinambungan juga menjadi bagian arah Pembangunan yang turut diupayakan pada periode ke 2 RPJPD guna mewujudkan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan di Kota Balikpapan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2035-2039)

Arah kebijakan pembangunan daerah tahap 3 adalah Ekspansi Transformasi dengan tema ”Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan“. Pada transformasi sosial dilaksanakan melalui pelayanan dasar yang berkualitas untuk SDM yang berdaya saing dan sejahtera. Pada aspek transformasi ekonomi dilakukan melalui industri dan jasa yang berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sementara pada transformasi tata kelola difokuskan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan kolaboratif serta pelayanan yang adaptif. Untuk mendukung transformasi Balikpapan pada tahap 3 ini dilakukan melalui upaya pemantapan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah, perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya maju, serta kelestarian lingkungan hidup yang terjaga, pemantapan pelayanan kota cerdas yang terintegrasi dengan aglomerasi perkotaan, pemantapan *smart infrastructure* pelayanan dasar dan pendukung perekonomian. Selain itu, penguatan kesinambungan pembangunan berbasis budaya inovasi, penganggaran inovatif, dan komitmen politik yang semakin kuat.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2040-2045)

Arah kebijakan pembangunan daerah tahap 4 merupakan “perwujudan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua”. Tahap ini adalah tahap terakhir dari periodenisasi RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Harapannya seluruh transformasi Kota Balikpapan semakin mantap. Pada transformasi sosial diharapkan terwujudnya SDM yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing global. Pada transformasi ekonomi diharapkan terwujudnya perekonomian Kota Balikpapan yang kokoh, inklusif dan berkelanjutan. Sementara pada transformasi tata kelola diharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif yang mendukung transformasi pembangunan daerah. Untuk memantapkan transformasi Balikpapan pada tahap 4 diperlukan dimantapkan landasan transformasi dan implementasinya melalui stabilitas wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi Kota Balikpapan, pemantapan masyarakat yang inklusif dan berkebudayaan maju, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, perwujudan layanan kota cerdas yang berkeadilan dan terintegrasi dalam skala regional, perwujudan *smart infrastructure* yang merata dan berkeadilan, dan pemantapan kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan yang inovatif, kolaboratif, dan semakin adaptif terhadap perubahan.

5.2 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers)*

Dalam rangka mewujudkan transformasi Kota Balikpapan, diperlukan agenda pembangunan yang lebih operasional. Agenda pembangunan ini merupakan *game changers* yang akan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang dan merupakan superprioritas dari berbagai arah kebijakan transformasi. Game changers memiliki sifat operasional, lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi serta akan merespon berbagai isu strategis.

- Mewujdukan Transformasi Sosial dengan membangun manusia unggul dan berpandangan Global
    1) Revitalisasi program pendidikan berbasis ketrampilan (vokasi)
    2) Transformasi kesehatan digital
    3) Penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi
    4) Penguatan pendidikan karakter dalam membangun tanggung jawab sosial, kemandirian, dan religius

5) Akselerasi kolaborasi pihak swastam organisasi nirlaba, internasional dan masyarakat sipil

- Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang berkelanjutan
  1) Pengembangan kawasan industri Kariangau dan pengolahan minyak (*oleochemical*) berbasis *green industry* dalam rangka mendukung hilirisasi berbasis SDA Unggulan
  2) Penguatan ekosistem MICE dan ekonomi kreatif
  3) Pendaftaran tanah kota lengkap 100%
- Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dengan membangun pemerintahan berintegritas, kolaboratif, dan adaptif
  1) Tata kelola kolaboratif dan transformasi pelayanan publik
  2) Penguatan birokrasi yang ramping struktur kaya fungsi
  3) Penguatan kolaborasi internasional melalui *sister city*
- Mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
  1) Penyediaan air minum dan sanitasi 100% aman terintegrasi
  2) Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
  3) Pengembangan *transit oriented development*
  4) Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan pada semua sektor
  5) Pengembangan *nature based solution*
  6) Penguatan nilai kearifan lokal masyarakat kota
  7) Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan pada semua sektor dan penguatan ketahanan pangan
- Mewujudkan kondusivitas kota dan demokrasi substansial
  1) Penguatan pengawasan kota berbasis teknologi
  2) Transformasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko

5.3 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Sasaran pokok, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan merupakan penjabaran lebih detail dari perumusan visi dan misi RPJPD Kota Balikpapan, serta arah kebijakan tahapan pembangunan yang dirumuskan pada bab sebelumnya.

5.3.1 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Penentuan indikator dan target kinerja indikator (IUP) RPJPD Kota Balikpapan mengacu pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten/kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Sedangkan perumusan sasaran pokok mengacu pada 17 (tujuh belas) arah pembangunan RPJPN, arah kebijakan transformasi, serta indikator utama pembangunan (IUP) sebagaimana tertuang dalam kertas kerja perumusan sasaran pokok RPJPD yang ada pada lampiran dokumen ini. Sasaran pokok, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	1. Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	76,7	77,88	79,06	80,47
			2	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	5	4	3	2	0
			3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,5	16,5	12,75	9	4,5
			4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment covarage*)	%	81,6	85,28	89,88	94,49	100
			5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	84,98	87,98	91,74	95,49	100
			6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
		2. Pendidikan berkualitas yang merata	7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi						

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
				minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
				2.10Literasi membaca SD/Sederajat	%	87,71	90,17	93,24	96,31	100
				2.11 Literasi membaca SMP/Sederajat	%	90,24	92,19	94,63	97,07	100
				2.12Numerasi SD/Sederajat	%	73,57	78,86	85,46	92,07	100
				2.13 Numerasi SMP/Sederajat	%	85,72	88.58	92,15	95,72	100
			8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	11,26	11,83	12,4	13,08
			9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	14,68	15,15	15,62	16,18
			10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	13	14	15,25	16,5	18
			11	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	%	74,22	76,38	79,07	81,77	85
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	12	Tingkat kemiskinan	%	2,15-2,20	1,73-1,80	1,20-1,29	0,67-0,79	0,04-0,18
			13	*Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan*	%	68,57	73,86	80,47	87,07	95
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing berkelanjutan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	47,5	49,76	52,59	55,42	58,82
			15	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,94	2,98	4,27	5,57	7,12
			16	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	25.918	41.469	60.908	8-.347	103.673
			17	*Jumlah usaha ekonomi kreatif*	*Angka*	670	1.118	1.678	2..238	2.910
			18	*Proporsi jumlah usaha miko naik kelas*	*%*	2,27	3,04	4,36	6,26	9,66

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
			19	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,02	4,77	5,71	6,6	7,78
			20	*Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	*%*	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
			21	*Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	*%*	6,38	6,71	7,11	7,51	8,00
			22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,85 – 5,90	5,56-5,79	5,19-5,65	4,83-5,51	4,39-5,34
			23	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	%	67,17	71,84	787,68	83,52	90,53
			24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,87	53,43	56,63	59,83	63,67
			25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	66	72	78	85
		5. Penerapan Ekonomi Hijau								
		6. Transformasi Digital	26	Persentase pnduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88	90	92,5	95	98
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	27	*Disparitas Harga*	*%*	9,77	8,91	7,85	6,78	5,50
			28	Kontribusi PDRB pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB	%	33,18	32,71	32,13	31,54	30,84
			29	Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	%	42,34	44,01	46,11	48,2	50,71
		8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	30	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,69	86,15	90,48	94,81	100
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	31	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks	3,85	4,08	4,37	4,66	5
			32	*Indeks pelayanan publik*	Indeks	4,54	4,59	4,66	4,72	4,8

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif			33	Indeks integritas pemerintah	Indeks	77,5	80,46	84,16	87,86	92,3
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	4. Meningkatnya kondusifitas wilayah	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
	5. Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro	34	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,06	0,22	0,43	0,63	0,88
			35	Tingkat inflasi	%	2,50±1	2,40±1	2,28±1	2,15±1	2,00±1
			36	Total dana pihak ketiga/PDRB	%	29,85	40,83	54,56	68,29	84,76
			37	Total kredit/PDRB	%	23,01	32,9	45,27	57,63	72,47
	6. Menguatnya stabilitas daerah	12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	38	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,8	3,9	4,03	4,15	4,3
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan	7. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	39	a. Jumlah kejadian tindak kriminal	Jumlah	1.167	1.054	912	770	600
				b. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	23	23,60	24,35	25,10	26
			40	Jumlah kejadian konflik SARA	Jumlah	0	0	0	0	0
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kota Cerdas, Terintegrasi dan Berkeadilan	8. Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	41	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	70,00	75,45	80,01	85,58	92,25
			42	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,16	0,15	0,13-0,14	0,12-0,13	0,10-0,12
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Terpadu, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,80	72,48	73,34	74,19	75,22
			44	*Rumah tangga dengan akses sanitasi layak*	%	96	97	98	99	100
			45	*Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah*	%	30,45	33,69	39,01	41,08	41,44

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
							2029	2034	2039	2045
Misi 8: Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	46	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5,67	4,59	3,25	1,9	0,29
			47	*Kapasitas air baku*	*m3/detik*	2.458	2.685	3.141	3.902	4.306
			48	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum aman	%	38,75	51	66	82	100
	10. Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	49	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	109,35	104,43	98,28	92,13	84,75
			50	Persentase Penurunan Emisi GRK						
				a. Kumulatif	%	0,24	3,24	9,17	16,43	26,24
				b. Tahunan	%	-9,22	16,75	36,74	50,26	70,39
Misi 8: Mewujudkan Keselarasan dan Kesinambungan Pembangunan	-									

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 00.7.2.1/14918/Bapp-II tentang pemutakhiran sasaran pembangunan kabupaten/kota dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, jumlah indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Balikpapan sebanyak 50 indikator. Dari 50 indikator tersebut, terdapat 38 indikator yang targetnya sudah ditentukan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan 12 indikator targetnya ditentukan oleh Pemerintah Kota Balikapapan. Adapun 12 indikator tersebut yakni persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah usaha ekonomi kreatif, proporsi jumlah usaha mikro naik kelas, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, *return on asset (ROA)* BUMD, disparitas harga, indeks pelayanan publik, indeks pembangunan kebudayaan, jumlah kejadian konflik SARA, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan kapasitas air baku.

5.4 Arah Kebijakan Transformasi

5.4.1 Arah Kebijakan Transformasi Kota Balikpapan

Arah kebijakan transformasi Kota Balikpapan mengacu pada lampiran Buku II SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan transformasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan transformasi berada dalam kerangka penguatan fondasi transformasi pada periode 1, percepatan transformasi pada periode 2, Balikpapan Kota Unggul dan Berkelanjutan pada periode 3 dan Balikpapan Kota Nyaman untuk Semua pada periode 4.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kota Balikpapan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
Transformasi sosial	1	Perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan penguatan peran layanan kesehatan primer	Seluruh kecamatan, seluruh puskesmas dan posyandu
	2	Penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis	Penuntasan stunting di semua kecamatan, peningkatan pengendalian dan penanganan penyakit menular (HIV, TBC, dll) melalui pendekatan integrasi multisektor, serta percepatan eliminasi penyakit malaria melalui rekayasa lingkungan habitat vektor	Seluruh kecamatan
	3	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan berkelanjutan	Pemenuhan dan pemerataan jumlah tenaga medis dan kesehatan pada layanan kesehatan sesuai standar, peningkatan tenaga kesahatan spesialis, peningkatan kompetensi kesehatan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya	Seluruh puskesmas dan rumah sakit
	4	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan yang disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi serta penguatan ketahanan kesehatan, penguatan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan; Ketahan kesehatan (farmasi, alat kesehatan, dan surveilance/ketahanan terhadap krisis kesehatan/bencana non alam); Transformasi	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Barat, Puskesmas di Sepinggan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			ketahanan teknologi kesehatan; Pembiayaan kesehatan.	
	5	Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas melalui perluasan akses Pendidikan dini dan Pendidikan dasar (Regulasi, kelembagaan, SDM, sarana prasarana)	Seluruh kecamatan
	6	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta melalui pengembangan kualitas SDM, sarana prasarana, pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat keberkerjaan tinggi, dan kelembagaan kerja sama antar satuan pendidikan	Seluruh kecamatan
	7	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan tinggi melalui pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi Science, Technology, Enginerring, Art, Mathematic (STEAM)	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	8	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3	Seluruh kecamatan
	9	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi globa	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara
	10	Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan TIK	Seluruh kecamatan
	11	Penguatan literasi masyarakat	Penguatan literasi masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, penyediaan akses buku dan sumber informasi pada perpustakaan dan taman baca masyarakat, pemanfaatan digitalisasi, kampanye literasi dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Seluruh kecamatan
	12	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.	
	13	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal dan informal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas	Seluruh kecamatan
	14	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat (termasuk pekerja sosial profesional) melalui akses perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala, terutama untuk daerah 3TP.	
	15	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi.	'Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.	Seluruh kecamatan
Transformasi Ekonomi	16	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	Seluruh kecamatan
	17	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya	
	18	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	19	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	20	Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi	Kawasan Industri Kariangau, Somber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	21	Penguatan cadangan pangan	Penguatan cadangan pangan melalui penguatan kerjasama, penyediaan infrastrukur pergudangan, pengembangan *urban farming,* peningkatan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			investasi dan inovasi di sektor pangan serta optimalisasi Perumda berbasis pangan	
	22	Pengembangan destinasi wisata potensial	Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat	Seluruh kecamatan
	23	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilakukan melalui peningkatan daya saing, penguatan jalur distribusi, dan perluasan pasar tujuan komoditas unggulan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	24	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan	Seluruh kecamatan
	25	Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola	Seluruh kecamatan
	26	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	
	27	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung (sinergi dan integrasi dengan pembangunan IKN).	Seluruh kecamatan
	28	Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan kompetensi SDM, proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Seluruh kecamatan
	29	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	30	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	Seluruh kecamatan
	31	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	32	Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan budidaya	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk *research and development* dan portofolio ekonomi karbon, *coastal tourism*, serta *marine services*, dengan mengedepankan penerapan *blue economy*	Seluruh kecamatan
Transformasi Tata Kelola	33	Optimasi regulasi daerah	Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah.	Seluruh kecamatan
	37	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	38	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat.	Seluruh kecamatan
	39	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital.	Seluruh kecamatan
	40	Penguatan sistem integritas serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penguatan preventif, edukatif, dan investigative serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan.	Seluruh kecamatan
	41	Peningkatan kualitas proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.	
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	42	Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.	Seluruh kecamatan
	43	Penguatan demokrasi substansial	Penguatan demokrasi substansial melalui Penguatan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi penguatan pendidikan partai politik, dan penguatan kebebasan sipil.	Seluruh kecamatan
	44	Peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.	Seluruh kecamatan
	45	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan,	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	46	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	Seluruh kecamatan
	47	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat, dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan	Seluruh kecamatan
	48	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	Seluruh kecamatan
	49	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya, budaya tak benda, dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	
	50	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan	Seluruh kecamatan
	51	Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	Seluruh kecamatan
	52	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan melalui peningkatan restorasi hutan dan lahan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan	Seluruh kecamatan
	53	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		lingkungan berbasis kearifan lokal	dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem	
	54	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana pengurangan resiko bencana dan ketahanan terhadap perubahan iklim.	Seluruh kecamatan
	55	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.	Seluruh kecamatan
	56	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	58	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Seluruh kecamatan
	59	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi	Seluruh kecamatan
	60	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan	Seluruh kecamatan
	61	Pembangunan bendung/ bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	Seluruh kecamatan
	62	Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	63	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill untuk mencapai ekonomi sirkular	Seluruh kecamatan
	64	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh kecamatan
Implementasi Transformasi	65	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota	Seluruh kecamatan
	66	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	69	Pengembangan pelabuhan laut	Fasilitasi pengembangan melalui dikembangkannya pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep *Economic Hub* tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	70	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	71	Pengembangan bandara	Pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk aerocity)	Kecamatan Balikpapan Selatan
	72	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	73	Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	Seluruh kecamatan
	74	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya	Seluruh kecamatan
	76	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	Seluruh kecamatan
	77	Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	78	Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	Seluruh kecamatan
	79	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik	Seluruh kecamatan
	80	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	81	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan	Seluruh kecamatan
	82	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota) dalam RTRW	Seluruh kecamatan
	83	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah	Seluruh kecamatan
	84	Perkuatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko	Seluruh kecamatan
	88	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.	
	89	Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon	Seluruh kecamatan
	90	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.	Seluruh kecamatan

Sumber: Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

5.4.2 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Indikasi Program RTRW dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan transformasi Kota Balikpapan perlu untuk diintegrasikan terhadap dokumen perencanaan tata ruang dan juga dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD Kota Balikpapan. Pengintegrasian ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan dan sinegisitas antar dokumen perencanaan di Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan implementasi terhadap kesinambungan pembangunan di Kota Balikpapan dapat diwujudkan.

Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Transformasi dan Penyelarasan terhadap Indikasi Program RTRW dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
Transformasi Sosial	Misi1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
				Pembangunan fasilitas kesehatan baru	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat yang membahayakan
					Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
					Mencapai cakupan kesehatan termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan serta vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah
					Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control
		Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pemeliharan dan peningkatan fasilitas pendidikan	Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
				Pembangunan fasilitas pendidikan baru	Menjamin semua anak untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan serta pendidikan pra sekolah, sehingga siap menembuh pendidikan dasar
					Membangun dan meningkatkan fasilitas yang ramah, aman, inklusif dan efektif bagi semua

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua
					Menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
					Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
					Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memperkuat ekonomi kreatif dan inklusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdayasaing berkelanjutan	Penyusunan Kajian Pengembangan KI Kariangau, Optimalisasi KI Kariangau, Pengembangan IPAL industri, Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di PPK Karangjoang.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
					Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah
		Penerapan Ekonomi Hijau		Pengembangan budidaya perikanan	Melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
				Peningkatan fasilitas pendukung perikanan budidaya	Meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi
		Transformasi Digital		Pengembangan jaringan serat optic, Pembangunan jaringan serat optic, Pengembangan Menara BTS, Pembangunan Menara BTS, Penataan Menara Telekomunikasi	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Kota, Pengembangan potensi pariwisata, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
		Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Penataan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kajian pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan baru	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
				Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintahan	Meningkatkan kerjasama dalam sains, teknologi, inovasi, serta berbagi pengetahuan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik
					Mengopersionalisasikan penggunaan teknologi dan sains, mekanisme pembangunan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Hankam	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat status apapun
		Stabilitas Ekonomi Makro	Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah	Pengembangan sentra industri kecil, Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sentra industri kecil, Penataan kegiatan perdagangan sektor informal, Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar
		Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	Kolaborasi pemerintahan meningkat dan berdampak		Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan
					Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
					Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas peribadatan, Pembangunan fasilitas peribadatan, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga, Pembangunan fasilitas olah raga baru, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas RTNH	Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas		Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun
					Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan maunusia, eksploitasi terhadap perempuan
					Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa
					Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar
Implementasi transformasi	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	Lingkungan Hidup Ber kualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengembangan Jaringan Jalan, Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pengembangan Bandar Udara Pengumpul, Pengembangan Transportasi Laut, Pengembangan Jaringan Kereta Api, Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda, Pengembangan Kawasan Transportasi	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya
					Memulihkan lahan kritis dan lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
	Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, Pengembangan jaringan gas rumah tangga, Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengembangan jaringan transmisi antar sistem, Pengembangan dan pembangunan SUTM, Pengembangan dan pembangunan Gardu Induk, Penyusunan Master Plan penyediaan Air Minum, Pengkajian sumber air baku untuk penyediaan air minum, Peningkatan intake air baku untuk penyediaan air minum, Pembangunan intake air baku untuk penyediaan air minum, Pengembangan unit produksi air minum, Pembangunan unit produksi air minum, Penyusunan Masterplan Pengolahan Limbah, Peningkatan SPAL, Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah B3,	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
				Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, Penyusunan Masterplan Persampahan, Pengembangan TPS, Pengembangan TPS3R, Pengembangan TPST, Pembangunan TPST, Pengembangan TPA, Penyusunan Masterplan Drainase Kota, Pengembangan jaringan drainase, Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pengembangan pertanian tanaman pangan.	
				Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Menjamin mobilisasi untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik
				Penyediaan perumahan untuk MBR	Mencapai akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau
				Penyediaan fasilitas pendukung perumahan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata
				Penanganan kawasan kumuh	Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin penggunaan dan

Transformasi/ Landasan Transformasi/ Implementasi Transformasi	Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikasi Program RTRW	Rekomendasi KLHS
					pasokan air yang berkelanjutan
					Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu
					Menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan aksesibilitas terhadap semua pengguna
	Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penyusunan rencana pengurangan risiko bencana	Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana
				Penyusunan rencana kontijensi	
				Pengembangan fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana	
				Peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana	
				Pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana	

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat harapan dan tujuan pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan. Sebagai dokumen yang secara umum bersifat teknokratis, RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 ini disusun melalui proses-proses teknokratik berbasis riset. Tentunya pendekatan partisipatif juga digunakan dalam perumusan dokumen RPJPD ini melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, penggalian data sekunder melalui laporan-laporan yang berisi data-data yang relevan untuk digunakan dalam rangka perencanaan jangka panjang.

Dokumen RPJPD ini secara umum telah memuat permasalahan pembangunan jangka panjang yang dialami oleh Kota Balikpapan beserta dengan perumusan isu strategis yang perlu direspons yang tentunya juga bersifat jangka panjang. Isu-isu strategis yang telah disusun tersebut digunakan untuk merumuskan perencanaan jangka panjang selama dua puluh tahun ke depan yang berisi kondisi-kondisi yang ingin dicapai.

Kondisi-kondisi yang ingin dicapai tersebut disusun dalam bentuk perencanaan kinerja yang disusun dengan menggunakan metode bagan alir atau cascading. Penggunaan metode bagan alir ini bertujuan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan memiliki hubungan yang logis antara pemetaan masalah yang telah dilakukan dengan perencanaan kinerja yang telah disusun, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, hingga sasaran pokok.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan peraturan atau patokan yang harus diikuti dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045. Adapun kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen bersama, pemerintah, masyarakat, dan swasta berkewajiban mendukung cita-cita RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun

aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;

2. Setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban mempedomani dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dalam perumusan visi dan misi beserta program prioritas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban mempedomani dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi;
4. Unsur Pemerintah Kota Balikpapan yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan atau unit organisasi yang ditugaskan sesuai peraturan yang berlaku berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya;
5. Apabila dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 setelah ditetapkan, terjadi perubahan kondisi yang berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan dan/atau kondisi yang menyebabkan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 tidak dapat dilaksanakan, maka perubahan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian kebijakan, sasaran, indikator, dan target, sedangkan cita-cita yang ingin diwujudkan berupa visi dan misi tidak dilakukan perubahan;
    b. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian isu strategis yang sesuai dengan perkembangan zaman;
    c. Jika dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berbeda periodenisasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti SDGs, RTRW, dan rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakannya yang dianggap masih relevan dan penting sesuai kondisi daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan turunannya, tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045;
    d. Perubahan dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045**

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	80,47	1. Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera
		Penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis	2	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	5	0	
		Pemenuhan tenaga kesehatan berkelanjutan	3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,5	4,5	
		Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas	4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment covarage*)	%	81,6	100	
			5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	84,98	100	
			6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,5	99,5	
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun	7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan		*a. Literasi membaca SD/Sederajat*	%	87,71	100	
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi		*b. Literasi membaca SMP/Sederajat*	%	90,24	100	
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik		*c. Numerasi SD/Sederajat*	%	73,57	100	
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan		*d. Numerasi SMP/Sederajat*	%	85,72	100	
		Penguatan literasi masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	13,08	
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	16,18	
		Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	13	18	
			11	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	%	74,22	85	
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan	12	Tingkat kemiskinan	%	2,15-2,20	0,04-0,18	
		Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	13	*Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan*	%	68,57	95	
		Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ekonomi bagi seluruh masyarakat						
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing	14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	47,5	58,82	2, Terwujudnya perekonomian daerah yang berdayasaing berkelanjutan
		Pengembangan kawasan industri komoditas unggulan berbasis teknologi tinggi berkelanjutan	15	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,94	7,12	
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	16	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	25.918	103.673	
		Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	17	*Jumlah usaha ekonomi kreatif*	*Angka*	670	2.910	
		Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	18	*Proporsi jumlah usaha miko naik kelas*	*%*	2,27	9,66	
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	19	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,02	7,78	
		Industrialisasi koperasi	20	*Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	*%*	0,24	0,29	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan produktivitas BUMD	21	*Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	%	6,38	8	
		Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,85-5,90	4,39-5,34	
		Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	23	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	%	67,17	90,53	
			24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,87	63,67	
			25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61	85	
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	-	-	-	-	-	
		Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan						
		Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan budidaya						
	6. Transformasi Digital	Pembangunan ekosistem digital	26	Persentase pnduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88	98	
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global.	27	*Disparitas Harga*	*%*	9,77	5,50	
			28	Kontribusi PDRB pembentukan	%	33,18	30,84	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				modal tetap bruto terhadap PDRB				
			29	Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	%	42,34	50,71	
	8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	30	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	82,69	100	
		Pemerataan terhadap akses hunian layak						
		Pengendalilan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh						
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Optimasi regulasi daerah	31	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	3,85	5	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
		Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	32	*Indeks pelayanan publik*	*Indeks*	4,54	4,8	
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	33	Indeks integritas pemerintah	Indeks	77,5	92,3	
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penguatan sistem integritas serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi						
		Peningkatan kualitas proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja						
		Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.						
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan						
Misi 4: Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Penguatan demokrasi substansial	-	-	-	-	-	4. Meningkatnya kondusifitas wilayah
	11. Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kualitas belanja daerah	34	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,06	0,88	5. Terwujudnya stabilitas ekonomi dan keuangan daerah
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	35	Tingkat inflasi	%	2,50±1	2,00±1	
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah	36	Total dana pihak ketiga/PDRB	%	29,85	84,76	
			37	Total kredit/PDRB	%	23,01	72,47	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan	38	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,8	4,3	6.Menguatnya stabilitas daerah
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	39	*a. Jumlah Kejadian Tindak Kriminal*	*Jumlah*	1.167	600	7. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan kebudayaan maju
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter		*b. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran*	Persen	23	26	
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;	40	*Jumlah Kejadian Konflik SARA*	*Kali*	0	0	
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama						
		Peningkatan peran lembaga/forum masyarakat serta lembaga adat						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	41	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	70	92,25	8. Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara gender, dan keluarga berkualitas
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	42	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,16	0,10-0,12	
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan						
		Peningkatan, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal						
		Peningkatan pengendalian penduduk						
Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu,	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,8	75,22	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
berkualitas dan ramah lingkungan		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	44	*Rumah tangga dengan akses sanitasi layak*	%	96	100	
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi	45	*Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah*	%	30,45	41,44	
		Perencanaan dan pengembangan perkotaan berwawasan lingkungan dan *nature based on solution*						
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pembangunan irigasi baru	46	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5,67	0,29	9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Pengendalian banjir	47	*Kapasitas air baku*	*m3/detik*	2.458	4.306	
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	48	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum aman	%	38,75	100	
		Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan kualitas penataan ruang						
		Fasilitasi peningkatan pelaksanaan reforma agraria						
		Fasilitasi pengembangan pelabuhan						
		Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia						
		Pengembangan bandara						
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan						
		Pembangunan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal, dan berwawasan lingkungan						
		Pengembangan diversifikasi pangan						
		Pengembangan moda kereta api						
		Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi						
		Pemenuhan akses air minum berkelanjutan dan inklusif						
		Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan						

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target		Sasaran Pokok
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman						
	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan peningkatan mitigasi bencana dan ketangguhan terhadap bencana serta pengendalian kebakaran kawasan permukiman	49	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	109,35	84,75	10.Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
			50	Persentase Penurunan Emisi GRK				
				a. Kumulatif	%	0,24	26,24	
				b. Tahunan	%	-9,22	70,39	
Misi 8: Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan	-	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	-					
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi						
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah;						
		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;						
		Pengembangan pembiayaan inovatif						

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD